

Thriving Through Transformation

Menerobos Maju Melalui Transformasi







Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer and Limit of Liability

Selamat datang di Laporan Tahunan PT Mass Rapid Transit Jakarta (Persero) dengan tema "Menerobos Maju Melalui Transformasi". Laporan Tahunan ini diterbitkan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perseroan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan peraturan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang Perseroan serta lingkungan bisnis dimana Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Perseroan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan Tahunan ini memuat kata "PT MRT Jakarta (Persero)", "MRT Jakarta" dan "Perseroan" yang didefinisikan sebagai PT Mass Rapid Transit Jakarta (Persero) yang menjalankan usaha di bidang Penyelenggara Sarana dan Prasarana Perkeretaapian.

Penyebutan satuan mata uang "Rupiah", "Rp" atau "IDR" merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah.

Tujuan utama penyusunan Laporan Tahunan ini adalah untuk meningkatkan keterbukaan informasi Perseroan kepada otoritas terkait serta menjadi buku tahunan yang turut membangun rasa bangga dan solidaritas di antara karyawan. Selain itu, Laporan Tahunan ini juga bertujuan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan para pemangku kepentingan lainnya tentang Perseroan, melalui penyediaan informasi yang tepat, seimbang, dan relevan.

Laporan Tahunan ini disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Laporan Tahunan ini dapat dilihat secara elektronik dan diunduh di situs web resmi Perseroan yaitu <https://www.jakartamrt.co.id/>.

Welcome to the Annual Report of PT Mass Rapid Transit Jakarta (Persero) with the theme "Thriving Through Transformation". This Annual Report is published based on the Decree of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta Province No. 96 of 2004 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in Regionally Owned Enterprises (BUMD) within the Government of the Special Capital Region of Jakarta.

This Annual Report contains statements of financial conditions, operations results, projections, plans, strategies, policies, and objectives of the Corporation, which are categorized as forwardlooking statements in the implementation of the applicable laws and regulations, except for historical matters. These statements are subject to prospective risks, uncertainties, and could cause actual results that differ materially from the reported results.

The prospective statements in this Annual Report are prepared based on various assumptions about the latest condition, the future condition, and the business environment where the Corporation performs its business activities. The Corporation does not guarantee that documents of which validity has been confirmed will bring certain results as expected.

This Annual Report contains the words "PT MRT Jakarta (Persero)", "MRT Jakarta", and the "Corporation" to define PT Mass Rapid Transit Jakarta (Persero) which runs a business as an Operator in the Railway Facilities and Infrastructure sector.

The term of currency unit, "Rupiah", "Rp" or "IDR" refers to the official currency of the Republic of Indonesia. All financial information is expressed in Rupiah.

The main objective of this Annual Report is to improve the disclosure of the Corporation's information to the relevant authorities and to become a yearbook that helps build a sense of pride and solidarity among employees. In addition, this Annual Report also aims to build understanding and trust of other stakeholders about the Corporation, by providing appropriate, balanced, and relevant information.

This Annual Report is presented in two languages, namely Indonesian and English using an easy-to-read font type and size with good-quality printing. This Annual Report can be viewed electronically and downloaded on the Corporation's official website, <https://www.jakartamrt.co.id/>.

Penjelasan Tema Theme Explanation



Thriving Through Transformation Menerobos Maju Melalui Transformasi

Tema Korporasi Tahun 2022 berfokus pada semangat untuk menjadi perusahaan yang berkembang lebih pesat dengan melakukan transformasi dan diversifikasi pada tiga poros bisnis yaitu *Network Provider*, *Urban Platformer*, dan *City Regenerator*. Melalui transformasi ini, MRT Jakarta beritikad dapat terus beradaptasi di dalam perubahan kondisi dan lingkungan apapun.

Network Provider untuk meneruskan perannya membangun jaringan MRT dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat kota. *Urban Platformer* menjadi *platform* dan kolaborator bagi pengembangan kota secara digital. *City Regenerator* menjadi perintis perubahan Jakarta menjadi kota yang berorientasi transit melalui pengembangan kawasan berorientasi transit pada simpul-simpul pertemuan jaringan transportasi publik.

The 2022 Corporate Theme focuses on the spirit to become a Corporation that develops more rapidly by transforming and diversifying into three business axes, namely *Network Provider*, *Urban Platformer*, and *City Regenerator*. Through this transformation, MRT Jakarta is determined to continuously adapt to any changing condition and environment.

Network Provider is to continue the role in building MRT network and providing the best service to urban communities. *Urban Platformer* means becoming a platform and collaborator for digital city development. *City Regenerator* means becoming the pioneer in the transformation of Jakarta into a transit-oriented city through the development of Transit-Oriented Development at the meeting points of the public transportation network.



Kesinambungan Tema

Theme Continuity

Sinergi dan Inovasi Membangun Negeri

Synergy and Innovation to Develop the Nation



Di tahun 2021 MRT Jakarta melakukan berbagai langkah sinergi dan inovasi dalam menjalankan infrastruktur sarana dan prasarana moda raya terpadu. Perseroan memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, mewujudkan pengembangan jalur MRT dengan inovasi, menjalankan pengoperasian dan pembangunan konstruksi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan menjaga keandalan berstandar internasional. Perseroan mengukuhkan langkahnya dengan menerapkan strategi *business beyond normal* yang terdiri dari 3 komponen yaitu: *beyond ridership*, *beyond physical mobility* dan *beyond transport network*. Ketiga komponen tersebut menjadi acuan Perseroan untuk bersinergi dan berinovasi dalam mewujudkan layanan dan transportasi terbaik di masa depan.

The Corporation carries out synergy and innovation in operating the mass rapid transit infrastructures and facilities. The Corporation strengthens synergies with various stakeholders, realizes MRT line development with innovation, carries out operations and construction development by implementing strict health protocols and maintaining international standard reliability. The Corporation strengthens its measures by implementing a business beyond normal strategy which consists of 3 components: beyond ridership, beyond physical mobility and beyond transport network. These three components become the Corporation's reference for synergizing and innovating in realizing the best services and transportation in the future.

Membangun Ketangguhan, Mendorong Inovasi

Building Resilience, Driving Innovation



Pada tahun 2020, Perseroan telah berhasil meraih capaian-capaian penting dengan beroperasinya MRT Jakarta dengan tepat waktu, tepat kualitas dan tepat anggaran, serta melampaui sejumlah target sekaligus menjadi wadah akselerasi kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, Perseroan mampu menghadirkan layanan terbaik, menjalankan pekerjaan konstruksi Fase 2A MRT Jakarta, mempertahankan kinerja keuangan, pengelolaan Kawasan Berorientasi Transit (KBT), pengembangan bisnis non-tiket (NFB), hingga pembentukan anak usaha dan perusahaan patungan.

Melalui transformasi bisnis yang tercipta, Perseroan mendorong terciptanya inovasi dengan cara baru diawali dengan ide atau gagasan, layanan operasional, model bisnis untuk menghasilkan produk baru, sehingga dapat mewujudkan Perseroan untuk bangkit dan bertumbuh secara berkelanjutan.

In 2020, the Corporation managed to reach critical achievements with the timely, high-quality, and costeffective operations of MRT Jakarta by surpassing the targets and to become a collaboration acceleration platform for the stakeholders. Amidst the COVID-19 pandemic, The Corporation managed to deliver the best service, to carry out construction works of Phase 2A of MRT Jakarta, maintain financial performance, manage Transit-Oriented Development (TOD) areas, develop non-farebox (NFB) business, and establish a subsidiary and joint ventures.

Through the business transformation, the Corporation has encouraged innovation in a new manner, starting from ideas, operational services, and business models to generate new products to recover the Corporation for sustainable growth.

Bersama Mewujudkan Peningkatan Nilai

Together We Create More Values



MRT Jakarta telah resmi beroperasi, membentuk karakter dan budaya baru kota dengan mengatasi kemacetan, mengurangi polusi udara, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. MRT Jakarta juga berperan sebagai ruang ketiga atau ruang interaksi publik guna menghadirkan pertumbuhan yang berkualitas.

MRT Jakarta has officially operated and shaped new urban community character and culture while helping to curtail traffic congestion, reduce air pollution, and improve people's quality of life and welfare. MRT Jakarta also plays the role of a third space or public interaction space to deliver high-quality developments

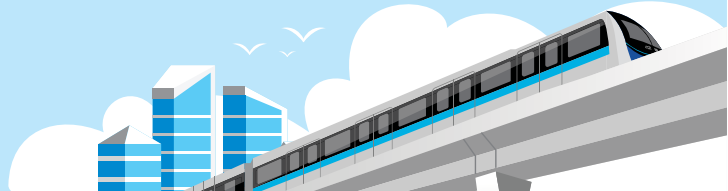
Pencapaian 2022

2022 Achievements



Kinerja Layanan Pengguna Jasa

Passenger Service Performance



Waktu Kedatangan
Arrival Time

99,95%
2022

2021 : **99,94%**

2020 : **99,97%**

Waktu Berhenti
Dwelling Time

99,98%
2022

2021 : **99,97%**

2020 : **99,98%**

Waktu Tempuh
Traveling time

99,94%
2022

2021 : **99,96%**

2020 : **99,98%**

Jumlah Pengguna Jasa
Total Passengers

19.776.064
2022

2021 : **7.189.862**

2020 : **9.926.513**

Indeks Kepuasan Pengguna Jasa
Customer Satisfaction Index

88,32%
2022

2021 : **88,29%**

2020 : **86,64%**

Angka Kejahatan
Crime Rates

**Nihil
Zero**
2022

2021 : **Nihil Zero**

2020 : **Nihil Zero**

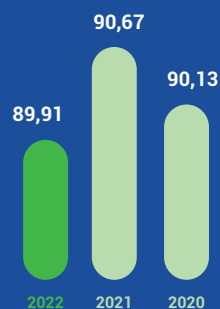


Kinerja Penerapan Tata Kelola

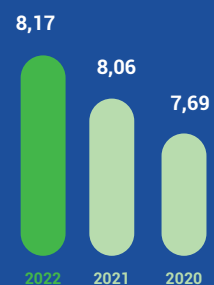
Corporate Governance
Performance



Skor Penilaian GCG
GCG Assessment Score



Tingkat Maturitas Manajemen
Pengetahuan
Knowledge Management Maturity Level





Kinerja Transformasi Digital

Digital Transformation Performance

Implementasi Transformasi Digital

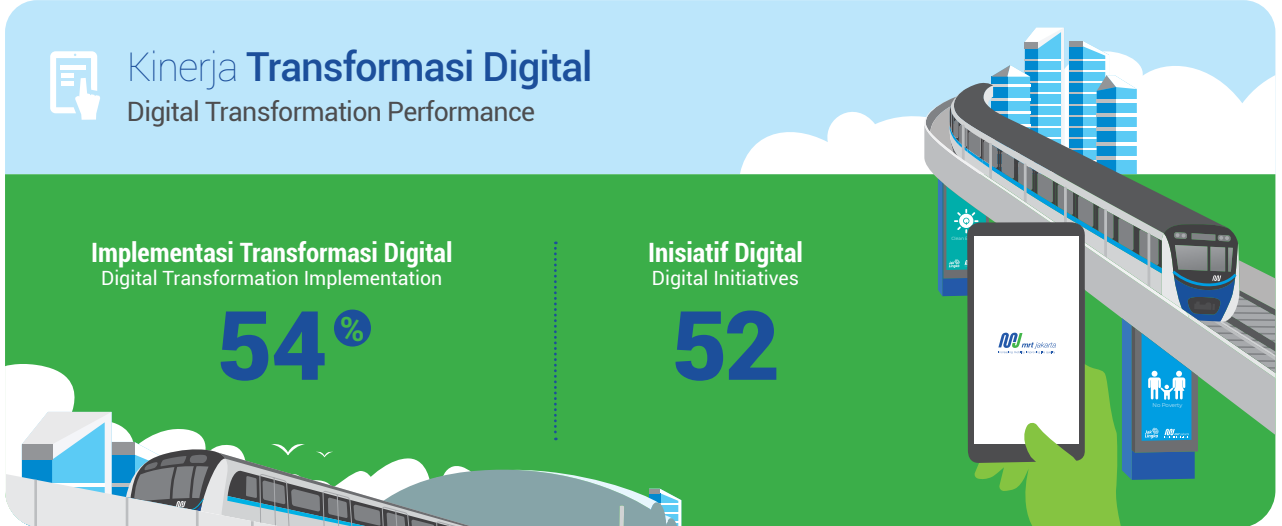
Digital Transformation Implementation

54%

Inisiatif Digital

Digital Initiatives

52



Kinerja Konstruksi

Construction Performance

Progres MRT Jakarta Fase 2A

MRT Jakarta Phase 2A Progress

18,09%
2022

CP 203: **23,39%**

CP 202: **8,44%**

CP 201: **49,41%**

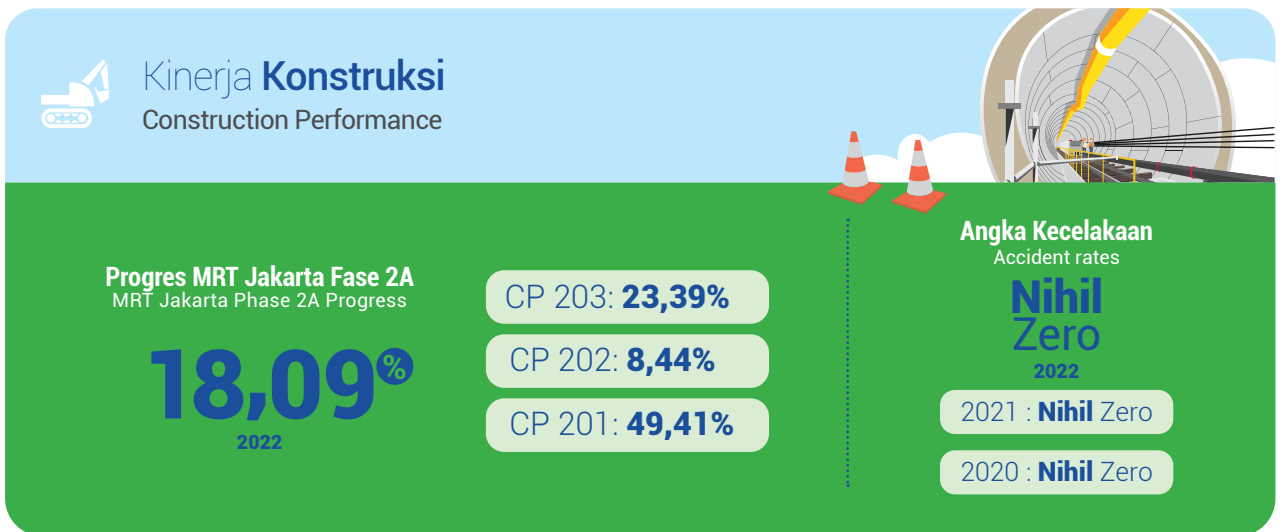
Angka Kecelakaan

Accident rates

Nihil Zero
2022

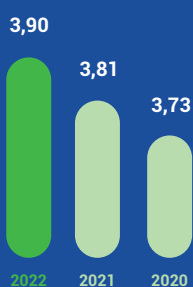
2021 : **Nihil Zero**

2020 : **Nihil Zero**



Tingkat Kematangan Risiko

Risk Maturity Level



Kinerja Keuangan

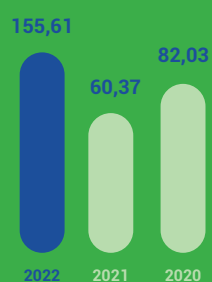
Financial Performance



Pendapatan Tiket

Farebox Revenue

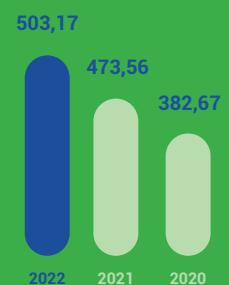
(Rp-miliar) (Rp-billion)



Pendapatan Non Tiket

Non-Farebox Revenue

(Rp-miliar) (Rp-billion)



PENINGKATAN PELAYANAN TRANSPORTASI DI MASA PEMULIHAN PANDEMI IMPROVEMENT OF TRANSPORTATION SERVICES DURING THE PANDEMIC RECOVERY PERIOD



Sejalan dengan semakin meredanya pandemi COVID-19, MRT Jakarta meningkatkan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di masa pemulihan pandemi COVID-19, MRT Jakarta mengakselerasi upaya untuk peningkatan layanan kepada pelanggan dengan meningkatkan prosedur standar layanan, seperti ketepatan waktu, kebersihan armada dan stasiun, dan berbagai standar layanan lainnya. Hal ini sejalan dengan konsep transportasi inklusif yang dikembangkan Perseroan.

Langkah yang dilakukan MRT Jakarta tersebut menunjukkan hasil yang sangat baik. Sepanjang tahun 2022, jumlah pengguna jasa meningkat hingga 176% dibandingkan tahun sebelumnya. Total jumlah pengguna jasa selama tahun 2022 mencapai 19.776.064 orang, dengan rata-rata per hari sebanyak 54.181 orang. Jumlah tersebut meningkat sebesar 12.586.202 orang, atau 175% dari jumlah pengguna jasa tahun 2021 sebanyak 7.189.862 orang, dengan rata-rata per hari 19.659 orang. Hal ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah dalam menurunkan penyebaran COVID-19 dan juga kebijakan menurunkan level penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Selain itu, untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan yang diberikan MRT Jakarta, Perseroan juga berkolaborasi dengan sejumlah operator transportasi publik pengumpan (*feeder*) seperti Transjakarta, Perum PPD, Bluebird, Grab, Gojek, Tebengan, Swoop dan UPAS Bus Sekolah Dishub DKI Jakarta.

Sejalan dengan strategi tersebut, penerapan tarif terintegrasi transportasi publik telah berlaku untuk moda transportasi MRT Jakarta, Transjakarta, dan LRT Jakarta. Layanan ini juga dapat diakses melalui aplikasi ponsel pintar JakLingko dan kartu uang elektronik yang dapat dimutakhirkan menjadi Kartu Transportasi JakLingko melalui mesin *balance check terminal* (BCT). Melalui penerapan tarif terintegrasi, diharapkan dapat membentuk ekosistem integrasi transportasi yang lebih luas untuk meningkatkan jumlah pengguna jasa.

In line with the subsided COVID-19 pandemic, MRT Jakarta is strengthening its commitment to providing the best service to the public. During the recovery from the COVID-19 pandemic, MRT Jakarta is accelerating efforts to improve service to customers by improving service standard procedures, such as punctuality, train and station cleanliness, and various other service standards. This is in line with the inclusive transportation concept developed by the Corporation.

The measures taken by MRT Jakarta have shown very good results. Throughout 2022, the number of passengers increased by 176% compared to the previous year. The total number of passengers in 2022 reached 19,776,064 passengers, with a daily average of 54,181 passengers. This number increased by 12,586,202 passengers, or 175% of the number of passengers in 2021 of 7,189,862 passengers, with a daily average of 19,659 passengers. This is inseparable from the Government's efforts to reduce the spread of COVID-19 and also the policy of lowering the level of the Community Activity Restriction Implementation (PPKM).

In addition, to make it easier for the public to access the services provided by MRT Jakarta, the Corporation also collaborates with a number of feeder public transportation operators such as Transjakarta, Perum PPD, Bluebird, Grab, Gojek, Tebengan, Swoop and UPAS School Bus of DKI Jakarta Transportation Agency.

In line with the above strategy, the application of integrated tariffs for public transportation has been implemented for MRT Jakarta, Transjakarta and LRT Jakarta. This service can also be accessed via the JakLingko smartphone application and electronic money card that can be upgraded into JakLingko Transportation Card through a balance check terminal (BCT) machine. The implementation of integrated tariffs is expected to form a broader transportation integration ecosystem to increase the number of passengers.

JASA KONSULTASI DAN PELATIHAN BAGI OPERATOR INTERNASIONAL DAN NASIONAL CONSULTING AND TRAINING SERVICES FOR INTERNATIONAL AND NATIONAL OPERATORS



Di tahun keempat operasi komersial, Perseroan melakukan inovasi bisnis berbasis pengetahuan dan keahlian dengan memberikan jasa konsultasi bagi operator nasional dan internasional. Pada tahun 2022, MRT Jakarta mendapatkan kepercayaan dari Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) untuk menjadi tempat pelatihan dan persiapan bagi operator MRT dari negara lain.

Kegiatan konsultasi dan pelatihan yang diberikan Perseroan, sebagai berikut :

- MRT Jakarta memberikan pelatihan dan berbagi pengalaman dengan Ho Chi Minh Metro yang saat ini tengah mempersiapkan operasi komersial perdana mereka. Di MRT Jakarta, tim dari Ho Chi Minh Metro mempelajari antara lain terkait *Operation Control Center (OCC)*, pemeliharaan kereta, sistem perkeretaapian, layanan stasiun, sistem manajemen keselamatan operasional, perawatan rel, hingga pengelolaan keuangan organisasi. Materi diberikan dalam bentuk pelatihan, wawancara, kunjungan lapangan hingga observasi pekerjaan saat window time. Saat ini MRT Jakarta sedang dalam persiapan kerja sama lebih lanjut dengan Ho Chi Minh Metro.
- MRT Jakarta berbagi pengalaman dalam pengelolaan moda raya terpadu di Jakarta baik dalam sektor operasional hingga kawasan, agar nantinya dapat diterapkan juga di sepanjang jalur LRT Palembang. Selain itu, MRT Jakarta juga membantu LRT Jakarta dalam meningkatkan jumlah pengguna jasa dan bisnis non-tiket.

Inovasi tersebut akan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan prospek usaha di masa mendatang. Mengingat besarnya peluang bisnis, Perseroan akan terus melakukan pemberian jasa konsultasi dan pelatihan yang berstandar internasional.

In its fourth year of commercial operations, the Corporation has made knowledge and expertise-based business innovations by providing consulting services for national and international operators. In 2022, MRT Jakarta has won the trust of the Japan International Cooperation Agency (JICA) to become a training and preparation site for MRT operators from other countries.

The consultancy and training activities provided by the Corporation are as follows:

- MRT Jakarta provided training for and shared experience with Ho Chi Minh Metro which is currently preparing for their first commercial operation. At MRT Jakarta, the team from Ho Chi Minh Metro studied the things including the *Operation Control Center (OCC)*, train maintenance, rail systems, station services, operational safety management system, rail maintenance, and organizational financial management. Materials are provided in the form of training, interviews, field visits and work observations during window time. Currently MRT Jakarta is preparing further collaboration with Ho Chi Minh Metro.
- MRT Jakarta shared its experience in managing rail transit mode, both in the operational and area development sectors, so that it can also be applied for LRT Palembang. In addition, MRT Jakarta also assisted LRT Jakarta to increase number of passengers and improve non-farebox business.

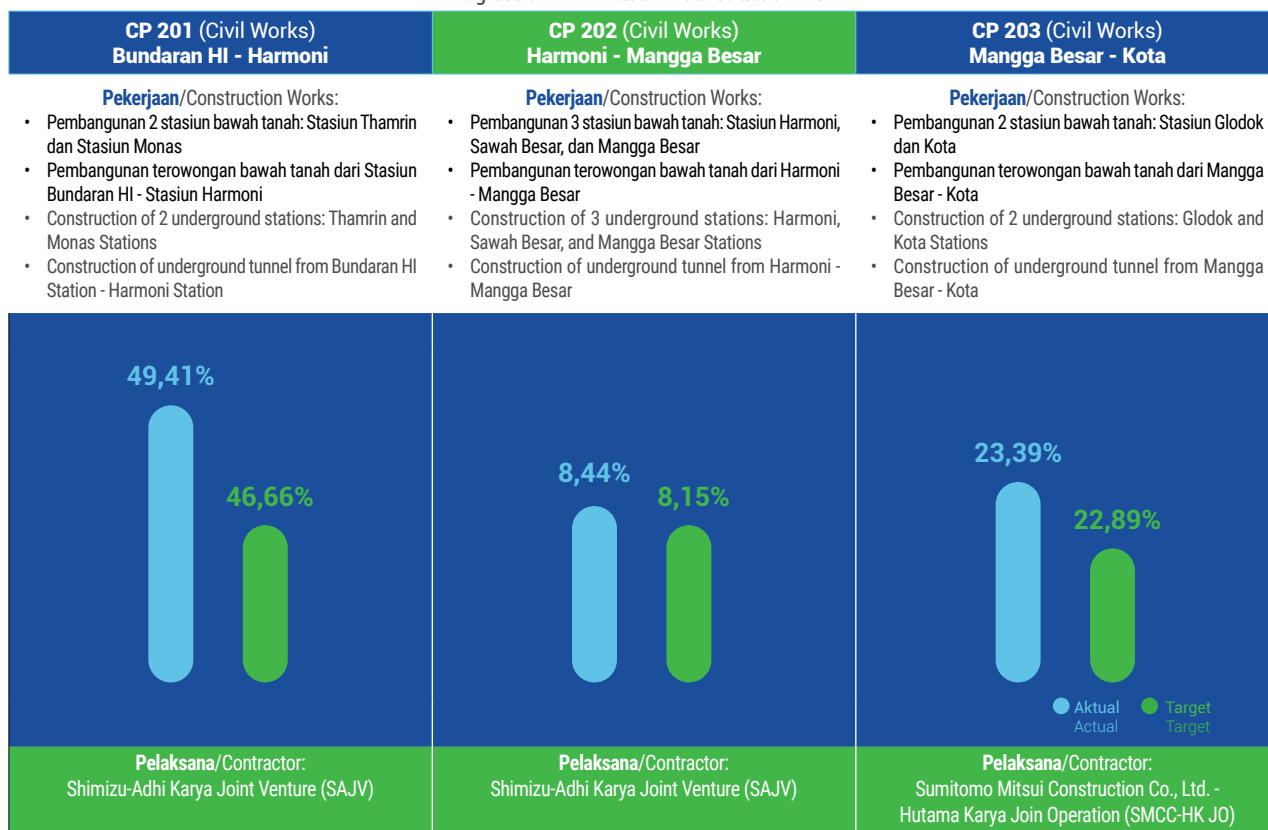
This innovation will be a strategic move in increasing future business prospects. Given the great business opportunity, the Corporation will continue to provide international standard consulting and training services.

MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MRT JAKARTA FASE 2 CONTINUING PHASE 2 CONSTRUCTION

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2022, Perseroan terus berupaya untuk mengoptimalkan pekerjaan Pembangunan MRT Jakarta Fase 2A sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Perseroan melanjutkan pembangunan MRT Jakarta Fase 2 yang terbagi menjadi dua fase, yaitu Fase 2A (Bundaran HI - Kota) dan Fase 2B (Kota - Ancol Barat). Pekerjaan MRT Jakarta Fase 2A dibagi menjadi dua segmen yakni segmen 1 (Bundaran HI - Monas) dengan target selesai tahun 2027 dan segmen 2 (Harmoni - Kota) dengan target selesai tahun 2029. Hingga akhir tahun 2022, progres pembangunan MRT Jakarta Fase 2A sudah mencapai 18,09%, lebih tinggi dibandingkan target 17,28%.

In the midst of various challenges faced throughout 2022, the Corporation continuously strived to optimize the MRT Jakarta Phase 2A development work according to the planned schedule. The Corporation continued the MRT Jakarta Phase 2 construction which is divided into two phases, namely Phase 2A (Bundaran HI - Kota) and Phase 2B (Kota - Ancol Barat). The MRT Jakarta Phase 2A work is divided into two segments, namely segment 1 (Bundaran HI - Monas) with a completion target in 2027 and segment 2 (Harmoni - Kota) with a completion target in 2029. Until the end of 2022, the progress of the MRT Jakarta Phase 2A development has reached 18.09%, higher than the target of 17.28%.

Perkembangan Pekerjaan Pembangunan MRT Fase 2A Progress of MRT Phase 2A Construction Work



MRT Jakarta Fase 2B (Kota - Ancol Barat) merupakan rute ekstensi dari MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI - Kota), menuju lahan depo potensial di Ancol Barat. Diharapkan proyek MRT Jakarta Fase 2B dapat memenuhi kebutuhan depo baru dengan menampung tambahan rangkaian kereta yang dibutuhkan guna melayani peningkatan jumlah pengguna jasa di masa yang akan datang.

MRT Jakarta Phase 2B (Kota - Ancol Barat) is an extension route from MRT Jakarta Phase 2A (Bundaran HI - Kota) to a potential depot area in Ancol Barat. It is hoped that the MRT Jakarta Phase 2B project will meet the need of a new depot to accommodate additional train sets required to cater more passengers in the future.

MEMPERCEPAT PENGEMBANGAN JARINGAN MRT JAKARTA ACCELERATE THE DEVELOPMENT OF MRT JAKARTA NETWORK



Pemerintah sepenuhnya mendukung MRT Jakarta dalam mengembangkan percepatan guna sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan dan juga sebagai moda transportasi publik yang ramah lingkungan sehingga mampu mengurangi polusi serta meningkatkan kualitas udara bersih. Pengembangan MRT Jakarta mendapat dukungan dari tiga negara yang telah menunjukkan ketertarikan dan komitmennya yaitu Jepang, Inggris, dan Korea Selatan dalam Presidensi G20 di Bali. Hal tersebut diwujudkan dengan penandatanganan nota kesepahaman, sebagai berikut:

1. *Memorandum of Cooperation (MoC)* antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang terkait kelanjutan pembangunan MRT Jakarta Fase 3 Stage 1 (Kembangan - Medan Satria) dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta.
2. *Letter of Intent (LoI)* antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris terkait Kerja Sama Pembangunan MRT Jakarta.
3. *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan terkait pembangunan MRT Jakarta Fase 4 (Fatmawati - Kampung Rambutan).

Perseroan sebagai sistem perkeretaapian perkotaan yang memiliki mandat dari mulai membangun, mengoperasikan, hingga mengembangkan MRT Jakarta. Hal tersebut menjadikan MRT Jakarta bukan hanya sebatas alat transportasi, melainkan sebagai *city regenerator*, *urban platformer*, dan *network provider*.

The Government fully supports MRT Jakarta in accelerating development to serve as a solution to curb traffic congestion and also as an eco-friendly mode of public transportation so as to reduce pollution and improve clean air quality. Three countries, namely Japan, the United Kingdom, and South Korea have expressed their interest and commitment during the G20 Presidency in Bali to support further development of MRT Jakarta. This is realized by the signing of a memorandum of understanding, as follows:

1. *Memorandum of Cooperation (MoC)* between the Government of Indonesia and the Government of Japan regarding the continuity of the MRT Jakarta Phase 3 Stage 1 construction (Kembangan - Medan Satria) within DKI Jakarta Province area.
2. *Letter of Intent (LoI)* between the Government of Indonesia and the Government of the United Kingdom regarding the MRT Jakarta Development Cooperation.
3. *Memorandum of Understanding (MoU)* between the Government of Indonesia and the Government of South Korea regarding the construction of MRT Jakarta Phase 4 (Fatmawati - Kampung Rambutan).

The Corporation as an urban rail system operator has the mandate to build, operate, and develop MRT Jakarta. This makes MRT Jakarta not only serve as a means of transportation, but also as a city regenerator, urban platformer, and network provider.

MEMPERKUAT STRATEGI BISNIS DENGAN TRANSFORMASI DIGITAL STRENGTHENING BUSINESS STRATEGY WITH DIGITAL TRANSFORMATION

Fokus bisnis MRT Jakarta berkembang lebih pesat dengan melakukan transformasi pada tiga poros bisnis, yakni *network provider*, *urban platformer*, dan *city regenerator*. Inisiatif transformasi digital dilakukan dengan mengubah budaya korporasi baik di internal maupun eksternal. Korporasi melakukan percepatan implementasi digital pada tahun 2022, melalui pembentukan Komite Teknologi Informasi dan Transformasi Digital, Task Force Transformasi Digital, dan penyusunan Pedoman Pengelolaan Inisiatif Digital.

MRT Jakarta terus mengembangkan *knowledge management platform Knowledge, Information, and Education Center* (Kinetic) sebagai *platform* internal yang dapat digunakan oleh Insan MRT Jakarta untuk mengelola pengetahuan sekaligus sebagai intranet portal menuju berbagai aplikasi digital internal. MRT Jakarta juga telah menerapkan pendekatan konstruksi digital (*digital construction*), dengan mekanisme *common data environment* (CDE) untuk pengembangan MRT Jakarta Fase 2.

Portofolio transformasi digital pada tahun 2022 telah menghasilkan 52 inisiatif digital, yang terbagi ke dalam 4 kategori:

1. Meningkatkan pendapatan non-tiket;
2. Memperkuat kapabilitas operasional;
3. Meningkatkan pengalaman pengguna jasa; dan
4. Meningkatkan dampak sosial-ekonomi pada kawasan berorientasi transit (KBT).

Secara keseluruhan, inisiatif pada tahun 2022 telah selesai diimplementasikan sebesar 54% dan inisiatif lainnya ditargetkan akan selesai pada tahun 2023. Pada tahun 2022, MRT Jakarta juga telah melakukan asesmen *IT Maturity* dengan skor 2,30, yang menggunakan *framework control objectives for information technologies* (COBIT) 2019.

Di tahun 2022, Perseroan terus berinovasi agar layanan yang diberikan dapat terus memenuhi kebutuhan para pengguna jasa dengan meluncurkan Robot *Digital Intelligent Assistant* (DINA). Melalui kolaborasi bersama dengan PT Sari Teknologi, robot pintar ini dapat memfasilitasi komunikasi di stasiun MRT Jakarta yang dapat digunakan oleh seluruh pengguna jasa guna mengurangi kontak fisik serta dapat membantu penumpang dalam kondisi darurat apabila membutuhkan bantuan petugas, selain itu alat ini juga dilengkapi dengan fitur ramah disabilitas. Saat ini, telah dilakukan uji coba di Stasiun Lebak Bulus Grab, nantinya akan dilakukan kajian dan evaluasi untuk penambahan di stasiun lain, termasuk untuk MRT Jakarta Fase 2A.

MRT Jakarta's business focus has been growing more rapidly by carrying out transformations in three business axes, namely *network provider*, *urban platformer*, and *city regenerator*. Digital transformation initiative is carried out by changing the corporate culture both internally and externally. The Corporate internal platform accelerates the implementation of digital transformation in 2022, through the formation of the Information Technology and Digital Transformation Committee, the Digital Transformation Task Force, and the preparation of Digital Initiative Management Guidelines.

MRT Jakarta continues to develop the Knowledge, Information, and Education Center (Kinetic) knowledge management platform as an internal platform that can be used by employees to manage knowledge as well as an intranet portal to various internal digital applications. MRT Jakarta has also implemented a digital construction approach, with a common data environment (CDE) mechanism for the development of MRT Jakarta Phase 2.

The digital transformation portfolio in 2022 has produced 52 digital initiatives, which are divided into 4 categories:

1. Increasing non-ticket revenue;
2. Strengthening operational capabilities;
3. Enhancing service user experience; and
4. Increasing the socio-economic impact on transit-oriented areas (KBT).

Overall, 54% of all initiatives in 2022 have been implemented and the rest are targeted to be completed in 2023. In 2022, MRT Jakarta has also conducted an IT Maturity assessment with a score of 2.30, using the 2019 control objectives for information technologies (COBIT) framework.

In 2022, the Corporation continued to innovate so that the services provided could continue to meet the needs of passengers by launching the Digital Intelligent Assistant Robot (DINA). Through collaboration with PT Sari Teknologi, this smart robot can facilitate communication at the Jakarta MRT stations which can be used by all passengers to reduce physical contact and can help passengers in emergencies if they need help from officers. In addition, this robot is also equipped with friendly features for persons with disabilities. Currently, a trial has been carried out at the Lebak Bulus Grab Station, and later a study and evaluation will be carried out for additions at other stations, including for MRT Jakarta Phase 2A.

MENGINISIASI FORUM INVESTASI *TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT* (TOD) INTERNASIONAL INITIATING THE INTERNATIONAL *TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT* (TOD) INVESTMENT FORUM



Setelah sukses menggelar TOD Forum pertama di Indonesia pada Juli 2022, Perseroan menginisiasi menggelar TOD Forum Internasional di Tokyo, Jepang pada November 2022. Event internasional ini didukung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang. TOD Forum merupakan tindak lanjut nyata dari kunjungan Menteri Perhubungan RI dan tim MRT Jakarta ke Jepang pada Juni 2022.

Topik diskusi pada event tersebut, yaitu potensi kerja sama regenerasi perkotaan (*urban regeneration*), investasi berkelanjutan (*climate investment*) di Indonesia dan DKI Jakarta, serta potensi-potensi investasi di kawasan berorientasi transit MRT Jakarta. MRT Jakarta mempresentasikan kepada forum investor di Tokyo berbagai proyek infrastruktur yang sedang dan akan dikembangkan sepanjang jalur MRT Jakarta.

TOD Forum ini diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para investor agar selanjutnya dapat tertarik untuk bekerja sama membangun Kawasan Berorientasi Transit sehingga pada akhirnya dapat mendorong pengembangan kawasan-kawasan di Jakarta menjadi area yang memberikan kenyamanan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat Jakarta serta dapat menciptakan efisiensi bagi warga dalam bermobilitas dari titik asal ke destinasi yang dituju.

After successfully holding the first TOD Forum in Indonesia in July 2022, the Corporation initiated the International TOD Forum in Tokyo, Japan in November 2022. This international event was supported by the Indonesian Embassy in Tokyo, Japan. The TOD Forum was a follow-up to the visit of the Indonesia's Transportation Minister and the MRT Jakarta team to Japan in June 2022.

The topics of discussion at the event were the potential for urban regeneration cooperation, sustainable investment (*climate investment*) in Indonesia and DKI Jakarta, as well as investment potentials in MRT Jakarta's transit-oriented areas. In the forum, MRT Jakarta showcased various infrastructure projects along the MRT Jakarta route currently and will be in the pipeline.

The TOD Forum is expected to provide a comprehensive understanding to investors to gain interest in Transit Oriented Development collaborations; and thus, encourage the development of areas in Jakarta to become spaces that provide comfort and a better quality of life for the people of Jakarta and improve efficiency for people to commute from one point to another.

Daftar Isi

Table of Contents

PENDAHULUAN INTRODUCTION		
Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimer and Limit of Liability	1	
Penjelasan Tema Theme Explanation	2	
Kesinambungan Tema Theme Continuity	3	
Pencapaian 2022 2022 Achievements	4	
Daftar Isi Table of Contents	12	
KILAS KINERJA 2022 2022 PERFORMANCE HIGHLIGHTS		
Kilas Kinerja Keuangan Financial Performance Highlights	16	
Peristiwa Penting dan Inisiatif Perseroan 2022 Event Highlights and Corporation Initiatives in 2022	20	
Penghargaan & Sertifikasi 2022 2022 Awards and Certifications	24	
LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT		
Laporan Dewan Komisaris The Board of Commissioners' Report	30	
Laporan Direksi The Board of Directors' Report	38	
Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2022 PT MRT Jakarta (Persero) Statement of the Members of the Board of Commissioners on Responsibility for the 2022 Annual Report of PT MRT Jakarta (Persero)	48	
Surat Pernyataan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2022 PT MRT Jakarta (Persero) Statement of the Members of the Board of Directors on Responsibility for the 2022 Annual Report of PT MRT Jakarta (Persero)	49	
PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE		
Informasi Umum Perusahaan General Information of the Corporation	52	
Riwayat Singkat Perusahaan Brief History of the Corporation	54	
Jejak Langkah Milestones	58	
Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan Corporate Vision, Mission, and Values	60	
Kegiatan dan Bidang Usaha Perseroan Corporate Activities and Business Lines	62	
Keanggotaan Asosiasi Association Membership	64	
Wilayah Operasi Perseroan Corporate Operational Area	65	
Struktur Organisasi Organizational Structure	66	
Dewan Komisaris The Board of Commissioners	68	
Direksi The Board of Directors	69	
Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners' Profile	71	
Profil Direksi Board of Directors' Profile	79	
Statistik Karyawan Employee Statistics	88	
Struktur dan Komposisi Pemegang Saham Shareholders Structure and Composition	90	
Informasi Entitas Anak, Asosiasi, Ventura Bersama, dan <i>Special Purpose Vehicle</i> (SPV) Information on Subsidiaries, Associates, Joint Ventures (JV), and Special Purpose Vehicle (SPV)	92	
Kronologi Pencatatan Saham dan/atau Pencatatan Saham dari Awal Penerbitan sampai dengan Akhir Tahun Buku Chronology of Share Listing from Initial Public Offering Until the end of Fiscal Year	94	
Informasi Pencatatan Efek Lainnya yang Belum Jatuh Tempo Pada Tahun Buku Information on Listing of Other Securities Not Due in the Fiscal Year	94	
Akuntan Publik Public Accountant	95	
Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal dan Kegiatan Usaha Name and Address of Supporting Institution and/or Professions to the Capital Market and Business Lines	96	



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Tinjauan Umum General Review	100
Tinjauan Operasi per Segmen Usaha Operational Review by Business Segment	105
Tinjauan Kinerja Keuangan Financial Performance Review	134

TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Implementation	172
Kerangka dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance Framework and Mechanism	175
Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	178
Dewan Komisaris Board of Commissioners	195
Direksi Board of Directors	208
Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Directors Nomination and Remuneration	227
Organ Penunjang Dewan Komisaris Board of Commissioners' Supporting Organs	234
Organ Pendukung Direksi Supporting Organs Of The Board Of Directors	260
Audit Eksternal External Audit	278
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	280
Manajemen Risiko Risk Management	285
Proses Bisnis Manajemen Risiko Risk Management Business Process	286
Peta Jalan Pengembangan Sistem Manajemen Risiko Risk Management System Development Roadmap	290
Perkara Hukum Berdampak Material Legal Cases with Material Impact	301
Sanksi Administrasi/Sanksi Lain Administrative Sanctions/Other Sanctions	301

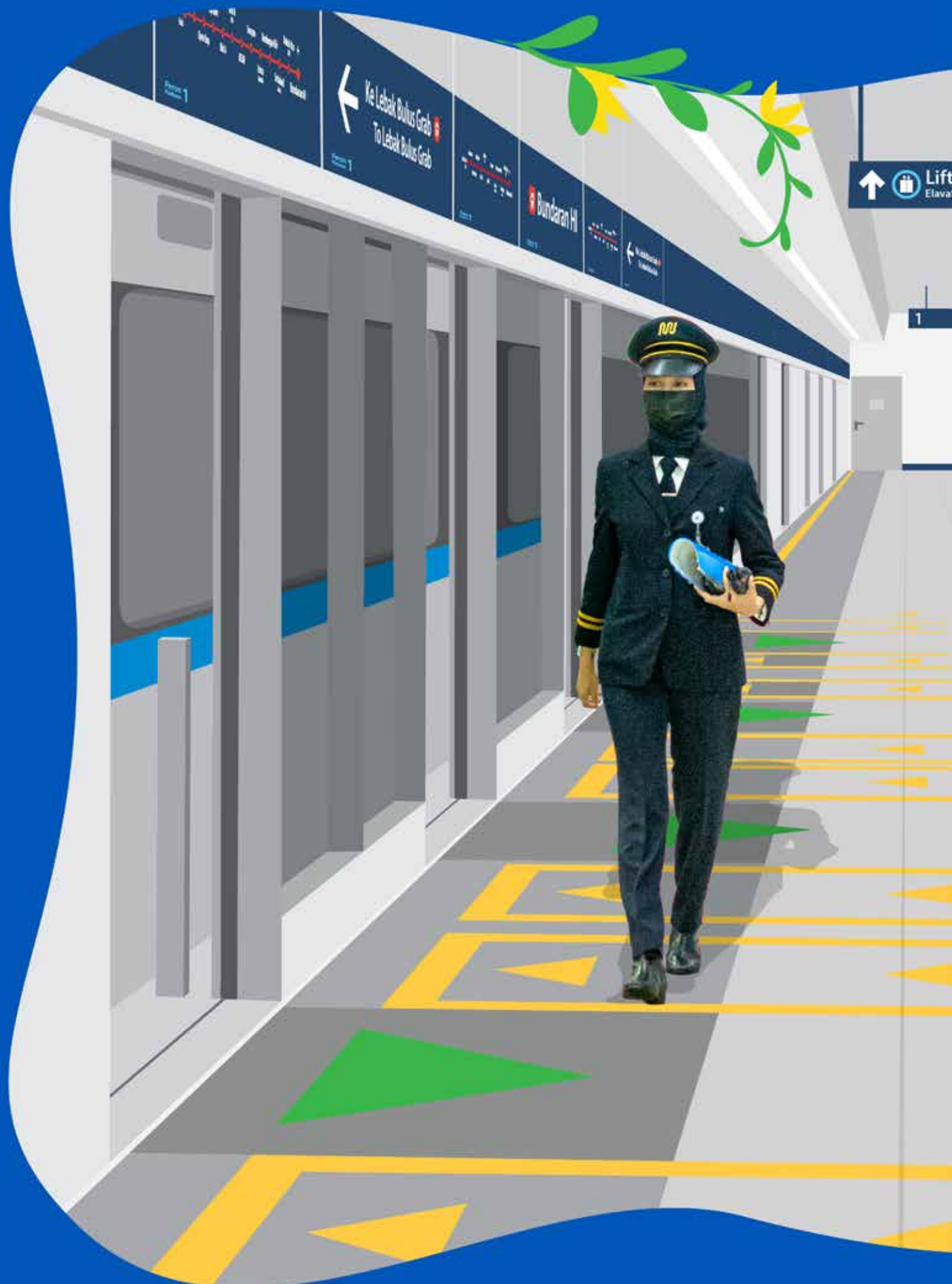
Kode Etik Code of Conduct	302
Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) Whistleblowing System	305
Kebijakan Anti-Korupsi Anti-Corruption Policy	309
Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik GCG Implementation Assessment	313
Akses Informasi dan Data Perseroan Corporate Information and Data Access	321
Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Information and Communication Technology (ICT) Governance	324

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environmental Responsibility Governance	331
Tanggung Jawab terhadap Lingkungan Hidup Responsibility to the Environment	334
Tanggung Jawab Sosial Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja Social Responsibility Related to Employment, and Occupational Safety and Health	338
Tanggung Jawab Sosial terhadap Pelanggan Social Responsibility to Customers	340
Tanggung Jawab Sosial terkait Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Social Responsibility Related to Social and Community Development	342

LAPORAN KEUANGAN FINANCIAL REPORT

Kriteria Pedoman Umum Governansi Korporate Indonesia (PUKGI) Criteria of the Indonesian General Corporate Governance Guidelines (PUGKI)	482
Referensi Silang SEOJK No. 16 /SEOJK.04/2021: Bentuk Dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Cross-Reference No. 16/SEOJK.04/2021: Format and Completing the Annual Report of Issuers or Public Companies	505



01

KILAS KINERJA 2022

2022 Performance
Highlights

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2022, MRT Jakarta secara konsisten terus menunjukkan peningkatan kinerja yang sangat baik.

In the midst of various challenges faced throughout 2022, MRT Jakarta consistently shows excellent performance improvement.

Kilas Kinerja Keuangan

Financial Performance Highlights

LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain | In million rupiah, unless stated otherwise

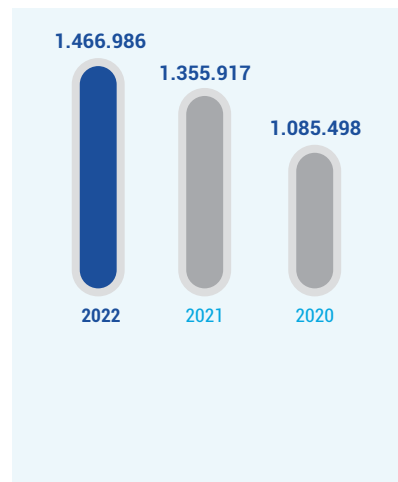
Uraian Description	2022	2021	2020	YoY 2021-2022 (%)
Pendapatan Tiket Farebox Revenue	155.615	60.371	82.025	157,76
Pendapatan Subsidi Subsidy Revenue	808.200	821.978	620.801	(1,68)
Pendapatan Non-tiket Non-Farebox Revenue	503.171	473.568	382.672	6,25
Total Pendapatan Total Revenues	1.466.986	1.355.917	1.085.498	8,19
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	(1.045.193)	(989.996)	(976.692)	5,58
Laba Kotor Gross Profit	421.793	365.921	108.806	15,27
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(279.202)	(218.351)	(189.754)	27,87
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	142.591	147.570	(80.948)	(3,37)
Penghasilan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	43.895	35.470	35.731	23,75
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Final dan Manfaat Pajak Penghasilan Income (Loss) Before Final Tax Expenses and Income Tax Benefit	186.486	183.040	(45.217)	1,88
Beban Pajak Final Final Tax Expenses	(10.008)	(11.678)	(17.492)	(14,30)
Laba (Rugi) Sebelum Manfaat Pajak Penghasilan Income (Loss) Before Income Tax Benefit	176.478	171.362	(62.709)	2,99
Manfaat Pajak Penghasilan Tambahan Deferred Income Tax Benefit	(71.510)	(65.829)	(6.385)	0,09
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Income (Loss) for the Year	104.968	105.533	(69.094)	(0,01)
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Other Comprehensive Income (Expense)	(7.745)	166	(1.732)	(100)
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income (Loss) for the Year	97.223	105.699	(70.826)	(0,01)
Laba (Rugi) per Saham (Rupiah Penuh) Earning (Loss) per Share (Full Rupiah)	5.906	5.949	(4.229)	(0,01)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang dapat didistribusikan kepada: Income (Loss) for the Year attributable to:				
• Pemilik Entitas Induk • Owner of the Parent Entity	104.910	105.730	(69.711)	(0,01)
• Pemilik Kepentingan Non-Pengendali • Non-Controlling Interests	58	(197)	617	(1,30)
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Total Comprehensive Income (Loss) for the Year attributable to:				
• Pemilik Entitas Induk • Owner of the Parent Entity	97.161	105.896	(71.443)	(0,08)
• Pemilik Kepentingan Non-Pengendali • Non-Controlling Interests	62	(197)	617	(1,30)



Total Pendapatan

Total Revenues

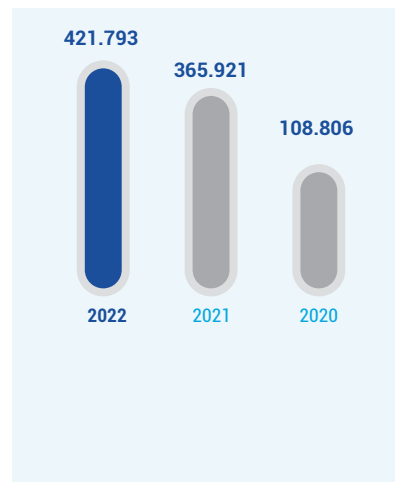
(dalam jutaan Rp)
(in million Rp)



Laba Kotor

Gross Profit

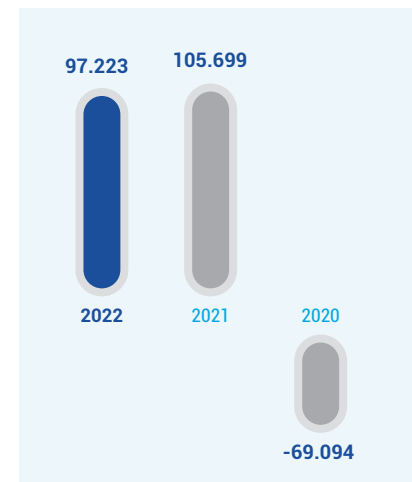
(dalam jutaan Rp)
(in million Rp)



Laba Bersih

Net Profit

(dalam jutaan Rp)
(in million Rp)



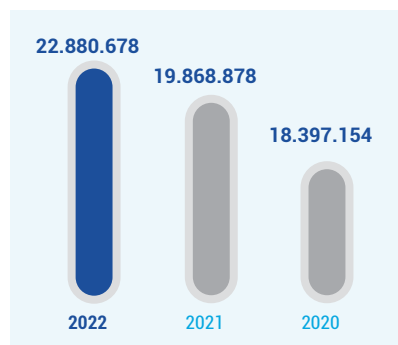
POSISI KEUANGAN FINANCIAL POSITION

Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain | In million rupiah, unless stated otherwise

Uraian Description	2022	2021	2020	YoY 2021-2022 (%)
Aset Assets				
Aset Lancar Current Assets	2.668.144	1.879.099	1.490.592	42
Aset Tetap Fixed Assets	17.417.431	16.246.019	15.944.111	7
Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture	17.541	25.441	33.849	(31)
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Assets	2.777.562	1.718.319	928.602	62
Jumlah Aset Total Assets	22.880.678	19.868.878	18.397.154	15
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity				
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	534.352	512.482	838.291	4
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	496.581	273.370	198.958	82
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.030.933	785.852	1.037.249	31
Ekuitas Neto Net Equity	21.849.745	19.083.026	17.359.905	14
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	22.880.678	19.868.878	18.397.154	15

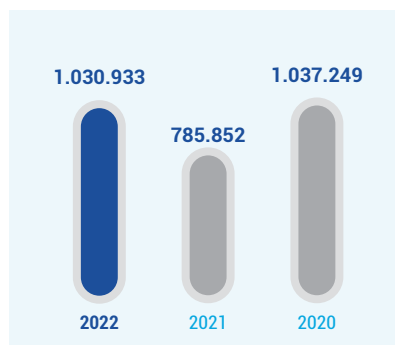
Jumlah Aset
Total Assets

(dalam jutaan Rp)
(in million Rp)



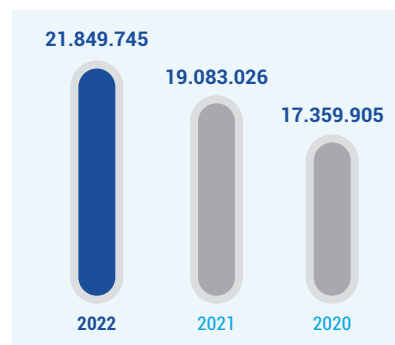
Jumlah Liabilitas
Total Liabilities

(dalam jutaan Rp)
(in million Rp)

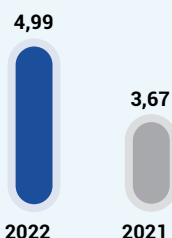


Jumlah Ekuitas
Total Equity

(dalam jutaan Rp)
(in million Rp)



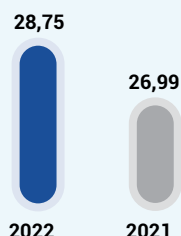
Rasio Lancar (%)
Current Ratio (%)



Rasio Lancar MRT Jakarta tahun 2022 meningkat menjadi 4,99% dari 3,67% di tahun 2021 yang menandakan bahwa Perseroan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

MRT Jakarta's Current Ratio in 2022 increased to 4.99% from 3.67% in 2021 indicating that the Corporation has a better capacity to fulfill its short-term obligations.

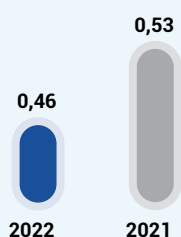
Margin Laba Kotor (%)
Gross Profit Margin (%)



Margin Laba Kotor MRT Jakarta tahun 2022 meningkat dari 28,75% di tahun 2021 menjadi 26,99% yang mencerminkan bahwa kemampuan Perseroan untuk meraih laba mengalami peningkatan.

MRT Jakarta's Gross Profit Margin in 2022 increased from 28.75% in 2021 to 26.99% which reflects that the Corporation's capability to earn profit has increased.

Tingkat Pengembalian Aset (%)
Return on Asset (ROA) (%)



Tingkat Pengembalian Aset MRT Jakarta tahun 2022 adalah 0,46% yang memperlihatkan bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitasnya cukup baik.

MRT Jakarta's Asset Return Rate in 2022 is 0.46% which demonstrates that the corporation's capability to generate profit from its activities is quite good.



RASIO KEUANGAN FINANCIAL RATIOS

Uraian Description	2022	2021	2020	YoY 2021-2022 (%)
Rasio Likuiditas Liquidity Ratios				
Rasio Lancar (Kali) Current Ratio (Times)	4,99	3,67	1,78	36,18
Rasio Solvabilitas (Kali) Solvability Ratio (Times)	22,19	25,28	17,74	(12,22)
Rasio Kas (Kali) Cash Ratio (Times)	3,43	2,64	1,46	(8,19)
Rasio Cepat (Kali) Quick Ratio (Times)	4,94	3,64	1,76	23,35
Rasio Solvabilitas Solvency Ratios				
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (Kali) Debt to Equity Ratio (Times)	0,05	0,04	0,06	14,58
Rasio Utang Jangka Pendek terhadap Ekuitas (Kali) Short Term Debt to Equity (Times)	0,02	0,03	0,05	(8,94)
Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Ekuitas (Kali) Long Term Debt to Equity Ratio (Times)	0,02	0,01	0,01	58,65
Rasio Utang terhadap Aset (Kali) Debt to Asset Ratio (Times)	0,05	0,04	0,06	13,92
Rasio Profitabilitas Profitability Ratios				
Margin Laba Kotor (%) Gross Profit Margin (%)	28,75	26,99	10,02	6,54
Margin Laba Bersih (%) Net Profit Margin (%)	7,16	7,78	(6,37)	54,56
Tingkat Pengembalian Aset (%) Return on Asset (ROA) (%)	0,46	0,53	(0,37)	(13,63)
Tingkat Pengembalian Ekuitas (%) Return on Equity (ROE) (%)	0,48	0,55	(0,41)	(13,06)

IKHTISAR SAHAM DAN EFEK LAINNYA

PT MRT Jakarta (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hingga akhir tahun 2022, Perseroan tidak menerbitkan dan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia, maupun bursa saham lain. Dengan demikian, tidak ada pengungkapan informasi terkait jumlah saham yang beredar; kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. Laporan ini juga tidak menyertakan pengungkapan informasi terkait penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*), serta penjelasannya. Selain itu, Perseroan juga tidak menerbitkan efek lainnya, baik berupa obligasi, sukuk, obligasi konversi atau efek berbentuk utang lainnya.

SHARE AND OTHER SECURITIES HIGHLIGHTS

PT MRT Jakarta (Perseroda) is a Regionally Owned Enterprise whose shares are mostly owned by the Government of DKI Jakarta Province. Until the end of 2022, the Corporation did not issue and list shares on the Indonesia Stock Exchange or other stock exchanges. Thus, there is no disclosure of information related to the number of outstanding shares; market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares are listed; the highest, lowest, and closing stock prices; and trading volume on the stock exchange where the shares are listed. This report also does not include disclosure of information regarding the suspension of share trading and/or delisting of share along with the explanation. In addition, the Corporation also does not issue other securities, whether in the form of bonds, sukuk, convertible bonds or other debt securities.

Peristiwa Penting dan Inisiatif Perseroan 2022

Event Highlights and Corporation Initiatives in 2022



27 Januari
January

PT MRT Jakarta (Perseroda) dan Unit Pengelolaan Angkutan Sekolah (UPAS) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan kerja sama terkait layanan transportasi terintegrasi dalam rangka menyediakan sistem pengumpan bagi pengguna MRT Jakarta dan bus sekolah DKI Jakarta. Kerja sama tersebut dituangkan melalui penandatanganan nota kesepahaman oleh Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta (Perseroda) dan Kepala Unit Pengelola Angkutan Sekolah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

PT MRT Jakarta (Perseroda) and the School Transportation Management Unit (UPAS) of the DKI Jakarta Province Transportation Agency entered into a cooperation regarding integrated transportation services to provide a feeder system for MRT Jakarta users and DKI Jakarta school buses. This cooperation was manifested through the signing of a Memorandum of Understanding by the Director of Operations and Maintenance of PT MRT Jakarta (Perseroda) and the Head of the School Transportation Management Unit of the DKI Jakarta Province Transportation Service.

Menteri Perdagangan Internasional Inggris Anne-Marie Trevelyan MP mengunjungi MRT Jakarta. Kunjungan tersebut bertujuan untuk membicarakan kemungkinan kerja sama kemitraan terkait perdagangan dengan MRT Jakarta, perpanjangan Nota Kesepahaman dengan Crossrail International, penajakan keikutsertaan Inggris dalam pembangunan koridor MRT fase berikutnya.

UK International Trade Minister Anne-Marie Trevelyan MP visited MRT Jakarta. The purpose of the visit was to discuss the possibility of partnership cooperation related to trade with MRT Jakarta, extension of the Memorandum of Understanding with Crossrail International, and exploration of the UK's participation in the construction of the next phase of MRT corridor.



23 Februari
February



24 Februari
February

Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran mesin bor terowongan 1 (TBM-1) fase 2A. Peresmian dilakukan di area awal pengeboran di sisi utara Stasiun Bundaran HI yang terletak di kedalaman 18 meter dari permukaan tanah. TBM ini merupakan mesin bor pertama dari dua mesin bor yang rencananya akan digunakan untuk membangun jalur Bundaran HI hingga Kota.

President Joko Widodo inaugurated the launch of the 1st tunnel boring machine (TBM-1) phase 2A. The inauguration was held in the initial drilling area on the north side of Bundaran HI Station which is located at a depth of 18 meters from the ground surface. This TBM is the first of two boring machines planned to be used to build Bundaran HI route to Kota.

24-27 Maret
March

Perseroan menggelar Festival Hari MRT 2022 yang dilaksanakan di kawasan Terowongan Kendal dan Taman Dukuh Atas pada 24-27 Maret 2022. Kegiatan ini melibatkan puluhan UMKM kuliner nusantara, pelaku seni, artis dan komunitas. Peringatan Hari MRT tahun ini merupakan bentuk apresiasi dari MRT Jakarta terhadap dukungan masyarakat yang telah diberikan hingga dapat terus memberikan layanan terbaik.

The Corporation held the 2022 MRT Day Festival in Terowongan Kendal and Taman Dukuh Atas area on March 24-27, 2022. This activity involved dozens of Indonesian culinary MSMEs, art performers, artists, and communities. This year's MRT Day commemoration is a form of appreciation from MRT Jakarta for the support given by the public so that MRT Jakarta can continuously provide the best service.



19 April
April

Perseroan menjalin kerja sama dalam hak penamaan nama Stasiun MRT Fatmawati, secara resmi memiliki nama baru, yaitu Stasiun Fatmawati Indomaret. Selain itu, gerai Indomaret telah dibuka di Stasiun MRT, yaitu di Stasiun MRT Istora Mandiri, Stasiun MRT Dukuh Atas BNI, dan Stasiun MRT Haji Nawi.

The Corporation entered into a cooperation in the naming rights of Fatmawati MRT Station, which officially had a new name "Fatmawati Indomaret Station". In addition, Indomaret outlets are opened at several MRT stations, namely at Istora Mandiri MRT Station, Dukuh Atas BNI MRT Station, and Haji Nawi MRT Station.



14 Mei
May

Dalam rangka perluasan jalur serta pembangunan sistem perkeretaapian perkotaan dalam mencapai mobilitas berkelanjutan secara global, PT MRT Jakarta (Perseroda) bersama dengan Crossrail International melakukan pembaruan kesepakatan bersama yang dituangkan melalui penandatanganan nota kesepahaman yang dilaksanakan di KBRI London, penandatanganan dilakukan oleh Presiden Direktur PT MRT Jakarta (Perseroda) William Sabandar dan Paul Dyson selaku CEO Crossrail International serta disaksikan langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Inggris Desra Percaya dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

In the quest of route expansion and development of the urban rail system in achieving globally sustainable mobility, PT MRT Jakarta (Perseroda) and Crossrail International conducted a renewal of the joint agreement manifested in the signing of a Memorandum of Understanding held at the Indonesian Embassy in London. The signing was conducted by PT MRT Jakarta (Perseroda) President Director of William Sabandar and Crossrail International CEO Paul Dyson and witnessed directly by the Ambassador of the Republic of Indonesia to the United Kingdom Desra Percaya and the Governor of DKI Jakarta Anies Baswedan.



22 Juni
June



Upaya mempercepat pembangunan Fase 2 dan 3 MRT Jakarta terus dilakukan. Dalam kunjungan kerjanya ke Jepang, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memimpin langsung delegasi Kementerian Perhubungan RI untuk bertemu dengan sejumlah pejabat penting dari kementerian terkait Jepang seperti Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism (MLIT); Japan Bank of International Cooperation (JBIC), Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Prime Minister's Special Advisor to the Cabinet Mori Masafumi, dan Ministry of Foreign Affairs (MOFA).

Efforts to accelerate the construction of MRT Jakarta Phases 2 and 3 are continuing. During his visit to Japan, the Minister of Transportation Budi Karya Sumadi directly led the Indonesian Ministry of Transportation delegation to meet with a number of important officials from Japanese related ministries such as the Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism (MLIT); Japan Bank of International Cooperation (JBIC), Japan International Cooperation Agency (JICA) and Prime Minister's Special Advisor to the Cabinet Mori Masafumi, and Ministry of Foreign Affairs (MOFA).

22 Juli
July

Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT MRT Jakarta (Perseroda) tanggal 22 Juli 2022 memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Zulfikri selaku Komisaris PT MRT Jakarta (Perseroda) serta menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pengabdian selama menjabat sebagai Komisaris;
2. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ir. William P. Sabandar, M.Eng.Sc, Ph.D. selaku Direktur Utama dan menyampaikan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian selama menjabat sebagai Direktur Utama; dan
3. Mengangkat Sdr. Ir. Mohamad. Aprindy, sebagai Direktur Utama dengan masa jabatan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

The resolution of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT MRT Jakarta (Perseroda) dated July 22, 2022 resolved the following matters:

1. Honorably dismissed Mr. Zulfikri as Commissioner of PT MRT Jakarta (Perseroda) and expressed gratitude and appreciation for his dedication while serving as Commissioner.
2. Honorably dismissed Mr. Ir. William P. Sabandar, M.Eng.Sc, Ph.D. as President Director and expressed highest gratitude and appreciation for his dedication while serving as President Director; and
3. appointed Mr. Ir. Mohamad. Aprindy, as President Director with a term of office in accordance with the Company's articles of association.



16 Agustus
August



Pembangunan MRT Jakarta Fase 2A dengan tambahan 7 stasiun memiliki total panjang jalur sekitar 5,8 kilometer yang terdiri dari tiga paket pekerjaan konstruksi, yaitu paket kontrak (contract package) CP201, CP202, dan CP203. Penandatanganan kontrak pelaksanaan konstruksi CP202 telah dilakukan pada 18 Juli 2022 lalu, dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Shimizu Adhi Karya Joint Venture (SAJV) sebagai kontraktor pelaksana diterbitkan pada 27 Juli 2022, yang dijadikan sebagai masa awal dimulainya pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalur Harmoni hingga Mangga Besar.

The construction of MRT Jakarta Phase 2A with the addition of 7 stations and a total track length of around 5.8 kilometers consisting of three construction work packages comprising CP201, CP202, and CP203 contract packages. The CP202 construction implementation contract was signed on July 18, 2022, with the Letter of Work Commencement (SPMK) to Shimizu Adhi Karya Joint Venture (SAJV) as the implementing contractor issued on July 27, 2022. The date was used as the initial period for the commencement of construction work from Harmoni to Mangga Besar.

1 September
September

PT MRT Jakarta (Perseroda) membuka kerja sama dengan berbagai investor untuk membangun dan mengembangkan MRT Jakarta. Dalam ajang Jakarta Investment Forum 2022 yang berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, PT MRT Jakarta (Perseroda) memamerkan delapan proyek infrastruktur MRT Jakarta yang terbuka untuk dikerjasamakan. Delapan proyek tersebut meliputi: Jaringan Fase 3 Timur-Barat Cikarang-Balaraja; Jaringan Fase 4 Fatmawati-Kampung Rambutan; Area komersial di Stasiun Bundaran HI; Transport Hub Stasiun Dukuh Atas; Dek Pejalan Kaki Stasiun Dukuh Atas; Pengembangan fungsi campuran di kawasan Blok M; Pengembangan fungsi campuran di kawasan Fatmawati; serta Area komersial di Stasiun Fatmawati.

PT MRT Jakarta (Perseroda) opens cooperation with various investors to build and develop MRT Jakarta. At the Jakarta Investment Forum 2022 event which took place at the Fairmont Hotel, Central Jakarta, PT MRT Jakarta (Perseroda) showcased eight MRT Jakarta infrastructure projects that are open for cooperation. The eight projects include: East-West Cikarang-Balaraja Phase 3 network; Phase 4 Fatmawati-Kampung Rambutan Network; Commercial area of Bundaran HI Station; Dukuh Atas Station Transport Hub; Dukuh Atas Station Pedestrian Deck; Development of mixed functions in Blok M area; Development of mixed functions in Fatmawati area; as well as the commercial area at Fatmawati Station.



19-25 Oktober
October

Tiga tahun beroperasi, PT MRT Jakarta (Perseroda) telah menjadi salah satu operator yang membantu persiapan operasi komersial Ho Chi Minh Metro. Deputy Director Tran Dang dan 13 orang koleganya merupakan anggota tim dari Ho Chi Minh City Urban Railways No 1 Company Limited (HURC 1) yang sedang mengikuti pelatihan di MRT Jakarta seperti *Operation Control Center (OCC)*, pemeliharaan kereta, layanan stasiun, sistem manajemen keselamatan operasional, perawatan rel, hingga pengelolaan keuangan organisasi. Peserta pelatihan mulai dari tingkat spesialis yang akan mengerjakan aspek teknis perawatan kereta hingga direktur manajemen organisasi.

Three years into its operation, PT MRT Jakarta (Perseroda) has become one of the operators which help prepare the commercial operation of the Ho Chi Minh Metro. Deputy Director Tran Dang along with 13 colleagues were team members from Ho Chi Minh City Urban Railways No 1 Corporation Limited (HURC 1) who underwent training at MRT Jakarta in areas such as operation control center (OCC), rolling stock maintenance, station services, operational safety management system, rail maintenance, and organizational financial management. Participants range from specialist level who will work on the technical aspects of train maintenance to directors of organizational management.

25 Oktober
October

Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT MRT Jakarta (Perseroda) tanggal 25 Oktober 2022 memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat:
 - a. Sdr. Muhammad Syaugi sebagai Komisaris Utama;
 - b. Sdr. Adnan Pandu Praja sebagai Komisaris;
 - c. Sdr. Mukhtasor sebagai Komisaris; dan
 - d. Sdr. Mohamad Aprindy sebagai Direktur Utama.

PT MRT Jakarta (Perseroda) menyampaikan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianya selama menjabat sebagai pengurus PT MRT Jakarta (Perseroda) yang telah dijalankan.

2. Mengangkat:
 - a. Sdr. Dodik Wijnarko sebagai Komisaris Utama;
 - b. Sdr. Bambang Kristiyono sebagai Komisaris;
 - c. Sdr. William P. Sabandar sebagai Komisaris; dan
 - d. Sdr. Tuhayat sebagai Direktur Utama.

The resolutions made by the shareholders outside the General Meeting of Shareholders of PT MRT Jakarta (Perseroda) dated October 25, 2022 included the following matters:

1. Honorably dismiss:
 - a. Mr. Muhammad Syaugi as President Commissioner;
 - b. Mr. Adnan Pandu Praja as Commissioner;
 - c. Mr. Mukhtasor as Commissioner; and
 - d. Mr. Mohamad Aprindy as President Director

PT MRT Jakarta (Perseroda) expresses its highest gratitude and appreciation for their dedication provided during their services as the management boards of PT MRT Jakarta (Perseroda).

2. Appointed:
 - a. Mr. Dodik Wijnarko as President Commissioner;
 - b. Mr. Bambang Kristiyono as Commissioner;
 - c. Mr. William P. Sabandar as Commissioner; and
 - d. Mr. Tuhayat as President Director





11 November
November

Perseroan memastikan bahwa rel trem yang ditemukan di area konstruksi CP202 akan direlokasi dengan baik agar kondisinya tetap terjaga seperti saat penemuannya, bersama dengan tim ahli arkeologi dan kontraktor pelaksana konstruksi CP202 Shimizu-Adhi Karya Joint Venture (SAJV) telah menyusun metode pekerjaan penyelamatan temuan rel trem tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Koordinasi rutin juga telah dilakukan dengan instansi terkait seperti Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

The Corporation ensured that the tram rails found in the CP202 construction area would be relocated properly to ensure they are preserved in the same condition upon discovery. The Corporation together with a team of archaeological experts and the contractor for the CP202 construction, Shimizu-Adhi Karya Joint Venture (SAJV), have developed a work method to protect the tram rails in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage. Routine coordination was also carried out with related agencies such as the DKI Jakarta Provincial Culture Office.

13 November
November

Perseroan menandatangani dokumen Perjanjian Hibah (*grant agreement*) terkait Studi Kelayakan usulan inisiatif energi baru terbarukan MRT Jakarta yang diberikan oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui United States Trade and Development Agency (USTDA). Penandatanganan dilakukan langsung oleh Tuhayat selaku Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) dan Sung Yong Kim selaku Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia pada Minggu, 13 November 2022 di Hotel Rimba, Bali.

The Corporation signed a grant agreement document related to the Feasibility Study for the MRT Jakarta new renewable energy initiative proposed by the United States Government through the United States Trade and Development Agency (USTDA). The signing was carried out directly by Tuhayat as PT MRT Jakarta (Perseroda) President Director and Sung Yong Kim as the United States Ambassador to Indonesia on Sunday, November 13, 2022 at Rimba Hotel, Bali.



13 Desember
Desember

PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Horizon Internusa Persada, yang lebih dikenal sebagai travelio.com, menyepakati kerja sama pemasaran hunian di sekitar stasiun MRT Jakarta dan stasiun commuter line melalui aplikasi MRTJ. Tercatat sekitar 524 unit apartemen yang terletak sekitar 1,3–2,4 kilometer dari stasiun MRT Jakarta seperti Stasiun Bundaran HI, Dukuh Atas BNI, Fatmawati Indomaret, dan Blok M BCA. Kerja sama ditandai dengan penandatanganan dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta (Perseroda) Farchad H. Mahfud dan CEO Travelio.com Hendry Rusli di Kantor Pusat PT MRT Jakarta (Perseroda) di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, pada Selasa 13 Desember 2022.

PT MRT Jakarta (Perseroda) and PT Horizon Internusa Persada, better known as travelio.com, agreed to cooperate in the marketing of residential around the Jakarta MRT station stations and commuter line stations through the MRTJ application. There are around 524 apartment units located about 1.3-2.4 kilometers from Jakarta MRT stations such as Bundaran Station HI, Dukuh Atas BNI, Fatmawati Indomaret, and Blok M BCA. The cooperation was marked by signing of the Cooperation Agreement document between the Director of Business Development of PT MRT Jakarta (Perseroda) Farchad H. Mahfud and Travelio.com CEO Hendry Rusli at the PT MRT Jakarta Head Office at Wisma Nusantara, Central Jakarta, on Tuesday, December 13, 2022.

28 Desember
Desember

Pembangunan industri perkeretaapian Indonesia agar dapat bersaing dan menembus pasar internasional membutuhkan kerja kolaboratif berbagai pihak. PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Industri Kereta Api (Perseroda) atau INKA, menyepakati kerja sama terkait kolaborasi penyelenggaraan jasa konsultansi, jasa perawatan, dan penelitian serta pengembangan fasilitas perkeretaapian. Kerja sama ditandai dengan penandatanganan dokumen nota kesepahaman oleh Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta (Perseroda) Muhammad Effendi dan Direktur Pengembangan PT Industri Kereta Api (Persero) Agung Sedaju di Depo MRT, Lebak Bulus.

The development of the Indonesian railway industry in order to be able to compete and penetrate the international market requires the collaborative work of various parties. PT MRT Jakarta (Perseroda) and PT Industri Kereta Api (Perseroda) or INKA have agreed to enter into cooperation on a collaboration in the provision of consultancy services, maintenance services, and research and development of railway facilities. The cooperation was marked by the signing of a memorandum of understanding document by the Director of Operations and Maintenance of PT MRT Jakarta (Perseroda) Muhammad Effendi and the Director of Development of PT Industri Kereta Api (Persero) Agung Sedaju at the MRT Depot, Lebak Bulus.



Penghargaan & Sertifikasi 2022

2022 Awards and Certifications

PENGHARGAAN AWARDS



WISCA 2022

Gold
Category

World Safety Organization
(WSO) Indonesia



Global Most Innovative Knowledge Enterprise (MIKE) Award 2022

The International Global
MIKE Study Group



Asia Sustainability Reporting Rating

Gold
Rank

National Center for Corporate
Reporting (NCCR)



Founder's Honoree dalam Ajang: Year in Infrastructure 2021 Going Digital Awards in Infrastructure

Founder's Honoree in the Event: Year
in Infrastructure 2021 Going Digital
Awards in Infrastructure

Bentley System, Incorporated



Best Workplace Safety and Health

Best Workplace Safety and Health

Utomo Awards 2022



Anugerah Humas Jakarta

- Media Sosial Terbaik di BUMD
- Konten Favorit
- The Best Social Media at BUMD
- Favourite Content

Pemprov DKI
Jakarta
Provincial
Government



Corporate Governance Perception Index

Trusted Company

The Indonesia
Institute for
Corporate
Governance



Sertifikat dan Bendera Emas SMK3

Certificate and Gold Flag in
Occupational Health and Safety
Management System

Kementerian Ketenagakerjaan RI
Indonesian Ministry of Manpower



Indonesia Digital Innovation & Achievement Awards 2022

Best Digital
Organization in
Transportation
Services 2022
PT MRT Jakarta
(Perseroda)

Best Chief Executive
Officer (CEO) Indonesia
Digital Innovation and
Achievement of The
Year 2022
M Aprindy

Best Corporate Secretary Indonesia
Digital Innovation and Achievement of
The Year 2022 Rendi Alhial - Corporate
Secretary

Business in Asia



MRT Business Space : Studio Live Streaming Pertama di Sarana Transportasi Publik

MRT Business Space: The First
Live Streaming Studio in Public
Transportation Facilities

MURI



Jampiro PR Indonesia Awards 2022

Corporate Secretary
Terpopuler di Media
Digital 2022.
Most Popular Corporate
Secretary in Digital
Media 2022

PR Indonesia



Top GRC Awards 2022

Golden Trophy TOP
GRC Awards 2022.

Top GRC Awards
2022 # 5 Stars

The Most
Committed GRC
Leader 2022

The High
Performing Board
of Commissioners
on GRC 2022

The High
Performing
Corporate Secretary
on GRC 2022

Top Business



PR Indonesia Awards

Terpopuler
Media Cetak
Most Popular
Print Media

Media Sosial
(Gold Winner)
Social Media
(Gold Winner)

Annual Report
(Silver Winner)

Brand Guideline
(Silver Winner)

PR Indonesia



Golden Trophy - TOP BUMD Awards

5 stars

Majalah Top Business



Top BUMD Awards 2022 BUMD Aneka Usaha

Top BUMD Awards 2022 - BUMD of Various Businesses

5 stars

Majalah Top Business



Anugerah Humas Indonesia

Kategori Kanal Digital, Sub-Kategori Website (Silver Winner)
Digital Channel Category, Website Sub-Category (Silver Winner)

Kategori Kanal Digital, Sub-Kategori Media Sosial Instagram (Bronze Winner)
Digital Channel Category, Instagram Social Media Sub-Category (Bronze Winner)

PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai Pemenang Institusi Terpopuler di Media Digital 2022.

PT MRT Jakarta (Perseroda) as the Winner of Most Popular Institution in Digital Media 2022.

Bapak William Sabandar, Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda), sebagai Pemenang Pemimpin Terpopuler di Media Digital 2022.
Mr. William Sabandar, President Director of PT MRT Jakarta (Perseroda), as the Most Popular Leader Winner in Digital Media 2022.

Kategori Kanal Digital, Sub-Kategori Media Sosial Twitter (Bronze Winner)

Digital Channel Category, Twitter Social Media Sub-Category (Bronze Winner)

Kategori Kanal Digital, Sub-Kategori Media Sosial Facebook (Bronze Winner)

Digital Channel Category, Facebook Social Media Sub-Category (Bronze Winner)

Humas Indonesia



Top CEO BUMD Awards 2022: William P. Sabandar, Direktur Utama PT MRT Jakarta BUMD Top CEO 2022: William P. Sabandar, President Director of PT MRT Jakarta

Majalah Top Business

Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di Tempat Kerja

Award for the Prevention and Management of COVID-19 Program in the Workplace

Kementerian Ketenagakerjaan RI
Indonesian Ministry of Manpower

Penghargaan Zero Accident Zero Accident Award

Kementerian Ketenagakerjaan RI
Indonesian Ministry of Manpower

● Kategori
Category

● Institusi Pemberi
Penghargaan
Awarded by

SERTIFIKASI CERTIFICATIONS

Daftar Kepemilikan Sertifikasi dan Periode Berlaku List of Certification and Validity Period





Ratangga di Jalur Layang
Ratangga on the Elevated Track



02

LAPORAN MANAJEMEN

Management Report

Langkah dan kebijakan strategis yang dijalankan manajemen diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi MRT Jakarta, yaitu "Menjadi penyedia jasa transportasi publik terdepan yang berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas, pengurangan kemacetan, dan pengembangan sistem transit perkotaan."

The management directed the strategic steps and policies taken to support the fulfillment of MRT Jakarta's vision "To become a leading provider that is committed to drive economic growth by increasing mobility, reducing congestion, and developing urban transit systems."

Laporan Dewan Komisaris

The Board of Commissioners' Report

Dodik Wijanarko

Komisaris Utama
President Commissioner





Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat, Dear Distinguished Shareholders and Stakeholders,

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang berlimpah kepada kita semua sehingga PT MRT Jakarta (Persero) dapat melewati tahun buku 2022 yang penuh tantangan dengan meraih kinerja yang baik.

Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang seiring dengan pemulihan kondisi ekonomi global, Dewan Komisaris percaya bahwa Perseroan mampu melanjutkan pekerjaan konstruksi, meningkatkan pelayanan operasi, serta melakukan ekspansi bisnis. Selanjutnya, merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk dapat menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perseroan yang dijalankan oleh Direksi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Penilaian Terhadap Kinerja Direksi

Dalam memberikan penilaian atas kinerja Direksi terkait pengelolaan Perseroan, Dewan Komisaris mempertimbangkan beberapa aspek sebagai dasar penilaiannya. Aspek tersebut antara lain, kondisi perekonomian, capaian kinerja yaitu kinerja operasional, kinerja keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan serta aspek penerapan tata kelola dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Penilaian terhadap kinerja Direksi tercermin dalam formula yang telah disepakati melalui parameter *key performance indicator* (KPI) serta pencapaian realisasi kinerja Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perseroan Tahun 2022.

Kondisi pertumbuhan ekonomi global mengalami tekanan cukup berat, ancaman krisis energi dan resesi ekonomi harus selalu diwaspadai oleh pemerintah agar ekonomi Indonesia dapat terus tumbuh dalam ketidakpastian tersebut. Di tengah tantangan ini, MRT Jakarta dapat meningkatkan jumlah pengguna jasa dan berupaya bangkit dengan tetap memberikan pelayanan terbaik. Selain itu, Perseroan masih terus melanjutkan pekerjaan konstruksi dan mengembangkan bisnis untuk meningkatkan pendapatan.

Direksi telah mengambil sejumlah kebijakan strategis yang sejalan dengan rencana bisnis perusahaan dan rencana jangka panjang perusahaan. Dari aspek operasional, Direksi berhasil memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna jasa dengan optimalisasi operasional sesuai ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.

Dari aspek Konstruksi, pembangunan Fase 2A berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Hingga akhir tahun 2022, progres pembangunan Fase 2A telah mencapai 18,09%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 17,28%. Selain itu, Direksi juga terus berinovasi untuk mencari sumber pendapatan non-tiket, antara lain melalui pemasangan media iklan luar ruang, pengelolaan digital aset dan sumber-sumber pendapatan lainnya.

Let us give praise and gratitude to God Almighty who has bestowed abundant mercy and grace on us all so that PT MRT Jakarta (Persero) was able to pass through the challenging 2022 financial year by achieving a promising performance.

In the midst of the COVID-19 pandemic along with the global economic recovery, the Board of Commissioners believes that the Corporation is able to continue construction work, improve operational services and carry out business expansion. Furthermore, it is an honor for us to be able to submit a report on the implementation of the the Board of Commissioners' supervisory function on the management of the Corporation carried out by the Board of Directors as mandated by laws and regulations and the Corporation's Articles of Association.

Assessment of the Board of Directors' Performance

In providing an assessment on the Board of Directors' performance regarding the management of the Corporation, the Board of Commissioners considers several aspects as the basis for our assessment. These aspects include economic conditions, performance achievements comprising operational performance, financial performance and soundness level of the Corporation, as well as aspects of governance implementation and compliance with laws and regulations. The assessment of the Board of Directors' performance is reflected in the formula that has been agreed through the key performance indicator (KPI) parameters as well as the achievement of the 2022 corporate work plan and budget (RKA) realization.

The global economic growth condition experienced quite heavy pressure, the threat of energy crisis and economic recession must always be controlled by the government so that the Indonesia's economy can continue to grow in this uncertainty. In the midst of these challenges, MRT Jakarta managed to increase the number of passengers and continued progressing by continuing to deliver the best service. In addition, the Corporation is still continuing construction work and developing business to increase revenue.

The Board of Directors has taken a number of strategic policies that are in line with the Corporation's business and long-term plans. As for the operational aspect, the Board of Directors succeeded in providing the best service to customers by prioritizing health protocols to passengers so that they can feel secure and comfortable in using the service. This can be achieved by optimizing operations in accordance with the provisions stipulated by the Government.

As for the Construction aspect, Phase 2A construction progressed according to the set targets. Until the end of 2022, the development progress of Phase 2A reached 18.09%, higher than the set target of 17.28%. In addition, the Board of Directors also continuously carried out innovation to seek sources of non-farebox revenue, including out of home advertising and digital asset management among others.

Perseroan dapat membukukan kinerja keuangan sesuai target yang ditetapkan. Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp1.466,98 miliar dan laba tahun berjalan sebesar Rp108.79 miliar, pencapaian tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Perseroan juga mencatat pertumbuhan aset yang cukup baik, yaitu menjadi Rp22.880,67 miliar. Dari sisi biaya, Direksi juga mampu menjalankan program efisiensi dengan menerapkan kebijakan pengendalian biaya.

Atas pencapaian yang baik tersebut, Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi dan seluruh jajaran manajemen. Dewan Komisaris juga mendorong Direksi dan jajarannya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Perseroan di tahun-tahun mendatang.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mengemban amanat dari Pemegang Saham dan pemangku kepentingan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan yang dijalankan oleh Direksi. Saran dan rekomendasi dari Dewan Komisaris akan menjadi pertimbangan Direksi dalam menjalankan tanggung jawab tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun internasional dan pedoman kerja Dewan Komisaris dan Direksi PT MRT Jakarta (Persero).

Selain itu, Dewan Komisaris memastikan independensi untuk Perseroan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan bertanggung jawab dalam pengelolaan *whistleblowing system*. MRT Jakarta selaku Induk Usaha, Dewan Komisaris juga turut melakukan pengawasan bagi anak usaha dan perusahaan patungan PT MRT Jakarta (Persero) melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi

Peran dan fungsi pengawasan merupakan tugas yang diemban oleh Dewan Komisaris, khususnya dalam memberikan masukan yang sejalan dengan aspirasi Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi dibangun melalui kesamaan pandangan untuk mencapai visi dan misi Perseroan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris selalu mengacu pada rencana jangka panjang perusahaan (RJPP) dan rencana kerja dan anggaran (RKA) Perseroan. Dewan Komisaris melakukan pemantauan atas semua kebijakan strategis yang diambil oleh Direksi untuk kemudian melakukan penilaian terhadap rencana kerja, visi dan misi Perseroan. Dewan Komisaris juga menyampaikan saran dan nasihat kepada Direksi tanpa harus terlibat dalam aktivitas operasional Perseroan.

Sepanjang tahun 2022 Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan Perseroan berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perseroan;
2. Pengawasan kebijakan strategis yang dilakukan oleh Direksi;
3. Pengawasan terhadap operasional layanan MRT;
4. Pengawasan terhadap manajemen proyek fase II dan pengembangan Kawasan TOD serta pembiayaannya;

The Corporation managed to record financial performance according to the set targets. The Corporation posted revenue of Rp1,466.98 billion and profit for the year of Rp108.79 billion. This achievement was slightly lower than the previous year. The Corporation also recorded a fairly good growth in total assets reaching Rp22,880.67 billion. In terms of expenses, the Board of Directors was also able to conduct efficiency programs by implementing cost control policies.

For these good achievements, the Board of Commissioners highly appreciates the Board of Directors and all levels of management. The Board of Commissioners also encourages the Board of Directors and its officials to maintain and improve the Corporation's performance in the coming years.

Implementation of the Board of Commissioners' Duties

The Board of Commissioners carries out the mandate from Shareholders and Stakeholders in supervising the management of the Corporation executed by the Board of Directors. In performing this responsibility, the Board of Directors considers suggestions and recommendations from the Board of Commissioners. The Board of Directors carries out the responsibility in accordance with the laws and regulations applicable in Indonesia and/or internationally and also with the work guidelines of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT MRT Jakarta (Persero).

Additionally, the Board of Commissioners ensures the independence for the Corporation to implement the principles of good corporate governance and to be responsible in managing the whistleblowing system. In terms of MRT Jakarta as a Parent Entity, the Board of Commissioners also supervises the subsidiaries and joint venture companies of PT MRT Jakarta (Persero) through joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Supervision of Strategy Implementation

The supervisory role and function is a task carried out by the Board of Commissioners, especially in providing input that is in line with the aspirations of Shareholders and all Stakeholders. In performing this supervisory function, the working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is built through a common understanding to achieve the Corporation's vision and mission.

In implementing its supervisory function, the Board of Commissioners always refers to the Corporation's long term plan (RJPP) and the Corporation's work plan and budget (RKAP). The Board of Commissioners monitors all strategic policies taken by the Board of Directors and then evaluates the work plan, vision and mission of the Corporation. The Board of Commissioners also conveys suggestions and advice to the Board of Directors without having to be involved in the Corporation's operational activities.

Throughout 2022 the Board of Commissioners has carried out the supervisory function as follows:

1. Implementation of the Corporation's activities based on the Corporation's Long Term Plan and the Corporation's Work Plan and Budget (RKA);
2. Supervision of strategic policies carried out by the Board of Directors;
3. Supervision of MRT service operations;
4. Supervision of phase II project management and development of the TOD Area and its financing;



5. Pengawasan governansi korporasi antara lain manajemen SDM, manajemen kinerja, manajemen risiko, implementasi *Good Corporate Governance*, *internal control*, dan transformasi digital;
6. Pengawasan pengembangan bisnis (NFB) dan kinerja keuangan, termasuk efisiensi dan refocusing anggaran.

Atas pengawasan yang dilakukan, Dewan Komisaris telah menyampaikan nasihat kepada Direksi, antara lain:

1. Mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan operasi MRT Jakarta yang mengedepankan aspek kualitas, keselamatan dan keamanan pengguna jasa, dan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat;
2. Mendorong percepatan kontrak dan realisasi proyeksi infrastruktur fase II dan TOD guna menghindari beban biaya ekonomi proyek bagi perusahaan, Pemda DKI, Pemerintah Pusat dan masyarakat, serta meminta direksi untuk membuat perencanaan yang lebih matang dan antisipasi apabila terjadi keterlambatan penyelesaian proyek;
3. Memberikan dukungan dan keputusan untuk percepatan pengalihan lokasi Depo Fase 2 dan melakukan kajian mengenai hitungan terhadap pembiayaan dan dampak dari pemindahan Depo;
4. Memberikan saran kepada direksi untuk terus memperbaiki manajemen kinerja, manajemen risiko, percepatan transformasi digital, penguatan implementasi GCG dan *internal control*, perbaikan manajemen talenta dalam HC;
5. Memberikan saran dan mendorong direksi untuk mengembangkan bisnis baru *non fare box* (NFB), memitigasi risikonya, mengoptimalkan pendapatan NFB untuk meningkatkan kemandirian keuangan dan profitabilitas perusahaan jangka Panjang, dengan memperkuat kemitraan, memilih fokus bisnis inti, dan mengoptimalkan area potensial yang belum menghasilkan pendapatan, seperti penjualan *naming right* beberapa stasiun, percepatan perizinan CTVT;
6. Meningkatkan dan membudayakan efisiensi dan refocusing penggunaan anggaran perusahaan guna memperkuat Kesehatan dan keberlanjutan keuangan perusahaan jangka Panjang;
7. Memastikan keberlangsungan anak usaha dan perusahaan patungan serta memperkuat kesehatan keuangan dan *sustainability* anak usaha dan/atau perusahaan patungan.

Berbagai saran dan nasihat yang disampaikan Dewan Komisaris dapat diterima oleh Direksi dan seluruh jajarannya. Hal tersebut membuat Perseroan dapat terus melaju dan meraih kinerja yang baik di tahun 2022.

Mekanisme dan Frekuensi Pemberian Nasihat Kepada Direksi

Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi telah terjalin dengan sangat baik dengan mengedepankan prinsip saling menghormati wewenang masing-masing pihak. Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi menggunakan mekanisme langsung maupun tidak langsung dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan yang dijalankan oleh Direksi. Mekanisme langsung dilakukan melalui rapat dengan mengundang Direksi.

Dewan Komisaris secara rutin mengadakan pertemuan dengan Direksi untuk membahas berbagai hal terkait pengelolaan Perseroan yang dijalankan oleh Direksi dalam forum rapat gabungan. Dalam forum tersebut, Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan dari Direksi mengenai

5. Supervision of corporate governance, including HR management, performance management, risk management, implementation of *Good Corporate Governance*, *internal control*, and digital transformation;
6. Supervision of business development (NFB) and financial performance, including budget efficiency and refocusing.

Based on the supervision carried out, the Board of Commissioners has provided the following advice to the Board of Directors:

1. To maintain and improve the performance of MRT Jakarta operational services that prioritize the aspects of quality, safety and security of passengers, and optimal benefits for the community;
2. Encouraging the acceleration of contracts and the realization of phase II and TOD infrastructure projections in order to avoid burdening the projects' economic costs for the Corporation, the Regional Government of DKI, the Central Government and the community, and asking the Board of Directors to make more mature planning and anticipate any delays in project completion;
3. Supporting and making decision to accelerate the transfer of the Depo Phase 2 location and conduct studies regarding the calculation of the financing and impact of moving the Depo;
4. Providing advice to the Board of Directors to continuously improve performance management and risk management, accelerate digital transformation, strengthen GCG implementation and internal control, and improve talent management in HC;
5. Providing advice and encouraging the Board of Directors to develop new non-fare box (NFB) businesses, mitigate their risks, optimize NFB revenues to increase financial independence and the Corporation's long-term profitability, by strengthening partnerships, selecting core business focus, and optimizing potential areas that have not generated revenue, such as the sale of naming rights for several stations, acceleration of CTVT licensing;
6. To improve and cultivate efficiency and refocusing of the use of the Corporation's budget to strengthen the health and long-term financial sustainability of the Corporation;
7. To ensure the sustainability of subsidiaries and joint ventures and strengthen the financial health and sustainability of subsidiaries and/or joint ventures.

The full range of suggestions and advice submitted by the Board of Commissioners can be accepted by the Board of Directors and all of its officials. This will enable the Corporation to continue moving forward and achieve good performance in 2022.

Mechanism and Frequency of Providing Advice to the Board of Directors

The working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors has been very well established by prioritizing the principle of mutual respect for the authority of each party. The Board of Commissioners has the authority to provide advice and recommendations to the Board of Directors using direct or indirect mechanisms in supervising the management of the Corporation executed by the Directors. The direct mechanism is carried out through meetings by inviting the Board of Directors.

The Board of Commissioners regularly holds meetings with the Board of Directors to discuss various matters related to the management of the Corporation carried out by the Directors in a joint meeting forum. In this forum, the Board of Commissioners may request an explanation from the Board of Directors

pencapaian kinerja Perseroan dan berbagai kendala yang dihadapi.

Dewan Komisaris dapat menyampaikan pandangan dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai hal tersebut. Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris melaksanakan 13 kali rapat gabungan dengan Direksi.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh tiga komite, yakni Komite Audit, Komite Sumber Daya Manusia dan Perusahaan serta Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dengan menjalin komunikasi dan rapat dengan mengundang Direksi atau Kepala Divisi untuk membahas bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab masing-masing Komite.

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris melakukan pengawasan langsung dengan melakukan kunjungan ke tempat-tempat kegiatan operasional Perseroan. Di tahun 2022, Dewan Komisaris melakukan kunjungan lapangan sebanyak 10 kali.

Pengawasan dalam Penyusunan Target dan Strategi

Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan melihat Direksi menjalankan target dan strategi yang telah ditetapkan bersama.

Terkait strategi operasional, Dewan Komisaris menilai Direksi perlu untuk mempertahankan ketepatan waktu pelayanan kepada pengguna jasa (*train service delivery*), selalu meningkatkan kepuasan pelanggan dan *customer journey* dari pengguna jasa dengan cara melakukan pelatihan secara berkala mengenai *customer service excellence* kepada para petugas di stasiun dan selalu berupaya menjaga tingkat keamanan, kenyamanan dan kebersihan fasilitas stasiun melebihi standar yang telah ditetapkan.

Pada strategi konstruksi, Dewan Komisaris menilai Direksi perlu meningkatkan kualitas kerja dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan dengan membuat *timeline* penyelesaian pekerjaan dan mendokumentasikan kendala yang dihadapi dalam proyek pembangunan MRT sehingga dapat menjadi pembelajaran (*lesson learned*) dan rujukan jika terjadi situasi yang serupa di masa mendatang. Selain hal tersebut, perlu dilakukan juga analisis risiko agar dapat melakukan mitigasi risiko dari hambatan-hambatan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Pembangunan konstruksi dilaksanakan dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik dengan tertib administrasi, tepat waktu dan tepat mutu.

Dari strategi pengembangan bisnis, Dewan Komisaris berharap dengan mengembangkan pendapatan non-tiket yang dapat meningkatkan laba bagi Perseroan. Salah satu upaya pengembangan tersebut melalui bisnis digital sesuai target Korporasi yakni penyelesaian *milestone* pengembangan bisnis digital dan penyelesaian *milestone quick wins* transformasi digital yang terimplementasi.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Perekonomian global berada di bawah bayang-bayang resesi di tahun 2023. Ancaman krisis energi dan gangguan rantai pasok global yang masih terus berlangsung serta lonjakan inflasi menjadi tantangan utama bagi perekonomian global.

regarding the achievement of the Corporation's performance and the various obstacles faced.

The Board of Commissioners can express views and provide advice to the Board of Directors regarding this matter. Throughout 2022, the Board of Commissioners held 13 joint meetings with the Board of Directors.

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by three committees, namely the Audit Committee, the Human Resources and Business Committee, and the Risk and Security Monitoring Committee. The Board of Commissioners supervises the Board of Directors or Division Heads by establishing communications and meetings to discuss the areas that become the responsibility of each Committee.

Throughout 2022, the Board of Commissioners performed direct supervision by visiting the sites of the Corporation's operational activities. In 2022, the Board of Commissioners conducted 10 site visits.

Supervision of Preparation of Targets and Strategies

The Board of Commissioners during the performance of its supervisory function views that the Board of Directors has executed the targets and strategies predetermined together.

Pertaining the operational strategy, the Board of Commissioners considers that the Board of Directors should maintain the punctuality of service to passengers (*train service delivery*), always improve customer satisfaction and the customer journey of passengers by conducting regular training on customer service excellence for officers at the stations and always strive to maintain the level of safety, comfort and cleanliness of the station facilities exceeding the predetermined standard.

On the construction strategy, the Board of Commissioners considers that the Board of Directors shall improve the quality of work and improve performance continuously by making a timeline for the completion of work and documenting the obstacles encountered in the MRT construction project as a lesson learned and reference if a similar situation occurs in the future. In addition to this, it is also necessary to carry out a risk analysis to mitigate risks from obstacles that may occur in the future. Construction development is carried out by applying the principles of good governance with orderly administration, on time and with proper quality.

In terms of business development strategy, the Board of Commissioners hopes that non-farebox revenue can be developed to increase the Corporation's profit. One of the development efforts is through digital business according to the Corporation's target, namely the completion of digital business development milestone and the completion of quick wins milestone for the implemented digital transformation

Views on the Business Prospects Prepared by the Board of Directors

The global economy will be under the shadow of a recession in 2023. The threats of energy crisis; ongoing disruption of global supply chain and a spike in inflation are the main challenges for the global economy. However, Bank Indonesia (BI) predicts



Namun demikian, Bank Indonesia (BI) memprediksi ekonomi Indonesia masih akan tumbuh cukup kuat di tahun 2023 dengan pertumbuhan yang berada pada kisaran 4,5% - 5,3%. Pertumbuhan ini akan ditopang oleh konsumsi, investasi, dan ekspor. BI juga memprediksi inflasi bisa terkendali sehingga kembali ke tingkat kisaran sasarannya, yaitu sebesar $\pm 3\%$.

Sektor transportasi diprediksi juga akan terus tumbuh seiring dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang telah kembali normal seperti era sebelum pandemi. Hal ini sejalan dengan langkah yang diambil Pemerintah yang mencabut status PPKM pada akhir tahun 2022. Namun demikian, Dewan Komisaris menilai Perseroan harus meningkatkan upaya untuk menciptakan standar layanan yang berkualitas untuk meningkatkan kepuasan pelanggan agar jumlah pengguna jasa dapat terus ditingkatkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi akan memastikan sejumlah langkah strategis guna memastikan terjaganya prospek usaha dengan tetap mempertimbangkan dinamika ekonomi nasional. Dewan Komisaris mendukung komitmen Direksi dalam merumuskan RJPP yang pada akhirnya menciptakan nilai jangka panjang untuk seluruh pemangku kepentingan dan menjadi *trendsetter* atau lokomotif penggerak di Indonesia yang juga berkiprah secara Internasional. Pada tahun 2022, Direksi telah menyusun RKA Perseroan tahun 2023 dan telah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham. Dewan Komisaris juga menilai dan meyakini bahwa target dan strategi yang ditetapkan oleh Direksi dalam RKA Perseroan tahun 2023 telah selaras dengan RJPP 2022-2030.

Dewan Komisaris menilai bahwa prospek usaha MRT Jakarta ke depan masih sangat besar dan potensial untuk digarap dan dikembangkan. Keberadaan transportasi publik yang aman, nyaman, dan tepat waktu merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat di kota metropolitan seperti Jakarta.

Namun demikian dalam pandangan Dewan Komisaris, Direksi tetap harus mendorong kemandirian Perseroan. Hal ini sangat diperlukan karena dalam beberapa aspek seperti pengembangan jalur baru dan perawatan kereta Perseroan masih bergantung pada pihak lain, sehingga beberapa rencana pengembangan MRT Jakarta menjadi mundur karena tidak ada kesepakatan. Dengan membangun kemandirian, maka diharapkan Perseroan tidak lagi bergantung dan mendapatkan keleluasaan dalam melakukan pengembangan jaringan maupun bisnis.

Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*) merupakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris bersama dengan Direksi beserta seluruh jajaran. Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk menerapkan prinsip GCG di setiap lini bisnis Perseroan, serta memastikan patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. Dari pengawasan Dewan Komisaris berpendapat Direksi telah menerapkan GCG sesuai dengan hasil Asesmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yang menunjukkan skor 89,91 dengan predikat Baik. Namun demikian, Dewan Komisaris menekankan pentingnya meningkatkan penerapan GCG yang secara fundamental dapat menjaga keberlangsungan usaha.

that the Indonesian economy can still grow quite strongly in 2023 in the range of 4.5%- 5.3%. This growth will be supported by consumption, investment, and exports. BI also predicts that inflation can still be under control to return to its targeted range of $\pm 3\%$.

The transportation sector is predicted to continue to grow in line with community economic activities which have been back to normal like before the pandemic. This is in line with the measure taken by the Government which revoked PPKM status at the end of 2022. However, the Board of Commissioners considers that the Corporation must gain efforts to create qualified service standards to increase customer satisfaction so that the number of passengers can continue to increase.

In connection with the above matters, the Board of Commissioners and the Board of Directors will verify a number of strategic measures to ensure that business prospects are maintained while taking the dynamics of the national economy into account. The Board of Commissioners supports the Board of Directors' commitment in formulating the RJPP which will ultimately create long-term value for all stakeholders and becomes a trendsetter in Indonesia and also in the world. In 2022, the Board of Directors has prepared the 2023 Corporate RKA and has received approval from the Shareholders. The Board of Commissioners also assesses and believes that the targets and strategies set by the Directors in the 2023 Corporate RKA are aligned with the 2022-2030 RJPP.

The Board of Commissioners considers that the future prospect for MRT Jakarta business is still ample and potential to be worked on and developed. The need of safe, comfortable and timely public transportation is a major need for people in a metropolitan city like Jakarta.

Nevertheless, the Board of Commissioners views that the Board of Directors must still encourage the independence of the Corporation. This is very crucial in several aspects such as the development of new lines and maintenance of trains where the Corporation still depends on other parties, resulting in the postponement of several MRT Jakarta development plans due to unachieved agreement. By being independent, hopefully the Corporation will no longer be dependent and will gain flexibility in developing its network and business.

Views on the Implementation of Corporate Governance

Implementation of good corporate governance (GCG) principles is the duty and responsibility of the Board of Commissioners along with the Board of Directors and all officials. The Board of Commissioners and Board of Directors are committed to implementing GCG principles in every line of the Corporation's business, and ensuring compliance with applicable laws and regulations. The Board of Commissioners believes that the Board of Directors has implemented GCG in accordance with the results of the 2022 GCG Implementation assesment by the Financial and Development Supervisory Agency of DKI Jakarta Province and showed a score of 89.91 with the title of Good. However, the Board of Commissioners still emphasizes the importance of enhancing GCG implementation which can fundamentally maintain business continuity.

Dewan Komisaris bersama dengan Organ Pendukung Dewan Komisaris secara seksama melakukan pemantauan dan peninjauan mengenai kesesuaian aktivitas operasional Perseroan. Kualitas penerapan GCG di lingkungan Perseroan juga terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan dari semakin baik dan lengkapnya infrastruktur serta mekanisme GCG yang dikembangkan Perseroan, mempertahankan sertifikasi ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan mengembangkan penerapan GRC terintegrasi.

Namun demikian, Dewan Komisaris tetap mengingatkan Direksi untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG dengan melakukan analisis perbandingan terhadap *best practices* baik dari institusi atau perusahaan di Indonesia maupun di luar negeri, antara lain dalam hal:

1. Penguatan kajian risiko dan mitigasi dalam proposal bisnis dan investasi;
2. Peningkatan efektifitas dan efisiensi struktur organisasi sesuai kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang Perseroan;
3. Penguatan mekanisme pengawasan anak usaha dan perusahaan patungan, khususnya dalam pengawasan manajemen risiko dan performa keuangan;
4. Penguatan dalam sistem informasi teknologi perusahaan; serta
5. Pengembangan sistem tanda tangan elektronik pada *e-office* untuk meminimalisir, potensi kecurangan.

Selain itu, Dewan Komisaris menilai dalam penerapan dan pengelolaan *whistleblowing system* (WBS) di tahun 2022 telah sesuai Pedoman Pelaporan Dugaan Pelanggaran yang disahkan oleh Peraturan Direksi Nomor 18 Tahun 2022. Penerapan WBS MRT Jakarta dikelola oleh pihak independen dan diawasi oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Apresiasi disampaikan Dewan Komisaris bahwa Perseroan telah memiliki unit kerja khusus yang mengelola WBS bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan melapor secara langsung kepada Dewan Komisaris. Selain itu, Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan *whistleblowing system* di Perseroan telah berjalan dengan baik, dan mendorong untuk meningkatkan sosialisasi yang lebih luas dan secara massif kepada para pemangku kepentingan.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris MRT Jakarta mengalami perubahan sebanyak dua kali sepanjang tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT MRT Jakarta (Perseroda) tanggal 22 Juli 2022, yang memberhentikan dengan hormat Zulfikri sebagai Komisaris Perseroan dan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT MRT Jakarta (Perseroda) tanggal 25 Oktober 2022, yang memberhentikan dengan hormat Muhammad Syaugi sebagai Komisaris Utama, Mukhtasor sebagai Komisaris dan Adnan Pandu Praja sebagai Komisaris.

Pemegang saham memutuskan mengangkat Dodik Wijanarko sebagai Komisaris Utama, William P. Sabandar sebagai Komisaris dan Bambang Kristiyono sebagai Komisaris.

The Board of Commissioners along with the Supporting Organs of the Board of Commissioners carefully monitor and review the compliance of the Corporation's operational activities. The quality of GCG implementation in the Corporation has continuously increased, indicated by the improvement and completeness of GCG infrastructure and mechanisms developed by the Corporation, renewal of ISO 37001: 2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) certification, and development of integrated GRC implementation.

Nevertheless, the Board of Commissioners continuously reminds the Board of Directors to continue improving the quality of GCG implementation by conducting a comparative analysis of best practices from both institutions or companies in Indonesia and abroad, including in the matters of the following:

1. Reinforcement of risk review and mitigation in business and investment proposals;
2. Improvement of the effectiveness and efficiency of the organizational structure according to the medium and long term needs of the Corporation;
3. Strengthening of the supervisory mechanism for subsidiaries and joint ventures, particularly in the supervision of risk management and financial performance;
4. Strengthening of the Corporation's information technology system; and
5. Development of electronic signature system on *e-office* to minimize the potential for fraud.

Moreover, the Board of Commissioners acknowledges that the implementation and management of the whistleblowing system (WBS) in 2022 has met the Guidelines for Reporting Alleged Violations enacted by the Board of Directors' Decree Number 18 of 2022. The implementation of the MRT Jakarta WBS is managed by an independent party and supervised by the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Board of Commissioners appreciates that the Corporation has a special work unit which manages WBS and is responsible to the President Director and reports directly to the Board of Commissioners. Furthermore, the Board of Commissioners considers that the implementation of the whistleblowing system in the Corporation has been going well, and encourages a wider and more massive dissemination to stakeholders.

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

There was a change in the composition of the MRT Jakarta Board of Commissioners in accordance with the Resolution outside the General Meeting of Shareholders of PT MRT Jakarta (Perseroda) dated July 22, 2022, which honorably discharged Zulfikri as the Corporation's Commissioner in accordance with the Resolution outside the General Meeting of Shareholders of PT MRT Jakarta (Perseroda) dated October 25, 2022, which honorably discharged Muhammad Syaugi as President Commissioner, Mukhtasor as Commissioner and Adnan Pandu Praja as Commissioner.

The shareholders agreed to appoint Dodik Wijanarko as President Commissioner, William P. Sabandar as Commissioner, and Bambang Kristiyono as Commissioner.



Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris MRT Jakarta pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Dodik Wijanarko : Komisaris Utama
Rukijo : Komisaris
William P. Sabandar : Komisaris
Bambang Kristiyono : Komisaris

Perubahan komposisi tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perseroan yang dijalankan Direksi. Atas nama Perseroan kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Muhammad Syaugi, Zulfikri, Mukhtasor dan Adnan Pandu Praja atas dedikasi dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

Apresiasi

Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pemegang Saham, dan Regulator serta seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dewan Komisaris sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Direksi dan seluruh Insan MRT Jakarta yang telah bekerja keras dan berhasil membawa Perseroan meraih kinerja yang membanggakan di tahun 2022. Kepada pelanggan dan mitra kerja, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kerja sama yang telah terjalin dengan sangat baik. Semoga kerja sama yang telah terjalin dengan baik dapat terus ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Thus, the composition of MRT Jakarta Board of Commissioners as of December 31, 2022 is as follows:

Dodik Wijanarko : President Commissioner
Rukijo : Commissioner
William P. Sabandar : Commissioner
Bambang Kristiyono : Commissioner

Such changes in the composition were done to increase the effectiveness of the Board of Commissioners' supervision of the management of the Corporation carried out by the Board of Directors. On behalf of the Corporation, we express our appreciation and gratitude to Muhammad Syaugi, Zulfikri, Mukhtasor and Adnan Pandu Praja for their dedication and contribution while serving as the Corporation's Commissioners.

Appreciation

The Board of Commissioners expresses our highest gratitude to Shareholders and Regulators and all stakeholders who have provided support to the Board of Commissioners in carrying out our duties and responsibilities.

The Board of Commissioners express our appreciation and gratitude to the Board of Directors and all MRT Jakarta personnel who have worked hard and succeeded in bringing the Corporation to an excellent performance in 2022. To customers and work partners, the Board of Commissioners would like to thank you for the trust and cooperation that has been well established. Hopefully the cooperation that has been well established can continuously be enhanced in the coming years.

Jakarta, 30 Maret 2023
Jakarta, March 30, 2023

Dodik Wijanarko
Komisaris Utama
President Commissioner

Laporan Direksi

The Board of Directors' Report

Tuhyat

Direktur Utama
President Director





Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat, Dear Distinguished Shareholders and Stakeholders,

Puji dan syukur terlebih dahulu kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan nikmat dan karuniaNya PT MRT Jakarta (Persero) dapat melalui tahun 2022 dengan penuh tantangan namun tetap membukukan kinerja yang baik. Bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban Direksi atas pengelolaan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 beserta laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernest & Young (EY) Indonesia) dan memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material.

Pemenuhan aspirasi kami laksanakan dengan mengedepankan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) untuk menjamin keberlangsungan usaha serta dapat berkontribusi untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Dukungan kami terhadap TPB selaras dengan kebijakan dan strategi keberlanjutan yang telah kami susun dan sahkan menjadi Peta Jalan Keberlanjutan MRT Jakarta tahun 2022-2030. Kami berkomitmen untuk dapat terus menyediakan transportasi publik yang inklusif dan ramah lingkungan, serta menyediakan kawasan berorientasi transit yang memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Kebijakan Strategis Perseroan

Selama tahun 2022, pandemi COVID-19 masih menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kinerja Perseroan. Perkembangan dan perubahan kondisi-kondisi secara internal maupun eksternal yang terjadi saat ini. Banyaknya perubahan dinamis yang terjadi dalam konteks ekonomi, sosial masyarakat, dan politik mengharuskan MRT Jakarta bertransformasi sesuai dengan kondisi masa kini. Oleh karena itu, MRT Jakarta bertransformasi untuk dapat berperan dalam berbagai *roles* secara *hybrid* sebagai *network provider*, *urban platformer*, dan *city regenerator*. Perseroan meyakini, ketiga poros tersebut akan dapat mempercepat perwujudan visi Perseroan, yaitu "Menjadi penyedia jasa transportasi publik terdepan yang berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas, pengurangan kemacetan, dan pengembangan sistem transit perkotaan."

Sebagai *network provider*, MRT Jakarta juga terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Selain menjalankan prosedur yang telah menjadi standar layanan, seperti ketepatan waktu, kebersihan armada dan stasiun, dan berbagai standar layanan lainnya, namun berkolaborasi dengan sejumlah operator transportasi publik pengumpan (*feeder*) juga mendorong peningkatan angka keterangkutan. Pelayanan tidak hanya berfokus pada jumlah pengguna jasa, namun lebih luas pada aspek gaya hidup yang mengedepankan kepuasan pelanggan. Hal ini sejalan dengan konsep transportasi inklusif yang dikembangkan MRT Jakarta.

We express our praise and gratitude to the God Almighty. Owing to His grace and blessing, PT MRT Jakarta (Persero) was able to go through 2022 which was filled with challenges by still being able to record an encouraging performance. On this occasion, we would like to present a Report on the Board of Directors' accountability for the Corporation management for the financial year ended December 31, 2022 along with the financial statements that have been audited by the Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernest & Young (EY) Indonesia) and obtained an unqualified opinion.

We have executed the fulfillment of aspirations by prioritizing environmental, social and governance (ESG) aspects to establish business continuity and contribute to sustainable development goals (SDGs). The support for SDGs is in line with the sustainability policies and strategies we have compiled and ratified to become the MRT Jakarta's Sustainability Roadmap 2022-2030. We are committed to continuously providing inclusive and environmentally friendly public transportation, as well as providing transit-oriented areas that have a positive impact on the environment and society.

Strategic Policies of the Corporation

During 2022, the COVID-19 pandemic was still a factor affecting the Corporation's performance, the developments and changes to internal and external conditions. With various dynamic changes taking place in the economic, social, and political contexts, Corporation must transform according to current conditions. Therefore, MRT Jakarta has been transforming to be able to take various roles in a hybrid manner as a network provider, urban platformer, and city regenerator. The Corporation believes that the three axes will accelerate the realization of the Corporation's vision "To become the leading public transportation provider, committed to encouraging a sustainable economic growth increasing mobility, reducing traffic congestion, and developing urban transit systems."

As a network provider, MRT Jakarta also continuously strives to improve service to customers. In addition to carrying out procedures that have become service standards, such as punctuality, train and station cleanliness, and various other service standards, collaboration with a number of feeder public transport operators has also boosted transport rates. Services do not only focus on the number of passengers, but more broadly on the lifestyle aspect that prioritizes customer satisfaction. This is in line with the inclusive transportation concept developed by MRT Jakarta.

Perseroan telah menjalankan beberapa upaya penyelesaian sesuai jadwal konstruksi Fase 2A. Selain itu, Perseroan juga telah berkomitmen untuk mengakselerasi pengembangan jaringan Fase 3 Tahap 1 Segmen 1 (Tomang - Medan Satria) dan Fase 4 (Fatmawati - Kampung Rambutan) yang dimana telah mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat serta negara lainnya seperti Jepang, Inggris dan Korea Selatan melalui penandatanganan nota kesepahaman dalam Presidensi G20, di Bali.

Pada poros *urban platformer*, Perseroan telah membentuk Komite Teknologi Informasi dan Transformasi Digital sebagai Organ Pendukung Direksi yang memiliki tugas untuk mengawasi dan mengkoordinasi implementasi transformasi digital. Pada tahun 2022, Perseroan juga terus memperkuat infrastruktur IT-nya dengan melakukan asesmen *IT Maturity* menggunakan *framework* COBIT 2019 dengan skor mencapai 2,30.

MRT Jakarta sebagai poros *city regenerator*, Perseroan menjalankan mandatnya sebagai pengelola KBT dan integrasi transportasi yang diarahkan pada kehidupan perkotaan yang lebih baik dalam proses peremajaan kota Jakarta di masa depan yang *people centric*, berkelanjutan, efisien, modern, dan *interconnected*. Di tahun 2022, Perseroan telah melakukan kerjasama pengelolaan dan pengusahaan aset infrastruktur di KBT dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta sebagai salah satu langkah dalam meningkatkan pendapatan non-tiket, serta menyusun Peraturan Direksi No. 004/BOD-MRT/III/2022 tentang Pembangunan Interkoneksi untuk Mewujudkan Konektivitas antara Bangunan Sekitar dengan Stasiun MRT.

Pada aspek keberlanjutan telah dilakukan pemutakhiran peta jalan keberlanjutan tahun 2022 - 2030. Perseroan menetapkan 7 (tujuh) aspek keberlanjutan yang relevan bagi pemangku kepentingan di seluruh bisnis dan rantai pasokan yang lebih luas yang bertujuan untuk menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan dapat bekerja harmonis dengan masyarakat sekitar.

Tantangan dan Kendala yang Dihadapi

Selama tahun 2022, Perseroan menghadapi berbagai kendala dan tantangan dalam merealisasikan RKAP. Pandemi COVID-19 masih menjadi tantangan yang dihadapi Perseroan di tahun 2022, meskipun telah jauh mengalami penurunan namun kekhawatiran masyarakat terhadap pandemi masih cukup tinggi. Terlebih mutasi virus yang terus terjadi, sehingga kewaspadaan terhadap pandemi harus tetap dijaga.

Dengan kondisi yang mulai terkendali, Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan jumlah pengguna jasa tanpa mengabaikan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dengan tetap mengikuti ketentuan oleh Pemerintah.

In addition, the Corporation has also committed to accelerate the development of the Phase 3 network of Stage 1 Segment 1 (Tomang - Medan Satria) and Phase 4 (Fatmawati - Kampung Rambutan), which are already supported by the Regional Government and the Central Government, as well as other countries such as Japan, United Kingdom and South Korea through the signing of a Memorandum of Understanding in the G20 Presidency, in Bali.

On the urban platformer axis, the Corporation has formed an Information Technology and Digital Transformation Committee as a Supporting Organ for the Board of Directors which has the task of supervising and coordinating the implementation of digital transformation. In 2022, the Corporation also continued to strengthen its IT infrastructure by conducting an IT Maturity assessment using the 2019 COBIT framework with a score of 2.30.

In terms of MRT Jakarta as the city regenerator axis, the Corporation carries out its mandate as the TOD areas and transportation integration operator which is projected as a better urban life in the process of rejuvenating Jakarta city in the future as a people centric, sustainable, efficient, modern and interconnected city. In 2022, the Corporation has entered into cooperation in the management and operation of infrastructure assets at TOD areas with the DKI Jakarta's Regional Asset Management Agency (BPAD) as one of the measures in increasing non-farebox revenue, as well as drafted Board of Directors' Decree No. 004/BOD-MRT/III/2022 concerning Interconnection Development to Create Connectivity between the Surrounding Buildings and the MRT Stations.

In terms of the sustainability aspect, the sustainability roadmap 2022 - 2030 has been updated. The Corporation defines 7 (seven) aspects of sustainability that are relevant to stakeholders throughout the business and the wider supply chains aiming to carry out responsible business practices and work in harmony with the surrounding community.

Challenges and Obstacles

In 2022, the Corporation faced a range of obstacles and challenges in realizing the RKAP. The COVID-19 pandemic was still a challenge faced by the Corporation in 2022. Despite having been decreasing significantly, the public's concern about the pandemic was still quite high. Especially, the mutation of the virus continued to occur, so vigilance against the pandemic must be maintained.

With such condition that can be under control, the Corporation continuously strived to increase the number of passengers without neglecting the aspects of safety, security, and comfort, while still following the provisions of the Government.



Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2022, Perseroan terus berupaya untuk mengoptimalkan pekerjaan pembangunan MRT Jakarta Fase 2A. Perubahan jadwal pekerjaan terjadi pada tahun 2020 sebagai akibat kegagalan tender CP 202 dan CP 203 yang terdampak COVID-19. Kemudian dilakukan pengadaan ulang untuk CP 202 dan CP 203, serta dimulainya pengadaan CP 205. Namun, CP 202 dan CP 205 kembali mengalami gagal tender yang disebabkan oleh durasi pekerjaan yang dinilai singkat dengan risiko teknis yang dinilai tinggi oleh peserta tender.

Berdasarkan Minutes of Discussion 2020 diperoleh persetujuan high level antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang untuk melanjutkan pengadaan dengan skema *Direct Contracting* dengan menggabungkan paket pengadaan CP202 dan CP205A, serta International Competitive Bidding untuk CP208. Namun, kedua pengadaan tersebut mengalami kegagalan dikarenakan tidak diperolehnya kesepakatan atas proposal Kandidat untuk CP202-205A dan tidak ada memasukkan penawaran untuk CP208.

Pada tahun 2022, target operasi MRT Jakarta Fase 2A disesuaikan kembali menjadi segmen 1 (Bundaran HI - Harmoni) di tahun 2027, sementara segmen 2 (Bundaran HI - Kota) di tahun 2029. Skema ini diupayakan dengan melakukan rekonfigurasi paket pekerjaan menjadi CP 202 melalui *redirect contracting* dan CP 205 (gabungan CP 205A & CP 208) melalui pengadaan ulang *International Competitive Bidding*. Hal ini disetujui secara *high level* antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang yang dituangkan melalui *minutes of discussion* 2022. Hingga saat ini, CP 202 telah memperoleh kesepakatan dengan kandidat yang ditunjuk selama *redirect contracting*. CP 205 sedang dalam proses pengadaan ulang dan masih berlangsung, serta CP 206 dan CP 207 sedang dalam proses persiapan pengadaan.

Selain itu, selama pembangunan berlangsung banyak ditemukan benda cagar budaya dan terduga cagar budaya, seperti saluran air kuno Batavia (terakota) dan rel trem kuno, dimana telah dilakukan penganganan khusus dengan beberapa bagian struktur terakota diangkat secara utuh yang juga dapat di tampilkan dalam galeri yang tersedia pada Stasiun MRT Kota. Adapun benda-benda temuan arkeologi lainnya dapat ditampilkan pada mini galeri tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pelestarian terhadap sejarah Jakarta.

Kinerja MRT Jakarta Tahun 2022

Melalui berbagai strategi yang dijalankan di tahun 2022, MRT Jakarta berhasil membukukan kinerja yang baik dan secara umum sesuai target yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Perseroan tahun 2022. Jumlah pengguna jasa MRT Jakarta tahun 2022 mencapai 19.776.064 orang, atau rata-rata 54.181 orang per hari, meningkat 75% dibandingkan tahun sebelumnya 7.189.862 orang. Pencapaian tersebut setara dengan 108% dari target rata-rata 50.000 orang per hari. Dengan peningkatan jumlah pengguna jasa tersebut, pendapatan tiket tahun 2022 mencapai Rp155,61 miliar, meningkat 157,76% dari tahun sebelumnya sebesar Rp60,37 miliar.

Amid various challenges faced throughout 2022, the Corporation continuously strived to optimize the MRT Jakarta Phase 2A development work. Changes to the work schedule occurred in 2020 as a result of the failure of CP 202 and CP 203 tenders which were affected by COVID-19. Then a re-tender was carried out for CP 202 and CP 203, as well as the tender for CP 205 was started. However, the tender for CP 202 and CP 205 also failed due to the short duration of work and the technical risk that was considered high by the bidders.

Based on the 2020 Minutes of Discussion, a high-level agreement was obtained between the Government of Indonesia and the Government of Japan to continue the tender under Direct Contracting scheme by combining CP202 and CP205A procurement packages, and International Competitive Bidding for CP208. However, both tenders failed because there was no agreement reached on the Candidate proposals for CP202-205A and there was no tender proposal received for CP208.

In 2022, the operational target of MRT Jakarta Phase 2A was readjusted to be segment 1 (Bundaran HI - Harmoni) in 2027, while segment 2 (Bundaran HI - Kota) in 2029. This scheme was sought by reconfiguring the work package to CP 202 through redirect contracting and CP 205 (combination of CP 205A & CP 208) through International Competitive Bidding re-procurement. This was a high level approval of the Government of Republic of Indonesia and the Government of Japan as outlined in the 2022 minutes of discussion. To date, CP 202 has obtained an agreement with the candidate appointed during the redirectcontracting. CP 205 is in the process of being re-tendered and the re-tender process is still ongoing, and CP 206 and CP 207 are in the process of preparing for procurement.

In addition, during the construction process, many objects of cultural heritage and suspected cultural heritage were found, such as the ancient Batavia water channel (terracotta) and ancient tram rails. Special handling had been done by lifting several parts of the terracotta structure removed in full to be displayed in the gallery at MRT Kota Station. Other archaeological finds can be displayed in the mini gallery. This is done as part of efforts to preserve the history of Jakarta.

MRT Jakarta's Performance in 2022

With a range of strategies carried out in 2022, the Corporation managed to record an encouraging performance and generally met the targets set in the 2022 Corporate Work Plan and Budget (RKAP). Total passengers of MRT Jakarta in 2022 reached 19,776,064 passengers, or a daily average of 54,181 passengers, an increase by 75% compared to the previous year of 7,189,862 passengers. This achievement is equivalent to 108% of the daily average target of 50,000 passengers. With an increase in the number of passengers, farebox revenue in 2022 reached Rp155.61 billion, an increase by 157.76% from the previous year of Rp60.37 billion.

Pendapatan tiket Perseroan tahun 2022 setara dengan 107,31% dari target yang ditetapkan sebesar Rp145,02 miliar. Sementara itu, pendapatan non tiket yang dibukukan tahun 2022 mencapai Rp503,17 miliar, meningkat 6,25% dari tahun sebelumnya sebesar Rp473,57 miliar. Sumber utama pendapatan non tiket tahun 2022 berasal dari Mitra Langsung yang mencapai Rp241,56 miliar.

Namun demikian, beban pokok pendapatan tahun 2022 juga meningkat menjadi Rp1.045,19 miliar. Peningkatan tersebut utamanya berasal dari kegiatan pemeliharaan yang meningkat dari sebelumnya Rp53,51 miliar, menjadi Rp75,10 miliar di tahun 2022. Perseroan terus melakukan langkah efisiensi agar dapat menekan beban pokok pendapatan. Dengan kinerja tersebut, Perseroan membukukan laba tahun berjalan tahun 2022 sebesar Rp176,48 miliar, terkoreksi 0,67% dari tahun sebelumnya sebesar Rp105,53 miliar. Pencapaian laba tahun berjalan tersebut setara dengan 841% dari target yang ditetapkan sebesar Rp20,98 miliar. Perseroan berhasil mencatat pertumbuhan aset sebesar 14,17% menjadi Rp22,79 triliun, dari tahun sebelumnya Rp19,87 triliun.

Keberadaan MRT Jakarta juga turut berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional dalam bentuk penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM.

Dari aspek pembangunan fisik, progres pekerjaan konstruksi Fase 2A (Bundaran HI - Kota) telah mencapai 18,09% atau berada di atas target yang ditetapkan sebesar 17,28%, yang dimana segmen 1 (Bundaran HI - Harmoni) telah mencapai 39,72%. Secara keseluruhan, proyek ini diharapkan akan selesai pada 2029.

Dari aspek pengembangan kawasan, Perseroan telah menyelesaikan infrastruktur sebagai berikut:

1. Taman Literasi Martha Christina Tiahahu yang menghadirkan lebih banyak ruang terbuka publik sebagai ruang-ruang interaksi dan kreativitas warga Jakarta;
2. Simpang Temu Lebak Bulus untuk pembenahan jalur pejalan kaki dari dan ke transportasi publik; dan
3. Hunian terjangkau yang bekerjasama dengan Cove, Rukita dan Travelio di sepanjang jalur MRT sebanyak >750 unit untuk memudahkan masyarakat kelas menengah agar mendapatkan akses hunian yang layak di pusat kota.

Fungsi peremajaan kota bukan hanya tercermin dalam penataan KBT namun juga yang berkaitan dengan integrasi antarmoda dengan sistem MRT Jakarta. Integrasi ini tercermin dalam bentuk uji coba dan implementasi *seamless* antara MRT Jakarta dan Transjakarta di simpang temu CSW. Hal ini kemudian diikuti dengan peluncuran sistem integrasi pembayaran JakLingko pada 24 September 2022.

Dari aspek pengembangan kompetensi, pengetahuan, dan inovasi, Perseroan telah melanjutkan pengembangan *competency based human resource management* (CBHRM), menjalankan program-program *knowledge management* dan *continuous improvement*. Program *knowledge management*

The Corporation's farebox revenue in 2022 is equivalent to 107.31% of the target set at Rp145.02 billion. Meanwhile, non-farebox revenue booked in 2022 reached Rp454.14 billion, a increase by 6.25% from the previous year of Rp473.57 billion. The main source of non-farebox revenue in 2022 was derived from Direct Partners which reached Rp241.56 billion.

Nonetheless, the cost of revenue in 2022 also increased to Rp1,045.19 billion. The increase was mainly derived from maintenance activities which increased from Rp53.51 billion in the previous year to Rp75.10 billion in 2022. The Corporation continued to take efficiency measures in order to reduce the cost of revenue. With this performance, the Corporation recorded profit for the year 2022 of Rp176.48 billion, an 0.67% correction from the previous year of Rp105.53 billion. The achievement of this profit of the year was equivalent to 841% of the target set at Rp20.98 billion. The Corporation managed to record a growth in total assets of 14.17% to Rp22.79 trillion from Rp19.87 trillion in the previous year.

The existence of the MRT Jakarta also contributes to national economic development in the form of job creation and MSME development.

In terms of physical development aspect, the progress of construction work in Phase 2A (Bundaran HI - Kota) has reached 18.09% or is above the target set at 17.28%, where segment 1 (Bundaran HI - Harmoni) has reached 39.72%. Overall, the project is expected to be completed in 2029.

In terms of area development aspect, the Corporation has completed the infrastructure as follows:

1. Martha Christina Tiahahu Literacy Park which presents more public open spaces as spaces for interaction and creativity for Jakarta citizens;
2. *Simpang Temu* Lebak Bulus to improve pedestrian paths to and from public transportation; and
3. Affordable housing in collaboration with Cove, Rukita and Travelio along the MRT line of >750 units to make it easier for middle class people to get access to decent housing in the city center.

The city rejuvenation function is not only reflected in the arrangement of the TOD areas, but also related to intermodal integration with the Jakarta MRT system. This integration is reflected in the form of trials and seamless implementation between MRT Jakarta and Transjakarta at the CSW Intersection. This was followed by the launch of the JakLingko payment integration system in September 24, 2022.

From the aspect of competence, knowledge and innovation development, the Corporation has continued to develop competency-based human resource management (CBHRM), implemented knowledge management and continuous improvement programs. The knowledge management program



memfasilitasi identifikasi, diskusi, pendokumentasian, dan sirkulasi pengetahuan strategis MRT Jakarta, melalui kegiatan *knowledge sharing, community of practice, lesson learning* yang didukung *platform* digital Kinetik dengan pengukuran berkala KM Index. MRT Jakarta berhasil mendapatkan nilai KM Maturity 8,17 (skala 10) berdasarkan asesmen yang dilakukan asesor eksternal, dan mempertahankan penghargaan Global MIKE (Most Innovative Knowledge Enterprise) di tahun 2022. Budaya inovasi terus ditumbuhkembangkan melalui 28 proyek lintas unit kerja yang didampingi selama 7 (tujuh) bulan dan diselebrasi dalam acara puncak kompetisi final Innovation Convention pada bulan Desember 2022.

Prospek Usaha Perseroan

Tahun 2023 masih akan menjadi tahun yang sangat menantang. Pertumbuhan ekonomi global diprediksi akan kembali melambat. Lembaga Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi ekonomi global hanya akan tumbuh 2,7% di tahun 2023. Konflik geopolitik, melonjaknya harga produk komoditas dan tingginya angka inflasi di banyak negara membuat prospek ekonomi global menjadi semakin tidak pasti.

Pemerintah Indonesia masih memiliki optimisme yang tinggi akan prospek ekonomi di tahun 2023. Bank Indonesia (BI) memprediksi ekonomi Indonesia masih akan tumbuh cukup kuat di 2023 dengan pertumbuhan yang berada pada kisaran 4,5% - 5,3%. Pertumbuhan ini akan ditopang oleh konsumsi, investasi, dan ekspor. BI juga memprediksi inflasi bisa terkendali sehingga kembali ke tingkat kisaran sasarannya, yaitu sebesar $\pm 3\%$.

Menghadapi tahun 2023, MRT Jakarta bertransformasi untuk dapat berperan dalam berbagai *roles* secara *hybrid* sebagai *network provider, urban platformer, dan city regenerator*. Perseroan meyakini, ketiga poros tersebut akan dapat mempercepat perwujudan sesuai dengan visi Perseroan, yaitu "Menjadi penyedia jasa transportasi publik terdepan yang berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas, pengurangan kemacetan, dan pengembangan sistem transit perkotaan".

Perseroan akan menerapkan kebijakan strategis yang berfokus pada tiga hal yaitu akselerasi kinerja, digitalisasi proses bisnis, dan kolaborasi korporasi. Ketiga fokus ini untuk mendukung rencana strategis Perseroan yang telah tercantum di dalam RBP dan RJPP. Akselerasi kinerja melalui percepatan kinerja dengan merumuskan *Key Performance Indicator* (KPI) yang terhubung secara langsung dengan tujuan perusahaan sesuai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Perseroan akan mengupayakan untuk mengakselerasi kegiatan dan inisiatif yang berdampak signifikan pada peningkatan pendapatan, penurunan biaya, dan peningkatan citra MRT Jakarta.

Perseroan mengembangkan transformasi digital, dengan dukungan teknologi digital Korporasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kerja. Oleh karena itu, Perseroan akan melakukan percepatan inovasi di seluruh lini bisnis.

facilitates the identification, discussion, documentation and circulation of MRT Jakarta strategic knowledge, through knowledge sharing activities, community of practice, lesson learning supported by the Kinetik digital platform with periodic KM Index measurements. MRT Jakarta managed to get a KM Maturity score of 8.17 (of scale 10) based on an assessment conducted by an external assessor, and maintain the Global MIKE (Most Innovative Knowledge Enterprise) award in 2022. The culture of innovation continues to be developed through 28 projects across work units that have been mentored for 7 (seven) months and celebrated in the final competition event of the Innovation Convention in December 2022.

The Corporation Business Prospects

2023 will still be a very challenging year. Global economic growth is predicted to slow down again. The International Monetary Fund (IMF) predicts that the global economy will only grow 2.7% in 2023. Geopolitical conflicts, escalation of commodity product prices, and high inflation rates in many countries have made the global economic prospects even more uncertain.

The Indonesian government is still highly optimistic about the economic prospects in 2023. Bank Indonesia (BI) predicts that the Indonesian economy will still grow quite strongly in 2023 with a growth in the range of 4.5% - 5.3%. This growth will be supported by consumption, investment, and exports sectors. BI also predicts that inflation will be under control so that it will return to its targeted range of $\pm 3\%$.

Facing 2023, MRT Jakarta is transforming to be able to play various roles in a hybrid manner as network provider, urban platformer, and city regenerator. The Corporation believes that these three axes will accelerate the realization of the Corporation's vision "To become the leading public transportation provider, committed to encouraging a sustainable economic growth by increasing mobility, reducing traffic congestion, and developing urban transit systems".

The Corporation will implement a strategic policy that focuses on three things, namely performance acceleration, business process digitalization, and corporate collaboration. These three focuses are to support the Corporation's strategic plan which has been stated in the RBP and RJPP. Performance acceleration can be achieved by formulating key performance indicators (KPI) that are directly linked to the Corporation's goals in accordance with the Corporate Long Term Plan (RJPP). The Corporation will strive to accelerate activities and initiatives that have a significant impact on increasing revenue, reducing costs, and improving the image of MRT Jakarta.

The Corporation develops digital transformation with the support of Corporate digital technology in order to increase the efficiency and effectiveness of work processes. Therefore, the Corporation will accelerate innovation in all business lines.

Perseroan juga mulai bergerak pada bisnis berbasis keahlian dan pengetahuan (*knowledge-based business*) melalui jasa konsultasi dan pelatihan kepada operator transportasi berbasis rel lain seperti Ho Chi Minh Metro dan LRT Palembang di tahun 2022 dan akan terus dikembangkan pada tahun 2023.

Penerapan Aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST)

MRT Jakarta dalam mewujudkan bisnis yang berkelanjutan telah berkomitmen untuk melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), yang mendukung pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) yang menjadi perhatian dari pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam mencapai upaya tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Sejalan dengan komitmen penerapan prinsip keberlanjutan, MRT Jakarta juga menyusun peta jalan keberlanjutan yang memuat inisiatif dan target terkait keberlanjutan yang hendak dicapai MRT Jakarta pada 2030.

Dari aspek lingkungan, MRT Jakarta terus berupaya mengurangi jejak lingkungan Perseroan dengan melakukan *carbon management* dengan menekan emisi karbon yang dihasilkan dari operasional Perseroan. Pada tahun 2022, MRT Jakarta mendapatkan *Renewable Energy Certificate* (REC) dari Perusahaan Listrik Negara sebesar 5.000 MWh listrik sebagai sumber aliran listrik berbasis pada energi baru dan terbarukan dengan *zero carbon emission*. Upaya tersebut terlihat menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini tercermin dari emisi karbon yang dihasilkan yang menunjukkan tren penurunan dari tahun sebelumnya. Total emisi GRK tahun 2022 memperlihatkan penurunan sebesar 3.447,88 ton CO₂eq dari jumlah tahun sebelumnya atau setara 7,97%. Selain itu, Perseroan juga memasang solar PV *charging station* di lingkungan Stasiun Dukuh Atas dan penandatanganan perjanjian untuk memulai kajian pemanfaatan *rooftop solar panel* yang di dukung oleh United States Trade and Development Agency.

Dari aspek sosial, Perseroan berkomitmen untuk mengelola keselamatan perkertaapiian bagi pengguna jasa yang dilakukan dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pada tahun 2022, penerapan SPM mencapai skor 99,56% berdasarkan penilaian Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Hingga akhir tahun 2022 tidak ada insiden fatalitas akibat kecelakaan kerja untuk seluruh karyawan maupun pekerja bukan karyawan. Perseroan mampu mempertahankan kinerja pengelolaan kecelakaan kerja di area konstruksi, operasi dan Kantor Pusat.

MRT Jakarta melanjutkan inisiatif pemberdayaan UMKM, terdapat 31 pelaku UMKM dalam kategori kuliner, fesyen, dan kriya, yang memanfaatkan beranda peron yang tersedia di stasiun MRT Jakarta, jumlah tersebut meningkat sebesar 23 pelaku UMKM dibandingkan tahun 2021. Selain itu, Perseroan juga masih melanjutkan pengembangan kolaborasi dengan perusahaan rintisan untuk mendorong pembentukan ekonomi digital melalui program MRTJ *Accelerator* dan MRTJ *Incubator*. Tahun 2022, terdapat 33 perusahaan *start up* yang bergabung dalam inisiatif tersebut.

The Corporation has also started to engage in knowledge-based business through consulting and training services for other rail-based transportation operators such as Ho Chi Minh Metro and LRT Palembang in 2022 and will continue to develop in 2023.

Implementation of Environmental, Social and Governance (ESG) Aspects

MRT Jakarta is committed to realizing a sustainable business through a social and environmental responsibility program (TJSL) that supports environmental, social and governance (ESG) management, which has become a concern of stakeholders to contribute to the sustainable development goals (SDGs) achievement. In line with the commitment to implementing the principles of sustainability, MRT Jakarta has also prepared a sustainability roadmap which contains initiatives and targets related to sustainability that MRT Jakarta wishes to achieve in 2030.

In terms of environmental aspect, MRT Jakarta continuously strives to reduce the Corporation's environmental footprint by implementing carbon management by reducing carbon emissions generated from the Corporation's operations. In 2022, MRT Jakarta received a renewable energy certificate (REC) from the State Electricity Company (PLN) for 5,000 MWh of electricity as a source of electricity based on new and renewable energy with zero carbon emission. This effort seems to show favorable results, reflected in the resulting carbon emissions which showed a downward trend from the previous year. Total GHG emissions in 2022 showed a reduction of 3,447.88 tons of CO₂eq from the previous year's amount or the equivalent of 7.97%. In addition, the Corporation also installed a solar PV charging station in the Dukuh Atas Station and signed an agreement to start a study on the use of rooftop solar panels supported by the United States Trade and Development Agency.

In terms of the social aspect, the Corporation is committed to managing railway safety for passengers by implementing minimum service standards (SPM). In 2022, the implementation of SPM reached a score of 99.56% assessed by DKI Jakarta Transportation Agency. Until the end of 2022 there was no fatality incident due to work accidents for all employees and non-employee workers. The Corporation is able to maintain the performance of work accident management in the construction, operation and Head Office areas.

MRT Jakarta continued the MSME empowerment initiative. There were 31 MSME actors in the culinary, fashion and craft categories who occupied spaces at the platforms in MRT Jakarta stations. This number increased by 23 MSMEs compared to 2021. In addition, the Corporation also continued the collaboration with startups to encourage the formation of the digital economy through the MRTJ *Accelerator* and MRTJ *Incubator* programs. In 2022, there were 33 start-ups joining the initiative.



Pada aspek tata kelola, Perseroan berupaya untuk terus meningkatkan kualitas penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Perseroan terus memperkuat penerapan berbagai standar sertifikasi yang telah dimiliki Perseroan, seperti ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan, dan ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Perseroan juga terus meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan ISO 31000:2018 dan penerapan sistem pengendalian internal sesuai standar COSO.

Tahun 2022, Perusahaan kembali melakukan penilaian kualitas penerapan GCG sesuai Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagai acuan. Berdasarkan penilaian dengan menggunakan kriteria tersebut, tahun 2022, Perseroan memperoleh skor sebesar 89,91 dengan predikat "Baik", sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya dimana Perusahaan meraih skor 90,67 dengan predikat "Sangat Baik". Perseroan juga tetap bisa mempertahankan predikat "The Trusted Company" pada ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) dan Majalah SWA.

MRT Jakarta mendorong kepatuhan tentang kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pejabat di lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda) serta Anak Usaha dan Perusahaan Patungan. Pada tahun 2022, jumlah pelaporan LHKPN sebanyak 110 wajib lapor dengan tingkat kepatuhan mencapai 100%. Selain itu, Dewan Komisaris menilai dalam penerapan dan pengelolaan *whistleblowing system* (WBS) di tahun 2022 telah sesuai Pedoman Pelaporan Dugaan Pelanggaran yang disahkan oleh Peraturan Direksi No.18 Tahun 2022. Sepanjang tahun 2022, pengaduan yang diterima sebanyak 10 pengaduan, atau 100% pengaduan selesai ditindaklanjuti. MRT Jakarta secara berkesinambungan terus melakukan inisiatif sosialisasi tersebut kepada para karyawan, di antaranya melalui sosialisasi secara daring dan *e-learning*.

Perubahan Komposisi Direksi

Komposisi Direksi MRT Jakarta mengalami perubahan sesuai Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT MRT Jakarta (Perseroda) tanggal 22 Juli 2022, yang memberhentikan dengan hormat William P. Sabandar sebagai Direktur Utama dan mengangkat M. Aprindy sebagai Direktur Utama. Perubahan komposisi Direksi MRT Jakarta kembali terjadi, sesuai Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 25 Oktober 2022 yang memberhentikan dengan hormat M. Aprindy sebagai Direktur Utama dan mengangkat Tuhayat sebagai Direktur Utama, sehingga komposisi Direksi MRT Jakarta menjadi sebagai berikut:

In terms of the governance aspect, the Corporation strived to continuously improve the quality of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles. The Corporation continued to strengthen the implementation of various certification standards obtained by the Corporation, such as ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System, ISO 9001:2015 Quality Management System, and ISO 14001:2015 Occupational Safety and Health System.

The Corporation also continues to improve the quality of risk management implementation in accordance with the provisions of ISO 31000:2018 and the implementation of internal control systems in accordance with COSO standards

In 2022, the Corporation once again conducted GCG assessment in accordance with the Decree of the Secretary of SOE Ministry No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Good Corporate Governance Implementation in SOEs as a reference. Based on the assessment using these criteria, in 2022, the Corporation obtained a score of 89.91 with a "Good" predicate, slightly lower from the previous year where the Corporation achieved a score of 90.67 with a "Very Good" predicate. The Corporation was also able to maintain the title of "The Trusted Company" at the Corporate Governance Perception Index (CGPI) event organized by The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) and SWA Magazine.

MRT Jakarta encourages officials of PT MRT Jakarta (Perseroda) and its Subsidiaries and Joint Venture Companies to comply with the obligation to submit the State Administration Wealth Report (LHKPN). In 2022, the number of LHKPN reporting was 110 mandatory reports with a compliance level of 100%. Not only that, the Board of Commissioners considers that the implementation and management of the whistleblowing system (WBS) in 2022 was already in accordance with the Guidelines for Reporting Alleged Violations enacted by the Board of Directors' Decree No.18 of 2022. Throughout 2022, 10 complaints were received, or 100% of the complaints were already followed up. MRT Jakarta continuously conducts the dissemination initiatives for employees, including through online dissemination and *e-learning*.

Changes in the Composition of the Board of Directors

The composition of MRT Jakarta Board of Directors changed following the Resolutions of Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT MRT Jakarta (Perseroda) dated July 22, 2022, which honorably discharged William P. Sabandar as President Director and appointed M. Aprindy as President Director. The composition of MRT Jakarta Board of Directors changed again following the Shareholders' Resolution outside the General Meeting of Shareholders on October 25, 2022 which honorably discharged M. Aprindy as President Director and appointed Tuhayat as President Director. Thus, the composition of MRT Jakarta Board of Directors became as follows:

Tuhyat : Direktur Utama
Silvia Halim : Direktur Konstruksi
Muhammad Effendi : Direktur Operasi dan Pemeliharaan
Roy Rahendra : Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi
Farchad H. Mahfud : Direktur Pengembangan Bisnis

Tuhyat : President Director
Silvia Halim : Construction Director
Muhammad Effendi : Operation and Maintenance Director
Roy Rahendra : Finance and Corporate Management Director
Farchad H. Mahfud : Business Development Director

Perubahan komposisi tersebut ditujukan untuk memperkuat manajemen dan mendorong peningkatan kinerja Perseroan. Atas nama Direksi kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada William P. Sabandar dan M. Aprindy atas dedikasi yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan.

The change in composition is aimed at strengthening management and encouraging improvement on the Corporation's performance. On behalf of the Board of Directors, we express our appreciation and gratitude to William P. Sabandar and M. Aprindy for their dedication while serving as the Corporation's President Director.

Apresiasi

MRT Jakarta telah berhasil meraih kinerja yang baik di tahun 2022 yang penuh tantangan. Keberhasilan tersebut tak lepas dari dukungan seluruh Insan MRT Jakarta yang telah bekerja keras dengan dedikasi yang tinggi. Atas nama Perseroan, kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu Perseroan mewujudkan kinerja tersebut, khususnya kepada seluruh pegawai, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, Regulator, Pelanggan, dan Mitra Kerja, serta pihak-pihak lain yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.

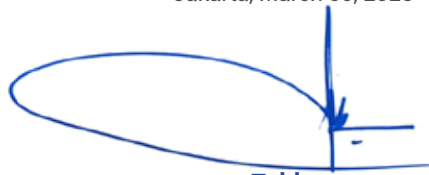
Acknowledgement

MRT Jakarta managed to achieve an encouraging performance in 2022 which was filled with challenges. This success cannot be separated from the support of all MRT Jakarta employees who have worked hard with high dedication. On behalf of the Corporation, we really appreciate and thank all parties who have helped the Company realize this performance, especially to all employees, the Board of Commissioners, Shareholders, Regulators, Customers and Work Partners, as well as other parties we cannot mention one by one.

Semoga kinerja yang baik ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Hopefully this encouraging performance can be maintained and improved in the coming years.

Jakarta, 30 Maret 2023
Jakarta, March 30, 2023



Tuhyat
Direktur Utama
President Director





SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2022 PT MRT JAKARTA (PERSERODA)

STATEMENT OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS ON RESPONSIBILITY FOR THE 2022 ANNUAL REPORT OF PT MRT JAKARTA (PERSERODA)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT MRT Jakarta (Perseroda) Tahun 2022 telah dimuat secara lengkap, dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

We the undersigned, testify that all information in the Annual Report of PT MRT Jakarta (Perseroda) for 2022 is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of contents in the Annual Report and Financial Report of the Corporation.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, 30 Maret 2023
Jakarta, March 30, 2023



DODIK WIJANARKO
Komisaris Utama
President Commissioner



RUKIJO
Komisaris
Commissioner



BAMBANG KRISTIYONO
Komisaris
Commissioner



WILLIAM P. SABANDAR
Komisaris
Commissioner



SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2022 PT MRT JAKARTA (PERSERODA)

STATEMENT OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS ON RESPONSIBILITY FOR THE 2022 ANNUAL REPORT OF PT MRT JAKARTA (PERSERODA)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT MRT Jakarta (Perseroda) Tahun 2022 telah dimuat secara lengkap, dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

We the undersigned, testify that all information in the Annual Report of PT MRT Jakarta (Perseroda) for 2022 is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of contents in the Annual Report and Financial Report of the Corporation.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, 30 Maret 2023
Jakarta, March 30, 2023



TUHIYAT
Direktur Utama
President Director



SILVIA HALIM*
Direktur Kontruksi
Construction Director



MUHAMMAD EFFENDI
Direktur Operasi dan Pemeliharaan
Operation and Maintenance Director



ROY RAHENDRA
Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi
Finance and Corporate Management Director



FARCHAD H. MAHFUD
Direktur Pengembangan Bisnis
Business Development Director

*Periode aktif sampai dengan 16 Februari 2023

*Active period until February 16, 2023



WJ **FATMAWATI
INDOMARET**

03

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

Untuk mewujudkan visi dan misinya, MRT Jakarta melakukan transformasi dan diversifikasi pada tiga poros bisnis yaitu *network provider*, *urban platformer*, dan *city regenerator*, agar dapat terus beradaptasi terhadap berbagai perubahan.

To realize its vision and mission, MRT Jakarta is transforming and diversifying in three business axes, namely network provider, urban platformer, and city regenerator, in order to continue to adapt to various changes.

Informasi Umum Perusahaan

General Information of the Corporation



Nama Perusahaan

Name of Company

PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda)



Bidang Usaha

Business Line

Penyelenggara Sarana dan Prasarana MRT Jakarta serta pengembangan dan pengelolaan Kawasan Berorientasi Transit pada kawasan stasiun MRT Jakarta yang ditetapkan
Operator of MRT Jakarta Facilities and Infrastructure as well as the development and management of Transit Oriented Areas in designated MRT Jakarta station areas



Tanggal Pendirian

Date of Establishment

17 Juni 2008

June 17, 2008



Status Badan Hukum

Status of Legal Entity

- Perseroan Terbatas (PT)
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- Limited Liability Company (PT)
- Regionally Owned Enterprise (ROE)



Dasar Hukum Pendirian dan Perubahan Terakhir

Legal Basis Of Establishment and Latest Amendment

- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) ("PerDa No. 9/2018") yang mencabut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Perda) No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT MRT Jakarta dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT MRT Jakarta.
- Regional Regulation of DKI Jakarta Province No. 9 of 2018 concerning Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) ("PerDa No. 9/2018") which revoked Regional Regulation of DKI Jakarta Province (Perda) No. 3 of 2008 concerning the Establishment of a Regionally Owned Enterprise (BUMD) PT MRT Jakarta and Regional Regulation of DKI Jakarta Province No. 4 of 2008 concerning Regional Equity Participation in PT MRT Jakarta.



Alamat Kantor Pusat

Head Office Address

Wisma Nusantara Lt. 21-22
Jl. M.H. Thamrin No. 59
Jakarta 10350 - Indonesia
P (62)21 - 3103629 | (62)21 - 3906454
F (62)21 - 3155846
Website: <https://www.jakartamrt.co.id/>
Surel/E-mail: corsec@jakartamrt.co.id



Kantor Administrasi Depo

Depot Administration Office

Depo MRT Jakarta - Pintu Timur
Jl. Lebak Indah I
Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak
Jakarta Selatan 12440 - Indonesia



Jumlah Karyawan Tahun 2022

Total Employees in 2022

732 orang
732 employees



Kepemilikan Saham

Share Ownership

- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta - **99,997%**
- Perumda Pasar Jaya - **0,003%**
- DKI Jakarta Provincial Government - 99,997%
- Perumda Pasar Jaya - 0,003%



Modal Dasar

Authorized Capital

Rp40.757.353.000.000
Rp40,757,353,000,000



Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Capital Paid/Issued

Rp17.772.643.000.000
Rp17,772,643,000,000



Media Sosial

Social Media

info@jakartamrt.co.id	jakartamrt.co.id
MRT Jakarta	MRTv
@mrtjakarta	1500 332
mrtjkt & mrtjktinfo	

Riwayat Singkat Perusahaan

Brief History of the Corporation



PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda) selanjutnya disebut “PT MRT Jakarta (Perseroda)”, “MRT Jakarta” dan “Perseroan” didirikan pada 17 Juni 2008 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mass Rapid Transit Jakarta No. 140 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn., di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-36355.AH.01.01 Tahun 2008. Pendirian Perseroan merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta (Perseroda) yang terakhir kali diubah melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 9 Tahun 2018.

PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda) hereinafter referred to as “PT MRT Jakarta (Perseroda)”, “MRT Jakarta” and the “Corporation” was established on June 17, 2008 based on the Deed of Establishment of a Limited Liability Company PT Mass Rapid Transit Jakarta No. 140 passed before Notary Sutjipto, S.H., M.Kn., in Jakarta and has been approved by the Republic of Indonesia Law and Human Rights Minister No. AHU-36355.AH.01.01 Year 2008. The Corporation’s establishment is a follow-up to the issuance of DKI Jakarta Provincial Regulation No. 3 of 2008 concerning the Establishment of a Regionally-Owned Company (BUMD) Limited Liability Company (PT) MRT Jakarta (Perseroda) which was most recently amended by DKI Jakarta Provincial Regulation No. 9 of 2018.



Pengembangan Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta sejatinya sudah direncanakan sejak tahun 1985. Setelah melalui proses kajian dan studi banding, pada tahun 2005, Presiden Republik Indonesia menetapkan Proyek MRT Jakarta merupakan Proyek Strategis Nasional. Langkah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan persetujuan pembiayaan Proyek MRT Jakarta oleh Gubernur Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang pada 28 November 2006.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, didirikanlah PT Mass Rapid Transit Jakarta (Persero) dengan badan hukum Perseroan Terbatas yang mayoritas sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan prasarana, dan pengusahaan prasarana MRT, penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan sarana, pengoperasian sarana, perawatan sarana, dan pengusahaan sarana MRT Jakarta, serta pengembangan dan pengelolaan properti/bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta depo dan kawasan sekitarnya.

Pengerjaan desain dasar jalur pertama dilaksanakan tahun 2010 hingga 2012. Pada tanggal 26 April 2012, pencairan persiapan Proyek MRT Jakarta dilakukan Gubernur DKI Jakarta. Proyek MRT Jakarta dimulai dengan pembangunan jalur MRT Fase 1 sepanjang ± 16 kilometer dari Terminal Lebak Bulus hingga Bundaran HI yang memiliki 13 stasiun dan 1 depo. Konstruksi lintasan MRT Fase 1 tersambung sepenuhnya pada 29 November 2017.

Pada 12 Maret 2019, dilakukan uji coba publik terbatas lintasan MRT Fase 1 yang menghubungkan Stasiun Lebak Bulus - Stasiun Bundaran HI. Setelah diuji coba, pada 24 Maret 2019, jalur tersebut diresmikan Presiden dan selanjutnya dioperasikan untuk khalayak umum.

Setelah Fase 1 resmi beroperasi, pengembangan MRT Fase 2 dimulai. MRT Fase 2 terdiri dari dua tahap, yaitu Fase 2A dan Fase 2B. Fase 2A terdiri dari tujuh stasiun bawah tanah (Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota) dengan total panjang jalur sekitar 5,8 kilometer. Fase 2B terdiri dari dua stasiun bawah tanah (Mangga Dua dan Ancol Marina) dan satu stasiun *at grade*, serta satu depo di Ancol Barat, dengan total panjang jalur sekitar 6,0 kilometer.

Fase 2B sedang dalam tahap proses pengajuan pendanaan menggunakan JICA Loan sejak 2021 dengan dimulainya proses *Contact Mission* dan *Fact Finding Mission*. Telah dilakukan *kick-off meeting* untuk dimulainya JICA Appraisal Mission yang berlangsung hingga ditandatanganinya *Minutes of Discussion* pada Mei 2022.

The Mass Rapid Transit (MRT) development in Jakarta had actually been planned since 1985. After passing through a review and comparative study process, in 2005, the President of the Republic of Indonesia designated the MRT Jakarta Project to be a National Strategic Project. This step was then followed up with the signing of the financing agreement for the MRT Jakarta Project by the Governor of the Japan Bank for International Cooperation (JBIC) and the Indonesian Ambassador to Japan on November 28, 2006.

Based on the agreement, PT Mass Rapid Transit Jakarta (Persero) was established with the legal entity as a Limited Liability Company whose majority shares are owned by the Provincial Government (Pemprov) of DKI Jakarta. The scope of the Corporation's activities is the implementation of urban public railway infrastructure which includes construction of infrastructure, operation of infrastructure, maintenance of infrastructure, and operation of MRT infrastructure, implementation of urban public railway facilities which includes construction of facilities, operation of facilities, maintenance of facilities, and operation of MRT Jakarta facilities, as well as development and property/business management at the stations and the surrounding areas, as well as the depots and the surrounding areas.

The baseline design works for the first track was carried out in 2010 until 2012. On April 26, 2012, the inauguration of MRT Jakarta Project preparation was held by the Governor of DKI Jakarta. MRT Jakarta Project was started by constructing the MRT track Phase 1 with the length of ± 16 kilometer from Lebak Bulus Terminal until Bundaran HI, with 13 stops and 1 depot. The construction of MRT track Phase 1 was completed on November 29, 2017.

On March 12, 2019, a limited public trial for MRT track Phase 1 connecting Lebak Bulus Station - Bundaran HI Station was conducted. After the trial, on March 24, 2019, the track was inaugurated by the President and then opened for public.

After Phase 1 was officially operational, MRT Phase 2 development began. MRT Phase 2, consisting of two stages: Phase 2A and Phase 2B. Phase 2A covers seven underground stations (Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, and Kota) with the total track length of 5.8 kilometers. Phase 2B consists of two underground station (Mangga Dua and Ancol Marina) and one at grade station, and one depot at West Ancol, with the total track length of 6.0 kilometers.

Phase 2B is in the process of applying for funding using JICA Loans since 2021 with the start of the *Contact Mission* and *Fact Finding Mission* processes. A kick-off meeting was held to start the JICA Appraisal Mission which took place until the *Minutes of Discussion* was signed in May 2022.

Selanjutnya, dilakukan serangkaian kegiatan mengenai komitmen Pemerintah Indonesia maupun Jepang termasuk *official request* oleh Pemerintah Indonesia dan penerbitan Pledge oleh Pemerintah Jepang pada November 2022, dimana termasuk pembiayaan untuk *Basic Engineering Design* Fase 2B. Hingga akhir 2022, sedang berlangsung tahap Loan Negotiation yang ditargetkan penandatanganan pinjaman pada Maret 2023.

Pada 24 Juli 2020, dimulai pengerjaan Fase 2A MRT Jakarta, yaitu *Contract Package* (CP) 201, yang meliputi pembangunan lintasan antara Stasiun Bundaran HI hingga Stasiun Monas, serta pembangunan dua stasiun, yaitu Stasiun Thamrin dan Stasiun Monas. Berikutnya, pada 24 April 2021, dilakukan penandatanganan pengerjaan CP 203 Fase 2A MRT Jakarta untuk lintasan antara Stasiun Mangga Besar hingga Stasiun Kota, serta pembangunan Stasiun Glodok dan Stasiun Kota. Pekerjaan CP 202 yang meliputi pembangunan lintasan dan Stasiun dari Stasiun Harmoni hingga Stasiun Mangga Besar telah berkontrak pada 18 Juli 2022. Sampai akhir tahun 2022, perkembangan pembangunan MRT Jakarta Fase 2A pada lintasan Stasiun Bundaran HI - Kota mencapai 18,09%.

Untuk mendukung PT MRT Jakarta (Perseroda) melakukan kerja sama dengan PT KAI (Persero) dalam pengintegrasian perkeretaapian umum di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang meliputi penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyediaan sistem pendukung penyelenggaraan perkeretaapian umum termasuk pengintegrasian dengan moda transportasi lainnya, dan pengusahaan dan pengembangan Kawasan berorientasi transit (KBT), PT MRT Jakarta memiliki anak perusahaan dan ventura bersama (*joint venture*):

1. PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ)

Merupakan perusahaan ventura bersama yang didirikan PT MRT Jakarta (Perseroda) bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan didirikan berdasarkan Akta No. 11 tanggal 11 Februari 2020, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menkumham Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-0008856.AH.01.01.Tahun Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek pada tanggal 12 Februari 2020. MITJ sebagai perusahaan induk dalam bidang transportasi perkeretaapian yang mengelola transportasi perkeretaapian terintegrasi dan *transit oriented development* (TOD) di wilayah Jakarta-bogor-depok-tangerang-bekasi (Jabodetabek).

Furthermore, a series of activities were carried out regarding the commitments of the Government of Indonesia and the Government of Japan including an official request by the Government of Indonesia and the issuance of a Pledge by the Government of Japan in November 2022. This includes financing for Basic Engineering Design of Phase 2B. Until the end of 2022, the Loan Negotiation stage is underway which is targeted for signing of loan contract in March 2023.

On July 24 2020, MRT Jakarta's Phase 2A work, namely Contract Package (CP) 201 was commenced, which included the construction of a track between Bundaran HI Station and Monas Station, and the construction of two stations, namely Thamrin Station and Monas Station. Later, on April 24, 2021, there was a signing of MRT Jakarta's CP 203 Phase 2A work for the line between Mangga Besar Station and Kota Station, as well as the construction of Glodok Station and Kota Station. The Contract for CP 202 work which includes the construction of the track and station from Harmoni Station to Mangga Besar Station has been made on July 18, 2022. Until the end of 2022, the progress of MRT Jakarta Phase 2A construction for Bundaran HI Station - Kota line has reached 18.09%.

To support PT MRT Jakarta (Perseroda) in cooperating with PT KAI (Persero) in the integration of public railways in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi areas which includes the provision of public railway infrastructure and facilities in accordance with the provisions of laws and regulations, the provision of public railway operation support system including integration with other modes of transportation, as well as business operation and development of transit-oriented areas, PT MRT Jakarta has subsidiaries and joint ventures as follows:

1. PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ)

It is a joint venture established by the Corporation and PT Kereta Api Indonesia (Persero) based on the Deed No. 11 dated February 11, 2020 of Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, which has been ratified with the Republic of Indonesia's Law and Human Rights Minister's Decree Number AHU-0008856.AH.01.01.Year 2020 concerning the Ratification of Establishment of Legal Entity Limited Liability Company PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek dated February 12, 2020. MITJ serves as a parent company in the field of rail transportation that manages integrated rail transportation and transit-oriented development (TOD) in the Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) area.



2. PT Integrasi Transit Jakarta (ITJ)

Dibentuk PT MRT Jakarta (Perseroda) bersama PT Transportasi Jakarta pada 6 Oktober 2020 yang didirikan berdasarkan Akta No. 18 tanggal 6 Oktober 2020, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0051263.AH.01.01. Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Integrasi Transit Jakarta tanggal 6 Oktober 2020. Tujuan pendirian ITJ adalah mengelola KBT dan melaksanakan penyelenggaraan termasuk namun tidak terbatas pada pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan KBT di sepanjang koridor MRT Jakarta.

3. PT Jakarta Lingko Indonesia (JakLingko Indonesia)

Berdiri berdasarkan Akta No. 78 tanggal 30 Desember 2020, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menkumham RI No. AHU-0070252. AH.01.01. Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Jakarta Lingko Indonesia tanggal 30 Desember 2020, JakLingko Indonesia merupakan ventura bersama antara PT MRT Jakarta (Perseroda), PT Jakarta Propertindo (Perseroda), PT Transportasi Jakarta, dan PT MITJ. Tujuan PT Jaklingko ialah sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang sistem pembayaran antar moda melalui metode elektronifikasi integrasi pembayaran transportasi umum.

2. PT Integrasi Transit Jakarta (ITJ)

It was established by the Corporation and PT Transportasi Jakarta based on the Deed No. 18 dated October 6, 2020 of Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, which has been ratified with the the Republic of Indonesia's Law and Human Rights Minister's Decree Number AHU-0051263.AH.01.01.Year 2020 concerning the Ratification of Establishment of Legal Entity Limited Liability Company PT Integrasi Transit Jakarta dated October 6, 2020. Its establishment is aimed at managing TOD areas and carrying out the implementation including but not limited to the construction, management, and development of TOD along the MRT Jakarta corridor.

3. PT Jakarta Lingko Indonesia (JakLingko Indonesia)

It was established based on the Deed No. 78 dated December 30, 2020 of Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, which has been ratified with the Republic of Indonesia's Law and Human Rights Minister's Decree Number AHU-0070252.AH.01.01.Year 2020 concerning the Ratification of Establishment of a Legal Entity Limited Liability Company PT Jakarta Lingko Indonesia dated December 30, 2020, JakLingko Indonesia is a joint venture between PT MRT Jakarta (Perseroda), PT Jakarta Propertindo (Perseroda), PT Transportasi Jakarta, and PT MITJ. The purpose of PT Jaklingko is to become a company engaging in the field of intermodal payment system through the electronification method of integrating payment for Jakarta public transportation and its development.

Dengan menjadi perusahaan Induk, akan memudahkan MRT Jakarta untuk mengelola aspek integrasi, baik tarif maupun pengembangan kawasan transit transportasi publik, di dalam area Jabodetabek.

Becoming a holding company will make it easier for MRT Jakarta to manage aspects of integration, both tariffs and the development of public transportation transit areas, within Jabodetabek.

Jejak langkah Milestones

Studi Kelayakan MRT (subway) oleh Tim Studi JICA, menekankan pentingnya pembangunan subway di Jakarta dan perlunya keterlibatan pemerintah dalam pembiayaan.

MRT (Subway) Feasibility Study conducted by JICA Study Team, which emphasized the importance of subway construction in Jakarta and the requirement of the government involvement in terms of financing.

2000

Studi JICA pada Integrated Transportation Master Plan II menekankan prioritas pada pembangunan subway.

JICA Study on Integrated Transportation Master Plan II emphasized the priority of subway construction.

2002

Departemen Perhubungan mengeluarkan Studi Implementation Program for Jakarta MRT System (Lebak Bulus-Dukuh Atas).

Transportation Ministry released the Implementation Program Study for the Jakarta MRT System (Lebak Bulus-Dukuh Atas).

2004

Studi oleh Tim Special Assistance for Project Formation (SAPROF) dari JBIC untuk memfasilitasi pembentukan kesepakatan di antara pemangku kepentingan atas proyek ini di Indonesia.

A study by Special Assistance for Project Formation (SAPROF) Team from JBIC to facilitate the agreement among stakeholders for the project in Indonesia.

2005

2017

- Seluruh rangkaian jalur layang dan bawah tanah MRT Jakarta Koridor Bundaran HI-Lebak Bulus telah tersambung.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan PT MRT Jakarta (Persero) sebagai Operator Utama Pengelola Kawasan Berorientasi Transit Koridor Utara-Selatan Fase 1 MRT Jakarta.
- All elevated and underground lines of MRT Jakarta for Bundaran HI-Lebak Bulus Corridor were connected.
- The Government of DKI Jakarta Province assigned PT MRT Jakarta (Persero) as the Main Operator Responsible for Managing the North-South Corridor of the Transit-Oriented Development Area of MRT Jakarta Phase 1.

2016

- TBM Antareja dan Antareja II berhasil menembus Stasiun Senayan-Istora-Bendungan Hilir dari lokasi awal pengoperasian TBM di titik Patung Pemuda Senayan.
- TBM Mustikabumi I dan Mustikabumi II mulai bekerja dari titik Stasiun Bundaran HI dan berhasil membuat terowongan jalur bawah tanah menembus Stasiun Dukuh Atas menuju Stasiun Setiabudi, tempat berakhirnya seluruh pekerjaan terowongan jalur bawah tanah.
- Antareja and Antareja II TBMs successfully tunneled from Senayan-Istora-Bendungan Hilir Stations from TBM launching point in Patung Pemuda Senayan.
- Mustikabumi I and Mustikabumi II TBMs started to tunnel from Bundaran HI Station and successfully tunneled to Dukuh Atas Station towards Setiabudi Station, the meeting point of all tunnelling works

2015

Beroperasinya *Tunnel Boring Machines* (TBM) Antareja untuk konstruksi bawah tanah. Peresmian dilakukan Presiden Joko Widodo.

Operation of Antareja Tunnel Boring Machines (TBM) for underground construction, which was inaugurated by President Joko Widodo.

2014

Proyek MRT Jakarta mendapatkan pengakuan internasional sebagai salah satu proyek dari 20 proyek infrastruktur di dunia.

MRT Jakarta Project gained international recognition as one of the 20 best infrastructure projects in the world.

2018

- Tersambungnya seluruh rel dari Stasiun Bundaran HI-Depo Lebak Bulus.
- Dimulainya pengujian pertama prasarana MRT oleh DJKA dan serangkaian uji operasi di jalur utama.
- All rails were successfully linked from Bundaran HI Stations to Lebak Bulus Depot.
- Commencement of the first trial of MRT infrastructures by DJKA and a series of operational tests in the mainline.

2019

- Peresmian MRT Jakarta Fase 1 dan Pencanangan MRT Jakarta Fase 2.
- MRT Jakarta Fase 1 beroperasi penuh.
- Inauguration of Phase 1 MRT Jakarta and Launching of Phase 2 MRT Jakarta.
- Full operation of MRT Jakarta Phase 1.

2020

- Dimulainya pekerjaan konstruksi MRT Jakarta Fase 2.
- Pembentukan satu anak usaha PT Integrasi Transit Jakarta (ITJ) dan dua perusahaan patungan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) dan PT Jakarta Lingko Indonesia (JakLingko Indonesia).
- Menjalankan bisnis "beyond normal".
- Menjalankan operasi dengan Protokol BANGKIT.
- Menciptakan inovasi bisnis melalui MRTJ Accelerator dan Incubator.
- Commencement of construction works for Phase 2 MRT Jakarta.
- Establishment of a subsidiary PT Integrasi Transit Jakarta (ITJ) and two joint ventures PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) and PT Jakarta Lingko Indonesia (JakLingko Indonesia).
- Operated the business "beyond normal".
- Implemented BANGKIT Protocols in operations.
- Created business innovation through MRTJ Accelerator and Incubator.



Loan Agreement Tahap 1 (IP-536) sebesar ¥1.869 miliar untuk pembiayaan, ditandatangani berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati dalam *Minutes of Discussion* (MoD) dan *Memorandum on Engineering Services* (MoES).

Phase 1 Loan Agreement (IP-536) of JPY 1,869 billion for financing was signed based on the terms agreed in the Minutes of Discussion (MoD) and Memorandum on Engineering Services (MoES).

PT MRT Jakarta berdiri pada 17 Juni 2008, setelah mendapatkan persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan BUMD PT MRT Jakarta dan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT MRT Jakarta.

PT MRT Jakarta was established on June 17, 2008 upon the approval of DKI Jakarta's Regional People's Representative Assembly through the issuance of Regional Regulation No. 3 Year 2008 regarding the Establishment of Regionally-Owned Enterprise PT MRT Jakarta and Regional Regulation Number 4 Year 2008 regarding Regional Capital Investment in PT MRT Jakarta.

Loan Agreement Tahap 2 senilai ¥48,15 miliar untuk pinjaman tahap konstruksi sebagai bagian kedua dari total pinjaman untuk Proyek MRT.

Phase 2 Loan Agreement of JPY 48.15 billion for the loan for the construction phase as the second part of the total loans for MRT Project.

Minutes of Discussion (MoD) antara JICA, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bappenas, dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. MoD membahas perpanjangan rute MRT koridor Selatan-Utara Fase 1 dari Lebak Bulus-Dukuh Atas menjadi Lebak Bulus-Bundaran HI.

Minutes of Discussion (MoD) between JICA, the Government of DKI Jakarta Province, Bappenas, and Directorate General of Railways of the Transportation Ministry. The MoD discussed the route extension of the South-North MRT corridor of Phase 1 from Lebak Bulus-Dukuh Atas to Lebak Bulus-Bundaran HI.

2006

2008

2009

2010

2013

Proyek MRT Jakarta memasuki tahap konstruksi (peletakan batu pertama).

The MRT Jakarta Project commenced the construction phase (ground-breaking).

2012

Pengumuman nama-nama nominasi konsorsium pemenang lelang 3 (tiga) Paket Bawah Tanah. Konsorsium pertama yang mengerjakan Paket (CP 104 dan CP 105) adalah Shimizu Obayashi sebagai *leader*-nya dengan anggota Wijaya Karya dan Jaya Konstruksi *Joint Venture*. Sementara untuk (CP 106) adalah Konsorsium Sumitomo Mitsui Construction Company (SMCC) bersama Hutama Karya *Joint Operation*.

Announcement of the nomination of winning consortiums in the tender for 3 (three) Underground Packages. The first consortium for Package (CP 104 and CP 105) was led by Shimizu Obayashi with membership comprising the Joint Venture of Wijaya Karya and Jaya Konstruksi. The winner for (CP 106) is Sumitomo Mitsui Construction Corporation (SMCC) Consortium with Hutama Karya Joint Operation.

2011

Pelaksanaan kegiatan lelang fisik Proyek MRT dilaksanakan karena telah mempunyai payung hukum yang menyatakan pemberian kewenangan kepada PT MRT Jakarta untuk seluruh kegiatan MRT, termasuk proses *tender*.

Physical tender of MRT Project was executed upon the issuance of the legal ground that granted authority to PT MRT Jakarta for all MRT activities, including the tender process.

2021

- Melanjutkan pekerjaan konstruksi CP 201 (Bundaran HI - Thamrin), dan memulai pekerjaan konstruksi CP 203 (Glodok - Kota).
- Pembukaan Kawasan Integrasi Halte CSW - Stasiun ASEAN.
- Penguatan transformasi digital di berbagai aspek korporasi (Konstruksi, Operasi, dan Bisnis).
- Tibanya *tunnel boring machine* (TBM) untuk Stasiun Thamrin dan Stasiun Monas.
- Peletakan batu pertama Simpang Temu Dukuh Atas, Simpang Temu Lebak Bulus, dan Taman Martha Tiahahu.
- Peresmian Integrasi Transportasi Jabodetabek.
- Continuing the construction of CP 201 (Bundaran HI - Thamrin) and starting the construction of CP 203 (Glodok - Kota).
- Launching of Integrated Area of CSW Bus Stop - ASEAN Station.
- Strengthening of digital transformation at various corporate aspects (Construction, Operations, and Business).
- Arrival of tunnel boring machine (TBM) for Thamrin Station and Monas Station.
- Groundbreaking of Dukuh Atas Transport Hub, Lebak Bulus Transport Hub, and Martha Tiahahu Park.
- Inauguration of Transportation Integration in Greater Jakarta Area.

2022

- Melanjutkan pekerjaan konstruksi CP 201 (Bundaran HI - Thamrin), CP 203 (Glodok - Kota) dan dimulainya pekerjaan konstruksi CP202 (Harmoni - Mangga Besar);
- Selesaiannya pembangunan terowongan sisi utara dan selatan yang menghubungkan Stasiun Monas dan Stasiun Thamrin menggunakan mesin bor TBM 2;
- Penerapan tarif terintegrasi transportasi publik di Jakarta yang berlaku untuk moda transportasi MRT Jakarta, Transjakarta, dan LRT Jakarta.
- Continuing the construction work of CP 201 (Bundaran HI - Thamrin), CP 203 (Glodok - Kota) and the commencement of CP202 (Harmoni - Mangga Besar) construction work;
- Completion of tunnel construction on the north and south sides connecting Monas and Thamrin Station using a TBM 2 machine;
- Implementation of integrated tariffs for public transportation in Jakarta applying for MRT Jakarta, Transjakarta and LRT Jakarta modes of transportation.

Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan

Corporate Vision, Mission, and Values



VISI VISION

Menjadi penyedia sarana transportasi publik terdepan, yang berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas, pengurangan kemacetan, dan pengembangan sistem transit perkotaan.

To become the leading public transportation provider, committed to encouraging a sustainable economic growth through mobility improvement, reduction of traffic congestion, and the development of urban transit systems.



MISI MISSION

Mencapai keunggulan yang berkesinambungan di semua elemen kinerja, melalui:

- 1. Pengembangan dan pengoperasian jaringan transportasi publik yang aman, terpercaya, dan nyaman;**
- 2. Menghidupkan kembali lingkungan perkotaan melalui pengembangan transit perkotaan ternama; dan**
- 3. Membangun reputasi sebagai perusahaan pilihan dengan melibatkan, menginspirasi, dan memotivasi tenaga kerja kami.**

To strive for excellence sustainably in all our undertakings through:

1. Development and operation of a safe, trusted, and reliable public transportation network;
2. Urban regeneration through prominent urban-transit developments; and
3. Building reputation as a preferred Corporation by involving, inspiring, and motivating our manpower.

Visi dan Misi Perseroan merupakan pedoman bagi para karyawan serta pemangku kepentingan akan pandangan manajemen. Oleh karena itu, Perseroan terus melakukan evaluasi secara berkala untuk menghasilkan visi dan misi yang memenuhi tujuan bisnis saat ini dan di periode yang akan datang. Perseroan menilai elemen bisnis internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi tujuan strategis Perseroan, Visi, Misi dan Nilai-nilai saat ini masih selaras dengan tujuan bisnis sebagaimana tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2022-2030.

Vision and Mission of the Corporation are the guidelines for the employees and stakeholders concerning the view of the corporate management. Therefore, the Corporation will evaluate the vision and mission periodically to develop vision and mission that fulfill the business objectives in the present and the future. The Corporation assessed its vision and mission statements by analyzing the internal and external business factors that may influence the strategic objectives of the Corporation. The current Vision, Mission, and Values of the Corporation are aligned with the business objectives of the Corporation as defined in the Corporate Long Term Plan (RJPP) 2022 - 2030.



NILAI-NILAI PERSEROAN

CORPORATE VALUES

Nilai-nilai Perseroan ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi No. 003 Tahun 2018 tentang Penetapan *Core Values* Perseroan dan *Leadership Competences* di Lingkungan PT MRT Jakarta (Persero). *Core Values* I CAN diterapkan sejalan dengan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia Tahun 2021 tentang empat prinsip dasar governansi korporat, yakni Perilaku Beretika, Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan.

The Corporate Values were established based on the Board of Directors' Decree No. 003 Year 2018 concerning the Establishment of Corporate Core Values and Leadership Competencies in PT MRT Jakarta (Persero). The I CAN core values are implemented in line with the four fundamental principles of corporate governance: Ethical Conduct, Transparency, Accountability, and Sustainability.



Nilai-nilai Perseroan
Corporate Values

I

Integrity

Setiap insan Perseroan secara konsisten menampilkan sikap jujur dan "satu kata dengan perbuatan" sesuai dengan pedoman perilaku dan tata kelola perusahaan.

Each employee of the Corporation must demonstrate honesty and "their words must align with their actions" according to the code of conduct and corporate governance.

C

Customer Focus

Setiap insan Perseroan menampilkan sikap proaktif dalam memahami, membantu, & melayani kebutuhan pelanggan serta membangun relasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan.

Each employee of the Corporation must be proactive in understanding, assisting, and meeting customers' requirements and building good relationship with all stakeholders.

A

Achievement Orientation

Setiap insan Perseroan memiliki semangat untuk berprestasi dan berani menghadapi tantangan dengan cara kerja yang efektif dan efisien.

Each employee of the Corporation must have the spirit to strive for achievement and to face challenges by applying effective and efficient way of work.

N

Nurturing Teamwork

Setiap insan Perseroan menghargai perbedaan & kontribusi setiap individu serta membangun komitmen untuk bersinergi secara produktif.

Each employee of the Corporation must appreciate diversity and contribution of other individuals and commit to create productive synergy.

Perilaku Beretika Ethical Conduct

Senantiasa mengedepankan kejujuran, *respect*, memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten.

Always prioritizing honesty, respect, fulfilling commitments, building and maintaining moral values and trust consistently.

Akuntabilitas Accountability

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan tanggungjawab organisasi yang memungkinkan pengelolaan perusahaan terlaksana secara transparan, wajar dan efektif.

Clarity of functions, implementation and organizational responsibilities that enable the Corporation management to be carried out in a transparent, fair and effective manner.

Transparansi Transparency

Penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Provision of material and relevant information in a way that is easily accessible and understandable to stakeholders.

Keberlanjutan Sustainability

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Compliance with laws and regulations and commitment to carrying out responsibilities towards society and the environment as well as contributing to sustainable development.

Kegiatan dan Bidang Usaha Perseroan

Corporate Activities and Business Lines



Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang tertuang dalam Akta Pendirian No. 140 Tanggal 17 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., M.Kn. yang telah mendapatkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-36355.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, yang mana terhadap kegiatan usaha Perseroan diubah terakhir kali melalui Akta No. 41 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Miryani Usman, S.H. di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-007295.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda), maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan dan pengusahaan prasarana;
2. Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan sarana, pengoperasian sarana, perawatan dan pengusahaan sarana;
3. Pengembangan dan pengelolaan properti atau bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta depo dan karyawan sekitarnya.

Under the Corporation's Articles of Association as stated in the Deed of Establishment No. 140 dated June 17, 2008 passed before Sutjipto, S.H., M.Kn. which has obtained the decision of the Republic of Indonesia's Law and Human Rights Minister pursuant to the Decree No. AHU-36355.AH.01.01 of 2008 dated June 27, 2008 concerning Ratification of Corporate Legal Entity, where the Corporation's business activities have been most recently amended by Deed No. 41 dated December 22, 2021 passed before Notary Miryani Usman, S.H. in Jakarta and approved by the Republic of Indonesia's Law and Human Rights Minister pursuant to the Decree No. AHU-007295.AH.01.02 of 2021 dated December 27, 2021 concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of Limited Liability Company PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda), the goals and objectives of the Corporation are as follows:

1. Management of urban public railway infrastructure, which includes infrastructure development, infrastructure operations, infrastructure maintenance, and commercialization;
2. Management of urban public railway facilities, which includes facility procurement, facility operations, and facility maintenance and commercialization;
3. Development and management of properties or businesses in the stations, Depot, and the surrounding areas.



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan dan bidang usaha sebagai berikut:

1. Konstruksi Gedung Lainnya;
2. Instalasi Telekomunikasi;
3. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri;
4. Instalasi Listrik;
5. Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over* dan *Under Pass*;
6. Konstruksi Jalan Rel;
7. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal;
8. Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta;
9. Aktivitas Stasiun Kereta Api;
10. Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api;
11. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi;
12. Aktivitas *Bounded Warehousing* atau Wilayah Kawasan Berikat;
13. Konstruksi Gedung Perkantoran;
14. Angkutan Jalan Rel Perkotaan;
15. Konstruksi Terowongan;
16. Angkutan Multimoda;
17. Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa;
18. Periklanan;
19. Industri Perlengkapan Komputer;
20. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel;
21. Jasa Multimedia Lainnya;
22. Aktivitas Konsultasi Transportasi;
23. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;
24. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI;
25. Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis;
26. Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik;
27. Aktivitas Pengolahan Data;
28. Portal Web dan/atau *Platform* Digital Tanpa Tujuan Komersial;
29. Portal Web dan/atau *Platform* Digital Dengan Tujuan Komersial;
30. Pelatihan Kerja Teknik Swasta;
31. Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta;
32. Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta;
33. Pelatihan Kerja Swasta Lainnya;
34. Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan;
35. Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi;
36. Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan;
37. Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya; dan
38. Angkutan Jalan Rel Untuk Barang.

To achieve the goals and objectives, the Corporation carries out business activities and business sectors as follows:

1. Other Building Construction;
2. Telecommunication Installation;
3. Telecommunications Activities specifically For Own Needs;
4. Electricity Installation;
5. Civil Building Construction of Bridge, Elevated Road, Flyover, and Underpass;
6. Railway Construction;
7. Electrical Civil Building Construction;
8. Train Locomotive and Car Industry;
9. Railway Station Activities;
10. Railway Signal and Telecommunication Installation;
11. Telecommunication Civil Building Construction for Transportation Infrastructures;
12. Bounded Warehousing or Bounded Zone Activities;
13. Office Building Construction;
14. Urban Railway Transportation;
15. Tunnel Construction;
16. Multi-mode Transportation
17. Owned or Leased Real Estate;
18. Advertising;
19. Computer Accessories Industry;
20. Cable Telecommunication Activities;
21. Other Multimedia Services;
22. Transportation Consultation Activities;
23. Other Management Consultation Activities;
24. Engineering and Relevant Technical Consultation Activities;
25. Business Consultation and Business Broker Activities;
26. Electronic Certificate Provision and Services Using Electronic Certificate Activities;
27. Data Processing Activities;
28. Web Portal and/or Digital Platform Without Commercial Purposes;
29. Web Portal and/or Digital Platform With Commercial Purposes;
30. Private Engineering Professional Training;
31. Private Information and Communication Technology Professional Training;
32. Private Business and Management Professional Training;
33. Other Private Professional Trainings;
34. Corporate Engineering Professional Trainings;
35. Information and Communication Technology Professional Training;
36. Corporate Business and Management Professional Training;
37. Other Corporate Professional Trainings; and
38. Railway Logistics.

Keanggotaan Asosiasi

Association Membership

Perseroan bergabung dalam sejumlah organisasi dan asosiasi baik tingkat nasional maupun internasional sebagai bagian dari upaya untuk terus meningkatkan layanan kepada pelanggan. Melalui organisasi dan asosiasi tersebut Perseroan dapat melakukan benchmarking dan saling berbagi *best practice*, serta agar selalu mendapatkan informasi perkembangan industri.

Hingga akhir tahun 2022, Perseroan bergabung dalam organisasi dan asosiasi, antara lain:

The Corporation is a member of several organizations and associations both nationally and internationally as part of the efforts to continuously improve services to customers. Through these organizations and associations, the Corporation can perform benchmarking and share best practices with each other, and continuously get information on industry developments.

Until the end of 2022, the Corporation is a member of the following organizations and associations:

Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)

Anggota
Member

Community of Metros (CoMET)

Anggota
Member

Union Internationale des Transport Publics (UITP)

Anggota
Member

Intelligent Transport System (ITS Indonesia)

Anggota
Member

Asosiasi Pengguna Jasa Security Indonesia

Anggota
Member

Persatuan Insinyur Indonesia

Anggota
Member

Selain memperluas jaringan bisnis, MRT Jakarta juga memperoleh berbagai informasi dan perkembangan industri dari asosiasi yang diikutinya.

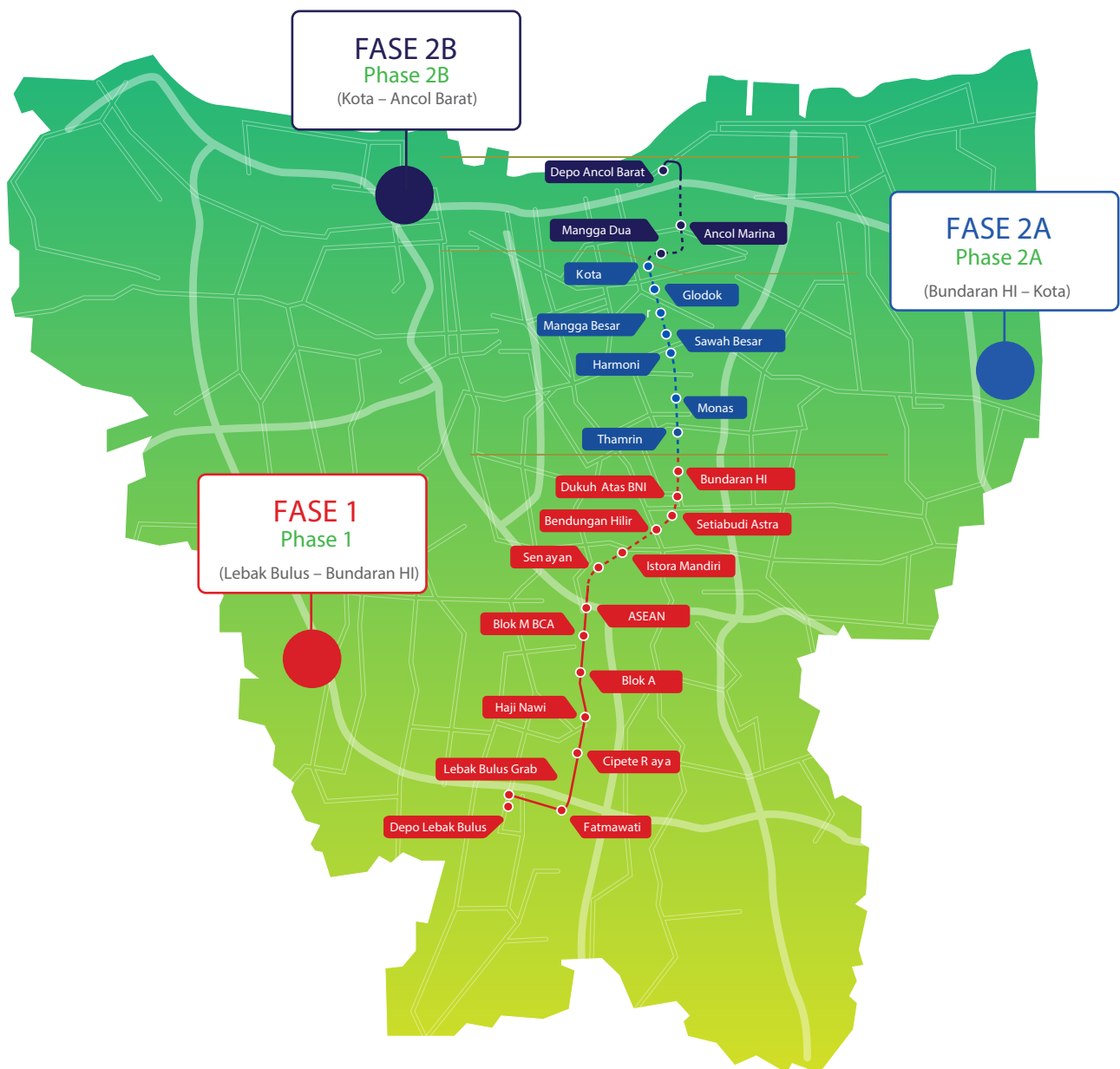
Apart from expanding its business network, MRT Jakarta also obtains various information and industrial developments from the associations the Corporation participates in.

Wilayah Operasi Perseroan

Corporate Operational Area

Wilayah operasi Perseroan berada di DKI Jakarta, Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2022, MRT Jakarta tidak memiliki wilayah operasi di daerah lain, maupun di luar wilayah Indonesia.

The operational area of the Corporation is DKI Jakarta, Indonesia. As of the end of 2022, the Corporation does not operate in other area nor outside Indonesia.

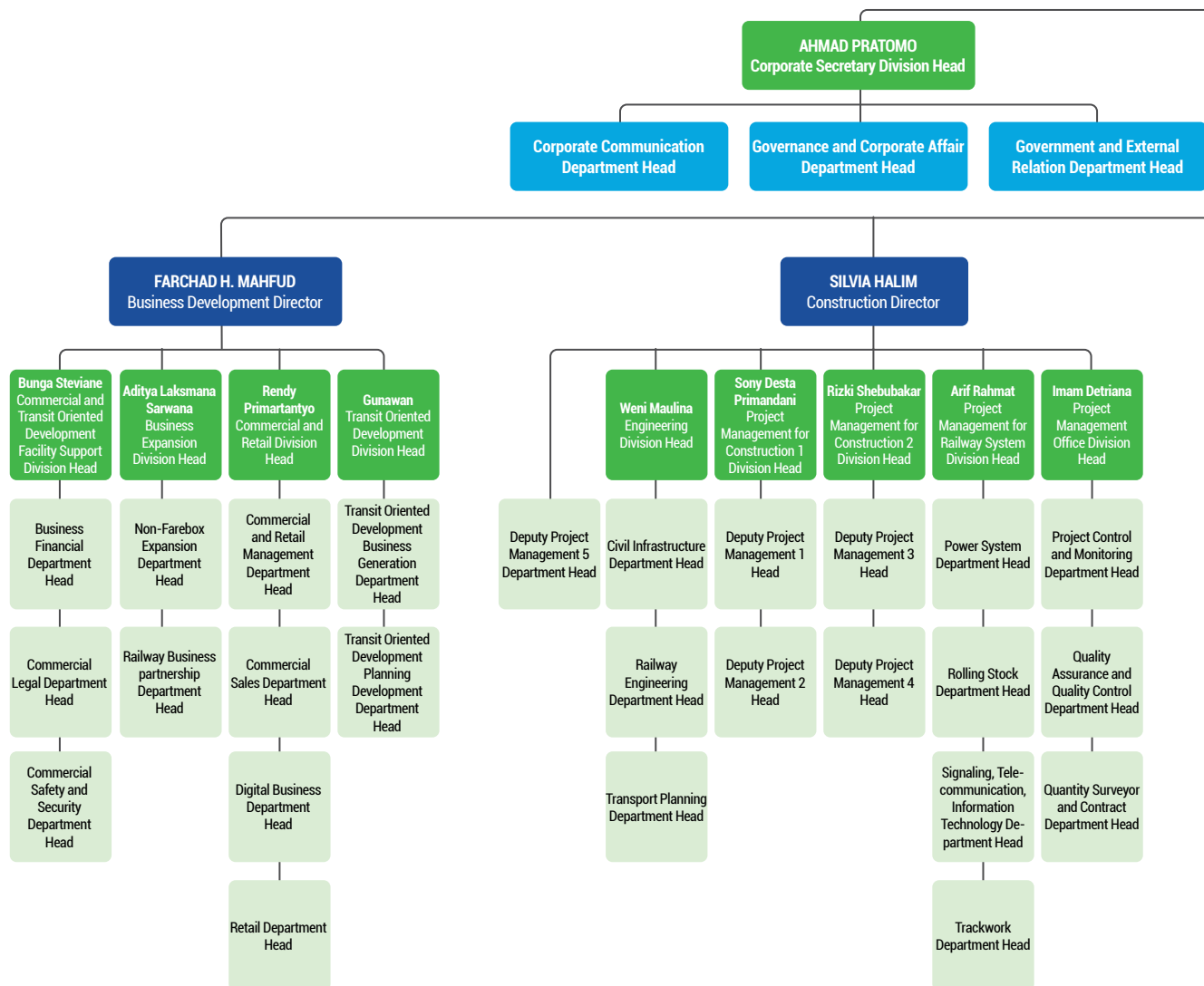


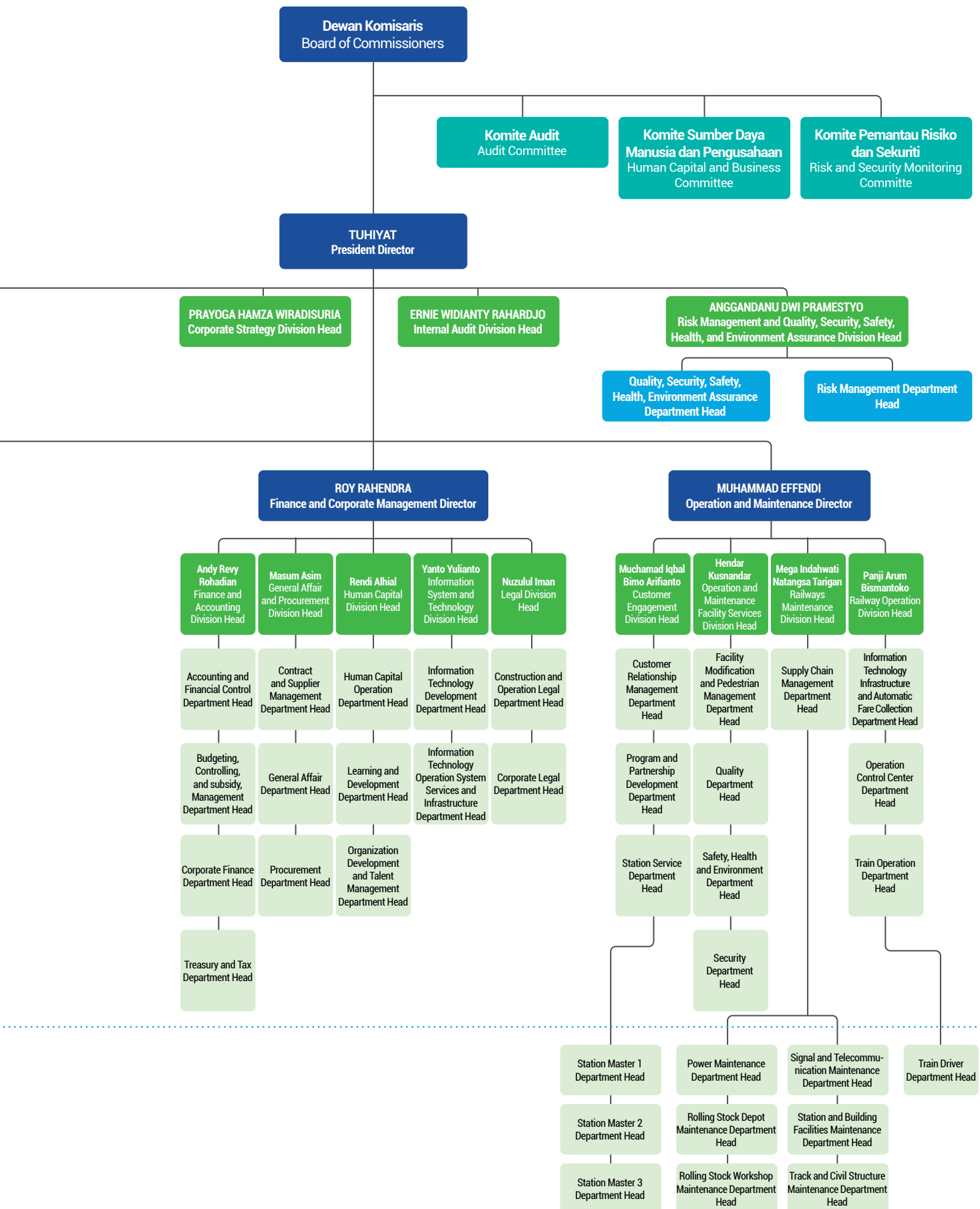
Struktur Organisasi

Organizational Structure

Struktur Organisasi yang berlaku di tahun 2022, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 053 Tahun 2021

The Organizational Structure applied in 2022, based on the Board of Directors Decision Letter No. 053 Year 2021





Dewan Komisaris

The Board of Commissioners



●
RUKIJO
Komisaris
Commissioner

●
BAMBANG KRISTIYONO
Komisaris
Commissioner

●
DODIK WIJANARKO
Komisaris Utama
President Commissioner

●
WILLIAM P. SABANDAR
Komisaris
Commissioner



Direksi

The Board of Directors



FARCHAD H. MAHFUD
Direktur Pengembangan Bisnis
Business Development Director

MUHAMMAD EFFENDI
Direktur Operasi dan
Pemeliharaan
Operation and Maintenance
Director

TUHIYAT
Direktur Utama
President Director

SILVIA HALIM
Direktur Konstruksi
Construction Director

ROY RAHENDRA
Direktur Keuangan dan
Manajemen Korporasi
Finance and Corporate
Management Director

Perubahan Komposisi Manajemen Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, Pemegang Saham terus memperkuat jajaran manajemen MRT Jakarta dengan melakukan sejumlah pergantian dengan kronologis sebagai berikut:

1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sirkuler pada 22 Juli 2022, memutuskan:
 - a. Memberhentikan dengan hormat Sdr. William Sabandar selaku Direktur Utama;
 - b. Mengangkat Sdr. Mohamad Aprindy sebagai Direktur Utama; dan
 - c. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Zulfikri selaku Komisaris.
2. Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT MRT Jakarta (Perseroda) tanggal 25 Oktober 2022, memutuskan:
 - a. Memberhentikan dengan hormat:
 - i) Sdr. Muhammad Syaugi sebagai Komisaris Utama;
 - ii) Sdr. Adnan Pandu Praja sebagai Komisaris;
 - iii) Sdr. Mukhtasor sebagai Komisaris; dan
 - iv) Sdr. Mohamad Aprindy sebagai Direktur Utama.
 - b. Mengangkat:
 - i) Sdr. Dodik Wijanarko sebagai Komisaris Utama;
 - ii) Sdr. Bambang Kristiyono sebagai Komisaris;
 - iii) Sdr. William Sabandar sebagai Komisaris; dan
 - iv) Sdr. Tuhiyat sebagai Direktur Utama.

Changes to Management Composition in 2022

Throughout 2022, Shareholders continued to strengthen MRT Jakarta's management by making some changes as shown in the following chronological order:

1. Circular Resolution of Shareholders on July 22, 2022 decided to:
 - a. Respectfully dismiss Mr. William Sabandar as President Director;
 - b. Appoint Mr. Mohamad Aprindy as President Director; and
 - c. Respectfully dismiss Mr. Zulfikri as Commissioner.
2. Shareholders Resolution outside the General Meeting of Shareholders of PT MRT Jakarta (Perseroda) on October 25, 2022, decided to:
 - a. Respectfully dismiss:
 - i) Mr. Muhammad Syaugi as President Commissioner;
 - ii) Mr. Adnan Pandu Praja as Commissioner;
 - iii) Mr. Mukhtasor as Commissioner; and
 - iv) Mr. Mohamad Aprindy as President Director.
 - b. Appoint:
 - i) Mr. Dodik Wijanarko as President Commissioner;
 - ii) Mr. Bambang Kristiyono as Commissioner;
 - iii) Mr. William Sabandar as Commissioner; and
 - iv) Mr. Tuhiyat as President Director.

Tabel Komposisi Manajemen Tahun 2022
Management Composition Table 2022

Jabatan Position	Periode 1 Januari 2022 - 22 Juli 2022 Period of January 01, 2022 - July 22, 2022	Periode 22 Juli 2022 - 25 Oktober 2022 Period of July 22, 2022 - October 25, 2022	Periode 25 Oktober 2022 - sekarang Period of October 25, 2022 - present
Dewan Komisaris/Board of Commissioners			
Komisaris Utama President Commissioner	Muhammad Syaugi	Muhammad Syaugi	Dodik Wijanarko
Komisaris Commissioner	Rukijo	Rukijo	Rukijo
Komisaris Commissioner	Adnan Pandu Praja	Adnan Pandu Praja	William P. Sabandar
Komisaris Commissioner	Mukhtasor	Mukhtasor	Bambang Kristiyono
Komisaris Commissioner	Zulfikri		
Direksi/Board of Directors			
Direktur Utama President Director	William P. Sabandar	Mohamad Aprindy	Tuhiyat
Direktur Konstruksi Construction Director	Silvia Halim	Silvia Halim	Silvia Halim
Direktur Operasi dan Pemeliharaan Operation and Maintenance Director	Muhammad Effendi	Muhammad Effendi	Muhammad Effendi
Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi Finance and Corporate Management Director	Roy Rahendra	Roy Rahendra	Roy Rahendra
Direktur Pengembangan Bisnis Business Development Director	Farchad H. Mahfud	Farchad H. Mahfud	Farchad H. Mahfud



Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Profile



DODIK WIJANARKO

Komisaris Utama
President Commissioner

Kewarganegaraan
Indonesia

Tempat Tanggal Lahir
Kediri, 3 Januari 1963

Usia
59 tahun

Domisili
DKI Jakarta

Riwayat Penunjukan
Menjabat pada jajaran Komisaris Perseroan untuk periode ke-1 sesuai Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT MRT Jakarta tanggal 25 Oktober 2022.

Riwayat Pendidikan dan Sertifikasi yang Dimiliki

- Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana (2005)
- Akademi Militer (1985)
- Certified Forensic Auditor (CFrA)

Riwayat Pekerjaan

- Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (2020-2021)
- Staf Khusus Panglima TNI (2018-2020)
- Inspektur Jenderal TNI (2017-2018)
- Komandan Polisi Militer TNI (2015-2017)
- Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (2015)

Rangkap Jabatan

- Komisaris Utama PT Mina Marret Energi Indonesia (2022-sekarang)
- Komisaris PT Kideco Jaya Agung (2021-sekarang)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali.

Nationality
Indonesia

Place/Date of Birth
Kediri, January 3, 1953

Age
59 years old

Domicile
DKI Jakarta

History of Appointment
Serving as the Corporation's Board of Commissioners for the 1st period in accordance with the Resolution of Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT MRT Jakarta dated October 25, 2022.

Educational History and Certifications Owned

- Bachelor of Law from Krisnadwipayana University (2005)
- Military Academy (1985)
- Certified Forensic Auditor (CFrA)

History of Employment

- Commander of the Central Army Military Police (2020-2021)
- Special Staff of the TNI Commander (2018-2020)
- Inspector General of the TNI (2017-2018)
- TNI Military Police Commander (2015-2017)
- Commander of the Central Army Military Police (2015)

Concurrent Position

- President Commissioner of PT Mina Marret Energi Indonesia (2022-present)
- Commissioner of PT Kideco Jaya Agung (2021-present)

Affiliation
Has no affiliation with members of the Board of Directors, fellow members of the Board of Commissioners, principal and controlling shareholders.

RUKIJO
Komisaris
Commissioner



Kewarganegaraan
Indonesia

Tempat Tanggal Lahir
Metro, 1 Februari 1967

Usia
55 tahun

Domisili
Pamulang, Tangerang, Banten

Riwayat Penunjukan
Menjabat pada jajaran Komisaris Perseroan untuk periode ke-2 sesuai Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT MRT Jakarta terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2020.

Riwayat Pendidikan dan Sertifikasi yang Dimiliki

- Doktor (S3) Ilmu Ekonomi, Universitas Padjadjaran (2019)
- Magister (S2) Manajemen, Universitas Muhammadiyah Jakarta (2007)
- Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Lampung (1990)

Riwayat Pekerjaan

- Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan (2020-sekarang)
- Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (2016-2019)
- Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (2014-2016)
- Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (2013-2014)
- Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Transfer II Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (2009-2013)

Rangkap Jabatan
Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenkeu (2020-sekarang).

Hubungan Afiliasi
Rukijo memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama Pengendali melalui jabatan pada Kementerian Keuangan sebagai bagian dari entitas pemilik akhir Perseroan. Jabatan Rukijo sebagai Komisaris Perseroan telah melalui uji kepatutan dan kelayakan.

Selain itu, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi.

Nationality
Indonesia

Place/Date of Birth
Metro, February 1, 1967

Age
55 years old

Domicile
Pamulang, Tangerang, Banten

History of Appointment
Serving as the Corporation's Board of Commissioners for the 2nd period in accordance with the Resolution of Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT MRT Jakarta dated August 19, 2020.

Educational History and Certifications Owned

- Doctor of Economics from Padjadjaran University (2019)
- Master of Management from University of Muhammadiyah Jakarta (2007)
- Bachelor of Economics majoring in Economics and Development Studies from Lampung University (1990)

History of Employment

- Head of Human Resource Bureau of the Finance Ministry (2020-present)
- Secretary of Directorate General of Fiscal Balance of the Finance Ministry (2016-2019)
- Director of Balance Fund of the Directorate General of Fiscal Balance of the Finance Ministry (2014-2016)
- Director of Regional Tax and Retributions of the Directorate General of Fiscal Balance of the Finance Ministry (2013-2014)
- Head of Transfer II Sub-directorate of the Directorate General of Fiscal Balance of the Finance Ministry (2009-2013)

Concurrent Position
Head of Human Resource Bureau of the Finance Ministry (2020-present).

Affiliation
Rukijo is affiliated with the Principal and Controlling Shareholder through his position in the Finance Ministry as part of the Corporation's ultimate beneficial owners. His position as a Commissioner has passed the fit-and-proper test.

Has no affiliation with fellow members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.



WILLIAM P. SABANDAR

Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan
Indonesia

Tempat Tanggal Lahir
Makassar, 4 November 1966

Usia
56 tahun

Domisili
Tangerang Selatan, Banten

Riwayat Penunjukan
Menjabat pada jajaran Komisaris Perseroan untuk periode ke-1 sesuai Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT MRT Jakarta tanggal 25 Oktober 2022.

- Riwayat Pendidikan dan Sertifikasi yang Dimiliki**
- Doktor (S3) Geografi Transportasi, Universitas Caterbury, Selandia Baru (2004)
 - Master (S2) Teknik Transportasi, Universitas New South Wales, Australia (2000)
 - Sarjana (S1) Teknik Sipil, Universitas Hasanuddin (1990)

- Riwayat Pekerjaan**
- Direktur Utama PT MRT Jakarta (2016-2022)
 - Penasihat Senior Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, merangkap Kepala Satuan Tugas Nasional Percepatan Pembangunan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (2015-2016)
 - Kepala Operasi Satuan Tugas Nasional REDD+ (2014-2015)
 - Asisten Ahli Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) (2012-2014)
 - Direktur Corporate Affairs Sekretariat ASEAN (2011-2012)
 - Utusan Khusus Sekretaris Jenderal ASEAN merangkap Kepala Operasi untuk Rekonstruksi Myanmar (2009-2010)
 - Kepala Rekonstruksi Kepulauan Nias (2005-2009)

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan, baik di dalam maupun di luar PT MRT Jakarta (Persero).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, pemegang saham utama dan pengendali.

Nationality
Indonesia

Place/Date of Birth
Makassar, November 4, 1966

Age
56 years old

Domicile
South Tangerang, Banten

History of Appointment
Serving as the Corporation's Board of Commissioners for the 1st period in accordance with the Resolution of Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT MRT Jakarta dated October 25, 2022.

- Educational History and Certifications Owned**
- Doctor of Transportation Geography from the University of Canterbury, New Zealand (2004)
 - Master of Transportation Engineering from the University of New South Wales, Australia (2000)
 - Bachelor of Civil Engineering from Hasanuddin University (1990)

- History of Employment**
- President Director of PT MRT Jakarta (2016-2022)
 - Senior Advisor to the Energy and Mineral Resources Minister and concurrently Head of the National Task Force for the Accelerated Development of Renewable Energy and Energy Conservation (2015-2016)
 - Operations Head for the National REDD+ Task Force (2014 - 2015)
 - Expert Assistant to the Head of Presidential Work Unit for Development Monitoring and Control (UKP4) (2012-2014)
 - Corporate Affairs Director for the ASEAN Secretariat (2011-2012)
 - Special Representative of the Secretary-General of ASEAN and concurrently Head of Operations for Myanmar Reconstruction (2009-2010)
 - Head of Nias Islands Reconstruction (2005-2009)

Concurrent Position
Has no concurrent position in and outside PT MRT Jakarta (Persero).

Affiliation
Has no affiliation with members of the Board of Directors, fellow members of the Board of Commissioners, principal and controlling shareholders.

BAMBANG KRISTIYONO

Komisaris
Commissioner



Kewarganegaraan
Indonesia

Tempat Tanggal Lahir
Bojonegoro, 15 Januari 1964

Usia
58 tahun

Domisili
Tambun Selatan, Bekasi, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Menjabat pada jajaran Komisaris Perseroan untuk periode ke-1 sesuai Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT MRT Jakarta tanggal 25 Oktober 2022.

Riwayat Pendidikan dan Sertifikasi yang Dimiliki

- Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (2011)
- Sekolah Staf dan Pimpinan (2003)
- Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (1996)
- Akademi Kepolisian (1988)

Riwayat Pekerjaan

- Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (2020-2022)
- Staf Khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2016-2022)
- Direktur Sengketa dan Konflik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2014-2016)
- Kepala Bidang Jasmani Akademi Kepolisian Semarang (2014)
- Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur (2013-2014)

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan, baik di dalam maupun di luar PT MRT Jakarta (Perseroda).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali.

Nationality
Indonesia

Place/Date of Birth
Bojonegoro, January 15, 1964

Age
58 years old

Domicile
South Tambun, Bekasi, Indonesia

History of Appointment
Serving as the Corporation's Board of Commissioners for the 1st period in accordance with the Resolution of Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT MRT Jakarta dated October 25, 2022.

Educational History and Certifications Owned

- School of Staff and Leadership (2011)
- School of Staff and Leadership (2003)
- College of Police Science (1996)
- Police Academy (1988)

History of Employment

- Head of North Kalimantan Regional Police (2020-2022)
- Special Staff of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (2016-2022)
- Director of Disputes and Conflicts of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (2014-2016)
- Head of the Physical Division of the Semarang Police Academy (2014)
- Directorate of General Criminal Reserse of the Republic of Indonesia National Police, East Java Region (2013-2014)

Concurrent Position
Has no concurrent position in and outside PT MRT Jakarta (Perseroda).

Affiliation
Has no affiliation with members of the Board of Directors, fellow members of the Board of Commissioners, principal and controlling and major shareholders.



DEWAN KOMISARIS TERDAHULU PREVIOUS BOARD OF COMMISSIONERS



MUHAMMAD SYAUGI*)

Komisaris Utama
Commissioner

Kewarganegaraan
Indonesia

Tempat Tanggal Lahir
Malang, 10 Desember 1960

Usia
62 tahun

Domisili
Bekasi, Jawa Barat

Riwayat Penunjukan
Menjabat pada jajaran Komisaris Perseroan untuk periode ke-1 sesuai Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT MRT Jakarta tanggal 31 Mei 2019.

Riwayat Pendidikan dan Sertifikasi yang Dimiliki

- Magister (S2) Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta (2014)
- Sarjana (S1) Sosial Politik, Universitas Merdeka Madiun (1998)

Riwayat Pekerjaan

- Kepala Badan SAR Nasional (2017-2019)
- Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI (2014-2017)
- Atase Pertahanan RI untuk Rusia (2003-2007)
- Komandan Skwadron Udara 3/F-16 (1990-an-2002)
- Sesko TNI AL angkatan 36 (1999)

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan, baik di dalam maupun di luar PT MRT Jakarta (Perseroda).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali.

*) menjabat hingga 25 Oktober 2022

Nationality
Indonesia

Place/Date of Birth
Malang, December 10, 1960

Age
62 years old

Domicile
Bekasi, West Java

History of Appointment
Serving as the Corporation's Board of Commissioners for the 1st period in accordance with the Shareholders' Resolution outside the General Meeting of Shareholders of PT MRT Jakarta dated May 31, 2019.

Educational History and Certifications Owned

- Master of Management from IMMI Jakarta College of Management (2014)
- Bachelor of Social Politics from Merdeka Madiun University (1998)

History of Employment

- Head of National SAR Agency (2017-2019)
- Director-General of Defense Planning at the Republic of Indonesia Defense Ministry (2014- 2017)
- Indonesian Defense Attache to Russia (2003- 2007)
- Commander of the 3/F-16 Air Squadron (1990s-2002)
- Indonesian Navy Special Forces 36 (1999)

Concurrent Position
Has no concurrent position in and outside PT MRT Jakarta (Perseroda).

Affiliation
Has no affiliation with members of the Board of Directors, fellow members of the Board of Commissioners, principal and major shareholders.

*) served until October 25, 2022

ADNAN PANDU PRAJA*)

Komisaris
Commissioner



Kewarganegaraan
Indonesia

Tempat Tanggal Lahir
Jakarta, 14 Januari 1960

Usia
62 tahun

Domisili
Depok, Jawa Barat

Riwayat Penunjukan

Menjabat pada jajaran Komisaris Perseroan untuk periode ke-1 sesuai Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT MRT Jakarta tanggal 31 Mei 2019.

Riwayat Pendidikan dan Sertifikasi yang Dimiliki

- Magister (S2) Fakultas Hukum, University of Technology, Sydney (2003)
- Sarjana (S1) Hukum, Universitas Indonesia (1986)

Riwayat Pekerjaan

- Penulis artikel di sejumlah media massa nasional
- Staf Khusus Menteri Perindustrian RI (2016-2017)
- Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (2011-2015)
- Praktisi hukum di sejumlah kantor hukum, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) (1990-an dan 2000-an)
- Pendiri Indonesian Student Association for International Studies (ISAFIS), serta menjadi penyunting Jurnal Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (1980-an)

Rangkap Jabatan

- Komisaris PT Taspen Properti Indonesia (2019-sekarang)
- Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2018-sekarang)

Hubungan Afiliasi

Adnan Pandu Praja memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama Pengendali, melalui jabatan Panitia Seleksi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari entitas pemilik akhir Perseroan. Jabatan Adnan Pandu Praja sebagai Komisaris Perseroan telah melalui uji kepatutan dan kelayakan.

Selain itu, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi.

*) menjabat hingga 25 Oktober 2022

Nationality
Indonesia

Place/Date of Birth
Jakarta, January 14, 1960

Age
62 years old

Domicile
Depok, West Java

History of Appointment

Serving as the Corporation's Board of Commissioners for the 1st period in accordance with the Resolution of Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT MRT Jakarta dated May 31, 2019.

Educational History and Certifications Owned

- Master of Law from the University of Technology, Sydney (2003)
- Bachelor of Law from the University of Indonesia (1986)

History of Employment

- Writer of articles for several national mass media publications
- Special Staff Member to the Minister of Industry of the Republic of Indonesia (2016-2017)
- Deputy-Chairman of the Corruption Eradication Commission (KPK) of the Republic of Indonesia (2011-2015)
- A legal practitioner for many law offices and the Capital Market Legal Consultants Association (HKHPM) (1990s and 2000s)
- Founder of the Indonesian Student Association for International Studies (ISAFIS) and was the editor of the Law and Development Journal for the Faculty of Law at the University of Indonesia (1980s)

Concurrent Position

- Commissioner of PT Taspen Properti Indonesia (2019-present)
- Open Selection Committee for Middle and First Leadership Position for the Government of DKI Jakarta Province (2018-present)

Affiliation

Adnan Pandu Praja is affiliated with the Principal and Controlling Shareholder through his position in the Open Selection Committee for the Government of DKI Jakarta Province as part of the Corporation's ultimate beneficial owners. His position as a Commissioner has passed the fit and proper test.

Has no affiliation with fellow members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors.

*) served until October 25, 2022



MUKHTASOR^{*)}

Komisaris Utama
Commissioner

Kewarganegaraan
Indonesia

Tempat Tanggal Lahir
Blitar, 20 April 1969

Usia
53 tahun

Domisili
Sukolilo, Jawa Timur

Riwayat Penunjukan
Menjabat pada jajaran Komisaris Perseroan untuk periode ke-1 sesuai Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT MRT Jakarta tanggal 29 Oktober 2018.

Riwayat Pendidikan dan Sertifikasi yang Dimiliki

- Doktor (S3) Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Sains Terapan, Universitas Memorial Newfoundland, Canada (2001)
- Magister (S2) Teknik, Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Sains Terapan, Universitas Memorial Newfoundland (MUN), Canada (1998)
- Sarjana (S1) Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) (1993)

Riwayat Pekerjaan

- Guru Besar, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya (2009-sekarang)
- Anggota Dewan Penasihat Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015-2017)
- Penasihat Senior Direktur Utama PT Pertamina (2015-2016)
- Anggota Dewan Energi Nasional (2009-2014)

Rangkap Jabatan
Guru Besar di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya (2009-sekarang).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali.

^{*)} menjabat hingga 25 Oktober 2022

Nationality
Indonesia

Place/Date of Birth
Blitar, April 20, 1969

Age
53 years old

Domicile
Sukolilo, East Java

History of Appointment
Serving as the Corporation's Board of Commissioners for the 1st period in accordance with the Resolution of Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT MRT Jakarta dated October 29, 2018.

Educational History and Certifications Owned

- Doctor of Civil Engineering from the Faculty of Engineering and Applied Science, Memorial University of Newfoundland, Canada (2001)
- Master of Civil Engineering from the Faculty of Engineering and Applied Science, Memorial University of Newfoundland, Canada (1998)
- Bachelor of Chemical Engineering, Faculty of Industrial Technology from Sepuluh November Institute of Technology (ITS) (1993)

History of Employment

- Professor at Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya (2009-present)
- Member of the Minister's Advisory Council at the Environment and Forestry Ministry (2015-2017)
- Senior Advisor to the President Director of PT Pertamina (2015-2016)
- Member of the Indonesian National Energy Board (2009-2014)

Concurrent Position
Professor at Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya (2009-present).

Affiliation
Has no affiliation with members of the Board of Directors, fellow members of the Board of Commissioners, principal and controlling shareholders.

^{*)} served until October 25, 2022

ZULFIKRI)**
Komisaris
Commissioner



Kewarganegaraan
Indonesia

Tempat Tanggal Lahir
Lintau, 9 Juli 1962

Usia
60 tahun

Domisili
Tangerang Selatan, Banten

Riwayat Penunjukan
Menjabat pada jajaran Komisaris Perseroan untuk periode ke-1 sesuai Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT MRT Jakarta tanggal 4 Mei 2018.

Riwayat Pendidikan dan Sertifikasi yang Dimiliki

- Magister (S2) Ekonomi Transportasi, Program Pasca Sarjana Universitas LYON II ENTREQ, Prancis (1997)
- Magister (S2) Sistem dan Teknik Jalan Raya, Program Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung (1990)
- Sarjana (S1) Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Bandung (ITB) (1987)

Riwayat Pekerjaan

- Direktur Jenderal Perkeretaapian (2017-sekarang)
- Direktur Prasarana Perkeretaapian (Mei-November 2017)
- Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Mei 2016-Mei 2017)
- Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Multimoda (Februari 2014-Mei 2016)
- Kepala Bagian Perencanaan (Januari 2011-Februari 2014)

Rangkap Jabatan
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (2017-sekarang)

Hubungan Afiliasi
Zulfikri memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama Pengendali, melalui jabatan pada Kementerian Perhubungan sebagai entitas pemilik akhir Perseroan. Jabatan Zulfikri sebagai Komisaris Perseroan telah melalui uji kepatutan dan kelayakan. Selain itu, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi.

***) menjabat hingga 22 Juli 2022

Nationality
Indonesia

Place/Date of Birth
Lintau, July 9, 1962

Age
60 years old

Domicile
South Tangerang, Banten

History of Appointment
Serving as the Corporation's Board of Commissioners for the 1st period in accordance with the Resolution of Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT MRT Jakarta dated May 4, 2018.

Educational History and Certifications Owned

- Master of Transportation Economics, LYON II ENTREQ University, France (1997)
- Master of Road Systems and Engineering, Postgraduate Program at the Bandung Institute of Technology, Bandung (1990)
- Bachelor of Civil Engineering and Planning, Bandung Institute of Technology (ITB) (1987)

History of Employment

- Director-General of Railways (2017-present)
- Railway Infrastructure Director (May-November 2017)
- Railway Traffic and Transportation Director (May 2016-May 2017)
- Multimodal Research and Development Center Head (February 2014-May 2016);
- Planning Head (January 2011-February 2014)

Concurrent Position
Director General of Railways for the Transportation Ministry (2017-present)

Affiliation
Zulfikri is affiliated with the Principal and Controlling Shareholder through his position in the Ministry of Transportation as part of the Corporation's ultimate beneficial owners. His position as a Commissioner has passed the relevant fit-and-proper test. Has no affiliation with fellow members of the Board of Commissioners or Board of Directors.

***) served until July 22, 2022

Pernyataan Independensi Komisaris Independen/Independent Commissioner's Independency Statement

MRT Jakarta tidak memiliki Komisaris Independen, karena tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan MRT Jakarta untuk mengangkat Komisaris Independen. Dengan demikian, tidak terdapat pengungkapan pernyataan independensi Komisaris Independen yang dapat disampaikan pada laporan ini. Namun demikian, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota Dewan Komisaris MRT Jakarta harus bersikap independen dan terbebas dari berbagai kepentingan.

MRT Jakarta does not have an Independent Commissioner, due to the absence of laws and regulations that oblige MRT Jakarta to appoint an Independent Commissioner. Thus, there is no disclosure of the Independent Commissioner's independency statement that can be submitted in this report. However, in carrying out their duties and responsibilities, all members of MRT Jakarta Board of Commissioners must act independently and be free from various interests.



Profil Direksi

Board of Directors' Profile



TUHIYAT

Direktur Utama
President Director

Kewarganegaraan
Indonesia

Tempat Tanggal Lahir
Serang, 2 Februari 1965

Usia
57 tahun

Domisili
Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan untuk periode ke-1 sesuai Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT MRT Jakarta tanggal 20 April 2020.

Riwayat Pendidikan dan Sertifikasi yang Dimiliki

- Master Management (S2), Universitas Krisnadwipayana (2000)
- Sarjana (S1) Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1994)
- Certified Management Accountant (CMA)

Riwayat Pekerjaan

- Direktur Utama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (2020–2022)
- Direktur Keuangan dan Administrasi PT MRT Jakarta (Perseroda) (2013–2020)
- Senior Manager Treasury, Tax, and Insurance PT Antam (Persero) Tbk (2008-2012)
- Senior Manager Accounting and Budgeting PT Antam (Persero) Tbk (2006-2008)
- Asisten Senior Manager Accounting PT Antam (Persero) Tbk (2005-2006)
- Manajer Accounting PT Antam (Persero) Tbk (2004-2005)
- Senior Internal Auditor PT Antam (Persero) Tbk (2001-2004)
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (1987-2001)

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan, baik di dalam maupun di luar PT MRT Jakarta (Perseroda).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali.

Nationality
Indonesia

Place/Date of Birth
Serang, February 02, 1965

Age
57 years old

Domicile
South Tangerang, Banten, Indonesia

History of Appointment
Serving as the Corporation's President Director for the 1st period in accordance with the Resolution of Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT MRT Jakarta dated April 20, 2020.

Educational History and Certifications Owned

- Master of Management (S2) from Krisnadwipayana University (2000)
- Bachelor of Accounting from State College of Accountancy (STAN) (1994)
- Certified Management Accountant (CMA)

History of Employment

- President Director of PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (2020–2022)
- Director of Finance and Administration of PT MRT Jakarta (Perseroda) (2013–2020)
- Senior Manager Treasury, Tax, and Insurance of PT Antam (Persero) Tbk (2008-2012)
- Senior Manager of Accounting and Budgeting of PT Antam (Persero) Tbk (2006-2008)
- Assistant Senior Manager of Accounting of PT Antam (Persero) Tbk (2005-2006)
- Accounting Manager of PT Antam (Persero) Tbk (2004-2005)
- Senior Internal Auditor of PT Antam (Persero) Tbk (2001-2004)
- Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) (1987-2001)

Concurrent Position
Has no concurrent position in and outside PT MRT Jakarta (Perseroda).

Affiliation
Has no affiliation with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, principal and controlling shareholders.

SILVIA HALIM
Direktur Konstruksi
Construction Director



Kewarganegaraan
Indonesia

Tempat Tanggal Lahir
Jakarta, 18 Juni 1982

Usia
40 tahun

Domisili
Denpasar, Bali

Riwayat Penunjukan
Menjabat sebagai Direktur Konstruksi Perseroan untuk periode ke-2 sesuai Keputusan RUPS Luar Biasa PT MRT Jakarta tanggal 21 Maret 2018.

Riwayat Pendidikan dan Sertifikasi yang Dimiliki
Sarjana (S1) Teknik jurusan Teknik Sipil, Nanyang Technological University, Singapura (2004)

Riwayat Pekerjaan
Project Manager, Road Projects Group di Land Transport Authority (LTA) Singapura, (2004-2016)

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan, baik di dalam maupun di luar PT MRT Jakarta (Persero).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali.

Nationality
Indonesia

Place/Date of Birth
Jakarta, June 18, 1982

Age
40 years old

Domicile
Denpasar, Bali

History of Appointment
Serving as the Corporation's Construction Director for the 2nd period according to PT MRT Jakarta Extraordinary General Meeting of Shareholders Decision dated March 21, 2018.

Educational History and Certifications Owned
Bachelor of Engineering majoring in Civil Engineering from Nanyang Technological University, Singapore (2004)

History of Employment
Project Manager of Road Projects Group in Singapore's Land Transport Authority (LTA), (2004 - 2016)

Concurrent Position
Has no concurrent position in and outside PT MRT Jakarta (Persero).

Affiliation
Has no affiliation with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, principal and controlling shareholders.



MUHAMMAD EFFENDI

Direktur Operasi dan Pemeliharaan
Operation and Maintenance Director

Kewarganegaraan
Indonesia

Tempat Tanggal Lahir
Palembang, 1 Maret 1964

Usia
58 tahun

Domisili
Jagakarsa, DKI Jakarta

Riwayat Penunjukan
Menjabat sebagai Direktur Operasi dan Pemeliharaan Perseroan untuk periode ke-1 sesuai Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS PT MRT Jakarta tanggal 29 Oktober 2018.

Riwayat Pendidikan dan Sertifikasi yang Dimiliki

- Magister (S2) Management, Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI)-Monash (2003)
- Diploma di bidang Occupational Safety and Health (K3), Australian Center for Work Safety Australia (1998)
- Sarjana (S1) Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Katolik Parahyangan (1989)

Riwayat Pekerjaan

- Kepala Divisi Manajemen Proyek untuk Konstruksi 2 PT MRT Jakarta (Perseroda) (2017-2018)
- Kepala Divisi dan Penasehat Konstruksi di Rasgas Corporate Ltd di Qatar (2005-2017)
- Direktur dan Manager di sejumlah Perseroan (1997-2005)

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan, baik di dalam maupun di luar PT MRT Jakarta (Perseroda).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali.

Nationality
Indonesia

Place/Date of Birth
Palembang, March 01, 1964

Age
58 years old

Domicile
Jagakarsa, DKI Jakarta

History of Appointment
Serving as the Corporation's Director of Operations and Maintenance for the 1st period in accordance with the Shareholders' Decision outside the GMS of PT MRT Jakarta dated October 29, 2018.

Educational History and Certifications Owned

- Master in Management, Indonesian Institute for Management Development (IPMI) - Monash (2003)
- Diploma in Occupational Safety and Health (K3) from the Australian Center for Work Safety, Australia (1998)
- Bachelor of Civil Engineering from the Faculty of Engineering, Parahyangan Catholic University, Bandung (1989)

History of Employment

- Project Management for Construction 2 Division Head of PT MRT Jakarta (Perseroda) (2017- 2018)
- Division Head and Construction Advisor for Rasgas Corporation Ltd in Qatar (2005-2017)
- Director and Manager for several companies (1997-2005)

Concurrent Position
Has no concurrent position in and outside PT MRT Jakarta (Perseroda).

Affiliation
Has no affiliation with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, principal and controlling shareholders.

ROY RAHENDRA

Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi
Finance and Corporate Management Director



Kewarganegaraan
Indonesia

Tempat Tanggal Lahir
Semarang, 07 September 1970

Usia
52 tahun

Domisili
Tangerang Selatan, Banten

Riwayat Penunjukan
Menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi Perseroan untuk periode ke-1 sesuai Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS PT MRT Jakarta tanggal 20 April 2020.

Riwayat Pendidikan dan Sertifikasi yang Dimiliki

- Magister (S2) Perdagangan, Universitas New South Wales, Australia (2002)
- Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1998)

Riwayat Pekerjaan

- National Programme Manager (NPM) untuk Partnership for Market Readiness (PMR) di United Nations Development Programme (UNDP) (2017-2020)
- Chief Technical Advisor (NPM) untuk REDD+ Program, di United Nations Development Programme (UNDP) (2015-2016)
- Penjabat - Kepala Sekretariat, Badan Pengelola REDD+ (2013-2015)
- Asisten Kepala, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) (2010-2011)
- Project Management Advisor, Asian Development Bank (ADB) (2009-2010)
- Direktur Keuangan dan Pendanaan, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh-Nias (2006-2009)

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan, baik di dalam maupun di luar PT MRT Jakarta (Persero).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali.

Nationality
Indonesia

Place/Date of Birth
Semarang, September 07, 1970

Age
52 years old

Domicile
South Tangerang, Banten

History of Appointment
Serving as the Corporation's Director of Finance and Corporate Management for the 1st period in accordance with the Resolution of Shareholders Outside the GMS of PT MRT Jakarta dated April 20, 2020.

Educational History and Certifications Owned

- Master in Trade from the University of New South Wales, Australia (2002)
- Indonesian State College of Accountancy (STAN) Jakarta, Indonesia (1998)

History of Employment

- National Program Manager (NPM) for the Partnership for Market Readiness (PMR) at the United Nations Development Program (UNDP) (2017-2020)
- Chief Technical Advisor (NPM) for REDD+ Program at the United Nations Development Program (UNDP) (2015-2016)
- Officer - Secretariat Head, REDD+ Management Agency (2013-2015)
- Assistant Deputy, Presidential Work Unit for the Monitoring and Control of Development (UKP4) (2010-2011)
- Project Management Advisor, Asian Development Bank (ADB) (2009-2010)
- Director of Finance and Funding, Aceh-Nias Reconstruction and Rehabilitation Agency (2006-2009)

Concurrent Position
Has no concurrent position in and outside PT MRT Jakarta (Persero).

Affiliation
No affiliation with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, principal and controlling shareholders.



FARCHAD H. MAHFUD

Direktur Pengembangan Bisnis
Business Development Director

Kewarganegaraan
Indonesia

Tempat Tanggal Lahir
Jakarta, 18 Oktober 1975

Usia
47 tahun

Domisili
Cipayung, DKI Jakarta

Riwayat Penunjukan
Menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis Perseroan untuk periode ke-1 sesuai Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS PT MRT Jakarta tanggal 5 Februari 2021.

Riwayat Pendidikan dan Sertifikasi yang Dimiliki

- Magister (S2) dan Doktor (S3) PhD di Bidang Chemical/Process Engineering, University of Groningen, Netherlands (2002-2006)
- Magister (S2) di Bidang Chemical/Process Engineering, Institut Teknologi Bandung (2000-2002)
- Sarjana (S1) di Bidang Chemical/Process Engineering, Institut Teknologi Bandung (1995-2000)

Riwayat Pekerjaan

- Head of Division Business Development and External Affair PT Surya Esa Perkasa Tbk (2018-2021)
- Head of Unit Middle East Investment Unit Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI (2015-2016)
- Staf Ahli Koordinator Prioritas Nasional Infrastruktur, Ketahanan Pangan, Energi Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) (2010-2014)

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan, baik di dalam maupun di luar PT MRT Jakarta (Persero).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali.

Nationality
Indonesia

Place/Date of Birth
Jakarta, October 18, 1975

Age
47 years old

Domicile
Cipayung, DKI Jakarta

History of Appointment
Serving as the Corporation's Director of Business Development for the 1st period in accordance with the Shareholders' Resolution outside the GMS of PT MRT Jakarta dated February 5, 2021.

Educational History and Certifications Owned

- Master and Doctor of Chemical/Process Engineering from the University of Groningen, the Netherlands (2002-2006)
- Master of Chemical/Process Engineering from Bandung Technological Institute (2000-2002)
- Bachelor of Chemical/Process Engineering from Bandung Technological Institute (1995-2000)

History of Employment

- Head of Business Development and External Affair Division for PT Surya Esa Perkasa Tbk (2018-2021)
- Head of Middle East Investment Unit, Energy and Mineral Resources Ministry of the Republic of Indonesia (2015-2016)
- Expert Staff of the Coordinator of National Priorities of Infrastructures, Food Security, and Energy for the Presidential Work Unit of Development Oversight and Control (UKP4) (2010-2014)

Concurrent Position
Has no concurrent position in and outside PT MRT Jakarta (Persero).

Affiliation
Has no affiliation with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, principal and controlling shareholders.

DIREKSI TERDAHULU PREVIOUS DIRECTORS

MOHAMAD APRINDY*)

Direktur Utama
President Director



Kewarganegaraan
Indonesia

Tempat Tanggal Lahir
Sampit, 12 April 1966

Usia
56 tahun

Domisili
Depok, Jawa Barat

Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan untuk periode ke-1 sesuai Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS PT MRT Jakarta tanggal 22 Juli 2022.

Riwayat Pendidikan dan Sertifikasi yang Dimiliki

- Magister (S2) Magister Teknik Universitas Tarumanegara (2004)
- Sarjana (S1) Teknik Sipil Universitas Sriwijaya (1989)

Riwayat Pekerjaan

- Direktur Teknik dan Pengembangan - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (2021-2022)
- Komisaris Independen - PT Widodo Makmur Unggas, Tbk (2020-2021)
- Komisaris Utama PT PP Energi (2019-2020)
- Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis - PT PP (Persero) (2018-2019)
- Direktur Gedung - PT PP (Persero) (2017-2018)
- Direktur Pemasaran - PT PP (Persero) (2016-2017)

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan, baik di dalam maupun di luar PT MRT Jakarta (Perseroda).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, pemegang saham utama dan pengendali.

*) menjabat dari 22 Juli 2022 hingga 25 Oktober 2022

Nationality
Indonesia

Place/Date of Birth
Sampit, April 12, 1966

Age
56 years old

Domicile
Depok, West Java

History of Appointment

Serving as the Corporation's President Director for the 1st period in accordance with the Resolution of Shareholders outside the GMS of PT MRT Jakarta dated July 22, 2022.

Educational History and Certifications Owned

- Master of Engineering from Tarumanegara University (2004)
- Bachelor of Civil Engineering from Sriwijaya University (1989)

History of Employment

- Engineering and Development Director of PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (2021-2022)
- Independent Commissioner of PT Widodo Makmur Unggas, Tbk (2020-2021)
- President Commissioner of PT PP Energi (2019-2020)
- Planning and Business Development Director of PT PP (Persero) (2018-2019)
- Building Director of PT PP (Persero) (2017-2018)
- Marketing Director of PT PP (Persero) (2016-2017)

Concurrent Position

Had no concurrent position in and outside PT MRT Jakarta (Perseroda).

Affiliation

Had no affiliation with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, principal and controlling shareholders.

*) served from July 22, 2022 to October 25, 2022



WILLIAM P. SABANDAR^{**})

Direktur Utama
President Director

Kewarganegaraan
Indonesia

Tempat Tanggal Lahir
Makassar, 4 November 1966

Usia
56 tahun

Domisili
Tangerang Selatan, Banten

Riwayat Penunjukan
Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan untuk periode ke-2 sesuai Keputusan RUPS Luar Biasa PT MRT Jakarta tanggal 21 Maret 2018.

- Riwayat Pendidikan dan Sertifikasi yang Dimiliki**
- Doktor (S3) Geografi Transportasi dari Universitas Canterbury, Selandia Baru (2004)
 - Master (S2) Teknik Transportasi dari Universitas New South Wales Australia (2000)
 - Sarjana (S1) Teknik Sipil Universitas Hasanuddin (1990)

- Riwayat Pekerjaan**
- Kepala Rekonstruksi Kepulauan Nias (2005-2009)
 - Utusan Khusus Sekretaris Jenderal ASEAN merangkap Kepala Operasi untuk Rekonstruksi Myanmar (2009-2010)
 - Direktur Corporate Affairs Sekretariat ASEAN (2011-2012)
 - Asisten Ahli Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) (2012-2014)
 - Kepala Operasi Satuan Tugas Nasional REDD+ (2014-2015)
 - Penasehat Senior Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, merangkap Kepala Satuan Tugas Nasional Percepatan Pembangunan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (2015-2016)

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan, baik di dalam maupun di luar PT MRT Jakarta (Persero).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, pemegang saham utama dan pengendali.

^{**}) menjabat hingga 22 Juli 2022

Nationality
Indonesia

Place/Date of Birth
Makassar, November 04, 1966

Age
56 years old

Domicile
South Tangerang, Banten

History of Appointment
Serving as the Corporation's President Director for the 2nd period in accordance with the Resolution of the Extraordinary GMS of PT MRT Jakarta dated March 21, 2018.

- Educational History and Certifications Owned**
- Doctor of Transportation Geography from the University of Canterbury, New Zealand (2004)
 - Master of Transportation Engineering from the University of New South Wales, Australia (2000)
 - Bachelor of Civil Engineering from Hasanuddin University (1990)

- History of Employment**
- Head of Nias Islands Reconstruction (2005-2009)
 - Special Representative of the Secretary-General of ASEAN and concurrently Head of Operations for Myanmar Reconstruction (2009-2010)
 - Corporate Affairs Director for the ASEAN Secretariat (2011-2012)
 - Expert Assistant to the Head of Presidential Work Unit for Development Monitoring and Control (UKP4) (2012-2014)
 - Operations Head for the National REDD+ Task Force (2014-2015)
 - Senior Advisor to the Energy and Mineral Resources Minister and concurrently Head of the National Task Force for the Accelerated Development of Renewable Energy and Energy Conservation (2015-2016)

Concurrent Position
Had no concurrent position in and outside PT MRT Jakarta (Persero).

Affiliation
Had no affiliation with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, principal and controlling shareholders.

^{**}) served until July 22, 2022

Pejabat Eksekutif Perseroan

Executives of the Corporation



DIREKTORAT KEUANGAN & MANAJEMEN KORPORASI
Finance and Corporate Management
Directorate



DIREKTORAT UTAMA
Main Directorate



DIREKTORAT KONSTRUKSI
Construction Directorate



DIREKTORAT OPERASI & PEMELIHARAAN
Operations and Maintenance Directorate



**DIREKTORAT
PENGEMBANGAN BISNIS**
Business Development Directorate



Statistik Karyawan

Employee Statistics

Karyawan MRT Jakarta terdiri dari sumber daya manusia yang berasal dari perusahaan induk yaitu PT MRT Jakarta (Persero), satu anak usaha PT Integrasi Transit Jakarta (ITJ) dan dua perusahaan patungan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) dan PT Jakarta Lingko Indonesia (JakLingko Indonesia). Karyawan merupakan aset yang berharga bagi Perseroan dalam mencapai visi menjadi penyedia sarana transportasi publik terdepan, yang berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas, pengurangan kemacetan, dan pengembangan sistem transit perkotaan. Komposisi karyawan MRT Jakarta telah diselaraskan dengan kebutuhan untuk mendukung strategi dan rencana pengembangan Perseroan. Selain itu, Perseroan juga menerapkan prinsip non diskriminasi bagi setiap karyawan dengan berbagai latar belakang yang berbeda.

MRT Jakarta employees consist of personnel from the parent company, namely PT MRT Jakarta (Persero), a subsidiary of PT Integrasi Transit Jakarta (ITJ) and two joint ventures PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) and PT Jakarta Lingko Indonesia (JakLingko Indonesia). Employees are valuable asset for the Corporation in achieving its vision of becoming a leading provider of public transportation facilities, committed to driving economic growth by increasing mobility, reducing congestion, and developing urban transit systems. The composition of MRT Jakarta employees has been aligned with the need to support the Corporation's development strategy and plans. In addition, the Corporation also applies the principle of non-discrimination to every employee with a variety of different backgrounds.

Jumlah Karyawan Grup PT MRT Jakarta (Persero)
Total Number of Employees of PT MRT Jakarta (Persero) Group

Uraian Description	2022				2021				2020			
	Pria Male		Wanita Female		Pria Male		Wanita Female		Pria Male		Wanita Female	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Karyawan MRT Jakarta MRT Jakarta's Employees	524	57,1	208	22,68	515	71,73	203	28,27	497	72,13	192	27,87
Karyawan Anak Usaha & Perusahaan Patungan Employees of Subsidiaries & Joint Venture Companies	37	5,7	24	2,62	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekerja Lain Other Workers	93	14,2	31	3,38	64	69,57	28	30,43	64	69,57	28	30,43
Jumlah Total	654	77,02	263	28,68	579	71,48	231	28,52	561	71,83	220	28,17
	917				810				781			

Jumlah Karyawan Grup PT MRT Jakarta (Persero) Berdasarkan Status Ketenagakerjaan dan Gender
Number of Employees of PT MRT Jakarta (Persero) Group by Employment Status and Gender

Uraian Description	2022				2021				2020			
	Pria Male		Wanita Female		Pria Male		Wanita Female		Pria Male		Wanita Female	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Karyawan Tetap Permanent Employees	512	64,56	209	26,36	471	65,60	180	25,07	442	64,15	175	25,40
Karyawan Kontrak Contract Employees	49	6,18	23	2,90	44	6,13	23	3,20	55	7,98	17	2,47
Jumlah Total	561	70,74	232	29,26	515	71,73	203	28,27	497	72,13	192	27,87
	793				718				689			



Jumlah Karyawan Grup PT MRT Jakarta (Perseroda) Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Number of Employees of PT MRT Jakarta (Perseroda) Group by Education

Uraian Description	2022				2021				2020			
	Pria Male		Wanita Female		Pria Male		Wanita Female		Pria Male		Wanita Female	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Pascasarjana (S2 dan S3) Postgraduate (Master and Doctoral Degree)	82	10	43	5	61	8,50	31	4,32	57	8,27	29	4,21
Sarjana (S1) Undergraduate (Bachelor's Degree)	344	43	151	19	257	35,79	116	16,16	231	33,53	103	14,95
Diploma III Diploma III	77	10	36	5	142	19,78	55	7,66	157	22,79	59	8,56
SMA/SMK Senior/Vocational High School	1	-	59	7	55	7,66	1	0,14	52	7,55	1	0,15
Jumlah Total	504	64	289	36	515	71,73	203	28,27	497	72,13	192	27,87
	793				718				689			

Jumlah Karyawan Grup PT MRT Jakarta (Perseroda) Berdasarkan Kelompok Usia
Number of Employees of PT MRT Jakarta (Perseroda) Group by Age

Uraian Description	2022				2021				2020			
	Pria Male		Wanita Female		Pria Male		Wanita Female		Pria Male		Wanita Female	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
≥ 51 Tahun ≥ 51 years old	19	2	0	-	17	2,37	-	0,00	16	2,32	-	0,00
41-50 Tahun 41-50 years old	51	6	8	1	40	5,57	7	0,97	40	5,81	6	0,87
31-50 Tahun 31-50 years old	180	23	80	10	155	21,59	57	7,94	143	20,75	46	6,68
21-30 Tahun 21-30 years old	306	39	149	19	303	42,20	139	19,36	306	44,41	141	20,46
Jumlah Total	556	70	237	30	515	71,73	203	28,27	496	71,99	192	27,87
	793				718				689			

Jumlah Karyawan Grup PT MRT Jakarta (Perseroda) Sesuai Masing-Masing Level Organisasi
Number Employees of PT MRT Jakarta (Perseroda) Group According to Each Organizational Level

Uraian Description	2022				2021				2020			
	Pria Male		Wanita Female		Pria Male		Wanita Female		Pria Male		Wanita Female	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Kepala Divisi Division Head	33	4,16	5	0,63	19	2,65	4	0,56	15	2,18	4	0,58
Kepala Departemen Department Head	67	8,45	29	3,66	51	7,10	17	2,37	47	6,82	17	2,47
Kepala Bidang Section Head	87	10,97	22	2,77	90	12,53	16	2,23	91	13,21	18	2,61
Spesialis Specialist	163	20,55	116	14,63	139	19,36	98	13,65	139	20,17	90	13,06
Staf Staff	211	26,61	60	7,57	216	30,08	68	9,47	205	29,75	63	9,14
Jumlah Total	561	70,74	232	29,26	515	71,73	203	28,27	497	72,13	192	27,87
	793				718				689			

Struktur dan Komposisi Pemegang Saham

Shareholders Structure and Composition

PT MRT Jakarta (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

PT MRT Jakarta (Perseroda) is a Regionally-Owned Enterprise whose majority of the shares are owned by the Provincial Government of DKI Jakarta.



Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat perubahan pada struktur dan komposisi pemegang saham Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Throughout 2022, there were no changes to the structure and composition of the Corporation's shareholders, namely as follows:

Komposisi Pemegang Saham Tahun 2022
Shareholder Composition in 2022

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Lembar Saham Total Shares	Nilai Per Lembar Saham Value Per Share	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Modal Disetor Total Paid-in Capital
Pemprov DKI Jakarta Provincial Government of DKI Jakarta	17.772.143	Rp1.000.000	99,997	Rp17.772.143.000.000
Perumda Pasar Jaya	500	Rp1.000.000	0,003	Rp500.000.000
Jumlah Total	17.772.643	-	100	Rp17.772.643.000.000

Modal dasar Perseroan per 31 Desember 2022 berjumlah Rp40.757.353.000.000 (empat puluh triliun tujuh ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah). Jumlahnya terbagi atas 40.757.353 (empat puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga) saham, masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per lembar saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor berjumlah Rp17.772.643.000.000 (tujuh belas triliun tujuh ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta rupiah) oleh para pemegang saham. Jumlahnya terbagi atas 17.772.643 (tujuh belas tujuh puluh tujuh dua ribu enam ratus empat puluh tiga) saham masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per lembar saham.

The Corporation's authorized capital as of December 31, 2022 is Rp40,757,353,000,000 (forty trillion seven hundred and fifty-seven billion three hundred and fifty-three million rupiah). It is divided into 40,757,353 (forty million seven hundred and fifty-seven thousand three hundred and fifty-three) shares, priced at Rp1,000,000 (one million rupiah) per share. Of the authorized capital, a total of Rp17,772,643,000,000 (seventeen trillion seven hundred seventy two billion six hundred fourty three million rupiah) has been placed by the shareholders. The total is divided into 17,772,643 (seventeen million seven hundred seventy two six hundred fourty three) shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (one million rupiah) per share.



Modal yang ditempatkan dan disetor penuh Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp17.772.143.000.000 (tujuh belas triliun tujuh ratus tujuh puluh dua miliar seratus empat puluh tiga juta rupiah), sementara Perumda Pasar Jaya sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Masing-masing terdiri atas 17.772.143 (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh tiga) lembar saham, dan 500 (lima ratus) lembar saham, dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per lembar saham. Pemegang saham utama/pengendali Perseroan adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan kepemilikan langsung sebesar 99,997%, dan kepemilikan tidak langsung melalui Perumda Pasar Jaya sebesar 0,003%. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan entitas induk sekaligus entitas pemilik akhir Perseroan.

Persentase Kepemilikan Saham oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Saham PT MRT Jakarta (Persero) dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Perumda Pasar Jaya. Sampai dengan 31 Desember 2022, Direksi maupun Dewan Komisaris tidak mempunyai kepemilikan saham atas Perseroan, langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, tidak terdapat informasi persentase kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali

Pemerintah Provinsi DKI menguasai 99,997% saham Perseroan, sehingga Pemprov DKI merupakan pemegang saham utama sekaligus pemegang saham pengendali Perseroan.

Profil Pemegang Saham Pengendali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta adalah ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Jakarta merupakan provinsi dengan status daerah khusus yang terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. DKI Jakarta memiliki luas sekitar 664,01 km² (lautan: 6.977,5 km²), dengan penduduk berjumlah 10.562.088 jiwa (2020).

Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Jakarta dilayani oleh dua bandar udara, yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma, serta tiga pelabuhan laut di Tanjung Priok, Sunda Kelapa, dan Ancol.

Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Saat ini, lebih dari 70% uang negara beredar di Jakarta. Perekonomian Jakarta terutama ditunjang oleh sektor perdagangan, jasa, properti, industri kreatif, dan keuangan.

Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2022

Pj. Gubernur : Heru Budi Hartono

Pj. Sekretaris Daerah : Uus Kuswanto

The DKI Jakarta Provincial Government's issued and paid up capital is Rp17,772,143,000,000 (seventeen trillion seven hundred seventy two billion one hundred forty three million rupiah), while Perumda Pasar Jaya is Rp500,000,000 (five hundred million rupiah). Each consisting of 17,772,143 (seventeen million seven hundred seventy two one hundred forty three) shares, and 500 (five hundred) shares, with a nominal value of Rp1,000,000 (one million rupiah) per share. The principal/controlling shareholder of the Corporation is the Provincial Government of DKI Jakarta, with direct ownership of 99.997%, and indirect ownership through Perumda Pasar Jaya of 0.003%. Thus, the Provincial Government of DKI Jakarta is the parent entity as well as the ultimate owner of the Corporation.

Percentage of Share Ownership by Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The shares of PT MRT Jakarta (Persero) are owned by the Provincial Government of DKI Jakarta and Perumda Pasar Jaya. As of December 31, 2022, neither the Board of Directors nor the Board of Commissioners has any share ownership in the Corporation, directly or indirectly. Thus, there is no information on the percentage of the Corporation's share ownership by members of the Board of Commissioners and Directors.

Major and Controlling Shareholders

As the Corporation's major and controlling shareholder, the DKI Provincial Government controls 99.997% of the Corporation's shares.

Controlling Shareholders' Profile DKI Jakarta Provincial Government

DKI Jakarta Province is the national capital and the largest city in Indonesia. Jakarta is a province with special area status located on the northwestern coast of Java Island. DKI Jakarta has an area of around 664.01 km² (ocean: 6,977.5 km²), with a population of 10,562,088 people (2020).

As a center for business, politics and culture, Jakarta is home to the headquarters of state-owned enterprises, private companies and foreign companies. The city is also the hub of government agencies and the ASEAN secretariat office. Jakarta is served by two airports, namely Soekarno-Hatta and Halim Perdanakusuma Airport, as well as three seaports at Tanjung Priok, Sunda Kelapa and Ancol.

Jakarta is a city with a fairly rapid economic growth rate. Currently, more than 70% of the state's money circulates in Jakarta. Jakarta's economy is mainly supported by trade, services, property, creative industries and financial sectors.

DKI Jakarta Provincial Government Officials as of December 31, 2022

Acting Governor : Heru Budi Hartono

Acting Regional Secretary : Uus Kuswanto

Informasi Entitas Anak, Asosiasi, Ventura Bersama, dan *Special Purpose Vehicle* (SPV)

Information on Subsidiaries, Associates, Joint Ventures (JV), and Special Purpose Vehicle (SPV)

ENTITAS ANAK SUBSIDIARIES

Nama Perusahaan Company Name	PT Integrasi Transit Jakarta (ITJ)	
Bidang Usaha Business Lines	- Konstruksi Gedung Hunian; - Konstruksi Gedung Perkantoran; - Konstruksi Gedung Industri; - Konstruksi Gedung Perbelanjaan; - Konstruksi Gedung Kesehatan; - Konstruksi Gedung Pendidikan; - Konstruksi Gedung Penginapan; - Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga; - Konstruksi Gedung lainnya; - Aktivitas real estat yang dimiliki sendiri atau disewa; - Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktivitas Mice dan Event Khusus; - Kawasan Pariwisata; - Kawasan Industri; - Aktivitas real estat atas balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak; - Aktivitas konsultasi manajemen lainnya; - Aktivitas Arsitektur; - Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI; - Periklanan; - Aktivitas Desain Alat Transportasi dan Permesinan; - Aktivitas Desain Interior; - Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa; - Penunjang Fasilitas; - Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan; - Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri lainnya; dan - Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman.	
	- Residential Building Construction; - Office Building Construction; - Industrial Building Construction; - Commercial Building Construction; - Healthcare Building Construction; - Educational Building Construction; - Accommodation Building Construction; - Recreation and Sport Building Construction; - Other Building Construction; - Owned or leased real estate activities; - Venue Rental for Mice Activities and Special Events; - Tourism Area; - Industrial Area; - Real estate activities for fee or contract; - Other management consultancy activities; - Architecture activities; - Engineering and Relevant Technical Consultation Activities; - Advertising; - Transportation and Machinery Design Activities; - Interior Design Activities; - Service Provider Activities; - Supporting Facilities; - Building General Cleaning Activities; - Other Building and Industrial Cleaning Activities; and - Park Maintenance Activities	
Kepemilikan Saham Share Ownership	90%	
Status Operasi Operational Status	Beroperasi Operating	
Tahun Pendirian Year of Establishment	2020	
Modal Ditempatkan dan Disetor Issued and Fully Paid Capital	Rp5.000.000.000	
Modal Dasar Authorized Capital	Rp5.000.000.000	
Jumlah Aset tahun 2022 Total Asset in 2022	Rp78.550.576.692	
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	Wisma Nusantara Lt. 23 Jl. M.H. Thamrin 59 Jakarta 10350-Indonesia Telepon : (+62-21) 310-3629, 390-6454 Surel : info@itj-mrtjakarta.co.id Web : http://itj-mrtjakarta.co.id	



VENTURA BERSAMA JOINT VENTURES

Nama Perusahaan Company Name	PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ)	
Bidang Usaha Business Lines	- Aktivitas konsultasi transportasi; - Aktivitas konsultasi manajemen lainnya; - Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa; dan - Periklanan.	
Kepemilikan Saham Share Ownership	51%	
Status Operasi Operational Status	Beroperasi Operating	
Tahun Pendirian Year of Establishment	2020	
Modal ditempatkan dan disetor Issued and Fully Paid Capital	Rp90.000.000.000	
Modal Dasar Authorized Capital	Rp90.000.000.000	
Jumlah Aset tahun 2022 Total Asset in 2022	Rp81.877.958.696	
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	Wisma Nusantara Lt. 3 Jl. M.H. Thamrin 59 Jakarta 10350-Indonesia Telepon : (+62-21) 314-4555 Surel : info@mitj.co.id Web : http://mitj.co.id IG : @ptmitj Twitter : @ptmitj	

VENTURA BERSAMA JOINT VENTURES

Nama Perusahaan Company Name	PT Jakarta Lingko Indonesia	
Bidang Usaha Business Lines	- Aktivitas pemrograman komputer lainnya; - Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya; - Aktivitas pengolahan data, portal web, dan/atau platform digital dengan tujuan komersial; - Penerbitan piranti lunak; dan - Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya.	
Kepemilikan Saham Share Ownership	20%	
Status Operasi Operational Status	Beroperasi Operating	
Tahun Pendirian Year of Establishment	2020	
Modal Ditempatkan dan Disetor Issued and Fully-paid Capital	Rp5.000.000.000	
Modal Dasar Authorized Capital	Rp20.000.000.000	
Jumlah Aset tahun 2022 Total Asset in 2022	Rp40.198.702.558	
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	Wisma Nusantara Lantai 23 Jl. M.H. Thamrin 59 Jakarta 10350-Indonesia Telepon: (+62-21) 964-4725, 792-6311 Surel : admin@jaklingkoindonesia.com	

Kronologi Pencatatan Saham dan/atau Pencatatan Saham dari Awal Penerbitan Sampai dengan Akhir Tahun Buku

Chronology of Share Listing from Initial Public Offering Until the end of Fiscal Year

Sampai dengan akhir tahun 2022, Perseroan tidak mencatatkan maupun mendaftarkan saham pada bursa efek mana pun. Dengan demikian, Laporan ini tidak menyajikan informasi terkait kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku; nama bursa efek di mana saham dicatatkan; pemecahan saham (*stock split*) dan penggabungan saham (*reverse stock*); dividen saham; saham bonus; dan perubahan nilai nominal saham; pelaksanaan efek konversi; serta pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal.

As of the end of 2022, the Corporation did not conduct share listing/registration in any stock exchange. Therefore, this Report does not disclose information on the chronology of share listing, total share, share price, and offering price since the initial public offering until the end of fiscal year; name of stock exchanges where the share is listed; stock split and reverse stock; share dividend; bonus share; changes to share price; implementation of conversion effect; and capital addition and capital reduction.

Informasi Pencatatan Efek Lainnya yang Belum Jatuh Tempo pada Tahun Buku

Information on Listing of Other Securities Not Due in the Fiscal Year

Sampai dengan akhir tahun 2022, Perseroan tidak mencatatkan efek lain. Dengan demikian, Laporan ini tidak menyajikan informasi mengenai pencatatan efek lainnya yang belum jatuh tempo pada tahun buku; nama efek, tahun penerbitan, dan tingkat suku bunga/imbal hasil; tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek.

As of the end of 2022, the Corporation did not list other security. Therefore, this Report does not disclose the listing of other securities not due in the fiscal year; the security name, listing year, and interest rate/profit maturity date; offering price; and security rating.



Akuntan Publik Public Accountant

PT MRT Jakarta (Perseroda) menggunakan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik (KAP) untuk pelaksanaan audit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2022. Sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2021 tertanggal 30 Maret 2022, Perseroan telah menunjuk KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (EY Indonesia) sebagai pihak independen pelaksana audit. Penunjukan dilakukan untuk memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 Tahun 2002 tentang Jasa Akuntan Publik dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, dengan penyesuaian pada MRT Jakarta sebagai Perseroan Terbatas yang bukan perusahaan terbuka.

PT MRT Jakarta (Perseroda) worked with a public accountant service and a Public Accountant Firm (KAP) to audit its Financial Statements for the 2022 Financial Year. Following the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the 2021 Financial Year dated March 30, 2022, the Corporation has appointed Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (EY Indonesia) as the independent party to carry out the audit process. The appointment was carried out to comply with the terms in the Finance Minister's Decree No. 423/KMK.06/2002 Year 2002 concerning Public Accountant Firm and Government Regulation No. 20 Year 2015 concerning Practice of Public Accountant, tailored to MRT Jakarta as a limited liability company that is not a public company.

Daftar Kantor Akuntan Publik List of Public Accountant Firm

Tahun Buku Financial Year	KAP Public Accountant Firm	Alamat Address	Jasa yang Diberikan Services Provided
2022	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY Indonesia)	Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, 7th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, DKI Jakarta 12190, Indonesia Telp. : +62 21 52895000 Faks. : +62 21 52894600 www.ey.com	1. Audit atas Laporan Keuangan 2. Jasa Lainnya: • Audit Kepatuhan terhadap Peraturan perundangundangan; • Audit Kepatuhan terhadap Pengendalian Internal; dan • Audit Tata Kelola IT Keuangan dengan Framework COBIT. 1. Audit of the Financial Statements 2. Other Services: • Audit of the compliance with the prevailing laws and regulations; • Audit of the compliance with the Internal Control; and • Audit of Financial IT Governance by COBIT Framework.
2021	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY Indonesia)	Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, 7th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, DKI Jakarta 12190, Indonesia Telp. : +62 21 52895000 Faks. : +62 21 52894600 www.ey.com	1. Audit atas Laporan Keuangan 2. Jasa Lainnya: • Audit Kepatuhan terhadap Peraturan perundangundangan; • Audit Kepatuhan terhadap Pengendalian Internal; dan • Audit Tata Kelola IT Keuangan dengan Framework COBIT. 1. Audit of the Financial Statements 2. Other Services: • Audit of the compliance with the prevailing laws and regulations; • Audit of the compliance with the Internal Control; and • Audit of Financial IT Governance by COBIT Framework.
2020	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY Indonesia)	Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, 7th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, DKI Jakarta 12190, Indonesia Telp. : +62 21 52895000 Faks. : +62 21 52894600 www.ey.com	1. Audit atas Laporan Keuangan 2. Jasa Lainnya: • Audit Kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan; • Audit Kepatuhan terhadap Pengendalian Internal. 1. Audit of the Financial Statements 2. Other Services: • Audit of the compliance with the prevailing laws and regulations; • Audit of the compliance with the Internal Control.

Daftar Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan PT MRT Jakarta (Perseroda) List of Public Accountant Firms and Public Accountants in Audit Implementation of PT MRT Jakarta (Perseroda) Financial Statements

Tahun Buku Financial Year	KAP Public Accountant Firm	Akuntan Accountant	Biaya Jasa Service Fee	Opini Audit Audit Opinion
2022	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY Indonesia)	Budi Hartono	838.738.739	Wajar, dalam semua hal yang material Unqualified in all material respects
2021	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY Indonesia)	Irwan Haswir CPA	825.825.000	Wajar, dalam semua hal yang material Unqualified in all material respects
2020	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY Indonesia)	Damester Hutagalung CPA	684.799.000	Wajar, dalam semua hal yang material Unqualified in all material respects

Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal dan Kegiatan Usaha

Name and Address of Supporting Institution and/or Professions to the Capital Market and Business Lines

PT MRT Jakarta (Persero) merupakan Perseroan Terbatas yang bukan perusahaan terbuka, dan tidak mencatatkan saham maupun menerbitkan efek lainnya pada bursa efek manapun, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan demikian, Laporan ini tidak menyajikan informasi terkait nama dan alamat Biro Administrasi Efek (BAE)/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan, nama, serta alamat perusahaan pemeringkat efek. Namun selama periode pelaporan, Perseroan memiliki kerja sama dengan beberapa lembaga profesi untuk menunjang kegiatan usaha.

PT MRT Jakarta (Persero) is a Limited Liability Company that is not a public company and does not list its shares nor other securities in any stock exchange, both domestic and international. Therefore, this report does not disclose information on the name and address of the Share Registrar (BAE)/any party that administers the Corporation's shares as well as the name and address of the Corporation's security rating company. However, during the reporting period, the Corporation collaborates with several professional institutions to support the business activities.

KONSULTAN HUKUM LEGAL CONSULTANT	
Nama Name	Hanafiah Ponggawa & Partners
Alamat Address	Wisma 46 Kota BNI Lantai 41 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat 10220 Telepon: (+62-21) 570 1837 Faksimile: (+62-21) 570 1835 Surel: Hendra.ong@dentons.com Situs Website: dentons.hprlawyers.com
Bentuk Jasa Type of Services	- Memberikan pandangan-pandangan dan pendapat hukum, serta rekomendasi langkah hukum yang komprehensif perihal permasalahan hukum yang sedang dihadapi dan berpotensi akan dihadapi oleh Perseroan; - Memberikan jasa hukum yang dibutuhkan Perseroan secara keseluruhan, termasuk namun tidak terbatas pada nasihat hukum, mempersiapkan dokumen-dokumen hukum dan mewakili Perseroan dalam sebuah tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan; - Mempersiapkan rancangan atau korespondensi telaahan (<i>review</i>), dokumen-dokumen, dan/atau perjanjian dalam kaitannya dengan atau antara Perseroan dengan pihak lain, baik yang berkaitan dengan proyek tertentu ataupun transaksi dari masalah umum Perseroan; - Mewakili atau membantu Perseroan dalam rapat, baik yang berkaitan dengan proyek, transaksi atau dalam kaitannya dengan masalah korporasi seperti hubungan dengan para <i>stakeholder</i> utama; dan - Pendampingan oleh Konsultan/penasehat hukum dalam bentuk kegiatan perancangan peraturan yang dibutuhkan Perseroan, legal <i>drafting</i>, hubungan industrial, penyelesaian perselisihan dan yang lainnya sebagaimana terkait. - Providing legal views and opinions, and recommending comprehensive legal actions for legal issues that are and potentially would be faced by the Corporation; - Providing comprehensive legal services as required by the Corporation, including but not limited to legal advice, preparation of legal documents, and representing the Corporation in a legal action in and outside the court; - Preparing review draft or correspondences, documents, and/or agreements concerning, or between the Corporation and other parties, regarding certain projects or transaction of general issues of the Corporation; - Representing or assisting the Corporation in meetings, regarding the projects, transactions, or in relation with corporate issues such as main stakeholder relationship; and - Assisting carried out by legal Consultant/advisor in the form of the drafting of regulations as required by the Corporation, legal drafting, industrial relations, dispute resolutions, and other related services.
Biaya Jasa Tahun 2022 Services Fee in 2022	Rp830.897.470.-
Periode Penugasan Tahun 2022 Period of Assignment in 2022	September - Desember 2022 September - December 2022



NOTARIS NOTARY	
Nama Name	Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
Alamat Address	Jl. Panglima Polim v/11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telepon: (021) 7244650 - 7392801- 7209542 - 7209645 Faks: (021) 7265090 Surel: cahyanie72@yahoo.co.id, poerbaningsing@yahoo.com
Bentuk Jasa Type of Services	1. Melakukan pembuatan akta-akta yang diperlukan oleh Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan maupun Luar Biasa, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham maupun di luar Rapat Umum Pemegang Saham, melegalisasi dan/atau melakukan waarmeding dokumen-dokumen, serta mengakta-notariil-kan perjanjian-perjanjian yang menurut peraturan perundangundangan perlu diakta notariil-kan; 2. Melakukan pengurusan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Perubahan Anggaran Dasar atau Data Perseroan, Berita Negara Republik Indonesia beserta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, dan/atau Daftar Perseroan; 3. Identifikasi atas data-data yang diperlukan sesuai dengan tugas yang diberikan dan data pendukung lainnya yang terkait; 4. Melaksanakan rapat dalam rangka pengumpulan data untuk pembuatan suatu dokumen tertentu sebagaimana diminta oleh Pengguna; 5. Menghadiri rapat-rapat apabila diperlukan dan menindaklanjuti hasil rapat/koordinasi dengan Pengguna; 6. Dalam hal melakukan legalisir, waarmeding dan/atau pengakta-notariil-kan suatu dokumen dan/atau perjanjian, Notaris wajib melakukan pengecekan keabsahan dokumen dan kewenangan pihak-pihak yang akan melakukan perbuatan hukum legalisir dokumen dan/atau perjanjian tersebut; 7. Membuat skenario RUPS apabila diminta oleh Perseroan serta melakukan legal review terhadap agenda RUPS yang akan dilaksanakan; dan 8. Pekerjaan lain-lain yang biayanya akan dikenakan disesuaikan dan disepakati dengan lingkup pekerjaan yang akan dilakukan. 1. Drawing up deeds as required by the User, including but not limited to Deed of Report for the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS), Deed of Statement of the Decision of General Meeting of Shareholders and outside General Meeting of Shareholders, legalizing and/or watermarking documents, and drawing up notarial deeds of agreements following the prevailing laws and regulations; 2. Administering the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia concerning the Approval for the Amendment to Corporate Articles of Association, Reception of the Notice regarding the Amendment to the Articles of Association and Corporate Data, State Gazette of the Republic of Indonesia and Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia, and/or List of Corporations; 3. Identifying the required data under the assigned duties as well as other supporting data as requested by the User; 4. Holding meetings to collect data in preparing certain documents as requested by User; 5. Participating in meetings whenever required and following up the meeting/COORDINATING with the User; 6. In terms of legalizing, watermarking, and/or drawing up notarial deeds of a document and/or agreements, Provider must check the validity of the documents and authorities of the parties to conduct the legal action of legalizing the document and/or agreement; 7. Prepare a GMS scenario if requested by the Corporation and conduct a legal review of the GMS agenda to be held; and 8. Other work of which the cost will be adjusted and agreed with the scope of work to be carried out.
Biaya Jasa Tahun 2022 Services Fee in 2022	Rp55.500.000,-
Periode Penugasan Tahun 2022 Period of Assignment in 2022	19 April 2021 - 18 April 2022 dan 19 April 2022 - 18 April 2023 April 19, 2021 - April 18, 2022 and April 19, 2022 - April 18, 2023



04

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis

Melalui penerapan strategi yang tepat, Kinerja MRT Jakarta 2022 menunjukkan peningkatan yang sangat baik dibandingkan tahun sebelumnya. Target kinerja operasional, keuangan dan konstruksi berhasil dilampaui.

By executing the right strategy in place, MRT Jakarta's performance in 2022 showed a promising improvement compared to the previous year as the Corporation successfully achieved operational, financial, and construction goals beyond the set target.

Tinjauan Umum

General Review



Seiring dengan penurunan kasus COVID-19 yang membuat masyarakat kembali beraktivitas secara normal, perekonomian Provinsi DKI Jakarta juga telah kembali mengalami pertumbuhan yang positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2022 hingga triwulan III tumbuh sebesar 5,94% dibandingkan triwulan III tahun 2021.

Along with the decline in COVID-19 cases that has made people return to their normal activities, the DKI Jakarta Province's economy has also started to experience a positive growth. Based on Statistics Indonesia (BPS) data, until the third quarter of 2022, DKI Jakarta Province's economy grew by 5.94% compared to the third quarter of 2021.



TINJAUAN EKONOMI

Proses pemulihan ekonomi global dari dampak pandemi COVID-19 kembali menghadapi tantangan di tahun 2022 yang ditandai dengan adanya disrupsi rantai pasok global yang disebabkan adanya restriksi ekspor karena setiap negara ingin mengutamakan pemenuhan pasokan domestiknya di tengah carut marut rantai pasok. Disrupsi rantai pasok global ini menggerek kenaikan harga komoditas, sehingga menyebabkan inflasi tinggi di banyak negara, termasuk di Indonesia.

Lembaga Dana Moneter Internasional (IMF) melalui laporan *World Economic Outlook* beberapa kali merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2022 dengan tren yang terus menurun. Terakhir pada laporan yang dipublikasikan pada Oktober 2022, IMF memprediksi ekonomi dunia hanya akan tumbuh 3,2% di tahun 2022 dan akan kembali turun menjadi 2,7% di tahun 2023, padahal di tahun 2021 ekonomi dunia tumbuh sebesar 6,0%.

Di tengah pelemahan ekonomi global, ekonomi Indonesia masih tumbuh dengan cukup baik. Fundamental ekonomi yang kuat dan didukung pasar yang besar serta kekayaan alam yang melimpah, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang positif di tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 salah satunya didukung oleh kinerja ekspor yang sangat baik sehingga secara umum neraca perdagangan Indonesia hingga November tahun 2022 mengalami surplus USD50,59 miliar. Pencapaian tersebut bahkan telah melampaui surplus neraca perdagangan pada puncak periode boom komoditas di tahun 2011 yang sebesar USD22,2 miliar.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta didorong oleh kinerja positif sebagian besar komponen dari sisi pengeluaran. Peningkatan konsumsi pada kelompok transportasi dan komunikasi; dan kelompok restoran dan hotel memberikan dampak positif pada komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT). Selain itu, pertumbuhan tersebut juga terindikasi dari meningkatnya impor barang konsumsi, penjualan kendaraan bermotor dan meningkatnya jumlah penumpang pada seluruh moda transportasi. Komponen lainnya yakni komponen pengeluaran LNPR (Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga) juga meningkat akibat peningkatan aktivitas partai politik menjelang pesta demokrasi tahun 2024.

ECONOMIC REVIEW

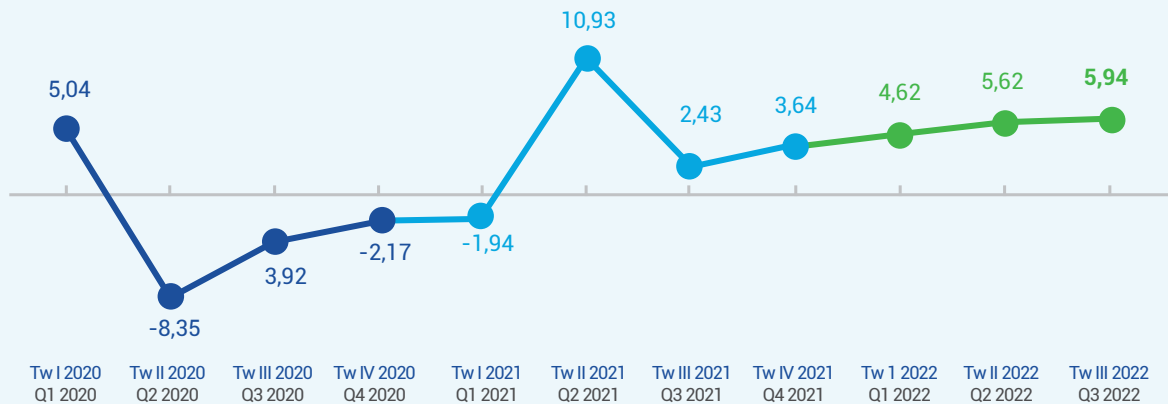
The process of global economic recovery from the impact of the COVID-19 pandemic again faced challenges in 2022. This was marked with disruption to global supply chains due to export restrictions as each country wanted to prioritize fulfilling its domestic supply amid chaotic supply chains. This global supply chain disruption drove up commodity prices, causing high inflation in many countries, including Indonesia.

The International Monetary Fund (IMF) through the World Economic Outlook report has revised its projections for global economic growth in 2022 several times with a downward trend. Most recently, in a report published in October 2022, IMF predicts that the world economy will only grow 3.2% in 2022 and will fall again to 2.7% in 2023, even though the world economy grew 6.0% in 2021.

Amid a weakening global economy, Indonesia's economy was still growing quite well. With strong economic fundamentals and supported by a large market and abundant natural wealth, Indonesia's economy positively grew in 2022. One of the reasons for Indonesia's economic growth in 2022 was the support of excellent export performance so that in general, Indonesia's trade balance until November 2022 experienced a surplus of USD50.59 billion. This achievement has even exceeded the trade balance surplus at the peak of the commodity boom period in 2011 which amounted to USD22.2 billion.

DKI Jakarta Province's economic growth was spurred by the positive performance of most components from the expenditure side. Increased consumption in the transportation and communication group; and the restaurant and hotel group had a positive impact on the Household Consumption Expenditure (PKRT) component. In addition, this growth was also indicated by the increase in imports of consumer goods, sales of motorized vehicles and the increase in the number of passengers in all modes of transportation. Another component, i.e. Non-Profit Institutions Serving Households (LNPR), also increased due to increased activities of political parties ahead of the 2024 elections.

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2020-2022 (Y-ON-Y), (Persen)
The Growth of Gross Regional Domestic Product (GRDP), 2020-2022 (Y-ON-Y), (Percent)



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta

Source: The Central Bureau of Statistics of the DKI Jakarta Province

Pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta juga didukung oleh tumbuhnya sebagian besar lapangan usaha. Kinerja lapangan usaha jasa lainnya menunjukkan pertumbuhan tertinggi, yang terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung tempat wisata dan jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Jakarta. Selain itu, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga tumbuh positif yang terlihat dari kenaikan rata-rata Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang serta mobilitas masyarakat yang mendorong kenaikan aktivitas makan secara *dine-in* juga turut berkontribusi. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan juga turut tumbuh akibat peningkatan volume barang pada angkutan laut dan jumlah penumpang di hampir seluruh moda transportasi publik dan juga peningkatan jumlah kendaraan yang melewati jalan tol di Provinsi DKI Jakarta.

MENUJU TRANSPORTASI EFEKTIF

Status DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis telah menarik warga dari berbagai daerah untuk mengadu nasib di Ibu Kota. Gelombang kedatangan warga menuju Ibu Kota yang terus terjadi setiap tahun, juga membuat populasi Jakarta semakin padat. Jakarta menjadi semakin padat di siang hari, dimana setiap hari jutaan warga yang tinggal di daerah penyangka seperti Bogor, Depok, Tangerang, atau Bekasi (Bodetabek), melakukan kegiatan ekonominya di Jakarta.

Di satu sisi, hubungan daerah penyangka dengan Ibu Kota telah menjadikan Jabodetabek sebagai wilayah teraglomerasi yang saling memiliki ketergantungan satu sama lain. Di sisi lain, kondisi ini menimbulkan persoalan pelik di sektor transportasi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya untuk menyediakan prasarana dan sarana transportasi untuk mengatasi masalah kemacetan di jalan-jalan Ibu Kota. Namun, hal tersebut terkendala oleh timpangnya rasio penambahan ruas jalan dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat.

DKI Jakarta Province's economic growth was also supported by the growth of most business sectors. The performance of other service business sectors showed the highest growth, as seen from the increase in the number of visitors to tourist attractions and the number of foreign tourists visiting Jakarta. In addition, the sector of the Provision of Accommodation and Food and Beverage also grew positively as seen from the increase in the average Room Occupancy Rate (TPK) of star hotels. The people's mobility which spurred an increase in dining activities also contributed to the growth. The transportation and warehousing business field also grew due to the increase in the volume of goods in sea transportation and the number of passengers in almost all modes of public transportation as well as the increase in the number of vehicles passing through toll roads in DKI Jakarta Province.

TOWARD EFFECTIVE TRANSPORTATION

DKI Jakarta's status as an economic and business center has attracted residents from various regions to try their luck in the capital city. The influx of residents coming to the capital, which continues to occur every year, has also made Jakarta's population denser. Jakarta becomes increasingly congested during the day, where every day millions of residents who live in neighboring cities such as Bogor, Depok, Tangerang, or Bekasi (Bodetabek), carry out their economic activities in Jakarta.

On the one hand, the relationship between the neighboring cities and the capital city has made Jabodetabek an agglomerated region that is mutually dependent on one another. On the other hand, this condition creates complex problems in the transportation sector. The Provincial Government of DKI Jakarta continuously makes efforts to provide transportation infrastructure and facilities to overcome the problem of congestion on the streets of the Capital City. However, this is constrained by the imbalance in the ratio of road expansion compared to the growth of motorized vehicles, both two-wheeled and four-wheeled.



Berdasarkan publikasi Polda Metro Jaya tahun 2017, diketahui laju pertambahan jalan di Jabodetabek hanya 1% per tahun, tidak berimbang dengan pertumbuhan kendaraan bermotor sebesar 11% per tahun, sehingga berimbas pada kemacetan.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan mengungkapkan kemacetan yang terjadi di daerah terpadat di Indonesia, Jabodetabek, mengakibatkan kerugian ekonomi senilai Rp71,4 triliun per tahun.

Salah satu solusi untuk mengatasi masalah kemacetan adalah mendorong masyarakat agar menggunakan transportasi publik untuk mendukung mobilitas mereka. Hal ini juga telah menjadi perhatian utama bagi pemerintah yang telah merumuskan strategi untuk melakukan pembangunan transportasi yang terintegrasi sebagai salah satu prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, yang berlanjut pada RPJMN 2020-2024.

RPJMN merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat kepada Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan ketersediaan dan layanan transportasi publik yang layak kepada masyarakat Ibu Kota. Hal ini sejalan dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 84 Tahun 2004 tentang Penetapan Pola Transportasi Makro di Provinsi DKI. Ketersediaan dan layanan transportasi publik tidak hanya menambah kapasitas daya angkut, tapi juga kenyamanan dan keamanan, serta sistem yang terintegrasi sehingga memudahkan warga.

Pembenahan moda transportasi umum di Jakarta sebagai ibu kota negara, terus dilakukan. Pada 2004, diresmikan beroperasinya moda transportasi Transjakarta yang merupakan sistem transportasi "*bus rapid transit*" pertama di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Pada tahun 2019, beroperasi moda transportasi massal berbasis rel, yaitu *mass rapid transit* (MRT) yang dikelola PT MRT Jakarta (Persero), dan Light Rapid Transit (LRT) yang dikelola oleh PT LRT Jakarta. Sebelumnya telah ada kereta komuter KRL Commuter Line yang dikelola PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero melalui PT Kereta Commuter Indonesia.

Tahun 2022, Pemprov DKI Jakarta meresmikan penerapan tarif terintegrasi transportasi publik di Jakarta yang berlaku untuk moda transportasi MRT Jakarta, Transjakarta, dan LRT Jakarta. Tarif ini dapat dinikmati melalui aplikasi ponsel pintar JakLingko dan kartu uang elektronik yang dapat dimutakhirkan menjadi Kartu Transportasi JakLingko melalui mesin *balance check terminal* (BCT) di stasiun MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan halte Transjakarta. Penerapan tarif terintegrasi ini akan semakin menyempurnakan upaya integrasi transportasi publik, baik layanan maupun fisik, yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui operator transportasi publiknya.

Based on the 2017 Polda Metro Jaya publication, it is known that the rate of road expansion in Jabodetabek is only 1% annually, a disproportion to the 11% annual growth of motorized vehicles which results in congestion.

The Jabodetabek (Greater Jakarta) Transportation Management Agency (BPTJ) of the Ministry of Transportation revealed that traffic jams occurring in Indonesia's most populous area, Jabodetabek, caused an economic loss of Rp71.4 trillion per year.

One of the solutions to overcome the congestion problem is to encourage people to use public transportation to support their mobility. This has also become a major concern for the government which has formulated a strategy to carry out integrated transportation development as one of the priorities in the 2014-2019 National Medium-Term Development Plan (RPJMN), which is reintroduced in the 2020-2024 RPJMN.

The RPJMN is a form of support from the central government to Pemprov DKI Jakarta to increase the availability and proper public transportation services for the people of the Capital City. This is in line with the DKI Jakarta Governor Decree No. 84 of 2004 concerning Determination of Macro Transportation Patterns in DKI Province. The availability and services of public transportation will not only increase the carrying capacity as well as comfort and safety, but also create an integrated system that makes it easier for the residents.

Improvement of public transportation modes in Jakarta as the nation's capital city is constantly performed. In 2004, the operation of the Transjakarta was inaugurated. Transjakarta is the first "*bus rapid transit*" transportation system in Southeast Asia and South Asia. In 2019, rail-based mass transportation mode started to operate, i.e. Mass Rapid Transit (MRT) managed by PT MRT Jakarta (Persero), and Light Rapid Transit (LRT) managed by PT LRT Jakarta. Previously there has been KRL Commuter Line commuter trains managed by PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero through PT Kereta Commuter Indonesia.

In 2022, the Provincial Government of DKI Jakarta inaugurated the application of integrated tariffs for public transportation in Jakarta which apply to MRT Jakarta, Transjakarta and LRT Jakarta. This tariff can be enjoyed through the JakLingko smartphone application and electronic money cards that can be upgraded to the JakLingko Transportation Card through balance check terminal (BCT) machines at MRT Jakarta stations, LRT Jakarta and Transjakarta bus stops. The application of this integrated fare will further enhance efforts to integrate public transportation, both service and infrastructure-wise which is being developed by the Provincial Government of DKI Jakarta through its public transportation operators.



Pengembangan transportasi publik di DKI Jakarta terus berlanjut di tahun 2022. Dari aspek pembangunan fisik, pengerjaan Fase 2A (Bundaran HI - Kota) telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hingga akhir tahun 2022 *progress* pengerjaan Fase 2A telah mencapai 18,09% dimana segmen 1 Bundaran HI-Harmoni telah mencapai 49,41%. Secara keseluruhan, proyek ini diharapkan akan selesai pada 2027 dan dapat beroperasi secara komersial.

Demikian juga halnya dengan sarana transportasi publik lainnya, seperti LRT Jakarta dan Transjakarta yang juga menunjukkan perkembangan yang sangat berarti di tahun 2022. Dengan tersedianya fasilitas integrasi antar moda, diharapkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum semakin meningkat. Hal tersebut penting dipenuhi karena berdasarkan kajian BPTJ, faktor kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan, menjadi alasan masyarakat selama ini lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang angkutan umum.

The development of public transportation in DKI Jakarta continued in 2022. From the aspect of infrastructure development, the work on Phase 2A (Bundaran HI - Kota) has shown positive progress. Until the end of 2022 the progress of Phase 2A has reached 18.09% where segment 1 Bundaran HI - Harmoni has reached 49.41%. Overall, the project is expected to complete and commercially operate by 2027.

Likewise with other public transportation facilities, such as the LRT Jakarta and Transjakarta which also showed very significant developments in 2022. With the availability of intermodal integration facilities, it is hoped that people's interest in using public transportation will increase. This is important to fulfill because based on BPTJ's study, the factors of convenience, security, safety and comfort are the reasons why people prefer to use private vehicles than public transportation.

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Operational Review by Business Segment

Laporan Keuangan MRT Jakarta belum memisahkan kegiatan usaha Perseroan sesuai PSAK 5 tentang Segmen Operasi. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa MRT Jakarta memiliki segmen tunggal. Sesuai dengan Anggaran Dasar PT MRT Jakarta (Persero), ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah:

1. Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum perkotaan, meliputi pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan dan pengusahaan prasarana;
2. Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum perkotaan, meliputi pembangunan sarana, pengoperasian sarana, perawatan dan pengusahaan sarana;
3. Pengembangan dan pengelolaan properti atau bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta Depo dan kawasan sekitarnya.

Pembahasan tinjauan operasi per segmen usaha pada laporan ini disesuaikan dengan lingkup kegiatan usaha Perseroan.

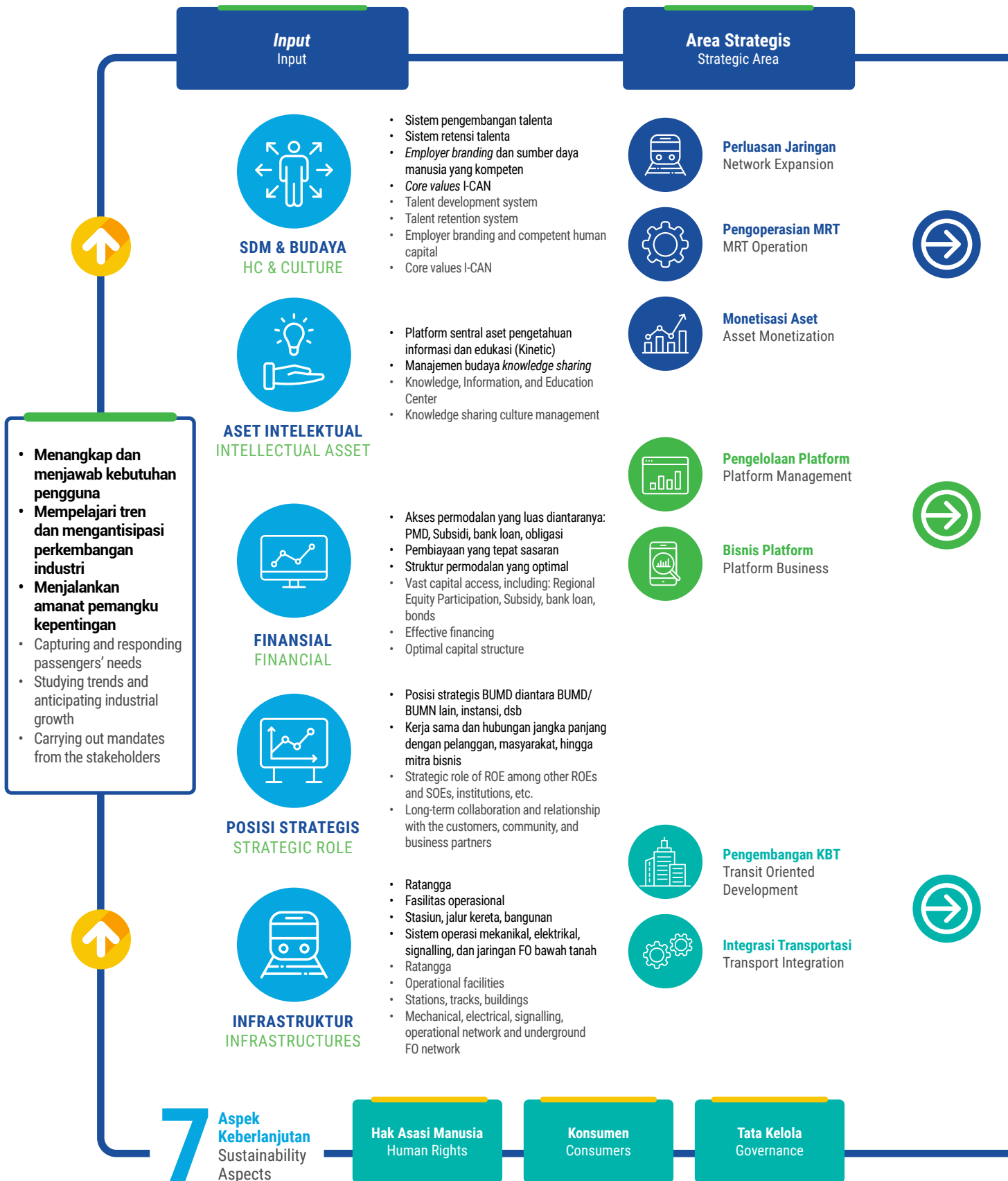
MRT Jakarta Financial Statements have not separated the Company's business activities in accordance with PSAK 5 regarding Operational Segments. Therefore, it can be concluded that MRT Jakarta has a single segment. In accordance with the Articles of Association of PT MRT Jakarta (Persero), the scope of the Corporation's activities are as follows:

1. Infrastructure management for public railways in an urban area that includes infrastructure development, infrastructure operations, infrastructure maintenance, and infrastructure management;
2. Facility management for public railways in an urban area that includes facility development, facility operations, facility maintenance, and facility management;
3. Development and management of property and business within station areas and the surrounding areas, as well as Depot and the surrounding areas.

The discussion on the review of operations per business segment in this report is adjusted to the scope of the Corporation's business activities.



Sasaran Strategis Strategic Target





Keterangan | Remarks:

Fase 1 Lebak Bulus - Bundaran HI: 16 km | Fase 1 Lebak Bulus - Bundaran HI: 16 km

Fase 2A Bundaran HI - Kota: 5,8 km | Fase 2A Bundaran HI - Kota: 5,8 km

Fase 2B Kota - Ancol Barat: ±6 km | Fase 2B Kota - Ancol Barat: ±6 km

Fase 3 Tahap 1 Segmen 1 Tomang - Medan Satria: ±24,5 km | Fase 3 Tahap 1 Segmen 1 Tomang - Medan Satria: ±24,5 km

Fase 4 Fatmawati - Kp. Rambutan: ±10,9 km | Fase 4 Fatmawati - Kp. Rambutan: ±10,9 km

KEGIATAN USAHA PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM PERKOTAAN

Pembangunan Prasarana

Untuk mewujudkan transportasi publik yang aman, nyaman dan efisien dibutuhkan prasarana dan infrastruktur yang memadai. Untuk itu, MRT Jakarta berupaya untuk menyiapkan prasarana sesuai dengan cetak biru yang telah disepakati.

Pelaksanaan pembangunan proyek MRT Jakarta dilakukan per tahap menurut jalur yang dilalui. Secara garis besar, pembangunan MRT Jakarta terbagi dalam 4 fase. Pembangunan MRT Jakarta Fase 1 yang menghubungkan jalur telah selesai dilaksanakan dan layanan MRT Jakarta telah beroperasi secara komersial. Saat ini, Perseroan tengah fokus dalam pembangunan MRT Jakarta Fase 2, yaitu jalur Bundaran HI - Ancol yang membentang sepanjang sekitar 11,8 kilometer.

Pengembangan selanjutnya adalah pembangunan MRT Jakarta Fase 3 yang melibatkan wilayah penyangga kota Jakarta yang membentang dari Cikarang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat hingga Balaraja, di Kabupaten Tangerang, Banten serta Fase 4 yang membentang dari Fatmawati hingga Kampung Rambutan.

Perkembangan pembangunan prasarana di masing-masing fase di tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut:

Pembangunan MRT Jakarta Fase 2

Pembangunan MRT Jakarta Fase 2 merupakan bagian dari upaya MRT Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Pemerintah Pusat untuk mewujudkan transportasi publik yang efektif, aman dan nyaman bagi masyarakat. MRT Jakarta Fase 2 membentang sepanjang 11,8 kilometer dari Bundaran HI hingga Ancol Barat. Proyek ini telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Saat ini, pembangunan MRT Jakarta Fase 2 yang tengah berjalan menjadi fokus utama bagi Perseroan. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, Perseroan membagi pembangunan MRT Jakarta Fase 2 menjadi dua tahap pekerjaan, yaitu:

1. MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI - Kota)

Fase 2A akan membentang sepanjang 5,8 kilometer yang terdiri dari tujuh stasiun bawah tanah, yaitu Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. Proyek Pembangunan MRT Jakarta Fase 2A ini terdiri dari 7 Paket Kontrak. Pelaksanaan proyek Pembangunan MRT Jakarta Fase 2A ini telah dimulai sejak 15 Juni 2020 dengan berlandaskan pada Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1713 Tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan Atas Gubernur Nomor 1728 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran HI.

URBAN PUBLIC RAILWAY INFRASTRUCTURE MANAGEMENT BUSINESS ACTIVITY

Infrastructure Development

To realize safe, comfortable and efficient public transportation, adequate facilities and infrastructure are needed. For this reason, MRT Jakarta has been trying to prepare infrastructure according to the agreed blueprint.

The implementation of the MRT Jakarta project development is carried out per stage according to the route traversed. In broad terms, MRT Jakarta construction is divided into 4 phases. The construction of MRT Jakarta Phase 1 which connects the lines has been completed and MRT Jakarta service has been operating commercially. Currently, the Corporation is focusing on the construction of MRT Jakarta Phase 2, namely Bundaran HI - Ancol line which stretches for about 11.8 kilometers.

The next development is the construction of MRT Jakarta Phase 3 which involves the Jakarta's neighboring cities stretching from Cikarang in Bekasi Regency, West Java, to Balaraja, in Tangerang Regency, Banten, as well as Phase 4 stretching from Fatmawati to Kampung Rambutan.

The development of infrastructure development in each phase in 2022 is described as follows:

Construction of MRT Jakarta Phase 2

The construction of MRT Jakarta Phase 2 is part of MRT Jakarta's efforts with the Government of DKI Jakarta Province and the Central Government to create effective, safe and comfortable public transportation for the community. MRT Jakarta Phase 2 stretches for 11.8 kilometers from Bundaran HI to Ancol Barat. This project has been designated as a National Strategic Project based on Presidential Regulation No. 56 of 2018 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation No. 3 of 2016 concerning the Acceleration of National Strategy Projects Implementation.

The ongoing construction of MRT Jakarta Phase 2 is currently the main focus for the Corporation. To increase the effectiveness of work implementation, the Corporation divides MRT Jakarta Phase 2 construction into two phases of work, namely:

1. MRT Jakarta Phase 2A (Bundaran HI - Kota)

Phase 2A will stretch for 5.8 kilometers consisting of seven underground stations, namely Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, and Kota. The Jakarta MRT Phase 2A Development Project consists of 7 Contract Packages. Implementation of the MRT Jakarta Phase 2A Development project has started since June 15, 2020 based on the Decree of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta Number 1713 of 2019 concerning Amendment to Governor's Decree Number 1728 of 2018 concerning Determination of Locations for the Construction of Bundaran HI Corridor Mass Rapid Transit Line.



2. MRT Jakarta Fase 2B (Kota - Ancol Barat)

Fase 2B terdiri dari dua stasiun bawah tanah (Mangga Dua dan Ancol Marina) dan satu stasiun *at grade*, serta satu depo di Ancol Barat dengan total panjang jalur sekitar 6 kilometer. Di tahun 2022, pekerjaan Pembangunan MRT Jakarta Fase 2B masih dalam tahap pengajuan pendanaan menggunakan JICA Loan, dimana telah dilaksanakan *Appraisal Mission* pada Januari - Maret 2022, dimana diputuskan bahwa pendanaan *Basic Engineering Design* serta *Tender Assistance* untuk MRT Fase 2B merupakan lingkup pada 2nd Slice Loan JICA untuk MRT Jakarta Fase 2 sesuai yang tertulis dalam *Minutes of Discussion* 2022. Paralel, sedang dilakukan proses perizinan untuk perolehan izin lingkungan, persiapan dokumen teknis dan proses perencanaan untuk pembebasan lahan.

Pembangunan MRT Jakarta Fase 2 (Bundaran HI - Ancol Barat) menggunakan pembiayaan dari JICA ODA Loan. Rencana pinjaman ini telah tercatat dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM/Bluebook) 2020-2024 per Oktober 2020 dan Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN/Greenbook) 2022 per Agustus 2022.

Pembangunan MRT Jakarta Fase 2A

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2022, Perseroan terus berupaya untuk mengoptimalkan pekerjaan Pembangunan MRT Jakarta Fase 2A. Pekerjaan konstruksi MRT Jakarta Fase 2A dibagi menjadi 2 segmen:

- Segmen 1 (Bundaran HI - Monas), dengan target selesai tahun 2027;
- Segmen 2 (Harmoni - Kota), dengan target selesai tahun 2029.

Adapun kronologi perubahan Jadwal Pekerjaan pada Proyek MRT Jakarta Fase 2A sebagai berikut:

1. Penyesuaian Target Operasi

Sehubungan dengan kegagalan tender CP 202 dan CP 203 serta terjadinya COVID 19, pada tahun 2020 dilakukan penyesuaian target operasi MRT Fase 2A menjadi Segmen 1 (Bundaran HI - Harmoni) : Kuartal I 2025 dan Segmen 2 (Bundaran HI - Kota) : Kuartal I 2026. Dilakukan juga pengadaan ulang untuk Paket CP 202 dan CP 203, serta pengadaan untuk Paket CP 205. Dalam prosesnya pengadaan, paket pekerjaan Sipil memperoleh Pemenang Lelang untuk Kontrak CP 203, namun pekerjaan Sipil CP 202 mengalami kegagalan tender kembali dan pekerjaan *Railway System and Track Work* CP 205 mengalami kegagalan tender. Adapun penyebab kegagalan pengadaan disebabkan oleh :

- a. CP 202: Berdasarkan *market sounding*, para peserta lelang menyatakan bahwa durasi konstruksi yang singkat dan risiko teknis pekerjaan konstruksi yang tinggi.
- b. CP 205: Peserta lelang menyatakan bahwa terdapat pertimbangan *interfacing* yang kompleks dengan kontraktor sipil dan durasi konstruksi yang singkat.

2. MRT Jakarta Phase 2B (Kota - Ancol Barat)

Phase 2B consists of two underground stations (Mangga Dua and Ancol Marina) and one at grade station, as well as one depot in Ancol Barat with a total length of about 6 kilometers. In 2022, the MRT Jakarta Phase 2B construction work was still in the stage of applying for funding using the JICA Loan, where an Appraisal Mission was carried out in January - March 2022. Based on the Appraisal Mission, it is decided that Funding for Basic Engineering Design and Tender Assistance for MRT Phase 2B is within the scope of the 2nd Slice Loan JICA for MRT Jakarta Phase 2 according to what is written in the 2022 Minutes of Discussion. In parallel, the permitting process is being carried out for obtaining environmental permits, preparing technical documents and planning processes for land acquisition.

The construction of MRT Jakarta Phase 2 (Bundaran HI - Ancol Barat) uses financing from the JICA ODA Loan. This loan plan has been recorded in the List of Medium Term Foreign Loan Plans (DRPLN-JM/Bluebook) for 2020-2024 as of October 2020 and the List of Priority Plans for Foreign Loans (DRPLN/Greenbook) for 2022 as of August 2022.

Construction of MRT Jakarta Phase 2A

In the midst of various challenges faced throughout 2022, the Company continuously strived to optimize the construction of MRT Jakarta Phase 2A. MRT Jakarta Phase 2A construction work is divided into 2 segments:

- Segment 1 (Bundaran HI - Monas), with a target of completion in 2027;
- Segment 2 (Harmoni - Kota), with a target of completion in 2029.

The chronology of changes to the Work Schedule for the Jakarta MRT Project Phase 2A is as follows:

1. Adjustments to Operational Targets

Due to the failure of the CP 202 and CP 203 tenders and the occurrence of COVID-19, in 2020 an adjustment to the operating target of MRT Phase 2A was made into Segment 1 (Bundaran HI - Harmoni): Quarter I 2025 and Segment 2 (Bundaran HI - Kota): First Quarter 2026. There were re-tender for CP 202 and CP 203 Packages and procurement for CP 205 Package. During the procurement process, the Civil works package had decided the Tender Winner for the CP 203 Contract, but the 2nd tender of CP 202 Civil works failed, while the tender for Railway System and Track works of Work CP 205 also failed. The failure of these two tender was caused by:

- a. CP 202: based on the market sounding, the Bidders stated that the duration of construction was short and the technical risks of construction work (Traffic Deck, Utilities, Underground Passageway) were high.
- b. CP 205 : The Bidders stated that there was a consideration of complex interfacing with the Civil Contractor and the construction duration was short.

Dalam upaya untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan dan menjaga target operasi MRT Fase 2A, maka diperoleh persetujuan *High Level* antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang dengan skema konfigurasi paket CP 202 - 205A melalui *Direct Contracting* dan paket CP 208 melalui *International Competitive Bidding* yang dituangkan dalam *Minutes of Discussion* 2020 dimana target operasi MRT Fase 2A menjadi Segmen 1 (Bundaran HI - Harmoni) : Kuartal I 2025 dan Segmen 2 (Bundaran HI - Kota) : Kuartal IV 2027. Pelaksanaan *Direct Contracting* paket CP202-205A kemudian mengalami kegagalan dikarenakan tidak diperolehnya kesepakatan pada tahap negosiasi dengan Kandidat.

2. Rencana Target Operasi Terkini

Pada tahun 2022, target operasi MRT Fase 2A disesuaikan kembali menjadi Segmen 1 (Bundaran HI - Harmoni) pada Kuartal II Tahun 2027, Segmen 2 (bundaran HI - Kota) skema skip operation pada Kuartal II Tahun 2029, dan *Full Segment* (Bundaran HI - Kota) pada Kuartal IV Tahun 2029. Skema ini diupayakan dengan melakukan rekonfigurasi paket pekerjaan menjadi CP 202 melalui *Re-Direct Contracting* dan CP 205 (gabungan CP 205A & CP 208) melalui pengadaan ulang *International Competitive Bidding*. Hal ini disetujui antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang yang dituangkan melalui *Minutes of Discussion* 2022. Hingga saat ini, Paket CP 202 telah memperoleh kesepakatan dengan kandidat yang ditunjuk selama *Re-Direct Contracting*. Paket CP 205 sedang dalam proses pengadaan ulang dan masih berlangsung, serta CP 206 dan CP 207 sedang dalam proses persiapan pengadaan.

Tujuh paket kontrak yang ada di proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 2A dijalankan secara paralel. Hingga akhir tahun 2022, progres pekerjaan tersebut telah mencapai 18,09%, lebih tinggi 0,81% dari yang ditargetkan sebesar 17,28%. Realisasi penggunaan dana hibah untuk proyek Fase 2 tahun 2022 per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.600.620.436.692 atau 89% dari total anggaran pada RKA Tahun 2022 sebesar Rp2.913.630.793.143.

In an effort to minimize delays and maintain MRT Phase 2A operating targets, a High Level agreement was obtained between the Government of Indonesia and the Government of Japan with the CP 202 - 205A package configuration scheme through Direct Contracting and the CP 208 package through International Competitive Bidding as outlined in the 2020 Minutes of Discussion where the target for MRT Phase 2A operation is Segment 1 (Bundaran HI - Harmoni): Quarter I 2025 and Segment 2 (Bundaran HI - City): Quarter IV 2027. Implementation of the Direct Contracting packages of CP202-205A failed as there is no agreement reached at the negotiation stage with the Candidate.

2. Most Recent Operation Target Plan

In 2022, the MRT Phase 2A operation target will be readjusted to Segment 1 (Bundaran HI - Harmoni): Quarter II 2027, Segment 2 (Bundaran HI - Kota Skip Operation scheme): Quarter II 2029, and Full Segment (Bundaran HI - Kota) : Quarter IV 2029. This scheme was pursued by reconfiguring the work package to become CP 202 through Re-Direct Contracting and CP 205 (combination of CP 205A & CP 208) through re-tender of International Competitive Bidding. This was agreed at a high level between the Government of Indonesia and the Government of Japan as outlined in the 2022 Minutes of Discussion. Until now, the CP 202 Package has obtained an agreement with the Candidate appointed during the Re-Direct Contracting. Package CP 205 is in the process of being re-tendered and is still ongoing, and Packages CP 206 and CP 207 are in the process of preparing for procurement.

The seven Contract Packages in the MRT Jakarta Phase 2A Development project are being executed in parallel and by the end of 2022, the progress of the work has reached 18.09%, 0.81% higher than the target of 17.28%. Realization of the use of Grant Funds for the 2022 Phase 2 MRT Project as of December 31, 2022 amounted to Rp2,600,620,436,692 or 89% of the total budget in the 2022 Work Plan Budget (RKA) of Rp2,913,630,793,143.





Perkembangan Pembangunan MRT Jakarta Fase 2A

Development of MRT Jakarta Phase 2A

Aspek Aspect	Uraian Description	
Perizinan Licensing	Saat ini MRT Jakarta sedang dalam proses pemenuhan perizinan di tahap detail desain sebelum memasuki konstruksi di lapangan untuk Stasiun MRT Thamrin, Monas, Glodok dan Kota dengan proses perizinannya dilakukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Telah dilaksanakan pembahasan desain Stasiun MRT bersama dengan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG). Saat ini terdapat beberapa masukan yang sedang ditindaklanjuti sebelum pembahasan sidang selanjutnya dari aspek arsitektur, struktur, dan mekanikal, elektrik, plumbing (MEP). Currently MRT Jakarta is in the process of obtaining permits for the design detail stage prior to entering on-site construction for Thamrin, Monas, Glodok and Kota MRT Stations with the permit process being carried out through the One Stop Investment and Services Agency (DPMPTSP). Discussions on the design of the MRT Station have been carried out together with the Building Construction Experts Team (TABG). Currently there are several inputs that are being followed up before the discussion of the next session from the architectural, structural, and mechanical, electrical, plumbing (MEP) aspects.	
Manajemen Kontrak Contract Management	CP 201	Pada tahun 2022, pekerjaan pembangunan CP 201 berjalan sesuai jadwal dengan perkembangan pembangunan telah mencapai 49,41%. Saat ini, pembangunan Stasiun Monas telah masuk ke tahap penyelesaian pengecoran <i>base slab</i> di <i>station box</i>, pengecoran kolom <i>base</i> dan <i>concourse level</i> di <i>station box</i>, pengecoran <i>bearing wall</i> di gardu induk, persiapan <i>main drive</i> untuk <i>tunnel</i> dari Stasiun Thamrin sisi utara menuju Stasiun Monas sisi selatan (<i>northbound</i>). Hingga akhir 2022 ini, PT MRT Jakarta (Persero) menargetkan penyelesaian penggalian <i>station box</i>, <i>roof slab</i>, <i>concourse slab</i>, dan <i>base slab</i> stasiun, serta memulai pengeboran koridor Monas - Thamrin. CP 201 construction work has been progressing according to schedule. As of December 25, 2022, construction progress has reached 49.41%. Currently, the construction of Monas Station has entered the stage of completion of base slab casting at the station box, casting of base columns and concourse levels at the station box, casting of bearing walls at the substation, preparation of the main drive for the tunnel from Thamrin Station on the north side to Monas Station on the north side. south (<i>northbound</i>). Until the end of 2022, PT MRT Jakarta (Persero) targeted to complete the excavation of the station boxes, roof slabs, concourse slabs and station base slabs, and start drilling the Monas - Thamrin corridor. Pekerjaan konstruksi pintu masuk pertama Stasiun MRT Jakarta Fase 2A CP201 yaitu <i>Entrance-1</i> Stasiun MRT Monas di Jalan Museum dilakukan dengan tahap pekerjaan sebagai berikut: 1. Tahap pekerjaan awal yang terdiri dari pembersihan lahan dan pengamanan utilitas bawah tanah; 2. Pekerjaan <i>launching shaft</i> di Jalan Museum dan <i>receiving shaft</i> di sisi utara Monas; 3. Pelaksanaan <i>box jacking</i> untuk membuat terowongan bawah tanah melalui proses pendorongan beton pracetak segmen per segmen ke dalam tanah dengan alat <i>hydraulic jack</i>; dan 4. Pekerjaan <i>reinstatement</i> untuk mengembalikan area kerja ke kondisi semula sebelum pekerjaan konstruksi dimulai. The construction work for the first entrance to the MRT Jakarta Station Phase 2A CP201, i.e. Entrance-1 to the Monas MRT Station on Jalan Museum, was carried out with the following stages of work: 1. Initial work phase consisting of land clearing and securing of the underground utilities; 2. Work on the launching shaft on Jalan Museum and the receiving shaft on the north side of Monas; 3. Implementation of box jacking to construct underground tunnels through the process of pushing precast concrete segment by segment into the ground with a hydraulic jack; And 4. Reinstatement work to return the work area to its original condition before construction work began. MRT Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan mulai 15 Desember 2022 sampai dengan 31 Agustus 2024, dengan detail sebagai berikut: • Jalan Museum akan ditutup, dan arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis menuju Jalan Medan Merdeka Barat dialihkan selama masa pembangunan <i>Entrance-1</i> Stasiun Monas MRT Jakarta berlangsung; • Arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis menuju Jalan Medan Merdeka Barat akan dialihkan melalui Jalan Budi Kemuliaan. MRT Jakarta has been conducting traffic flow management from 15 December 2022 to 31 August 2024, with the following details: • Jalan Museum will be closed, and traffic flow from Jalan Abdul Muis to Jalan Medan Merdeka Barat will be diverted during the construction of Entrance-1 at Monas MRT Jakarta Station; • Traffic flow from Jalan Abdul Muis to Jalan Medan Merdeka Barat will be diverted via Jalan Budi Kemuliaan.
	CP 202	Konstruksi CP 202 merupakan paket kontrak pembangunan MRT Jakarta Fase 2A yang akan membangun Stasiun Harmoni, Stasiun Sawah Besar, dan Stasiun Mangga Besar dengan total jalur sepanjang sekitar 1,8 kilometer. Sepanjang tahun 2022, progres pekerjaan paket kontrak CP202 telah mencapai 8,44% per akhir Desember 2022. Stasiun Sawah Besar dan Mangga Besar akan menjadi salah satu stasiun dengan desain unik karena akan memiliki empat lantai di bawah tanah yang kedalamannya mencapai sekitar 28 meter. Pada pembangunan CP 202, ditemukan rel trem sebanyak enam titik eskavasi dari delapan titik eskavasi yang dilakukan. The CP 202 construction is a contract package for the construction of MRT Jakarta Phase 2A which will build Harmoni Station, Sawah Besar Station, and Mangga Besar Station with a total track length of around 1.8 Kilometers. As of end of December 2022, the work progress of the CP202 contract package has reached 8.44%. The Sawah Besar and Mangga Besar stations will be the stations with a unique design because they will have four floors underground with a depth of around 28 meters. During the construction of CP 202, tram rails were found in six of the eight excavation points carried out. Perseroan bersama dengan tim ahli arkeologi dan kontraktor pelaksana konstruksi CP202 Shimizu-Adhi Karya Joint Venture (SAJV) telah menyusun metode pekerjaan penyelamatan temuan rel trem tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Koordinasi rutin juga dilakukan dengan instansi terkait seperti Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. The Corporation together with a team of archaeological experts and construction contractor of CP202 from Shimizu-Adhi Karya Joint Venture (SAJV) have developed a work method to protect the tram rail findings in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage. Routine coordination is also carried out with related agencies such as the DKI Jakarta Provincial Culture Office. Selain itu, melakukan pekerjaan pondasi dan struktur untuk halte bus serta menyusun opsi pola operasi Transjakarta saat proses revitalisasi Halte Monas. In addition, the Corporation conducted foundation and structural work for bus shelters and prepared options for Transjakarta operation patterns during the Monas shelter revitalization process.

Perkembangan Pembangunan MRT Jakarta Fase 2A
Development of MRT Jakarta Phase 2A

Aspek Aspect	Uraian Description
CP 203	Sampai dengan akhir 2022, progres pekerjaan CP 203 mencapai 23,39%. Saat ini sedang dilakukan pekerjaan pembangunan D-Wall di Stasiun Kota, setelah diselesaikan pembangunan D-Wall di Stasiun Glodok. Lokasi pembangunan yang berdekatan dengan area permukiman dan aktivitas warga menjadi tantangan utama, jarak penggalian dan bangunan di sekitarnya bahkan kurang dari dua meter. Terdapat sekitar 100 bangunan yang berada di sekitar area proyek pembangunan Stasiun Kota. Tim konstruksi MRT Jakarta bersama dengan Kontraktor melakukan sosialisasi kepada para penghuni, pemilik, atau pengelola bangunan tersebut. Selain sosialisasi dan pendekatan langsung, secara teknis, tim konstruksi juga melakukan <i>inject soil improvement</i> dan <i>pre-construction survey</i> terhadap seluruh bangunan tersebut. Hal itu dilakukan untuk memastikan agar proses pembangunan tidak menimbulkan dampak buruk terhadap bangunan di sekitar area proyek. As of the end of 2022, work progress for CP 203 reached 23.39%. Currently, D-Wall construction work is being carried out at Kota Station, after the completion of the D-Wall construction at Glodok Station. Construction site that is close to residential areas and residents' activities are the main challenge, the distance between the excavation and the surrounding buildings is even less than two meters. There are around 100 buildings around the Kota Station development project area. The MRT Jakarta construction team together with the Contractor conducted dissemination to the occupants, owners or managers of the buildings. In addition to the dissemination and hands-on approach, technically, the construction team also conducted inject soil improvement and pre-construction surveys for all of the buildings. This is done to ensure that the construction process does not have an adverse impact on buildings around the project area. Selama pembangunan berlangsung, banyak ditemukan benda cagar budaya dan terduga cagar budaya, seperti saluran air kuno Batavia (terakota) dan rel trem kuno. Sebagaimana dalam upaya untuk menjaga kelestarian benda cagar budaya maupun terduga cagar budaya, telah dilakukan penanganan khusus dengan beberapa bagian struktur terakota diangkat secara utuh, serta benda - benda arkeologi lainnya untuk selanjutnya dimanfaatkan atau dilestarikan menjadi bagian dari mini galeri Stasiun MRT Kota. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pelestarian terhadap sejarah Jakarta. During the construction, many objects of cultural heritage and suspected cultural heritage were found, such as the ancient Batavia (terracotta) waterways and ancient tram rails. As an effort to preserve objects of cultural heritage and suspected cultural heritage, special handling has been carried out by lifting several parts of the terracotta structures in full, as well as other archaeological objects to be further utilized or preserved as part of the mini gallery of the Kota MRT Station. This is done as part of efforts to preserve the history of Jakarta. Pekerjaan galian tanah, <i>road decking</i> dan penanganan air tanah dan tanah terkontaminasi sedang dilakukan di Stasiun Glodok. Perkembangan penanganan air tanah dan tanah terkontaminasi telah dikirimkan secara rutin kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Earth excavation work, road decking and handling of groundwater and contaminated soil are being carried out at Glodok Station. Progress on handling groundwater and contaminated soil is reported regularly to the Ministry of Environment and Forestry.



Perkembangan Pembangunan MRT Jakarta Fase 2A

Development of MRT Jakarta Phase 2A

Aspek Aspect	Uraian Description
CP 205	Pengadaan CP 205 dengan metode <i>International Competitive Bidding</i> (ICB) telah memperoleh persetujuan secara prinsip melalui <i>high level coordination meeting</i> antara Menteri Perhubungan dan Ambassador of Japan pada 4 Maret 2022, selanjutnya telah dituangkan dan disahkan dalam <i>Minutes of Discussion 2022</i> yang ditandatangani pada 23 Mei 2022. Proses persiapan yang dilaksanakan, sebagai berikut: The procurement of CP 205 using the International Competitive Bidding (ICB) method has obtained a principle approval through a high level coordination meeting between the Minister of Transportation and the Ambassador of Japan on March 4, 2022, which was then stated and ratified in the 2022 Minutes of Discussion signed on May 23, 2022. The preparation process carried out is as follows: a. Pelaksanaan <i>market audience</i> selama Februari - Juli 2022 kepada <i>potential bidders</i> yang menunjukkan minat terhadap CP 205 dalam upaya mengumpulkan masukan terhadap pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam proses persiapan pengadaan ulang dari aspek teknis dan kontraktual; b. Telah memperoleh JICA Concurrence pada 16 Agustus 2022 dan telah dilaksanakan pengadaan <i>re-tender</i> pada 25 Agustus 2022. <i>Pre-bid meeting</i> telah dilakukan pada 15 September 2022, 17 dan 23 November 2022, dan 21 Desember 2022 serta <i>site visit</i> telah dilakukan di bulan Oktober 2022 - Januari 2023; dan c. Saat ini sedang berlangsung proses klarifikasi dengan <i>potential bidders</i> dengan target penyerahan proposal penawaran pada Maret 2023. a. Implementation of a market audience during February - July 2022 for potential bidders who show interest in CP 205 in an effort to gather input on considerations that need to be taken in the process of preparing for re-tender from technical and contractual aspects; b. Obtained JICA Concurrence on August 16, 2022 and re-tender procurement was carried out on August 25, 2022. Pre-bid meetings were conducted on September 15, 2022, November 17 and 23, 2022, and December 21, 2022 and site visits were conducted in October 2022 - January 2023; And c. Currently a clarification process is underway with potential bidders with a target of submitting bid proposals in March 2023.



Perkembangan Pembangunan MRT Jakarta Fase 2A
Development of MRT Jakarta Phase 2A

Aspek Aspect	Uraian Description
CP 206	Menanggapi JICA <i>concurrency</i> dokumen tender CP 206: <i>rolling stock</i> yang telah dikirimkan oleh MRT Jakarta pada 19 Agustus 2021, JICA menyampaikan balasan akan menunda segala komentar pada draf dokumen tender yang telah disampaikan sebelum terdapat kepastian pada proyek lainnya dan kepastian lahan Depo. MRT Jakarta menunggu informasi lebih lanjut terkait Depo Ancol, telah dilakukan <i>market sounding</i> kembali dan <i>site visit</i> dengan manufaktur pada 12 dan 13 Agustus 2022. In response to JICA's <i>concurrency</i> of the CP 206 tender document: <i>rolling stock</i> was already sent by MRT Jakarta on August 19, 2021, JICA replied that it would postpone all comments on the draft tender document that had been submitted before there was confirmation on other projects and the Depo land. MRT Jakarta is waiting for further information regarding the Ancol Depo, a market sounding has been conducted again and site visit with manufacturers has also been done, respectively on August 12 and 13, 2022. Selain itu, seiring dengan progres CP 205, terdapat perubahan kebutuhan spesifikasi teknis dan jumlah pengadaan kereta. Saat ini, MRT Jakarta berupaya untuk kembali melakukan <i>market sounding</i> dengan rencana jumlah pengadaan kereta sebanyak 8 rangkaian kereta, yang direncanakan tender akan dimulai pada Kuartal I Tahun 2023. In addition, along with the CP 205 progress, there have been changes in the need for technical specifications and the number of trains procured. Currently, MRT Jakarta is trying to conduct market sounding again with a plan to procure a total of 8 train sets. Tender for this procurement is planned to start in the first quarter of 2023.
CP 207	MRT Jakarta dan PT Jakarta Lingko Indonesia (JLI) akan mengatur integrasi ticketing antar operator menggunakan kartu transportasi serta integrasi pembayaran dengan QR dan <i>account based ticketing</i> (ABT). Penerapan tarif terintegrasi transportasi publik telah berlaku untuk moda transportasi MRT Jakarta, Transjakarta, dan LRT Jakarta. MRT Jakarta and PT Jakarta Lingko Indonesia (JLI) will arrange ticketing integration between operators using transportation cards as well as payment integration with QR and <i>account based ticketing</i> (ABT). The application of integrated public transportation tariffs has been in effect for MRT Jakarta, Transjakarta, and LRT Jakarta. Merujuk kepada Surat MRT Jakarta kepada Bank Indonesia, No. 917/BOD-MRT/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 perihal Penyampaian Komitmen Bersama antara PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dan PT MRT Jakarta (MRT Jakarta) terkait konvergensi teknis Penggunaan SAM Bersama Uang Elektronik Chip Based bahwa MRT Jakarta bersama dengan KCI telah berkoordinasi dan berkomitmen untuk menyelesaikan konvergensi teknis 1 (satu) SAM selambat-lambatnya pada September 2023. Referring to MRT Jakarta Letter to Bank Indonesia No. 917/BOD-MRT/VIII/2022 dated August 12, 2022 regarding Submission of a Joint Commitment between PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) and PT MRT Jakarta (MRT Jakarta) on technical convergence on the use of SAM Bersama Chip-Based Electronic Money, MRT Jakarta together with KCI have coordinated and committed to complete the technical convergence of 1 (one) SAM no later than September 2023. Namun, sehubungan dengan hasil pembahasan dan kajian MRT Jakarta, bahwa MRT Jakarta memutuskan tidak akan meneruskan implementasi konvergensi teknis 1 (satu) SAM serta rencana ke depan untuk melanjutkan sistem pembayaran dengan mengembangkan ke arah <i>server based issuer</i>. Berdasarkan keputusan tersebut, MRT Jakarta telah bersurat dan menyampaikan persetujuan kepada Kementerian Perhubungan dan Bank Indonesia agar kartu MTT masih dapat diedarkan hingga November 2024, yakni akhir dari masa berlaku izin penerbit chip based MRT Jakarta. Perseroan akan melanjutkan sistem pembayaran dengan mengembangkan ke arah <i>server based issuer</i> dengan mempertimbangkan beberapa aspek risiko seperti risiko operasional, risiko strategi, risiko keuangan, dan risiko pasar untuk keberlangsungan MRT Jakarta. However, in relation to the results of discussions and studies on MRT Jakarta, MRT Jakarta has decided not to continue with the implementation of 1 (one) SAM technical convergence and future plan to continue the payment system by developing towards a server based issuer. Based on this decision, MRT Jakarta has written and submitted approval to the Ministry of Transportation and Bank Indonesia so that MTT cards can still be circulated until November 2024, which is the end of the validity period for the issuance of MRT Jakarta chip-based permit. The Corporation will continue the payment system by developing towards a server based issuer by considering several risk aspects such as operational risk, strategic risk, financial risk, and market risk for the sustainability of MRT Jakarta.

Paket Kontrak MRT Jakarta Fase 2A Terkait Pekerjaan D-Wall RSS Taman Monas dan Akumulasi Perkembangan Konstruksi per 31 Desember 2022

MRT Jakarta Phase 2A Contract Package Related to D-Wall Work at RSS Taman Monas and Accumulation of Construction Progress as of December 31, 2022

Paket Kontrak Contract Package	Kontraktor Contractor	Pekerjaan Work	Persentase Bobot Pekerjaan (%) Work Weight Percentage (%)	Perkembangan (%) Progress (%)		
				Rencana Plan	Aktual Actual	Deviasi Deviation
CP 200	PT Trocon Indah Perkasa	Dinding diafragma dan RSS pada Taman Monas Diaphragm wall and RSS at Taman Monas	100	100	100	-



Paket Kontrak MRT Jakarta Fase 2A dan Akumulasi Perkembangan Konstruksi per 31 Desember 2022
MRT Jakarta Phase 2A Contract Package and Construction Progress Accumulation as of December 31, 2022

Paket Kontrak Contract Package	Kontraktor Contractor	Pekerjaan Work	Persentase Bobot Pekerjaan (%) Work Weight Percentage (%)	Perkembangan (%) Progress (%)		
				Rencana Plan	Aktual Actual	Deviasi Deviation
CP 201	SAJV	Bundaran HI - Harmoni (2 stasiun bawah tanah, pengeboran terowongan, dan C&C terowongan) Bundaran HI - Harmoni (2 underground stations, tunnel drilling and tunnel C&C)	23,82	46,66	49,41	2,75
CP 202	SAJV	Harmoni - Mangga Besar (3 stasiun bawah tanah, pengeboran terowongan) Harmoni - Mangga Besar (3 underground stations, tunnel drilling)	21,54	8,15	8,44	0,29
CP 203	SMCC-HK	Mangga Besar - Kota (2 stasiun bawah tanah, pengeboran terowongan, dan C&C terowongan) Mangga Besar - Kota (2 underground stations, tunnel drilling and tunnel C&C)	19,24	22,89	23,39	0,50
CP 205	TBA	Sistem perkeretaapian dan jalan rel Railway system and railroads	16,96	0,00	0,00	0,00
CP 206	TBA	Pengadaan kereta Rolling stock procurement	15,93	0,00	0,00	0,00
CP 207	TBA	Sistem Pertiketan (<i>Automatic Fare Collection</i>) Ticketing System (<i>Automatic Fare Collection</i>)	2,50	0,00	0,00	0,00
Keseluruhan MRT Jakarta Fase 2A Overall MRT Jakarta Phase 2A			100,00	17,28	18,09	0,81

Keterangan:

- CP 204 dialihkan ke MRT Jakarta Fase 2B
- TBA: To be announced

SA JV: Shimizu Corporation - Adhi Karya Joint Venture

SMCC-HK JO: Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd. - Hutama Karya Joint Operation

Note:

- CP 204 was diverted to MRT Jakarta Phase 2B
- TBA: To be announced

SA JV: Shimizu Corporation - Adhi Karya Joint Venture

SMCC-HK JO: Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd. - Hutama Karya Joint Operation

MRT Jakarta Fase 2B (Kota - Ancol Barat)

MRT Jakarta Fase 2B (Kota - Ancol Barat) merupakan rute ekstensi MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI - Kota), menuju lahan depo potensial di Ancol Barat. Kebutuhan akan proyek MRT Jakarta Fase 2B berangkat dari kebutuhan depo baru untuk menampung tambahan rangkaian kereta yang dibutuhkan guna melayani peningkatan jumlah pengguna jasa di masa depan.

Sehubungan dengan rencana pembiayaan MRT Jakarta Fase 2 (Bundaran HI - Ancol Barat) menggunakan JICA ODA Loan yang dibagi menjadi beberapa slice pinjaman, proses JICA Appraisal Mission untuk 2nd Slice Loan telah berlangsung pada Januari - Mei 2022, diakhiri dengan ditandatanganinya *Minutes of Discussion* pada 23 Mei 2022. Lingkup *2nd Slice Loan* mencakup pembiayaan konstruksi dan konsultasi Fase 2A dan *Basic Engineering Design* Fase 2B. Sampai dengan akhir periode pelaporan, telah dilaksanakan *Pledge* atas *2nd Slice Loan* untuk MRT Jakarta Fase 2 antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia pada 14 November 2022 yang telah memasuki tahap *Loan Negotiation*. Sebagai salah satu langkah penandatanganan perjanjian, secara paralel juga sedang dilaksanakan proses dokumen *Exchange of Notes*, *Note Verbale*, dan *Record of Discussions* antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia.

MRT Jakarta Phase 2B (Kota - Ancol Barat)

MRT Jakarta Phase 2B (Kota - Ancol Barat) is an extension route for MRT Jakarta Phase 2A (Bundaran HI - Kota), towards a potential depot area in Ancol Barat. The need for the MRT Jakarta Phase 2B project came from the need for a new depot to accommodate additional train sets required to cater more passengers in the future.

In connection with the plan to finance MRT Jakarta Phase 2 (Bundaran HI - Ancol Barat) using the JICA ODA Loan which is divided into several loan slices, the JICA Appraisal Mission process for the 2nd Slice Loan took place in January - May 2022 and was ended with the signing of the Minutes of Discussion on 23 May 2022. The scope of the 2nd Slice Loan includes construction and consultancy financing for Phase 2A and Basic Engineering Design for Phase 2B. Until the end of the reporting period, the Pledge of the 2nd Slice Loan for MRT Jakarta Phase 2 between the Government of Japan and the Government of Indonesia had been implemented on 14 November 2022 and had entered the Loan Negotiation stage. As one of the steps to the signing of the agreement, the processes of Exchange of Notes, Note Verbale, and Record of Discussions between the Government of Japan and the Government of Indonesia are also being carried out parallelly.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2021, sebagai salah satu prasyarat pengurusan izin lingkungan, Perseroan telah mendapatkan Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah (Pertek BMAL) untuk MRT Jakarta Fase 2B yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta pada 22 November 2022. Sampai dengan akhir periode pelaporan, sedang dilaksanakan integrasi dokumen Pertek BMAL pada dokumen Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan, dan Rencana Pemantauan Lingkungan (ANDAL RKL-RPL) untuk selanjutnya akan diajukan proses permohonan izin lingkungan MRT Jakarta Fase 2B.

Perencanaan Pembangunan MRT Jakarta Fase 3

Upaya untuk membangun transportasi publik yang terintegrasi juga akan menjangkau wilayah-wilayah penyangga kota Jakarta. Karena itu, MRT Jakarta juga telah merencanakan pembangunan MRT Jakarta Fase 3 yang membentang pada koridor timur ke barat sepanjang 87,3 kilometer, menghubungkan Cikarang, Jawa Barat dengan Balaraja, Tangerang, Banten, melalui wilayah DKI Jakarta. Perencanaan MRT Jakarta Fase 3 dikoordinasikan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan karena melintasi wilayah di tiga provinsi.

Sesuai dokumen Engineering Services for Jakarta MRT East-West Line Project tahun 2022, perencanaan MRT Fase 3 terbagi dalam beberapa tahap:

1. Tahap 1 Segmen 1: Tomang - Medan Satria
2. Tahap 1 Segmen 2: Tomang - Kembangan
3. Tahap 2 Barat: Kembangan - Balaraja
4. Tahap 2 Timur: Medan Satria - Cikarang

Penandatanganan Nota Kerja Sama telah dilaksanakan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang terkait kelanjutan pembangunan MRT Jakarta Fase 3 Tahap 1 (Kembangan - Medan Satria) dalam Presidensi G20 di Bali pada 14 November 2022.

Jalur Fase 3 yang panjang juga mengundang minat dari pihak-pihak lainnya di luar Pemerintah/Lembaga Jepang yang selama ini menjadi pendukung utama pembangunan Fase 1 dan 2, salah satunya adalah Pemerintah Inggris yang juga telah menandatangani Nota Kerja sama serupa pada Presidensi G20 untuk kerjasama pengembangan jalur MRT secara umum, dengan preferensi khusus pada Fase 3.

Capaian pekerjaan persiapan pembangunan Fase 3 di Kementerian Perhubungan sampai dengan akhir 2022 telah menyelesaikan kajian trase kereta dan dalam proses penyusunan serta finalisasi kajian teknis pendahuluan lainnya seperti *Basic Engineering Design*, *Analisa Dampak Lalu Lintas*, serta *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* (LARAP).

As stipulated in Government Regulation no. 22 of 2021 and Minister of Environment Regulation No. 5 of 2021, as one of the prerequisites for obtaining an environmental permit, the Corporation has obtained Technical Approval for Wastewater Quality Standard (Pertek BMAL) for MRT Jakarta Phase 2B issued by the DKI Jakarta Provincial Environmental Office on November 22, 2022. Until the end of the reporting period, integration of the Pertek BMAL document is being carried out in the Environmental Impact Analysis, Environmental Management Plan, and Environmental Monitoring Plan (ANDAL RKL-RPL) documents for the subsequent process of applying for an environmental permit for MRT Jakarta Phase 2B.

MRT Jakarta Phase 3 Development Planning

Efforts to build integrated public transportation will also reach Greater Jakarta. Therefore, MRT Jakarta has also planned the construction of MRT Jakarta Phase 3 which will span on an 87.3 kilometer east-west corridor, connecting Cikarang, West Java with Balaraja, Tangerang, Banten, via DKI Jakarta area. MRT Jakarta Phase 3 planning is coordinated by the Directorate General of Railways of the Ministry of Transportation because it crosses areas in three provinces.

In accordance with the Engineering Services document for the Jakarta MRT East-West Line Project for 2022, MRT Phase 3 planning is divided into several stages:

1. Phase 1 Segment 1: Tomang - Medan Satria
2. Phase 1 Segment 2: Tomang - Kembangan
3. West Phase 2: Kembangan - Balaraja
4. East Phase 2: Medan Satria - Cikarang

The Government of Indonesia and the Government of Japan have signed a Memorandum of Cooperation regarding the continuation of the construction of MRT Jakarta Phase 3 Phase 1 (Kembangan - Medan Satria) during the G20 Presidency in Bali on November 14, 2022.

The long Phase 3 track also invites interest from other parties outside the Japanese Government/Institutions which have been the main supporters of Phase 1 and 2 development. One of these other parties is the British Government which has also signed a similar Memorandum of Cooperation at the G20 Presidency on the cooperation of MRT lines development in general, with special preference on Phase 3.

The achievement of the Phase 3 development preparatory work at the Ministry of Transportation until the end of 2022 was the completion of a study of the train alignment and this was in the process of preparing and finalizing other preliminary technical studies such as *Basic Engineering Design*, *Traffic Impact Analysis*, and *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* (LARAP).



Perencanaan Pembangunan MRT Jakarta Fase 4

Fase selanjutnya dari pengembangan transportasi publik yang terintegrasi adalah pengembangan MRT Jakarta Fase 4. Rencana pengembangan ini berangkat dari beberapa dokumen diantaranya Jabodetabek *Urban Transportation Policy Integration Project Phase 2* (JUTPI 2) dan *Draft Rencana Peraturan Daerah Rencana Induk Transportasi (RIT) Jakarta* dan *Draft Rencana Induk Perkeretaapian Perkotaan (RIPP) Jakarta 2019 - 2039* di Tahun 2022.

Sejak tahun 2019, Perseroan dan Pemprov DKI telah beberapa koridor angkutan masal terintegrasi dalam *Draft Rencana Peraturan Daerah Rencana Induk Transportasi (RIT) Jakarta 2019-2039*. Dari koridor yang ada, terpilih koridor Taman Mini Indonesia Indah (TMII)-Fatmawati sepanjang 12,31 kilometer, yang direncanakan memiliki tujuh stasiun bawah tanah, tiga stasiun layang, dan satu depo, serta terintegrasi dengan koridor MRT Jakarta Fase 1 (Lebak Bulus-Bundaran HI), LRT Jabodebek, KRL Commuter Line, dan TransJakarta. Dalam perjalanannya jalur Fase 4 memperoleh minat kerja sama pembangunan dari Lembaga/Badan Usaha asal Korea Selatan dimana dalam studinya pihak Korea Selatan mengusulkan untuk memodifikasi jalur menjadi sepanjang 10,9 kilometer dengan terminal di Terminal Kampung Rambutan atas pertimbangan jumlah pengguna jasa dan efisiensi.

Penandatanganan Nota Kesepahaman telah dilaksanakan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan terkait pembangunan MRT Jakarta Fase 4 koridor Fatmawati–Kampung Rambutan dalam Presidensi G20 di Bali pada 14 November 2022. Hingga akhir tahun 2022, MRT Jakarta didukung mitra strategis telah menyelesaikan dokumen proposal pelaksanaan pembangunan Fase 4 secara Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam bentuk laporan prastudi kelayakan kepada pemangku kepentingan terkait yaitu Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

MRT Jakarta Phase 4 Development Planning

The next phase of integrated public transportation development is the development of MRT Jakarta Phase 4. This development plan starts from several documents including the Jabodetabek *Urban Transportation Policy Integration Project Phase 2* (JUTPI 2) and the *Draft Plan for Regional Regulations on the Jakarta Transportation Master Plan (RIT)* and the *Draft Master Plan for Jakarta Urban Railways Plan (RIPP) 2019 - 2039* in 2022.

Since 2019, the Corporation and DKI Provincial Government have integrated several mass transit corridors in the *Regional Regulation Draft on the 2019-2039 Jakarta Transportation Master Plan (RIT)*. From the existing corridors, the 12.31 kilometer Taman Mini Indonesia Indah (TMII) - Fatmawati corridor was selected, which is planned to have seven underground stations, three elevated stations and one depot, as well as being integrated with the MRT Jakarta Phase 1 corridor (Lebak Bulus - Bundaran HI), LRT Jabodetabek, KRL Commuter Line, and TransJakarta. In its development, the Phase 4 line received interest in development cooperation from an Institution/ Business Entity from South Korea. In the study, the South Korean side proposed to modify the line to be 10.9 kilometers long with a depot at Kampung Rambutan Terminal for consideration of the number of passengers and efficiency.

The Government of Indonesia and the Government of South Korea signed a Memorandum of Understanding regarding the construction of MRT Jakarta Phase 4 of the Fatmawati-Kampung Rambutan corridor during the G20 Presidency in Bali on November 14, 2022. Until the end of 2022, MRT Jakarta, supported by strategic partners, has completed the proposal document for the implementation of Phase 4 development in Public Private Partnership (PPP) in the form of a pre-feasibility study report to relevant stakeholders, i.e. the Ministry of Transportation and the Provincial Government of DKI Jakarta.



Pengoperasian Prasarana

Sejalan dengan semakin menurunnya penyebaran COVID-19, pemerintah juga menurunkan level penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah DKI Jakarta. Kebijakan tersebut menjadi hal yang sangat baik bagi Perseroan, sehingga Perseroan dapat mengoperasikan prasarana dengan lebih optimal.

Infrastructure Operation

In line with the decreasing spread of COVID-19, the government has also lowered the level of Community Activity Restrictions (PPKM) implementation in DKI Jakarta. This policy is beneficial for the Corporation, so that the Corporation can operate its infrastructure more optimally.

Waktu Operasional Kereta MRT
Operational Hours of MRT

Pola Operasi Operational Pattern	Jam Operasi Operational Hours	Jumlah Trip Frequency of Trips	Headway
Gapeka Khusus 29 (<i>Weekend</i>) Special Train travel chart 29 (Weekend)	05.00-22.30	199	Flat 10 Menit 10 Minutes Flat
Gapeka Khusus 20 (<i>Weekday</i>) Special Train travel chart 20 (Weekday)	05.00-21.30	253	Peak hour 5 menit Off peak 10 menit 5 minutes during peak hours 10 minutes during off-peak
Gapeka Khusus 24 (<i>Weekend</i>) Special Train travel chart 24 (Weekend)	06.00-21.30	175	Flat 10 Menit 10 Minutes Flat
Gapeka Khusus 24 (<i>Weekday dan Weekend</i>) Special Train travel chart 24 (Weekday and Weekend)	06.00-21.30	175	Flat 10 Menit 10 Minutes Flat
Gapeka Khusus 20 (<i>Weekday</i>) Special Train travel chart 20 (Weekday)	05.00-21.30	253	Peak hour 5 menit Off peak 10 menit 5 minutes during peak hours 10 minutes during off-peak
Gapeka Khusus 24 (<i>Weekend</i>) Special Train travel chart 24 (Weekend)	06.00-21.30	175	Flat 10 Menit 10 Minutes Flat
Gapeka Khusus 27 (<i>Weekday</i>) Special Train travel chart 27 (Weekday)	05.00-22.30	265	Peak hour 5 menit Off peak 10 menit 5 minutes during peak hours 10 minutes during off-peak
Gapeka Khusus 28 (<i>Weekend</i>) Special Train travel chart 28 (Weekend)	06.00-22.30	185	Flat 10 Menit 10 Minutes Flat
Gapeka Khusus 19 (<i>Weekday</i>) Special Train travel chart 19 (Weekday)	05.00-23.00	273	Peak hour 5 menit Off peak 10 menit 5 minutes during peak hours 10 minutes during off-peak
Gapeka Khusus 30 (<i>Weekend</i>) Special Train travel chart 30 (Weekend)	06.00-23.00	193	Flat 10 Menit 10 Minutes Flat
Gapeka Normal <i>Weekday</i> Normal Train travel chart Weekday	05.00-24.00	285	Peak hour 5 menit Off peak 10 menit 5 minutes during peak hours 10 minutes during off-peak
Gapeka Khusus 31 (<i>Weekend</i>) Special Train travel chart 31 (Weekend)	06.00-24.00	205	Flat 10 Menit 10 Minutes Flat
Gapeka Khusus 32 (<i>Weekend</i>) Special Train travel chart 32 (Weekend)	06.00-02.00	235	Flat 10 Menit 5 Menit (pukul 00.00-01.00) 10 Minutes Flat 5 minutes (at 00.00-01.00)



Sepanjang tahun, level penerapan PPKM di DKI Jakarta telah diturunkan ke level 1-2. Namun sebagai langkah antisipasi terjadinya lonjakan kasus MRT Jakarta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam operasionalnya. Perseroan juga tetap menyiapkan fasilitas pendukung, di antaranya pos kesehatan yang didukung tim medis, terdiri dari perawat yang selalu berjaga selama jam operasional di Stasiun Lebak Bulus Grab, Stasiun Fatmawati Indomaret, Stasiun Blok M BCA, Stasiun Senayan, Stasiun Bendungan Hilir, Stasiun Dukuh Atas BNI, dan Stasiun Bundaran HI. Perawat tersebut akan berpindah apabila diperlukan di stasiun lain yang tidak terdapat perawat. Selain itu, terdapat juga klinik kesehatan yang berlokasi di Depo MRT Jakarta Lebak Bulus yang didukung tim medis yang terdiri dari dokter, perawat, dan *driver ambulance* setiap hari selama 24 jam.

Throughout the year, the level of PPKM implementation in DKI Jakarta has been lowered to level 1-2. However, as a measure to anticipate a spike in cases, MRT Jakarta continues to implement strict health protocols in its operations. The Corporation also continues to prepare supporting facilities, including health posts supported by a medical team, consisting of paramedics who are always on standby during operational hours at Lebak Bulus Grab Station, Fatmawati Indomaret Station, Blok M BCA Station, Senayan Station, Bendungan Hilir Station, Dukuh Atas BNI Station, and Bundaran HI Station. The paramedics will move if needed to stations with no paramedic. In addition, there is also a health clinic located at the Lebak Bulus MRT Jakarta Depot which is supported by a medical team consisting of doctors, nurses and ambulance drivers every day for 24 hours.

Selama tahun 2022, orang yang sakit berkunjung ke pos kesehatan maupun klinik kesehatan, baik oleh pengguna jasa, karyawan, vendor, maupun gerai tercatat ada 459 pengunjung. Seluruh kunjungan telah ditindaklanjuti dengan memberikan pertolongan pertama, dan tidak ada yang membutuhkan perawatan lebih lanjut di puskesmas maupun fasilitas kesehatan yang lain.

In 2022, 459 patients visited health posts and clinics, consisting of passengers, employees, vendors, and tenants. All visits were followed up by providing first aid, and no one required further treatment at the puskesmas (community health centers) or other health facilities.

Data Kunjungan Klinik dan Pos Kesehatan Tahun 2022
Data on the Visits to Clinic and Health Posts in 2022

Pengunjung Visitors	2022			2021		
	Pos Kesehatan Health Post	Klinik Clinic	Jumlah Total	Pos Kesehatan Health Post	Klinik Clinic	Jumlah Total
Pengguna Jasa Passengers	136	1	137	162	-	162
Vendor Vendors	88	35	123	105	45	150
Karyawan Employees	16	183	199	29	166	195
Jumlah Total	240	219	459	296	211	507

Perawatan Prasarana

Sepanjang tahun 2022, Perseroan melakukan pekerjaan perawatan prasarana dengan baik. Secara keseluruhan, realisasi pelaksanaan pekerjaan perawatan telah dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Infrastructure Maintenance

Throughout 2022, the Cooperation conducted infrastructure maintenance properly. Overall, the realization of the infrastructure implementation was able able to meet the targets set.

Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan Perawatan Prasarana
Realization of Infrastructure Maintenance Implementation

Bentuk Pekerjaan Pemeliharaan Type of Maintenance Work	2022			2021		
	Target Target	Realisasi Realization	%	Target Target	Realisasi Realization	%
Track and Civil Structure	1.077	1.122	104,18	1.400	1.400	100
Signal and Telecommunication	3.483	3.483	100	1.428	1.428	100
Power Maintenance	3.822	3.828	100,16	10.031	10.040	99,91
Depot & Workshop Equipment (DWE)	1.419	1.419	100	1.574	1.574	100
MEP Maintenance	2.825	2.825	100	2.974	2.974	100
Station & Building Facilities Maintenance Department	17.425	18.577	106,6	16.867	16.867	100

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dan perawatan prasarana, Perseroan terus berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas pekerja melalui program sertifikasi. Pada tahun 2022, jumlah karyawan pelaksana pemeriksaan dan perawatan prasarana yang memiliki sertifikasi ada 120 orang, atau 71,42% dari seluruh tenaga pemeriksaan dan perawatan prasarana. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2021 yang mencapai 89 orang karena adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) serta sertifikasi.

To improve the quality of the implementation of infrastructure inspection and maintenance work, the Corporation continuously strives to increase the competence and capacity of workers through a certification program. In 2022, the number of certified employees carrying out inspection and maintenance of infrastructure was 120 employees, or 71.42% of all infrastructure inspection and maintenance employees. This number increased compared to 89 certified employees in 2021. This was owing to education and training as well as certification activities.

Jumlah dan Persentase Tenaga Pemeriksaan dan Perawatan Prasarana
Number and Percentage of Infrastructure Inspection and Maintenance Personnel

Departemen Department	2022			2021		
	Jumlah SDM Total Employees	Jumlah SDM Tersertifikasi Total Certified Employees	%	Jumlah SDM Total Employees	Jumlah SDM Tersertifikasi Total Certified Employees	%
<i>Rolling Stock Depot Maintenance</i>	35	27	80	29	22	76
<i>Rolling Stock Workshop Maintenance</i>	36	12	33,33	26	11	42
<i>Track and Civil Str. Maintenance</i>	25	23	92	24	16	67
<i>Power Maintenance</i>	21	20	95	22	20	91
<i>Signal & Telecommunication Maintenance</i>	23	22	96	25	20	80
<i>Station & Building Facilities Maintenance Department</i>	28	16	57	28	19	67
Jumlah Total	168	120	71,42	126	89	57,94

Selama tahun 2022, pekerjaan pembangunan prasarana MRT Jakarta Fase 1 hanya bersifat modifikasi dan perawatan untuk menjamin keamanan, keselamatan, serta kenyamanan pengguna jasa, seperti pembangunan simpang temu di beberapa stasiun, penanggulangan genangan air dan banjir, dan penataan pedestrian di stasiun. Secara keseluruhan, pada tahun 2022, terdapat 197 pekerjaan modifikasi dengan nilai total pekerjaan Rp6.200.434.998.

In 2022, MRT Jakarta Phase 1 infrastructure development work was only modification and maintenance to ensure security, safety and comfort for passengers, such as construction of interconnections at several stations, tackling of waterlogging and flooding, and pedestrian management at stations. Overall, in 2022, there were 197 modification works with a total work value of Rp6,200,434,998.





TINJAUAN KEGIATAN USAHA PENYELENGGARAAN SARANA

Tahun 2022, Perseroan mengoperasikan 16 rangkaian sarana kereta MRT (*rolling stock*) pada lintasan MRT Jakarta Fase 1 (Lebak Bulus - Bundaran HI). Jumlah tersebut sama dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 16 rangkaian.

Kinerja Pengoperasian Sarana

Kinerja pengoperasian sarana dilakukan sesuai dengan pemberlakuan PPKM yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian meliputi grafik perjalanan kereta (Gapeka), jumlah trip, jarak antar kereta (*headway*), dan jumlah kereta. Gangguan listrik yang menyebabkan terhentinya rangkaian kereta telah terjadi pada 9 Juni 2022. Perseroan dengan cepat dapat mengatasi gangguan tersebut, sehingga dalam waktu yang relatif singkat operasional MRT Jakarta dapat kembali berjalan dengan normal.

Untuk memastikan kondisi sarana aman, nyaman, bersih, serta mendukung kebijakan PPKM yang diatur oleh pemerintah, MRT Jakarta telah melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Pembatasan jumlah dan pengaturan posisi pengguna jasa di dalam kereta dengan melakukan pemasangan stiker, baik untuk lokasi duduk dan juga lokasi berdiri, dengan maksimum 68 pengguna jasa per kereta;
2. Pembersihan harian, mingguan dan bulanan secara rutin dengan menggunakan cairan disinfektan untuk seluruh bagian dalam kereta; dan
3. Penggunaan lampu ultraviolet pada saat pencucian kereta bulanan.

REVIEW OF FACILITIES MANAGEMENT BUSINESS ACTIVITIES

In 2022, the Corporation operated 16 trains (*rolling stock*) on the MRT Jakarta Phase 1 line (Lebak Bulus - Bundaran HI). This number was the same as the previous year which amounted to 16 train sets.

Facility Operation Performance

The facility operational performance is carried out in accordance with the implementation of the PPKM set by the government. Adjustments include train travel charts (Gapeka), number of trips, train headway, and number of trains. On June 9, 2022 MRT Jakarta experienced a power outage which cause train operation to breakdown. However, the Corporation was able to quickly overcome the disruption and resume operation back to normal in a relatively short time.

In ensuring safe, comfortable, and hygiene facility condition to support PPKM policies set by the Government, the Corporation took various efforts, including:

1. Limiting the number of passengers to 68 passengers per train and arranging the position of passengers inside the train by applying stickers to indicate sitting and standing spots;
2. Cleaning and disinfecting the interior of the trains every day, every week, and every month;
3. Utilizing ultraviolet light upon monthly train cleaning.



Pola Operasi Operational Pattern	Jam Operasi Operational Hours	Jumlah Trip Total Trips	Headway	Jumlah Trainset Total Trainsets	Tanggal Implementasi Implementation Date
Gapeka Khusus 29 (<i>Weekend</i>) Special Train travel chart 29 (Weekend)	05.00-22.30	199	Flat 10 Menit 10 Minutes Flat	7	1-2 Januari 2022 January 1-2, 2022
Gapeka Khusus 20 (<i>Weekday</i>) Special Train travel chart 20 (Weekday)	05.00-21.30	253	Peak hour 5 menit Off peak 10 menit 5 minutes during peak hours 10 minutes during off-peak	14	7 Januari 2022 January 7, 2022
Gapeka Khusus 24 (<i>Weekend</i>) Special Train travel chart 24 (Weekend)	06.00-21.30	175	Flat 10 Menit 10 Minutes Flat	7	
Gapeka Khusus 24 (<i>Weekday dan Weekend</i>) Special Train travel chart 24 (Weekday and Weekend)	06.00-21.30	175	Flat 10 Menit 10 Minutes Flat	7	10 Februari 2022 February 10, 2022
Gapeka Khusus 20 (<i>Weekday</i>) Special Train travel chart 20 (Weekday)	05.00-21.30	253	Peak hour 5 menit Off peak 10 menit 5 minutes during peak hours 10 minutes during off-peak	14	11 Maret 2022 March 11, 2022
Gapeka Khusus 24 (<i>Weekend</i>) Special Train travel chart 24 (Weekend)	06.00-21.30	175	Flat 10 Menit 10 Minutes Flat	7	
Gapeka Khusus 27 (<i>Weekday</i>) Special Train travel chart 27 (Weekday)	05.00-22.30	265	Peak hour 5 menit Off peak 10 menit 5 minutes during peak hours 10 minutes during off-peak	14	8 April 2022 April 8, 2022
Gapeka Khusus 28 (<i>Weekend</i>) Special Train travel chart 28 (Weekend)	06.00-22.30	185	Flat 10 Menit 10 Minutes Flat	7	
Gapeka Khusus 19 (<i>Weekday</i>) Special Train travel chart 19 (Weekday)	05.00-23.00	273	Peak hour 5 menit Off peak 10 menit 5 minutes during peak hours 10 minutes during off-peak	14	18 Mei 2022 May 18, 2022
Gapeka Khusus 30 (<i>Weekend</i>) Special Train travel chart 30 (Weekend)	06.00-23.00	193	Flat 10 Menit 10 Minutes Flat	7	
Gapeka Normal <i>Weekday</i> Normal Train travel chart Weekday	05.00-24.00	285	Peak hour 5 menit Off peak 10 menit 5 minutes during peak hours 10 minutes during off-peak	14	15 November 2022 November 15, 2022
Gapeka Khusus 31 (<i>Weekend</i>) Special Train travel chart 31 (Weekend)	06.00-24.00	205	Flat 10 Menit 10 Minutes Flat	7	
Gapeka Khusus 32 (<i>Weekend</i>) Special Train travel chart 32 (Weekend)	06.00-02.00	235	Flat 10 Menit 5 Menit (pukul 00.00-01.00) 10 Minutes Flat 5 minutes (at 00.00-01.00)	7 9	31 Desember 2022 December 31, 2022





Kinerja Layanan Pengguna Jasa

Sepanjang tahun 2022, Perseroan mampu menjaga ketepatan waktu kedatangan antar stasiun, ketepatan waktu berhenti di stasiun dan ketepatan waktu tempuh kereta per lintas.

Passenger Service Performance

Throughout 2022, the Corporation was able to maintain the punctuality of train arrival time, dwelling time, and traveling time.

Kinerja Layanan Pengguna Jasa
Passenger Service Performance

Parameter Parameter	Satuan Unit	2022	2021	2020
Waktu Kedatangan Arriving Time	%	99,95	99,94	99,97
Waktu Berhenti Dwelling Time	%	99,98	99,97	99,98
Waktu Tempuh Traveling Time	%	99,94	99,96	99,98

Kondisi pandemi COVID-19 kian terkendali dan semakin tingginya rasio masyarakat yang sudah memperoleh dosis vaksin lengkap, membuat pemerintah melonggarkan aturan PPKM di DKI Jakarta hingga ke level 1. Kebijakan tersebut membuat mobilitas warga DKI Jakarta dan mengalami peningkatan yang signifikan. Total jumlah pengguna jasa selama tahun 2022 mencapai 19.776.064 orang, dengan rata-rata per hari sebanyak 54.181 orang. Jumlah tersebut meningkat sebesar 12.586.202 orang, atau 175% dari jumlah pengguna jasa tahun 2021 sebanyak 7.189.862 orang, dengan rata-rata per hari 19.659 orang.

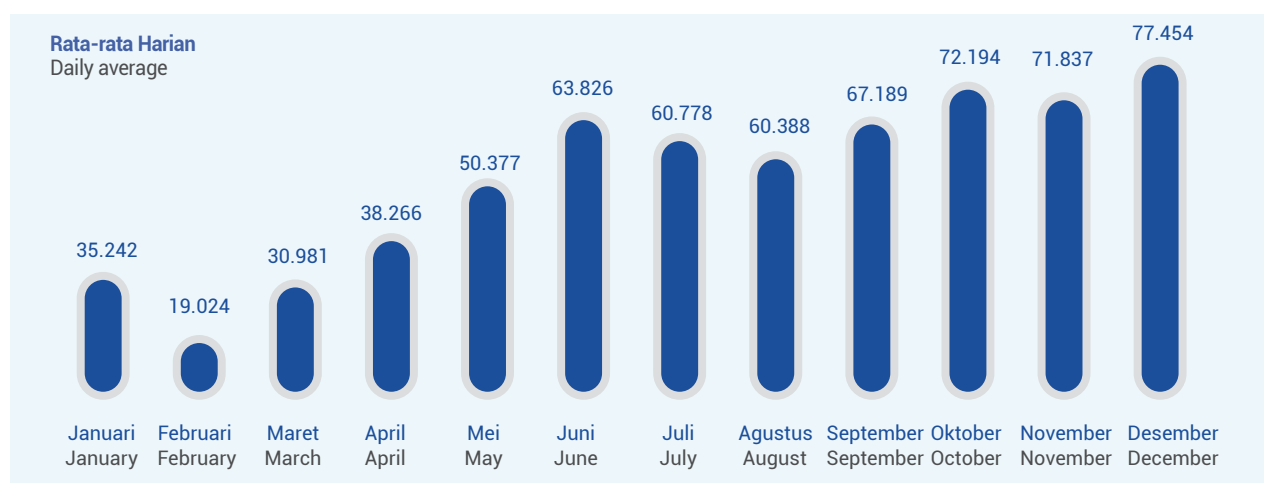
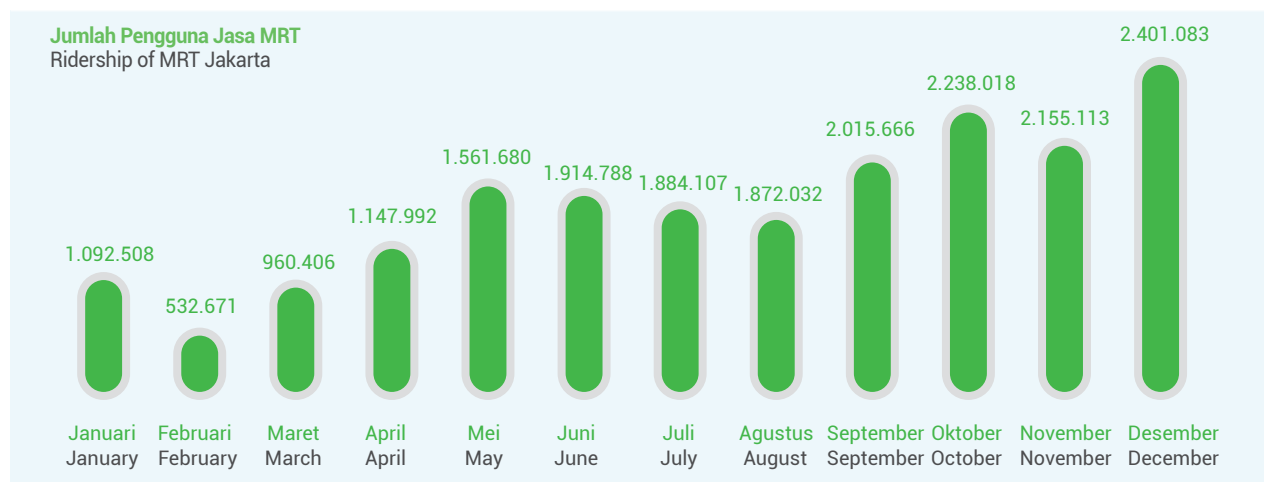
The COVID-19 pandemic condition has been increasingly under control and the increasing ratio of people who have received complete vaccine doses has made the government ease PPKM regulations in DKI Jakarta to level 1. This policy has significantly increased the mobility of DKI Jakarta citizens. The total number of passengers in 2022 reached 19,776,064 passengers, with an average of 54,181 passengers per day. This number increased by 12,586,202 passengers, or 175% of the number of passengers in 2021 of 7,189,862 passengers, with an average of 19,659 passengers per day.

Sepanjang tahun 2022, jumlah terendah pengguna jasa MRT Jakarta pada bulan Februari, yakni sebanyak 532.671 orang, atau rata-rata per hari sebanyak 19.024 orang. Hal ini disebabkan karena adanya gelombang ketiga COVID-19 Omicron yang terjadi di periode tersebut sehingga kembali ada pengetatan kebijakan PPKM. Adapun jumlah tertinggi pengguna jasa MRT Jakarta pada tahun 2022 adalah bulan Desember, sebanyak 2.401.083 orang, atau rata-rata per hari sebanyak 77.454 orang. Hal ini dipengaruhi oleh program *push ridership* Pemerintah seperti pemberlakuan kembali ganjil genap di ruas jalan utama Jakarta, serta program *pull ridership* yang diadakan oleh MRT Jakarta seperti kerjasama *feeder, lifestyle* serta program wisata edukasi dan komunitas.

Throughout 2022, the lowest ridership recorded was in February, i.e. 532,671 passengers, or an average of 19,024 passengers per day. This was due to the third wave of COVID-19 Omicron occurring in that period, resulting in a tightening of the PPKM policy. The highest ridership recorded in 2022 was in December, with 2,401,083 passengers or an average of 77,454 passengers per day. This is influenced by the Government's push ridership programs such as the reintroduction of odd-even traffic rule on Jakarta's main roads, as well as pull ridership programs held by MRT Jakarta such as establishment of feeder system as well as lifestyle, educational, and community tourism programs.

MRT Jakarta senantiasa mengedepankan layanan yang aman, nyaman, dan andal guna mewujudkan MRT Jakarta sebagai operator metro kelas dunia
MRT Jakarta always prioritizes safe, comfortable and reliable services in order to realize MRT Jakarta as a world-class metro operator

Grafik Jumlah Pengguna Jasa MRT Jakarta Fase 1 (Lebak Bulus - Bundaran HI) Tahun 2022
Ridership Graph of MRT Jakarta Phase 1 (Lebak Bulus - Bundaran HI) in 2022



Jumlah Pengguna Jasa MRT Jakarta Fase 1 (Lebak Bulus - Bundaran HI)
The Number of Ridership of MRT Jakarta Phase 1 (Lebak Bulus - Bundaran HI)

Uraian Description	2022	2021	2020	Δ%	
	1	2	3	1:2	2:3
Jumlah Pengguna Jasa Total Ridership	19.776.064	7.189.862	9.926.513	175	(28)
Rata-rata Pengguna Jasa per Hari Average Ridership per Day	54.182	19.659	27.122	176	(28)
Rata-rata Pengguna Jasa pada Hari Kerja Average Ridership on Weekdays	61.090	21.667	33.007	182	(34)
Rata-rata Pengguna Jasa pada Akhir Pekan dan Hari Libur Average Ridership on Weekends and Holidays	39.625	15.280	14.753	159	4

Jumlah Rata-rata dan Persentase Pengguna Jasa pada Relasi Favorit MRT Jakarta
Average and Percentage of MRT Jakarta Ridership based on Travel Course Top Choice

Relasi Travel Course	Rata-rata Pengguna Jasa Average Ridership	Persentase (%) Percentage (%)
Lebak Bulus Grab - Bundaran HI	1.656	3,06
Bundaran HI - Lebak Bulus Grab	1.578	2,91
Istora Mandiri - Dukuh Atas BNI	1.483	2,74
Dukuh Atas BNI - Senayan	1.442	2,66
Dukuh Atas BNI - Istora Mandiri	1.229	2,27



Kinerja Perawatan Sarana

Perawatan kereta MRT dilakukan di Depo, meliputi pekerjaan perawatan harian, dan perawatan bulanan. Perawatan dilakukan untuk memastikan keamanan operasional kereta dan kenyamanan selama perjalanan. Pekerjaan perawatan sarana dilakukan oleh karyawan yang memiliki kompetensi kecakapan dan sertifikasi sesuai. Selama tahun 2022, kinerja perawatan kereta berjalan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

Facility Maintenance Performance

The MRT rolling stock maintenance is carried out in the Depot, covering daily and monthly maintenance. It aims to ensure operational safety and comfort during the trips. Rolling stock maintenance is executed by competent and certified employees. In 2022, the rolling stock maintenance performance was well and fulfilled the target.

Target dan Realisasi Pemeliharaan Sarana
Target and Realization of Maintenance

Bentuk Pekerjaan Pemeliharaan Maintenance Works	2022			2021		
	Target (kali) Target (times)	Realisasi (kali) Realization (times)	%	Target (kali) Target (times)	Realisasi (kali) Realization (times)	%
Rolling Stock Depot Maintenance						
Perawatan Harian Daily Maintenance	1.762	1.762	1.762	1.714	1.714	100
Perawatan Bulanan Monthly Maintenance	180	180	180	192	192	100
Cuci Kereta Train Washing	3.872	3.872	3.872	3.691	3.691	100

Kinerja Pengusahaan Sarana

Kegiatan pengusahaan sarana yang dijalankan Perseroan adalah pemberlakuan tarif perjalanan kepada pengguna jasa dan kerja sama periklanan pada kereta MRT Jakarta. Penetapan besaran tarif perjalanan pengguna jasa MRT Jakarta ditetapkan berdasar Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No. 34 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Perkeretaapian Mass Rapid Transit dan Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit. Tahun 2022, besaran tarif perjalanan yang harus dibayarkan pengguna jasa adalah minimal Rp3.000 dan maksimal Rp14.000. Daftar tarif perjalanan dapat diakses pada link <https://jakartamrt.co.id/id/tarif-mrt-jakarta>.

Facility Commercialization Performance

The facility commercialization activities of the Corporation include the enforcement of farebox fare to the passengers and advertising collaboration on MRT Jakarta trains. The regulations concerning farebox fare of MRT Jakarta is governed by the Governor's Regulation of DKI Jakarta No. 34 Year 2019 concerning Mass Rapid Transit and Light Rail Transit Tariffs. In 2022, The minimum amount of tariff is Rp3,000 and the maximum tariff is Rp14,000. The list of tariff is available at <https://jakartamrt.co.id/id/tarif-mrt-jakarta>.

Metode Pembayaran dan Persentase Penggunaan Tahun 2022
Payment Methods and Percentage of Usage in 2022

Metode Pembayaran Payment Method	Uraian Description	Jumlah Pengguna Jasa Total Ridership
Tiket Single Trip Single Trip Ticket	Tiket berupa kartu yang dapat dipakai untuk sekali jalan. Pada periode pelaporan, Perseroan menghentikan sementara penjualan tiket <i>single trip</i> . Ticket that takes the form of a card that can be used for one trip. During the reporting period, the Corporation temporarily stopped the sales of single trip tickets.	700
Tiket Multi Trip Multi-Trip Ticket	Tiket berupa kartu berisi saldo yang dapat dipakai berkali-kali dan dapat diisi ulang saldonya. Ticket that takes the form of a card with a balance that can be used multiple times and the balance can be topped up.	2.359.383
Kartu Elektronik Bank Bank Electronic Card	Kartu pembayaran yang dikeluarkan bank penyelenggara. Sampai dengan akhir tahun 2021, Perseroan bekerja sama dengan beberapa bank penyelenggara, yakni Bank BCA (Flazz), Bank DKI (JakCard), Bank BNI (TapCash), Bank Mandiri (e-Money), dan Bank BRI (BRIZZI). Payment cards issued by banks. As of the end of 2022, the Corporation collaborates with various banks, such as Bank BCA (Flazz), Bank DKI (JakCard), Bank BNI (TapCash), Bank Mandiri (e-Money), and Bank BRI (BRIZZI).	14.347.771
Aplikasi MRT Jakarta MRT Jakarta Application	Pengguna jasa membayar dengan uang elektronik. Selama tahun 2021, Perseroan bekerja sama dengan penyelenggara uang elektronik Dana, OVO, Gopay, AstraPay, dan LinkAja dan i.saku. Payment with electronic wallet. In 2022, the Corporation collaborates with various e-wallet providers such as Dana, OVO, Gopay, AstraPay, LinkAja and i.saku.	2.658.980
Kartu JakLingko JakLingko Card	Pengguna jasa menggunakan kartu JakLingko untuk perjalanan MRT dan transit ke moda transportasi lainnya Passengers use the JakLingko card for MRT trips and transit to other modes of transportation	372.947
Aplikasi JakLingko JakLingko Application	Pengguna jasa menggunakan Aplikasi JakLingko untuk perjalanan MRT dan transit ke moda transportasi lainnya Passengers use the JakLingko Application for MRT trips and transit to other modes of transportation	36.283

TOD INVESTMENT FORUM TOKYO

Menindaklanjuti surat dari Atase Perhubungan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo (KBRI Tokyo) Nomor 060/PHB/IX/2022 perihal dengan Rencana Penyelenggaraan Kegiatan TOD Investment Forum yang akan diadakan oleh KBRI Tokyo, maka pada bulan Desember 2022 PT MRT Jakarta dan KBRI Tokyo menginisiasi kegiatan TOD *Investment Forum* yang diselenggarakan pada tanggal 29-30 November untuk memperkenalkan potensi investasi kepada para investor di Jepang dalam proyek-proyek TOD PT MRT Jakarta. Pada *plenary* disampaikan oleh pembicara dari Pihak Jepang mengenai dukungan dan pentingnya Pembangunan TOD di Jakarta khususnya melalui program JUTPI 3 yang diinisiasi oleh JICA, sementara dari pembicara Pihak Indonesia disampaikan mengenai tata cara untuk Investasi di Jakarta dan disampaikan juga mengenai Potensi Investasi yang ada di Proyek TOD PT MRT Jakarta.

1. *Urban Renaissance Agency (UR)* menyampaikan bahwa UR akan siap membantu PT MRT Jakarta untuk mengembangkan area TOD di Jabodetabek dengan bersedia membantu Jakarta dengan para pelaku bisnis swasta dari Jepang untuk ikut serta mengembangkan TOD Jabodetabek
2. Pertemuan dengan Sumitomo Corporation menghasilkan beberapa poin yang dapat ditindaklanjuti khususnya dalam membangun interkoneksi dengan properti milik Sumitomo Corporation di Jakarta
3. Pertemuan dengan Hankyu Hanshin Properties dihasilkan bahwa HHP akan siap mengembangkan TOD Dukuh Atas dengan menggunakan konsep kolaborasi dengan pemilik Tanah seperti yang telah dilakukan pada proyek TOD di Marunouchi Tokyo dan Proyek TOD di Umeda Osaka
4. Pertemuan dengan Oriental Consultants Global menghasilkan poin bahwa OC Global akan bekerja sama dengan MRT Jakarta untuk mengembangkan TOD di Jakarta serta mengajak MRT Jakarta untuk berpartisipasi dalam bisnis Konsultansi untuk TOD di India

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman, seperti:

1. MRT Jakarta dan UR: *Potential cooperation regarding TOD projects in Jabodetabek*;
2. MRT Jakarta and HHP: *Preliminary Assessment of Potential Investment Partnership for Land Development and Interconnection Building in Dukuh Atas Transit Oriented Development Area*;
3. MRT Jakarta and OCG: *Preliminary Assessment of Strategic Cooperation related to Business Generation At Transit Oriented Development in Jakarta*; dan
4. MRT Jakarta and JR-East: *Preliminary Assessment of Potential Partnership in Transit Oriented Development Area*.

TOD INVESTMENT FORUM TOKYO

Following up the letter from the Transportation Attaché of the Republic of Indonesia Embassy in Tokyo (KBRI Tokyo) Number 060/PHB/IX/2022 regarding Plan to Organize TOD Investment Forum Activity by the Indonesian Embassy in Tokyo, in December 2022 PT MRT Jakarta and KBRI Tokyo initiated TOD Investment Forum held on November 29-30 to showcase the potential of PT MRT Jakarta's TOD projects to investors. At the plenary, the Japanese speakers conveyed their support and importance of TOD development in Jakarta, especially through the JUTPI 3 program initiated by JICA, while the Indonesian speakers discussed the procedures for investing in Jakarta and conveyed potential investment in the TOD projects of PT MRT Jakarta.

1. The Urban Renaissance Agency (UR) said that UR would be ready to assist PT MRT Jakarta to develop the TOD areas in Jabodetabek by agreeing to help Jakarta with private businesses from Japan to participate in developing the Jabodetabek TOD Areas.
2. The meeting with Sumitomo Corporation resulted in several points that could be followed up, especially in building interconnections with Sumitomo Corporation's properties in Jakarta
3. Meeting with Hankyu Hanshin Properties (HPP) resulted a decision that HHP is ready to develop Dukuh Atas TOD Area by using the concept of collaboration with land owners as has been done in the TOD project in Marunouchi Tokyo and the TOD Project in Umeda Osaka
4. The meeting with Oriental Consultants Global resulted in the point that OC Global would work together with MRT Jakarta to develop TOD areas in Jakarta and invite MRT Jakarta to participate in the Consulting business for TOD in India

In those activities, there is also the signing of the following memorandums of understanding:

1. MRT Jakarta and UR: *Potential cooperation regarding TOD projects in Jabodetabek*;
2. MRT Jakarta and HHP: *Preliminary Assessment of Potential Investment Partnership for Land Development and Interconnection Building in Dukuh Atas Transit Oriented Development Area*;
3. MRT Jakarta and OCG: *Preliminary Assessment of Strategic Cooperation related to Business Generation At Transit Oriented Development in Jakarta*; and



TINJAUAN KEGIATAN USAHA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PROPERTI DI STASIUN, DEPO, DAN KAWASAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No. 67 Tahun 2019 jo. No. 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit, Perseroan mendapat kesempatan mengajukan diri sebagai pengelola kawasan yang berperan dalam perencanaan penataan kawasan di sekitar stasiun MRT Jakarta berdasarkan konsep *Transit-Oriented Development* (TOD) melalui penyusunan Kajian Proposal dan Panduan Rancang Kota (PRK). Sampai tahun 2022, Perseroan telah ditugaskan sebagai pengelola kawasan pada 6 (enam) Kawasan Berorientasi Transit (KBT)/TOD, yang disahkan dalam bentuk Pergub No. 65 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pergub No. 15 Tahun 2020 tentang Penugasan Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta sebagai Pengelola Kawasan Berorientasi Transit Koridor Utara-Selatan Mass Rapid Transit Jakarta di mana Perseroan dibantu anak perusahaan, yaitu PT Integrasi Transit Jakarta (ITJ), untuk menjalin kerja sama dan berkoordinasi dengan masyarakat serta pemangku kepentingan lain di sekitar kawasan KBT MRT Jakarta.

BUSINESS ACTIVITY REVIEW OF PROPERTY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT IN THE STATIONS, DEPOT, AND SURROUNDING AREAS

In line with the Regulation of DKI Jakarta Governor No. 67 Year 2019 in conjunction with No. 50 Year 2021 concerning the Development of Transit-Oriented Development Areas, the Corporation was given the opportunity to propose itself to be a manager that plans the areal development around MRT Jakarta stations following Transit-Oriented Development (TOD) concept by preparing Proposal Study and Urban Design Guidelines (PRK). As of the end of 2022, the Corporation has been appointed as the developer of 6 TOD areas as ratified by Governor's Regulation No. 65 Year 2021 concerning Amendment to Governor's Regulation No. 15 Year 2020 concerning the Appointment of Limited Liability Company Mass Rapid Transit Jakarta as the Developer of Transit-Oriented Development Areas for North-South Corridor of Mass Rapid Transit Jakarta. The Corporation is supported by its subsidiary, PT Integrasi Transit Jakarta (ITJ) to build collaboration and coordination with the surrounding communities and other stakeholders around the TOD areas.

Lokasi KBT dan Dasar Penetapan
Location of TOD Areas and Legal Bases

Lokasi Location	Dasar Penetapan Legal Basis	
PRK KBT Blok M - Sisingamangaraja	Pergub DKI Jakarta No. 55/2020	Regulation of DKI Jakarta Governor No. 55/2020
PRK KBT Fatmawati	Pergub DKI Jakarta No. 56/2020	Regulation of DKI Jakarta Governor No. 56/2020
PRK KBT Lebak Bulus	Pergub DKI Jakarta No. 57/2020	Regulation of DKI Jakarta Governor No. 57/2020
PRK KBT Istora - Senayan	Pergub DKI Jakarta No. 90/2020	Regulation of DKI Jakarta Governor No. 90/2020
PRK KBT Dukuh Atas	Pergub DKI Jakarta No. 107/2020	Regulation of DKI Jakarta Governor No. 107/2020
PRK KBT Bundaran HI	Pergub DKI Jakarta No. 65/2021 (Pengelola Kawasan)	Regulation of DKI Jakarta Governor No. 61/2021 (Area Management)

Penyediaan Hunian Terjangkau

Provision of Affordable Housing



Telah tersedia
Available

863 unit
units

Target
Target

750 unit
units

Bekerja sama dengan
Cove, Rukita dan
Travelio.
collaboration with
Cove, Rukita and
Travelio

Peresmian oleh
Gubernur pada 19
Agustus 2022.
Inauguration was
conducted by the
Governor on August
19, 2022.

Taman Literasi Martha Christina Tiahahu

Martha Christina Tiahahu Literacy Park



PKS Pemanfaatan Aset dalam Akta Notaris
No. 10 tanggal 20 September 2022
Cooperation Agreement on Asset Utilization in
Notary Deed No. 10 dated September 20, 2022

Peresmian oleh Gubernur
tanggal 18 September 2022.
Inauguration was conducted by
by the Governor on September
18, 2022.

Transit Plaza Lebak Bulus

Lebak Bulus Transit Plaza



Telah beroperasi/In operation

29 Desember 2022
December, 2022

Peresmian oleh Gubernur
tanggal 11 Oktober 2022
Inauguration was conducted by
the Governor on October 11, 2022

Realisasi Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (KBT)
Realization of TOD Area Development

No.	Proyek Project	Progres Progress	Target Penyelesaian Completion Target
1	Simpang Temu Lebak Bulus atau Transit Plaza, Hub, Skybridge POINS, Lebak Bulus Lebak Bulus Transport Hub or Transit Plaza, Hub, Skybridge POINS, Lebak Bulus	- Transit Plaza telah diresmikan oleh Gubernur pada 11 Oktober 2022 (100%); - Pedestrian Bridge Simpang Temu Lebak Bulus telah beroperasi pada 29 Desember 2022 (100%). - Telah dioperasikan pada tanggal 31 Desember 2022 - Transit Plaza was inaugurated by the Governor on October 11, 2022 (100%); - Pedestrian Bridge of Simpang Temu (Transport Hub) Lebak Bulus would be operational on December 29, 2022 (100%). - Has been operationalized since December 31, 2022	Telah terselesaikan Completed
2	Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Blok M Martha Christina Tiahahu Literacy Park, Blok M	Telah diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 18 September 2022 (100%). Inaugurated by the Governor of DKI Jakarta on September 18, 2022 (100%).	Telah terselesaikan Completed
3	Simpang Temu Dukuh Atas atau Transport Hub, Dukuh Atas Dukuh Atas Transport Hub	Pekerjaan tahap arsitektural dan MEP (65,2%). Architectural and MEP work stage (65.2%).	Maret 2023 March 2023
4	Serambi Temu Dukuh Atas atau JPM LRT-KCI, Dukuh Atas Dukuh Atas Pedestrian Deck or JPM LRT-KCI, Dukuh Atas	- Pekerjaan finishing dan penyelesaian defect list Zona 1; - Proses penguatan struktur Zona 2; dan - Pemasangan rangka baja Zona 3 (77,7%). - Finishing work and completion of Zone 1 defect list; - Zone 2 structure strengthening process; and - Zone 3 steel framing installation (77.7%).	Januari 2023 January 2023
5	Hunian Terjangkau Lahan One BelPark One Belpark Affordable Housing	Pekerjaan pemasangan bata ringan, piping dan elektrikal di koridor lantai dan unit (80%). Light brick installation, piping, and electrical installation work in floor and unit corridors (80%).	Maret 2023 (Diundur karena adanya perubahan skema pembiayaan) March 2023 (Postponed due to changes in financing scheme)
6	Plaza Transit Jalan Mahakam Jalan Mahakam Transit Plaza	Penataan atau revitalisasi Kawasan Jalan Mahakam telah selesai. Pekerjaan tambahan kegiatan di sekitar Kawasan Transit Mahakam direncanakan akan dilakukan pada tahun 2023 (83%). Revitalization of Jalan Mahakam Area has been completed. Additional work activities around the Mahakam Transit Area are planned to be carried out in 2023 (83%).	Agustus 2022 August 2022
7	Penyediaan Hunian Terjangkau MRT Provision of MRT Affordable Housing	- Telah tersedia 883 unit hunian hasil kerja sama dengan Cove, Rukita, Travelio (100%). - Penandatanganan PKS antara MRTJ dengan Cove dan Rukita disaksikan oleh Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2023. - Penandatanganan PKS antara MRTJ dengan travelio untuk penyediaan 525 unit pada tanggal 13 Desember 2022. - There are 883 residential units in collaboration with Cove, Rukita, Travelio (100%). - Signing of Cooperation Agreement between MRTJ with Cove and Rukita witnessed by the Governor of DKI Jakarta on August 18, 2023. - Signing of Corporation Agreement between MRTJ and travelio for the provision of 525 units on December 13, 2022.	750 unit 750 units
8	Pedestrian Jalan Blora Jalan Blora Pedestrian	Proses pekerjaan pelebaran jalan Pati Juana (40%). The process of widening the Pati Juana road (40%).	Diusulkan Tahun 2023 Proposed for 2023
9	Penataan Taman Kudus Taman Kudus Revitalization	Pekerjaan pemasangan atap kanopi sedang berlangsung (75%). Canopy roof installation work was in progress (75%).	Desember 2022 December 2022
10	Pedestrian Tunnel UOB UOB Tunnel Pedestrian	- Groundbreaking Tunnel UOB dicanangkan oleh Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 7 Juli 2023. - Saat ini dalam proses pemilihan kontraktor (25%). - The Governor of DKI Jakarta planned to hold the UOB Tunnel Groundbreaking on July 7, 2023. - Currently in the contractor selection process (25%).	2023
11	Pedestrian Tunnel Mandiri Mandiri Pedestrian Tunnel	Diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan BPAD terkait tindak lanjut pencatatan aset (9%). Further coordination with BPAD is required regarding the follow-up of asset registration (9%).	2023
12	Lebak Bulus Park and Ride Lebak Bulus Park and Ride	Proses pengajuan Surat permohonan pengajuan HPL (30%). The process of filing an application letter for Right of Land Management submission (30%).	Groundbreaking Desember 2022 Groundbreaking in December 2022



Simpang Temu Lebak Bulus
Lebak Bulus Transport Hub



Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Blok M
Martha Christina Tiahahu Literacy Park, Blok M



Alaspadu Taman Kudus
Alaspadu Taman Kudus

URAIAN PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS KEGIATAN SEGMENT USAHA

Laporan Keuangan MRT Jakarta tahun 2022 yang diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja belum menyajikan segmen usaha sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 5 (Revisi 2015) tentang Segmen usaha.

Pembahasan Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha pada Laporan ini menggunakan struktur pendapatan Perseroan yang terdiri dari pendapatan tiket atau *farebox*, pendapatan subsidi dari Pemprov DKI Jakarta dan pendapatan non-tiket. Total perolehan Pendapatan Usaha Perseroan per 31 Desember 2022 mencapai Rp1.466.986 juta, dengan kontribusi terbesar berasal dari Pendapatan Subsidi dari Pemprov DKI Jakarta yaitu sebesar Rp808.200 juta atau setara dengan 55,09% dari Pendapatan Usaha Perseroan.

DETAILS OF REVENUE AND PROFITABILITY OF BUSINESS SEGMENTS

The Financial Statements 2022 of MRT Jakarta audited by Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro, & Surja have not yet present the business segments following the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) 5 (2015 Revision) concerning Business Segments.

The discussion on Revenue and Profitability of Business Segments in this Report uses the Corporation's revenue structure which consists of farebox revenue, subsidy revenue from the Government of DKI Jakarta, and non-farebox revenue. The total business revenue of the Corporation as of December 31, 2022 amounted to Rp1,466,986 million, with the largest contribution coming from subsidy revenue from the DKI Jakarta Provincial Government, which amounted to Rp808,200 million or equivalent to 55.09% of the Corporation's Business Revenues.

Kontribusi Perolehan Pendapatan Usaha MRT Jakarta
Contribution of Business Revenue of MRT Jakarta

Uraian Description	2022			2021	2020	Pertumbuhan (%) Growth (%)	
	Target (Rp Juta) Target (Rp Million)	Realisasi (Rp Juta) Realization (Rp Million)	%	Target (Rp Juta) Target (Rp Million)	Realisasi (Rp Juta) Realization (Rp Million)	2022-2021	2021-2020
Pendapatan Tiket Farebox Revenue	145.019	155.615	107,29	60.371	82.026	157,73	(26,4)
Pendapatan Subsidi dari Pemprov DKI Jakarta Subsidy Revenue from the Government of DKI Jakarta Province	831.847	808.200	99,56	821.978	620.801	0,76	32,4
Pendapatan Non-Tiket Non-farebox Revenue	473.000	503.171	100,21	473.568	382.672	0,09	23,75
Jumlah Pendapatan Total Revenue	1.449.866	1.466.986	100,55	1.355.917	1.085.498	6,0	25,5

Profitabilitas Pendapatan Tiket

Pendapatan tiket yang diperoleh Perseroan tahun 2022 sebesar Rp155.615 juta, jumlah tersebut meningkat Rp111.069 juta atau 157,76% dari pendapatan tiket tahun 2021 sebesar Rp60.371 juta. Peningkatan pendapatan tiket tersebut utamanya disebabkan membaiknya kondisi penanganan pandemi COVID-19, sehingga pemerintah menurunkan level PPKM sehingga kebijakan WFO kembali berlaku.

Realisasi pendapatan tiket pada tahun 2022 melampaui target target yang ditetapkan sebesar Rp145.019 juta, yaitu dengan pencapaian 107,29%. Pendapatan tiket tersebut diperoleh dari 19.776.064 pengguna jasa. Perolehan tertinggi pendapatan tiket tercatat bulan Desember sebesar Rp18.459 juta, dengan jumlah pengguna jasa sebanyak 2.401.083 orang. Sedangkan perolehan terendah pendapatan tiket tercatat bulan Februari, sebesar Rp4.302 juta, dengan jumlah pengguna jasa sebanyak 532.671 orang.

Profitability of Farebox Revenue

Farebox revenue earned by the Company in 2022 amounted to Rp155,615 million, this amount increased by Rp111,069 million or 157.76% from farebox revenue in 2021 of Rp60,371 million. The increase in farebox revenue was mainly due to the improved condition of the COVID-19 pandemic handling, so that the government eased the PPKM level. As a consequence, the WFO policy has been back in effect.

Realization of farebox revenue in 2022 exceeded the target set of Rp145,019 million with an achievement of 107.29%. The farebox revenue was obtained from 19,776,064 passengers. The highest farebox revenue was generated in December with Rp18,459 million from 2,401,083 passengers. The lowest farebox revenue was generated in February with Rp4,302 million, from 532,671 passengers.



Pendapatan tiket termasuk subsidi prasarana dan sarana dari Pemrov DKI Jakarta yang diberikan terkait penugasan kepada PT MRT Jakarta (Perseroda). Ketentuan terkait subsidi prasarana dan sarana diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 107 Tahun 2019 yang diperbaharui dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 39 Tahun 2020 tentang Subsidi Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 46 Tahun 2022 tentang Subsidi Layanan Angkutan Umum Transjakarta, Moda Raya Terpadu, dan Lintas Raya Terpadu.

Pemberian subsidi pada periode pelaporan diatur dalam Perjanjian antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT MRT Jakarta (Perseroda) tentang Pemberian Subsidi Moda Raya Terpadu yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 No. DISHUB PROV DKI JAKARTA: 45/-10.00, PT MRT (Perseroda): CON/021/MRT/IV/2022 beserta Perjanjian Addendumnya dengan No. DISHUB PROV DKI JAKARTA 5407/PH.10.00, PT MRT (Jakarta): CON/167/MRT/XII/2022. Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Selisih Kurang/Lebih Subsidi Prasarana dan Sarana MRT Jakarta No. 338/1.811.3 dan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka pemberian subsidi MRT Jakarta pada tahun 2022 adalah sebesar Rp831.847 juta.

Farebox revenue includes the infrastructure and facility subsidies from the Government of DKI Jakarta Province, granted due to the appointment of PT MRT Jakarta (Perseroda). Provisions related to subsidies for infrastructure and facilities are regulated in DKI Jakarta Governor Regulation No. 107 of 2019 which was renewed in DKI Jakarta Provincial Governor Regulation No. 39 of 2020 concerning Subsidy for Mass Rapid Transit and Light Rail Transit as well as the DKI Jakarta Governor Regulation No. 46 of 2022 concerning Subsidies for Transjakarta Public Transport Services, Mass Rapid Transit and Light Rail Transit.

The provision of subsidy during the reporting period is regulated in the Agreement between the Government of DKI Jakarta Province and PT MRT Jakarta (Perseroda) regarding the provision of subsidy for the Mass Rapid Transit originating from the Regional Revenue and Expenditure Budget for 2022 Financial Year No. DISHUB PROV DKI JAKARTA: 45/-10.00, PT MRT (Perseroda): CON/021/MRT/IV/2022 and its Addendum Agreement with No. DISHUB PROV DKI JAKARTA 5407/PH.10.00, PT MRT (Jakarta): CON/167/MRT/XII/2022. Based on the Minutes of Verification of the Difference of Subsidy for MRT Jakarta Infrastructure and Facilities Number: 338/1.811.3 and the Financial Report for the year ended December 31, 2022, the subsidy for MRT Jakarta in 2022 was Rp831,847 million.

Profitabilitas Pendapatan Tiket dan Subsidi
Profitability of Farebox and Subsidy Revenues

Uraian Description	2022			2021	2020	Pertumbuhan (%) Growth (%)	
	Target (Rp Juta) Target (Rp Million)	Realisasi (Rp Juta) Realization (Rp Million)	%	Target (Rp Juta) Target (Rp Million)	Realisasi (Rp Juta) Realization (Rp Million)	2022-2021	2021-2020
Pendapatan Tiket Farebox Revenue	145.019	155.615	107,31	60.371	82.026	95,24	(26,4)
Pendapatan Subsidi dari Pemprov DKI Jakarta Subsidy Revenue from the Government of DKI Jakarta Province	831.847	808.200	97,16	821.978	620.800	(13,77)	32,4
Jumlah Pendapatan Total Revenue	976.865	963.815	98,66	882.350	702.826	81,46	25,5

Jumlah Pengguna Jasa dan Pendapatan Tiket
Total Ridership and Farebox Revenue

Bulan Month	2022		2021		2020	
	Jumlah Pengguna Jasa (Orang) Total Ridership (Persons)	Jumlah Pendapatan (Rp Juta) Total Revenue (Rp Million)	Jumlah Pengguna Jasa (Orang) Total Ridership (Persons)	Jumlah Pendapatan (Rp Juta) Total Revenue (Rp Million)	Jumlah Pengguna Jasa (Orang) Total Ridership (Persons)	Jumlah Pendapatan (Rp Juta) Total Revenue (Rp Million)
Januari January	1.092.508	9.132	424.536	3.500	2.638.270	21.919
Februari February	532.671	4.302	470.738	3.914	2.564.869	20.923
Maret March	960.406	7.712	669.627	5.616	1.403.638	11.216
April April	1.147.992	9.428	710.803	5.917	121.757	1.003
Mei May	1.561.680	13.555	744.488	6.431	43.544	466
Juni June	1.914.788	14.494	680.571	5.669	340.533	2.910
Juli July	1.884.107	15.063	134.055	1.076	559.542	4.646
Agustus August	1.872.032	14.564	185.930	1.541	524.752	4.454
September September	2.015.666	15.518	442.149	3.658	389.750	3.201
Oktober October	2.238.018	17.084	709.577	5.990	344.256	2.860
November November	2.155.113	16.282	911.091	7.655	500.104	4.215
Desember December	2.401.083	18.480	1.106.297	9.406	495.498	4.212
Jumlah Total	19.776.064	155.615	7.189.862	60.371	9.926.513	82.025

Profitabilitas Pendapatan Non-Tiket

Pendapatan non-tiket diperoleh dari beberapa sumber, yaitu:

1. Mitra Strategis untuk kerja sama layanan periklanan pada area operasional, kereta MRT Jakarta, layanan periklanan media luar ruang pada media pilar MRT Jakarta, dan layanan telekomunikasi;
2. Mitra Langsung untuk hak penamaan stasiun dan pembayaran tiket digital MRT Jakarta, yang dikelola sendiri oleh Perseroan;
3. Kerja sama dengan gerai regular maupun gerai usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) proses kurasi pemilihan tenant UMKM dilakukan Perseroan bersama Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf);
4. Kerja sama dengan Mitra dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan kawasan TOD, seperti sewa lahan dan bangunan interkoneksi;
5. Kerja sama dengan Mitra dalam hal penyediaan dan pengelolaan Hunian TOD;
6. Kerja sama dengan Mitra Accel yang telah berhasil menyelesaikan program MRTJ Accel;
7. Penyediaan jasa konsultasi pendampingan teknis, alih ilmu pengetahuan (*knowledge transfer*), dan dukungan SDM.

Profitability of Non-Farebox Revenue

Non-Farebox Revenue is generated from the following main sources:

1. Strategic Partners for advertising services at operational areas, MRT trains, outdoor media advertising services on the pillars, and telecommunication services;
2. Direct partners for station naming rights and digital payment for MRT Jakarta that is managed by the Corporation;
3. Regular tenants and micro, small, and medium enterprises (MSME) tenants the curation process of MSME tenant shortlisting is carried out by the Corporation and Creative Economy Agency (Bekraf).
4. Cooperation with Partners in terms of utilization and management of TOD areas, such as land lease and interconnecting buildings;
5. Cooperation with Partners in terms of provision and management of TOD Housing;
6. Cooperation with Accel Partners which have successfully completed the MRTJ Accel program;
7. Provision of consulting services for technical assistance, knowledge transfer and HR support.



Sepanjang tahun 2022, Perseroan meningkatkan sumber pendapatan non-tiket baru, yakni:

1. Penambahan mitra pembayaran tiket digital MRT;
2. Penambahan mitra retail *Vending Machine*;
3. Dana *Sponsorship event*;
4. Kontribusi Sewa kawasan TOD Blok M dan Dukuh Atas;
5. Interkoneksi di kawasan TOD Lebak Bulus;
6. Kerjasama Hunian TOD;
7. Jasa Konsultasi dan Pendampingan LRT Palembang;
8. Kerja sama dengan Tokyo Metro untuk pendampingan dan pelatihan kepada Ho Chi Minh Metro;
9. Penambahan Mitra Naming Right; dan
10. Kerja sama kemitraan Accel.

Kendala dan tantangan yang dihadapi direktorat Pengembangan Bisnis dalam melakukan inovasi pencapaian pendapatan non-tiket tahun 2022:

1. Masih rendahnya penjualan iklan media luar ruang dikarenakan pandemi berdampak kepada penurunan anggaran iklan yang dimiliki *brand* hingga 80%;
2. Market retail stasiun yang masih *wait and see* karena pandemi yang berdampak terhadap pengguna jasa MRT;
3. Penyesuaian strategi dan anggaran pemasaran calon mitra *Naming Rights*, Pengelola dan Interkoneksi Kawasan TOD dan potensi kerjasama lain.

Realisasi perolehan pendapatan non-tiket pada tahun 2022 mencapai Rp503.171 juta, atau 106,37% dari target Rp473.000 juta, dan meningkat Rp29.603 juta, atau 6,25% dari tahun 2021 sebesar Rp473.568 juta. Perolehan terbesar dari pendapatan non-tiket berasal dari Mitra Langsung, sebesar Rp266.850 juta, atau 53,03% dari total perolehan pendapatan non-tiket.

Throughout 2022, the Corporation increased new sources of non-farebox revenue, namely as follows:

1. Additional partners of MRT digital farebox payment;
2. Addition of Vending Machine retail partners;
3. Event sponsorship funds;
4. Contribution from the Lease of Blok M TOD and Dukuh Atas TOD areas;
5. Interconnection in the Lebak Bulus TOD area;
6. TOD Residential Cooperation;
7. LRT Palembang Consulting and Assistance Services;
8. Cooperation with Tokyo Metro for assistance and training for the Ho Chi Minh Metro;
9. Addition of Naming Right Partners; and
10. Accel partnership cooperation.

Constraints and challenges faced by the Directorate of Business Development in making innovations to achieve non-farebox revenue in 2022 are as follows:

1. The low sales of outdoor media advertising. This was due to the pandemic that had reduced the brand's advertising budget by up to 80%;
2. Station retail market which was still in wait-and-see stance due to the pandemic which had an impact on MRT ridership;
3. Adjustment of strategy and marketing budget for potential partners of Naming Rights, TOD Area Management and Interconnection, and other potential cooperation.

The realization of non-farebox revenue in 2022 reached Rp503,171 million, or 106.37% out of the target of Rp473,000 million, increased by Rp29,603 million or 6.25% from Rp473,568 million in 2021. The largest contributor of non-farebox revenue was Direct Partners that contributed Rp266,850 million or 53.03% of the total non-farebox revenue.

Profitabilitas Pendapatan Non-Tiket
Profitability of Non-Farebox Revenue

Uraian Description	2022			2021	2020	Pertumbuhan (%) Growth (%)	
	Target (Rp Juta) Target (Rp Million)	Realisasi (Rp Juta) Realization (Rp Million)	%	Target (Rp Juta) Target (Rp Million)	Realisasi (Rp Juta)	2022-2021	2021-2020
Mitra Strategis Strategic Partner	191.035	195.070	102,11	169.338	168.673	15,20	(0,39)
Mitra Langsung Direct Partner	251.897	266.850	105,94	208.512	192.796	27,98	(8,15)
Mitra Retail Retail Partner	14.905	14.371	96,42	7.890	10.352	82,14	(23,78)
Lain-lain Others	15.163	26.880	176,92	500	10.849	5276,00	(95,39)
Jumlah Pendapatan Total Revenue	473.000	503.171	106,37	473.568	382.672	6,25	23,75

Tinjauan Kinerja Keuangan

Financial Performance Review



Standar Penyajian Informasi dan Kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan pada Laporan Tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young (EY) Indonesia).

Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Perseroan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Information Presentation Standards and Adherence to Financial Accounting Standards

The analysis and discussion of financial performance in this Annual Report refer to the Financial Statements for the years ended on December 31, 2022 which have been audited by Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (EY Indonesia).

The presentation and disclosure of the Corporation's financial statements are prepared following Financial Accounting Standards ("SAK") in Indonesia which covers Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of Indonesian Institute of Chartered Accountants.



LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

Laporan Posisi Keuangan Statements of Financial Position

dalam jutaan Rupiah (in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	2020	Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)	
				Rp	%
Aset Lancar Current Assets	2.668.144	1.879.099	1.490.592	789.045	41,99
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	20.212.534	17.989.779	16.906.563	2.222.756	12,36
Jumlah Aset Total Assets	22.880.678	19.868.878	18.397.155	3.011.801	15,16
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	534.352	512.482	838.291	21.869	4,27
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	496.581	273.370	198.958	223.212	81,65
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.030.933	785.852	1.037.249	245.081	31,19
Ekuitas Neto Net Equity	21.849.745	19.083.026	17.359.906	2.766.720	14,50
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	22.880.678	19.868.878	18.397.155	3.011.801	15,16

Aset

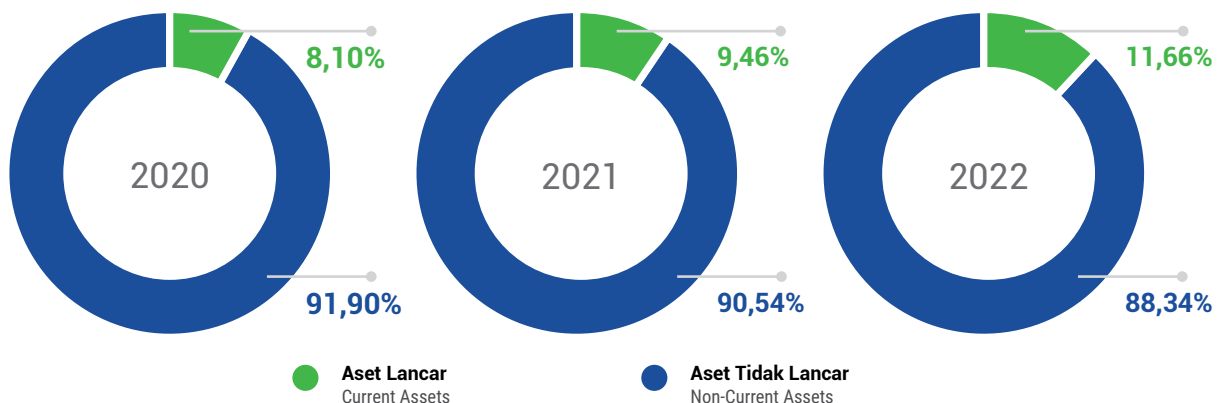
Jumlah Aset MRT Jakarta pada akhir tahun 2022 tercatat sebesar Rp22.880.678 juta, meningkat Rp3.011.801 juta atau 15,16% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp19.868.878 juta. Peningkatan Jumlah Aset tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar selama tahun 2022.

Komposisi Aset Perseroan utamanya berupa Aset Tidak Lancar yang pada tahun 2022 mencapai 88,34% dari Jumlah Aset Perseroan. Komposisi tersebut relatif tidak mengalami perubahan dalam tiga tahun terakhir.

Asset

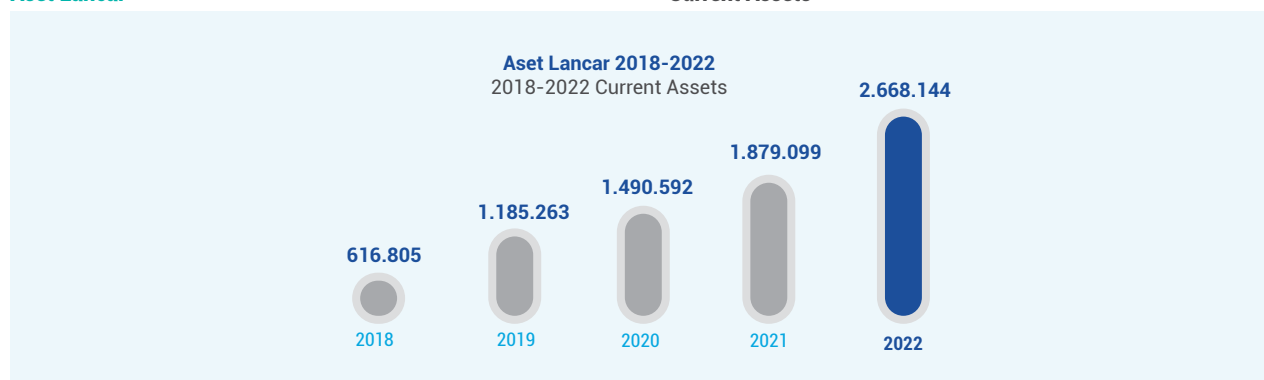
The total assets of MRT Jakarta at the end of 2022 was recorded at Rp22,880,678 million, an increase by Rp3,011,801 million or 15.16% compared to the same period in 2021 of Rp 19,868,878 million. The increase in Total Assets is driven by the increase in Current Assets and Non-Current Assets during 2022.

The main composition of the Corporation's Assets was Non-Current Assets which in 2022 reached 88,34% of the Corporation's Total Assets. The composition has remained relatively unchanged in the last three years.



Aset Lancar

Current Assets



Jumlah Aset Lancar Perseroan tahun 2022 tercatat sebesar Rp2.668.144 juta, meningkat Rp789.045 juta atau 41,99% dari tahun 2021 sebesar Rp1.879.099 juta. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan kenaikan kas dan setara kas dan piutang usaha.

Total Current Assets of the Corporation in 2022 were recorded at Rp2,668,144 million, an increase by Rp789,045 million or 41.99% from the current assets in 2021 of Rp1,879,099 million. The increase was mainly due to an increase in cash and cash equivalent and account receivables.

Aset Lancar Current Assets

dalam jutaan Rupiah (in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	2020	Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)	
				Rp	%
Kas dan Setara Kas Cash and cash equivalents	1.834.417	1.353.832	1.224.727	480.585	35,50
Piutang Usaha Account receivables	409.615	64.706	146.127	344.909	533,04
Piutang Subsidi Subsidy receivables	223.312	375.507	83.970	(152.195)	(40,53)
Pendapatan Masih Akan Diterima Accrued revenues	8.750	1.070	9.732	7.680	717,76
Persediaan Inventories	29.454	14.181	13.364	15.273	107,70
Aset Lancar Lainnya Other current assets	162.596	69.803	12.672	92.793	132,94
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	2.668.144	1.879.099	1.490.592	789.045	1890,36

Kas dan Setara Kas

Jumlah Kas dan Setara Kas MRT Jakarta per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.834.417 juta, meningkat Rp480.585 juta atau 35,50% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp1.353.832 juta. Peningkatan Kas dan Setara Kas tersebut disebabkan strategi Perseroan dalam menjalankan *cash flow*.

Cash and Cash Equivalents

Cash and Cash Equivalents of MRT Jakarta as of December 31, 2022 were recorded at Rp1,834,417 million, an increase by Rp480,585 million or 35.50% compared to the same period in 2021 of Rp1,353,832 million. The increase in Cash and Cash Equivalents was due to the Corporation's strategy in carrying out cash flow.



Piutang Usaha

Jumlah Piutang Usaha Jangka Pendek MRT Jakarta per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp409.615 juta, naik Rp344.909 juta atau 533,04% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp64.706 juta. Peningkatan Piutang Usaha tersebut disebabkan naiknya transaksi dengan mitra Perusahaan.

Piutang Subsidi

Jumlah Piutang Subsidi MRT Jakarta per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp223.312 juta, menurun Rp152.195 juta atau 40,53% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp375.507 juta. Penurunan Piutang Subsidi tersebut disebabkan telah dibayarkannya piutang subsidi tahun 2021 di tahun 2022.

Pendapatan Masih Akan Diterima

Jumlah Pendapatan Masih Akan Diterima MRT Jakarta per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp8.750 juta, meningkat Rp7.680 juta atau 717,76% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp1.070 juta. Peningkatan Pendapatan Masih Akan Diterima tersebut disebabkan kenaikan pendapatan yang belum diterima berdasarkan kontrak berjalan.

Persediaan

Jumlah Persediaan MRT Jakarta per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp29.454 juta, meningkat Rp15.273 juta atau 107,70% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp14.181 juta. Peningkatan Persediaan tersebut disebabkan penambahan persediaan suku cadang sarana.

Aset Lancar Lainnya

Jumlah Aset Lancar Lainnya MRT Jakarta per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp162.596 juta, meningkat Rp92.793 juta atau 132,94% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp69.803 juta. Peningkatan Aset Lancar Lainnya tersebut disebabkan meningkatnya nilai dana dibatasi penggunaannya.

Aset Tidak Lancar

Accounts Receivables

Short-Term Account Receivables of MRT Jakarta as of December 31, 2022 were recorded at Rp409,615 million, an increase by Rp344,909 million or 533.04% compared to the same period in 2021 amounting to Rp64,706 million. The increase in Account Receivables was due to an increase in transactions with the Corporation's partners.

Subsidy Receivables

Subsidy Receivables of MRT Jakarta as of December 31, 2022 were recorded at Rp223.312 million, a decrease by Rp152,195 million or 40.53% compared to the same period in 2021 amounting to Rp375,507 million. The decrease in Subsidy Receivables was because the subsidy receivables for 2021 had been paid in 2022.

Accrued Revenue

Accrued Revenue of MRT Jakarta as of December 31, 2022 was recorded at Rp8,750 million, an increase by Rp7,680 million or 717,76% compared to the same period in 2021 of Rp 1,070 million. The increase in Accrued Revenue was due to an increase in unearned revenue under the current contract.

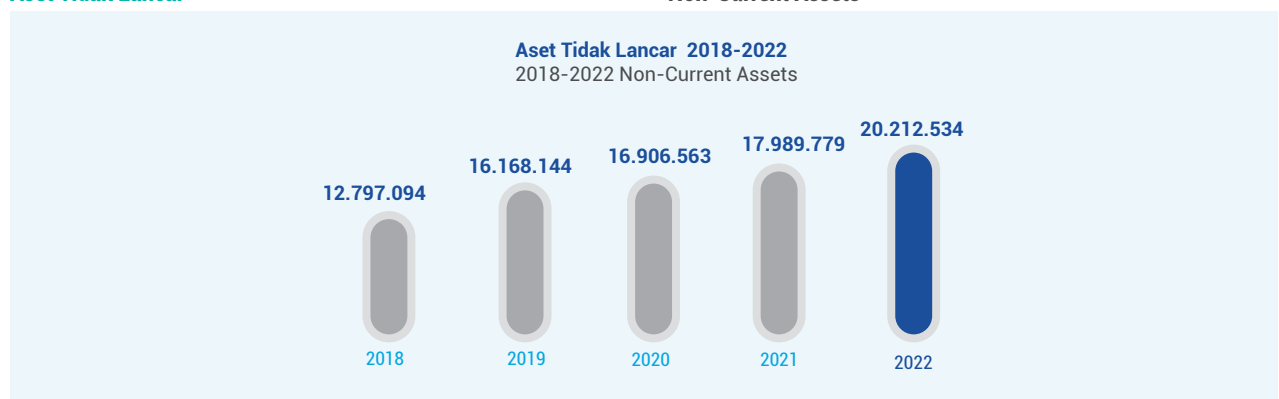
Inventories

MRT Jakarta's Inventories as of December 31, 2022 was recorded at Rp29,454 million, an increase by Rp15,273 million or 107.70% compared to the same period in 2021 of Rp14,181 million. The increase in inventories was due to the addition of spare parts for facilities.

Other Current Assets

Total Other Current Assets of MRT Jakarta as of December 31, 2022 were recorded at Rp162,596 million, an increase by Rp92,793 million or 132.94% compared to the same period in 2021 of Rp69,803 million. The increase in Other Current Assets was due to the increase in the balance of restricted funds.

Non-Current Assets



Jumlah Aset Tidak Lancar Perseroan tahun 2022 tercatat sebesar Rp20.212.534 juta, meningkat Rp2.222.756 juta atau 12,36% dari tahun 2021 sebesar Rp17.989.779 juta. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan kenaikan aset tetap dan uang muka kontraktor.

Total Non-Current Assets of the Corporation in 2022 was recorded at Rp20,212,534 million, an increase by Rp2,222,756 million or 12.36% from Rp17,989,779 million in 2021. The increase was mainly due to an increase in fixed assets and contractor advances.

Aset Tidak Lancar
Non-Current Assets

dalam jutaan Rupiah (in million Rupiah)

Uraian	2022	2021	2020	Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)	
				Rp	%
Piutang Jangka Panjang Long-term Receivables	-	228.415	-	(228.415,00)	(100)
Uang Muka Kontraktor Contractor Advances	2.545.685	1.397.650	765.178	1.148.035,21	82,14
Investasi Entitas Anak dan Ventura Bersama Subsidiary and Joint Venture Investment	17.541	25.441	33.849	(7.900,09)	(31,05)
Aset Tetap - Neto Fixed Assets - Net	17.417.431	16.246.019	15.944.111	1.171.412,51	7,21
Aset Hak Guna - Neto Right-of-use Assets - Net	8.387	21.809	31.882	(13.422,17)	(61,54)
Aset Tak Berwujud - Neto Intangible Assets - Net	66.009	27.407	27.715	38.601,71	140,85
Uang Jaminan Security Deposits	20.489	20.593	20.489	104	(0,51)
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	681	6.754	72.374	(6.072,83)	(89,91)
Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan Estimated Claim for Tax Refund	16.383	15.691	10.964	691,75	4,41
Piutang Sewa Subsidy receivables	3.333	-	-	3.333	100
Aset Lainnya Other Assets	146	-	-	146	100
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	20.212.534	17.989.779	16.906.562	2.222.755	12,36

Uang Muka Kontraktor

Jumlah Uang Muka Kontraktor MRT Jakarta per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp2.545.685 juta, meningkat Rp1.148.035 juta atau 82,14% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp1.397.650 juta. Peningkatan Uang Muka Kontraktor tersebut disebabkan kenaikan uang muka dari kontraktor CP202.

Investasi Entitas Anak dan Ventura Bersama

Jumlah Investasi Entitas Anak dan Ventura Bersama MRT Jakarta per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp17.541 juta, menurun Rp7.900 juta atau 31,05% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp25.441 juta. Penurunan Investasi Entitas Anak dan Ventura Bersama tersebut disebabkan kenaikan rugi dari Perusahaan ventura yang harus diserap oleh Perseroan.

Aset Tetap-Neto

Jumlah Aset Tetap-Neto MRT Jakarta per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp17.417.431 juta, meningkat Rp1.171.412 juta atau 7,21% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp16.246.019 juta. Peningkatan Aset Tetap-Neto tersebut disebabkan kenaikan pada Aset dalam Penyelesaian MRT Fase 2.

Contractor Advances

Contractor Advances of Jakarta MRT Contractors as of December 31, 2022 were recorded at Rp2,545,685 million, an increase by Rp1,148,035 million or 82.14% compared to the same period in 2021 of Rp1,397,650 million. The increase in contractor advances was due to an increase in contractor advances for CP202.

Subsidiary and Joint Venture Investment

Subsidiary and Joint Venture Investment of MRT Jakarta as December 31, 2022 was recorded at Rp17,541 million, a decrease by Rp7,900 million or 31.05% compared to the same period in 2021 of Rp25,441 million. The decrease in Subsidiary and Joint Venture Investment was due to the increase in losses from venture companies that had to be absorbed by the Corporation.

Fixed Assets-Net

Fixed Assets-Net of MRT Jakarta as of 31 December 2022 was recorded at RpRp17,417,431 million, an increase by Rp1,171,412 million or 7.21% compared to the same period in 2021 of Rp16,246,019 million. The increase in Fixed Assets-Net was due to an increase in Assets in MRT Phase 2 Completion.



Aset Hak Guna - Neto

Jumlah Aset Hak Guna-Neto MRT Jakarta per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp8.387 juta, menurun Rp13.422 juta atau 61,54% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp21.809 juta. Penurunan Aset Hak Guna - Neto tersebut disebabkan oleh depresiasi tahun berjalan.

Aset Tak Berwujud - Neto

Jumlah Aset Tak Berwujud-Neto MRT Jakarta per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp66.009 juta, meningkat Rp38.601 juta atau 61,54% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp27.407 juta. Peningkatan Aset Tak Berwujud - Neto tersebut disebabkan bertambahnya aset tak berwujud.

Liabilitas

Jumlah Liabilitas MRT Jakarta pada akhir tahun 2022 tercatat sebesar Rp1.030.933 juta, meningkat Rp245.081 juta atau 31% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp785.852 juta. Peningkatan Jumlah Liabilitas tersebut dipengaruhi oleh kenaikan utang retensi kepada kontraktor MRT Fase 2.

Komposisi Liabilitas Perseroan utamanya berupa Liabilitas Jangka Pendek yang pada tahun 2022 mencapai 41,98% dari Jumlah Liabilitas Perseroan. Komposisi tersebut relatif tidak mengalami perubahan dalam tiga tahun terakhir.

Right-of-use Assets - Net

Right-of-use Assets - Net of MRT Jakarta as of December 31, 2022 were recorded at Rp8,387 million, a decrease Rp13,422 million or 61.54% compared to the same period in 2021 of Rp21,809 million. The decrease in Right-of-use Assets - Net was due to the depreciation for the year.

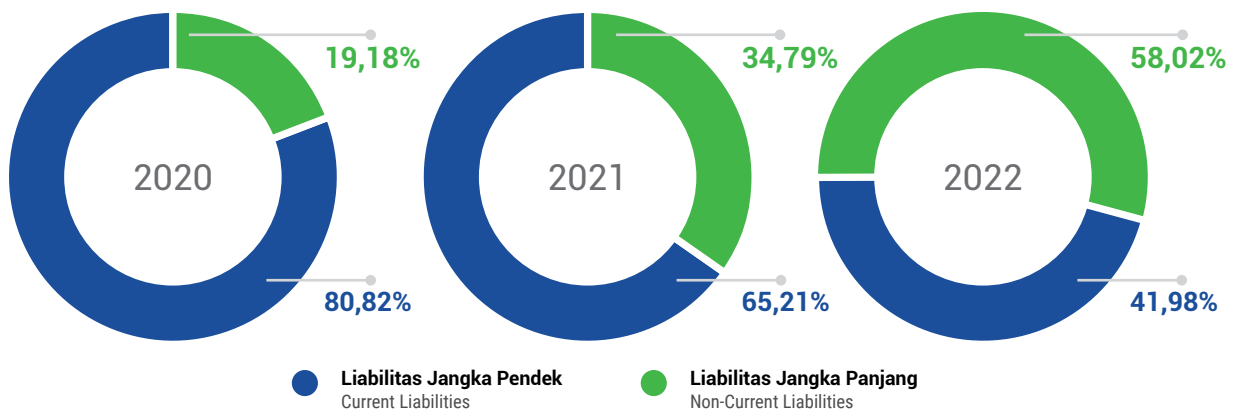
Intangible Assets - Net

Intangible Assets - Net of MRT Jakarta as of December 31, 2022 were recorded at Rp66,009 million, an increase by Rp38,601 million or 61.54% compared to the same period in 2021 of Rp27,407 million. The increase in Intangible Assets - Net was due to an increase in intangible assets.

Liabilities

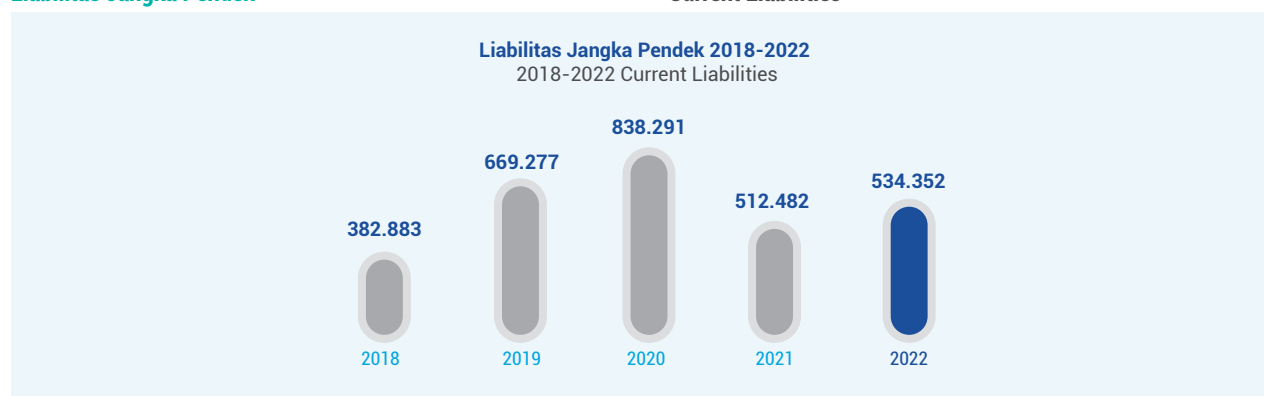
Total liabilities of MRT Jakarta at the end of 2022 were recorded at Rp1,030,933 million, an increase by Rp245,081 million or 31% compared to the same period in 2021 of Rp785,852 million. The increase in Total Liabilities was affected by an increase in retention liabilities to MRT Phase 2 contractors.

The main composition of the Corporation's Liabilities is in the form of Current Liabilities which in 2022 reached 41.98% of the Corporation's Total Liabilities. The composition has remained relatively unchanged in the last three years.



Liabilitas Jangka Pendek

Current Liabilities



Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perseroan tahun 2022 tercatat sebesar Rp534.352 juta, meningkat Rp21.870 juta atau 4,27% dari tahun 2021 sebesar Rp512.482 juta. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan meningkatnya utang bank di Anak Perusahaan.

The Corporation's total current liabilities in 2022 was recorded at Rp534,352 million, an increase by Rp21,870 million or 4,27% from 2021 of Rp512,482 million. The increase was mainly due to a increase in bank payable in subsidiary.

Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities

dalam jutaan Rupiah (in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	2020	Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)	
				Rp	%
Utang Usaha Account Payables	7.004	2.973	1.510	4.031	135,59
Utang Bank Bank Payables	34.186	5.300	-	28.886	545,02
Liabilitas Imbalan Kerja Liabilities for Benefits	3.248	-	-	3.248	100
Utang Kontraktor dan Konsultan Payables to Contractors and Consultants	56.060	56.142	56.946	(82)	(0,15)
Utang Lain-lain other payables	1.651	-	-	1.651	100
Utang Retensi Retention Payables	3.041	11.466	431.065	(8.425)	(73,48)
Beban Akrua Accrued Expenses	299.483	278.964	169.256	20.519	7,36
Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek Short-term Unearned Revenues	107.783	142.462	137.007	(34.679)	(24,34)
Utang Pajak Tax Payables	18.948	12.284	13.221	6.664	54,25
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	2.948	2.891	29.286	57	1,96
Total Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	534.352	512.482	838.291	21.870	4,27

Utang Usaha

Jumlah Utang Usaha MRT Jakarta per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp7.004 juta, meningkat Rp4.031 juta atau 135,59% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp2.973 juta. Peningkatan Utang Usaha tersebut disebabkan naiknya utang jasa profesional.

Account payables

Account Payables of MRT Jakarta as of December 31, 2022 were recorded at Rp7,004 million, an increase by Rp4,031 million or 135.59% compared to the same period in 2021 of Rp 2,973 million. The increase in Account Payables was due to an increase in professional service liabilities.



Utang Bank

Jumlah Utang Bank MRT Jakarta per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp34.186 juta meningkat sebesar Rp28.886 juta atau 545,02% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp5.300 juta. Utang Bank tersebut merupakan pinjaman oleh Anak Perusahaan, yaitu PT Integrasi Transportasi Jakarta.

Utang Kontraktor dan Konsultan

Jumlah Utang Kontraktor dan Konsultan MRT Jakarta per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp56.060 juta, menurun Rp82 juta atau 0,15% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp56.142 juta. Peningkatan Utang Kontraktor dan Konsultan tersebut disebabkan kenaikan utang pada kontraktor CP201.

Utang Retensi

Jumlah Utang Retensi jangka pendek MRT Jakarta per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp3.041, menurun Rp8.425 juta atau 73,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp11.466 juta. Penurunan disebabkan oleh pembayaran retensi untuk kontraktor fase 1.

Beban Akruai

Jumlah Beban Akruai MRT Jakarta per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp299.483 juta, meningkat Rp20.519 juta atau 7,36% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp278.964 juta. Kenaikan beban akrual disebabkan kenaikan beban akrual atas pekerjaan kontraktor MRT fase 2.

Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek MRT Jakarta per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp107.783 juta, menurun Rp34.679 juta atau 24,34% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp142.462 juta. Penurunan Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek tersebut disebabkan telah diterimanya pendapatan dari mitra.

Utang Pajak

Jumlah Utang Pajak MRT Jakarta per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp18.948 juta, meningkat Rp6.664 juta atau 54,25% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp12.284 juta. Peningkatan Utang Pajak tersebut disebabkan kenaikan pada PPN.

Liabilitas Sewa

Jumlah Liabilitas Sewa MRT Jakarta per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp2.948 juta, meningkat Rp57 juta atau 1,96% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp2.891 juta. Peningkatan Liabilitas tersebut disebabkan karena adanya penambahan aset hak guna sewa pada tahun berjalan.

Bank Payables

Bank Payables of MRT Jakarta Debt as of December 31, 2022 were recorded at Rp34,186 million an increase by Rp28,886 million or 545.02% compared to the same period in 2021 of Rp5,300 million. The bank payables were payables of the Subsidiary, PT Integrasi Transportasi Jakarta.

Payables to Contractors and Consultants

Payables to Contractors and Consultants of MRT Jakarta as of December 31, 2022 were recorded at Rp56,060 million, a decrease by Rp82 million or 0.15% compared to the same period in 2021 of Rp56,142 million. The increase in payables to contractors and consultants was due to an increase in payables to CP201 contractors.

Retention Payables

Current Retention Payables of MRT Jakarta as of December 31, 2022 were recorded at Rp3,014 a decrease by Rp20,519 million or 73.48% compared to the same period in 2021 of Rp278,964 million. The increase was due to retention payment of contractor MRT Phase 1.

Accrued Expenses

Accrued Expenses of MRT Jakarta as of December 31, 2022 were recorded at Rp299,483 million, an increase by Rp20,519 million or 7.36% compared to the same period in 2021 of Rp278,964 million. The increase in accrued expenses was due to increase in accrued expenses of contractor MRT Phase 2.

Short Term Unearned Revenues

Short-Term Unearned Revenues of MRT Jakarta as of December 31, 2022 were recorded at Rp107.783 million, a decrease by Rp34,679 million or 24.34% compared to the same period in 2021 of Rp142,462 million. The decrease in Short Term Unearned Revenues was due to the receipt of revenues from partners.

Tax Payables

Tax Payables of MRT Jakarta as of December 31, 2022 were recorded at Rp18,948 million, an increase Rp6,664 million or 54.25% compared to the same period in 2021 of Rp12,284 million. The increase in tax payables was due to an increase in VAT.

Lease Liabilities

Lease Liabilities of MRT Jakarta as of December 31, 2022 were recorded at Rp2,984 million, an increase by Rp57 million or 1.96% compared to the same period in 2021 of Rp2,891 million. The decrease in liabilities is to the addition of leasehold assets in the current year.

Liabilitas Jangka Panjang

Non-Current Liabilities



Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Perseroan tahun 2022 tercatat sebesar Rp496.581 juta, meningkat Rp223.211 juta atau 81,65% dari tahun 2021 sebesar Rp273.370 juta. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan kenaikan pada utang retensi dan Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang.

The Corporation's total Long-Term Liabilities in 2022 was recorded at Rp496,581 million, an increase of Rp223,211 million or 81.65% from 2021 of Rp273,370 million. The increase was mainly due to an increase in retention payables and Long-Term Prepaid Income.

Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities

dalam jutaan Rupiah (in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	2020	Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)	
				Rp	%
Utang Retensi Retention Payables	219.808	72.678	-	147.130	202,44
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	1.184	2.662	1.802	(1.478)	(55,52)
Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang Long-Term Unearned Revenues	143.876	131.120	138.086	12.756	9,73
Liabilitas Pajak Tangguhan Deferred Tax Liabilities	60.672	-	-	60.672	100
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan Liabilities for Employee Benefits	50.715	51.140	44.763	(425)	(0,83)
Jaminan Uang Pelanggan Customers' Security Deposit	20.326	15.770	14.307	4.556	28,89
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	496.581	273.370	198.958	223.211	81,65

Utang Retensi

Jumlah Utang Retensi MRT Jakarta per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp219.808 juta, meningkat Rp147.130 juta atau 202,44% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp72.678 juta. Peningkatan Utang Retensi tersebut disebabkan kenaikan utang retensi untuk kontraktor MRT Fase 2.

Retention Payables

Retention Payables of MRT Jakarta as of December 31 2022 were recorded at Rp219,808 million, an increase by Rp147,130 million or 202.44% compared to the same period in 2021 of Rp72,678 million. The increase in Retention Payables was due to an increase in retention payables for MRT Phase 2 contractors.

Liabilitas Sewa

Jumlah Liabilitas Sewa MRT Jakarta per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp971 juta, menurun Rp1.691 juta atau 63,52% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp2.662 juta. Penurunan Liabilitas Sewa tersebut disebabkan reklasifikasi liabilitas sewa ke liabilitas jangka pendek.

Lease Liabilities

Lease Liabilities of MRT Jakarta as of December 31, 2022 were recorded at Rp971 million, a decrease by Rp1,691 million or 63.52% compared to the same period in 2021 of Rp 2,662 million. The decrease in Lease Liabilities was due to the reclassification of lease liabilities to current liabilities.



Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang MRT Jakarta per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp143.876 juta, meningkat Rp92.736 juta atau 181,34% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp51.140 juta. Peningkatan Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang tersebut disebabkan adanya perjanjian kerja sama baru di tahun 2022.

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan MRT Jakarta per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp50.715 juta, menurun Rp80.405 juta atau 61,32% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp131.120 juta. Penurunan Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan tersebut disebabkan adanya kebijakan baru terkait liabilitas imbalan kerja karyawan.

Jaminan Uang Pelanggan

Jumlah Jaminan Uang Pelanggan MRT Jakarta per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp20.326 juta, meningkat Rp4.556 juta atau 28,89% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp15.770 juta. Peningkatan Jaminan Uang Pelanggan tersebut disebabkan adanya penambahan jaminan dari pelanggan baru.

Long Term Unearned Revenues

Long-Term Unearned Revenues of MRT Jakarta as of December 31, 2022 were recorded at Rp143,876 million, an increase by Rp92,736 million or 181.34% compared to the same period in 2021 of Rp51,140 million. The increase in Long-Term Unearned Revenues was due to a new cooperation agreement in 2022.

Liabilities for Employee Benefits

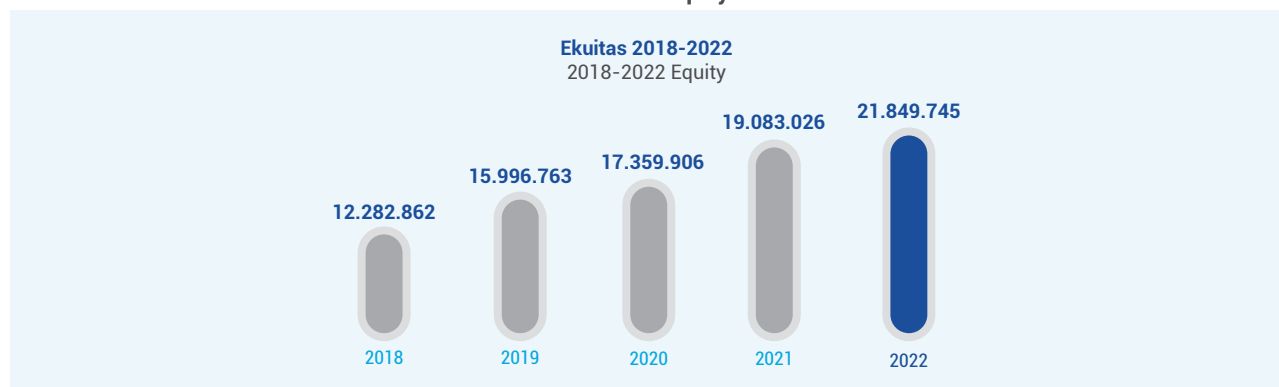
Liabilities for Employee Benefits of MRT Jakarta as of 31 December 2022 were recorded at Rp50,715 million, a decrease by Rp80,405 million or 61.32% compared to the same period in 2021 of Rp131,120 million. The decrease in Liabilities for Employee Benefits was due to a new policy related to liabilities for employee benefits.

Customers' Security Deposit

Customers' Security Deposit of MRT Jakarta as of December 31, 2022 was recorded at Rp20,326 million, an increase by Rp4,556 million or 28.89% compared to the same period in 2021 of Rp 15,770 million. The increase in Customers' Security Deposit was due to additional Customers' Security Deposit from new customers.

Ekuitas

Equity



Jumlah Ekuitas Perseroan tahun 2022 tercatat sebesar Rp21.849.745 juta, meningkat Rp2.766.720 juta atau 14,50% dari tahun 2021 sebesar Rp19.083.026 juta. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan penambahan modal daerah dari Provinsi DKI Jakarta.

The Corporation's total equity in 2022 was recorded at Rp21,849,745 million, an increase by Rp2,766,720 million or 14.50% from 2021 of Rp19,083,026 million. The increase was mainly due to the additional capital from the Government of DKI Jakarta Province.

Ekuitas Equity

dalam jutaan Rupiah (in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	2020	Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)	
				Rp	%
Modal Saham Shared Capital	17.772.643	17.772.643	16.339.169	-	0,00
Modal Disetor Lainnya Other Paid-Up Capital	4.286.916	1.617.420	1.443.474	2.669.496	165,05
Defisit Deficit	(210.796)	(307.037)	(412.738)	(96.241)	(31,35)
Jumlah Ekuitas Total Equity	21.849.745	19.083.026	17.359.906	2.766.720	14,50

Modal Saham

Jumlah Modal Saham MRT Jakarta per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp17.772.643 juta, meningkat Rp0 juta atau 0% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp17.772.643 juta.

Modal Disetor Lainnya

Jumlah Modal Disetor Lainnya MRT Jakarta per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp4.286.916 juta, meningkat Rp2.669.496 juta atau 165,05% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp1.617.420 juta. Peningkatan Modal Disetor Lainnya tersebut disebabkan penambahan penyertaan modal daerah dari Pemprov. DKI Jakarta selama tahun 2022.

Defisit

Jumlah Defisit MRT Jakarta per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp210.796 juta, menurun Rp96.241 juta atau 31,35% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp307.037 juta. Penurunan Defisit tersebut disebabkan penurunan akumulasi rugi Perseroan.

LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Pelonggaran PPKM sejalan dengan menurunnya pandemi COVID-19, menjadi faktor utama yang berpengaruh pada Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain. Pelonggaran kegiatan masyarakat dan meningkatnya mobilitas warga, berdampak pada peningkatan kembali jumlah pengguna jasa, sehingga mempengaruhi perolehan pendapatan tiket.

Shared Capital

Shared capital of MRT Jakarta as of December 31, 2022 was recorded at Rp17,772,643 million, an increase by Rp 0 million or 0% compared to the same period in 2021 of Rp 17,772,643 million.

Other Paid-up Capital

Other Paid-up Capital of MRT Jakarta as of 31 December 2022 was recorded at Rp4,286,916 million, an increase by Rp2,669,496 million or 165.05% compared to the same period in 2021 of Rp 1,617,420 million. The increase in Other Paid-up Capital was due to an increase in capital participation from the Government of DKI Jakarta Province during 2022.

Deficit

Deficit of MRT Jakarta as of December 31, 2022 was recorded at Rp210,796 million, an decrease by Rp96,241 million or 31.35% compared to the same period in 2021 of Rp307,037 million. The decrease in the deficit was due to a decrease in the Corporation's accumulated losses.

REPORT OF PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE REVENUES

PPKM easing in line with the decline in the COVID-19 pandemic became the main factor affecting Profit (Loss) and Other Comprehensive Revenues. The easing of community activities and the increasing mobility of citizens have an impact on the increasing number of passengers, thus affecting the gain of farebox revenue.





Laba (Rugi) Komprehensif Comprehensive Profit (Loss)

dalam jutaan Rupiah (in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	2020	Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)	
				Rp	%
Pendapatan Revenue	1.466.986	1.355.917	1.085.498	111.069	8,19
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(1.045.193)	(989.996)	(976.692)	(55.197)	5,58
Laba Kotor Gross Profit	421.793	365.921	108.806	55.872	15,27
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(279.202)	(218.351)	(189.754)	(60.851)	27,87
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	142.591	147.570	(80.948)	(4.979)	(3,37)
Penghasilan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	43.895	35.470	35.731	8.425	23,75
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Final dan Manfaat Pajak Penghasilan Income (Loss) Before Final Tax Expenses and Income Tax Benefits	186.486	183.040	(45.217)	3.446	1,88
Beban Pajak Final Final Tax Expenses	(10.008)	(11.678)	(17.492)	1.670	(14,30)
Laba (Rugi) Sebelum Manfaat Pajak Penghasilan Income (Loss) Before Income Tax Benefits	176.478	171.362	(62.709)	5.116	2,99
Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan Deferred Income Tax Benefits	(71.510)	(65.829)	(6.385)	(5.681)	0,09
Laba (rugi) Tahun Berjalan Income (Loss) for the Year	104.968	105.533	(69.094)	(565)	(0,01)
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	(7.745)	166	(1.732)	(166)	(1,00)
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income (Loss) for the Year	97.223	105.699	(70.826)	(731)	(0,01)
Laba (Rugi) per Saham (Rupiah Penuh) Earnings (Loss) per Share (Full Rupiah)	5.906	5.949	(4.229)	(43)	(0,01)

Pendapatan

Tahun 2022, MRT Jakarta membukukan pendapatan sebesar Rp1.466.986 juta, meningkat Rp111.069 juta atau 8,19% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp1.355.917 juta. Pendapatan Perseroan tahun 2022 utamanya masih berasal dari Pendapatan Subsidi yang pada tahun 2022 mencapai Rp808.100 juta.

Revenue

In 2022, MRT Jakarta posted revenue of Rp1,466,986 million, an increase by Rp111,069 million or 8.19% compared to the same period in 2021 of Rp1,355,917 million. The Corporation's revenue in 2022 was still mainly derived from Subsidy Revenue which in 2022 reached Rp808,100 million.

Pendapatan Revenue

dalam jutaan Rupiah (in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	2020	Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)	
				Rp	%
Pendapatan Tiket Farebox Revenue	155.615	60.371	82.026	95.244	157,76
Pendapatan Subsidi Subsidy Revenue	808.200	821.978	620.800	(13.778)	(1,68)
Pendapatan Non-Tiket Non-Farebox Revenue	503.171	473.568	382.670	29.603	6,25
Jumlah Pendapatan Total Revenue	1.466.986	1.355.917	1.085.498	111.069	8,19

Analisis pencapaian Pendapatan Perseroan tahun 2022 dapat dilihat pada halaman 145 Laporan ini.

Beban Pokok Pendapatan

Beban Pokok Pendapatan MRT Jakarta tahun 2022 mencapai Rp1.045.193 juta, meningkat Rp55.197 juta atau 5,58% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp989.996 juta. Beban Pokok Pendapatan Perseroan tahun 2022 utamanya masih berasal dari Beban Penyusutan yang pada tahun 2022 mencapai Rp526.049 juta.

The analysis of the Corporation's Revenue achievement in 2022 can be seen on page 145 of this report.

Cost of Revenue

MRT Jakarta's Cost of Revenue in 2022 reached Rp1,045,193 million, an increase by Rp55,197 million or 5.58% compared to the same period in 2021 of Rp989,996 million. The Corporation's Cost of Revenue in 2022 was still mainly derived from Depreciation Cost which in 2022 reached Rp526,049 million.

Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues

dalam jutaan Rupiah (in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	2020	Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)	
				Rp	%
Penyusutan Aset Tetap Depreciation of Fixed Assets	526.050	523.823	520.750	2.227	0,43
Gaji dan Kesejahteraan Karyawan Salaries and Employee's Welfare	144.879	134.673	120.860	10.206	7,58
Biaya Energi dan Utilitas Energy and Utility Costs	70.900	61.360	81.576	9.540	15,55
Keamanan dan Kebersihan Security and Hygiene	131.610	131.626	132.271	(16)	(0,01)
Pemeliharaan Maintenance	75.108	53.514	34.012	21.594	40,35
Asuransi Insurance	23.308	23.580	25.792	(272)	(1,15)
Keperluan Rumah Tangga Household Appliances	23.780	25.763	17.957	(1.983)	(7,70)
Jasa Profesional Professional Services	3.936	-	-	3.936	100,00
Pajak Bumi Bangunan Land and Building Tax	43.982	34.808	42.670	9.174	26,36
Lain-lain Others	1.640	849	804	791	93,17
Jumlah Total	1.045.193	989.996	976.692	55.197	5,58%

Peningkatan Beban Pokok Pendapatan tahun 2022 dipengaruhi oleh kenaikan biaya pemeliharaan.

The increase in Cost of Revenue in 2022 was affected by an increase in maintenance cost.

Laba Kotor

Sejalan dengan peningkatan Pendapatan Perseroan di tahun 2022, Laba Kotor yang dibukukan Perseroan juga meningkat sebesar Rp55.872 juta atau 15,27% menjadi Rp421.793 juta, dari tahun sebelumnya sebesar Rp365.921 juta.

Gross profit

In line with the increase in the Corporation's Revenue in 2022, Gross Profit recorded by the Corporation also increased by Rp55,872 million or 15.27% to Rp421,793 million,, from the previous year of Rp365,921 million.

Beban Umum dan Administrasi

Jumlah Beban Umum dan Administrasi per 31 Desember 2022 mencapai Rp279.202 juta, meningkat Rp60.851 juta, atau naik 27,87% dari nilai per 31 Desember 2021 sebesar Rp218.351 juta. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan beban gaji dan tunjangan dan penyisihan piutang.

General and Administrative Expenses

Total General and Administrative Expenses as of 31 December 2022 reached Rp279,202 million, an increase by Rp59,362 million, or an increase by 27.19% from Rp218,351 million as of December 31, 2021. The increase was due to an increase in salary and benefits expenses and allowance for receivables.



Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses

dalam jutaan Rupiah (in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	2020	Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)	
				Rp	%
Gaji dan Kesejahteraan Karyawan Salaries and Employees' Welfare	125.664	112.779	86.425	12.885	11,42
Perlengkapan Kantor Office Supplies	17.752	20.126	18.448	(2.374)	(11,80)
Pelatihan dan Keanggotaan Trainings and Membership	6.431	7.230	4.901	(799)	(11,05)
Sewa Kantor dan Kendaraan Office and Vehicle Rent Expenses	1.460	631	2.247	829	131,38
Jasa Profesional Professional Fee	30.165	36.972	32.914	(6.807)	(18,41)
Promosi dan Pameran Promotion and Exhibition	3.535	4.455	6.582	(920)	(20,65)
Keperluan Rumah Tangga Household Appliances	4.330	3.026	8.319	1.304	43,09
Penyusutan Depreciation	11.866	12.457	9.768	(591)	(4,74)
Hak Guna Usaha Business Use Right	9.832	12.081	11.824	(2.249)	(18,62)
Rapat Koordinasi dan RUPS Coordination Meeting and GMS	8.461	3.062	2.019	5.399	176,32
Transportasi dan Parkir Transportation and Parking	2.180	1.328	2.054	852	64,16
Amortisasi Amortization	4.849	3.083	2.814	1.766	176,32
Sumbangan Donation	4.488	850	1.066	3.638	428
Komunikasi, Energi, dan Utilitas Communication, Energy, and Utility	259	33	328	226	684,85
Administrasi Bank Bank Administration	1.084	237	44	847	357,38
Perjalanan dinas Business trips	6.687	-	-	6.687	0,00
Beban Penyisihan piutang Allowance for receivables	39.922	-	-	39.922	0,00
Jumlah Beban Umum dan Administrasi Total General and Administrative Expenses	279.200	218.351	189.753	59.362	27,19

Laba (Rugi) Usaha

Tahun 2022, Perseroan membukukan Laba Usaha sebesar Rp142.591 juta, menurun Rp4.979 juta atau 3,37% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp147.570 juta. Peningkatan Laba Usaha tersebut utamanya disebabkan kenaikan pada pendapatan usaha.

Penghasilan (Beban) Lain-lain

Pada tahun 2022, Perseroan mencatat Penghasilan Lain-lain sebesar Rp43.895 juta, meningkat Rp8.425 juta atau 23,75% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp35.470 juta. Kenaikan penghasilan lain-lain tersebut disebabkan kenaikan pada laba selisih kurs.

Operating Profit (Loss)

In 2022, the Corporation recorded an Operating Profit of Rp142,591 million, a decrease by Rp4,979 million or 3.37% compared to the previous year of Rp147,570 million. The increase in Operating Profit was mainly due to an increase in operating revenue.

Other Income (Expenses)

In 2022, the Corporation recorded Other Income of Rp43,895 million, an increase by Rp8,425 million or 23.75% compared to the previous year of Rp35,470 million. The increase in other income was due to an increase in gain on foreign exchange.

Penghasilan (Beban) Lain-lain
Other Income (Expenses)

dalam jutaan Rupiah (in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	2020	Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)	
				Rp	%
Penghasilan Keuangan Finance Income	41.920	40.664	(1.651)	1.256	3,09
Laba Selisih Kurs Gains on Foreign Exchange	20.014	3.432	52.243	16.582	483,16
Penghasilan Hibah Grant Income	7.406	-	-	7.406	100,00
Serap Rugi Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Share of Loss of Associate and Joint Venture	(12.992)	(9.407)	(6.951)	(3.585)	-
Beban Keuangan Finance Expense	(8.939)	(15.626)	(11.436)	6.687	(42,79)
Penghasilan Denda Penalty Income	(3.514)	16.407	21.527	(19.921)	(121,42)
Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain Total Other Income (Expenses)	43.895	35.470	35.732	8.425	23,75

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Laba Tahun Berjalan Perseroan per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp104.968 juta, menurun Rp565 juta atau 0.01% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp105.553 juta. Penurunan tersebut disebabkan menurunnya penghasilan lain-lain dan meningkatnya beban pajak tangguhan.

Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang dibukukan Perseroan per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp97.223, menurun Rp8.476 juta atau 0,08% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp105.699 juta. Penurunan tersebut disebabkan menurunnya penghasilan lain-lain dan meningkatnya beban pajak tangguhan.

Laba (Rugi) per Saham

Sejalan dengan meningkatnya Laba Tahun Berjalan yang dibukukan Perseroan, Laba per Saham Perseroan tahun 2022 juga menurun menjadi Rp5.906 atau menurun 0,01% dibandingkan Laba per Saham tahun sebelumnya sebesar Rp5.949 per lembar saham.

Income (Loss) for the Year

The Corporation's Income for the Year as of December 31, 2022 was recorded at Rp104.968 million, an decrease by Rp566 million or 0.01% compared to the previous year of Rp 105,553 million. This decrease was due to a decrease in other income and in deferred tax expense.

Total Comprehensive Income (Loss) for the Year

Total Comprehensive Income for the Year recorded by the Corporation as of December 31, 2022 was recorded at Rp97,223 million, a decrease by Rp8,476 million or 0.08% compared to the previous year of Rp105,699 million. This decrease was due to a decrease in other income and an increase in deferred tax expense.

Earnings (Loss) per Share

In line with the increase in the Corporation's Income for the Year, the Corporation's Earnings per Share in 2022 also decreased to Rp5,906 or a decreased by 0.01% compared to the previous year's Earnings per Share of Rp5,949 per share.



Laba (Rugi) Per Saham Earnings (Loss) per Share

dalam jutaan Rupiah (in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	2020	Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)	
				Rp	%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Income (Loss) of the Year	104.968	105.533	(69.094)	(761)	(0,72)
Jumlah Saham yang Beredar (Lembar) Number of Outstanding Shares (Share)	17.772.643	17.772.643	16.339.169	-	-
Laba (Rugi) Per Saham Dasar (Rp/Lembar) Earnings (Loss) per Basic Share (Rp/Share)	5.906	5.949	(4.229)	(43)	(0,01)

Informasi Tentang Laba (Rugi) Tahun Berjalan dan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk dan Kepentingan Non-Pengendali

Perseroan telah membentuk entitas anak, yakni PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek, PT Integrasi Transit Jakarta, dan PT Jakarta Lingko Indonesia. Total laba yang distribusikan kepentingan non pengendali adalah sebesar Rp58 juta.

Information on the Income (Loss) of the Year and Total Comprehensive Income (Loss) of the Year Attributable to Owners of the Holding Entity and Non-Controlling Interests

The Corporation has established subsidiaries: PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek, PT Integrasi Transit Jakarta, and PT Jakarta Lingko Indonesia. The total income attributable to non controlling interests were Rp58 million.

LAPORAN ARUS KAS

Jumlah Kas dan Setara Kas MRT Jakarta pada akhir tahun 2022 tercatat sebesar Rp1.698.913 juta, meningkat Rp345.081 juta atau 25,5% dibandingkan posisi awal tahun sebesar Rp1.353.832 juta. Peningkatan Kas dan Setara Kas tersebut disebabkan kenaikan penerimaan kas dari subsidi.

CASH FLOW STATEMENTS

Total Cash and Cash Equivalent of MRT Jakarta at the end of 2022 was recorded at Rp1,698,913 million, an increase by Rp345,081 million or 25.5% compared to the position at the beginning of the year of Rp1,353,832 million. The increase in Cash and Cash Equivalent was due to an increase in cash received from subsidy.

Arus Kas Cash Flow

dalam jutaan Rupiah (in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	2020	Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)	
				Rp	%
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	633.502	280.773	360.868	352.729	125,6
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investing Activities	(88.503)	(72.276)	(98.934)	16.227	(22,5)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	(64.414)	(79.392)	500	(14.978)	(18,9)
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Net Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalent	480.585	129.105	248.182	351.480	272,2
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalent at the Beginning of the Year	1.353.832	1.224.727	976.545	129.105	10,5
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalent at the End of the Year	1.834.417	1.353.832	1.224.727	480.585	35,5

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih yang diperoleh dari/digunakan untuk aktivitas operasi tahun 2022 tercatat sebesar Rp633.502 juta. Jumlah tersebut meningkat 125.6% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp280.773 juta. Peningkatan tersebut disebabkan kenaikan penerimaan kas dari pembayaran subsidi.

Cash Flow from Operating Activities

Net cash flow provided by/used in operating activities in 2022 was recorded at Rp633,502 million. This amount increased by 125,6% compared to the previous year of Rp280,773 million. The increase was due to an increase in cash received from the payment of subsidy.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Cash Flow from Operating Activities

dalam jutaan Rupiah (in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	2020	Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)	
				Rp	%
Penerimaan dari Pelanggan Receipts from Customers	490.316	411.729	419.384	78.587	19,1
Penerimaan dari Subsidi Receipts from Subsidy	953.537	529.591	641.762	423.946	80,1
Penerimaan Penghasilan Bunga Receipts from Interest Income	33.627	32.531	39.338	1.096	3,4
Pembayaran kepada Pemasok Payment to Vendors	(560.807)	(465.737)	(530.910)	95.370	20,5
Pembayaran kepada Komisaris, Direksi, dan Karyawan Payment to Commissioners, Directors, and Employees	(282.471)	(227.625)	(208.706)	54.846	24,1
Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Payment of Bank Loan Interest	(700)	(16)	-	684	4.275
Kas Bersih yang Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Operasi Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities	633.502	280.773	360.868	352.729	125,6

Arus kas masuk diperoleh dari Penerimaan dari Pelanggan sebesar Rp490.316 juta, Penerimaan dari Subsidi sebesar Rp953.537 juta dan Penerimaan Penghasilan Bunga sebesar Rp33.627 juta. Sedangkan arus kas keluar digunakan untuk Pembayaran kepada Pemasok sebesar Rp560.807 juta, Pembayaran kepada Komisaris, Direksi, dan Karyawan sebesar Rp282.471 juta dan Pembayaran Bunga Pinjaman Bank sebesar Rp700 juta.

Cash inflows were provided by receipts from customers of Rp490,316 million, receipts from subsidy of Rp953,537 million and receipts from interest income of Rp33,627 million. Meanwhile, cash outflows were used in Payment to Vendors of Rp560,807 million, Payment to Commissioners, Directors and Employees of Rp282,471 million and payment of Bank Loan Interest of Rp700 million.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas bersih yang diperoleh dari/digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2022 tercatat sebesar Rp88.503 juta. Jumlah tersebut turun 22,5% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp72.276 juta. Kenaikan tersebut disebabkan penambahan investasi ke Perusahaan Ventura.

Cash Flow from Investing Activities

Net cash flow provided by/used in investing activities in 2022 was recorded at Rp88,503 million. This amount decreased by 22.5% compared to the previous year of Rp 72,276 million. The increase was due to addition in investment to Joint Venture.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Cash Flow from Investing Activities

dalam jutaan Rupiah (in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	2020	Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)	
				Rp	%
Investasi Entitas Anak Subsidiary Investment	(5.100)	(1.000)	(40.800)	(4.100)	410,0
Penambahan Aset Tetap Additions to Fixed Assets	(45.575)	(66.033)	(56.346)	(20.458)	(31)
Penambahan Aset Tak Berwujud Additions to Intangible Assets	(37.828)	(5.243)	(1.788)	32.585	621,5
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used in Investing Activities	(88.503)	(72.276)	(98.934)	16.227	22,5



Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas bersih yang diperoleh dari/digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun 2022 tercatat sebesar Rp64.414 Juta. Jumlah tersebut menurun 18,9% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp79.392 juta. Penurunan disebabkan penambahan penarikan pinjaman bank.

Cash Flow from Investing Activities

Net cash flow provided by/used in financing activities in 2022 was recorded at Rp64,414 million. This amount decreased by 18.9% compared to the previous year of Rp79,392 million. The decrease was due to addition to proceed of bank loan.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investing Activities

dalam jutaan Rupiah (in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	2020	Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)	
				Rp	%
Penarikan Pinjaman Bank Bank Loan Withdrawal	28.886	5.300	-	23.586	445,02
Penambahan Dana dibatasi Penggunaannya Additions to Restricted Fund	(84.105)	(56.862)	-	27.243	47,91
Pembayaran Liabilitas Sewa Payment of Lease Liabilities	(9.195)	(27.830)	(14.252)	(18.635)	(66,96)
Penerbitan Saham di Anak Perusahaan Issuance of Capital Stock in Subsidiary	-	-	500	-	-
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash Used in Financing Activities	(64.414)	(79.392)	(13.752)	-	(18,87)

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya dapat diukur dengan menggunakan keuangan yang relevan. Dalam hal ini, Perseroan menggunakan Rasio Solvabilitas dan Rasio Likuiditas. Rasio Solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan Perseroan membayar seluruh utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio Likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam membayar utang jangka pendek.

Rasio Likuiditas

Kemampuan Perseroan untuk membayar Utang Jangka Pendek diukur berdasarkan Rasio Likuiditas, yang dilihat dari Rasio Lancar, Rasio Kas dan Rasio Cepat.

1. Rasio Lancar dihitung sebagai Aset Lancar berbanding dengan Liabilitas Jangka Pendek;
2. Rasio Kas dihitung sebagai Kas dan Setara Kas berbanding Liabilitas Jangka Pendek;
3. Rasio Cepat dihitung sebagai Aset Lancar dikurang Persediaan, dibanding Liabilitas Jangka Pendek.

SOLVENCY

The Corporation's ability to meet its obligation can be measured using the relevant financial ratio. In this case, the Corporation uses the Solvency Ratio and Liquidity Ratio. Solvency Ratio is a ratio that measures the ability of the Corporation to pay all of its debt, including short-term and long-term debts. Liquidity Ratio is a ratio to measure the ability of the Corporation to pay its short-term debt.

Liquidity Ratio

The Corporation's ability to meet its Current Liabilities is reflected by the Liquidity Ratio, which is represented by the Current Ratio, Cash Ratio, and Quick Ratio.

1. The Current Ratio is calculated as the Current Asset divided by Short-Term Liabilities;
2. The Cash Ratio is calculated as Cash and Cash Equivalent to Short-Term Liabilities;
3. The Quick Ratio is calculated as Current Asset minus Inventory, divided by Short-Term Liabilities.

Rasio Likuiditas Liquidity Ratio

dalam jutaan Rupiah (in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	2020	Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)	
				Rp	%
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent	1.834.417	1.353.832	1.224.727	480.585	35,50
Persediaan Inventories	29.454	14.181	13.364	15.273	107,70
Aset Lancar Current Assets	2.668.144	1.879.099	1.490.592	789.045	41,99
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	534.352	512.482	838.291	21.869	4,27
Rasio Lancar (Kali) Current Ratio (Times)	4,99	3,67	1,78	1,33	36,18
Rasio Kas (Kali) Cash Ratio (Times)	3,43	2,64	1,46	0,79	29,95
Rasio Cepat (Kali) Quick Ratio (Times)	4,94	3,64	1,76	1,30	35,70

Secara umum Rasio Likuiditas memperlihatkan peningkatan, sehingga hal ini menunjukkan ketersediaan kas Perseroan dalam membayar utang.

1. Rasio Lancar tahun 2022 adalah 4,99 kali, meningkat dari tahun sebelumnya 1,33 kali;
2. Rasio Kas tahun 2022 adalah 3,43 kali, meningkat dari tahun sebelumnya 0,79 kali;
3. Rasio Cepat tahun 2022 adalah 4,94 kali, meningkat dari tahun sebelumnya 1,30 kali.

In general, the Liquidity Ratio showed increases, reflecting the Corporation's cash availability to pay debts.

1. Current Ratio in 2022 was 4.99 times, an increase from 1.33 times in the previous year;
2. Cash Ratio in 2022 was 3.43 times, an increase from 0.79 times in the previous year;
3. Quick Ratio in 2022 was 4.94 times, an increase from 1.30 times in the previous year.

Rasio Solvabilitas

Kemampuan Perseroan dalam membayar Utang Jangka Panjang maupun Jangka Pendek diukur dengan Rasio Solvabilitas, yang terdiri dari Rasio Utang terhadap Modal atau Ekuitas, atau *Debt to Equity Ratio* (DER), baik Utang Jangka Pendek maupun Utang Jangka Panjang, maupun Rasio Utang terhadap Aset, atau *Debt to Asset Ratio* (DAR).

1. *Debt to Equity Ratio* dihitung sebagai Total Liabilitas dibanding Ekuitas Neto;
2. *Debt to Asset Ratio* dihitung sebagai Total Liabilitas dibanding Total Aset.

Solvency Ratio

The Corporation's ability to meet its Non-Current Liabilities and Current Liabilities is measured by the Solvency Ratio, which consists of the Debt to Equity Ratio (DER), both Short Term Debt and Long Term Debt, as well as the Debt to Assets Ratio (DAR).

1. Debt-to-Equity Ratio is calculated as Total Liabilities divided by Net Equity;
2. Debt-to-Asset Ratio is calculated as Total Liabilities divided by Total Assets.

Secara umum dari Rasio Solvabilitas diketahui bahwa Perseroan memiliki kemampuan dalam membayar utang dengan menggunakan aset.

1. Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Perseroan tahun 2022 sebesar 0,05 kali, tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2021;
2. Rasio Utang Jangka Pendek terhadap Ekuitas tahun 2022 sebesar 0,02 kali, tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2021;
3. Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Ekuitas Perseroan tahun 2022 sebesar 0,02 kali, tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2021;
4. Rasio Utang terhadap Aset Perseroan tahun 2022 sebesar 0,05 kali, tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2021.

In general, based on the Solvency Ratio, the Corporation is able to meet its liabilities using its assets.

1. The Corporation's Liabilities to Equity Ratio in 2022 was 0.05 times, there was no change compared to 2021;
2. Current Liabilities to Equity ratio in 2022 was 0,02 times, there was no change compared to 2021;
3. The Corporation's Non-Current Liabilities to Equity in 2022 was 0,02 times, there was no change compared to 2021;
4. The Corporation's Debt to Asset Ratio in 2022 was 0.05 times, there was no change compared to 2021.



Rasio Solvabilitas Solvency Ratio

dalam jutaan Rupiah, kecuali disebut khusus (in Million Rp, unless stated otherwise)

Uraian Description	2022	2021	2020	Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)	
				Rp	%
Jumlah Aset Total Assets	22.880.678	19.868.878	18.397.154	3.011.801	15,2
Jumlah Utang Jangka Pendek Total Current Liabilities	534.352	512.482	838.291	21.869	4,3
Jumlah Utang Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	496.581	273.370	198.958	223.212	81,7
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.030.933	785.852	1.037.249	245.081	31,2
Ekuitas Net Net Equity	21.849.745	19.083.026	17.359.905	2.766.720	14,5
Rasio Solvabilitas (Kali) Solvency Ratio (Times)	22,19	25,28	17,74	(3,089)	(12,2)
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas (Kali) Debt to Equity Ratio (Times)	0,05	0,04	0,06	0,006	14,6
Rasio Utang Jangka Pendek Terhadap Ekuitas (Kali) Current Liability to Equity Ratio (Times)	0,02	0,03	0,05	(0,002)	(8,9)
Rasio Utang Jangka Panjang Terhadap Ekuitas (Kali) Non-Current Liability to Equity Ratio (Times)	0,02	0,01	0,01	0,008	58,7
Rasio Utang Terhadap Aset (Kali) Debt to Asset Ratio (Times)	0,05	0,04	0,06	0,006	13,9

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dapat memberikan piutang kepada pelanggan dan pihak lainnya. Pada akhir tahun 2022, jumlah piutang usaha Perseroan mencapai sebesar Rp409.615 juta. Atas piutang tersebut, Perseroan melakukan peninjauan terhadap kolektibilitas piutang secara berkala.

Kemampuan Perseroan dalam mengumpulkan piutang dapat diketahui dengan menghitung Lama Penagihan Rata-rata atau *Collection Period* serta Rasio Perputaran Piutang. Semakin kecil nilai *Collection Period* menunjukkan kemampuan Perseroan dalam mengumpulkan piutang semakin cepat.

1. Lama Penagihan Rata-rata dihitung sebagai Piutang Usaha dibanding Pendapatan Usaha dikalikan 365 hari;
2. Rasio Perputaran Piutang dihitung sebagai Piutang Usaha dibanding Pendapatan Usaha.

Accounts Receivable Collectibility

In carrying out its business activities, the Corporation may give receivables to customers and other parties. At the end of 2022, the Company's accounts receivable amounted to Rp409,615 million. For these accounts receivable, the Corporation periodically reviews the collectibility of receivables.

The Corporation's ability to collect receivable can be determined by calculating the Average Collection Period and Receivable Turnover Ratio. The smaller value of the Collection Period shows the Corporation's ability in collecting receivable faster.

1. The Average Collection Period is calculated as Account Receivables divided by Operating Revenue times 365 days;
2. The Receivables Turnover Ratio is calculated as Account Receivables divided by Operating Revenue.

Piutang Usaha Perseroan Corporate Trade Receivables

dalam jutaan Rupiah, kecuali disebut khusus (in Million Rp, unless stated otherwise)

Uraian Description	2022	2021	2020	Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)	
				Rp	%
Piutang Usaha Pihak Berelasi Trade Receivables of Related Parties	126.773	37.811	2	88.962	70,17
Piutang Usaha Pihak Ketiga Trade Receivables of Third Parties	355.460	27.328	146.558	328.132	92,31
Cadangan Penurunan Nilai Allowance for Impairment	(72.618)	(433)	(433)	(72.185)	99,40
Jumlah Piutang Usaha Total Total Trade Receivables	409.615	64.706	146.127	344.909	84,20

Rasio Tingkat Kolektibilitas Piutang

Lama Penagihan Rata-rata tahun 2022 mencapai 100.52 hari, bertambah 485,11% dari tahun 2021 selama 17,42 hari, hal tersebut juga membuat Rasio Perputaran Piutang tahun 2022 meningkat menjadi 3,6 kali, atau naik 82,91% dari tahun 2021 sebesar 0,05 kali. Hal ini menunjukkan proses penagihan piutang Perseroan kepada vendor yang memerlukan waktu lebih lama.

Receivable Collectability Rate Ratio

The average billing period in 2022 reached 100,52 days, an increase by 485.11% from 2021 of 17.42 days. This also made the Receivable Turnover Ratio in 2022 increased to 3.6 times, or an increase by 82.91% from 2021 by 0.05 times. This shows that the collection processes of the Corporate receivables to vendors take much longer to be collected.

Rasio Tingkat Kolektibilitas Piutang Receivable Collectability Rate Ratio

dalam jutaan Rupiah, kecuali disebut khusus (in Million Rp, unless stated otherwise)

Uraian Description	2022	2021	2020	Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)	
				Rp	%
Piutang Usaha Trade Receivables	409.615	64.706	146.127	344.909	533,04
Pendapatan Operating Revenue	1.466.986	1.355.917	1.085.498	111.069	8,19
Lama Penagihan Rata-rata (Hari) Average Collectible Period (Days)	100,52	17,42	49,14	83,34	485,11
Rasio Perputaran Piutang (Kali) Receivable Turnover Ratio (Times)	3,58	0,05	0,13	17,37	82,91

STRUKTUR MODAL

Struktur modal Perseroan terdiri dari utang dan ekuitas. Per 31 Desember 2022, ekuitas memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap struktur modal yaitu sebesar 91,89%. Tahun 2022, porsi ekuitas mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

CAPITAL STRUCTURE

The Capital Structure of the Corporation consists of interest-bearing debt and equity. As of December 31, 2022, equity made a very large contribution to the capital structure by 91.89%. In 2022, the equity portion increased compared to the previous year.

Struktur Modal Perseroan Capital Structure of the Corporation

dalam jutaan Rupiah (in million Rupiah)

Uraian Description	2022		2021	2020	Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Rp	Kontribusi Contribution (%)	Rp	Rp	Rp	%
Liabilitas Liabilities						
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	534.352	2,34	512.482	838.291	21.869	0,04
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	496.581	2,17	273.370	198.958	223.212	0,82
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.030.933	4,51	785.852	1.037.249	245.081	0,31
Ekuitas Equity						
Ekuitas Equity	21.849.745	95,49	19.083.026	17.359.905	2.766.721	0,14
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	22.880.678	100,00	19.868.878	18.397.154	3.011.802	0,15



Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal Perseroan

Struktur modal yang optimal mendukung biaya modal yang rendah, memaksimalkan nilai pemegang saham sehingga dapat mempertahankan kelangsungan usaha. Perseroan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan:

- Efisiensi penggunaan modal berdasarkan Arus Kas yang digunakan untuk kegiatan operasi;
- Pengeluaran modal dan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Tahun 2022, Perseroan merealisasikan *Capital Expenditure* yakni investasi barang modal sebesar Rp112.781 juta terhadap barang/jasa dan properti investasi sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku yang utamanya ditujukan untuk mendukung peningkatan operasional dan perawatan MRT Jakarta, dalam rangka mencapai keunggulan pelayanan. Sumber dana untuk ikatan material diperoleh melalui pendanaan internal Perseroan, dengan mata uang yang menjadi denominasi adalah IDR.

INVESTASI BARANG MODAL YANG DIREALISASIKAN PADA TAHUN BUKU

Tahun 2022, Perseroan merealisasikan investasi barang modal sebesar Rp112.781 juta berupa aset tetap dan properti investasi yang utamanya ditujukan untuk mendukung operasional Perseroan.

Management Policy on the Corporation's Capital Structure

Optimal capital structure supports low capital cost, maximize shareholders' value so as to maintain business continuity. The Corporation actively and regularly reviews and manages its capital to ensure optimal capital structure and returns for shareholders, by taking into account:

- The Efficiency of capital usage based on Cash Flow used for operating activities;
- Capital expenditures and future capital requirements.

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL EXPENDITURE

In 2022, the Corporation realized its Capital Expenditure, namely investment in capital goods of Rp112,781 million for investment in goods/services and properties in accordance with applicable accounting guidelines which are primarily intended to support the improvement of MRT Jakarta operations and maintenance, in order to achieve service excellence. The source of funds for the material commitments is obtained through the Corporation's internal funding, with the denominated currency in IDR.

REALIZATION OF CAPITAL EXPENDITURE IN THE BOOK YEAR

In 2022, the Corporation realized investment in capital goods amounting to Rp112,781 million in the form of fixed assets and investment property which are primarily intended to support the Corporation's operations.

Investasi Barang Modal yang Direalisasikan Realized Capital Goods Investment

Bentuk Investasi Barang Modal Capital Expenditure	Nilai Investasi (Rp Juta) Investment Value (Rp Million)
Taman Literasi Martha Christina Tiahahu Martha Christina Tiahahu Literacy Park	35.756
General Kontraktor Modifikasi Stasiun Pedestrian General Contractor of Pedestrian Station Modification	15.433
Kajian TOD MRTJ MRTJ TOD Study	9.034
Studi Kelayakan Pengembangan Jalur MRTJ Fase 4 Feasibility Study for Phase 4 MRTJ Line Development	7.406
Kajian Strategi & Roadmap MRT Future Network MRT Future Network Strategy & Roadmap Study	6.841
Konsultan MK Transport Hub dan Fasilitas KBT DKA Consultant for MK Transport Hub and TOD DKA Facilities	3.589
Basic Engineering Desain MRT Training Center Basic Engineering Design of MRT Training Center	3.018
FS & Market Entry Study Bisnis FS & Market Entry Business Study	1.884
Penyusunan Business Case Mitra Pengembang Fase 2B Preparation of Phase 2B Development Partner Business Case	1.808
ERP Addendum Fase I ERP Addendum Phase I	1.716
Jasa Konsultansi Feasibility Study Pedestrian Deck Consultancy Services for Pedestrian Deck Feasibility Study	1.616

Investasi Barang Modal yang Direalisasikan
Realized Capital Goods Investment

Bentuk Investasi Barang Modal Capital Expenditure	Nilai Investasi (Rp Juta) Investment Value (Rp Million)
Peralatan Tunnel Monitoring Tahap 2 Tunnel Monitoring Stage 2 Equipment	1.500
Tunnel Monitoring Tahap 3 Tunnel Monitoring Stage 3	1.439
Fan Block Fan Block	1.349
Kendaraan Operasional Operational Vehicles	1.348
Retribusi IMB Gedung Transport Hub Building Permit Retribution for Transport Hub Building	1.250
Railway Protection Zone Guidelines Railway Protection Zone Guidelines	1.185
Kajian MRTJ Accel & Incubator MRTJ Accel & Incubator Study	1.064
Addendum DED Gedung Kantor/Transport Hub Addendum to DED of Office/Transport Hub Building	976
Toolset Capex TCSM Toolset Capex TCSM	964
Proteksi Petir Lightning Protection	810
Enhancement MMS System (MRO) MMS System (MRO) Enhancement	779
Kajian Transformasi Digital Digital Transformation Study	728
MT Box Set with YY-7 Railbond MT Box Set with YY-7 Railbond	630
Studi Hidrologi & Kebencanaan Hydrology & Disaster Studies	621
Perangkat Visitor Management System Visitor Management System Tool	490
Lisensi Electrical Transient Analysis Program Electrical Transient Analysis Program License	442
Battery UPS 5000CF-T4/100 Vision 12V 200Ah St. FTM Battery UPS 5000CF-T4/100 Vision 12V 200Ah St. FTM	414
Kabel Bounding (Rail Bound) D Bounding Cable (Rail Bound) D	405
Peningkatan Fungsi Keandalan Crane Improved Crane Reliability Function	381
Tata Kelola IT Berbasis COBIT COBIT-Based IT Governance	378
Project Proposal Rail Roughness Project Proposal Rail Roughness	375
Tablet Device Preventive & Corrective Railway Main Tablet Device Preventive & Corrective Railway Main	356
Handy Talky Tetra Hytera Handy Talky Tetra Hytera	355
Laptop Microsoft Surface Laptop 4 Laptop Microsoft Surface Laptop 4	332
Fasilitas Pelatihan Teknis Simple Catenary System Simple Catenary System Technical Training Facility	324
Pengembangan Digitalisasi SHE SHE Digitalization Development	291
Modifikasi Channel Letter Lebak Bulus Grab Modification of the Lebak Bulus Grab Channel Letter	261
Insulated Tower for Overhead Contact System Insulated Tower for Overhead Contact System	249
Fasilitas Penunjang Ruang Pengawasan Workshop Supporting Facilities of Workshop Supervision Room	222
Lain - Lain Others	4.760



Nilai Investasi Barang Modal Perseroan
Investment Value of the Corporation's Capital Goods

Uraian Description	2022	2021	2020	Persentase Kenaikan (Penurunan) 2022:2021 Percentage of Increase (Decrease) 2022:2021	
Realisasi Investasi Barang Modal Realization of Capital Goods Investment	112.781	74.732	41.432	38.049	50.91%

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan keputusan Pemegang Saham tanggal 7 Desember 2022, para pemegang saham telah menyetujui dan mengesahkan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan dari sebelumnya Rp17.772.643 juta menjadi Rp19.390.063 juta. Perubahan tersebut telah disetujui kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Mass Rapid Transit Jakarta Persero No AHU-AH.01.03-0001351 tanggal 4 Januari 2023.
- Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham sirkuler tanggal 13 Maret 2023, para pemegang saham telah menyetujui pengangkatan Sdri. Weni Maulina sebagai Direktur Konstruksi menggantikan Sdri. Silvia Halim dan pengangkatan Sdr. Novie Riyanto R sebagai Komisaris.

MATERIAL INFORMATION AND FACTS OCCURRING AFTER THE REPORTING DATE

Material information and facts that occurred after the reporting date is as follows:

- Based on the resolution of the Shareholders dated December 7, 2022, the shareholders have approved and ratified the increase in the Company's paid-up and issued capital from previously Rp17,772,643 million to Rp19,390,063 million. The amendment has been approved to the Ministry of Law and Human Rights through the letter of Acceptance of Notification of Amendment to the Articles of Association of PT Mass Rapid Transit Jakarta Persero No AHU-AH.01.03-0001351 dated January 4, 2023.
- Based on the circular resolution of the Shareholders outside the General Meeting of Shareholders dated March 13, 2023, the shareholders have approved the appointment of Ms. Weni Maulina as Construction Director replacing Ms. Silvia Halim and also appointment of Mr. Novie Riyanto R as Commissioner.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI

COMPARISON OF TARGET DAN REALIZATION

Perbandingan Target dan Realisasi
Comparison of Target and Realization

Dalam jutaan Rupiah, kecuali disebut khusus (in Million Rp, unless stated otherwise)

Uraian Description	2022			2021	
	Realisasi Realization	Target Target	Realisasi terhadap Target Target Realization	Realisasi Realization	Target Target
	Rp	Rp	%	Rp	%
Operasi Operation					
Rata-rata Jumlah Pengguna Jasa per Hari Average Daily Passengers	54.181	50.000	108	19.972	18.099
Pendapatan Revenue					
Pendapatan Tiket Farebox Revenue	155.615	145.019	107,31	60.371	54.742
Pendapatan Subsidi dan Pemprov DKI Jakarta Subsidy Revenue from the Government of DKI Jakarta Province	808.200	831.847	97,16	821.978	900.520
Pendapatan Non-Tiket Non-Farebox Revenue	503.171	473.030	106,37	473.568	386.240
Jumlah Pendapatan Total Revenue	1.466.986	1.449.895	101,18		
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(1.045.193)	(1.060.001)	(1,40)	(989.996)	(1.037.873)
Laba (Rugi) Kotor Gross Profit (Loss)	421.793	389.895	8,18	365.921	303.628
Total Beban Umum dan Administrasi Total Total General and Administrative Expenses	(279.202)	(240.093)	16,29	(218.351)	(213.353)
Laba (Rugi) Usaha Operating Income (Loss)	142.591	140.233	1,68	147.570	90.276

Perbandingan Target dan Realisasi Comparison of Target and Realization

Dalam jutaan Rupiah, kecuali disebut khusus (in Million Rp, unless stated otherwise)

Uraian Description	2022			2021	
	Realisasi Realization	Target Target	Realisasi terhadap Target Target Realization	Realisasi Realization	Target Target
	Rp	Rp	%	Rp	%
Penghasilan (Beban) Lain-lain Other Income (Expense)	43.895	(43.656)	100,55	35.470	(39.042)
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Comprehensive Income (Loss)	186.486	20.984	789	183.040	19.582

Kendati masih terdapat beberapa indikator kinerja yang pencapaiannya masih berada di bawah target, namun kinerja MRT Jakarta tahun 2022 secara umum berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam RKAP tahun 2022.

Pendapatan tiket yang dibukukan Perseroan tahun 2022 adalah sebesar Rp155,61 miliar yang setara dengan 107,31% dari target RKAP 2022 sebesar Rp145,02 miliar. Demikian juga dengan pendapatan non-tiket yang terealisasi sebesar Rp503,17 miliar atau setara dengan 106,37% dari target RKAP. Perseroan juga dapat beroperasi dengan lebih efisien yang ditunjukkan dari beban pokok pendapatan yang berada di bawah target dengan pencapaian sebesar 1,40% dari target RKAP.

Dengan pencapaian tersebut, tahun 2022 Perseroan berhasil membukukan laba usaha sebesar Rp150,85 miliar, 2,48% lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar Rp140,23 miliar.

Even though there are several performance indications with achievements below the set target, in 2022 MRT Jakarta has generally succeeded in achieving the targets set in the 2022 RKAP.

The farebox revenue recorded by the Corporation in 2022 was Rp155.61 billion which is equivalent to 107.31% of the 2022 RKAP target of Rp145.02 billion. Likewise, non-farebox revenue was realized at Rp503.17 billion or equivalent to 106.37% of the RKAP target. The Corporation can also operate more efficiently as shown by the cost of revenue which is below the target by achieving 1.40% of the RKAP target.

With this accomplishment, in 2022 the Corporation managed to record an operating profit of Rp150.85 billion, 2.48% higher than the target set at Rp140.23 billion.

PROYEKSI SATU TAHUN KE DEPAN

Memasuki tahun 2023, MRT Jakarta telah menetapkan sejumlah target kinerja yang disusun dengan mempertimbangkan sejumlah asumsi, baik dari kondisi internal maupun eksternal Perseroan. Adapun beberapa target MRT Jakarta tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NEXT YEAR'S PROJECTION

Entering 2023, MRT Jakarta has set several performance targets which have been prepared by considering several assumptions, both from the Corporation's internal and external conditions. Several targets of MRT Jakarta for 2023 are as follows:

Target MRT Jakarta Tahun 2023 Targets of MRT Jakarta for 2023

Uraian Description	Realisasi 2022 Realization 2022	Target 2023 Target 2023	Target Pertumbuhan Growth Target
	Rp	Rp	%
Operasi Operation			
Rata-rata Jumlah Pengguna Jasa per Hari Average Daily Ridership	54.181	70.000	29,20
Pendapatan Revenue			
Pendapatan Tiket Farebox Revenue	155.615	204.400	31,37
Pendapatan Subsidi dan Pemprov DKI Jakarta Subsidy Revenue from the Government of DKI Jakarta Province	808.200	966.400	16,69
Pendapatan Non-Tiket Non-Farebox Revenue	503.171	483.000	1,90
Jumlah Pendapatan Total Revenue	1.466.986	1.653.800	13,44
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(1.045.193)	(1.226.110)	15,4
Laba (Rugi) Kotor Gross Profit (Loss)	421.793	427.689	(4,8)



Target MRT Jakarta Tahun 2023 Targets of MRT Jakarta for 2023

Uraian Description	Realisasi 2022 Realization 2022	Target 2023 Target 2023	Target Pertumbuhan Growth Target
	Rp	Rp	%
Total Beban Umum dan Administrasi Total Total General and administrative Expenses	(279.202)	(284.063)	(201,6)
Laba (Rugi) Usaha Operating Income (Loss)	142.591	143.626	(50,0)
Penghasilan (Beban) Lain-lain Other Income (Expense)	43.895	(19.626)	31,4
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Comprehensive Income (Loss)	97.223	46.344	16,7

ASPEK PEMASARAN DAN PANGSA PASAR

Seiring dengan semakin meredanya pandemi COVID-19 dan diturunkannya level PPKM di Jakarta, MRT Jakarta secara gencar mendorong masyarakat untuk memanfaatkan transportasi publik, khususnya layanan MRT Jakarta, untuk memenuhi kebutuhan transportasinya. Upaya tersebut dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari peningkatan standar layanan, menambah waktu operasional, berkolaborasi dengan penyedia layanan transportasi publik lainnya, hingga melakukan komunikasi yang gencar, khususnya di media sosial.

Selain itu, untuk meningkatkan jumlah pengguna jasa, di tahun 2022 MRT Jakarta menerapkan sistem tarif terintegrasi bersama untuk MRT Jakarta, LRT, dan Transjakarta. Dengan tarif terintegrasi ini, pengguna jasa dapat menikmati tarif yang lebih efisien dalam memanfaatkan sarana transportasi publik yang berada dalam pengelolaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Refrensi atas data tersebut disampaikan.

MARKETING ASPECT AND MARKET SHARE

As the COVID-19 pandemic continued to subside and the PPKM level in Jakarta was lowered, MRT Jakarta intensively encouraged the public to take advantage of public transportation, especially MRT Jakarta services, to meet their transportation needs. These efforts were carried out in various ways, starting from improving service standards, increasing operational time, collaborating with other public transportation service providers, to carrying out vigorous communication, especially on social media.

In addition, to increase the number of passengers in 2022 MRT Jakarta implemented a joint integrated fare system for MRT Jakarta, LRT and Transjakarta. With this integrated tariff, passengers can enjoy more efficient tariffs in utilizing public transportation facilities that are under the management of the Provincial Government of DKI Jakarta. References to the data are submitted.

Jumlah dan Persentase Pengguna Jasa MRT Jakarta dan Transportasi Publik Lain Tahun 2022 Total and Percentage of MRT Jakarta Ridership and Other Public Transportation in 2022

Moda Transportasi Publik Public Transportation Mode	Jumlah Penumpang per Hari Total Ridership per Day	Jumlah Penumpang Total Ridership	Persentase (%) Percentage (%)
TransJakarta	526.027	192 juta million	44,91
KRL Commuterline	589.178	215,05 juta million	50,30
MRT	54.181	19.776.064	4,63
LRT	1.877	687.237	0,16
Jumlah Total	1.171.269	427.513.301	100

Selain itu, sepanjang tahun 2022 Perseroan juga berupaya untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan non-tiket dengan menerapkan strategi pemasaran melalui berbagai saluran untuk mempromosikan bisnis pendapatan non-tiket, antara lain melalui:

1. Melalui mitra strategis periklanan;
2. Penawaran langsung kepada calon mitra;
3. Pelaksanaan *TOD Fair*;
4. Pelaksanaan *Mitra Gathering*; dan
5. Promosi melalui kanal *Social Media*, *Mobile Apps* dan *Website* MRT Jakarta dan Mitra.

Throughout 2022 the Corporation also sought to optimize the gain of non-farebox revenue by implementing marketing strategies through various channels to promote the non-farebox revenue business, including through:

1. Strategic partners in advertising;
2. Direct offers to potential partners;
3. Implementation of *TOD Fair*;
4. Implementation of *Partners Gathering*; and
5. Promotion through *Social Media* channels, *Mobile Apps* and the websites of Jakarta MRT and Partners.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan berkomitmen untuk memberikan nilai tambah kepada seluruh pemegang saham. Untuk itu, Perseroan berkomitmen untuk memberikan imbal hasil dalam bentuk dividen kepada pemegang saham tatkala Perseroan membukukan laba. Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa. Sebelum tahun buku keuangan berakhir, dividen interim dapat dibagikan sepanjang diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen interim ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Kebijakan pembagian dividen Perseroan mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 20 tentang Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen, yang menyatakan:

1. Laba Bersih Perusahaan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca, dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut;
2. Dalam hal RUPS tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen;
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi belum sama sekali tertutup;
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak perseroan;
5. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kronologis Pembagian Dividen

RUPS Tahunan Tahun 2022 yang diselenggarakan pada 30 Maret 2022 memutuskan untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham. Laba bersih Perseroan ditetapkan sebagai saldo laba untuk memperkuat permodalan dan mendukung operasional Perseroan. Dengan demikian, tidak ada informasi tentang pembagian dividen tunai kepada pemegang saham selama dua tahun buku terakhir mengenai persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih, tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non-kas, jumlah dividen per saham (kas dan/atau non-kas), serta jumlah dividen per tahun yang dibayar.

DIVIDEND POLICY

The Corporation is committed to providing added value to all shareholders. For this reason, the Corporation is committed to providing returns in the form of dividends to shareholders when the Corporation records profits. In accordance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the distribution of dividends is carried out according to the decisions of the Annual GMS or Extraordinary GMS. Before the end of the financial year, interim dividends can be distributed as long as it is permitted by the Company's Articles of Association. Interim dividend distribution is determined by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners.

The fundamental policies concerning dividend distribution of the Corporation refers to the Articles of Association of the Corporation, Article 20 concerning the Use of Profit and Dividend Distribution, that states:

1. Corporation's Net Profit in one fiscal year as stated in the balance sheet and profit and loss calculation, which has been approved by the annual GMS and is a positive profit balance, divided according to the method decided by the GMS;
2. If the GMS does not determine its appropriation, the net profit, after deducting the allowance for reserves required by the Law and Articles of Association of the Corporation, is distributed as dividends;
3. If the calculation of profit and loss in a financial year shows a loss that cannot be covered with reserve funds, then the loss will still be recorded and included in the calculation of profit and loss in the next financial year. The Corporation is considered to have no profit as long as the loss is recorded and included in the calculation of profit and loss that has not been completely covered;
4. Profit distributed as dividends that are not taken within 5 (five) years after being available for payment is put into a reserve fund specifically designated for this purpose. Dividends in the special reserve fund can be taken by the entitled shareholders before 5 (five) years have passed, by providing proof of their rights to the dividends, that can be accepted by the Board of Directors of the Corporation. The dividends that are not taken after the lapse of 10 (ten) years will become the right of the Corporation;
5. The Corporation can distribute interim dividends before the fiscal year ends following the prevailing laws and regulations.

Dividend Distribution Chronology

The 2022 Annual GMS held on March 30, 2022 decided not to distribute dividends to Shareholders. The Corporation's net profit is determined as retained earnings to strengthen capital and support the Corporation's operations. Thus, there is no information regarding the distribution of cash dividends to shareholders during the last two financial years regarding the percentage of the amount of dividends distributed to net income, the date of payment of cash dividends and/or the date of distribution of non-cash dividends, the amount of dividends per share (cash and/or non-cash), as well as the amount of annual dividends paid.



REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Hingga akhir tahun 2022, PT MRT Jakarta (Persero) tidak melakukan penawaran umum saham ke publik melalui bursa saham/bursa efek manapun. Perseroan juga tidak menerbitkan obligasi, sukuk, obligasi konversi, maupun efek lainnya. Dengan demikian, Laporan ini tidak menyertakan informasi terkait total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana, dan tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum dari hasil penawaran umum saham dan/atau dari efek lain yang diterbitkan Perseroan.

INFORMASI MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, RESTRUKTURISASI UTANG, TRANSAKSI AFILIASI, DAN TRANSAKSI MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat informasi dan fakta material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, restrukturisasi utang yang terkait dengan MRT Jakarta.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Perseroan menerapkan PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" yang mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi, dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, di mana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Berdasarkan tinjauan Direksi, transaksi dengan pihak afiliasi telah melalui prosedur yang memadai dan memenuhi prinsip transaksi yang wajar. Kewajaran dari transaksi dengan pihak afiliasi diawasi oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit.

REALIZATION OF THE USAGE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

As of the end of 2022, MRT Jakarta did not carry out public offering through any stock exchange. The Corporation did not issue any bonds, securitization (sukuk), convertible bonds, or other securities. Therefore, this Report does not disclose information on the total proceeds gained, proceed usage plans, proceed usage details, proceed balance, date of GMS approval, and changes to proceed usage obtained from public offering of shares and/or other securities issued by the Corporation.

INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION, DEBT RESTRUCTURATION, AFFILIATED TRANSACTION, AND TRANSACTION BEARING CONFLICTS OF INTEREST

Throughout 2022, there is no material information and facts regarding investment, expansion, divestment, acquisition, debt restructuring related to MRT Jakarta.

Information on Material Transactions Bearing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties

The Corporation implements PSAK 7 concerning "Related Party Disclosures, which require disclosure of relationships, transactions, and balances of related parties, including commitments, in financial statements. This transaction is carried out based on terms agreed by both parties, where such requirements may not be the same as other transactions carried out with unrelated parties. Based on the Board of Directors' review, transaction with affiliations have gone through adequate procedures and complied with fair transaction principle. The fairness of transaction with affiliations is monitored by the Board of Commissioners and the Audit Committee.

Pihak Bertransaksi, Sifat Hubungan Afiliasi, dan Alasan Dilakukan Transaksi

Name of Transacting Parties, Nature of Affiliation, Nature of Transaction, and Reasons of Transaction

Pihak yang Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Affiliation	Sifat Transaksi Nature of Transaction	Alasan Dilakukannya Transaksi Reasons of Transaction
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta The Government of DKI Jakarta Province	Pemegang Saham Utama Main Shareholder	Pendapatan subsidi, serta pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Subsidy revenue and tax on land & building payment	Keperluan Subsidi yang diatur dalam peraturan Pemerintah Provinsi Jakarta Subsidy needs as governed in the Regulation of the Government of DKI Jakarta Province
PT Bank Daerah Khusus Ibu Kota	Dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Under the control of the Government of DKI Jakarta Province	Penempatan deposito & rekening giro Placement of time deposits and current accounts	Tingkat bunga yang diperoleh dari bank pihak yang berelasi sebanding dengan tingkat bunga yang diperoleh dari bank pihak ketiga The interest rates obtained from related party banks are proportional to the interest rates obtained from third party banks
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	Dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Under the control of the Government of DKI Jakarta Province	Penyediaan layanan periklanan pada MRT Jakarta Fase 1 untuk pendapatan non-tiket Provision of advertisements in MRT Jakarta Phase 1 for non-farebox revenue	Kerja sama layanan periklanan Cooperation in advertisement service
Perumda Pembangunan Sarana Jaya	Dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Under the control of the Government of DKI Jakarta Province	Jasa konsultasi konstruksi Construction consultancy service	Kerja sama jasa konsultasi konstruksi Cooperation in construction consultancy service

Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi

Perseroan dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga transaksi dengan pihak-pihak berelasi tetap disajikan dalam maupun dengan pihak ketiga, berdasarkan peraturan yang berlaku dari setiap instansi yang melakukan perikatan. Kewajaran transaksi dan pemenuhan peraturan atas transaksi pihak berelasi telah melalui proses review dan audit oleh pihak auditor internal dan eksternal. Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah sesuai dengan PSAK No. 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan bebas dari benturan kepentingan.

Explanation on Transaction Fairness

The Corporation is controlled by the Government of DKI Jakarta Province, hence transactions with related parties are still disclosed in or with third parties, in compliance with the prevailing regulations of each institution that engaged in the commitment. Transaction fairness and compliance with the regulation concerning the transaction with related parties have been reviewed and audited by internal and external auditors. The Corporation carries out transaction with related parties following PSAK No. 7 concerning "Disclosure of Related Parties" and the transactions are free from conflicts of interest.

Saldo dan Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

Balance and Realization of Related Party Transaction

Transaksi Pihak Berelasi dalam Aset Tahun 2022 dan Perbandingan dengan Tahun 2021

Related Party Transaction on Assets in 2022 and Comparison with 2021

Uraian Description	31 Desember 2022 31 December 2022		31 Desember 2021 31 December 2021	
	Rp Juta Rp Million	Persentase dari Jumlah Aset (%) Percentage of the Total Assets (%)	Rp Juta Rp Million	Persentase dari Jumlah Aset (%) Percentage of the Total Assets (%)
Bank	14.812	0,06	4.829	0,02
Deposito Berjangka Time Deposit	1.449.471	6,33	1.024.140	5,15
Piutang Usaha Trade Receivables	-	-	36.934	0,19
Piutang Subsidi Subsidy Receivables	223.312	0,98	375.507	1,89
Piutang Bunga Interest Receivables	-	0,00	15.000	0,08
Jumlah Aset dari Pihak-pihak Berelasi Total Assets from Related Parties	1.580.487	6,91	1.493.277	7,52
Jumlah Aset Total Assets	22.880.678	100	19.868.878	100,00



Transaksi Pihak Berelasi dalam Liabilitas Tahun 2022 dan Perbandingan dengan Tahun 2021
Related Party Transaction on Liabilities in 2022 and Comparison with 2021

Uraian Description	31 Desember 2022 31 December 2022		31 Desember 2021 31 December 2021	
	Rp Juta Rp Million	Persentase dari Jumlah Liabilitas (%) Percentage of the Total Liabilities (%)	Rp Juta Rp Million	Persentase dari Jumlah Liabilitas (%) Percentage of the Total Liabilities (%)
Utang Bank Bank Payables	34.186	3,32	5.300	0,42
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.030.933	100,00	1.270.137	100,00

Transaksi Pihak Berelasi dalam Pendapatan Tahun 2022 dan Perbandingan dengan Tahun 2021
Related Party Transaction on Revenue in 2022 and Comparison with 2021

Uraian Description	31 Desember 2022 31 December 2022		31 Desember 2021 31 December 2021	
	Rp Juta Rp Million	Persentase dari Jumlah Pendapatan (%) Percentage of the Total Revenue (%)	Rp Juta Rp Million	Persentase dari Jumlah Pendapatan (%) Percentage of the Total Revenue (%)
Pendapatan Subsidi Subsidy Revenue	808.200	55,09	821.978	60,62
Pendapatan Non-Tiket Non-Farebox Revenue	41.030	2,80	65.825	4,85
Jumlah Pendapatan Total Revenue	1.466.986	100,00	1.355.917	100,00

Transaksi Pihak Berelasi dalam Beban Pokok Pendapatan Tahun 2022 dan Perbandingan dengan Tahun 2021
Related Party Transaction on Cost of Revenues in 2022 and Comparison with 2021

Uraian Description	31 Desember 2022 31 December 2022		31 Desember 2021 31 December 2021	
	Rp Juta Rp Million	Persentase dari Jumlah Aset (%) Percentage of the Total Asset (%)	Rp Juta Rp Million	Persentase dari Jumlah Beban Pokok Pendapatan (%) Percentage of the Total Cost of Revenues (%)
Pajak Bumi dan Bangunan Land & Property Tax	43.982	4,21	34.808	3,45
Jumlah Beban Pokok Pendapatan Total Cost of Revenues	1.045.193	100,00	989.996	100,00

Transaksi Pihak Berelasi dalam Penghasilan (Beban) Tahun 2022 dan Perbandingan dengan Tahun 2021
Related Party Transaction on Income (Expenses) in 2022 and Comparison with 2021

Uraian Description	31 Desember 2022 31 December 2022		31 Desember 2021 31 December 2021	
	Rp Juta Rp Million	Persentase dari Jumlah Aset (%) Percentage of the Total Asset (%)	Rp Juta Rp Million	Persentase dari Jumlah Penghasilan (Beban) (%) Percentage of the Total Income (Expenses) (%)
Penghasilan Bunga Interest Income	33.896	195,95	825	2,33
Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain Total Other Income (Expenses)	17.298	100,00	35.470	100,00

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH TERHADAP PERSEROAN

Pada tahun 2022, terdapat peraturan perundang-undangan baru yang memiliki pengaruh terhadap PT MRT Jakarta (Persero) yakni:

- Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 31 tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mengatur terkait jaringan jalur kereta api perkotaan termasuk jalur Mass Rapid Transit/MRT; dan
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 46 Tahun 2022 tentang Subsidi Layanan Angkutan Umum Transjakarta, Moda Raya Terpadu, dan Lintas Raya Terpadu. Peraturan ini mengatur mengenai pemberian subsidi kepada PT MRT Jakarta (Persero).

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pada tahun 2022, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak pada laporan keuangan Perseroan.

ASPEK PERPAJAKAN DAN KONTRIBUSI BAGI NEGARA

Jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan Perseroan tahun 2022 mencapai Rp39,62 miliar, meningkat 49% dari tahun sebelumnya Rp26,60 miliar.

AMENDMENTS TO LAWS AND REGULATIONS THAT AFFECT THE CORPORATION

In 2022, there are new laws and regulations that have an impact on PT MRT Jakarta (Persero), namely:

- DKI Jakarta Governor Regulation Number 31 of 2022 concerning Detailed Spatial Plans for the Provincial Special Capital Region of Jakarta which regulates the urban rail network, including the Mass Rapid Transit/MRT track; and
- DKI Jakarta Governor Regulation Number 46 of 2022 concerning Subsidies for Transjakarta Public Transport Services, Mass Rapid Transit, and Light Rail Transit. This regulation regulates the provision of subsidies to PT MRT Jakarta (Persero).

CHANGES TO ACCOUNTING POLICIES

In 2022, there was no change in accounting policies that had an impact on the Corporation's financial statements.

STATE TAX ASPECTS AND CONTRIBUTION

The amount of income tax paid by the Company in 2022 reached Rp39.62 billion, an increase by 49% from Rp 26.60 billion in the previous year.

Pembayaran Pajak Perseroan Tahun 2022 dan Perbandingan dengan Tahun 2021
Tax Payment by the Corporation in 2022 and Comparison with 2021

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21-26 Income Tax of Article 21-26	39.617	26.597	13.020	49
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23-26 Income Tax of Article 23-26	3.055	2.493	562	23
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 Income Tax of Article 4 paragraph 2	2.922	4.280	(1.358)	(32)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Value Added Tax (VAT)	30.570	33.087	(2.516)	(8)
Jumlah Kontribusi Pajak Total Tax Contribution	76.164	66.457	9.707	15
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21-26 Income Tax of Article 21-26	39.617	26.597	13.020	49

Pembayaran Pajak dan Retribusi yang Diatur Pemprov DKI Jakarta Tahun 2022 dan Perbandingan dengan Tahun 2021

Tax and Retribution Payment Regulated by the Government of DKI Jakarta Province in 2022 and Comparison with 2021

Pembayaran Pajak dan Retribusi Tax and Retribution Payment

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Pajak Bumi dan Bangunan Land and Tax Building	43.982	34.808	9.174	26
Pajak Kendaraan Bermotor Motor Vehicle Tax	-	-	-	-
Pajak Reklame Advertisement Tax	1.380	3.328	(1.947)	(59)
Jumlah Total	45.362	37.464	45.362	21



PROSPEK USAHA

Adanya sarana transportasi publik yang aman, nyaman dan efektif merupakan kebutuhan seluruh masyarakat. Terlebih di wilayah DKI Jakarta yang mobilisasi penduduknya terbilang sangat tinggi. MRT Jakarta berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut melalui layanan yang diberikannya. Perseroan menyadari bahwa layanan yang saat ini diberikan kepada masyarakat baru mampu memenuhi sebagian kecil dari kebutuhan tersebut, karena itu Perseroan berupaya untuk mengakselerasi pengembangan usahanya sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.

Di tahun 2023, aktivitas ekonomi masyarakat diperkirakan sudah akan kembali ke masa sebelum pandemi, sehingga mobilitas masyarakat akan semakin meningkat. MRT Jakarta melihat adanya potensi pasar yang besar untuk terus meningkatkan jumlah pengguna jasa. Untuk itu, kebijakan strategis Perseroan di 2023 akan berfokus pada 3 hal yaitu akselerasi kinerja, digitalisasi proses bisnis, dan kolaborasi korporasi.

BUSINESS PROSPECT

The existence of safe, comfortable, and effective public transportation facilities is a necessity for the people. Especially in the DKI Jakarta area, where population mobilization is relatively high. MRT Jakarta seeks to meet the needs of the people through the services it provides. The Corporation realizes that the services currently being provided to the public are only able to fulfill a small part of these needs, therefore the Corporation is trying to accelerate its business development in accordance with plans that have been prepared previously.

In 2023, it is estimated that people's economic activities will return to pre-pandemic times, therefore people's mobility will increase. MRT Jakarta sees a large market potential to continue increasing the ridership. For this reason, the Corporation's strategic policy in 2023 will focus on 3 things, namely performance acceleration, business process digitalization, and corporate collaboration.





Ketiga fokus ini untuk mendukung rencana strategis Perseroan yang telah tercantum di dalam RBP 2022 - 2026 dan RJPP 2022 - 2030. Perseroan akan mengupayakan untuk akselerasi kegiatan dan inisiatif yang berdampak signifikan pada peningkatan pendapatan, penurunan biaya, dan peningkatan citra Perusahaan. Perseroan telah memulai bisnis berbasis keahlian dan pengetahuan (*knowledge-based business*) melalui jasa konsultasi dan pelatihan kepada Ho Chi Minh Metro dan LRT Palembang di tahun 2022. Pengalaman ini membuka jalan untuk peluang penyediaan jasa konsultasi baik dari operator nasional maupun internasional di tahun mendatang.

Selain itu, Perseroan juga melanjutkan proses transformasi digital yang telah dimulai pada tahun-tahun sebelumnya. Digitalisasi proses bisnis menjadi sesuatu yang wajib untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kerja. Beberapa hal yang akan dilaksanakan mulai tahun 2023 yaitu transisi ke *digital office* dan peluncuran *Innovation Lab* sebagai wadah inovasi insan MRT Jakarta. Inovasi yang nantinya ditelurkan tidak hanya yang berkaitan dengan perbaikan proses bisnis namun juga penciptaan nilai yang dapat mendatangkan pendapatan baru bagi Perseroan.

Perseroan juga mendorong upaya untuk peningkatan kolaborasi antar unit kerja untuk mempercepat penyelesaian seluruh inisiatif yang terdapat di dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Bisnis Perusahaan.

KELANGSUNGAN USAHA DAN STRATEGI KEBERLANGSUNGAN USAHA

Sudah menjadi komitmen Perseroan untuk terus meningkatkan kualitas layanan agar dapat memberikan rasa nyaman dan puas terhadap pelayanan diberikan. Upaya peningkatan layanan dilakukan dengan secara bertahap dengan memperluas rute yang ditangani. Dalam melaksanakan kelangsungan usahanya, Perseroan bergantung pada kemampuan dalam menyediakan layanan yang maksimal bagi pengguna jasa. Seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna jasa yang akan memberikan pengaruh pada pendapatan Perseroan, yaitu pendapatan non tiket dan pendapatan tiket termasuk subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Perseroan menerapkan Manajemen Keberlangsungan Usaha (BCM) mengacu pada ISO 22301 agar dapat menghadapi risiko dan mengelola dampak yang tidak dapat dikendalikan maupun kejadian yang tidak teridentifikasi sebelumnya yang dapat mengganggu kelangsungan Perseroan. Kebijakan Manajemen Keberlangsungan Usaha Perseroan dituangkan dalam Peraturan Direksi Nomor PER/042/BOD-MRT/VIII/2019 yang sudah ditetapkan dan disepakati. Penyusunan peta jalan menjadi langkah awal di dalam BCM dilanjutkan dengan penilaian risiko dan ancaman, analisis dampak bisnis, penyiapan risiko dan ancaman, analisis dampak bisnis, penyiapan prosedur tanggap darurat, prosedur pemulihan dan prosedur restorasi saat terjadi peristiwa.

These three focuses are to support the Corporation's strategic plan which has been stated in the 2022-2026 RBP and 2022-2030 RJPP. The Corporation will strive to accelerate activities and initiatives that have a significant impact on increasing revenue, reducing costs, and improving its image. The Corporation has started a knowledge-based business through consulting and training services for the Ho Chi Minh Metro and Palembang LRT in 2022. This experience paved the way for opportunities to provide consulting services from both national and international operators in the coming year.

In addition, the Corporation will also continue the digital transformation process that started in the previous years. Digitalization of business processes is mandatory to increase the efficiency and effectiveness of work processes. Several things will be started in 2023, namely the transition to a digital office and the launch of an innovation lab as a forum of innovation for MRT Jakarta Personnel. The innovations to be made will not only be related to improving business processes but also to creating value that can generate new revenues for the Corporation.

The Corporation will also encourage efforts to increase collaboration between work units to accelerate the completion of all initiatives contained in the Corporation's Long Term Plan and the Corporation's Business Plan.

BUSINESS CONTINUITY AND BUSINESS CONTINUITY STRATEGY

It has become the Corporation's commitment to continuously enhance service quality in order to provide a sense of comfort and satisfaction with the services provided. Efforts to enhance services are carried out gradually by expanding routes. In carrying out its business continuity, the Corporation depends on the ability to provide maximum service to passengers. Along with the increasing number of passengers that will have an impact on the Corporation's revenue, i.e. non-farebox revenue and farebox revenue including subsidies from the Government of DKI Jakarta Province.

The Corporation implements Business Continuity Management (BCM) in order to be able to face risks and manage impacts that cannot be controlled or previously unidentified events that could disrupt the continuity of the Corporation. The Corporation's Business Continuity Management Policy is set forth in the Board of Directors' Decree Number PER/042/BOD-MRT/VIII/2019 which has been established and agreed upon. Preparation of a road map is the first step in BCM followed by risk and threat assessment, business impact analysis, risk and threat preparation, business impact analysis, preparation of emergency response procedures, recovery procedures and restoration procedures when events occur.

Sebagai bentuk evaluasi terhadap Manajemen Kelangsungan Usaha (BCM) pada tahun 2022, Perseroan telah melakukan pengukuran tingkat kematangan implementasi dengan capaian 3,02 dari skala 5. Mengacu pada hasil evaluasi tersebut Perseroan berkomitmen terus melakukan perbaikan berkelanjutan untuk penerapan BCM.

Informasi Kelangsungan Usaha

Seiring dengan membaiknya penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan pemerintah, aktivitas masyarakat berlangsung menjadi normal kembali. Kebijakan untuk kembali beraktivitas di kantor sudah kembali diterapkan oleh sebagian perusahaan di wilayah DKI Jakarta. Hal tersebut berdampak pada bertumbuhnya pengguna jasa sehingga mendorong pendapatan tiket, namun Perseroan juga tetap berupaya memaksimalkan pendapatan dari non-tiket. MRT Jakarta akan berperan dalam 3 (tiga) poros bisnis yaitu sebagai *network provider*, *urban platformer*, dan *city regenerator*.

Pada tahun 2022, Perseroan dihadapkan dengan situasi, tantangan, dan tren yang terus mengalami perubahan. Dengan kondisi ini, Perseroan perlu menyusun strategi yang dijalankan Perseroan sebagai berikut:

1. *Network provider*, strategi ini mendorong perubahan budaya transportasi masyarakat melalui penyediaan transportasi integrasi berbasis lingkungan. Hingga akhir tahun 2022, Perseroan terus melakukan pembangunan Fase 2 terdiri dari dua tahap, yaitu Fase 2A dan Fase 2B. Fase 2A terdiri dari tujuh stasiun bawah tanah (Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota) dengan total panjang jalur sekitar 5,8 kilometer, sedangkan Fase 2B terdiri dari dua stasiun bawah tanah (Mangga Dua dan Ancol Marina) serta satu stasiun *at grade* (Ancol Barat).
2. *Urban platformer*, guna mendukung mobilitas warga secara digital, Perseroan terus mendorong pengembangan ekosistem digital di sepanjang jalur layanan MRT Jakarta melalui kerja sama dengan perusahaan rintisan (*start up*) melalui program MRTJ Accel.
3. *City regenerator*, pengembangan KBT terus dikembangkan untuk mendorong regenerasi kota melalui simpul transportasi publik.

Sepanjang tahun 2022, Perseroan telah melaksanakan pembangunan berbagai fasilitas yang menjadi bagian dari pengembangan KBT yang memiliki fokus adalah memperbaiki jalur pejalan kaki dan memperbaiki ruang terbuka hijau. Pembangunan KBT untuk pembenahan jalur pejalan kaki dari dan ke transportasi publik yang meliputi simpang temu lebak bulus dan simpang dukuh atas. Upaya menghadirkan lebih banyak ruang terbuka publik di Jakarta terus digalakkan. Pembangunan kota dengan orientasi terhadap pejalan kaki dan pengguna transportasi publik mendorong hadirnya infrastruktur yang tidak lagi sekadar mengakomodir lalu lalang dan mobilitas masyarakat yang lebih aman dan nyaman, namun juga sebagai ruang-ruang interaksi dan kreativitas warga, seperti Taman Literasi Martha Christina Tiahahu.

As a form of evaluation of Business Continuity Management (BCM) in 2022, the Corporation has measured the maturity level of implementation with an accomplishment of 3.02 on a scale of 5. Referring to the evaluation results, the Corporation is committed to continuing to make sustainable improvements to BCM implementation.

Business Continuity Information

Along with the improvement in the COVID-19 pandemic handling by the Government, community activities are returning to normal. Work from Office policy has been re-implemented by several companies in the DKI Jakarta area. This has an impact on the growth of ridership and thereby driving farebox revenue. However, the Corporation also continues to maximize revenue from non-farebox. MRT Jakarta will play a role in 3 (three) business axes, namely as *network provider*, *urban platformer*, and *city regenerator*.

In 2022, the Corporation is faced with changing situations, challenges and trends. With this condition, the Corporation needs to develop a strategy that is implemented by the Corporation as follows:

1. *Network provider*, this strategy encourages changes in the culture of public transportation through the provision of environmentally-based integrated transportation. Until the end of 2022, the Corporation continued to carry out Phase 2 construction consisting of two stages, namely Phase 2A and Phase 2B. Phase 2A consists of seven underground stations (Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, and Kota) with a total length of about 5.8 kilometers, while Phase 2B consists of two underground stations (Mangga Dua and Ancol Marina) and one at grade station (Ancol Barat).
2. *Urban platformer*, to digitally support the mobility of citizens, the Corporation continues to encourage the development of digital ecosystems along MRT Jakarta service lines through collaboration with start-up companies through the MRTJ Accel program.
3. *City regenerator*, the development of TOD areas is continued to encourage city regeneration through public transportation nodes.

Throughout 2022, the Corporation has carried out the construction of various facilities which are part of TOD areas development which has a focus on improving pedestrian pathways and improving green open spaces. Simpang Temu Lebak Bulus and Simpang Temu Dukuh Atas are examples of TOD area development which aim to improve pedestrian pathways connecting public areas to public transportation. Efforts to create more public open spaces in Jakarta are being encouraged. Pedestrian-oriented city development urge not only the presence of infrastructures that accommodate safe and comfortable traffic and mobility, but also spaces that can prompt interactions and creativity, such as Martha Christina Tiahahu Literacy Park.



Penyediaan buku di stasiun dan perpustakaan mini merupakan upaya dari kampanye #UbahJakarta dan inovasi yang disiapkan oleh Perseroan agar semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk berpindah dari pengguna transportasi pribadi menjadi pengguna transportasi publik.

Strategi Keberlangsungan Usaha

Di tengah kondisi yang penuh tantangan, Perseroan tetap mempertahankan komitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi pengguna jasa agar dapat meraih pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Kondisi ini mendorong Perseroan untuk menyiapkan strategi untuk terus mengembangkan strategi keberlangsungan usaha. Perseroan terus berinovasi untuk meningkatkan pengguna jasa tanpa mengabaikan aspek keamanan dan keselamatan penumpang dari ancaman COVID-19 dengan tetap mengikuti ketentuan oleh Pemerintah.

Dalam rangka memetakan fungsi bisnis kritis yang harus segera dipulihkan saat terjadi kondisi krisis, Perseroan telah meninjau dan melengkapi analisis dampak bisnis sesuai dengan perkembangan organisasi di tahun 2022.

Pada tahun 2022, Perseroan telah melaksanakan simulasi *tabletop* dan *call tree* yang melibatkan jajaran Direksi, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Karyawan Operasional guna melatih kesiapan dan respon jajaran Manajemen saat terjadi situasi krisis. Perseroan aktif dalam melakukan pelatihan dan simulasi untuk kesiapan tanggap darurat menghadapi risiko bencana dan risiko lainnya. Beberapa simulasi tanggap darurat yang dilakukan sepanjang tahun 2022, antara lain:

1. Simulasi penanganan banjir;
2. Simulasi penanganan bahan kimia berbahaya (BKB);
3. Simulasi penanganan kebakaran dan pengetesan *hydrant* yang dilaksanakan di Depo Lebak Bulus;
4. Simulasi penanganan teroris; dan
5. Simulasi penanganan gempa bumi.

Provision of books at stations and mini libraries is part of the #UbahJakarta campaign and an innovation prepared by the Corporation so that more and more people are interested in switching from using private transportation to using public transportation.

Business Continuity Strategy

In the midst of challenging conditions, the Corporation continues to maintain its commitment to providing the best service for passengers with a view to achieve sustainable business growth. This condition encourages the Corporation to prepare a strategy to relentlessly develop a business continuity strategy. The Corporation continuously innovates to increase ridership without ignoring the security and safety aspects of passengers from the threat of COVID-19 while still following the Government's regulations.

In order to map critical business functions that must be restored immediately when a crisis occurs, the Corporation has reviewed and completed a business impact analysis in accordance with organizational developments in 2022.

In 2022, the Corporation carried out tabletop and call tree simulations involving the Board of Directors, Division Heads, Department Heads and Operations Employees to train the readiness and response of the Management in the event of a crisis situation. The Corporation is active in conducting training and simulations for emergency response preparedness to face disaster risks and other risks. Several emergency response simulations were carried out throughout 2022, including:

1. Simulation of flood handling;
2. Simulation of hazardous chemicals handling;
3. Simulation of fire handling and hydrant testing carried out at the Lebak Bulus Depot;
4. Simulation of terrorists handling; and
5. Earthquake handling simulation.





05

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance

NWJ Temuan Arkeologi

Penerapan prinsip tata kelola perusahaan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional MRT Jakarta. Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan prinsip tata kelola agar dapat mewujudkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Implementation of corporate governance principles has become an integral part of the operation of MRT Jakarta. The Corporation is committed to continuously improve the quality implementation of governance principles in order to realize sustainable business growth.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Implementation



Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* ("GCG") merupakan fondasi strategis bagi pencapaian keunggulan daya saing berkelanjutan. GCG merupakan sistem, struktur, mekanisme, dan budaya yang akan melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan pemegang saham. Melalui komitmen seluruh Insan MRT Jakarta, Perseroan tidak hanya telah memenuhi berbagai ketentuan terkait penerapan GCG tetapi juga menerapkan praktik-praktik terbaik agar dapat menjadi menjadi salah satu perusahaan terdepan dalam penerapan GCG.

Good Corporate Governance ("GCG") is a strategic foundation for achieving sustainable competitive advantage. GCG is a system, structure, mechanism and culture which would protect the interests of the shareholders and stakeholders. Through the commitment of all MRT Jakarta Personnels, the Corporation has not only complied with various provisions related to the GCG implementation, but has also implemented the best practices to become one of the leading companies in implementing GCG.



DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan GCG di MRT Jakarta mengacu pada sejumlah ketentuan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas");
2. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah);
3. Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; dan
4. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance Tahun 2021.

PRINSIP TATA KELOLA

Perseroan menerapkan GCG sesuai Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia yang dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2021. Terdapat 4 (empat) pilar dalam prinsip-prinsip governansi korporat Indonesia yang akan mendorong terciptanya nilai jangka panjang korporasi, meliputi:

- **Perilaku Beretika**
Dalam melaksanakan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
- **Akuntabilitas**
Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.
- **Transparansi**
Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

BASIS FOR CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The GCG implementation in MRT Jakarta refers to several statutory provisions, including:

1. Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as most recently amended by Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation ("Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies");
2. DKI Jakarta Province Regional Regulation No. 9 of 2018 concerning MRT Jakarta Limited Liability Company (Regional Company);
3. DKI Jakarta Province Governor Decree No. 96 of 2004 concerning the Good Corporate Governance Practices Implementation in Regionally Owned Enterprises (BUMD) in the Special Capital City of Jakarta Regional Government; and
4. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance by National Committee on Governance Policy in 2021.

GOVERNANCE PRINCIPLES

The Corporation implements GCG in accordance with the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG) in 2021. There are 4 (four) pillars in the principles of Indonesian corporate governance of which would encourage the creation of long-term corporate value, including:

- **Ethical Conduct**
In carrying out its activities, the Corporation always prioritizes honesty, treats all parties with respect, fulfills commitments, builds and maintains moral values and beliefs consistently. The Corporation pays attention to the shareholders and other stakeholders' interests based on the principle of fairness and is managed independently therefore each organ of the Corporation does not dominate the other and cannot be intervened by other parties.
- **Accountability**
The Corporation can be held accountable for its performance in a transparent and fair manner. For this reason, the Corporation must be managed properly, measurably and in accordance with corporate interests while taking into account the shareholders and stakeholders interests. Accountability is a prerequisite needed to achieve sustainable performance.
- **Transparency**
To maintain objectivity in conducting business, the Corporation provides material and relevant information in a way easily accessible and understandable to stakeholders. The Corporation takes the initiative to disclose not only issues required by laws and regulations, but also important matters for decision making by shareholders, creditors and other stakeholders.

- **Keberlanjutan**

Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.

- **Sustainability**

The Corporation complies with laws and regulations and is committed to carrying out responsibilities towards society and the environment in order to contribute to sustainable development through cooperation with all stakeholders. It is related with improving their lives in a way aligned with business interests and the sustainable development agenda.

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Tujuan penerapan GCG di MRT Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, karyawan, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan;
2. Mendorong dan mendukung perkembangan Perseroan;
3. Mengelola sumber daya dan risiko Perseroan secara lebih efektif dan efisien;
4. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
5. Mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan Perseroan;
6. Memaksimalkan nilai Perseroan dalam bentuk peningkatan kinerja serta citra Perseroan yang baik;
7. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan, dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perseroan;
8. Mendorong organ Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan yang dilandasi dengan nilai etika/moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap pemangku kepentingan;
9. Mengurangi potensi benturan kepentingan organ Perseroan dan karyawan dalam menjalankan bisnis Perseroan; dan
10. Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif terhadap pencapaian tujuan Perseroan.

GCG IMPLEMENTATION OBJECTIVES

GCG implementation objectives in MRT Jakarta are as follows:

1. To control and direct the relationship among shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors, employees, business partners, as well as the community and environment;
2. To encourage and support the Corporation's development;
3. To manage the Corporation's resources and risks effectively and efficiently;
4. To increase accountability to the stakeholders;
5. To prevent acts of misconduct in managing the Corporation;
6. To maximise the Corporation's value by improving performance as well as maintaining the Corporation's image;
7. To encourage the Corporation management in a professional, transparent, and efficient manner and to empower its functions and strengthen independence of the Corporation's organs;
8. To encourage organs within the Corporation to make decisions and execute actions based on high ethical/moral values complying with the prevailing laws and regulations, and to have the awareness of the Corporation's social responsibility towards the stakeholders;
9. To reduce the possible conflict of interests between organs and employees in conducting the Corporation's business; and
10. To create a business environment supporting the efforts to achieve the Corporation's goals.



Kerangka dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang Baik

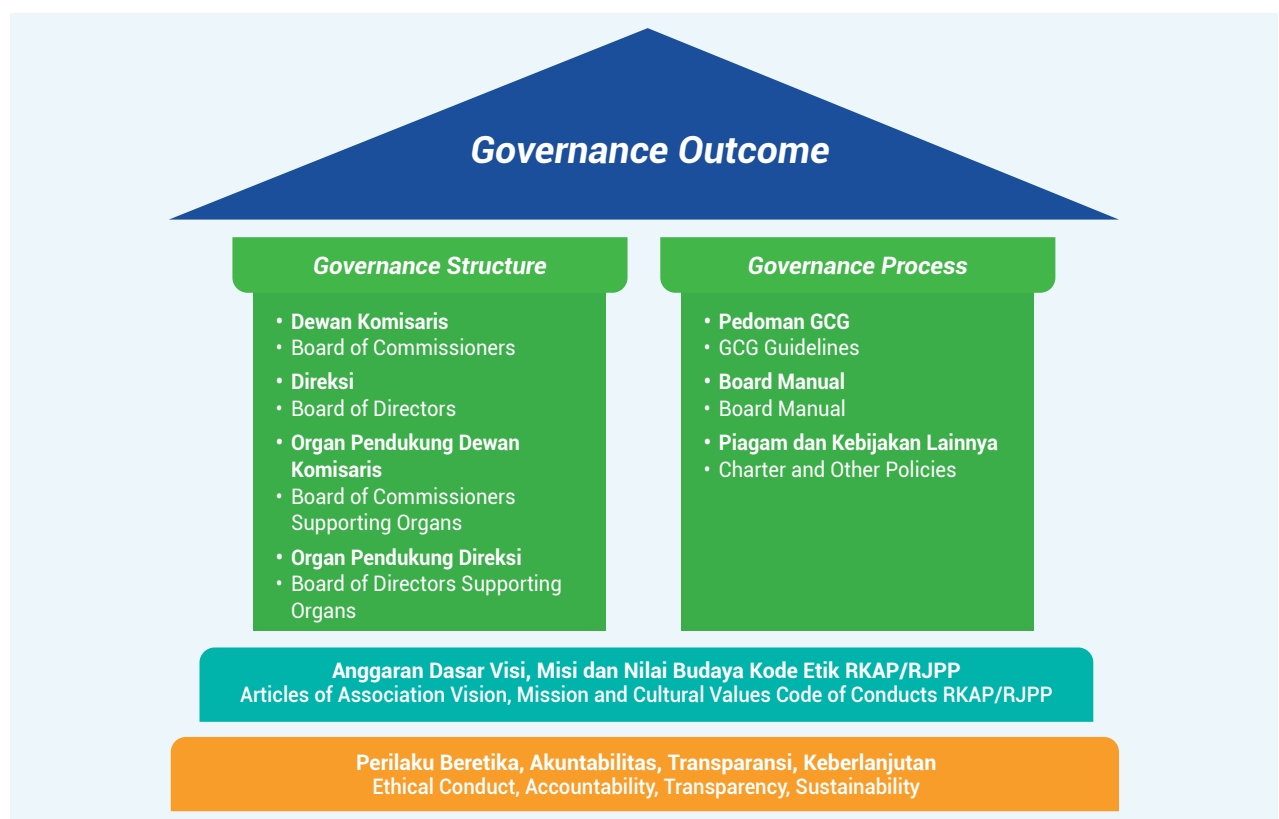
Good Corporate Governance Framework and Mechanism

KERANGKA TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Perseroan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan dan *best practices* baik di dalam negeri maupun luar negeri.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE FRAMEWORK

Good Corporate Governance implementation in the Corporation refers to relevant laws and regulations and best practices both domestically and abroad.



Kerangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang di MRT Jakarta secara umum terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. **Governance Structure**
Struktur tata kelola yang terdiri dari organ utama dan organ pendukung.
2. **Governance Process**
Proses dan mekanisme kerja dari organ tata kelola.
3. **Governance Outcome**
Hasil dari penerapan tata kelola.

Sebagai landasan dari penerapan tata kelola perusahaan di MRT Jakarta adalah visi, misi dan nilai budaya perusahaan, kode etik dan rencana kerja Perusahaan (Rencana Kerja dan Anggaran dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan), sedangkan sebagai pondasi adalah prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Keadilan.

Corporate Governance implementation framework in MRT Jakarta is generally divided into 3 (three) parts, namely:

1. **Governance Structure**
Governance structure consisting of main and supporting organs.
2. **Governance Process**
Processes and work mechanisms of governance organs.
3. **Governance Outcomes**
Governance implementation result.

Vision, mission and corporate cultural values, the Corporation's code of conducts and work plan (Work Plan and Budget and Corporate Long Term Plan) are the basis of the corporate governance implementation in MRT Jakarta. Meanwhile, the foundation is the Good Corporate Governance principles consisting of Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness.

STRUKTUR TATA KELOLA

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur Tata Kelola Perseroan secara garis besar terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi yang masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

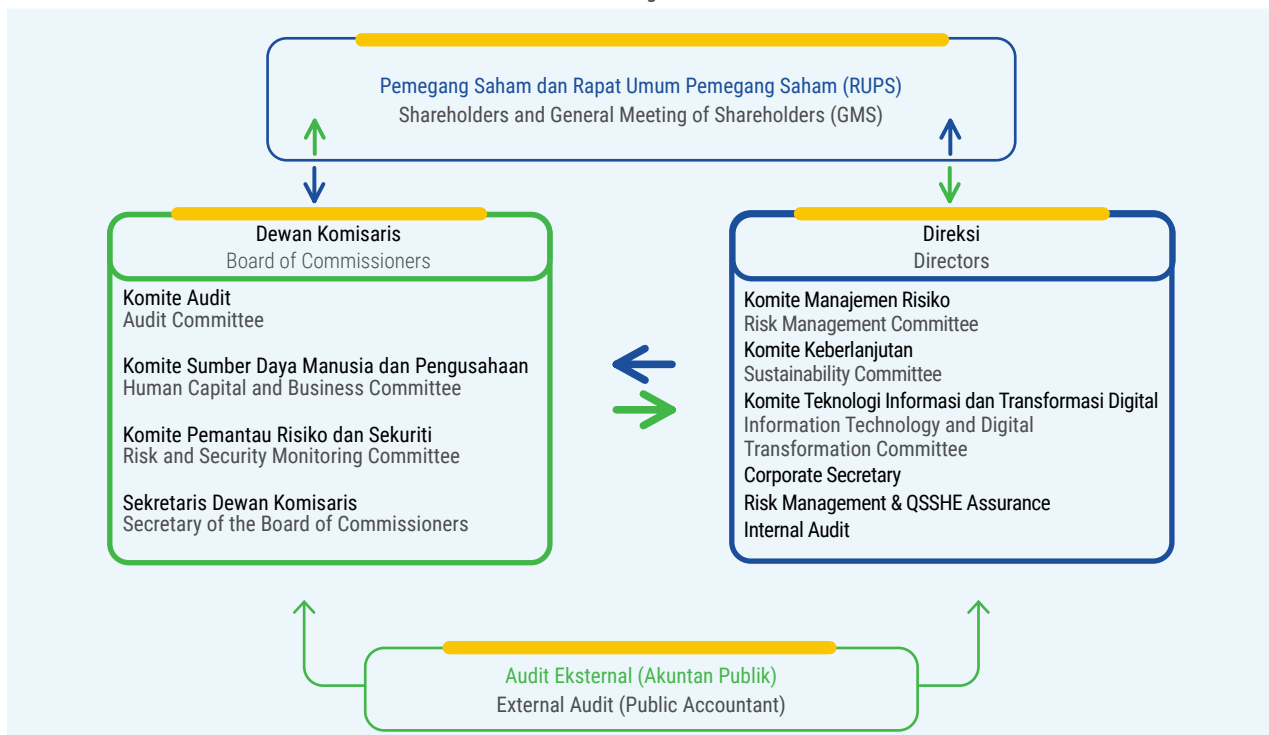
Selain itu, Perseroan juga membentuk organ pendukung baik yang berada di bawah Dewan Komisaris maupun di bawah Direksi. Organ pendukung Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan dan Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti. Sedangkan organ di bawah Direksi terdiri dari Komite Manajemen Risiko, Komite Keberlanjutan, Komite Teknologi Informasi dan Transformasi Digital dan Sekretaris Perusahaan, Internal Audit, Corporate Strategy, Risk Management & QSSHE Assurance, dan divisi lainnya.

GOVERNANCE STRUCTURE

In accordance with the Republic of Indonesia Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Corporation's governance structure in general consists of a General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and Directors, each of which has clear authorities and responsibilities as mandated in Articles of Association and laws and regulations.

The Corporation also forms supporting organs both under the Board of Commissioners and Directors. The Board of Commissioners' supporting organs consist of the Audit Committee, Human Capital and Business Committee, Risk and Security Monitoring Committee. Meanwhile, the organs under the Board of Directors consist of the Risk Management Committee, Sustainability Committee, Information Technology and Digital Transformation Committee and the Corporate Secretary, Internal Audit, Corporate Strategy, Risk Management & QSSHE Assurance, and other divisions

Struktur Perangkat Tata Kelola
Governance Organ Structure



MEKANISME TATA KELOLA

Mekanisme tata kelola merupakan proses yang mengatur peran dan fungsi dari masing-masing organ utama tata kelola, sehingga dapat mendorong terciptanya hasil tata kelola yang berkualitas untuk memenuhi harapan pemegang saham maupun segenap pemangku kepentingan. Sebagaimana tergambar dalam bagan berikut:

GOOD CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM

The governance mechanism is a process regulating the roles and functions of each main governance organ to encourage the creation of quality governance results to meet the shareholders and all stakeholders' expectations. As illustrated in the following chart:



Untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola secara berkelanjutan, MRT Jakarta telah menyusun dan menerapkan kebijakan-kebijakan operasional bagi seluruh unit kerja sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan. Perseroan telah menetapkan hierarki peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam *Corporate Governance Policy*.

To improve the quality and scope of governance implementation in a sustainable manner, MRT Jakarta has prepared and implemented operational policies for all work units in line with the corporate governance principles. The Corporation has established a hierarchy of rules and policies stipulated in the *Corporate Governance Policy*.

Hierarki Peraturan dan Kebijakan Perseroan Hierarchy of Rules and Policies Corporation

No	Kebijakan Policy	Dasar Penetapan Legal Basis
1	Anggaran Dasar Perseroan Corporate Articles of Association	Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mass Rapid Transit Jakarta No. 140 tanggal 17 Juni 2008 PT Mass Rapid Transit Jakarta Limited Liability Company Deed of Establishment No. 140 of June 17, 2008
2	Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Board Manual	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 010 Tahun 2020 dan No. 066 Tahun 2020 Board of Commissioners and Directors Joint Decision No. 010 Year 2020 and No. 066 Year 2020
3	Pedoman Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Guidelines	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 007 Tahun 2021 dan No. 043 Tahun 2021 Board of Commissioners and Directors Joint Decision No. 007 Year 2021 and no. 043 Year 2021
4	Pedoman Etika dan Perilaku Code of Conduct Guidelines	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 011 Tahun 2020 dan No. 067 Tahun 2020 Board of Commissioners and Directors Joint Decision No. 011 Year 2020 and No. 067 Year 2020
5	Pedoman Benturan Kepentingan Conflict of Interest Guidelines	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 013 Tahun 2020 dan No. 071 Tahun 2020 Board of Commissioners and Directors Joint Decision No. 013 Year 2020 and no. 071 Year 2020
6	Piagam Audit Internal Internal Audit Charter	Ditetapkan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama pada 30 November 2022 Stipulated by President Director and President Commissioner on November 30, 2022
7	Pedoman Sistem Pengendalian Internal Internal Control System Guidelines	Peraturan Direksi No. 023-1 Tahun 2021 Board of Directors' Decree No. 023-1 Year 2021
8	Kebijakan Manajemen Risiko Risk Management Policy	Peraturan Direksi No. 018 Tahun 2020 Board of Directors' Decree No. 018 Year 2020
9	Pedoman Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) State Officials Wealth Report (LHKPN) Management Guidelines	Peraturan Direksi No. 048 Tahun 2020 Board of Directors' Decree No.048 Year 2020
10	Pedoman Pengendalian Gratifikasi Gratification Control Guidelines	Peraturan Direksi No. 027 Tahun 2022 Board of Directors' Decree No. 027 Year 2022
11	Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran Whistleblowing System Guidelines	Peraturan Direksi No. 018 Tahun 2022 Board of Directors' Decree No. 018 Year 2022
12	Pedoman Pengambilan Keputusan Decision-Making Guidelines	Peraturan Direksi No. 006 Tahun 2022 beserta perubahan pertama yang disahkan melalui Peraturan Direksi No. 011-1 Tahun 2022 Board of Directors' Decree No. 006 Year 2022 along with the amendment through Directors Regulation No. 011-1 Year 2022
13	Perubahan Sistem Manajemen Terintegrasi (Keselamatan Perkeretaapian, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Mutu, Lingkungan dan Pengamanan Changes to the Integrated Management System (Railway Safety, Occupational Safety and Health, Quality, Environment and Security)	Peraturan Direksi No. 027 Tahun 2021 Board of Directors Decree No. 027 Year 2021
14	Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan Implementation of Anti-Bribery Management System	Peraturan Direksi No. 035 Tahun 2020 Board of Directors' Decree No. 035 Year 2020
15	Pedoman Hubungan Perseroan dengan Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan Guidelines on Corporation's Relations with Subsidiaries and/or Joint Venture Companies	Peraturan Direksi No. 018 Tahun 2021 Board of Directors' Decree No. 018 Year 2021
16	Piagam Komite Audit Audit Committee Charter	Keputusan Dewan Komisaris No. 001 Tahun 2022 Board of Commissioners Decision No. 001 Year 2022
17	Piagam Komite SDM dan Pengusahaan Human Capital and Business Committee Charter	Keputusan Dewan Komisaris No. 003 Tahun 2022 Board of Commissioners Decision No. 003 Year 2022
18	Piagam Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti Risk and Security Monitoring Committee Charter	Keputusan Dewan Komisaris No. 002 Tahun 2022 Board of Commissioners Decision No. 002 Year 2022

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders



Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") merupakan organ tertinggi Perseroan dan wadah bagi para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang kewenangannya tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI PERSEROAN

PT MRT Jakarta (Persero) merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sahamnya seluruhnya 100% dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tahun 2022, komposisi kepemilikan saham Perseroan terdiri atas kepemilikan langsung 99,997% oleh Pemprov DKI Jakarta dan kepemilikan tidak langsung melalui Perumda Pasar Jaya sebesar 0,003%. Dengan demikian, Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan adalah Pemprov DKI Jakarta.

HAK PEMEGANG SAHAM

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham memiliki hak:

1. Menghadiri RUPS dan memberikan suara pada RUPS;
2. Memperoleh informasi material (termasuk hak bertanya), baik dari Dewan Komisaris maupun Direksi, mengenai keuangan atau hal-hal lain yang menyangkut Perseroan secara lengkap, tepat waktu, dan teratur;

General Meeting of Shareholders ("GMS") is the Corporation highest organ and a forum for Shareholders to generate important resolutions whose authority is not granted to the Board of Directors and Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and applicable laws and regulations.

INFORMATION ON THE CORPORATION'S MAJOR/CONTROLLING SHAREHOLDERS

PT MRT Jakarta (Persero) is a regional owned enterprise (BUMD) of the DKI Jakarta Provincial Government whose shares are 100% owned by the DKI Jakarta Provincial Government, either directly or indirectly. In 2022, the Corporation's share ownership composition consists of direct ownership of 99.997% by the DKI Jakarta Provincial Government and indirect ownership through Perumda Pasar Jaya of 0.003%. Thus, the Corporation's Major/Controlling Shareholder is DKI Jakarta Provincial Government.

SHAREHOLDERS' RIGHTS

In accordance with the Corporation's Articles of Association, the Shareholders' rights are:

1. Attending the GMS and voting at the GMS;
2. Obtaining material information (including the right to ask) from both the Board of Commissioners and Directors regarding financial matters or other matters concerning the Corporation in a complete, timely, and orderly manner;



3. Memperoleh pembagian laba Perseroan (dividen);
4. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau Dewan Komisaris lalai dalam menyelenggarakan RUPS Tahunan dan sewaktu-waktu meminta penyelenggaraan RUPS Luar Biasa bila dipandang perlu;
5. Mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan; dan
6. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

WEWENANG RUPS

1. Menetapkan dan melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Menetapkan komposisi jabatan Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Menetapkan target dan kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, serta memberikan penilaian terhadap pencapaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan tantiem/insentif kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Menyetujui atau menolak Rencana Bisnis Perseroan (RBP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perseroan;
7. Memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi Perseroan yang perlu mendapat persetujuan RUPS;
8. Menetapkan Auditor Eksternal;
9. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan termasuk laporan keuangan dan tugas pengawasan Dewan Komisaris; dan
10. Menetapkan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan (bila saldo laba positif).

JENIS-JENIS RUPS

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku berakhir untuk membahas mata acara rapat laporan tahunan dan penggunaan laba Perseroan. RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar Perseroan disebut juga RUPS luar biasa diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat selain mata acara rapat RUPS Tahunan.

3. Receiving a part of the Corporation's profit (dividend);
4. Organizing the GMS in the event the Board of Directors and/or Board of Commissioners fail to hold Annual GMS and at any time request an Extraordinary GMS if deemed necessary;
5. Generating a binding resolution without the GMS on the condition all Shareholders with voting rights agree in writing by signing the related proposal; and
6. Exercising other rights based on Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies.

GMS AUTHORITIES

1. Determining and implementing the appointment and dismissal of the Board of Commissioners and Directors' members in accordance with the prevailing laws and regulations;
2. Determining the Board of Commissioners and Directors' composition;
3. Determining the Board of Commissioners and Directors' target and performance, as well as providing an assessment on their performance accomplishment;
4. Determining the salary/honorarium, benefits, facilities, and bonuses/incentives for the Board of Commissioners and Directors' performance;
5. Carrying out assessment on the Board of Commissioners and Directors' prospective members;
6. Approving or rejecting the Corporation's Business Plan and its Work Plan and Budget;
7. Giving approval/decisions on the proposed Corporate actions of which requiring an approval from the GMS;
8. Appointing the External Auditors;
9. Approving and ratifying annual reports including financial statements and the Board of Commissioners' supervisory duties; and
10. Determining the use of net income including the determination of total allowance for reserves (if profit balance is positive).

GMS TYPES

In accordance with the Corporation's Articles of Association and the Limited Liability Company Law, the GMS consists of the Annual and Other GMS. The Annual GMS must be held no later than 6 (six) months after the Financial Year ended to discuss the agenda for the annual report meeting and the use of the Corporation's profits. Other GMS, which in the Corporation's Articles of Association are also called extraordinary GMS, are held at any time required to discuss and decide on the meeting agenda other than the agenda for the Annual GMS meeting.

KETENTUAN PENYELENGGARAAN RUPS PERSEROAN

RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya merupakan wadah bagi Pemegang Saham untuk mengendalikan kinerja Perseroan sesuai yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Anggaran Dasar. Keputusan yang diambil dalam RUPS tahunan dan RUPS lainnya dilakukan secara transparan dengan memperhatikan kepentingan usaha Perseroan. RUPS dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha, atau dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan. Risalah rapat hasil penyelenggaraan RUPS dibuat secara tertulis, dan diedarkan kepada seluruh pemegang saham yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pelaksanaan RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.

Pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan dengan mekanisme musyawarah untuk mufakat. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan secara tertulis, keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama yang diambil dengan sah dalam RUPS.

PELAKSANAAN RUPS PADA TAHUN 2022

Sepanjang Tahun 2022, Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan sebanyak 1 kali dan RUPS Luar Biasa sebanyak 2 kali, selain dari itu terdapat pula Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham sebanyak 2 kali, dengan rincian sebagai berikut:

Pelaksanaan RUPS pada Tahun 2022
GMS Implementation in 2022

No	Jenis RUPS Type of GMS	Waktu Date
1	RUPS Tahunan Annual GMS	30 Maret 2022 March 30, 2022
2	RUPS Luar Biasa Extraordinary GMS	30 Maret 2022 March 30, 2022
3	Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham Shareholders' Resolutions Outside the General Meeting of Shareholders	22 Juli 2022 July 22, 2022
4	Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham Shareholders' Resolutions Outside the General Meeting of Shareholders	25 Oktober 2022 October 25, 2022
5	RUPS Luar Biasa Extraordinary GMS	7 Desember 2022 December 07, 2022

PROVISIONS FOR THE CORPORATION'S GMS IMPLEMENTATION

The Annual and Other GMS are forums for Shareholders to control the Corporation's performance as determined by the applicable laws and regulations or the Articles of Association. Resolutions taken at the annual and other GMS are carried out in a transparent manner by considering the Corporation's business interests. GMS can be held at the Corporation's domicile or where its business activities conducted, or by teleconference media, video conferences or through other electronic media facilities of which allowing all GMS participants to see and listen to each other directly and participate in meetings.

The GMS is held after summoning the shareholders by registered mail no later than 14 (fourteen) days prior to the GMS date. The minutes of GMS is made in writing and circulated to all participating shareholders for approval and signature. In accordance with the provision of the Corporation's Articles of Association, the GMS is chaired by the President Commissioner.

In the GMS, the resolutions are made through deliberation for consensus mechanism. Shareholder can also make resolutions without GMS, as long as all shareholders are informed in writing and express their agreement in writing as well as sign the agreement in writing, any decision made through such mechanism has the same power with the resolutions made in a GMS.

GMS IMPLEMENTATION IN 2022

Throughout 2022, the Corporation held 1 Annual and 2 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) GMS. There were also 2 Shareholders' Resolutions Outside the General Meeting of Shareholders, with details as follows:



Adapun keputusan dari masing-masing RUPS dan KPPS tersebut adalah sebagai berikut:

The Decision of each GMS and the Shareholders' Decisions are follows:

RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

Annual and Extraordinary GMS

RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Annual and Extraordinary GMS

Jenis RUPS Type of GMS	RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya Annual and Extraordinary GMS
Tanggal Undangan Summons Date	23 Maret 2022 March 23, 2022
Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	30 Maret 2022 March 30, 2022
Tempat Place	Wisma Nusantara Lantai 22 Wisma Nusantara 22 nd Floor

RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sebagaimana disebutkan diatas dihadiri oleh perwakilan Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

The Annual and Extraordinary GMS as mentioned above were attended by the Shareholders' representatives, the Corporation's Board of Commissioners and Directors' members, with the following details:

Rekapitulasi Kehadiran RUPS Tahunan RUPS Luar Biasa Tahun 2022 Recapitulation of Attendance at Annual and Extraordinary GMS in 2022

No	Nama Name	Jabatan Position
1.	Budi Purnama	Plt. Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta Acting Head of the Regionally-Owned Enterprise Development Agency for Special Capital Region of Jakarta
2.	Ratih Mayasari	Direktur Keuangan Perumda Pasar Jaya Finance Director of Perumda Pasar Jaya
3.	Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito	Notaris Notary
4.	Muhammad Syaugi	Komisaris Utama President Commissioner
5.	Rukijo	Komisaris Commissioner
6.	Adnan Pandu Praja	Komisaris Commissioner
7.	Mukhtasor	Komisaris Commissioner
8.	Zulfikri	Komisaris Commissioner
9.	William P. Sabandar	Direktur Utama President Director
10.	Silvia Halim	Direktur Konstruksi Construction Director
11.	Muhammad Effendi	Direktur Operasional dan Pemeliharaan Operation and Maintenance Director
12.	Roy Rahendra	Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi Finance and Corporate Management Director
13.	Farchad H. Mahfud	Direktur Pengembangan Bisnis Business Development Director

Adapun agenda, keputusan dan tindak lanjut dari keputusan RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

The Agenda of Resolution and an Annual GMS are follows:

Agenda 1 dan Agenda 2 Agenda 1 and Agenda 2	1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2021; dan 2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021. 1. The Corporation's Annual Report Approval and the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the 2021 Financial Year; And 2. The Corporation's Financial Statements Ratification for the 2021 Financial Year.
Keputusan Resolution	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu); 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 - 12 - 2021 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh satu) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young) sesuai dengan laporannya No. 00320/2.1032/AU.1/06/1726-1/1/III/2022 tanggal 25 - 3 - 2022 (dua puluh lima Maret tahun dua ribu dua puluh dua), dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal yang Material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia; dan 3. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 - 12 - 2021 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh satu) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan. 1. Approved the Corporation's Annual Report and Supervisory Duties Report which have been carried out by the Board of Commissioners for the 2021 (two thousand and twenty one) Financial Year; 2. Ratified the Corporation's Financial Statements for the 31-12-2021 (thirty first December two thousand and twenty one) Financial Year ended which have been audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro and Surja (Ernst & Young) according to their reports No. 00320/2.1032/AU.1/06/1726-1/1/III/2022 dated 25 - 3 - 2022 (the twenty-fifth of March of the year two thousand and twenty two), present fairly in all material respects in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards; And 3. Furthermore, with the Approval of Annual Report and the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report for the 2021 (two thousand twenty one) Financial Year and the Corporation's Financial Statements ratification for the 2021 (two thousand twenty one) Financial Year, the GMS granted a full acquittal and discharge to all members of the Board of Directors for their management actions and to all members of the Board of Commissioners for their supervisory actions carried out during the 31 - 12 - 2021 (thirty-first December of the year two thousand and twenty one) Financial Year ended in so far as these actions are reflected in the Corporation's Financial Report.
Tindak Lanjut Follow-up	Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroa disingkat PT MRT Jakarta Perseroa Nomor 50 tanggal 30 Maret 2022. The resolution became effective immediately and it is drawn as Deed of Official Report of the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders' Resolutions of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroa also known as PT MRT Jakarta Perseroa Number 50 dated March 30, 2022.
Agenda 3 Agenda 3	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 Appointment of a Public Accounting Firm to Audit the Financial Statements for the 2022 Financial Year
Keputusan Resolution	Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik) sesuai dengan prosedur pengadaan yang berlaku di Perseroan, untuk melaksanakan audit keuangan Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31- 12 - 2022 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh dua). Granted authority to the Board of Commissioners to appoint an external auditor (Public Accounting Firm) in accordance with the procurement procedures applicable in the Corporation, to carry out the Corporation's financial audit for the financial year ended on 31-12-2022 (thirty-first December of the year two thousand and twenty two).
Tindak Lanjut Follow-up	Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroa disingkat PT MRT Jakarta Perseroa Nomor 50 tanggal 30 Maret 2022. The resolution became effective immediately and it is drawn as Deed of Official Report of the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders' Resolutions of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroa also known as PT MRT Jakarta Perseroa Number 50 dated March 30, 2022.
Agenda 4 Agenda 4	Penetapan Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Tahun Buku 2022 serta Insentif Kinerja/Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 Determination of the Board of Directors' Salary and the Board of Commissioners' Honorarium for the 2022 Financial Year and their Performance Incentive for the 2021 Financial Year.
Keputusan Resolution	Menetapkan Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris beserta Tunjangan dan/atau Fasilitas yang diberikan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta Insentif Kinerja/Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang dilakukan oleh Pemegang Saham berdasarkan usulan Dewan Komisaris dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pedoman penetapan penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang hasilnya akan disampaikan oleh Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris. Determined the Board of Directors' Salary and the Board of Commissioners' Honorarium along with the Allowances and/or Facilities provided for the 2022 (two thousand twenty two) Financial Year as well as the Performance Bonus/Incentives for the Directors and Board of Commissioners for the 2021 (two thousand twenty one) Financial Year carried out by the Shareholders based on the proposal of the Board of Commissioners in accordance with the prevailing laws and regulations regarding guidelines for determination on the income of the Board of Directors, Supervisory Board and Board of Commissioners of Regional Owned Enterprises of the Jakarta Province Special Capital Region. The results would be submitted by the Shareholders through the Board of Commissioners.
Tindak Lanjut Follow-up	Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroa disingkat PT MRT Jakarta Perseroa Nomor 50 tanggal 30 Maret 2022. The resolution became effective immediately and it is drawn as Deed of Official Report of the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders' Resolutions of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroa also known as PT MRT Jakarta Perseroa Number 50 dated March 30, 2022.



Adapun agenda, keputusan dan tindak lanjut dari keputusan RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

The agenda, resolution and follow-up of the Extraordinary GMS are as follows:

Agenda 1 Agenda 1	Persetujuan dan Pengesahan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perusahaan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). Approval and Ratification of Amendment to the Corporation's Work Plan and Budget (RKA) for the 2022 (two thousand twenty two) Financial Year.
Keputusan Resolution	Menyetujui dan mengesahkan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perusahaan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang terdiri dari anggaran sebagai berikut: 1. Anggaran Proyek yang bersumber dari Dana Penerusan Pinjaman JICA yang diteruskanpinjamkan dan dihibahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 2. Anggaran Investasi (<i>Investing</i>) di mana di dalam Anggaran Investasi (<i>Investing</i>) tersebut terdapat Anggaran Penyertaan Modal (<i>Investment</i>) dan Anggaran Belanja Modal (<i>Capital Expenditure</i>); 3. Anggaran Biaya Operasional Usaha (<i>Operational Expenditure</i>); dan 4. Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan <i>Non-Farebox</i>, Pendapatan <i>Farebox</i>, dan Pendapatan Subsidi. Penyesuaian RKA Perseroan dalam rangka pemenuhan terhadap peraturan dan/atau perkembangan bisnis yang berdampak material, dilakukan oleh Perseroan berdasarkan tata kelola Perseroan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan peraturan perundang-undangan. Segala sumber dan penggunaan dana pada rincian RKA Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai lampiran keputusan RUPS ini akan dipertanggung jawabkan oleh pengurus Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku. Approved and ratified of Amendment to the Corporation's Work Plan and Budget (RKA) for the 2022 (two thousand twenty two) Financial Year which consists of the following budget: 1. The project budget originates from the JICA Loan Fund which is redistributed and granted by the Republic of Indonesia Government to the DKI Jakarta Provincial Government; 2. Investment Budget (<i>Investing</i>) where in the Investment Budget (<i>Investing</i>) there is an Investment Budget and Capital Expenditure Budget; 3. Business Operational Budget (<i>Operational Expenditure</i>); And 4. Income consisting of <i>Non-Farebox</i> Revenue, <i>Farebox</i> Revenue, and Subsidy Income. Adjustments to the Corporation's RKA in order to comply with regulations and/or business developments that have a material impact, are carried out by the Corporation based on the applicable corporate governance as long as they do not conflict with DKI Jakarta Provincial Government policies and statutory regulations. The dividends that are not taken after the lapse of 10 (ten) years will become the right of the Corporation.
Tindak Lanjut Follow-up	Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroan disingkat PT MRT Jakarta Perseroan Nomor 50 tanggal 30 Maret 2022. The resolution became effective immediately and it is drawn as Deed of Official Report of the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders' Resolutions of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroan also known as PT MRT Jakarta Perseroan Number 50 dated March 30, 2022.

Keputusan RUPS Tahunan dan Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2022 sebagaimana dimaksud di atas, telah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan Luar Biasa Nomor 50 tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., di Jakarta.

The Annual and Extraordinary GMS resolutions which were held on March 30, 2022 as referred to above, have been drawn as Deed of Official Report of the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders' Resolutions Number 50 dated March 30, 2022 passed before Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., in Jakarta.

RUPS LUAR BIASA TAHUN 2022

EXTRAORDINARY GMS YEAR 2022

Jenis RUPS Type of GMS	RUPS Luar Biasa Tahun 2022 Extraordinary GMS Year 2022
Tanggal Undangan Summons Date	23 November 2022 November 23, 2022
Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	7 Desember 2022 December 07, 2022
Tempat Place	Gedung Wisma Nusantara Lantai 22 Wisma Nusantara Building 22 nd Floor

RUPS Luar Biasa sebagaimana disebutkan diatas dihadiri oleh perwakilan Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

The Extraordinary GMS as mentioned above, was attended by the Shareholders' representatives, the Corporation's Board of Commissioners and Directors' members, with the following details:

Rekapitulasi Kehadiran RUPS Tahunan Tahun 2022
Recapitulation of Attendance at Annual GMS in 2022

No	Nama Name	Jabatan Position
1	Sri Haryati	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Economic and Finance Assistant for the Regional Secretary of DKI Jakarta Province
2	Tri Prasetyo	Direktur Utama Perumda Pasar Jaya President Director of Perumda Pasar Jaya
3	Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito	Notaris Notary Public
4	Dodik Wijanarko	Komisaris Utama President Commissioner
5	Bambang Kristiyono	Komisaris Commissioner
6	Rukijo	Komisaris Commissioner
7	William P. Sabandar	Komisaris Commissioner
8	Tuhyat	Direktur Utama President Director
9	Muhammad Effendi	Direktur Operasi dan Pemeliharaan Operations and Maintenance Director
10	Roy Rahendra	Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi Finance and Corporate Management Director
11	Farchad H. Mahfud	Direktur Pengembangan Bisnis Business Development Director
12	Silvia Halim	Direktur Konstruksi Construction Director

Adapun agenda, keputusan dan tindak lanjut dari keputusan RUPS Luar Biasa tersebut adalah sebagai berikut:

The agenda, resolutions and follow-up of the Extraordinary GMS are as follows:

Agenda 1 Agenda 1	Persetujuan dan Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perseroan Tahun Buku 2022 Approval and Ratification of Amendment to the Corporation's Work Plan and Budget (RKA) for the 2022 Financial Year
Keputusan Resolution	Menyetujui dan mengesahkan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sehingga menjadi sebagaimana terlampir dalam Lampiran keputusan Rapat ini, yang terdiri dari Anggaran dan Pendapatan sebagai berikut: 1. Anggaran Proyek yang bersumber dari Dana Penerusan Pinjaman JICA yang diteruskanpinjaman dan dihibahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 2. Anggaran <i>Capital Expenditure</i> dan Anggaran <i>Operational Expenditure</i>; 3. Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan <i>Non-Farebox</i>, Pendapatan <i>Farebox</i> dan Pendapatan Subsidi. Penyesuaian rincian RKA Perseroan sebagaimana terlampir dalam rangka pemenuhan terhadap peraturan dan/atau perkembangan bisnis, dilakukan oleh pengurus Perseroan berdasarkan tata kelola Perseroan yang berlaku sepanjang tidak melebihi jumlah total Anggaran sebagaimana disebutkan pada paragraf pertama di atas serta tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Segala sumber dan penggunaan dana pada rincian RKA Perseroan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai lampiran keputusan Rapat ini akan dipertanggungjawabkan oleh pengurus Perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Approved and ratified the Amendment to the Corporation's Work Plan and Budget (RKA) for the 2022 (two thousand and twenty two) Financial Year to become as attached in the Appendix of this Meeting's resolutions, which consist of the Budget and Revenue as follows: 1. The project budget originates from the JICA Loan Fund which is sustainably lent and granted by the Republic of Indonesia Government to the DKI Jakarta Provincial Government; 2. Capital Expenditure Budget and Operational Expenditure Budget; 3. Income consisting of Non-Farebox Revenue, Farebox Revenue and Subsidy Income. Adjustments to the details of the Corporation's RKA as attached in the context of complying with regulations and/or business developments, are carried out by the Corporation's management based on the applicable corporate governance as long as it does not exceed the total Budget as mentioned in the first paragraph above and does not conflict with the policies of the DKI Jakarta Provincial Government as well as the applicable laws and regulations. All sources and uses of funds in the details of the Corporation's RKA as attached which are an integral part as an attachment to this Meeting's resolutions will be accounted for by the Corporation's management in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
Tindak Lanjut Follow-up	Keputusan langsung berlaku dan tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan Luar Biasa PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroan disingkat PT MRT Jakarta Perseroan Nomor 11 tanggal 7 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., di Jakarta. The resolution became effective immediately and it is drawn as Deed of Official Report of the Extraordinary General Meeting of Shareholders' Resolutions of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroan also known as PT MRT Jakarta Perseroan Number 11 dated December 07, 2022 passed before Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., in Jakarta.



Agenda 2 Agenda 2	Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perseroan Tahun Buku 2023 Approval and Ratification of the Corporation's Work Plan and Budget (RKA) for the 2023 Financial Year
Keputusan Resolution	Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sehingga menjadi sebagaimana terlampir dalam Lampiran keputusan Rapat ini, yang terdiri dari Anggaran dan Pendapatan sebagai berikut: 1. Anggaran Proyek yang bersumber dari Dana Penerusan Pinjaman JICA yang diteruskanpinjaman dan dihibahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 2. Anggaran <i>Capital Expenditure</i> dan <i>Operational Expenditure</i>; 3. Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan <i>Non-Farebox</i>, Pendapatan <i>Farebox</i> dan Pendapatan Subsidi. Penyesuaian rincian RKA Perseroan sebagaimana terlampir dalam rangka pemenuhan terhadap peraturan dan/atau perkembangan bisnis, dilakukan oleh pengurus Perseroan berdasarkan tata kelola Perseroan yang berlaku sepanjang tidak melebihi jumlah total Anggaran sebagaimana disebutkan pada paragraf pertama di atas serta tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Segala sumber dan penggunaan dana pada rincian RKA Perseroan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai lampiran keputusan Rapat ini akan dipertanggungjawabkan oleh pengurus Perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Approved and ratified the Amendment to the Corporation's Work Plan and Budget (RKA) for the 2023 (two thousand and twenty three) Financial Year to become as attached in the Appendix of this Meeting's resolutions, which consist of the Budget and Revenue as follows: 1. The project budget originates from the JICA Loan Fund which is sustainably lent and granted by the Republic of Indonesia Government to the DKI Jakarta Provincial Government; 2. Capital Expenditure Budget and Operational Expenditure Budget; 3. Income consisting of Non-Farebox Revenue, Farebox Revenue and Subsidy Income. Adjustments to the details of the Corporation's RKA as attached in the context of complying with regulations and/or business developments, are carried out by the Corporation's management based on the applicable corporate governance as long as it does not exceed the total Budget as mentioned in the first paragraph above and does not conflict with the policies of the DKI Jakarta Provincial Government as well as the applicable laws and regulations. All sources and uses of funds in the details of the Corporation's RKA as attached which are an integral part as an attachment to this Meeting's resolutions will be accounted for by the Corporation's management in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
Tindak Lanjut Follow-up	Keputusan langsung berlaku dan tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan Luar Biasa PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda disingkat PT MRT Jakarta Perseroda Nomor 11 tanggal 7 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., di Jakarta. The resolution became effective immediately and it is drawn as Deed of Official Report of the Extraordinary General Meeting of Shareholders' Resolutions of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda also known as PT MRT Jakarta Perseroda Number 11 dated December 07, 2022 passed before Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., in Jakarta.
Agenda 3 Agenda 3	Persetujuan dan Pengesahan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan Approval and Ratification of the Corporation's additional Issued and Paid-Up Capital
Keputusan Resolution	• Menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan/saham dalam portepel sebesar sejumlah 1.617.420 (satu juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar saham kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi Modal Ditempatkan dan Disetor penuh dalam Perseroan. • Menyetujui dan mengesahkan peningkatan Modal Disetor dan Ditempatkan Perseroan dari sebelumnya Rp17.772.643.000.000,- (tujuh belas triliun tujuh ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta rupiah) menjadi Rp19.390.063.000.000 (sembilan belas triliun tiga ratus sembilan puluh miliar enam puluh tiga juta rupiah), dengan komposisi modal yang disetor oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.617.420.000.000 (satu triliun enam ratus tujuh belas miliar empat ratus dua puluh tiga juta rupiah), sesuai Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 516 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) Tahun Anggaran 2021. • Selanjutnya Para Pemegang Saham memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama - sama maupun secara sendiri - sendiri untuk menuangkan keputusan ini ke dalam suatu Akta Notaris, serta membuat perubahan yang diisyaratkan guna penyesuaian dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku. • Approved the issuance/placement of shares that are still in savings/shares in the portfolio in the amount of 1,617,420 (one million six hundred seventeen thousand four hundred and twenty) shares with a nominal value of Rp1,000,000 (one million rupiah) per share to DKI Jakarta Provincial Government to become Issued and fully paid up capital in the Company. • Approved and authorized the additional in the Corporation's Paid-up and Issued Capital from previously Rp17,772,643,000,000,- (seventeen trillion seven hundred seventy-two billion six hundred and forty-three million rupiah) to Rp19,390,063,000,000 (nineteen trillion three hundred and nine twenty billion sixty-three million rupiahs), with the composition of paid-up capital by the DKI Jakarta Provincial Government amounting to Rp. 1,617,420,000,000 (one trillion six hundred seventeen billion four hundred and twenty million rupiahs), according to the Jakarta Special Capital Region Governor Decree No. 516 Year 2022 concerning Regional Equity Participation in MRT Jakarta Limited Liability Companies (Regional Companies) for the 2021 Financial Year. • Furthermore, the Shareholders granted power of attorney with substitution rights to the Corporation's Board of Directors, both jointly and severally, to put this resolution into a Notary Deed, and make the required amendment in order to comply with the legal provisions and statutory regulations applied.
Tindak Lanjut Follow-up	Keputusan langsung berlaku dan tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan Luar Biasa PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda disingkat PT MRT Jakarta Perseroda Nomor 11 tanggal 7 Desember 2022 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda disingkat MRT Jakarta Perseroda sebagaimana dibuktikan dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0001351 tanggal 4 Januari 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda, yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., di Jakarta. The resolution became effective immediately and it is drawn as Deed of Statement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders' Resolutions of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda also known as MRT Jakarta Perseroda Number 11 dated December 07, 2022 and the Deed of Statement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders' Resolutions of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda also known as MRT Jakarta Perseroda and It has been reported as stated by the Republic of Indonesia Law and Human Rights Minister Letter Number AHU-AH.01.03-0001351 dated January 04, 2023 regarding the Reception of the Notice on the Amendments of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda's Articles of Association, both of which were passed before Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., in Jakarta.

KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TANGGAL 22 JULI 2022

Adapun keputusan dan tindak lanjut dari KPPS Tanggal 22 Juli 2022 adalah sebagai berikut:

SHAREHOLDERS' RESOLUTIONS OUTSIDE THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ON JULY 22, 2022

The resolutions and follow-ups from the Shareholders' Resolutions Outside the GMS on July 22, 2022 are as follows:

Keputusan dan tindak lanjut dari KPPS Tanggal 22 Juli 2022

The resolutions and follow-ups from the Shareholders' Resolutions Outside the GMS on July 22, 2022

No	Keputusan Resolution	Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow-up
1	Penegasan pemberhentian dengan hormat Sdr. Zulfikri selaku Komisaris terhitung sejak tanggal berakhirnya masa jabatan berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 5 Juli 2018, yaitu pada tanggal 4 Mei 2022 dan menyampaikan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianya selama menjabat sebagai Komisaris yang telah dijalankan. Confirmation of dismissal with respect Mr. Zulfikri as Commissioner as of his term of office ended based on Deed Number 19 dated July 05, 2018, namely on May 04, 2022 and expressed gratitude and highest appreciation for his service while serving as Commissioner.	Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Mass Rapid Transit Jakarta Persero Nomor 100 Tanggal 29 Juli 2022 dan telah diberitahukan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0038690 tanggal 29 Juli 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mass Rapid Transit Jakarta Persero. The resolution became effective immediately and it is drawn in the Deed of Statement of the Shareholders' Resolutions Without the General Meeting of Shareholders of PT Mass Rapid Transit Jakarta Persero Number 100 July 29, 2022 and It has been reported as stated by the Republic of Indonesia Law and Human Rights Minister Letter Number AHU-AH.01.09-0038690 dated July 29, 2022 regarding the Reception of the Notice on the Amendments in Corporation Data of PT Mass Rapid Transit Jakarta Persero.
2	Memberhentikan dengan hormat Sdr. William P. Sabandar selaku Direktur Utama terhitung sejak tanggal terakhir ditandatangani Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham ini dan menyampaikan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianya selama menjabat sebagai Direktur Utama yang telah dijalankan. Respectfully dismissed Mr. William P. Sabandar as the President Director as of the last date the Shareholders Resolutions Without the General Meeting of Shareholders were signed and expressed highest gratitude and appreciation for his service while serving as the President Director.	Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Mass Rapid Transit Jakarta Persero Nomor 100 Tanggal 29 Juli 2022 dan telah diberitahukan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0038690 tanggal 29 Juli 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mass Rapid Transit Jakarta Persero. The resolution became effective immediately and it is drawn in the Deed of Statement of the Shareholders' Resolutions Without the General Meeting of Shareholders of PT Mass Rapid Transit Jakarta Persero Number 100 July 29, 2022 and It has been reported as stated by the Republic of Indonesia Law and Human Rights Minister Letter Number AHU-AH.01.09-0038690 dated July 29, 2022 regarding the Reception of the Notice on the Amendments in Corporation Data of PT Mass Rapid Transit Jakarta Persero.
3	Mengangkat Sdr. M. Aprindy sebagai, Direktur Utama dengan masa jabatan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan terhitung sejak tanggal terakhir ditandatangani Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan sebelum masa jabatan berakhir. Appointed Mr. M. Aprindy as, President Director with the term of office in accordance with the Corporation's articles of association commencing from the last date of the Shareholders' Resolution Without the General Meeting of Shareholders was signed, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time prior to the term of office ends.	Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Mass Rapid Transit Jakarta Persero Nomor 100 Tanggal 29 Juli 2022 dan telah diberitahukan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0038690 tanggal 29 Juli 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mass Rapid Transit Jakarta Persero. The resolution became effective immediately and it is drawn in the Deed of Statement of the Shareholders' Resolutions Without the General Meeting of Shareholders of PT Mass Rapid Transit Jakarta Persero Number 100 July 29, 2022 and It has been reported as stated by the Republic of Indonesia Law and Human Rights Minister Letter Number AHU-AH.01.09-0038690 dated July 29, 2022 regarding the Reception of the Notice on the Amendments in Corporation Data of PT Mass Rapid Transit Jakarta Persero.
4	Dengan dilakukan pemberhentian dan pengangkatan tersebut di atas, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: a. Dewan Komisaris Komisaris Utama: Sdr. Muhammad Syaugi Komisaris: Sdr. Rukijo Komisaris: Sdr. Mukhtasor Komisaris: Sdr. Adnan Pandu Praja b. Direksi Direktur Utama: Sdr. M. Aprindy Direktur Konstruksi: Sdr. Silvia Halim Direktur Operasional & Pemeliharaan: Sdr. Muhammad Effendi Direktur Keuangan & Manajemen Korporasi: Sdr. Roy Rahendra Direktur Pengembangan Bisnis: Sdr. Farchad H. Mahfud With the dismissal and appointment mentioned above, the Corporation's management composition becomes as follows: a. Board of Commissioners President Commissioner: Mr. Muhammad Syaugi Commissioner: Mr. Rukijo Commissioner: Mr. Mukhtasor Commissioner: Mr. Adnan Pandu Praja b. Board of Directors President Director: Mr. M. Aprindy Construction Director: Ms. Silvia Halim Operations & Maintenance Director: Mr. Muhammad Effendi Finance & Corporate Management Director: Mr. Roy Rahendra Business Development Director: Mr. Farchad H. Mahfud	Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Mass Rapid Transit Jakarta Persero Nomor 100 Tanggal 29 Juli 2022 dan telah diberitahukan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0038690 tanggal 29 Juli 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mass Rapid Transit Jakarta Persero. The resolution became effective immediately and it is drawn in the Deed of Statement of the Shareholders' Resolutions Without the General Meeting of Shareholders of PT Mass Rapid Transit Jakarta Persero Number 100 July 29, 2022 and It has been reported as stated by the Republic of Indonesia Law and Human Rights Minister Letter Number AHU-AH.01.09-0038690 dated July 29, 2022 regarding the Reception of the Notice on the Amendments in Corporation Data of PT Mass Rapid Transit Jakarta Persero.

Keputusan dan tindak lanjut dari KPPS Tanggal 22 Juli 2022

The resolutions and follow-ups from the Shareholders' Resolutions Outside the GMS on July 22, 2022

No	Keputusan Resolution	Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow-up
5	Selanjutnya para pemegang saham memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menuangkan Keputusan para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham ini ke dalam suatu Akta Notaris, serta membuat perubahan yang disyaratkan guna penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Furthermore, the shareholders granted power of attorney with substitution rights to the Corporation's Board of Directors, both jointly and severally, to write down the Shareholders' Resolutions without this General Meeting of Shareholders into a Notary Deed, as well as form the necessary amendment in accordance with the prevailing laws and regulations.	Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroada Nomor 100 Tanggal 29 Juli 2022 dan telah diberitahukan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0038690 tanggal 29 Juli 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroada. The resolution became effective immediately and it is drawn in the Deed of Statement of the Shareholders' Resolutions Without the General Meeting of Shareholders of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroada Number 100 July 29, 2022 and It has been reported as stated by the Republic of Indonesia Law and Human Rights Minister Letter Number AHU-AH.01.09-0038690 dated July 29, 2022 regarding the Reception of the Notice on the Amendments in Corporation Data of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroada.



KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TANGGAL 25 OKTOBER 2022

Adapun keputusan dan tindak lanjut dari KPPS Tanggal 25 Oktober 2022 adalah sebagai berikut:

SHAREHOLDERS' RESOLUTIONS OUTSIDE THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ON OCTOBER 25, 2022

The resolutions and follow-ups from the Shareholders' Resolution Outside GMS on October 25, 2022 are as follows:

Keputusan dan Tindak Lanjut dari KPPS Tanggal 25 Oktober 2022

The Resolutions and Follow-ups from the Shareholders' Resolutions Outside the GMS on October 25, 2022

No	Keputusan Resolution	Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow-up
1	Memberhentikan dengan hormat: - Sdr. Muhammad Syaugi sebagai Komisaris Utama; - Sdr. Adnan Pandu Praja sebagai Komisaris; - Sdr. Mukhtasor sebagai Komisaris; dan - Sdr. M. Aprindy sebagai Direktur Utama, terhitung sejak tanggal terakhir ditandatangani Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham ini dan menyampaikan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianya selama menjabat sebagai pengurus PT MRT Jakarta (Persero) yang telah dijalankan. Dismissed with honor: - Mr. Muhammad Syaugi as President Commissioner; - Mr. Adnan Pandu Praja as Commissioner; - Mr. Mukhtasor as Commissioner; And - Mr. M. Aprindy as President Director, as of the last date the Shareholders' Resolution Without the General Meeting of Shareholders was signed and expressed gratitude and highest appreciation for their dedication while serving as the management of PT MRT Jakarta (Persero).	Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Umum Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Mass Rapid Transit Jakarta Persero Nomor 51 Tanggal 28 Oktober 2022 dan telah diberitahukan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0071217 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mass Rapid Transit Jakarta Persero. The resolution became effective immediately and it is drawn in the Deed of Statement of the Shareholders' Resolutions Without the General Meeting of Shareholders of PT Mass Rapid Transit Jakarta Persero Number 51 dated October 28, 2022 and It has been reported as stated by the Republic of Indonesia Law and Human Rights Minister Letter Number AHU-AH.01.09-0071217 dated October 31, 2022 regarding the Reception of the Notice on the Amendments in Corporation Data of PT Mass Rapid Transit Jakarta Persero.
2	Mengangkat: - Sdr. Dodik Wijanarko sebagai Komisaris Utama; - Sdr. Bambang Kristiyono sebagai Komisaris; - Sdr. William P. Sabandar sebagai Komisaris; dan - Sdr. Tuhayat sebagai Direktur Utama, dengan masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan terhitung sejak tanggal terakhir ditandatangani Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan sebelum masa jabatan berakhir. Appointed: - Mr. Dodik Wijanarko as President Commissioner; - Mr. Bambang Kristiyono as Commissioner; - Mr. William P. Sabandar as Commissioner; and - Mr. Tuhayat as President Director, With the term of office in accordance with the Corporation's Articles of Association commencing from the last date of the Shareholders' Resolution Without this General Meeting of Shareholders was signed, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time prior to the term of office ends.	Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Umum Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Mass Rapid Transit Jakarta Persero Nomor 51 Tanggal 28 Oktober 2022 dan telah diberitahukan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0071217 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mass Rapid Transit Jakarta Persero. The resolution became effective immediately and it is drawn in the Deed of Statement of the Shareholders' Resolutions Without the General Meeting of Shareholders of PT Mass Rapid Transit Jakarta Persero Number 51 dated October 28, 2022 and It has been reported as stated by the Republic of Indonesia Law and Human Rights Minister Letter Number AHU-AH.01.09-0071217 dated October 31, 2022 regarding the Reception of the Notice on the Amendments in Corporation Data of PT Mass Rapid Transit Jakarta Persero.





Keputusan dan Tindak Lanjut dari KPPS Tanggal 25 Oktober 2022

The Resolutions and Follow-ups from the Shareholders' Resolutions Outside the GMS on October 25, 2022

No	Keputusan Resolution	Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow-up
3	Dengan dilakukan pemberhentian dan pengangkatan tersebut di atas, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: a. Dewan Komisaris Komisaris Utama: Sdr. Dodik Wijanarko Komisaris: Sdr. Bambang Kristiyono Komisaris: Sdr. Rukijo Komisaris: Sdr. William P. Sabandar Komisaris: - b. Direksi Direktur Utama: Sdr. Tuhayat Direktur Konstruksi: Sdr. Silvia Halim Direktur Operasional & Pemeliharaan: Sdr. Muhammad Effendi Direktur Keuangan & Manajemen Korporasi: Sdr. Roy Rahendra Direktur Pengembangan Bisnis: Sdr. Farchad H. Mahfud With the dismissal and appointment mentioned above, the Corporation's management composition becomes as follows: a. Board of Commissioners President Commissioner: Mr. Dodik Wijanarko Commissioner: Mr. Bambang Kristiyono Commissioner: Mr. Rukijo Commissioner: Mr. William P. Sabandar Commissioner: - b. Board of Directors President Director: Mr. Tuhayat Construction Director: Ms. Silvia Halim Operations & Maintenance Director: Mr. Muhammad Effendi Finance & Corporate Management Director: Mr. Roy Rahendra Business Development Director: Mr. Farchad H. Mahfud	Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Umum Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda Nomor 51 Tanggal 28 Oktober 2022 dan telah diberitahukan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0071217 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda. The resolution became effective immediately and it is drawn in the Deed of Statement of the Shareholders' Resolutions Without the General Meeting of Shareholders of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda Number 51 dated October 28, 2022 and It has been reported as stated by the Republic of Indonesia Law and Human Rights Minister Letter Number AHU-AH.01.09-0071217 dated October 31, 2022 regarding the Reception of the Notice on the Amendments in Corporation Data of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda.
4	Selanjutnya para pemegang saham memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menuangkan Keputusan para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham ini ke dalam suatu Akta Notaris, serta membuat perubahan yang disyaratkan guna penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Furthermore, the shareholders granted power of attorney with substitution rights to the Corporation's Board of Directors, both jointly and severally, to write down the Shareholders' Resolutions without this General Meeting of Shareholders into a Notary Deed, as well as form the necessary amendment in accordance with the prevailing laws and regulations.	Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Umum Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda Nomor 51 Tanggal 28 Oktober 2022 dan telah diberitahukan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0071217 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda. The resolution became effective immediately and it is drawn in the Deed of Statement of the Shareholders' Resolutions Without the General Meeting of Shareholders of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda Number 51 dated October 28, 2022 and It has been reported as stated by the Republic of Indonesia Law and Human Rights Minister Letter Number AHU-AH.01.09-0071217 dated October 31, 2022 regarding the Reception of the Notice on the Amendments in Corporation Data of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda.

PELAKSANAAN KEPUTUSAN RUPS TAHUN SEBELUMNYA

Pada Tahun 2021, Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan sebanyak 1 kali dan RUPS Lainnya sebanyak 2 kali, selain dari itu terdapat pula Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham sebanyak 2 kali, dengan rincian sebagai berikut:

IMPLEMENTATION OF THE PREVIOUS YEAR'S GMS RESOLUTIONS

In 2021, the Corporation held 1 Annual GMS and 2 EGMS. There were also 2 Shareholders' Resolutions Outside the General Meeting of Shareholders, with details as follows:

Pelaksanaan Keputusan RUPS Tahun 2021

Resolutions of Implementation the GMS in 2021

No	Jenis RUPS Type of GMS	Waktu Date
1	Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS Shareholders' Resolution without GMS	5 Februari 2021 February 05, 2021
2	RUPS Tahunan Annual GMS	31 Maret 2021 March 31, 2021
3	RUPS Luar Biasa Extraordinary GMS	31 Maret 2021 March 31, 2021
4	Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS Shareholders' Resolution Outside GMS	13 Agustus 2021 August 13, 2021
5	RUPS Luar Biasa Extraordinary GMS	30 November 2021 November 30, 2021

Adapun keputusan dan realisasi serta tindak lanjut dari keputusan RUPS tersebut adalah sebagai berikut:

KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TANGGAL 5 FEBRUARI 2021

Adapun keputusan dan tindak lanjut dari Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat umum Pemegang Saham tersebut adalah sebagai berikut:

The resolutions and realization as well as follow-up of the GMS resolutions are as follows:

SHAREHOLDERS RESOLUTIONS OUTSIDE THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ON FEBRUARY 05, 2021

The resolutions and follow-up of the shareholders' resolutions outside the general meeting of shareholders are as follows:

Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal 5 Februari 2021 Shareholders Resolutions Outside The General Meeting of Shareholders on February 05, 2021

No	Keputusan Resolution	Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow-up
1	Mengangkat Sdr. Farchad H. Mahfud sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dengan masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan terhitung sejak tanggal terakhir ditandatangani Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham ini, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir Appointed Mr. Farchad H. Mahfud as Business Development Director with the term of office in accordance with the Corporation's Articles of Association commencing from the last date of the Shareholders' Resolution without this General Meeting of Shareholders was signed, without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time prior the term of office ends.	Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda disingkat MRT Jakarta Perseroda Nomor 47 Tanggal 27 Februari 2021 dan telah diberitahukan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0139810 tanggal 4 Maret 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda. The resolution became effective immediately and it is drawn in the Deed of Statement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders' Resolutions of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda Number 47 dated February 27, 2021 and It has been reported as stated by the Republic of Indonesia Law and Human Rights Minister Letter Number AHU-AH.01.03-0139810 dated March 04, 2021 regarding the Reception of the Notice on the Amendments in Corporation Data of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda.
2	Dengan dilakukan pemberhentian dan pengangkatan tersebut di atas, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: a. Dewan Komisaris Komisaris Utama: Sdr. Muhammad Syaugi Komisaris: Sdr. Rukijo Komisaris: Sdr. Adnan Pandu Praja Komisaris: Sdr. Mukhtasor Komisaris: Sdr. Zulfikri b. Direksi Direktur Utama: Sdr. William P. Sabandar Direktur Konstruksi: Sdr. Silvia Halim Direktur Operasional & Pemeliharaan: Sdr. Muhammad Effendi Direktur Keuangan & Manajemen Korporasi: Sdr. Roy Rahendra Direktur Pengembangan Bisnis: Sdr. Farchad H. Mahfud With the dismissal and appointment mentioned above, the Corporation's management composition becomes as follows: a. Board of Commissioners President Commissioner: Mr. Muhammad Syaugi Commissioner: Mr. Rukijo Commissioner: Mr. Adnan Pandu Praja Commissioner: Mr. Mukhtasor Commissioner: Mr. Zulfikri b. Board of Directors President Director: Mr. William P. Sabandar Construction Director: Ms. Silvia Halim Operations & Maintenance Director: Mr. Muhammad Effendi Finance & Corporate Management Director: Mr. Roy Rahendra Business Development Director: Mr. Farchad H. Mahfud	Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda disingkat MRT Jakarta Perseroda Nomor 47 Tanggal 27 Februari 2021 dan telah diberitahukan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0139810 tanggal 4 Maret 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda. The resolution became effective immediately and it is drawn in the Deed of Statement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders' Resolutions of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda Number 47 dated February 27, 2021 and It has been reported as stated by the Republic of Indonesia Law and Human Rights Minister Letter Number AHU-AH.01.03-0139810 dated March 04, 2021 regarding the Reception of the Notice on the Amendments in Corporation Data of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda.
3	Selanjutnya Para Pemegang Saham memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menuangkan Keputusan para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham ini ke dalam suatu Akta Notaris, serta membuat perubahan yang disyaratkan guna penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Furthermore, the shareholders granted power of attorney with substitution rights to the Corporation's Board of Directors, both jointly and severally, to write down the Shareholders' Resolutions without this General Meeting of Shareholders into a Notary Deed, as well as form the necessary amendment in accordance with the prevailing laws and regulations.	Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda disingkat MRT Jakarta Perseroda Nomor 47 Tanggal 27 Februari 2021 dan telah diberitahukan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0139810 tanggal 4 Maret 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda. The resolution became effective immediately and it is drawn in the Deed of Statement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders' Resolutions of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda Number 47 dated February 27, 2021 and It has been reported as stated by the Republic of Indonesia Law and Human Rights Minister Letter Number AHU-AH.01.03-0139810 dated March 04, 2021 regarding the Reception of the Notice on the Amendments in Corporation Data of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda.



RUPS TAHUNAN TANGGAL 31 MARET 2021

ANNUAL GMS ON MARCH 31, 2021

Agenda 1 Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020. Approval of the Corporation's Annual Report and the Board of Commissioners' Supervisory Duties Implementation Report for the 2020 Financial Year.
Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow-up	Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroan disingkat MRT Jakarta Perseroan Nomor 69 Tanggal 31 Maret 2021. The resolution became effective immediately and it is drawn as Deed of Official Report of the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroan also known as MRT Jakarta Perseroan Number 69 dated March 31, 2021.
Agenda 2 Agenda 2	Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020. Ratification of the Corporation's Financial Statements for the 2020 Financial Year.
Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow-up	Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroan disingkat MRT Jakarta Perseroan Nomor 69 Tanggal 31 Maret 2021. The resolution became effective immediately and it is drawn as Deed of Official Report of the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroan also known as MRT Jakarta Perseroan Number 69 dated March 31, 2021.
Agenda 3 Agenda 3	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the 2021 Financial Statements.
Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow-up	Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroan disingkat MRT Jakarta Perseroan Nomor 69 Tanggal 31 Maret 2021. The resolution became effective immediately and it is drawn as Deed of Official Report of the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroan also known as MRT Jakarta Perseroan Number 69 dated March 31, 2021.
Agenda 4 Agenda 4	Penetapan Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 dan Insentif Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020. Determination of Directors' Salaries and Board of Commissioners Honorarium for the 2021 Financial Year and Performance Incentives for Directors and Board of Commissioners for the 2020 Financial Year.
Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow-up	Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroan disingkat MRT Jakarta Perseroan Nomor 69 Tanggal 31 Maret 2021. The resolution became effective immediately and it is drawn as Deed of Official Report of the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroan also known as MRT Jakarta Perseroan Number 69 dated March 31, 2021.

RUPS LUAR BIASA TANGGAL 31 MARET 2021

EXTRAORDINARY GMS ON MARCH 31, 2021

Agenda 1 Agenda 1	Persetujuan dan Pengesahan Perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan. Approval and Ratification of Amendments to Article 3 of the Corporation's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives as well as the Corporation's Business Activities.
Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow-up	Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroan disingkat MRT Jakarta Perseroan Nomor 69 Tanggal 31 Maret 2021 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroan disingkat MRT Jakarta Perseroan Nomor 34 Tanggal 27 April 2021 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-00026769.AH.01.02.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroan tanggal 30 April 2021. The resolution became effective immediately and it is drawn in the Deed of Official Report of the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroan also known as MRT Jakarta Perseroan Number 69 dated March 31, 2021 and the Deed of Statement of the General Meeting of Shareholders' Resolutions of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroan also known as MRT Jakarta Perseroan Number 34 dated April 27, 2021 and has been acknowledged by the Republic of Indonesia Law and Human Rights Minister Decree Number AHU-00026769.AH.01.02. YEAR 2021 regarding Approval of Amendments to the Articles of Association of Limited Liability Company PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroan dated April 30, 2021.
Agenda 2 Agenda 2	Persetujuan dan Pengesahan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran RKA Perseroan Tahun Buku 2021. Approval and Ratification of Amendments to the Corporation's Work Plan and Budget (RKA) for the 2021 Financial Year.
Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow-up	Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroan disingkat MRT Jakarta Perseroan Nomor 69 Tanggal 31 Maret 2021 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroan disingkat MRT Jakarta Perseroan Nomor 34 Tanggal 27 April 2021 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-00026769.AH.01.02.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroan tanggal 30 April 2021. The resolution became effective immediately and it is drawn in the Deed of Official Report of the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroan also known as MRT Jakarta Perseroan Number 69 dated March 31, 2021 and the Deed of Statement of the General Meeting of Shareholders' Resolutions of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroan also known as MRT Jakarta Perseroan Number 34 dated April 27, 2021 and has been acknowledged by the Republic of Indonesia Law and Human Rights Minister Decree Number AHU-00026769.AH.01.02. YEAR 2021 regarding Approval of Amendments to the Articles of Association of Limited Liability Company PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroan dated April 30, 2021.

Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal 13 Agustus 2021
Shareholders' Resolutions Without the General Meeting of Shareholders on August 13, 2021

No	Keputusan Resolution	Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow-up
1	Persetujuan Prinsip kepada Perseroan untuk menunjuk PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek sebagai perusahaan patungan Perseroan yang dibentuk bersama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang antara lain bergerak di bidang pengelolaan transportasi perkeretaapian terintegrasi dan <i>Transit-Oriented Development</i> (TOD) di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek), untuk melaksanakan penugasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait kerja sama pendayagunaan ekuitas dengan membentuk suatu badan usaha dengan BUMD dan BUMN yang bergerak di bidang usaha pariwisata dalam pengelolaan Kawasan Kota Tua. Adapun terkait pembiayaan yang dibutuhkan oleh Perseroan sehubungan dengan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat ini, akan dibahas dan diputuskan di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dan tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata kelola perusahaan yang baik. Agreement in principle to the Corporation to appoint PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek as a joint venture of the Corporation and PT Kereta Api Indonesia (Persero) whose business line is integrated railway transportation management and Transit-Oriented Development (TOD) in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Greater Jakarta Area), in carrying out the assignment from the Government of DKI Jakarta Province concerning the collaboration of equity empowerment by establishing a business entity that involves an ROE and SOE to carry out business in travel sector to manage Kota Tua Area. The financing required by the Corporation concerning the principle agreement as referred to in this sentence will be discussed and the resolutions will be made in line with the mechanism according to the prevailing laws and regulations and good corporate governance principles.	Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda Nomor 02 Tanggal 02 September 2021. Sebagaimana dibuktikan dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0445164 tanggal 07 September 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda. The resolution became effective immediately and it is drawn as Deed of Statement of the General Meeting of Shareholders' Resolutions of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda Number 2 dated September 02, 2021. It has been reported as stated by the Republic of Indonesia Law and Human Rights Minister Letter Number AHU-AH.01.03-0445164 dated September 7, 2021 regarding the Reception of the Notice on the Amendment to the Articles of Association of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda.
2	Penerbitan saham baru sejumlah 1.433.474 (satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per saham kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengkonversi setoran modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi Modal Ditempatkan dan Disetor penuh dalam Perseroan. Issuance of 1,433,474 (one million four hundred and thirty-three thousand four hundred and seventy-four) new shares with the value of Rp1,000,000 (one million rupiah) per share to the Government of DKI Jakarta Province in order to convert the capital paid by the Government of DKI Jakarta Province to be Issued and Paid-Up Capital of the Corporation	Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda Nomor 02 Tanggal 02 September 2021. Sebagaimana dibuktikan dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0445164 tanggal 07 September 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda. The resolution became effective immediately and it is drawn as Deed of Statement of the General Meeting of Shareholders' Resolutions of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda Number 2 dated September 02, 2021. It has been reported as stated by the Republic of Indonesia Law and Human Rights Minister Letter Number AHU-AH.01.03-0445164 dated September 7, 2021 regarding the Reception of the Notice on the Amendment to the Articles of Association of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda.
3	Menyetujui dan mengesahkan peningkatan Modal Disetor dan Ditempatkan Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp16.339.169.000.000 (enam belas triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar seratus enam puluh sembilan juta Rupiah) menjadi Rp17.772.643.000 (tujuh belas triliun tujuh puluh dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan komposisi modal yang disetor oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.433.474.489.993 (satu triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga Rupiah), sesuai Keputusan Gubernur Nomor 900 Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) tentang Penyerahan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) Tahun Anggaran 2020 (dua ribu dua puluh). Approval and ratification of additional Issued and Paid Up Capital from Rp16,339,169,000,000 (sixteen trillion three hundred and thirty-nine billion one hundred and sixty-nine million rupiah) to be Rp17,772,643,000,000 (seventeen trillion seven hundred and seventy-two billion six hundred and forty-three million rupiah), following the Governor Decree Number 900 Year 2021 concerning Capital Investment on Limited Liability Company MRT Jakarta (Regionally-Owned Enterprise) in 2020 Financial Year.	Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda Nomor 02 Tanggal 02 September 2021. Sebagaimana dibuktikan dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0445164 tanggal 07 September 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda. The resolution became effective immediately and it is drawn as Deed of Statement of the General Meeting of Shareholders' Resolutions of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda Number 2 dated September 02, 2021. It has been reported as stated by the Republic of Indonesia Law and Human Rights Minister Letter Number AHU-AH.01.03-0445164 dated September 7, 2021 regarding the Reception of the Notice on the Amendment to the Articles of Association of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda.
4	Selanjutnya para pemegang saham memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menuangkan Keputusan para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham ini ke dalam suatu Akta Notaris, serta membuat perubahan yang disyaratkan guna penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Then the shareholders approve to authorize the substitution rights to the Corporation's Board of Directors, jointly or severally, to state the Shareholders' Resolutions without the General Meeting of Shareholder in a Notary Deed, and to make the necessary amendments in accordance with the prevailing laws and regulations.	Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda Nomor 02 Tanggal 02 September 2021. Sebagaimana dibuktikan dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0445164 tanggal 07 September 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda. The resolution became effective immediately and it is drawn as Deed of Statement of the General Meeting of Shareholders' Resolutions of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda Number 2 dated September 02, 2021. It has been reported as stated by the Republic of Indonesia Law and Human Rights Minister Letter Number AHU-AH.01.03-0445164 dated September 7, 2021 regarding the Reception of the Notice on the Amendment to the Articles of Association of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda.



RUPS LUAR BIASA TANGGAL 30 NOVEMBER 2021

EXTRAORDINARY GMS ON NOVEMBER 30, 2021

Agenda 1 Agenda 1	Persetujuan dan Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) 2022-2030 dan Rencana Bisnis Perusahaan (RBP) 2022-2026 Perseroan. Approval and Ratification of the Corporation's 2022-2030 Long Term Plan (RJPP) and 2022-2026 Corporate Business Plan (RBP).
Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow-up	Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda disingkat PT MRT Jakarta Perseroda Nomor 25 tanggal 30 November 2021. The resolution became effective immediately and it is drawn as Deed of Official Report of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda Number 25 dated November 30, 2021.
Agenda 2 Agenda 2	Persetujuan Pelaksanaan Kerja Sama Pendayagunaan Ekuitas dalam Rangka Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Ekosistem Badan Usaha Milik Daerah. Approval of Collaboration for Equity Empowerment for Human Capital Competency Development in the ecosystem of Regionally-Owned Enterprises.
Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow-up	Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda disingkat PT MRT Jakarta Perseroda Nomor 25 tanggal 30 November 2021. The resolution became effective immediately and it is drawn as Deed of Official Report of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda Number 25 dated November 30, 2021.
Agenda 3 Agenda 3	Persetujuan Pengambilalihan 51% (lima puluh satu persen) saham milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada PT Kereta Commuter Indonesia. Approval of 51% (fifty-one percent) share takeover of PT Kereta Api Indonesia (Persero) by PT Kereta Commuter Indonesia.
Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow-up	Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda disingkat PT MRT Jakarta Perseroda Nomor 25 tanggal 30 November 2021. The resolution became effective immediately and it is drawn as Deed of Official Report of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda Number 25 dated November 30, 2021.
Agenda 4 Agenda 4	Persetujuan dan Pengesahan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). Approval and Ratification of Amendment to Corporate Work Plan and Budget (RKA) of the 2021 Financial Year.
Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow-up	Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda disingkat PT MRT Jakarta Perseroda Nomor 25 tanggal 30 November 2021. The resolution became effective immediately and it is drawn as Deed of Official Report of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda Number 25 dated November 30, 2021.
Agenda 5 Agenda 5	Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). Approval and Ratification of the Corporation's Work Plan and Budget (RKA) for the 2022 (two thousand and twenty two) Financial Year.
Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow-up	Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda disingkat PT MRT Jakarta Perseroda Nomor 25 tanggal 30 November 2021. The resolution became effective immediately and it is drawn as Deed of Official Report of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda Number 25 dated November 30, 2021.
Agenda 6 Agenda 6	Persetujuan dan Pengesahan Perubahan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar terkait Penambahan dan Pengurangan Kegiatan Usaha Perseroan. Approval and Ratification of Amendments to Article 3 paragraph (2) of the Articles of Association regarding the Addition and Reduction of the Corporation's Business Activities.
Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow-up	Keputusan langsung berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda disingkat PT MRT Jakarta Perseroda Nomor 25 tanggal 30 November 2021 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda disingkat PT MRT Jakarta Perseroda Nomor 41 Tanggal 22 Desember 2021 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0075295.AH.01.02.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda tanggal 27 Desember 2021. The resolution became effective immediately and it is drawn as Deed of Official Report of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda Number 25 dated November 30, 2021 and the Deed of Statement of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda also known as MRT Jakarta Perseroda Number 41 December 22, 2021 and it has been received approval from the Republic of Indonesia Law and Human Rights Minister based on Decree Number AHU-0075295.AH.01.02.TAHUN 2021 regarding Approval of Amendment to the Articles of Association of Limited Liability Company PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda dated December 27, 2021.





Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas mengawasi pengelolaan Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi jika dipandang perlu demi kepentingan Perseroan. Selain itu, Dewan Komisaris juga diharapkan mampu melakukan pemantauan atas pelaksanaan dan efektivitas penerapan GCG termasuk di dalamnya memberikan saran konstruktif untuk penyempurnaan implementasi GCG oleh Perseroan.

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga telah menyusun Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi atau *Board Manual*, yang ditetapkan Perseroan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT MRT Jakarta (Perseroda) No. SK/010/BOC-MRT/XII/2020, dan No.SK/066/BOD-MRT/XII/2020, tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi selengkapnya dapat diakses di laman PPID MRT Jakarta melalui tautan <https://ppid.jakartamrt.co.id/informasi-berkala/>.

JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2022, komposisi Dewan Komisaris Perseroan mengalami perubahan sesuai keputusan Pemegang Saham. Pada akhir tahun 2022, jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah 4 (empat) orang, berkurang dibandingkan dengan akhir tahun 2021 yang sebanyak 5 (lima) orang. Meskipun demikian, kekosongan satu anggota Dewan Komisaris tidak mempengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris.

Board of Commissioners is the organ with supervisory duties on the Corporation's management and provide advice to the Directors if deemed necessary in the interests of the Corporation. The Board of Commissioners is also expected to conduct monitoring on the implementation and effectiveness of the GCG, including providing constructive suggestions for the GCG implementation improvement by the Corporation.

BOARD OF COMMISSIONERS' BOARD MANUAL

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners refers to the prevailing laws and regulations. In addition, the Corporation has also prepared the Board of Commissioners and Directors Guidelines or Board Manual, which was determined by the Corporation through the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT MRT Jakarta (Perseroda) No.SK/010/ BOC-MRT/XII/2020 and No.SK/066/ BOD-MRT/XII/2020 concerning Board Manual.

The Board Manual is accessible at: <https://ppid.jakartamrt.co.id/informasi-berkala/>

BOARD OF COMMISSIONERS' TOTAL AND COMPOSITION

In 2022, the Corporation's Board of Commissioners' composition has changed according to the Shareholders' resolution. At the end of 2022, total members of the Corporation's Board of Commissioners consisted of 4 (four) members, reduced compared to the end of 2021 which consisted of 5 (five) members. Nonetheless, this vacancy of one member of the Board of Commissioners has no affect to the effectiveness of the Board of Commissioners' supervisory duties.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap pengelolaan Perseroan yang dijalankan Direksi.

The Board of Commissioners carries out active supervision of the management of the Corporation carried out by the Board of Directors.

Adapun komposisi Dewan Komisaris Perseroan sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

The Corporation's Board of Commissioners' Composition throughout year 2022 is as follows:

Komposisi Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2022
The Corporation's Board of Commissioners' Composition in 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Dodik Wijanarko	Komisaris Utama President Commissioner	Akta No. 51 tanggal 28 Oktober 2022, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Deed No. 51 dated October 28, 2022, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.	25 Oktober 2022 - sekarang October 25, 2022 - present
Rukijo	Komisaris Commissioner	- Akta No. 1 Tanggal 19 Agustus 2015, Notaris Miki Tanumiharja, S.H. - Akta No. 21 tanggal 12 November 2020, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. - Deed No. 1 dated August 19, 2015, Notary Miki Tanumiharja, S.H. - Deed No. 21 November 12, 2020, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.	19 Agustus 2015 - RUPS Tahun 2020 19 Agustus 2020 - sekarang - August 19, 2015 - GMS Year 2020 - August 19, 2020 - present
William P. Sabandar	Komisaris Commissioner	Akta No. 51 tanggal 28 Oktober 2022, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Deed No. 51 dated October 28, 2022, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.	25 Oktober 2022 - sekarang October 25, 2022 - present
Bambang Kristiyono	Komisaris Commissioner	Akta No. 51 tanggal 28 Oktober 2022, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Deed No. 51 dated October 28, 2022, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.	25 Oktober 2022 - sekarang October 25, 2022 - present
Muhammad Syaugi	Komisaris Utama President Commissioner	Akta No. 46 Tanggal 26 Juni 2019, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Deed No. 46 Dated June 26, 2019, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.	31 Mei 2019 - 25 Oktober 2022 May 31, 2019 - October 25, 2022
Zulfikri	Komisaris Commissioner	Akta No. 19 Tanggal 6 Juli 2018, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Deed No. 19 July 6, 2018, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.	4 Mei 2018 - 22 Juli 2022 May 04, 2018 - July 22, 2022
Mukhtasor	Komisaris Commissioner	Akta No. 16 Tanggal 7 November 2018, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Deed No. 16 November 7, 2018, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.	29 Oktober 2018 - 25 Oktober 2022 October 29, 2018 - October 25, 2022
Adnan Pandu Praja	Komisaris Commissioner	Akta No. 46 Tanggal 26 Juni 2019, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Deed No. 46 Dated June 26, 2019, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.	31 Mei 2019 - 25 Oktober 2022 May 31, 2019 - October 25, 2022

KOMISARIS INDEPENDEN

Pada tahun 2022, Perseroan tidak memiliki Komisaris Independen. Pengangkatan Komisaris Independen sepenuhnya menjadi wewenang Pemprov DKI Jakarta selaku Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan di dalam UU Perseroan Terbatas:

- Komisaris Independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham Utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya, baik terafiliasi dalam hubungan bisnis maupun hubungan keluarga;
- Jika terdapat lebih dari 1 (satu) Komisaris Independen, salah satu di antaranya harus memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan.

INDEPENDENT COMMISSIONER

In 2022, the Corporation did not have any Independent Commissioner. The appointment of an Independent Commissioner is the sole authority of the Government of DKI Jakarta Province as the Shareholder, considering the provisions of Law concerning Limited Liability Company:

- Independent Commissioners are appointed based on the GMS' resolutions from parties who are not affiliated with Major Shareholders, Board of Directors' members, Board of Commissioners' members, whether in business or family affiliation;
- If there is more than 1 Independent Commissioner, one of the Independent Commissioners must have an accounting or finance background.



TUGAS DEWAN KOMISARIS

Pengungkapan lengkap mengenai uraian tugas Dewan Komisaris dapat diakses pada dokumen Panduan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi melalui tautan

<https://ppid.jakartamrt.co.id/informasi-serta-merta/>.

Secara umum tugas Dewan Komisaris ada beberapa, yaitu:

1. Tugas berkaitan dengan Direksi;
2. Tugas berkaitan dengan pelaksanaan GCG;
3. Tugas berkaitan dengan RUPS/Pemegang Saham;
4. Tugas yang terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran;
5. Tugas yang terkait dengan Rencana Bisnis Perusahaan;
6. Tugas yang terkait dengan Laporan Tahunan;
7. Tugas berkaitan dengan Nominasi Anggota Dewan Komisaris, dan Direksi Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan patungan;
8. Tugas berkaitan dengan Pengawasan Manajemen Risiko;
9. Tugas berkaitan dengan Sistem Pengendalian Internal;
10. Tugas berkaitan dengan pengawasan implementasi ISO; dan
11. Tugas berkaitan dengan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan.

WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris berwenang untuk menyetujui atau menolak secara tertulis rencana Direksi dalam hal:
 - Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan;
 - Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada Perseroan lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan dan halaman, atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai Perseroan, dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Mendapat penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan kepada Direksi dan Anggota Direksi.
4. Melaksanakan kepengurusan Perseroan jika terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Direksi. Dalam hal tersebut, Dewan Komisaris dapat menunjuk pejabat dari Internal Perseroan untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi, sampai dengan pengangkatan Direksi *definitive*, paling lama enam bulan.
5. Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Direksi.
6. Memberikan teguran dan peringatan kepada Direksi atas pengelolaan/pengurusan Perseroan yang tidak sesuai dengan RKAP, Rencana Strategis (Renstra) Bisnis, dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan.
7. Memeriksa Anggota Dewan Direksi yang diduga melakukan tindakan yang merugikan Perseroan.
8. Meminta data dan informasi mengenai kegiatan usaha Perseroan dan/atau pengelolaan/pengurusan Perseroan oleh Direksi.
9. Meminta penjelasan dari Direksi mengenai perkembangan Perseroan.

BOARD OF COMMISSIONERS' DUTIES

Further disclosure of the details of the Board of Commissioners' duties is accessible in the Board Manual for the Board of Commissioners and Directors through the link

<https://ppid.jakartamrt.co.id/informasi-serta-merta/>.

In general, the Board of Commissioners' duties are:

1. Duties in relation with the Board of Directors;
2. Duties in relation with the GCG implementation;
3. Duties in relation with GMS/Shareholders;
4. Duties in relation with the Work Plan and Budget;
5. Duties in relation with the Corporate Business Plan;
6. Duties in relation with the Annual Report;
7. Duties in relation with the Nomination of the Board of Commissioners, and Directors of the subsidiaries and/or joint ventures;
8. Duties in relation with the Risk Management Control;
9. Duties in relation with the Internal Control System;
10. Duties in relation with the supervision of the ISO implementation; and
11. Duties in relation with Anti-Bribery Management System.

BOARD OF COMMISSIONERS' AUTHORITIES

1. The Board of Commissioners has the authority to approve or reject in writing the plan of the Board of Directors concerning:
 - Borrowing or lending money on behalf of the Corporation;
 - Establishing a new business or participating in other Corporation in Indonesia and abroad;
2. The Board of Commissioners at any time during office hours has the right to enter the buildings and yard or other places used or controlled by the Corporation and has the right to examine all books, letters, and other evidences, examine and match the cash balance and others, and has the right to know all the actions taken by the Board of Directors.
3. To obtain explanation for any inquiries asked to the Board of Directors and its members.
4. To manage the Corporation in the event of vacancy of all Members of the Board of Directors. In this event, the Board of Commissioners has the right to appoint an internal official of the Corporation to help the execution of duties of the Board of Directors, until the appointment of definitive members of the Board of Commissioners by no later than six months.
5. To provide input, suggestions, and considerations to the Board of Directors.
6. To reprimand and warn the Board of Directors in relation to the Corporation's management of which does not comply with the RKAP, Business Strategic Plans, and/or Corporate Work Plan and Budget.
7. To inquire the Board of Directors' members of whom are alleged to carry out detrimental actions.
8. To request data and information regarding the Corporation and/or management's business activities by the Board of Directors.
9. To ask for explanation from the Board of Directors concerning Corporate development.

10. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
11. Memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi Perseroan.
12. Membentuk Komite Audit dan Komite lainnya untuk bekerja secara kolektif, dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
13. Dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Komisaris.
14. Memberikan persetujuan atas permohonan cuti yang diajukan.
15. Memberi persetujuan atas permohonan izin yang diajukan Direksi untuk perjalanan dinas luar negeri.

10. To ask the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors to attend the meeting of the Board of Commissioners.
11. To assess the performance of the Corporation's Board of Directors.
12. To establish Audit Committee and other Committees to work collectively and help the Board of Commissioners in carrying out their supervisory duties.
13. To appoint a Secretary of the Board of Commissioners.
14. To approve the proposed leave request.
15. To approve other request for leave proposed by the Board of Directors for international business travel.

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Panduan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, tanggung jawab Dewan Komisaris bersifat kolektif. Pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris Perseroan di tahun 2022 berdasarkan SK Nomor 008/BOC-MRT/XI/2022.

BOARD OF COMMISSIONERS' DISTRIBUTION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Based on the Board Manual, the Board of Commissioners' responsibilities are collective. The Board of Commissioners duties and responsibilities distribution in 2022 based on Decision Letter Number 008/BOC-MRT/XI/2022.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Distribution of Duties and Responsibilities

Nama Name	Jabatan Position	Pembagian Tugas Distribution of Duty
Dodik Wijanarko	Komisaris Utama President Commissioner	Koordinator seluruh bidang penugasan pengawasan Dewan Komisaris Coordinator of all fields of the Board of Commissioners' supervisory assignment
Rukijo	Komisaris Commissioner	Ketua Komite Audit Audit Committee Chairman
William P. Sabandar	Komisaris Commissioner	Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan Human Capital and Business Committee
Bambang Kristiyono	Komisaris Commissioner	Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti Risk and Security Monitoring Committee

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, atau sewaktu-waktu bilamana dianggap perlu. Dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan, atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Rapat Dewan Komisaris dibantu Sekretaris Dewan Komisaris untuk melakukan pencatatan risalah rapat.

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah seluruh Anggota Dewan Komisaris. Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

BOARD OF COMMISSIONERS' MEETING

The Board of Commissioners may hold regular meetings at least once in a month, or anytime as deemed necessary. The Board of Commissioners may invite the Board of Directors to attend the meeting. The Board of Commissioners' Meetings are held in the domicile of the Corporation or where the Corporation carries out the business activities. The Board of Commissioners' Meeting is supported by the Secretary of the Board of Commissioners to record the minutes of meeting.

The Board of Commissioners' Meeting is valid and resolutions can be taken if it is attended or represented by more than ½ (half) of the total Members of the Board of Commissioners. The Resolutions in the Board of Commissioners' Meeting are made through deliberation for consensus. In the event that consensus cannot be reached, the resolutions are made by voting, based on a vote of at least a little more than ½ (half) of the total votes cast at the meeting.

Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris, baik rapat internal, rapat gabungan, maupun rapat dengan Komite Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan, dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan (*dissenting opinion*) peserta rapat. Risalah tersebut juga diwajibkan untuk diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diberikan salinannya kepada peserta rapat.

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris mengadakan Rapat Internal Dewan Komisaris tanpa mengundang Direksi dan/atau Unit Kerja (hanya organ Dewan Komisaris termasuk Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota komite) sebanyak 12 kali dan rapat dengan mengundang Direksi sebanyak 13 kali.

Adapun frekuensi kehadiran Dewan Komisaris pada rapat tersebut adalah sebagai berikut:

All Board of Commissioners' Meeting, internal meeting, joint meeting, and meeting with the Committees under the Board of Commissioners, must be outlined in minutes of meeting covering the discussions and resolutions, including dissenting opinions from the meeting participant. The minutes of meeting must be recorded by the Secretary of the Board of Commissioners or another appointed official to be copied and distributed to the meeting participants.

Throughout 2022, the Board of Commissioners has held 12 Internal meetings without inviting the Directors and/or Work Units (only the Board of Commissioners' organs including the Secretary of the Board of Commissioners and committee members) and 13 meetings inviting the Board of Directors.

The Board of Commissioners' attendance frequency for those meetings is as follows:

Frekuensi Kehadiran Dewan Komisaris
The Board Of Commissioners' Attendance Frequency

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Dewan Komisaris Board of Commissioners' Internal Meetings			Rapat Dewan Komisaris dengan Mengundang Direksi Board of Commissioners and Directors Joint Meetings		
		Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran Attendance %	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran Attendance %
Dodik Wijanarko	Komisaris Utama President Commissioner	3	3	100	4	4	100
Rukijo	Komisaris Commissioner	12	12	100	13	13	100
William P. Sabandar	Komisaris Commissioner	3	3	100	4	4	100
Bambang Kristiyono	Komisaris Commissioner	3	3	100	4	4	100
Muhammad Syaugi**)	Komisaris Utama President Commissioner	9	9	100	9	9	100
Zulfikri*)	Komisaris Commissioner	6	6	100	5	5	100
Mukhtasor**)	Komisaris Commissioner	10	10	100	9	9	100
Adnan Pandu Praja**)	Komisaris Commissioner	10	10	100	9	9	100

*) menjabat hingga 22 Juli 2022 | served until July 22, 2022

**) menjabat hingga 25 Oktober 2022 | served until October 25, 2022



PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS



Selama tahun 2022, Dewan Komisaris telah dapat menjalankan tanggung jawab pengawasan, sesuai Panduan Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris telah dapat merealisasikan rencana kerja yang disusun dan ditetapkan pada tanggal 04 Februari 2022 setelah melalui rapat internal Dewan Komisaris.

Throughout 2022, the Board of Commissioners has been able to carry out its supervisory responsibilities, according to the Board Manual for the Board of Commissioners and Directors. The Board of Commissioners has been able to realize the work plan which was prepared and determined on February 4, 2022 through its internal meeting.

Realisasi Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2022 Realization of the Board of Commissioners' 2022 Work Plan

Rencana Kerja Work Plan	Realisasi Realization
Melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan Direksi setiap bulannya dengan melakukan <i>monitoring</i> , pengawasan, dan pemberian masukan/umpan balik kepada manajemen, khususnya dalam pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> di Perusahaan sebanyak 12 kali rapat dalam satu tahun. Carrying out the Board of Commissioners' joint meetings with the Board of Directors monthly by monitoring, supervising, and providing input/ feedback to the management, especially on <i>Good Corporate Governance</i> implementation at the Corporation such meetings are held 12 times in a year.	Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dengan Direksi atau disebut "Rapat Gabungan BOC BOD" terjadi 13 kali rapat dalam setahun. The Board of Commissioners and Directors' Joint Meeting or "BOC BOD Joint Meeting" was held 13 times in a year.
Melakukan rapat internal Dewan Komisaris dan juga termasuk rapat dengan seluruh organ dewan komisaris, yang di dalamnya seluruh anggota Komite Komisaris dan sekretariat dewan komisaris selama 12 kali dalam setahun. Carrying out internal Board of Commissioners' meetings including meetings with all organs under the Board of Commissioners, including all members of the Board of Commissioners' Committees and the Secretary of the Board of Commissioners. Such meetings are held 12 times in a year.	Pelaksanaan rapat internal Dewan Komisaris serta rapat bersama seluruh organ komisaris dilaksanakan sebanyak 12 kali dalam setahun. Internal Board of Commissioners' meeting with all organs under the Board of Commissioners was held 12 times in a year.
Melaksanakan observasi/ <i>site visit</i> progres konstruksi Fase 2 dan pelaksanaan operasi MRT Fase 1 sebanyak minimal 3 kali dalam setahun. Carrying out site visit/observation of phase II construction progress and operations of Phase I MRT. Such site visits are carried out three 3 times in a year.	Kunjungan lapangan dilakukan oleh Dewan Komisaris sebanyak 13 kali dalam setahun. Site visit was carried out by the Board of Commissioners 13 times in a year.
Memberikan arahan dan telaah tertulis melalui korespondensi internal kepada Direksi dan/atau Komite Komisaris sebagai sarana pemberian masukan/umpan balik dalam penerapan GRC sebanyak 12 kali dalam setahun. Providing written direction and reviews through internal correspondence to the Board of Directors and/or Committee of the Board of Commissioners to provide input/feedback concerning GRC implementation. This is carried out 12 times in a year.	Arahan dan telaah tertulis melalui korespondensi internal kepada Direksi sebagai sarana pemberian masukan/umpan balik dalam penerapan GRC terjadi sebanyak 22 kali dalam setahun. Written direction and reviews through internal correspondence to the Board of Directors to provide input/feedback concerning GRC implementation was carried out 22 times in a year.



Realisasi Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2022 Realization of the Board of Commissioners' 2022 Work Plan

Rencana Kerja Work Plan	Realisasi Realization
Melakukan Pengawasan pada pelaksanaan KPI dan serapan RKA Perusahaan melalui rapat sebanyak 3 kali dalam setahun. Monitoring KPI implementation and RKA absorption of the Corporation through meetings that are held three times in a year.	Telah dilaksanakan pengawasan pelaksanaan KPI dan serapan RKA melalui rapat sebanyak 3 kali dalam setahun. Monitoring of KPI implementation and RKA absorption are carried out through 3 meetings in a year.
Melakukan minimal 12 kali rapat dalam setahun antara Komite Komisaris dengan unit kerja terkait sesuai fungsi Komite masing-masing. Holding 12 meetings in a year between the Committees under the Board of Commissioners with the relevant work unit concerning the function of each Committee.	Telah dilaksanakan 12 kali rapat dalam setahun antara Komite Komisaris dengan unit kerja terkait sesuai fungsi Komite masing-masing. Meetings between the Committees under the Board of Commissioners with the relevant work unit concerning the function of each Committee were held 12 times in a year.
Dewan Komisaris, Komite Komisaris, dan Sekretariat Komisaris mengikuti pelatihan, <i>workshop</i> , seminar atau konferensi terkait isu GRC ataupun isu lain yang sesuai minimal satu kali dalam satu tahun. Participating training, workshop, seminar, or conference concerning GRC issues or other relevant issues for the Board of Commissioners, Committees under the Board of Commissioners, and the Secretariat of the Board of Commissioners at least once in a year.	Dewan Komisaris, Komite Komisaris, dan Sekretariat Komisaris mengikuti pelatihan, <i>workshop</i> , seminar atau konferensi terkait isu GRC sebanyak satu kali dalam tahun. The Board of Commissioners, Committees under the Board of Commissioners, and the Secretariat of the Board of Commissioners participated in training, workshop, seminar, or conference concerning GRC issues once in a year.
Membuat Laporan Triwulan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham. Compiling Quarterly Report of the Board of Commissioners for the Shareholders.	Telah dibuat laporan sebanyak 4 kali dalam setahun. There are 4 reports compiled in a year.

REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2022

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS' RECOMMENDATION IN 2022

Throughout 2022, the Board of Commissioners has provided advice and recommendations to the Board of Directors as follows:

Rekomendasi Dewan Komisaris Tahun 2022 Board of Commissioners' Recommendation in 2022

Rekomendasi Dewan Komisaris Tahun 2022 Board of Commissioners' Recommendation in 2022	
Aspek Konstruksi Construction Aspect	- Agar lebih bisa mengantisipasi kejadian keterlambatan proyek Transport Hub supaya ke depannya tidak terjadi lagi hal yang sama; - Terkait lokasi lahan Depo Fase 2 agar segera bisa diputuskan kepastian lokasinya; - Dewan Komisaris meminta agar jangan sampai terjadi kegagalan mengenai pengadaan proyek CP 205; - Secara progresif harus memastikan bahwa percepatan untuk paket CP 201 & CP 203 bisa dilakukan; - Perlu upaya lebih persisten dan ngotot dari BOD utk mempercepat eksekusi Fase 4 (Fatmawati-Kp.Rambutan), dan juga Fase 3 (Cikarang-Balaraja); - Meminta agar dibuatkan kajian kepada Direktur Konstruksi mengenai hitungan terhadap pembiayaan dan dampak dari pemindahan lokasi Depo Fase 2. - To better anticipate delays in the Transport Hub project so that the same thing does not happen again in the future; - To make decision on the location of the Phase 2 Depot land; - The Board of Commissioners requests that there should be no failure in the procurement of the CP 205 project; - Must progressively ensure that acceleration for CP 201 & CP 203 packages can be implemented; - BOD should make more persistent and intense efforts to speed up the execution of Phase 4 (Fatmawati-Kp.Rambutan) and Phase 3 (Cikarang-Balaraja); - Request that a study be made to the Director of Construction regarding the calculation of the financing and impact of relocating the Depo Phase 2.
Aspek Operasi dan Pemeliharaan Operations and Maintenance Aspects	- Agar mewaspadai tingkat curah hujan yang tinggi terhadap kondisi stasiun, pastikan pengelolaan kebersihan dan mitigasi (antisipasi) banjir; - Perubahan penggunaan alat untuk transaksi dengan <i>system server based ticketing</i> agar dapat disimulasikan agar nantinya tidak terjadi penurunan tingkat kepercayaan. Harus menyampaikan kepada publik bahwa MRT bisa menangani masalah dengan baik; - Mengenai pengajuan Sertifikat Obvitas, harus diperhitungkan untung ruginya sebelum diajukan kepada Kemenhub; - Dewan Komisaris mendukung program TKDN dan ujicoba di PT. Indoprima Gemilang; - Harus mempertahankan & bahkan meningkatkan kinerja pelayanan Perseroan yang mengedepankan <i>Safety, Security & Quality</i>; - Penayangan pesan sosial masyarakat di stasiun - stasiun untuk senantiasa menjaga kebersihan, keselamatan & keamanan di stasiun harus secara rutin dilakukan. - Ensuring the management of cleanliness and flood mitigation (anticipation) in order to be aware of the high level of rainfall against the station's condition; - Changes in the use of tools for transactions with a server based ticketing system to be simulated to avoid decrease in the level of trust. Should convey the public of how problems are handled well by MRT; - Regarding the application for an Obvitas Certificate, the pros and cons must be calculated before submitting it to the Transportation Ministry; - The Board of Commissioners supports Domestic Component Level and trial programs at PT. Indoprima Gemilang; - Should maintain & even improve the Corporation's services performance by prioritizing Safety, Security & Quality; - Displaying community social messages at stations to keep maintaining cleanliness, safety & security at stations should be conducted routinely.

Rekomendasi Dewan Komisaris Tahun 2022
Board of Commissioners' Recommendation in 2022

Rekomendasi Dewan Komisaris Tahun 2022 Board of Commissioners' Recommendation in 2022	
Aspek Pengembangan Bisnis Business Development Aspect	- Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi NFB yang selama ini dilakukan oleh Perseroan. Penguatan perlu dilakukan pada aspek <i>digital business</i> dan aspek urban regenerator yang kelihatannya belum banyak ditambah, padahal ini bisnis yang akan sangat menjanjikan potensi ke depannya kalau disesuaikan dengan RJPP; - Perlu dilakukan evaluasi terhadap <i>skill set</i>. Pertanyaannya, apakah sekarang <i>skill set</i> yang dimiliki oleh teman-teman di Perseroan itu relevan dengan bisnis-bisnis baru yang ada sekarang. Perseroan harus berani untuk memotong/memangkas sumber daya yang tidak sesuai dengan <i>skill set</i> yang baru dan berani merekrut sumber daya yang memang dibutuhkan untuk menambah pendapatan - pendapatan non-tiket (NFB); - Melakukan pemantauan secara berkala mengenai <i>performance</i> keuangan anak usaha; - Manajemen perlu memberikan fokus pada bisnis yang menjadi core bisnis perusahaan, yang memiliki nilai tinggi secara finansial, dengan menyesuaikan strategi yang bisa meningkatkan nilai yang ada, seperti mempertajam <i>skillset</i>, membangun tim, membangun proses bisnis yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan di pasar; - Agar manajemen melakukan peninjauan bisnis untuk menyelenggarakan paket wisata edukasi untuk menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat. - It is necessary to carry out a thorough evaluation of the NFB strategy has been carried out by the Corporation so far. Strengthening needs to be done in the digital business and urban regenerator aspect of which it seems has not been explored much, whereas this is a business with a very promising potential in the future if it is adjusted to the RJPP. It is necessary to evaluate the skill set. The question is, is the current skill set owned by colleagues in the Corporation relevant to the new businesses that are now available. The Corporation must have the courage to cut/reduce the resources that are not in accordance with the new skill set and dare to recruit resources that are really needed to increase Non Fare Box (NFB) revenues; - Conduct periodic monitoring of the financial performance of the subsidiaries; - Management needs to focus on businesses that are the Corporation's core business, which have high financial value, by adjusting strategies that can increase existing values, such as sharpening skillset, building teams, building business processes that can increase the Corporation's competitiveness in the market; - For management to conduct business assessments to organize educational tour packages to build trust from the community.
Aspek Governance, Risk and Compliance Governance, Risk and Compliance Aspect	- Permasalahan lahan depo di Ancol agar bisa diselesaikan dengan baik; - MRT hendaknya mengajukan permohonan untuk penghapusan <i>financing charges</i>; - Meminta agar dibuat laporan perbandingan antara rencana KPI 2023 dengan KPI selama 3 tahun terakhir; - Agar memperhatikan capaian - capaian KPI yang masih belum memenuhi target, sehingga pada akhir tahun bisa tercapai target 100%; - Agar mensejajarkan KPI dengan capaian finansial, yaitu <i>financial performance & development performance</i>; - Penggunaan anggaran harus sangat efektif dan efisien serta realistis karena akan berdampak atau berpengaruh terhadap <i>cashflow</i> perusahaan. Tidak harus menghabiskan anggaran yang sudah kita buat, tapi harus benar - benar digunakan seefektif dan seefisien mungkin; - BOD agar memberikan perhatian kepada aspek pengembangan SDM melalui proses reorganisasi yg sedang berlangsung saat ini, yaitu memastikan tersedianya fungsi-fungsi utama (<i>critical functions</i>) dan <i>critical skills</i> yang dibutuhkan untuk menjalankan dan mencapai target-target RJPP Tahun 2030; - Meminta kepada manajemen agar membuat laporan atau menampilkan posisi kas selama 4 tahun terakhir; - Agar melakukan identifikasi mengenai hal - hal apa yang menyebabkan anak usaha merugi, dan langkah - langkah apa saja yang harus dilakukan supaya tidak merugi; - Harus dilakukan upaya - upaya untuk kolaborasi antara MRTJ dengan anak usaha; - Strategi komunikasi diharapkan agar menghasilkan suatu output dimana masyarakat merasa bangga dengan MRTJ, merasa memiliki dan bertanggung jawab untuk menjaga MRTJ, karena MRTJ adalah milik masyarakat, milik kita bersama. - Depot land issues in Ancol should be resolved properly; - MRT should apply for the elimination of financing charges; - Request that a comparative report should be made between the planned 2023 KPI and KPIs for the last 3 three years; - To pay attention to KPI achievements that have not yet met the target, so that at the end of the year the 100% target can be achieved; - To align KPI with financial achievements, namely financial performance & development performance; - The use of the budget must be very effective, efficient, and realistic because it will impact or affect the Corporation's cash flow. We don't have to spend the budget we have made, but it must really be used as effectively and efficiently as possible; - BOD to pay attention to the human resource development aspect through the ongoing reorganization process, namely ensuring the availability of critical functions and critical skills needed to carry out and achieve the targets of the 2030 RJPP; - Request management to make reports or present cash position for the last 4 years; - To identify the things that cause the subsidiaries to suffer losses, and what measures must be taken to prevent losses; - Efforts must be made for collaboration between MRTJ and its subsidiaries; - It is hoped that the communication strategy will produce an output where the community feels proud of MRTJ, has the sense of belonging, and is responsible for protecting MRTJ, because MRTJ belongs to the community, belongs to us all.

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Program peningkatan kapabilitas merupakan salah satu program penting agar Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perseroan dan pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Ketentuan-ketentuan tentang program peningkatan kapabilitas bagi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris;
2. Rencana untuk melaksanakan program peningkatan kapabilitas harus dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris;

BOARD OF COMMISSIONERS' COMPETENCY IMPROVEMENT

Capability development program is a crucial program for the Board of Commissioners to obtain the latest information on recent developments of the Corporation's business activities and other knowledge concerning the implementation of their duties. The provisions on capability development program for the Board of Commissioners are as follows:

1. Capability development program is carried out to develop the professional effectiveness of the Board of Commissioners;
2. Capability development program execution plan must be included in the annual work plan and budget of the Board of Commissioners;



3. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program peningkatan kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan diminta untuk menyajikan presentasi kepada Anggota Dewan Komisaris lainnya dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan;
4. Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan bertanggung jawab untuk membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan program peningkatan kapabilitas. Laporan tertulis tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris.

3. Each member of the Board of Commissioners who participates in a capability development program, such as seminar and/or training, is requested to present to its other members to share the information and knowledge;
4. The relevant member of the Board of Commissioners is responsible to prepare a written report concerning capability development program execution. The report is submitted to the Board of Commissioners.

Tahun 2022, anggota Dewan Komisaris Perseroan telah mengikuti program peningkatan kompetensi sebagai berikut:

In 2022, the Corporation's Board of Commissioners' members have participated in the competency improvement program as follows:

Program Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris
Competency Improvement Program Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/Workshop/Konferensi/ Seminar Name of Training/Workshop/Conference/Seminar	Lembaga Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Time and Venue
Dodik Wijnarko (***)	Komisaris Utama President Commissioner	Program Pengenalan Dewan Komisaris Board of Commissioners Induction Program	Divisi Corporate Secretary Corporate Secretary Division	7 Desember 2022, Wisma Nusantara December 7, 2022, Wisma Nusantara
Rukijo	Komisaris Commissioner	- Integrated GRC Sustainable Business PT MRT Jakarta (Perseroda) - Data Driven Executive (DDE) - Integrated GRC Sustainable Business PT MRT Jakarta (Perseroda) - Data Driven Executive (DDE)	- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) - Algoritma - National Committee on Governance Policy (KNKG) - Algorithm	- Jakarta, 18 Agustus 2022 - Jakarta, August 18, 2022 - Training Online, 21 Juli 2022 - Online Training, July 21, 2022
William P. Sabandar (***)	Komisaris Commissioner	Program Pengenalan Dewan Komisaris Board of Commissioner Induction Program	Divisi Corporate Secretary Corporate Secretary Division	7 Desember 2022, Wisma Nusantara December 7, 2022, Wisma Nusantara
Bambang Kristiyono (***)	Komisaris Commissioner	Program Pengenalan Dewan Komisaris Board of Commissioners Induction Program	Divisi Corporate Secretary Corporate Secretary Division	7 Desember 2022, Wisma Nusantara December 7, 2022, Wisma Nusantara
Muhammad Syauqi(**)	Komisaris Utama President Commissioner	- Integrated GRC Sustainable Business PT MRT Jakarta (Perseroda) - Data Driven Executive (DDE) - Integrated GRC Sustainable Business PT MRT Jakarta (Perseroda) - Data Driven Executive (DDE)	- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) - Algoritma - National Committee on Governance Policy (KNKG) - Algorithm	- Jakarta, 18 Agustus 2022 - Jakarta, August 18, 2022 - Training Online, 21 Juli 2022 - Online Training, July 21, 2022
Zulfikri*)	Komisaris Commissioner	- Integrated GRC Sustainable Business PT MRT Jakarta (Perseroda) - Data Driven Executive (DDE) - Integrated GRC Sustainable Business PT MRT Jakarta (Perseroda) - Data Driven Executive (DDE)	- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) - Algoritma - National Committee on Governance Policy (KNKG) - Algorithm	- Jakarta, 18 Agustus 2022 - Jakarta, August 18, 2022 - Training Online, 21 Juli 2022 - Online Training, July 21, 2022
Mukhtasor**)	Komisaris Commissioner	- Integrated GRC Sustainable Business PT MRT Jakarta (Perseroda) - Data Driven Executive (DDE) - Integrated GRC Sustainable Business PT MRT Jakarta (Perseroda) - Data Driven Executive (DDE)	- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) - Algoritma - National Committee on Governance Policy (KNKG) - Algorithm	- Jakarta, 18 Agustus 2022 - Jakarta, August 18, 2022 - Training Online, 21 Juli 2022 - Online Training, July 21, 2022
Adnan Pandu Praja**)	Komisaris Commissioner	- Integrated GRC Sustainable Business PT MRT Jakarta (Perseroda) - Data Driven Executive (DDE) - Integrated GRC Sustainable Business PT MRT Jakarta (Perseroda) - Data Driven Executive (DDE)	- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) - Algoritma - National Committee on Governance Policy (KNKG) - Algorithm	- Jakarta, 18 Agustus 2022 - Jakarta, August 18, 2022 - Training Online, 21 Juli 2022 - Online Training, July 21, 2022

*) menjabat hingga 22 Juli 2022 / served until July 22, 2022

**) menjabat hingga 25 Oktober 2022 / served until October 25, 2022

***) menjabat mulai 25 Oktober 2022 / has been serving since October 25, 2022

PROGRAM PENGENALAN DEWAN KOMISARIS

1. Program Pengenalan mengenai Perseroan wajib diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris yang baru pertama kali menjabat sebagai Dewan Komisaris di Perseroan.
2. Program pengenalan dapat disampaikan oleh Komisaris Utama atau jika Komisaris Utama berhalangan, maka dapat disampaikan oleh Direktur Utama atau Direksi lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau dapat dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan.
3. Materi yang diberikan pada Program Pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di lingkungan Perseroan;
 - b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan visi dan misi, nilai-nilai Perseroan, tujuan dan strategi Perseroan, lingkup kegiatan Perseroan, kinerja keuangan dan operasi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, manajemen risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - c. Pengenalan mengenai berbagai peraturan yang berhubungan dengan pekerjaan Dewan Komisaris seperti peraturan mengenai Perseroan Terbatas, peraturan mengenai tindak pidana korupsi, peraturan mengenai persaingan usaha, dan peraturan lain yang dirasa relevan;
 - d. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta tugas dan peran Komite Audit dan Komite Dewan Komisaris lainnya;
 - e. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite Dewan Komisaris.
4. Program pengenalan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk presentasi/seminar/workshop, pertemuan, kunjungan ke lokasi, pengkajian dokumen atau bentuk lainnya yang dianggap sesuai.

Tahun 2022, terdapat beberapa orang anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. Kepada mereka telah dijalankan program pengenalan dengan rincian sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS' INTRODUCTION PROGRAM

1. An Introduction Program regarding the Corporation must be given to the Board of Commissioners' Members of whom are serving as the Board of Commissioners for the first time in the Corporation.
2. The induction program can be delivered by the President Commissioner or if he/she is absent, then it can be delivered by the President Director or other Directors appointed by the President Director or it can be carried out by the Corporate Secretary.
3. The materials provided in the Induction Program include the following:
 - a. Good Corporate Governance implementation within the Corporation;
 - b. An overview of the Corporation in relation to the vision and mission, its values, goals and strategy, the scope of its activities, financial performance and operations, short and long term business plans, risk management and other strategic issues;
 - c. Introduction to various regulations related to the Board of Commissioners' duties of such as regulations regarding Limited Liability Companies, corruption, business competition, and other regulations deemed relevant;
 - d. Explanation relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies as well as the duties and roles of the Audit Committee and other Committees of the Board of Commissioners;
 - e. Explanation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors and the Board of Commissioners' Committees.
4. The induction program can be carried out in the form of presentations/seminars/workshops, meetings, site visits, document review or other forms deemed appropriate.

In 2022, there are several newly appointed members of the Board of Commissioners. They have carried out an induction program with the following details:

Program Pengenalan Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Introduction Program

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Tanggal Pelaksanaan Program Pengenalan Date of Induction Program Implementation	Pelaksana Program Pengenalan Induction Program Organizer
Dodik Wijanarko	Komisaris Utama President Commissioner	25 Oktober 2022 October 25, 2022	7 Desember 2022 December 7, 2022	Divisi Corporate Secretary Corporate Secretary Division
William P. Sabandar	Komisaris Commissioner	25 Oktober 2022 October 25, 2022	7 Desember 2022 December 7, 2022	Divisi Corporate Secretary Corporate Secretary Division
Bambang Kristiyono	Komisaris Commissioner	25 Oktober 2022 October 25, 2022	7 Desember 2022 December 7, 2022	Divisi Corporate Secretary Corporate Secretary Division



PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Pemegang Saham menilai kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan masing-masing Anggota Dewan Komisaris. Kinerja dinilai dan dievaluasi berdasarkan laporan triwulan realisasi kinerja yang disampaikan Anggota Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham. Penilaian dilakukan melalui mekanisme pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang dimuat dalam Kontrak Manajemen. Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Penilaian terhadap Dewan Komisaris mencakup kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Penyusunan KPI pada awal tahun dan evaluasi pencapaiannya;
2. Tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris, rapat koordinasi, maupun rapat dengan komite-komite Dewan Komisaris yang ada;
3. Kontribusinya dalam proses pengawasan Perseroan;
4. Keterlibatannya dalam penugasan-penugasan tertentu;
5. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perseroan;
6. Ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan RUPS, serta kebijakan Perseroan.

BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE ASSESSMENT

The Shareholders conduct a performance assessment of the Board of Commissioners both jointly and severally. The performance is assessed and evaluated based on the quarterly report of performance realisation submitted by the Board of Commissioners' Members to the Shareholders. The assessment mechanism is carried out by measuring the accomplishment of the Board of Commissioners' Key Performance Indicator (KPI) based on the Board of Commissioners' proposal as set forth in the Management Contract. The performance assessment result of each Member of the Board of Commissioners individually is one of the basis of consideration for the Shareholder to dismiss and/or reappoint the relevant Member of the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners' Performance Assessment cover the criteria as follows:

1. KPI preparation at the beginning of the year and its accomplishment assessment;
2. Attendance rate in Board of Commissioners' Meetings, coordination meetings, and meetings with the committees under the Board of Commissioners;
3. Contribution in the Corporation supervising process;
4. Engagement in certain responsibilities;
5. Commitment to prioritize the Corporation's interest;
6. Compliance with the prevailing laws and regulations, the Corporation's Articles of Association, GMS Resolutions, and the Corporation's Policies.



Hasil Penilaian dan Pencapaian KPI Dewan Komisaris Tahun 2022
Board of Commissioners' Assessment Results and KPI Accomplishment in 2022

No	Sasaran Strategis Strategic Goals	Bobot (%) Weight (%)	KPI KPI	Bobot KPI (%) KPI Weight (%)	Target (%) Target (%)	Realisasi (%) Realization (%)	Skor Final (%) Final Score (%)
1	Pengawasan dan pemberian arahan kepada manajemen melalui rapat koordinasi, kunjungan lapangan dan arahan tertulis Supervision and direction of the management through coordinated meeting, site visit, and written directives	38	Terlaksananya rapat bulanan gabungan, arahan tertulis, korespondensi internal dan kunjungan lapangan oleh Dewan Komisaris Execution of monthly joint meetings, written directives, internal correspondences, and site visit by the Board of Commissioners	38	100	100	100
2	Pengawasan pada pelaksanaan KPI dan serapan RKA Perusahaan Supervision over the implementation of KPI and RKA absorption of the Corporation	23	Terlaksananya evaluasi, review laporan keuangan, persetujuan KPI 2021, dan pengajuan KPI dan RKA 2022 Execution of evaluation, review of financial statements, approval on 2022 KPI, and 2022 KPI and RKA proposal	38	100	100	100
3	Pengembangan dan peningkatan kompetensi Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris Competency development and improvement of the Board of Commissioners and Its Organs	23	Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris mengikuti latihan, <i>workshop</i> , seminar atau konferensi terkait isu GRC ataupun isu lain yang sesuai Participation of the Board of Commissioners and Its Organs in trainings, workshops, seminars, or conferences on GRC issues or other relevant issues	23	100	100	100
4	Pertanggungjawaban kegiatan pengawasan Dewan Komisaris & Organ Dewan Komisaris Accountability of the Board of Commissioners and Its Organs supervisory duties	15	Pelaporan kegiatan Komite kepada Dewan Komisaris, dan pelaporan kegiatan Dewan Komisaris kepada pemegang saham Reporting of the Committees' activities to the Board of Commissioners, and reporting of the Board of Commissioners' activities to the Shareholders.	23	100	100	100

*) menjabat hingga 22 Juli 2022 / served until July 22, 2022
**) menjabat hingga 25 Oktober 2022 / served until October 25, 2022
***) menjabat mulai 25 Oktober 2022 / has been serving since October 25, 2022

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP KINERJA KOMITE

Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap kinerja setiap Komite yang membantu tugas pengawasan melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (KPI) masing-masing Komite. Berdasarkan penilaian yang telah dilaksanakan tahun 2022, diketahui masing-masing Komite telah dapat merealisasikan pencapaian target KPI yang telah ditetapkan.

BOARD OF COMMISSIONERS' ASSESSMENT ON COMMITTEE PERFORMANCE

The Board of Commissioners conducts an assessment on the performance of each Committee of which assisting in supervisory duties through the Key Performance Indicators (KPI) accomplishment of each Committee. Based on the assessment in 2022, each Committee realized the accomplishment of KPI targets.

Penilaian Kinerja Komite Audit oleh Dewan Komisaris Berdasarkan Pencapaian Kinerja Utama (KPI) Tahun 2022
Audit Committee Performance Assessment by the Board of Commissioners by 2022 Key Performance Indicators (KPI)

Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicators	Satuan Unit	Bobot (%) Accomplishment Score (%)	Target Target	Realisasi Realization	Capaian (%) Accomplishment (%)	Skor Capaian (%) Accomplished Score (%)
Terlaksananya rapat bulanan Implementation of monthly meetings	Rapat Meetings	40	24	24	100	100
Terselesaikannya Laporan Triwulan 1-4 Completion of Q1-Q4 Quarterly Reports	Rapat Meetings	30	4	4	100	100
Terlaksananya tindak lanjut asesmen BPKP Tahun 2020 Implementation of follow-up on BPKP assessment in 2020	Tindak Lanjut Follow-up	30	18	18	100	100



Penilaian Kinerja Komite SDM dan Pengusahaan oleh Dewan Komisaris Berdasarkan Pencapaian Kinerja Utama (KPI) Tahun 2022
 HC and Business Committee Performance Assessment by the Board of Commissioners by 2022 Key Performance Indicators (KPI)

Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicators	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)	Target Target	Realisasi Realization	Capaian (%) Accomplishment (%)	Skor Capaian (%) Accomplished Score (%)
Terlaksananya rapat bulanan Implementation of monthly meetings	Rapat Meetings	40	24	24	100	100
Terselesaikannya Laporan Triwulan 1-4 Completion of Q1-Q4 Quarterly Reports	Rapat Meetings	30	4	4	100	100
Terlaksananya tindak lanjut asesmen BPKP Tahun 2020 Implementation of follow-up on BPKP assessment in 2020	Tindak Lanjut Follow-up	30	3	3	100	100

Penilaian Kinerja Komite Pemantau Risiko & Sekuriti oleh Dewan Komisaris Berdasarkan Pencapaian Kinerja Utama (KPI) Tahun 2022
 Risk & Security Monitoring Committee Performance Assessment by the Board of Commissioners by 2022 Key Performance Indicators (KPI)

Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicators	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)	Target Target	Realisasi Realization	Capaian (%) Accomplishment (%)	Skor Capaian (%) Accomplished Score (%)
Terlaksananya rapat bulanan Implementation of monthly meetings	Rapat Meetings	40	24	24	100	100
Terselesaikannya Laporan Triwulan 1-4 Completion of Q1-Q4 Quarterly Reports	Rapat Meetings	30	4	4	100	100
Terlaksananya tindak lanjut asesmen BPKP Tahun 2020 Implementation of follow-up on BPKP assessment in 2020	Tindak Lanjut Follow-up	30	18	18	100	100



Direksi

Board of Directors



Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

PEDOMAN KERJA DIREKSI

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga telah menyusun Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi atau *Board Manual*, yang ditetapkan Perseroan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT MRT Jakarta (Perseroda) No. SK/010/BOC-MRT/XII/2020, dan No. SK/066/BOD-MRT/XII/2020, tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi selengkapnya dapat diakses di laman PPID MRT Jakarta melalui tautan <https://ppid.jakartamrt.co.id/informasi-berkala/>.

Board of Directors is the Corporation's organ with full authorization and responsibility on the management for its benefit, in accordance with the Corporation's aims and objectives as well as represents the Corporation both inside and outside the court in accordance with the applicable laws and regulations, Articles of Association, and GMS Resolutions.

BOARD OF DIRECTORS' BOARD MANUAL

Board of Directors refers to the applicable laws and regulations in conducting its duties and responsibilities. The Corporation has also set forth the Guidelines or Board Manual for the Board of Commissioners and Directors. The Board Manual is stipulated by the Corporation through PT MRT Jakarta (Perseroda) Board of Commissioners and Directors Joint Decision No. SK/010/BOC-MRT/XII/2020, and No. SK/066/BOD-MRT/XII/2020, regarding Board Manual for the Board of Commissioners and Directors.

The complete Board Manual for the Board of Commissioners and Directors is accessible on the PPID MRT Jakarta website via the link <https://ppid.jakartamrt.co.id/informasi-berkala/>.



JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, jumlah anggota Direksi Perseroan adalah 5 (lima) orang, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan 4 (empat) orang Direktur. Tahun 2022, komposisi Direksi MRT Jakarta mengalami perubahan dengan kronologis sebagai berikut:

BOARD OF DIRECTORS' TOTAL AND COMPOSITION

In accordance with the provisions of the Corporation's Articles of Association and the Board Manual for the Board of Commissioners and Directors, total members of the Corporation's Board of Directors is 5 (five) members, consisting of a President Director and 4 (four) Directors. In 2022, the composition of the MRT Jakarta Board of Directors has changed chronologically as follows:

Jumlah dan Komposisi Direksi
Board of Directors' Total and Composition

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Tuhyat	Direktur Utama President Director	Akta No. 51 tanggal 28 Oktober 2022, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Deed No. 51 dated October 28, 2022, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.	25 Oktober 2022 - sekarang October 25, 2022 - present
Silvia Halim	Direktur Konstruksi Construction Director	- Akta No. 48 Tanggal 13 September 2016, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. - Akta No. 57 tanggal 17 April 2018, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. - Deed No. 48 dated September 13, 2016, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. - Deed No. 57 dated April 17, 2018, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.	24 Agustus 2016 - 21 Maret 2018 21 Maret 2018 - sekarang - August 24, 2016 - March 21, 2018 - March 21, 2018 - present
Muhammad Effendi	Direktur Operasi dan Pemeliharaan Operations and Maintenance Director	Akta No. 16 Tanggal 7 November 2018, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Deed No. 16 dated November 7, 2018, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.	29 Oktober 2018 - sekarang October 29, 2018 - present
Roy Rahendra	Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi Finance and Corporate Management Director	Akta No. 02 Tanggal 2 Mei 2020, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Deed No. 02 dated May 2, 2020, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.	20 April 2020 - sekarang April 20, 2020 - present
Farchad H. Mahfud	Direktur Pengembangan Bisnis Business Development Director	Akta No. 47 Tanggal 27 Februari 2021 Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S. H. Deed No. 47 dated February 27, 2021 Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S. H.	5 Februari 2021 - sekarang February 5, 2021 - present
Mohamad Aprindy	Direktur Utama President Director	Akta No. 100 Tanggal 29 Juli 2022, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S. H. Deed No. 100 dated July 29, 2022, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S. H.	22 Juli 2022 - 25 Oktober 2022 July 22, 2022 - October 25, 2022
William P. Sabandar	Direktur Utama President Director	- Akta No. 51 Tanggal 21 Oktober 2016, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. - Akta No 57 tanggal 17 April 2018, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. - Deed No. 51 dated October 21, 2016, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. - Deed No. 57 dated April 17, 2018, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.	14 Oktober 2016 - 21 Maret 2018 21 Maret 2018 - 22 Juli 2022 - October 14, 2016 - March 21, 2018 - March 21, 2018 - July 22, 2022

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI

Tugas Direksi

Pengungkapan lengkap mengenai uraian tugas Direksi dapat diakses pada dokumen Panduan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi melalui tautan <https://ppid.jakartamrt.co.id/informasi-serta-merta/>. Secara umum tugas Direksi terdiri atas:

1. Tugas dan tanggung jawab umum;
2. Tugas yang berhubungan dengan RUPS/Pemegang Saham;
3. Tugas yang terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);

BOARD OF DIRECTORS' DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND AUTHORITIES

Board of Directors' Duties

Further disclosure of the details of the Board of Directors' duties is accessible in the Board Manual for the Board of Commissioners and Directors through the link <https://ppid.jakartamrt.co.id/informasi-sertamerta/>. In general, the Board of Directors duties are:

1. General duties and responsibilities;
2. Duties in relation with GMS/Shareholders;
3. Duties in relation with the Work Plan and Budget;

4. Tugas yang terkait dengan Rencana Bisnis Perusahaan;
5. Tugas yang terkait dengan Laporan Tahunan;
6. Tugas yang terkait dengan Pengurusan Manajemen Risiko;
7. Tugas berkaitan dengan Sistem Pengendalian Internal;
8. Tugas sebagai Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan; dan
9. Tugas yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan.

Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Sifat dari tanggung jawab tersebut adalah tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Pengambilan keputusan yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan ditanggung renteng, sedangkan pengambilan keputusan atas kepentingan pribadi dan merugikan Perseroan ditanggung oleh pribadi.

Anggota Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Atas nama Perseroan, pemegang saham dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan.

Wewenang Direksi

Pengungkapan lengkap mengenai uraian wewenang Direksi dapat diakses pada dokumen Panduan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi melalui tautan <https://ppid.jakartamrt.co.id/informasi-serta-merta/>. Secara umum, wewenang Direksi terdiri atas:

1. Wewenang Direksi secara Kolegial;
2. Wewenang Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris;
3. Wewenang Direksi yang harus mendapat persetujuan dari RUPS.

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Masing-masing Direksi

Direksi bertugas secara kolegial, namun agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas dilakukan pembagian tugas di antara anggota Direksi. Pembagian tugas di antara Direksi tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi secara kolegial dalam pengurusan Perseroan.

4. Duties in relation with the Corporate Business Plan;
5. Duties in relation with the Annual Report;
6. Duties in relation with the Risk Management Control;
7. Duties in relation with the Internal Control System;
8. Duties as Commissioner of Subsidiaries and/or Joint Ventures; and
9. Duties in relation with Anti-Bribery Management System.

Board of Directors' Responsibilities

The Board of Directors is fully responsible on the Corporation's management for the interest and objectives of the Corporation, and for representing the Corporation in a legal action in and outside the court, in line with the provisions of the Articles of Association. Each Member of the Board of Directors is personally responsible for the Corporation's losses if the person concerned is found guilty or negligent in carrying out their duties. Such responsibility shall apply jointly to each Member of the Board of Directors. Decision-making for the interest of the Corporation will be held jointly responsible, while the decision-making for personal interest of which may harm the Corporation will be held personally responsible.

The Board of Directors will not be held responsible for losses if they can prove that:

1. Such losses did not occur due to their mistakes or negligence;
2. They have managed the Corporation in good faith and prudence for the interest of the Corporation and in accordance with the goals and objectives of the Corporation;
3. They have no conflict of interests, neither directly nor indirectly, for the management actions which results in losses, and they have taken efforts to prevent such losses from arising or continuing.

On behalf of the Corporation, the shareholders may sue Members of the Board of Directors of whom due to their mistakes or negligence have caused losses to the Corporation.

Board of Directors' Authority

Further disclosure of the details of the Board of Directors' authorities is accessible in the Board Manual for the Board of Commissioners and Directors through the link <https://ppid.jakartamrt.co.id/informasi-serta-merta/>. In general, the Board of Directors' authorities are:

1. Board of Directors' Collegial Authorities;
2. Board of Directors' Authorities of which require written approval from the Board of Commissioners;
3. Board of Directors' Authorities of which require approval from the GMS.

BOARD OF DIRECTORS' DUTIES AND RESPONSIBILITIES DISTRIBUTION

The Board of Directors carries out their duties collegially. However, the duties among the Board of Directors are distributed in order to create efficiency and effectiveness. The distribution of duties among the Board of Directors does not eliminate its collegial responsibility in managing the Corporation.



Direktur Utama

1. Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
2. Berperan sebagai wakil Perseroan dalam berkoordinasi dengan pemangku kepentingan;
3. Memimpin, mengendalikan, dan mengoordinasikan semua kegiatan di seluruh Direktorat;
4. Menetapkan kebijakan Perseroan yang mencakup seluruh aktivitas Perseroan;
5. Menetapkan kebijakan dan strategi di bidang tata kelola, manajemen risiko, dan kontrol internal serta mengevaluasi pelaksanaannya;
6. Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang akan ditimbulkan telah ditetapkan rencana mitigasinya dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala;
7. Memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Perseroan;
8. Membangun budaya mengelola risiko, keselamatan, dan kesehatan kerja serta berorientasi kepada kepuasan pelanggan;
9. Memastikan Implementasi Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keselamatan Perkeretaapian, Sistem Manajemen Lingkungan, dan Sistem Manajemen Mutu telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan perundangan;
10. Memberikan persetujuan rencana audit tahunan;
11. Bertanggung jawab mengawasi tindak lanjut hasil pelaksanaan audit, baik internal maupun eksternal;
12. Bertanggung jawab mengawasi tindak lanjut hasil pengawasan manajemen mutu;
13. Melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kinerja Perseroan;
14. Memastikan pencapaian kinerja Perseroan sesuai dengan target;
15. Memberikan laporan kepada pemangku kepentingan utama mengenai progres pembangunan proyek MRT Jakarta;
16. Menyampaikan informasi Perseroan kepada pemangku kepentingan;
17. Jika salah seorang Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama atau Rapat Direksi dapat menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya untuk dapat berhak dan berwenang atas nama Direktur yang bersangkutan serta mewakili Perseroan;
18. Sebagai penanggung jawab penerapan dan pemantauan tata kelola perusahaan yang baik, antara lain:
 - Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
 - Memantau dan menjaga kepatuhan Perseroan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga.
19. Bertanggung jawab mengawasi tindak lanjut hasil penilaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik, baik yang dilakukan oleh pihak eksternal maupun secara penilaian sendiri;
20. Menetapkan kebijakan tentang penyusunan Key Performance Indicator (KPI) Perseroan;

President Director

1. Acting for and on behalf of the Directors and represent the Corporation;
2. Acting as a representative of the Corporation in coordination with the Stakeholders;
3. Leading, controlling, and coordinating all activities in all Directorates;
4. Establishing Corporate policies of which cover all the Corporation's activities;
5. Establishing policies and strategies concerning governance, risk management and internal control as well as conducting assessment on their implementation.
6. Ensuring all material risks and impacts resulted from the mitigation plan have been defined and reported to the Board of Commissioners periodically;
7. Ensuring adequate implementation of the Risk Management in accordance with the characteristics, complexity, and risk profile of the Corporation;
8. Building culture of which manages risk and occupational safety and health as well as is customer-oriented;
9. Ensuring the Implementation of Occupational Safety and Health Systems, Railway Safety, Environmental Management Systems, and Quality Management Systems in accordance with the standards as set forth by the prevailing laws and regulations;
10. Giving approval for the annual audit plan;
11. Being responsible for supervising the follow-up to internal and external audit results;
12. Being responsible for supervising the follow-up to the results of quality management supervision;
13. Performing overall supervision on the implementation of the Corporation's performance;
14. Ensuring the accomplishment of the Corporation's performance are in accordance with the targets.
15. Providing reports to key stakeholders regarding the progress of the Jakarta MRT project development;
16. Delivering the Corporation's information to Stakeholders;
17. If one of the Directors is absent or is unable to attend due to any reason, which does not need to be proven to a third party, the President Director or the Directors' Meeting may appoint one of the other Directors to be entitled and authorized on behalf of the Director concerned and represent the Corporation;
18. Being the person-in-charge for the implementation and monitoring of GCG, including:
 - Monitoring and maintaining the Corporation's business activities not to deviate from the applicable provisions;
 - Monitoring and maintaining the Corporation's compliance with all agreements and commitments made by the Corporation with third parties;
19. Being responsible for supervising the follow-up to the good corporate governance implementation assessment results both by external parties and by self-assessment;
20. Determining policies concerning the development of the Corporation's Key Performance Indicator (KPI);

21. Mengembangkan dan mengomunikasikan pemahaman strategi bisnis Perseroan;
22. Mengembangkan Rencana Bisnis Perseroan guna menjamin keberlanjutan dan kontinuitas penyelenggaraan dan operasional MRT Jakarta;
23. Memantau pencapaian dan evaluasi sasaran kinerja Perseroan;
24. Menyetujui alternatif strategi untuk mencapai sasaran Perseroan;
25. Menetapkan dan mengembangkan strategi keberlanjutan dan pengembangan Perseroan;
26. Menetapkan visi dan misi Perseroan;
27. Menetapkan *Business Process Framework* Perseroan;
28. Menetapkan rencana pengelolaan mutu Perseroan dan memonitor penerapannya;
29. Menetapkan dan mengembangkan strategi, sistem, dan budaya *Knowledge Management System* Perseroan;
30. Menetapkan dan mengembangkan *Improvement program* Perseroan;
31. Menetapkan kebijakan dan prosedur *quality* Perseroan;
32. Memonitor pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan dan media; dan
33. Memonitor pengelolaan pengembangan *image* Perseroan dan komunikasi di dalam dan ke luar Perseroan.

Direktur Konstruksi

Tugas Pokok

1. Bertanggung jawab atas pembangunan prasarana dan sarana MRT Jakarta;
2. Pengendalian biaya, waktu, maupun kualitas dalam kegiatan pembangunan MRT Jakarta sesuai strategi yang ditetapkan Direksi;
3. Mengoordinasikan dan mengawasi semua pelaksanaan proyek yang berada dalam kewenangannya;
4. Mengembangkan budaya mengelola risiko, keselamatan, dan kesehatan kerja serta berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam pengelolaan konstruksi; dan
5. Mengimplementasikan aspek-aspek *Governance, Risk, and Compliance* dalam pelaksanaan pengelolaan Perseroan.

Aspek Teknis

1. Pengendalian atas aspek-aspek strategis dari setiap kegiatan besar dan pelaksanaan manajemen risiko konstruksi;
2. Menjamin terlaksana secara efektif, baik pada tahap persiapan dan pelaksanaan pembangunan, maupun pada tahap persiapan operasi prasarana dan sarana MRT Jakarta atas aspek berikut:
 - a. Rencana pengelolaan proyek;
 - b. Sistem kontrol dan pengendalian kualitas;
 - c. Manajemen risiko dan pengelolaan keselamatan.
3. Pelaksanaan kajian terhadap produk atau *output* pekerjaan;
4. Ketersediaan jadwal induk dari tahap perencanaan sampai selesainya pembangunan;
5. Ketersediaan *Project Charter*;
6. Mengoordinasikan konsultan yang terlibat pada masa konstruksi;

21. Developing and communicating the understanding of Corporate business strategy;
22. Developing Corporate Business Plan to ensure the sustainability and continuity of the MRT Jakarta management and operations;
23. Monitoring the accomplishment and assessment of the Corporation's performance objectives;
24. Approving strategy alternatives to achieve the Corporation's objectives;
25. Establishing and developing the Corporation's sustainability and development strategy;
26. Determining the Corporation's vision and missions;
27. Determining the Corporation's Business Process Framework;
28. Determining the Corporation's quality management plan and monitoring its implementation;
29. Determining and developing the Corporation Knowledge Management System;
30. Determining and developing the Corporation Improvement Program;
31. Determining the Corporation's policy and quality procedures;
32. Monitoring relationship management with Stakeholders and the media; and
33. Monitoring the management of the Corporation's image development as well as internal and external communication.

Construction Director

Main Duties

1. Being responsible for the construction of MRT infrastructure and facilities in Jakarta;
2. Controlling the cost, time, and quality in MRT Jakarta development activities in accordance with the strategy set by the Directors;
3. Coordinating and supervising all project implementation within their authority;
4. Building culture of which manages risk, occupational safety, and health, focusing on customer satisfaction in Construction management; and
5. Implementing the aspects of Governance, Risk, and Compliance in the Corporation's management.

Technical Aspects

1. Controlling the strategic aspects of each major activity and the implementation of construction risk management;
2. Ensuring the effective implementation, both at the preparation stage and implementation of development as well as at the preparation stage for the operation of infrastructure and facilities of the MRT Jakarta on the following aspects:
 - a. Project management plan;
 - b. Quality control and management system;
 - c. Risk and safety management.
3. Carrying out a review of a product or work output;
4. Availability of a master schedule from the planning stage to the development completion;
5. Availability of the Project Charter;
6. Coordinating consultants involved in the construction period;



7. Berkoordinasi dengan Direktur Operasi dan Pemeliharaan dalam perancangan dan spesifikasi teknis *Rolling Stock, Station Building & facilities*, dan berbagai sistem perkeretaapian dan pekerjaan terkait lainnya;
8. Berkoordinasi dengan Direktur Pengembangan Bisnis dalam perancangan dan spesifikasi retail;
9. Mengarahkan dan mengoordinasikan Manajer Proyek dalam rangka memastikan seluruh aktivitas telah berjalan dalam arah pencapaian tujuan pekerjaan, serta dapat diselesaikan dalam batasan-batasan waktu dan pendanaan;
10. Memimpin penyusunan prosedur operasional untuk pelaksanaan proyek dan memastikan bahwa prosedur telah memenuhi atau selaras dengan kebutuhan pencapaian sasaran proyek;
11. Bertanggung jawab atas kebenaran dan kerapian administrasi kontrak konstruksi, termasuk kelengkapan perizinan dan lisensi terkait yang harus diperoleh; dan
12. Mengembangkan Rencana Bisnis Perusahaan dalam kaitan sasaran pertumbuhan kapasitas atau kemampuan melaksanakan pekerjaan pembangunan.

Tanggung Jawab pada Tahap Prakonstruksi

1. Perencanaan Proyek
 - Melakukan finalisasi rencana kerja;
 - Menetapkan strategi pengadaan berkaitan dengan pelaksanaan proyek;
 - Menganalisis perkiraan biaya dan menetapkan rencana biaya proyek secara keseluruhan;
 - Membuat jadwal utama proyek secara keseluruhan;
 - Mengembangkan sistem atau prosedur komunikasi dan persetujuan;
 - Mempersiapkan perencanaan tentang aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan aspek pengelolaan lingkungan.
2. Reviu Desain
 - Memastikan spesifikasi desain dan gambar, termasuk *scope of work* kontraktor, dalam pelaksanaan proyek sesuai dengan strategi Perseroan;
 - Sebagai representatif dari pemegang saham dan memberikan persetujuan terhadap seluruh dokumen konstruksi;
 - Mengoordinasikan integrasi desain antar kontraktor;
 - Memimpin rapat koordinasi proyek dengan pihak eksternal pemangku kepentingan;
 - Memastikan terpenuhinya aspek hukum;
 - Memastikan desain konstruksi selaras dengan ketentuan perundangan-undangan standar bangunan dan aspek lingkungan.
3. Berkaitan dengan pengadaan konstruksi
 - Melaksanakan dan memastikan pengadaan kontrak konstruksi sesuai rencana sampai dengan penandatanganan kontrak.

7. Coordinating with the Operations and Maintenance Director on the design and technical specifications of the Rolling Stock, Station Building & facilities, as well as various railway systems and other related works;
8. Coordinating with the Business Development Director on retail design and specification;
9. Directing and coordinating the Project Manager to ensure all activities have been carried out to achieve the work objectives and can be completed within time and funding constraints;
10. Leading the preparation of operational procedures for project implementation and ensuring those procedures have fulfilled or are aligned with the needs of project objectives accomplishment.
11. Being responsible for the accuracy and orderliness of construction contracts administration, including the comprehensiveness of permits and related licenses of which must be obtained; and
12. Developing the organization's long-term plan in relation to the target of capacity building or ability to carry out development work.

Responsibilities in Pre-Construction Stage

1. Project Planning
 - Finalizing the work plan;
 - Establishing procurement strategies related to project implementation;
 - Analyzing cost estimates and determine overall project cost plans;
 - Generating the overall project master schedule;
 - Developing a system or procedure for communication and approval;
 - Preparing planning on occupational aspects of health and safety and environmental management'.
2. Design Review
 - Ensuring the design specification and picture including the contractor's scope of work in project implementation is in accordance with the Corporation strategy;
 - Being a representative of the shareholders and giving approval to all construction documents;
 - Coordinating design integration among contractors;
 - Leading project coordination meeting with external shareholders;
 - Ensuring compliance with legal aspects;
 - Ensuring the construction design is in accordance with the prevailing laws and regulations of building standards and environmental aspects.
3. Construction procurement
 - Carrying out and ensuring the procurement of construction contracts is in accordance with the plan until the signing of the contract.

Tanggung Jawab Tahap Konstruksi

1. Persiapan Proyek

- Memastikan terlaksananya sistem pengendalian proyek;
- Memastikan pemilihan dan pelaksanaan sistem manajemen proyek;
- Memonitor arus kas proyek;
- Menetapkan prosedur informasi dan komunikasi proyek;
- Memeriksa kesiapan implementasi aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta aspek lingkungan.

2. Pembangunan

- Bertanggung jawab atas aktivitas konstruksi lapangan dan menjamin kesesuaian terhadap kontrak dan peraturan perundangan;
- Memberikan laporan kepada pemegang saham mengenai aktivitas dan interaksi dengan pihak lain mencakup kontraktor, konsultan, sub konsultan, dan supplier;
- Mengembangkan dan menjalankan rencana pengendalian dan jaminan kualitas;
- Mengendalikan implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan, dan pengamanan area proyek oleh kontraktor dalam tahapan konstruksi;
- Memastikan administrasi pembayaran proyek terkait pekerjaan konstruksi berlangsung sesuai jadwal;
- Melakukan reviu dan mempersiapkan rekomendasi pembayaran atas seluruh tagihan;
- Melakukan negosiasi terhadap jumlah pembayaran untuk *variation order*, *price adjustment*, *delay payment*, dan pembayaran lainnya terkait pekerjaan konstruksi;
- Mengawasi progres konstruksi dan mengembangkan strategi penyesuaian jadwal;
- Mengoordinasikan rapat integrasi pelaksanaan proyek dan sistem dokumentasinya;
- Memberikan solusi atas perselisihan dalam aspek waktu, kepraktisan, maupun biaya;
- Memastikan terlaksananya pelaporan kemajuan konstruksi bulanan;
- Mengoordinasikan dokumentasi proyek secara keseluruhan.

3. Penyelesaian Proyek

- Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan lembaga atau institusi terkait lainnya dalam rangka menyiapkan fasilitas dan sistem layanan yang berkesinambungan bagi pengguna jasa kereta dalam melakukan perjalanan;
- Memastikan terlaksananya inspeksi terhadap pelaksanaan pekerjaan seluruh konstruksi sebelum serah terima maupun habisnya masa jaminan kontraktor;
- Memastikan aspek keselamatan dan kualitas yang telah ditetapkan telah dipenuhi oleh kontraktor sesuai dengan kontrak;

Responsibilities in Construction Stage

1. Project Preparation

- Ensuring the implementation of project control system;
- Ensuring the selection and implementation of project management system;
- Monitoring project cash flow;
- Establishing project information and communication procedures;
- Checking the readiness to implement occupational safety and health aspects and environmental aspects.

2. Construction

- Being responsible for field construction activities and ensuring compliance with the contract and the prevailing laws and regulations;
- Submitting report to the Shareholders concerning the activities and interactions with other parties including contractors, consultants, sub-consultants, and suppliers;
- Developing and implementing control plan and quality assurance;
- Controlling the implementation of occupational safety and health system, environmental management, and security of project area by the contractors in construction stage;
- Ensuring project payment administration concerning construction works are on time;
- Reviewing and preparing payment recommendation for all invoices;
- Negotiating the total payment for variation order, price adjustment, delay payment, and other payment concerning construction works;
- Supervising construction progress and developing strategies to adjust the schedule;
- Coordinating integration meeting for project implementation and its documentation system;
- Providing solutions on disputes in the aspects of time, practicality, and fee;
- Ensuring the implementation of monthly construction progress report;
- Coordinating the overall project documentation.

3. Project Completion

- Coordinating with the Central Government or Regional Government and other related agencies or institutions in preparing the sustainable facilities and service system for passengers during their trip;
- Ensuring the implementation of inspection to the implementation of all construction works before handover or the end of contractor guarantee period;
- Ensuring the safety and quality aspects as set forth have been fulfilled by the contractors as stated in the contract;



- Melakukan reviu terhadap dokumen yang diberikan oleh kontraktor;
- Menetapkan penjadwalan penyelesaian proyek;
- Memastikan serah terima berlangsung sesuai dengan kontrak.

Direktur Operasi dan Pemeliharaan

Tugas Pokok

1. Melakukan koordinasi penyusunan, penetapan dan evaluasi kebijakan, prosedur serta *Service Level Agreement* (SLA) sarana dan prasarana MRT Jakarta;
2. Memastikan kebijakan tahapan pembangunan, survei, dan standardisasi desain kelayakan operasi sarana dan prasarana serta program pemeliharaannya;
3. Menetapkan standar layanan prima operasi sarana dan prasarana serta program pemeliharaannya (*Reliability Availability Maintainability Safety*);
4. Menetapkan standar keselamatan dan keamanan dalam operasi dan pemeliharaan MRT Jakarta;
5. Melakukan koordinasi penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimum operasional (*service level*) MRT Jakarta;
6. Turut bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan, dari tahap *basic design* sampai serah terima pekerjaan sebelum dioperasikan;
7. Bertanggung jawab atas persiapan pengoperasian, pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan prasarana dan sarana MRT Jakarta sesuai strategi yang ditetapkan oleh Direksi dan standar pelayanan minimum;
8. Memastikan kajian sistem dan struktur kelembagaan bagi kegiatan operasi dan pemeliharaan;
9. Memastikan kesiapan operasi dan pemeliharaan melalui pelaksanaan *Independent Safety Assessment* atau mekanisme *assurance* lainnya yang sesuai;
10. Membantu berkoordinasi dengan Direktur Konstruksi dalam perancangan dan spesifikasi teknis *Rolling Stock, Station Building & Facilities, Trackwork, Signal, Power System & OCS System, Environmental Control System* dan *Automatic Fare Collection* (AFC);
11. Mengimplementasikan aspek-aspek *Governance, Risk, and Compliance* dalam pelaksanaan pengelolaan Perseroan;
12. Mengembangkan budaya mengelola risiko, keselamatan dan kesehatan kerja serta berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam pengelolaan konstruksi;
13. Memonitor penyusunan dan penerapan prosedur dan kebijakan mengenai pelayanan pelanggan;
14. Menetapkan target kinerja serta tolok ukur keberhasilan pelayanan pelanggan baik jangka panjang, menengah, dan pendek;
15. Memonitor pelaksanaan program pelayanan pelanggan;
16. Memonitor pengelolaan hubungan dengan pelanggan; dan
17. Memonitor pengelolaan logistik.

- Reviewing documents provided by contractors;
- Establishing project completion schedule;
- Ensuring the handover is carried out in accordance with the contract.

Operations and Maintenance Director

Main Duties

1. Coordinating the preparation, establishment, and evaluation of policies, procedures, and the *Service Level Agreement* (SLA) of facilities and infrastructure of MRT;
2. Ensuring the policies for construction stages, survey, and design standardization of facility and infrastructure operational feasibility and the maintenance program;
3. Establishing the standards of excellent service for facility and infrastructure operations and the maintenance program (*Reliability Availability Maintainability Safety*);
4. Establishing safety and security standards in operations and maintenance of MRT Jakarta;
5. Coordinating the preparation and establishment of operational minimum service level of MRT Jakarta;
6. Taking responsibility for the implementation of construction, from basic design stage until handover prior to operations;
7. Being responsible for the preparation of operations, maintenance, and business of facility and infrastructure of MRT Jakarta in accordance with the strategy as set forth by the Board of Directors and minimum service standards;
8. Ensuring the review of institutional system and structure for operations and maintenance;
9. Ensuring operational and maintenance readiness through the implementation of an *Independent Safety Assessment* or other appropriate assurance mechanism;
10. Helping to coordinate with the Construction Director in terms of design and technical specification of *Rolling Stock, Station Building & Facilities, Trackwork, Signal, Power Systems & OCS Systems, Environmental Control Systems, and Automatic Fare Collection Systems*;
11. Implementing *Governance, Risk, and Compliance* aspects in the management of the Corporation;
12. Building culture of which manages risk, occupational safety, and health, focusing on customer satisfaction in construction management;
13. Monitoring the preparation and implementation of procedures and policies concerning customer service;
14. Setting performance target and success benchmark for customer service in short, medium and long-term;
15. Monitoring the implementation of the customer service program;
16. Monitoring relationship management with customers; and
17. Monitoring logistics management.

Aspek Teknis

1. Memastikan keteknisan dan kerekayasaan, baik di lingkungan internal (tim) maupun dengan *technology provider*;
2. Memberikan dukungan teknis pada kegiatan pelaksanaan proyek guna memenuhi standar desain yang telah ditetapkan sebelumnya;
3. Pengendalian Aspek Teknis;
 - Mengoordinasikan setiap upaya dalam rangka peningkatan pengetahuan teknis dalam organisasi;
 - Menentukan, menginformasikan, mensosialisasikan, dan menetapkan pelaksanaan standar atau ketentuan teknis;
 - Memonitor dan mengusulkan perubahan-perubahan atas solusi atau hasil desain dalam hubungannya terhadap lingkup, kemampuan atau kinerja teknis, efektivitas biaya, ketahanan atau umur layanan, dan kemudahan pemeliharaan.

Persiapan Operasi MRT Jakarta

1. Melakukan koordinasi dalam penyusunan dan pengembangan kebijakan dalam rangka keselamatan kerja dan keselarasan dengan standar keselamatan kerja yang ada, termasuk keselamatan pengguna MRT Jakarta;
2. Melakukan koordinasi dalam penyusunan ketentuan dan panduan operasi dan pemeliharaan MRT Jakarta yang berbasis pada regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi yang berwenang;
3. Melakukan *project safety review* untuk memastikan operasi berjalan sesuai dengan standar keselamatan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan;
4. Melakukan koordinasi dengan institusi yang berwenang dalam rangka penentuan standar pengujian prasarana atau sarana sebelum pengoperasian;
5. Memberi arahan kepada unit kerja SDM dalam rangka struktur organisasi dan sertifikasi bagi karyawan operasional dan pemeliharaan sesuai ketentuan;
6. Koordinasi dalam kesiapan *database asset* terkait infrastruktur dan fasilitas kereta api, beserta sistem jadwal dan pengendalian pemeliharaan;
7. Menetapkan kebijakan investasi dan *outsourcing* perlengkapan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas sistem MRT Jakarta;
8. Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan lembaga atau institusi terkait lainnya dalam rangka menyiapkan fasilitas dan sistem layanan yang berkesinambungan bagi pengguna jasa kereta dalam melakukan perjalanan;
9. Memastikan komunikasi dan edukasi bagi pelanggan pengguna MRT Jakarta untuk menjaga kepuasan pelanggan dan reputasi Perseroan.

Aspek Perencanaan

1. Melakukan koordinasi dalam penetapan dan pengembangan standar teknis yang diperlukan dalam operasi dan pemeliharaan fasilitas MRT Jakarta;
2. Memastikan ketersediaan tim yang berkemampuan dalam peningkatan kebutuhan perancangan terkait dengan operasi dan pemeliharaan sistem MRT Jakarta;

Technical Aspects

1. Ensuring the technical and engineering aspects both in the internal environment (team) and with technology providers;
2. Providing technical support to project implementation activities to fulfill predetermined design standards;
3. Technical Aspect Control;
 - Coordinating every effort in the context of increasing technical knowledge in the organization;
 - Determining, informing, disseminating, and assigning the implementation of standards or technical provisions;
 - Monitoring and proposing changes to the solution or design results in relation to the scope, capability or technical performance, cost effectiveness, durability or service life, and ease of maintenance.

Preparation of MRT Jakarta Operations

1. Coordinating the formulation and development of policies in the context of work safety and harmony with existing work safety standards, including the safety of MRT Jakarta users;
2. Coordinating the preparation of provisions and guidelines for the operation and maintenance of MRT Jakarta based on regulations issued by the authorized institutions;
3. Carrying out project safety review to ensure the operations comply with the safety standard as set forth by the prevailing laws and regulations;
4. Coordinating with authorized institutions in the context of determining standards for testing infrastructure or facilities before operation;
5. Providing input to HC work units in the framework of organizational structure and certification for operational and maintenance employees in accordance with the provisions;
6. Coordinating in the preparation of a database of assets related to railroad infrastructure and facilities, along with a maintenance schedule and control system;
7. Establishing investment policies and outsourcing of infrastructure maintenance equipment and MRT system facilities;
8. Coordinating with the Central Government or Regional Government and other related institutions in order to prepare facilities and a sustainable service system for the train passengers while traveling;
9. Ensuring communication and education to the MRT Jakarta users to maintain customer satisfaction and Corporate reputation.

Planning Aspects

1. Coordinating the determination and development of technical standards required in the operation and maintenance of MRT Jakarta facilities;
2. Preparing a team capable of increasing the design requirements related to the operations and maintenance of MRT Jakarta system;



3. Berkoordinasi dalam proses perencanaan pembuatan paket pekerjaan konstruksi dalam kaitan dengan pelaksanaan desain dan pekerjaan konstruksi;
4. Membantu mengembangkan rencana strategi operasi dan pemeliharaan sistem MRT sebagai bagian dari Rencana Bisnis Perusahaan guna menjamin keberlanjutan dan kontinuitas penyelenggaraan dan operasional MRT Jakarta;
5. Melakukan koordinasi penyusunan dan pengkajian rancangan teknis operasional, pemeliharaan, dan perawatan;
6. Memonitor dan merekomendasikan perubahan-perubahan hasil rancangan dalam kaitan dengan lingkup pembangunan, kinerja teknis, efektivitas biaya, usia layanan, dan aspek pemeliharaan;
7. Melakukan koordinasi antar bidang disiplin dalam rangka kesuksesan operasi MRT Jakarta;
8. Bertanggung jawab dalam mempersiapkan dan pengurusan seluruh perizinan yang diperlukan dalam keberlangsungan operasi dan pemeliharaan sistem MRT Jakarta.

Tanggung Jawab pada Operasi dan Pemeliharaan

1. Persiapan Operasi dan Pemeliharaan;
2. Memeriksa kesiapan implementasi aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta aspek lingkungan;
3. Memastikan perizinan operasi dan pemeliharaan didapatkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Operasi dan Pemeliharaan

1. Bertanggung jawab atas aktivitas operasi dan pemeliharaan lapangan dan menjamin kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan laporan kepada pemegang saham mengenai kinerja operasi dan pemeliharaan MRT Jakarta;
3. Menetapkan kebijakan terkait interaksi dengan vendor, supplier, dan gerai dalam skema operasi dan pemeliharaan;
4. Mengembangkan dan menjalankan rencana pengendalian dan jaminan kualitas;
5. Mengendalikan implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan oleh selama tahapan operasi dan pemeliharaan;
6. Mengoordinasikan rapat integrasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dan sistem dokumentasinya;
7. Memastikan terlaksananya pelaporan rutin terkait aspek-aspek operasi dan pemeliharaan;
8. Mengoordinasikan dokumentasi operasi dan pemeliharaan secara keseluruhan;
9. Menetapkan kebijakan sistem pengamanan terintegrasi sebagai bagian dari layanan operasi dan pemeliharaan;
10. Memastikan implementasi sistem pengamanan sebagai bagian dari operasi dan pemeliharaan untuk menjamin keselamatan pengguna jasa.

3. Coordinating in planning the construction work package in relation to the implementation of design and construction work;
4. Helping to develop the operational and maintenance strategy for the MRT system as part of the Corporation Business Plan to ensure the sustainability and continuity of the operations and maintenance of MRT Jakarta;
5. Coordinating the preparation and review of operational, maintenance, and technical maintenance designs;
6. Monitoring and recommending changes to the design results in relation to the scope of development, technical performance, cost effectiveness, service life, and maintenance aspects';
7. Coordinating between disciplines in the context of the success of MRT Jakarta operation;
8. Being responsible for preparing and administering all licenses needed in MRT Jakarta operations and maintenance.

Responsibilities in Operations and Maintenance

1. Operational and Maintenance Preparation;
2. Checking implementation readiness of occupational safety and health aspects as well as environmental aspects;
3. Ensuring the operational and maintenance permit has been obtained in accordance with the prevailing laws and regulations.

Operations and Maintenance

1. Being responsible for field operational activities and maintenance as well as ensuring compliance with the prevailing laws and regulations;
2. Submitting a report to Shareholders concerning the operational and maintenance performance of MRT Jakarta;
3. Establishing policies concerning interaction with vendors, suppliers, and tenants in operational and maintenance scheme;
4. Developing and implementing a control plan and quality assurance;
5. Controlling the implementation of an occupational safety and health management system during the operational and maintenance stage;
6. Coordinating integration meeting for operational and maintenance implementation as well as a documentation system;
7. Ensuring the implementation of a routine report on operational and maintenance aspects;
8. Coordinating the overall operational and maintenance documentation;
9. Establishing an integrated safety system policy as a part of operational and maintenance service;
10. Ensuring the implementation of a security system as a part of the operational and maintenance service to ensure passengers' safety.

Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi

1. Melakukan koordinasi dalam penyusunan dan penetapan kebijakan pelaksanaan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi dari Divisi Legal, General Affairs and Procurement, Information System & Technology, Finance & Accounting dan Divisi Human Capital, dan berkoordinasi dengan Direksi;
2. Mengawasi dan mengevaluasi seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi dari Direktorat Keuangan dan Manajemen Korporasi;
3. Menetapkan kebijakan anggaran, keuangan, dan akuntansi Perseroan;
4. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran Perseroan;
5. Berkoordinasi dengan Direktur Pengembangan Bisnis untuk menetapkan Kebijakan Investasi;
6. Memfasilitasi proses perencanaan keuangan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perseroan;
7. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran Perseroan;
8. Melakukan pengendalian anggaran, biaya, dan pendapatan Perseroan;
9. Melakukan koordinasi laporan keuangan dan laporan RKAP;
10. Mengendalikan dan mengoordinasikan fungsi-fungsi administratif kegiatan impor keperluan konstruksi MRT Jakarta;
11. Menetapkan kebijakan teknologi dan sistem informasi Perseroan;
12. Melakukan pengembangan teknologi dan sistem informasi Perseroan;
13. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan teknologi dan sistem informasi Perseroan;
14. Bertanggung jawab dalam sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia, mulai dari rekrutmen, pengembangan dan penempatan, hingga pemutusan hubungan kerja;
15. Menetapkan kebijakan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
16. Menetapkan standar kompetensi strategis untuk organisasi;
17. Menetapkan pola pengembangan dan pelatihan karyawan;
18. Menetapkan pola pengelolaan sistem kompensasi dan hubungan industri;
19. Menetapkan kebijakan dan sistem pengelolaan tempat kerja yang aman dan nyaman;
20. Melakukan koordinasi proses penilaian kinerja karyawan dan sistem *reward & punishment* atas prestasi kerja dan pelanggaran di Perseroan;
21. Berkoordinasi dengan Direktur Konstruksi dan Direktur Operasi dan Pemeliharaan, khususnya dalam bidang *engineering* (keteknikan), untuk penyiapan dokumen pengadaan;
22. Menetapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang mengakomodasi aspek keselamatan sesuai (SMK3KP);

Finance and Corporate Management Director

1. Coordinating the preparation and determination of policies for the implementation of all activities related to the functions of the Information System & Technology, Finance & Accounting Division and the Human Capital Division, and coordinate with the Directors;
2. Supervising and evaluating all activities related to the functions of the Directorate of Finance and Corporate Management;
3. Establishing the Corporation and financial and accounting policies;
4. Carrying out monitoring and evaluation of the realization of the Corporation budget;
5. Coordinating with the Business Development Director to establish Investment Policy;
6. Facilitating the process of financial planning and Corporation Work Plan and Budget (RKA) preparation;
7. Monitoring and evaluating the realization of Corporate budget;
8. Controlling the Corporation budget, costs, and revenues;
9. Coordinating financial statements and RKAP reports;
10. Controlling and coordinating the administrative functions of the import activities of the MRT Jakarta construction;
11. Establishing technology policies and information systems of the Corporation;
12. Developing technology and information systems in the Corporation;
13. Monitoring and evaluating the application of technology and information systems of the Corporation;
14. Taking responsibility in the system of Human Capital Management, from recruitment, development, and appointment until termination;
15. Establishing policies related to the Human Capital Management System;
16. Establishing strategic competency standards for the organization;
17. Establishing employee training and development plans;
18. Establishing a compensation and industrial relationship relation management system;
19. Establishing policies and management of a safe and comfortable work environment;
20. Coordinating the employee performance assessment process and the implementation of reward & punishment systems for work performance and violations in the Corporation;
21. Coordinating with Construction Director and Operations and Maintenance Director especially on engineering aspects, to prepare procurement documents;
22. Establishing policy for goods and services procurement of which accommodating safety aspects in accordance with Occupational Health and Safety and Railway Safety Management System (SMK3KP);



23. Menangani kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penanganan masalah hukum;
24. Memberikan masukan dari aspek hukum kepada Direksi, berkaitan dengan operasionalisasi dan pengembangan usaha Perseroan;
25. Melakukan *monitoring* Daftar Pemegang Saham dan pemutakhirannya;
26. Memastikan ketersediaan sumber daya untuk implementasi fungsi *Governance, Risk, and Compliance*;
27. Memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk implementasi SMK3KP, Sistem Manajemen Lingkungan, Sistem Manajemen Mutu di lingkungan MRT Jakarta;
28. Memastikan skema pendanaan dan ketersediaan alokasi anggaran untuk kejadian tanggap darurat keselamatan, keamanan, dan bencana;
29. Mengimplementasikan aspek-aspek *Governance, Risk, and Compliance* dalam pelaksanaan pengelolaan Perseroan; dan
30. Mengembangkan budaya mengelola risiko, keselamatan, dan kesehatan kerja serta berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam pengelolaan konstruksi.

Direktur Pengembangan Bisnis

1. Melakukan koordinasi dalam penyusunan dan penetapan kebijakan pelaksanaan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi dari Divisi Commercial & Retail, Divisi Transit-Oriented Development, dan Divisi Business Expansion;
2. Melakukan koordinasi dalam penyusunan kebijakan tentang pengelolaan investasi Perseroan yang bersifat pengembangan usaha dan pembinaan kerja sama usaha yang berkaitan dengan bidang usaha Perseroan;
3. Menetapkan kebijakan pengembangan usaha *non-farebox* dan pengelolaan kawasan sekitar stasiun;
4. Menetapkan kebijakan kemitraan strategis;
5. Melakukan koordinasi dalam mengembangkan kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka pengembangan Perseroan;
6. Menetapkan formulasi TOD, untuk menjamin kesinambungan (*sustainability*) operasional MRT Jakarta (*potential future direction of system, recommend service, and capital improvements*);
7. Mencari peluang usaha sesuai dengan perencanaan jangka panjang Perseroan dengan persetujuan Direksi;
8. Membangun, mengorganisir, dan mengoordinasikan perencanaan dan strategi pengembangan usaha;
9. Berkoordinasi dengan Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi dalam penyusunan strategi dan penyelenggaraan pengembangan usaha, khususnya penggunaan ruang dalam stasiun dan fasilitas kereta api, sampai tersusunnya model bisnis, perkiraan, dan validasi asumsi untuk kebutuhan pengembangan usaha;
10. Mengupayakan jalur pengembangan usaha yang menguntungkan dan tetap berada pada kondisi realistis dan sehat, selaras dengan bisnis utama Perseroan;

23. Handling activities in relation with the management of legal issues;
24. Providing input based on legal aspects to the Board of Directors, in relation with the operations and development of Corporation business;
25. Monitoring the Register of Shareholders and its update;
26. Ensuring the availability of resources for the implementation of Governance, Risk, and Compliance functions;
27. Ensuring the availability of adequate resources to implement SMK3KP, the Environmental Management System, and the Quality Management System within MRT Jakarta;
28. Ensuring funding scheme and availability of budget allocation of safety, security, and disaster emergency response plan;
29. Implementing Governance, Risk, and Compliance aspects in the Corporation's management; and
30. Building culture of which manages risk, occupational safety, and health, focusing on customer satisfaction in construction management.

Business Development Director

1. Coordinating the preparation and establishment of policy on the implementation of all activities concerning the functions of Commercial & Retail Division, TransitOriented Development Division, and Business Expansion Division;
2. Coordinating the preparation of policy concerning Corporation investment management for business expansion and business cooperation assistance in relation with the Corporation's business line;
3. Establishing the policy for Non-Farebox business development and the development of area surrounding the stations;
4. Establishing the policy on strategic partnership;
5. Coordinating to develop strategic partnership with relevant stakeholders to develop the Corporation;
6. Establishing TOD formulation to ensure sustainability of MRT Jakarta operations (potential future direction of system, recommended service, and capital improvements);
7. Finding business opportunities in line with Corporation long-term planning with approval from the Board of Directors;
8. Developing, organizing, and coordinating the planning and strategy for business development;
9. Coordinating with Finance and Corporate Management Director in developing strategy and implementation of business development, especially for the utilization of space in the station and railway facilities, to the establishment of business model, estimation, and assumption validation for business development;
10. Promoting profitable business development pathways while remaining in realistic and healthy condition, in line with the Corporation main business;

11. Melakukan koordinasi dalam merencanakan investasi jangka panjang Perseroan;
12. Memastikan optimalisasi atas biaya pengembangan usaha dan melakukan upaya-upaya yang diperlukan dalam rangka perubahan rencana maupun implementasi pengembangan usaha;
13. Memastikan standar keselamatan, lingkungan, keamanan, dan mutu yang berlaku di MRT Jakarta dipatuhi dalam skema kerja sama dengan mitra;
14. Mengimplementasikan aspek-aspek *Governance, Risk, and Compliance* dalam pelaksanaan pengelolaan Perseroan; dan
15. Mengembangkan budaya mengelola risiko, keselamatan dan kesehatan kerja serta berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam pengelolaan konstruksi.

RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan, atau setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

Publikasi mengenai rencana pelaksanaan rapat Direksi selambat lambatnya dilakukan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan. Dalam publikasi tersebut, diinformasikan mengenai tanggal dan waktu pelaksanaan rapat, lokasi rapat, agenda rapat, dan pihak-pihak yang diundang dalam menghadiri rapat.

11. Coordinating in planning long-term investment of the Corporation;
12. Ensuring optimization of business development cost and implementing the required measures in terms of plan changes and implementation of business development;
13. Ensuring the safety, environmental, security, and quality standards applicable in MRT Jakarta are fulfilled in collaboration scheme with partners;
14. Implementing Governance, Risk, and Compliance aspects in the Corporation's management; and
15. Building culture of which manages risk, occupational safety, and health, focusing on customer satisfaction in Construction management.

BOARD OF DIRECTORS' MEETING

The Board of Directors' meeting is held at least once a month, or anytime as deemed necessary by one or more members of the Board of Directors. The Board of Directors' Meeting is valid and resolutions can be taken if it is attended or represented by more than ½ (half) of its total Members.

The publication concerning the plan to conduct a Board of Directors' meeting shall be made no later than 3 (three) days prior to the date of the meeting. The publication shall inform the date and time of meeting, the location, the agenda, and the parties invited to attend the meeting.

Rekapitulasi Kehadiran Anggota Direksi Tahun 2021
Recapitulation of Attendance of the Members of the Board of Directors in 2021

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Direksi Board of Directors' Meetings			Rapat Bersama Dewan Komisaris Joint Meetings with the Board of Commissioners		
		Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran Attendance %	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran Attendance %
Tuhyat	Direktur Utama President Director	8	8	100	3	3	100
Silvia Halim	Direktur Konstruksi Construction Director	73	67	91,7	13	12	92,31
Muhammad Effendi	Direktur Operasi dan Pemeliharaan Operations and Maintenance Director	73	67	91,7	13	13	100
Roy Rahendra	Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi Finance and Corporate Management Director	73	72	98,6	13	12	92,31
Farchad H. Mahfud	Direktur Pengembangan Bisnis Business Development Director	73	72	98,6	13	13	100
M. Aprindy*)	Direktur Utama President Director	21	21	100	3	3	100
William P. Sabandar**)	Direktur Utama President Director	39	36	92,3	7	7	100

*) menjabat dari 22 Juli 2022 - 25 Oktober 2022 | served from July 22, 2022 - October 25, 2022

**) menjabat hingga 22 Juli 2022 | served until July 22, 2022



Keputusan Rapat Direksi ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Risalah rapat harus dibuat untuk setiap Rapat Direksi, dan dalam risalah rapat harus dicantumkan pula pendapat yang berbeda (*dissenting comments*) dengan apa yang diputuskan dalam rapat (bila ada). Selama tahun 2022, Direksi mengadakan Rapat Direksi sebanyak 73 kali dan rapat bersama Dewan Komisaris sebanyak 13 kali.

PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KAPABILITAS ANGGOTA DIREKSI

Program peningkatan kapabilitas merupakan program penting agar Direksi dapat selalu memperbarui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perseroan dan pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Direksi. Berikut adalah ketentuan-ketentuan tentang program peningkatan kapabilitas bagi Direksi:

1. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Direksi;
2. Rencana untuk melaksanakan program peningkatan kapabilitas harus dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan Direksi;
3. Setiap anggota Direksi yang mengikuti program peningkatan kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan diminta untuk menyajikan presentasi kepada anggota Direksi lainnya dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan;
4. Anggota Direksi yang bersangkutan bertanggung jawab untuk membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan program peningkatan kapabilitas. Laporan tertulis tersebut disampaikan kepada Direksi.

Pelatihan dan/atau peningkatan kapabilitas anggota Direksi telah diatur pada Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT MRT Jakarta (Persero) Nomor SK/010/BOC-MRT/XII/2020, dan Nomor SK/066/BOD-MRT/XII/2020, tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

The decisions in the Board of Commissioners' Meeting are made through deliberation for consensus. In the event consensus cannot be reached, the resolutions are made by voting, based on a vote of at least a little more than $\frac{1}{2}$ (half) of the total votes cast at the meeting. Each Board of Directors' Meeting must be outlined in minutes of meeting covering the dissenting opinions from the meeting participant and the meeting's decisions (if any). Throughout 2022, the Board of Directors held 73 internal meetings and 13 joint meetings with the Board of Commissioners.

COMPETENCY AND CAPABILITY IMPROVEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Capability development program is a crucial program for the Board of Directors to be updated with information on recent developments of the Corporation's business activities and other knowledge concerning the implementation of their duties. The provisions on capability development program for the Board of Directors are as follows:

1. Capability development program is carried out to develop the professional effectiveness of the Board of Directors;
2. Capability development program execution plan must be included in the annual work plan and budget of the Board of Directors;
3. Each member of the Board of Directors who participates in a capability development program, such as seminar and/or training, is requested to present to other members of the Board of Directors to share the information and knowledge;
4. The relevant member of the Board of Directors is responsible to prepare a written report concerning capability development program execution. The report is submitted to the Board of Directors.

Training and/or capacity building for the Board of Directors' members has been regulated in PT MRT Jakarta (Persero) Board of Commissioners and Directors Joint Decision Number SK/010/BOC-MRT/XII/2020, and Number SK/066/BOD-MRT/XII/2020, regarding Board Manual for the Board of Commissioners and Directors.

Program Pengembangan Kapabilitas Anggota Direksi Capability Improvement Program of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Nama Program Name of Program	Lembaga Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Date and Place
Tuhayat	Direktur Utama President Director	<i>Business Continuity Management (BCM) Table-Top Simulation</i> PT MRT Jakarta (Persero)	PT Delloite Konsultan Indonesia	7 Desember 2022, <i>Onsite</i> - Wisma Nusantara, PT MRT Jakarta (Persero) December 07, 2022, <i>Onsite</i> - Wisma Nusantara, PT MRT Jakarta (Persero)
		Program Pengenalan Direktur Utama President Director Induction Program	Divisi Corporate Secretary Corporate Secretary Division	22 Juli 2022, Wisma Nusantara, PT MRT Jakarta (Persero) July 22, 2022, Wisma Nusantara, PT MRT Jakarta (Persero)

Program Pengembangan Kapabilitas Anggota Direksi
Capability Improvement Program of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Nama Program Name of Program	Lembaga Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Date and Place
Silvia Halim	Direktur Konstruksi Construction Director	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) <i>Leaders Summit 2022</i> Regional Owned Enterprises (BUMD) Leaders Summit 2022	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Provinsi DKI Jakarta Owned Enterprise Development Agency (BP BUMD) DKI Jakarta Province	15 Januari 2022, <i>Onsite</i> - Jakarta Equestrian Park January 15, 2022, <i>Onsite</i> - Jakarta Equestrian Park
		<i>Sharing Discussion: Governance, Risk, and Compliance (GRC) Terintegrasi</i> Sharing Discussion: Integrated Governance, Risk, and Compliance (GRC).	PT MRT Jakarta (Perseroda)	18 Agustus 2022, <i>Online</i> via Ms. Teams August 18, 2022, <i>Online</i> via Ms. Teams
		<i>Business Continuity Management (BCM) Table-Top Simulation</i> PT MRT Jakarta (Perseroda)	PT Delloite Konsultan Indonesia	07 Desember 2022, <i>Onsite</i> - Wisma Nusantara, PT MRT Jakarta (Perseroda) December 07, 2022, <i>Onsite</i> - Wisma Nusantara, PT MRT Jakarta (Perseroda)
Muhammad Effendi	Direktur Operasi dan Pemeliharaan Operations and Maintenance Director	<i>Sharing Discussion: Governance, Risk, and Compliance (GRC) Terintegrasi</i> Sharing Discussion: Integrated Governance, Risk, and Compliance (GRC).	PT MRT Jakarta (Perseroda)	18 Agustus 2022, <i>Online</i> via Ms. Teams August 18, 2022, <i>Online</i> via Ms. Teams
		<i>Business Continuity Management (BCM) Table-Top Simulation</i> PT MRT Jakarta (Perseroda)	PT Delloite Konsultan Indonesia	07 Desember 2022, <i>Onsite</i> - Wisma Nusantara, PT MRT Jakarta (Perseroda) December 07, 2022, <i>Onsite</i> - Wisma Nusantara, PT MRT Jakarta (Perseroda)
Roy Rahendra	Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi Finance and Corporate Management Director	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) <i>Leaders Summit 2022</i> Regional Owned Enterprises (BUMD) Leaders Summit 2022	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Provinsi DKI Jakarta Regional Owned Enterprise Development Agency (BP BUMD) DKI Jakarta Province	15 Januari 2022, <i>Onsite</i> - Jakarta Equestrian Park January 15, 2022, <i>Onsite</i> - Jakarta Equestrian Park
		<i>Sharing Discussion: Governance, Risk, and Compliance (GRC) Terintegrasi</i> Sharing Discussion: Integrated Governance, Risk, and Compliance (GRC).	PT MRT Jakarta (Perseroda)	18 Agustus 2022, <i>Online</i> via Ms. Teams August 18, 2022, <i>Online</i> via Ms. Teams
		<i>Business Continuity Management (BCM) Table-Top Simulation</i> PT MRT Jakarta (Perseroda)	PT Delloite Konsultan Indonesia	07 Desember 2022, <i>Onsite</i> - Wisma Nusantara, PT MRT Jakarta (Perseroda) December 07, 2022, <i>Onsite</i> - Wisma Nusantara, PT MRT Jakarta (Perseroda)
Farchad H. Mahfud	Direktur Pengembangan Bisnis Business Development Director	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) <i>Leaders Summit 2022</i> Regional Owned Enterprises (BUMD) Leaders Summit 2022	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Provinsi DKI Jakarta Regional Owned Enterprise Development Agency (BP BUMD) DKI Jakarta Province	15 Januari 2022, <i>Onsite</i> - Jakarta Equestrian Park January 15, 2022, <i>Onsite</i> - Jakarta Equestrian Park
		<i>Sharing Discussion: Governance, Risk, and Compliance (GRC) Terintegrasi</i> Sharing Discussion: Integrated Governance, Risk, and Compliance (GRC).	PT MRT Jakarta (Perseroda)	18 Agustus 2022, <i>Online</i> via Ms. Teams August 18, 2022, <i>Online</i> via Ms. Teams
		<i>Business Continuity Management (BCM) Table-Top Simulation</i> PT MRT Jakarta (Perseroda)	PT Delloite Konsultan Indonesia	07 Desember 2022, <i>Onsite</i> - Wisma Nusantara, PT MRT Jakarta (Perseroda) December 07, 2022, <i>Onsite</i> - Wisma Nusantara, PT MRT Jakarta (Perseroda)
M. Aprindy*)	Direktur Utama President Director	<i>Sharing Discussion: Governance, Risk, and Compliance (GRC) Terintegrasi</i> Sharing Discussion: Integrated Governance, Risk, and Compliance (GRC).	PT MRT Jakarta (Perseroda)	18 Agustus 2022, <i>Online</i> via Ms. Teams August 18, 2022, <i>Online</i> via Ms. Teams
William P. Sabandar**)	Direktur Utama President Director	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) <i>Leaders Summit 2022</i> Regional Owned Enterprises (BUMD) Leaders Summit 2022	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Provinsi DKI Jakarta Regional Owned Enterprise	15 Januari 2022, <i>Onsite</i> - Jakarta Equestrian Park January 15, 2022, <i>Onsite</i> - Jakarta Equestrian Park

*) menjabat dari 22 Juli 2022 - 25 Oktober 2022 | served from July 22, 2022 - October 25, 2022

**) menjabat hingga 22 Juli 2022 | served until July 22, 2022



PROGRAM PENGENALAN DIREKSI

Perseroan melaksanakan program pengenalan bagi anggota Direksi baru untuk memberikan gambaran tanggung jawab Direksi terkait aktivitas bisnis, rencana perusahaan, struktur organisasi, dan hal-hal lainnya. Program pengenalan Direksi diatur di dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

Program pengenalan Direksi dilakukan kepada M. Aprindy dan Tuhayat oleh Direktur Terkait dan Kepala Divisi Corporate Secretary. Setelah diangkat sebagai Direktur Utama pada 22 Juli 2022, M. Aprindy mengikuti beragam program pengenalan dalam rentang 26 Juli 2022 sampai dengan 17 Agustus 2022 dengan topik dan penjelasan terkait penerapan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan Perseroan termasuk tugas dan tanggung jawab Direksi, aktivitas dan program dalam bidang sumber daya manusia, teknologi informasi, anak perusahaan, keuangan, pengembangan bisnis, legal, serta proyek konstruksi dan KBT.

Program pengenalan juga dilakukan kepada Tuhayat yang resmi menjabat Direktur Utama pada 25 Oktober 2022. Direktur terkait dan Kepala Divisi Corporate Secretary melaksanakan program pengenalan pada 8 November 2022 berupa kunjungan lapangan ke Depo Lebak Bulus untuk meninjau kegiatan *Operation Control Center* dan pemeliharaan kereta, serta kemajuan beberapa proyek KBT. Pada 24 November 2022, dilakukan sesi pengenalan terkait penerapan tata Kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan Perseroan termasuk tugas dan tanggung jawab Direksi.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Kinerja Direksi dan masing-masing anggota Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris, dan disampaikan kepada pemegang saham dalam RUPS. Penilaian dilakukan berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (KPI) yang telah ditetapkan berdasar Kontrak Manajemen yang ditandatangani Direksi dengan Gubernur DKI Jakarta sebagai perwakilan pemegang saham.

Dari hasil evaluasi pada tahun 2022 yang dilakukan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada pemegang saham, diketahui Direksi memperlihatkan kinerja yang baik dalam mengurus Perseroan. Direksi dapat merealisasikan target-target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Manajemen yang telah ditandatangani.

BOARD OF DIRECTORS' INDUCTION PROGRAM

The Corporation carries out an induction program for new members of the Board of Directors to provide an overview of the Board of Directors' responsibilities regarding business activities, corporate plans, organizational structure and other matters. The Board of Directors introduction program is regulated in the Board of Commissioners and Directors Board Manual.

The Board of Directors introduction program was conducted for M. Aprindy and Tuhayat by the Relevant Director and the Corporate Secretary Division Head. After being appointed as President Director on July 22, 2022, M. Aprindy participated in various induction programs from July 26, 2022 to August 17, 2022 with topics and explanations related to the implementation of good corporate governance, risk management and the compliance including the Board of Directors' duties and responsibilities, activities and programs in the fields of human capital, information technology, subsidiary management, finance, business development, legal, as well as construction and TOD projects.

The induction program was also carried out for Tuhayat who officially served as President Director on October 25, 2022. The relevant directors and the Corporate Secretary Division Head carried out an induction program on November 08, 2022 in the form of a site visit to the Lebak Bulus Depot reviewing Operation Control Center activities and train maintenance, as well as the progress of several TOD projects. On November 24 2022, an induction session was held regarding the implementation of good corporate governance, risk management and compliance including the Board of Directors' duties and responsibilities.

BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE ASSESSMENT

The performance of the Board of Directors and its each member is evaluated by the Board of Commissioners and submitted to the Shareholders during the GMS. The assessment is carried out by measuring the accomplishment of the Key Performance Indicators (KPI) as defined by the Management Contract signed by the Board of Directors and the Governor of DKI Jakarta as the shareholders' representative.

The results of the Board of Directors' performance assessment in 2022 reported to the shareholders showing the Board of Directors demonstrates excellent performance in managing the Corporation. The Board of Directors successfully realized the targets as defined in the Management Contract.

Hasil Penilaian dan Pencapaian KPI Direksi Tahun 2022
Assessment Results and KPI Achievement of the Board of Directors in 2022

Kode Code	KPI Tahun 2022 2022 KPI	Polaritas Polarity	Satuan Unit	Target Tahunan Yearly Target	Target Bobot (%) Weight Target (%)	
FI.1	EBITDA	↑	Rp	617.995.734.315	2,50	
FI.2	Total Pendapatan Total Revenue	↑	Rp	618.049.234.876	10,00	
FI.3	Cost Recovery Ratio	↑	%	37,20	2,50	
CU.1	Indeks <i>Engagement Stakeholder</i> Stakeholder Engagement Index	↑	Indeks Index	94,50	2,50	
CU.2	Indeks Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Index	↑	Indeks Index	86,00	7,50	
CU.3	% penyelesaian KSD % completion of KSD	↑	%	100,0	7,50	
CU.4	Total Penumpang (Rerata: 50.000) Ridership (Average: 50,000)	↑	Jumlah <i>Rider</i> Total Rider	18.250.00	7,50	
IB.1	Frequency Rate	↓	Rating	1,00	2,50	
IB.2	Train Service Delivery	↑	%	95,00	5,00	
IB.3	% Penyelesaian Konstruksi (Fase 2A) % Construction Progress (Phase 2A)	↑	%	17,28	7,50	
IB.4	% Penyelesaian <i>Milestone</i> Pengembangan Jalur Baru % Milestone Completion of New Track Development	↑	%	100	7,50	
IB.5	% Penyelesaian <i>Milestone</i> Pengembangan Bisnis Jasa Konsultasi <i>Rail Based</i> % Milestone Completion of Rail Based Consulting Services Business Development	↑	%	100	2,50	
IB.6	% Penyelesaian Pengembangan Infrastruktur KBT sesuai <i>Milestone</i> % Completion of TOD Infrastructure Development according to Milestone	↑	%	100	10,00	
IB.7	% Penyelesaian <i>Milestone</i> Pengembangan Bisnis Digital % Milestone Completion of Digital Business Development	↑	%	100	2,50	
IB.8	% Penyelesaian <i>Milestone Quick Wins</i> Transformasi Digital yang Terimplementasi % Milestone Completion of Quick Wins Digital Transformation Implemented	↑	%	100	2,50	
IB.9	% Penyelesaian <i>Milestone</i> Integrasi Antarmoda dengan Sistem MRTJ % Milestone Completion of intermodal Integration with MRTJ System	↑	%	100	10,00	
LG.1	% Implementasi <i>Roadmap</i> Berkelanjutan % Implementation of Sustainability Roadmap	↑	%	100	2,50	
LG.2	Tingkat Maturitas KM KM Maturity Index	↑	Skala Scale	8,10	2,50	
LG.3	Skor GRC GRC score	↑	Skor Score	3,60	2,50	
LG.4	Indeks Manajemen Talenta Talent Management Index	↑	Indeks Index	3,50	2,50	
					100,00	



	Periode Monitoring Monitoring Period	YTD 21 Desember YTD December 21 st			Capaian terhadap Target Tahunan (%) Accomplishment to Yearly Target (%)	Skor KPI terhadap Bobot (%) KPI Score to Weight (%)
		Target Target	Realisasi Realization	Capaian Terhadap Target YTD (%) Accomplishment to YTD Target (%)		
	Bulanan Monthly	61.7.995.734.315	698.017.114.382	112,95	112,95	2,82
	Bulanan Monthly	618.049.234.876	634.229.834.425	102,62	102,62	10,26
	Bulanan Monthly	37,20	48,92	120,00	120,00	3,00
	Tahunan Yearly	94,50	98,51	104,24	104,24	2,61
	Tahunan Yearly	86,00	88,32	102,70	102,70	7,70
	Triwulanan Quarterly	100,00	98,94	98,94	98,94	7,42
	Bulanan Monthly	18.250.000	19.776.064	108,36	108,36	8,13
	Bulanan Monthly	1,00	0,13	98,38	98,38	2,46
	Bulanan Monthly	95,00	100,00	105,26	105,26	5,26
	Bulanan Monthly	17,28	18,09	104,69	104,69	7,85
	Bulanan Monthly	100,00	100,00	100,00	100,00	7,50
	Bulanan Monthly	100,00	100,00	100,00	100,00	2,50
	Bulanan Monthly	100,00	98,14	98,14	98,14	9,81
	Bulanan Monthly	100,00	100,00	100,00	100,00	2,50
	Bulanan Monthly	100,00	100,00	100,00	100,00	2,50
	Bulanan Monthly	100,00	100,00	100,00	100,00	10,00
	Bulanan Monthly	100,00	100,00	100,00	100,00	2,50
	Tahunan Yearly	8,17	8,17	100,86	100,86	2,52
	Tahunan Yearly	3,67	3,67	101,94	101,94	2,55
	Tahunan Yearly	3,50	3,50	100,00	100,00	2,50
		100,00				102,40
		KPI Aktif Active KPIs				20

PENILAIAN DIREKSI TERHADAP KINERJA ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

Penilaian kinerja dilakukan melalui mekanisme evaluasi laporan berkala yang disampaikan organ pendukung. Kriteria penilaian meliputi realisasi pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan. Direksi melakukan penilaian terhadap kinerja dari setiap organ pendukung yang membantu Direksi dalam mengurus Perseroan. Berdasarkan penilaian yang telah dilaksanakan tahun 2022 diketahui, masing-masing organ pendukung telah dapat merealisasikan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan. Pengungkapan informasi tentang realisasi rencana kerja masing-masing organ pendukung selama tahun 2022 disampaikan pada halaman 263, 266, 270, 271, dan 277 Laporan ini, pada bahasan tentang Organ Lain Pendukung Direksi.

BOARD OF DIRECTORS' ASSESSMENT ON ITS SUPPORTING ORGANS' PERFORMANCE

The Board of Directors conducts an assessment on the performance of each supporting organs in managing the Corporation. The performance assessment is carried out through evaluation of periodic report submitted by the supporting organs. The assessment criteria include realization of work plan implementation. Based on the assessment in 2022, each supporting organ has realized all the work plans as defined. The disclosure of information on the realization of work plans of each supporting organ in 2022 is presented on page 263, 266, 270, 271, and 277 of this Report, under the discussion concerning Other Supporting Organs of the Board of Directors.





Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Directors Nomination and Remuneration

Pengangkatan, pemberhentian dan penetapan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan/atau Direksi merupakan hak pemegang saham yang dilakukan melalui mekanisme RUPS dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

MRT Jakarta merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berada di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan status tersebut, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi MRT Jakarta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena itu, nominasi anggota Dewan Komisaris Perseroan mengacu pada Pergub DKI Jakarta No. 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah. Sedangkan nominasi anggota Direksi Perseroan mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Patungan.

Nominasi Anggota Dewan Komisaris

Calon anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan, warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan formal, persyaratan materiil, dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, serta memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.
2. Memiliki integritas, loyalitas, dan dedikasi.
3. Memahami manajemen Perseroan.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan.
5. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
6. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan Perseroan manapun yang dinyatakan pailit.

Calon anggota Dewan Komisaris akan menjalankan proses seleksi yang dilakukan Perseroan melalui tahapan seleksi administrasi, yaitu verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan. Calon anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi administrasi kemudian menjalani uji kepatutan dan kelayakan (UKK) sebagai proses pengukuran kelayakan kepatutan kompetensi. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan dengan keputusan RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

The appointment, dismissal, and determination of total remuneration of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors are the Shareholders' rights carried out through the GMS mechanism with reference to the applicable laws and regulations.

Nomination Mechanism for the Board of Commissioners and Directors

MRT Jakarta is a Regionally Owned Enterprise (BUMD) under the Government of DKI Jakarta Province. With this status, the appointment and dismissal of members of MRT Jakarta Board of Commissioners and Board of Directors refer to the laws and regulations stipulated by the Government of DKI Jakarta Province. Therefore, the nomination of the Corporation's Board of Commissioners members refers to the Regulation of the Governor of DKI Jakarta Governor No. 50 of 2018 concerning Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Supervisory Board and Members of the Board of Commissioners of Regionally Owned Enterprises. Meanwhile, the nomination of the Corporation's Board of Directors members refers to the Regulation of the Governor of DKI Jakarta Province No. 5 of 2018 concerning Procedures for Appointment and Dismissal of the Board of Directors of Regionally Owned Enterprises and Joint Venture Companies.

Nomination of Board of Commissioners Members

The Board of Commissioners candidate is an individual, Indonesian citizen who meet the formal, material, and other requirements stipulated in prevailing laws and regulations, and fulfill the following requirements:

1. Capable of performing legal actions.
2. Have integrity, loyalty and dedication.
3. Understand the corporate management.
4. Having adequate knowledge in the Corporation's business sector.
5. Provide sufficient time to carry out his duties.
6. Never been involved in any activity of a company which is declared bankrupt.

The Board of Commissioners candidate will go through a selection process conducted by the Corporation through the administrative selection stage, i.e. verification of the requirements completeness. The Board of Commissioners candidate who passes the administrative selection will undergo the fit-and-proper test as a process to examine the competence fitness. The appointment of the Board of Commissioners member is determined by the GMS resolutions and/or the provisions of laws and regulations.

Nominasi Anggota Direksi

Calon anggota Direksi adalah orang perorangan, warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan formal, persyaratan materiil, dan persyaratan lain yang mengajukan lamaran kepada Gubernur DKI Jakarta, dengan melengkapi persyaratan formal. Calon anggota Direksi haruslah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah), yaitu:

1. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
2. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi;
3. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan yang memadai dalam bidang usaha Perseroan;
4. Memiliki kompetensi manajemen perusahaan;
5. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
6. Tidak menjabat struktural dan fungsional pada instansi/ lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan/ atau Direksi BUMD lainnya;
7. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan maupun yang dinyatakan pailit; dan
8. Syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Patungan, calon anggota Direksi akan mengikuti proses seleksi yang dilakukan Perseroan melalui tahapan seleksi administrasi, yaitu verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan. Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, akan menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagai proses pengukuran kelayakan kepatutan kompetensi. Calon yang lulus proses seleksi akan diangkat dan ditetapkan sebagai anggota Direksi dengan keputusan RUPS.

Selain menerima pendaftaran secara terbuka, Badan Pembina BUMD Provinsi DKI Jakarta memiliki manajemen talenta sebagai proses manajemen SDM untuk nominasi atau suksesi Direksi, dalam rangka pengembangan, penguatan dan pemeliharaan, dan kesinambungan BUMD. BPBUMD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan laporan wadah kandidat berupa daftar kandidat per posisi atau rumpun jabatan serta wadah kandidat secara berkala kepada Gubernur DKI Jakarta.

Nomination of the Board of Directors' Members

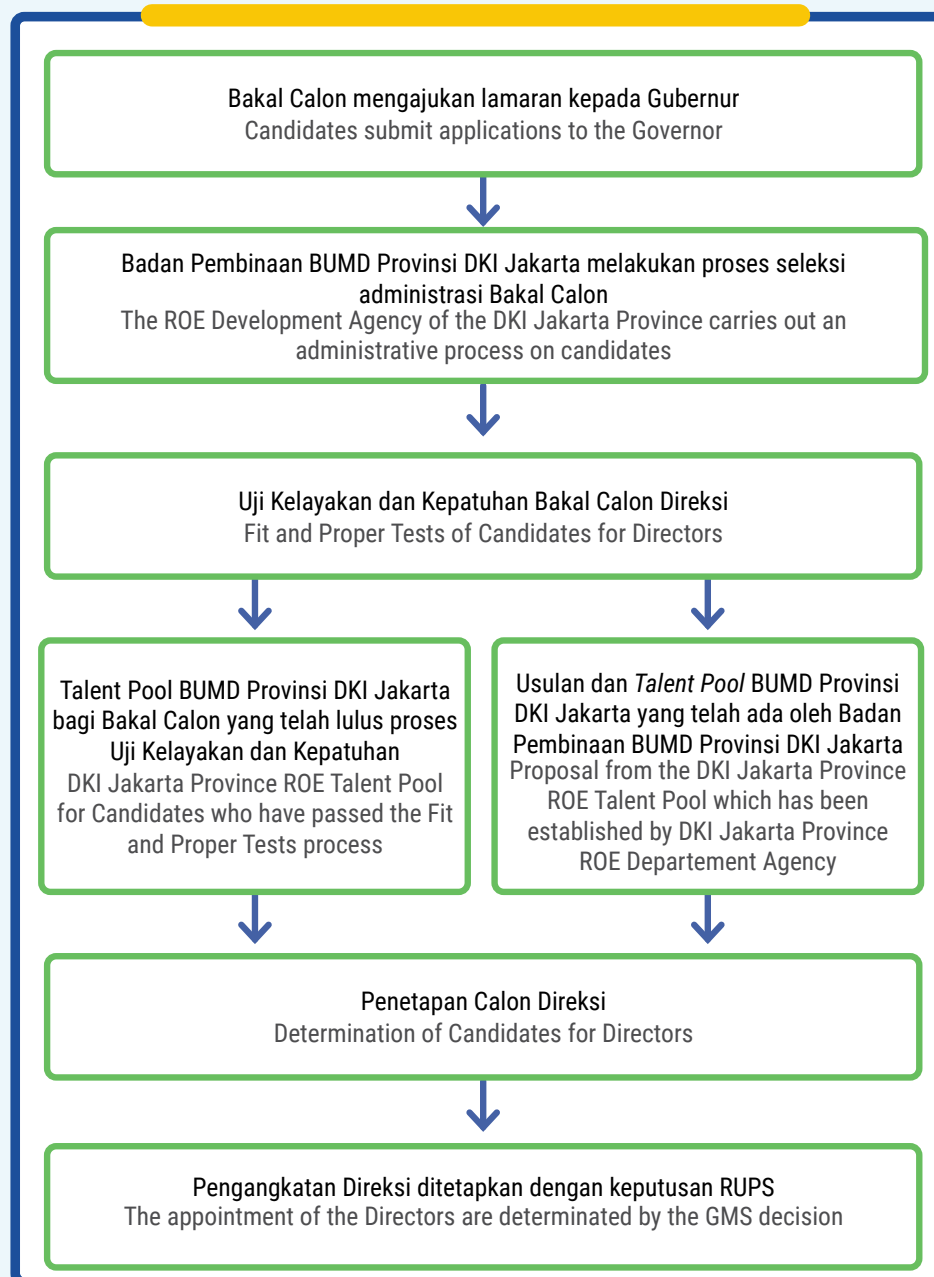
The Board of Directors candidate is an individual, Indonesian citizen who meets the formal, material, and other requirements and submits applications to the Governor of DKI Jakarta, by completing the formal requirements. Candidates for members of the Board of Directors must fulfill the requirements specified in the Regional Regulation of the Province of the Special Capital Region of Jakarta Number 9 of 2018 concerning Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah), namely:

1. Capable of taking legal actions;
2. Have integrity, loyalty and dedication;
3. Have adequate expertise, experience, ability in the Corporation's business sector;
4. Have corporate management competency;
5. Provide sufficient time to carry out their duties;
6. Have no structural and functional positions in the Central Government and Regional Government and/or serve as the Board of Directors of other BUMDs;
7. Have never been involved in any activity of a company that is declared bankrupt; and
8. Other conditions specified in the Corporation's Articles of Association.

In accordance with the Regulation of the Governor of the Province of the Special Capital Region of Jakarta Number 5 of 2018 concerning Procedures for Appointment and Dismissal of the Board of Directors of Regionally Owned Enterprises and Joint Ventures. The Board of Directors candidates who are declared to have passed the administrative selection, will undergo a Fit and Proper Test as a process of measuring competency eligibility. Candidates who pass the selection process will be appointed and determined as members of the Board of Directors by decision of the GMS.

In addition to accepting open registration, ROE Development Agency (BPBUMD) of DKI Jakarta Province has in place talent management as an HR management process for the nomination or succession of Directors, for the purpose of developing, strengthening and maintaining, and continuity of BUMDs. BPBUMD of DKI Jakarta Province submits reports regarding the candidates in the form of a list of candidates per position or position group as well as candidate forums periodically to the Governor of DKI Jakarta.

Proses Pengusulan hingga Penetapan Direksi Perseroan
The Process of Submission until Appointment of the Board of Directors of the Corporation

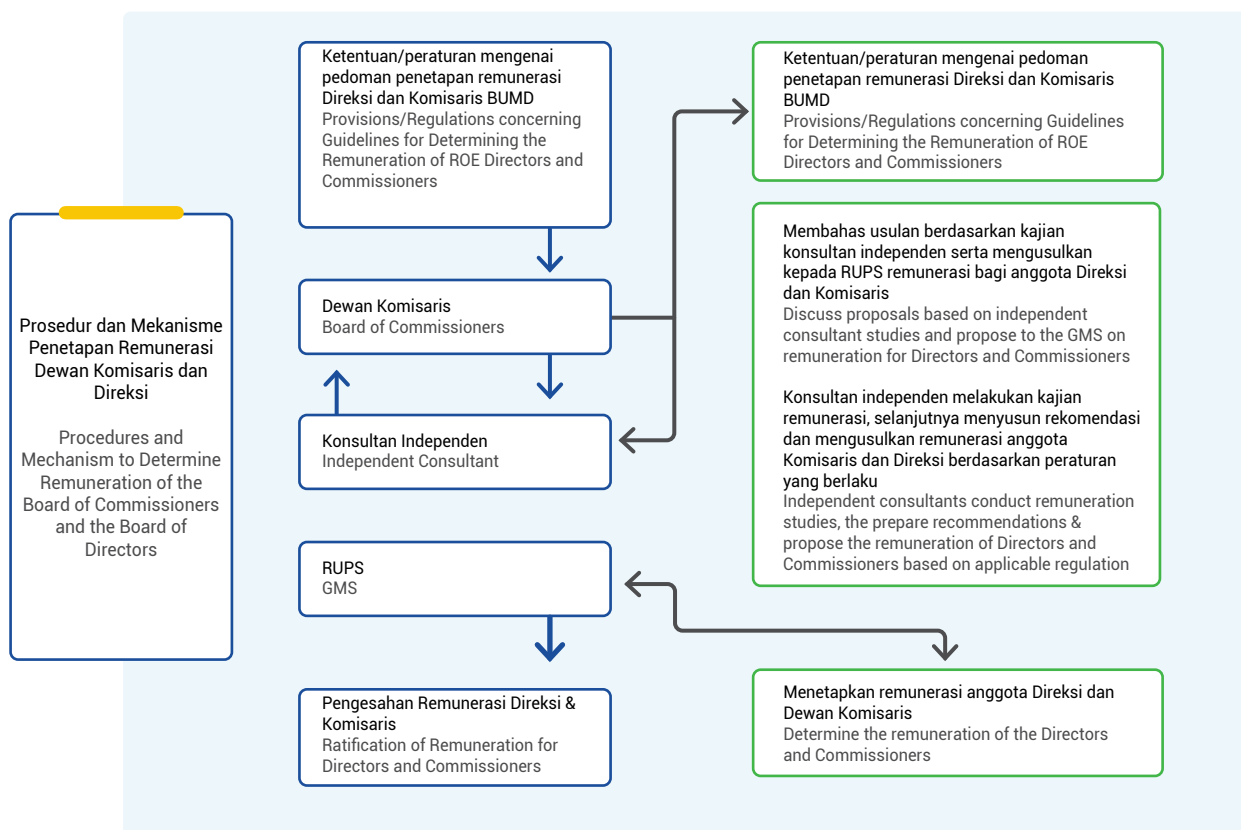


PROSEDUR DAN PELAKSANAAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Mekanisme remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris setelah mempertimbangkan hasil kajian pihak independen. Hal ini sesuai dengan Pergub DKI Jakarta No. 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas, dan Dewan Komisaris BUMD.

PROCEDURES AND IMPLEMENTATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS REMUNERATION

The remuneration mechanism for the members of the Board of Commissioners and Directors is defined by the GMS based on the recommendation from the Board of Commissioners after considering analysis results from an independent party. This is in line with Governor Regulation of DKI Jakarta No. 79 Year 2019 concerning Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, Supervisory Board, and Board of Commissioners of ROEs.



Kebijakan Dasar terkait Indikator dan Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2022

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 79 Tahun 2019;
- Kinerja Perseroan;
- Prestasi kerja Dewan Komisaris dan Direksi;
- Remunerasi yang berlaku dalam industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan, yang mempunyai jenis dan skala usaha yang sama dengan Perseroan.

Underlying Policies concerning the Indicators and Determination of Remuneration for the Board of Commissioners and Directors in 2022

The formulation of structures, policies, and total remuneration for the Board of Commissioners and Directors consider the factors as follow:

- The prevailing laws and regulations, especially Governor Regulation of DKI Jakarta Province No. 79 Year 2019;
- Performance of the Corporation;
- Professional accomplishment of the Board of Commissioners and Directors;
- Applicable remuneration within the industry based on the Corporation's business activities with similar business types and scale with the Corporation.



Komponen Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 79 Tahun 2019

Component of Income of the Board of Commissioners and Directors in Accordance with the Governor Regulation of DKI Jakarta Province No. 79 Year 2019

Remunerasi Dewan Komisaris Board of Commissioners' Remuneration	Remunerasi Direksi Board of Directors' Remuneration
- Honorarium / Honorarium - Tunjangan / Allowance - Fasilitas / Facilities - Tantiem/Insentif Kinerja / Performance Bonus/Incentive	- Honorarium / Honorarium - Tunjangan / Allowance - Fasilitas / Facilities - Tantiem/Insentif Kinerja / Performance Bonus/Incentive
Pajak atas Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi ditanggung dan menjadi beban Perseroan. Taxes on Honorarium, Allowances, and Facilities for the Board of Commissioners and Directors are borne by the Corporation	
Pajak atas Tantiem/Insentif Kinerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Dewan Komisaris. Taxes on Performance Bonus/Incentives for the Board of Commissioners and Directors are borne by each member of the Board of Commissioners.	

Struktur dan Komponen Remunerasi Dewan Komisaris

Structure and Components of The Board of Commissioners' Remuneration

Komponen Remunerasi Remuneration Component	Uraian Description	Bentuk dan Struktur Form and Structure
Honorarium Honorarium	Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh anggota Dewan Komisaris. Fixed income in the form of money received monthly by the members of the Board of Commissioners	- Perhitungan gaji Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama. - Perhitungan gaji Komisaris sebesar 35% dari gaji Direktur Utama. - Salary of the President Commissioner is 45% of the salary of President Director - Salary of the Commissioners are 35% of the salary of President Director.
Tunjangan Allowances	Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Dewan Komisaris selain Honorarium. Income in the form of money or something can be valued with money received at certain time by the members of the Board of Commissioners in addition to the Honorarium.	- Tunjangan Hari Raya, diberikan paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap per bulan di setiap tahunnya. - Tunjangan Jabatan, diberikan setiap bulan paling banyak 50% dari honorarium per bulan. - Tunjangan Asuransi Purna Jabatan, diberikan dengan ketentuan premi yang ditanggung Perseroan paling banyak 25% dari honorarium per tahun. - Holiday allowance, given every year of no more than 1 (one) time of total monthly fixed income - Position allowance, given monthly of no more than 50% of the monthly honorarium - Retirement Insurance Benefit, no more than 25% of the premium is borne by the Corporation annually.
Fasilitas Facilities	Penjaminan yang digunakan/ dimanfaatkan oleh anggota Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan. Insurance of which can be used/ utilized by the members of the Board of Commissioners to carry out their duties, authorities, obligations, and responsibilities based on the prevailing laws and regulations.	- Fasilitas Kesehatan, diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan. - Fasilitas Bantuan Hukum, diberikan jika diperlukan, dalam hal terjadi tindakan/ perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan Perseroan. - Fasilitas Perkumpulan Profesi, diberikan paling banyak untuk 2 (dua) perkumpulan, dan diberikan dalam bentuk uang pangkal/ pendaftaran dan uang iuran tahunan. - Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang menurut ketentuan perundang-undangan menjalankan fungsi operasional atau yang menjalankan fungsi kepengurusan dan kepenasihat Perseroan secara aktif, maka dapat diberikan fasilitas kendaraan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, kepatutan dan kemampuan keuangan Perseroan. - Health Facilities provided in the form of health insurance. - Legal Assistance Facilities, provided if necessary in the event of any actions for and on behalf of their position relating to the Corporation. - Professional Association Facilities, given for no more than 2 (two) associations, and are provided in the form of registration and annual fees. - In the case the members of the Board of Commissioners of whom according to statutory provisions carry out the operational functions or of whom carry out the Corporation's management and advisory functions actively, vehicle facilities may be given considering the principles of efficiency, properness, and financial capability of the Corporation.
Tantiem/Insentif Kinerja Performance Bonus/ Incentive	Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, maupun Direksi apabila Perseroan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi apabila terjadi peningkatan kinerja Perseroan, meskipun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian. Performance bonus is an award granted to the members of the Board of Commissioners and Directors if the Corporation makes a profit and does not record accumulated losses. Performance incentive is an income as an award granted to the members of the Board of Commissioners and Directors if the Corporation performance increase despite losses or accumulated losses.	Komposisi besarnya Tantiem/Insentif Kinerja bagi Dewan Komisaris mengikuti Faktor Jabatan: - Komisaris Utama sebesar 45% dari Direktur Utama; dan - Komisaris sebesar 35% dari Direktur Utama. The composition of Performance Bonus/Incentive for the Board of Commissioners follows the Factor of Position: - President Commissioners' bonus/incentive is 45% of the President Director. - The Commissioners bonus/incentive is 35% of the President Director.

Struktur dan Komponen Remunerasi Direksi
Structure and Components of the Board of Directors' Remuneration

Komponen Remunerasi Remuneration Component	Uraian Description	Bentuk dan Struktur Form and Structure
Gaji Salary	Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan. Fixed income in the form of money received monthly.	- Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan rumus perhitungan yang tercantum dalam Pergub DKI Jakarta No. 79 Tahun 2019, serta pedoman internal Pemprov DKI Jakarta. - Gaji anggota Direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi Faktor Jabatan sebesar 90% dari Gaji Direktur Utama. - Salary of the President Director is determined by the calculation as set forth by Governor Regulation of DKI Jakarta No. 79 Year 2019 and the internal guidelines of the Governance of DKI Jakarta. - Salary of other members of the Board of Directors is 90% of the President Director's salary.
Tunjangan Allowances	Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi selain Gaji. Income in the form of money or something can be valued with money received at certain time by the members of the Board of Directors in addition to the Salary.	- Tunjangan Hari Raya, paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap per bulan di setiap tahunnya. - Tunjangan Jabatan, diberikan setiap bulan paling banyak 50% dari gaji per bulan. - Tunjangan Asuransi Purna Jabatan, diberikan dengan ketentuan premi yang ditanggung Perseroan paling banyak 25% dari gaji per tahun. - Tunjangan Cuti Tahunan, diberikan setiap tahun paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap per bulan. - Tunjangan Cuti Besar, diberikan setiap 3 (tiga) tahun paling banyak 2 (dua) kali penghasilan tetap per bulan. - Holiday allowance, given every year of no more than 1 (one) times total monthly fixed income. - Position allowance, given monthly of no more than 50% of the monthly honorarium. - Retirement Insurance Benefit, no more than 25% of the premium is borne by the Corporation annually. - Annual Leave Allowance, given every year of no more than 1 (one) times of the monthly salary per month. - Sabbatical Leave Allowance, given once in three years of no more than 2 (two) times the monthly salary.
Fasilitas Facilities	Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Direksi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan. Income in the form of facilities/ benefits and/ or insurance of which can be used/ utilized by the members of the Board of Directors to carry out their duties, responsibilities, obligations, and responsibilities based on the prevailing laws and regulations.	- Fasilitas Kesehatan, diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan. - Fasilitas Bantuan Hukum, diberikan jika diperlukan, dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan Perseroan. - Fasilitas Kendaraan, diberikan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional dengan spesifikasi dan standar sesuai jabatan. - Fasilitas Perkumpulan Profesi, diberikan paling banyak untuk 2 (dua) perkumpulan, dan diberikan dalam bentuk uang pangkal/pendaftaran dan uang iuran tahunan. - Fasilitas Club Membership/Corporate Member, diberikan paling banyak untuk 2 (dua) keanggotaan, dan diberikan dalam bentuk uang pangkal/ pendaftaran dan uang iuran tahunan. - Health Facilities provided in the form of health insurance. - Legal Assistance Facilities, provided if necessary in the event of any actions for and on behalf of their position relating to the Corporation. - Vehicle Facilities, provided of no more than 1 (one) unit of official car along with the maintenance cost and operational in line with the specification and standard based on the position. - Professional Association Facilities, given for no more than 2 (two) associations, and are provided in the form of registration and annual fees. - Club Membership/Corporate Membership Facilities, provided of no more than 2 membership, and are provided in the form of registration and annual fees.
Tantiem/Insentif Kinerja Performance Bonus/ Incentive	Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, maupun Direksi apabila Perseroan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi apabila terjadi peningkatan kinerja Perseroan, meskipun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian. Performance bonus is an award granted to the members of the Board of Commissioners and Directors if the Corporation makes a profit and does not record accumulated losses. Performance incentive is an income as an award granted to the members of the Board of Commissioners and Directors if the Corporation performance increase despite losses or accumulated losses.	Komposisi besarnya Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi mengikuti Faktor Jabatan, yaitu anggota Direksi sebesar 90% dari Direktur Utama. Composition of the total Performance Bonus/Initiative follows the Factor of Position, i.e. a member of the Board of Directors receives 90% of the President Directors' salary.



Perhitungan Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Sesuai Pergub DKI Jakarta No. 79 Tahun 2019
Calculation of Total Remuneration for the Board of Commissioners and Directors in Accordance with Governor Regulation of DKI Jakarta Province No. 79 Year 2019

Jabatan Position	Besaran Total
Direktur Utama President Director	100%
Direksi Lainnya Other Directors	Sebesar 90% dari gaji Direktur Utama 90% of President Director's salary
Komisaris Utama Other Directors	Sebesar 45% dari gaji Direktur Utama 45% of President Director's salary
Komisaris Lainnya Other Commissioners	Sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama 90% of President Commissioners' salary

TRANSPARANSI REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2022

Sesuai dengan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 775/-071.241 perihal Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT MRT Jakarta (Persero) besarnya gaji yang diterima Direktur Utama Perseroan pada tahun 2022 adalah Rp141.056.189. Gaji Direktur Utama tersebut menjadi acuan bagi besaran perhitungan gaji Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, sebagaimana tercantum dalam Pergub DKI Jakarta No. 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, Dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah. Informasi mengenai Rasio Gaji disampaikan dalam Laporan Keberlanjutan PT MRT Jakarta (Persero), yang disusun dan diterbitkan terpisah dari Laporan ini.

TRANSPARENCY OF THE REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS IN 2022

In accordance with the Letter of Regional Secretary of Special Capital Region of Jakarta Province Number 775/-071.241 concerning Income of Board of Directors and Board of Commissioners of PT MRT Jakarta (Persero), the total salary received by the President Director of the Corporation in 2022 is Rp141.056.189. The salary of the President Director becomes the reference to calculate the salary of other members of the Board of Directors and Commissioners, as stated in Governor Regulation of DKI Jakarta Province No. 79 Year 2019 concerning Guidelines to Determine Income of Board of Directors, Supervisory Board, and Board of Commissioners of Regionally-Owned Enterprises. Information on the Salary Ratio is presented in the Sustainability Report of PT MRT Jakarta (Persero) compiled and published separately from this report.

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2022
Total Remuneration of the Board of Commissioners and Directors in 2022

Jabatan Position	Besaran (Rp) Total (Rp)
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris Total Board of Commissioners' Remuneration	9.374.402.499
Jumlah Remunerasi Direksi Total Board of Directors' Remuneration	27.197.335.707
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Total Board of Commissioners and Directors Remuneration	36.571.738.206

KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI JANGKA PANJANG

Perseroan tidak memiliki kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang dalam bentuk program kepemilikan saham oleh manajemen (*Management Stock Ownership Program* atau MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*Employee Stock Ownership Program* atau ESOP) dan/atau penghargaan kompensasi dalam bentuk lainnya. Dengan demikian, Laporan ini tidak menyertakan pengungkapan informasi mengenai jumlah saham, jangka waktu pelaksanaan, persyaratan harga pelaksanaan, yang terkait program MSOP dan/atau ESOP.

LONG-TERM COMPENSATION PROVISION POLICY

The Company does not have a policy of providing long-term compensation compensation policy in the form of a share ownership program program (*Management Stock Ownership Program* or MSOP) and/or employee stock ownership program (*Employee Stock Ownership Program* or ESOP) and/or other form of compensation awards in other forms. With Accordingly, this Report does not include disclosure of information on the number of shares, exercise period, exercise price requirements, which are related to the MSOP and/or ESOP programs.

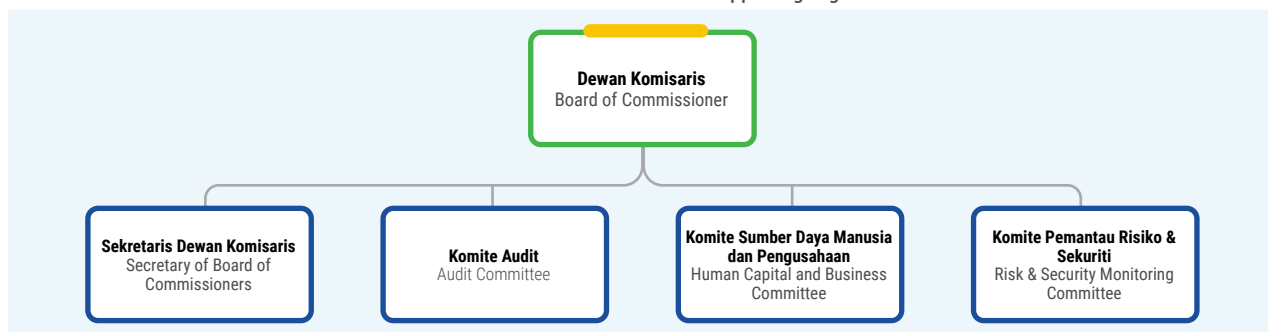
Organ Penunjang Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Supporting Organs

Sesuai peraturan perundang-undangan, Dewan Komisaris dapat membentuk organ yang dapat membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan, pemberian saran, serta rekomendasi kepada Direksi. Hingga akhir tahun 2022, Dewan Komisaris MRT Jakarta telah membentuk organ-organ pendukung, yakni Komite Audit, Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan, serta Komite Pemantau Risiko & Sekuriti. Selain itu, Dewan Komisaris juga dibantu Sekretaris Dewan Komisaris.

In accordance with the prevailing laws and regulations, the Board of Commissioners may form organs to assist the implementation of its supervisory duties and responsibilities, provision of advice and recommendations to the Board of Directors. Until the end of 2022, MRT Jakarta's Board of Commissioners has formed supporting organs, namely the Audit Committee, Human Capital and Enterprise Committee, and the Risk & Security Monitoring Committee. The Board of Commissioners is also assisted by the Secretary of the Board of Commissioners.

Dewan Komisaris dan Organ Penunjang
The Board of Commissioners and Supporting Organs



KOMITE AUDIT

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan, memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi, memastikan perusahaan dikelola dengan manajemen yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, memberikan nasihat dalam pelaksanaan pengendalian internal dan audit perusahaan dan meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan.

Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, dan dilaporkan kepada Pemegang Saham. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai jangka waktu masa Jabatan Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan Divisi Internal Audit dan Divisi lainnya sesuai kebutuhan. Koordinasi dan kerja sama terkait kewenangan Komite Audit untuk mendapatkan informasi secara penuh dan bebas tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya Perseroan lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Seluruh anggota Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

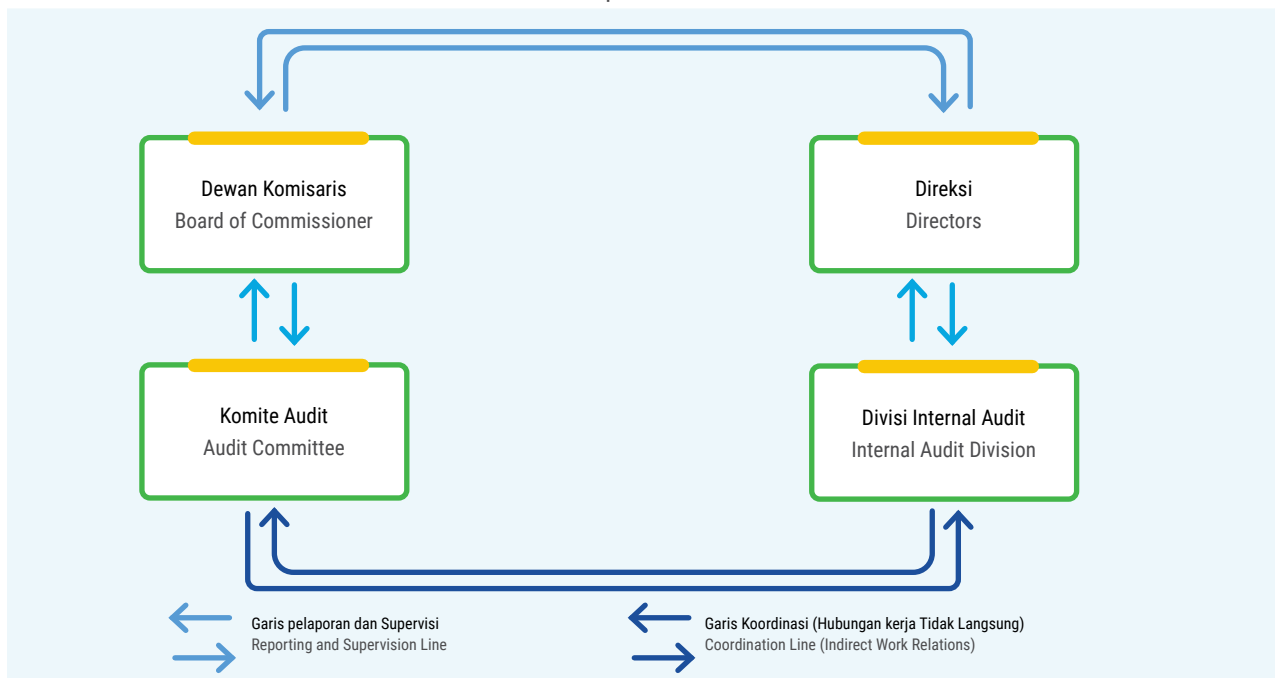
AUDIT COMMITTEE

The Board of Commissioners has established an Audit Committee with the aim of assisting the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function, providing input and recommendations to the Board of Directors, ensuring that the Corporation is managed with sound management in accordance with GCG principles, providing advice on the implementation of internal control and audits of the Corporation and improving the quality of transparency and financial reporting.

The Chair and Members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners and reported to the Shareholders. The term of office for members of the Audit Committee who are not members of the Board of Commissioners of the Corporation is in line with the term of office of the Board of Commissioners, without limiting the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee may coordinate and cooperate with the Internal Audit Division and other Divisions as needed. Coordination and collaboration is carried out considering the authorities of the Audit Committee to obtain full and transparent information on the employees, funds, assets, and other resources of the Corporation, which are related to the implementation of their duties. All members of the Audit Committee are responsible to the Board of Commissioners.

Hubungan Kerja Komite Audit Work Relationship of the Audit Committee



Piagam Komite Audit

Komite Audit Perseroan memiliki Piagam sebagai acuan dan pedoman kerja dalam menjalankan tugas dan wewenang melaksanakan kewajiban kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal Perseroan. Piagam Komite Audit ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 001 Tahun 2020, tanggal 23 Juli 2020.

Piagam Komite Audit ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Ketua Komite Audit. Piagam Komite Audit memuat:

1. Tugas dan tanggung jawab, serta wewenang;
2. Komposisi, struktur, dan persyaratan keanggotaan;
3. Tata cara dan prosedur kerja;
4. Kebijakan penyelenggaraan rapat;
5. Sistem pelaporan kegiatan;
6. Kode etik;
7. Ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan;
8. Masa tugas Komite Audit; dan
9. Periode pemutakhiran Piagam Komite Audit.

Keanggotaan Komite Audit

Persyaratan dan kualifikasi anggota Komite Audit Perseroan harus memenuhi persyaratan kompetensi dan independensi sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 001 Tahun 2020, tanggal 23 Juli 2020.

1. Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Pemegang Saham dengan tembusan kepada Kepala BPBUMD;

Audit Committee Charter

The Audit Committee of the Corporation has a Charter as a reference and work guidelines for the Audit Committee in carrying out their duties and authorities concerning the obligations to comply with the prevailing laws and regulations and internal control of the Corporation. The Audit Committee Charter is stipulated through the Commissioners' Decree No. 001 Year 2020, dated July 23, 2020.

The Audit Committee Charter is signed by the Board of Commissioners and the Chairman of the Audit Committee. The Audit Committee Charter covers:

1. Duties, responsibilities, and authorities;
2. Composition, structure and requirement of members;
3. Work guidelines and procedures;
4. Policy on meetings;
5. Activity reporting system;
6. Code of conduct;
7. Provisions to handle complaints or reports concerning violation of financial reporting;
8. Term of office of the Audit Committee; And
9. Update period of the Audit Committee Charter.

Audit Committee Membership

Requirements and qualifications for members of the Audit Committee of the Corporation must meet the competency and independence requirements as stipulated in the Audit Committee Charter stipulated by Decree of the Board of Commissioners No. 001 of 2020, dated July 23, 2020.

1. The Chair and Members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners and reported to Shareholders with a copy to the Head of BPBUMD;

2. Ketua Komite Audit yaitu Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen;
 3. Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau di luar Perseroan;
 4. Salah seorang anggota Komite Audit harus memiliki keahlian akuntansi dan keuangan dan bidang usaha Perseroan;
 5. Anggota Komite Audit yang bukan berasal dari Dewan Komisaris paling banyak berjumlah 2 (dua) orang atau dapat lebih dari 2 (dua) orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Anggota Komite Audit dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
2. Chair of the Audit Committee, namely a member of the Board of Commissioners who can act independently;
 3. Members of the Audit Committee may come from members of the Board of Commissioners or from outside the Corporation;
 4. A member of the Audit Committee must have expertise in accounting and finance and line of business of the Corporation;
 5. Members of the Audit Committee who are not from the Board of Commissioners are at most 2 (two) persons or can be more than 2 (two) persons in accordance with the provisions of laws and regulations;
 6. Members of the Audit Committee are prohibited from having blood and marital relations to the third degree, either in a straight line or a sideways line, with members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Corporation.

Pada tahun 2022, komposisi anggota Komite Audit Perseroan mengalami perubahan, dengan komposisi sebagai berikut:

In 2022, the composition of the Audit Committee members of the Corporation has changed, with the following composition:

Komposisi Anggota Komite Audit Perseroan Pada Tahun 2022
Composition of The Audit Committee Members of the Corporation in 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keterangan Remarks
Rukijo	Ketua Chair	SK/008/BOC-MRT/X/2022	Komisaris Commissioner
Mohamad Hassan	Anggota Member	SK/004/BOC-MRT/X/2022	Pihak Independen Independent Party
Krishna Mochtar	Anggota Member	SK/004/BOC-MRT/X/2022	Pihak Independen Independent Party
Hary Budiarto	Anggota Member	SK/004/BOC-MRT/X/2022	Pihak Independen Independent Party
Adnan Pandu Praja*)	Ketua Chair	SK/002/BOC-MRT/II/2021	Komisaris Commissioner

*) menjabat hingga 25 Oktober 2022

*) served until October 25, 2022

Profil Komite Audit Profile of the Audit Committee



Rukijo

Ketua Komite Audit
Chair of Audit Committee

Profil Rukijo dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Rukijo's profile can be seen in the Board of Commissioners' Profile section in this Annual Report.



Mohamad Hassan

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Usia Age	62 tahun 62 years old
Domisili Domicile	Tangerang Selatan, Banten
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	SK/004/BOC-MRT/X/2022

Pendidikan dan Sertifikasi Education and Certification

Pendidikan: Education

- S2 Internal Audit, Cleveland State University, USA, (1993)
- Master of Internal Audit, Cleveland State University, USA, (1993)
- Diploma IV Akuntansi, STAN, (1991)
- Diploma in Accounting, STAN, (1991)

Latar Belakang Karier History of Employment

- Komisaris Independen, PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk (2022 - sekarang)
- Independent Commissioner, PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk (2022 - Now)
- Komite Audit, PT Bumi Resource Mineral, Tbk (2022 - sekarang)
- Audit Committee, PT Bumi Resource Mineral, Tbk (2022 - Now)
- Direktur Akademis, PPIA-YPIA (2018 - 2022)
- Academic Director, PPIA-YPIA (2018 - 2022)
- Komite Audit, PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk (2021 - sekarang)
- Audit Committee, PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk (2021 - Now)
- Komite Audit, PT Bakrieland Development, Tbk (2019 - sekarang)
- Audit Committee, PT Bakrieland Development, Tbk (2019 - Now)
- Komite Audit, Universitas Indonesia (2017 - sekarang)
- Audit Committee, Universitas Indonesia (2017 - Now)
- Komisaris, PT Bina Audita Indonesia (2018 - 2021)
- Commissioner, PT Bina Audita Indonesia (2018 - 2021)
- Komite Audit, Lembaga Penjamin Simpanan (2016 - 2021)
- Audit Committee, Lembaga Penjamin Simpanan (2016 - 2021)
- Direktur, PT Bina Audita Indonesia (2015 - 2018)
- Director, PT Bina Audita Indonesia (2015 - 2018)
- Komite Audit, PT Dharma Henwa, Tbk (2007 - 2010)
- Audit Committee, PT Dharma Henwa, Tbk (2007 - 2010)

Hubungan Afiliasi Affiliate Relations

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pengusahaan dan Pemegang Saham Pengendali.

Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Directors, and Controlling Shareholders.



Krishna Mochtar

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Usia Age	61 tahun 61 years old
Domisili Domicile	DKI Jakarta
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	SK/004/BOC-MRT/X/2022

Pendidikan dan Sertifikasi Education and Certification

Pendidikan: Education

- Doktor (S3) Teknik Sipil di Illinois Institute of Technology, Chicago, USA, (2000)
- Doctor of Philosophy in Civil Engineering, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA, (2000)
- Magister (S2) Teknik Sipil di neering, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA, (1994)
- Master of Science in Civil Engineering, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA, (1994)
- Sarjana Teknik Sipil (Struktur), Universitas Indonesia, Jakarta, (1987)
- Bachelor of Science in Civil Engineering (Structure), University of Indonesia, Jakarta, Indonesia, (1987)

Latar Belakang Karier History of Employment

- Head of Senate, (2016-sekarang)
- Head of Senate, (2016-Present)
- Pembantu Rektor 1 Bidang Akademik ITI, (2000-2008)
- ITI Vice Rector in Academic Affairs (Vice Rector 1), (2000-2008)
- Kepala Laboratorium Material Konstruksi ITI, (2000-2001)
- Head of ITI Construction Materials Laboratory, (2000-2001)
- Pembantu Dekan 1 Bidang Akademik, Faculty of Civil Engineering and Planning ITI, (1996-1997)
- Vice Dean in Academic Affair (Assistant Dean 1), Faculty of Civil Engineering and Planning ITI, (1996-1997)
- Head of Civil Engineering Studio, (1994-1996)
- Head of Civil Engineering Studio, (1994-1996)
- Kepala Laboratorium Soil Mechanics, ITI, (1990-1991)
- Head of Soil Mechanics Laboratory, ITI, (1990-1991)
- Sekretaris Laboratorium Soil Mechanics, ITI, (1989-1990)
- Secretary of Soil Mechanics, ITI Laboratory, (1989-1990)

Hubungan Afiliasi Affiliate Relations

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pengusahaan dan Pemegang Saham Pengendali.

Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Directors, and Controlling Shareholders.



Hary Budiarto

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Usia	55 tahun
Age	55 years old
Domisili	Depok, Jawa Barat
Domicile	
Dasar Pengangkatan	SK/004/BOC-MRT/X/2022
Basis of Appointment	

Pendidikan dan Sertifikasi Education and Certification

Pendidikan:

Education

- Doktor (S3), Departemen Teknik Listrik dan Elektronika, Tokyo Institute of Technology, Jepang, (1999-2004)
- Doctorate from the Department of Electrical and Electronics Engineering, Tokyo Institute of Technology, Japan, (1999-2004)
- Magister (S2), Ilmu Komputer, Universitas Indonesia, Jakarta (1996-1999)
- Master of Computer Science, Indonesia University, Jakarta (1996-1999)
- Sarjana (S1), Departemen Matematika dan Sains, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, (1985-1990)
- Bachelor from the Department of Mathematics and Science, Sepuluh November Institute of Technology, Surabaya, (1985-1990).

Latar Belakang Karier

History of Employment

- Kepala Badan Litbang dan SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, (2020-Sekarang)
- Head of Research and Development and Human Resources, Ministry of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia, (2020-present)
- Deputi Data dan Informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), (2015-2019)
- Deputy of Data and Information, Corruption Eradication Commission (KPK), (2015-2019)
- Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Deputi TIEM, BPPT, (2014-2015)
- Director of the Information and Communication Technology Center, Deputy of TIEM, BPPT, (2014-2015)
- Kepala Pusat Data, Informasi, dan Standardisasi, Sekretariat Utama, BPPT, (2010-2014)
- Head of Data, Information, and Standardization Center, Main Secretariat, BPPT, (2010-2014)
- Kepala Bidang Sistem Komunikasi Multimedia, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Deputi TIEM, BPPT, (2007-2010)
- Head of Multimedia Communication System, Information and Communication Technology Center, Deputy of
- TIEM, BPPT, (2007-2010)
- Peneliti bidang TIK dan Lingkungan Hidup, Pusat Teknologi Lingkungan, Deputi TIEM, BPPT, (1992-2007)
- Researcher in ICT and Environment, Environmental Technology Center, Deputy of TIEM, CPPT, (1992-2007)

Hubungan Afiliasi

Affiliate Relations

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pengusaha dan Pemegang Saham Pengendali.

Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Directors, and Controlling Shareholders.

Independensi Komite Audit

Anggota Komite Audit Perseroan diwajibkan memenuhi kriteria independensi, sebagai berikut:

1. Bukan pegawai Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
2. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan Perseroan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris;
3. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan usaha Perseroan termasuk di dalamnya tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan entitas anak selain imbalan jasa yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas sebagai anggota Komite Audit;
4. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal, dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan.

Seluruh Anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi dimaksud.

Independence of the Audit Committee

Members of the Audit Committee of the Corporation are required to meet the following independence criteria:

1. Not working for a Public Accountant Firm, Legal Consultant Firm, or other parties providing audit services, non-audit services, and/or other consultancy services to the Corporation within the last 6 (six) months before being appointed by the Commissioners;
2. Not being a person with the authority and responsibility to plan, lead, or control the Corporation activities within the last 6 (six) months before being appointed by the Commissioners, except for Members of Audit Committee from the Board of Commissioners;
3. Not having direct or indirect business relationship related to the business activities of the Corporation, including not receiving compensation from the Corporation and its subsidiaries other than the compensation received for services relating to the duties as a member of the Audit Committee;
4. Not having family relationship due to marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically, with the Commissioners, Directors, or Ultimate / Controlling Shareholders of the Corporation.

All Members of the Audit Committee has met the independence criteria.



Tugas dan Tanggung Jawab

1. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
2. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan Divisi Internal Audit;
3. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Divisi Internal Audit maupun auditor eksternal;
4. Memberikan rekomendasi atas penunjukan auditor eksternal;
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
6. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi atas segala informasi yang dikeluarkan Perseroan;
7. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;
8. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut: Laporan Triwulanan pelaksanaan Komite Audit, Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Audit, dan telaah tertulis terkait hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas Komite Audit.

Wewenang

Komite Audit berwenang untuk mendapatkan informasi secara penuh dan bebas tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;

1. Komite Audit wajib bekerja sama dengan Divisi Internal Audit, dengan melalui prosedur yang telah ditetapkan;
2. Berkomunikasi langsung dengan pegawai, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi pengendalian internal, manajemen risiko, tata kelola Perseroan, dan auditor eksternal terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite Audit dapat meminta bantuan tenaga ahli dan/atau konsultan untuk membantu Komite Audit;
4. Wewenang lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Duties and Responsibilities

1. The Audit Committee act independently in carrying out their duties and responsibilities;
2. Assisting the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of the internal control system, and the effectiveness of the implementation of the duties of the external auditors and the Internal Audit Division;
3. Assessing the implementation and results of audit carried out by the Internal Audit Division and external auditor;
4. Provide recommendations on the appointment of external auditors;
5. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding improvement of management control system and the implementation;
6. Ensuring that evaluation procedures for all information released by the Corporation have been in place;
7. Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioners;
8. The Audit Committee reports to the Board of Commissioners and submits these reports: Quarterly Report of Audit Committee, Report for each special tasks of the Audit Committee, and written review on matters concerning the implementation of duties of the Audit Committee.

Authorities

The Audit Committee is authorized to obtain full and transparent information on the employees, funds, assets, and other resources of the Corporation in relation to the implementation of the duties;

1. The Audit Committee must collaborate with the Internal Audit Division through procedures as defined;
2. The Audit Committee is authorized to communicate directly with the employees, including the Board of Directors and parties carrying out internal control function, risk management function, Corporate governance function, and external auditor concerning the duties and responsibilities of the Audit Committee;
3. The Audit Committee, with written approval from the Board of Commissioners, may seek assistance from experts and/or consultants to support the Audit Committee;
4. Other authorities as delegated by the Board of Commissioners.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Keanggotaan Komite Audit Tahun 2022
Segregation of Duties and Responsibilities among Members of the Audit Committee in 2022

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Rukijo	Ketua Chair	Mengawasi keseluruhan tugas dan tanggung jawab semua Anggota Komite Overseeing the overall duties and responsibilities of all Committee Members
Mohamad Hassan	Anggota Member	Bidang <i>governance, risk, and compliance</i> , dan keuangan Governance, Risk and Compliance, and Finance
Krishna Mochtar	Anggota Member	Bidang konstruksi, operasi, dan pemeliharaan Construction, Operations, and Maintenance
Hary Budiarto	Anggota Member	Bidang teknologi informasi & komunikasi Information Technology and Communication

RAPAT KOMITE AUDIT

1. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
2. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila ketua Komite Audit berhalangan hadir;
3. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit;
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua Komite Audit;
5. Komite Audit mengadakan rapat koordinasi dengan Divisi Internal Audit sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Komite mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Setiap pelaksanaan rapat disertai risalah yang ditandatangani seluruh anggota Komite yang hadir, dengan tetap mencantumkan *dissenting opinion* dari peserta rapat. Risalah disampaikan secara tertulis oleh Komite kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2022, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

AUDIT COMMITTEE'S MEETING

1. The Audit Committee holds meeting at least once in a month;
2. The Audit Committee Meeting is chaired by the Audit Committee Chair or the most senior member of the Audit Committee if the Audit Committee Chair is not present;
3. If required, the Audit Committee may summon a Management party relevant to the discussion of the meeting to attend the Audit Committee meeting;
4. Each Audit Committee meeting is outlined in the minutes of meeting that is signed by the Audit Committee Chair;
5. The Audit Committee holds coordination meeting with the Internal Audit Division at least once in a month.

The total number of the Committee's meetings shall at least equal to the minimum total number of the Board of Commissioners'/Supervisory Board's meetings set forth in the Articles of Association. Each meeting is recorded in the Minutes of Meeting signed by the Committee members attending the meeting, which also include the dissenting opinion of the meeting participants. The minutes of meeting is submitted in writing by the Committee to the Board of Commissioners.

Throughout 2022, the Audit Committee has held 12 (twelve) meetings with the following attendance levels:

Rekapitulasi Kehadiran Rapat Komite Audit Tahun 2022
Recapitulation of Attendance in the Audit Committee's Meeting in 2022

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran (%) Percentage of Attendance (%)
Rukijo**)	3	3	100
Mohamad Hassan	12	12	100
Krishna Mochtar	12	12	100
Hary Budiarto	12	12	100
Adnan Pandu Praja*)	10	10	100

*) menjabat hingga 25 Oktober 2022

*) served until October 25, 2022

**) Rukijo dari periode Januari - Oktober 2022 menjabat sebagai Ketua Komite SDM dan Pengusahaan, Periode November - Desember 2022 menjabat sebagai Ketua Komite Audit

**) From January - October 2022 Rukijo served as Head of Human Capital and Business Committee, November - December 2022 served as Chair of the Audit Committee

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Piagam Komite Audit dan program kerja yang telah ditetapkan di awal tahun, antara lain dengan memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan meningkatkan *matching cost and benefit* dalam penggunaan anggaran;
2. Melakukan koordinasi dengan fungsi lain dalam penerapan SMAP, khususnya *Bribery Risk Assessment* terkait proses perencanaan, fungsi *treasury* dan batasan interaksi unit kerja dengan vendor;

Audit Committee Duties Implementation Report of 2022

Throughout 2022, the Audit Committee has carried out its duties and responsibilities in accordance with the Audit Committee Charter and work programs set at the beginning of the year, among others, by providing the following recommendations:

1. To improve compliance with laws and increase matching costs and benefits in budget expense;
2. To coordinate with other functions in implementing ABMS, especially the Bribery Risk Assessment regarding the planning process, treasury function and limitation of work unit interaction with vendors;



3. Menetapkan batasan (*threshold*) antara penggunaan diskresi dan *policy* dalam proses pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan operasional Perseroan;
4. Membuat kontinjensi plan untuk meminimalisir dampak dari suatu peristiwa;
5. Divisi Engineering perlu meningkatkan kesiapan SDM dan pendukungnya untuk melakukan simulasi, perhitungan, pengukuran dan lain-lain pada kasus-kasus mendesak sehingga mengurangi ketergantungan pihak *outsourced* konsultan;
6. Melakukan latihan keadaan darurat dengan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Pemprov, BNPB, Basarnas dan lain-lain;
7. Menyiapkan SDM dan peralatan untuk mengantisipasi berakhirnya masa *Defect Liability Period* (DLP) oleh kontraktor fase 1, untuk memastikan keberlanjutan proses perawatan;
8. Meningkatkan kualitas proses inspeksi;
9. Memastikan kesiapan SMD untuk memenuhi sertifikasi DJKA;
10. Implementasi sistem *Building Information Modelling* (BIM) yang terintegrasi dengan kantor pusat dalam proses konstruksi;
11. Melakukan kajian terkait kelembagaan MRT dalam proses Transformasi Digital (TD);
12. Membuat arsitektur yang lebih detail dan komprehensif dalam Transformasi Digital agar selaras dengan tujuan organisasi dan KPI;
13. Mengintegrasikan seluruh aplikasi agar menjadi satu kesatuan ekosistem;
14. Meningkatkan keamanan digital;
15. Mengintegrasikan sistem informasi *maintenance reporting* dengan sistem yang sudah ada sekarang seperti MMS (IMO) atau ERP System (SAP);
16. Menggunakan *drone* yang dapat bekerja di terowongan dan ruang tertutup;
17. Memberikan rekomendasi nama auditor independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022.

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Untuk menunjang Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Perseroan juga menyertakan anggota Komite Audit pada program-program peningkatan kapabilitas.

Sepanjang tahun 2022, anggota Komite Audit Perseroan telah mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagai berikut:

3. To set threshold between the use of discretion and policy in the decision-making process regarding the implementation of the Corporation's operations;
4. To create a contingency plan to minimize the impact of an event;
5. The Engineering Division needs to increase the readiness of human resources and the supporting tools to carry out simulation, calculation, measurement and others in urgent cases so as to reduce dependence on outsourced consultants;
6. To conduct emergency drills in coordination with related parties such as the Provincial Government, National Agency for Disaster Management, National Search and Rescue Agency and others;
7. To prepare human resources and supporting tools to anticipate the end of the Defect Liability Period (DLP) by phase 1 contractors, to ensure the continuity of the maintenance process;
8. To improve the quality of the inspection process;
9. To ensure the personnel readiness to fulfill DJKA certification;
10. To implement the Building Information Modeling (BIM) system that is integrated with the Head Office in the construction process;
11. To conduct studies related to MRT's organizational objectives during the Digital Transformation process;
12. To create a more detailed and comprehensive architecture in Digital Transformation to align with organizational goals and KPIs;
13. To integrate all applications to become a single ecosystem;
14. To improve digital security;
15. To integrate maintenance reporting information systems with existing systems such as MMS (IMO) or ERP System (SAP);
16. To use drones that can work in tunnels and closed spaces;
17. Provide recommendations for the names of independent auditors who will audit the Company's financial statements for the 2022 financial year.

Competency Development of the Audit Committee

To support the Audit Committee in carrying out their duties and responsibilities, the Corporation also includes members of the Audit Committee in capability improvement programs.

Throughout 2022, members of the Corporation's Audit Committee participated in the following competency training and development programs:

Program Pengembangan Kompetensi Komite Audit
Competency Development Program of the Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/Seminar Name of Training/Workshop/ Conference/Seminar	Lembaga Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Time and Place
Rukijo	Ketua Chair	Pengembangan kompetensi/pelatihan Ketua Komite Audit Rukijo dapat dilihat pada bagian pengembangan kompetensi/pelatihan Dewan Komisaris. The competency development/training for the Audit Committee Chair Rukijo can be seen in the Board of Commissioners competency development/training section.		
Mohamad Hassan	Anggota Member	- Integrated GRC Sustainable Business PT MRT Jakarta (Persero) - Data Driven Executive (DDE)	- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) - Algoritma - National Committee on Governance Policy (KNKG) - Algoritma	- Jakarta, 18 Agustus 2022 - Jakarta, August 18, 2022 - Training Online, 21 Juli 2022 - Online Training, July 21, 2022
Krishna Mochtar	Anggota Member	- Integrated GRC Sustainable Business PT MR Jakarta (Persero) - Data Driven Executive (DDE)	- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) - Algoritma - National Committee on Governance Policy (KNKG) - Algoritma	- Jakarta, 18 Agustus 2022 - Jakarta, August 18, 2022 - Training Online, 21 Juli 2022 - Online Training, July 21, 2022
Hary Budiarto	Anggota Member	- Integrated GRC Sustainable Business PT MR Jakarta (Persero) - Data Driven Executive (DDE)	- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) - Algoritma - National Committee on Governance Policy (KNKG) - Algoritma	- Jakarta, 18 Agustus 2022 - Jakarta, August 18, 2022 - Training Online, 21 Juli 2022 - Online Training, July 21, 2022
Adnan Pandu Praja*)	Ketua Chair	Pengembangan kompetensi/pelatihan Ketua Komite Audit Adnan Pandu Praja dapat dilihat pada bagian pengembangan kompetensi/pelatihan Dewan Komisaris. The competency development/training for the Audit Committee Chair Adnan Pandu Praja can be seen in the Board of Commissioners competency development/training section.		

*) menjabat hingga 25 Oktober 2022

*) served until October 25, 2022

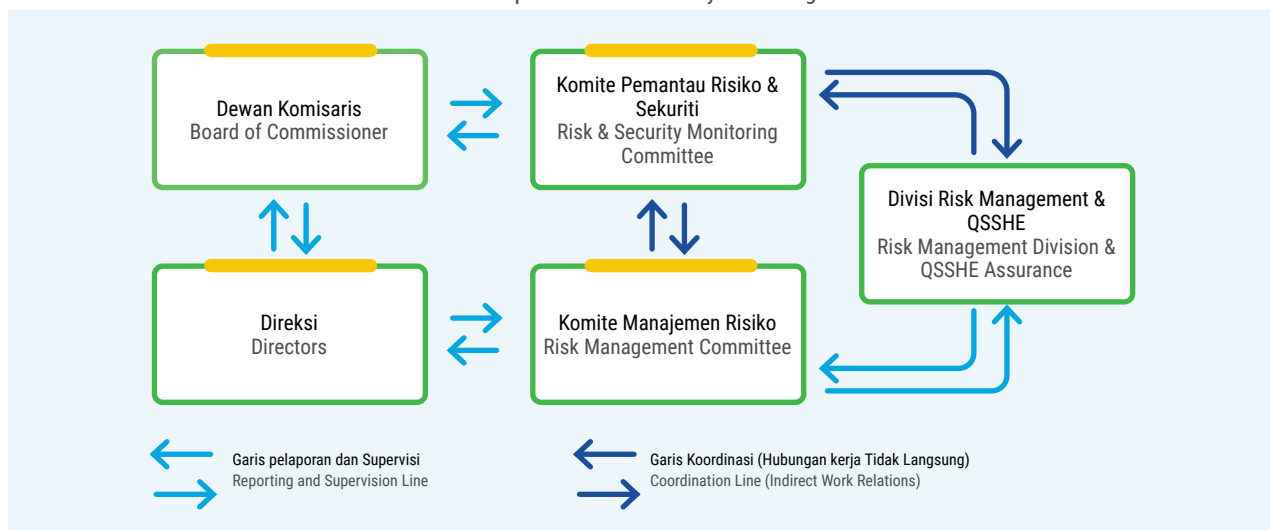
KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN SEKURITI

Dewan Komisaris MRT Jakarta membentuk Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk memastikan efektivitas kebijakan, strategi, serta pelaksanaan manajemen risiko, manajemen sekuriti, manajemen mutu, dan manajemen anti penyuapan. Komite juga membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, Divisi Risk Management & QSSHE Assurance, dan Divisi Operation Maintenance Facility Services pada aspek sekuriti.

RISK AND SECURITY MONITORING COMMITTEE

The Board of Commissioners of MRT Jakarta established a Risk and Security Monitoring Committee with the aim of assisting the Board of Commissioners in carrying out their supervisory and advisory functions to ensure the effectiveness of policies, strategies and implementation of risk management, security management, quality management and anti-bribery management. The Committee also assists the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of the implementation of the duties of the Risk Management Committee, the Risk Management & QSSHE Assurance Division, and the Operation Maintenance Facility Services Division in terms of security.

Hubungan Kerja Komite Pemantau Risiko & Sekuriti
Work Relationship of the Risk & Security Monitoring Committee





Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti

Persyaratan dan kualifikasi anggota Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti Perseroan harus memenuhi persyaratan kompetensi dan independensi sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 002 Tahun 2020, tanggal 23 Juli 2020.

1. Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
2. Ketua Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti yaitu Anggota Dewan Komisaris;
3. Anggota Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau di luar Perseroan;
4. Anggota Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti memiliki keahlian di bidang yang berkaitan dengan Manajemen Risiko dan/atau pengelolaan keamanan;
5. Anggota Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti yang bukan berasal dari Dewan Komisaris paling banyak berjumlah 2 (dua) orang atau dapat lebih dari 2 (dua) orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Anggota Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Pada tahun 2022, komposisi anggota Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti Perseroan mengalami perubahan dengan kronologis sebagai berikut:

Membership of the Risk and Security Monitoring Committee

Requirements and qualifications for members of the Risk and Security Monitoring Committee of the Corporation must meet the competency and independency requirements as stipulated in the the Risk and Security Monitoring Committee Charter was stipulated by the Board of Commissioners Decision Letter No. 002 of 2020, dated July 23, 2020.

1. The Chairperson and Members of the Risk and Security Monitoring Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners;
2. The Chairperson of the Risk and Security Monitoring Committee, namely a member of the Board of Commissioners;
3. Members of the Risk and Security Monitoring Committee may come from members of the Board of Commissioners or outside the Corporation;
4. Members of the Risk and Security Monitoring Committee have expertise in areas related to Risk Management and/ or security management;
5. Members of the Risk and Security Monitoring Committee who are not from the Board of Commissioners are at most 2 (two) persons or can be more than 2 (two) persons in accordance with the provisions of laws and regulations;
6. Members of the Risk and Security Monitoring Committee are prohibited from having family relations by blood and kinship to the third degree, either in a straight line or a sideways line, with members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Corporation.

In 2022, the composition of the members of the Risk and Security Monitoring Committee of the Corporation has changed chronologically as follows:

Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti Perseroan Pada Tahun 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keterangan Remarks
Bambang Kristiyono	Ketua Chair	SK/008/BOC-MRT/XI/2022	Komisaris Commissioner
Sutrisno	Anggota Member	SK/005/BOC-MRT/X/2022	Pihak Independen Independent Party
Ivan Malik	Anggota Member	SK/005/BOC-MRT/X/2022	Pihak Independen Independent Party
Singgih Budihartono	Anggota Member	SK/005/BOC-MRT/X/2022	Pihak Independen Independent Party
Zulfikri*)	Ketua Chair	SK/002/BOC-MRT/II/2021	Komisaris Commissioner
Mukhtasor**)	Ketua Chair	ST/004/INT/BOC-MRT/ST-PLT/V/2022	Komisaris Commissioner

*) menjabat hingga 22 Juli 2022 | served until 22 July 2022

**) menjabat dari 22 Juli 2022 - 25 Oktober 2022 | served from July 22, 2022 - October 25, 2022

Profil Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti Profile of Risk and Security Monitoring Committee



Bambang Kristiyono

Ketua Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti
Chair of the Risk and Security Monitoring Committee

Profil Bambang Kristiyono dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Bambang Kristiyono's profile can be seen in the Board of Commissioners' Profile section in this Annual Report.



Sutrisno

Anggota Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti
Member of the Risk and Security Monitoring Committee

Usia Age	62 tahun 62 years old
Domisili Domicile	DKI Jakarta
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	SK/005/BOC-MRT/X/2022

Pendidikan dan Sertifikasi Education and Certification

Pendidikan:

Education

- Diskpespa Pers, Surabaya, (2012)
- Dikcapareg, Surabaya, (2002)
- Dikcabaregsus, Surabaya, (1991)
- Diktaifib, Surabaya, (1983)
- Dik mata Wamil, Surabaya, (1980)

Latar Belakang Karier

History of Employment

- Wadantim, Satgas Intel Bais Leuser-04, NAD, (2009-2010)
- Deputy Group Commander, Leuser-04 Strategic Intelligence Agency Intel Task Force, Nangroe Aceh Darussalam (2009-2010)
- Wadantim, Satgas Intel Bais TNI/Gajah Putih, NAD, (2000-2001)
- Deputy Group Commander, TNI/White Elephant Strategic Intelligence Agency Intel Task Force, Nangroe Aceh Darussalam (2000-2001)
- Anggota, Satgas Keris Tim Tim, Timor Timur, (1984-1985)
- Member, Task Force Keris Tim Tim, East Timor, (1984-1985)
- Anggota, Satgas Tim Tim Pasmal-11, Timor Timur, (1980-1981)
- Member, Task Force Team Pasmal-11, East Timor, (1980-1981)

Hubungan Afiliasi

Affiliate Relations

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pengusahaan dan Pemegang Saham Pengendali.

Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Directors, and Controlling Shareholders.



Ivan Malik

Anggota Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti
Member of the Risk and Security Monitoring Committee

Usia Age	60 tahun 60 years old
Domisili Domicile	DKI Jakarta
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	SK/005/BOC-MRT/X/2022

Pendidikan dan Sertifikasi Education and Certification

Pendidikan:

Education

- Doktorat (S3), Manajemen Keuangan, Universitas Indonesia, (2012)
- Doctorate (S3), Financial Management, University of Indonesia, (2012)
- Magister (S2), Manajemen Keuangan, Universitas Indonesia, (2001)
- Masters (S2), Financial Management, University of Indonesia, (2001)
- Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAAIK), (1997)
- Assistant Indonesian Loss Insurance Expert (AAAIK), (1997)
- Sarjana Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung, (1987)
- Bachelor of Civil Engineering, Bandung Institute of Technology, (1987)

Latar Belakang Karier

History of Employment

- Komite GCG & MR Pelindo 3, (2017-2018)
- Pelindo 3 GCG & MR Committee, (2017-2018)
- Direktur, PT Aero Hotel Management, (2016)
- Director, PT Aero Hotel Management, (2016)
- Direktur Finance and Administration, PT Hotel Indonesia Natour (Persero), (2013-2015)
- Director of Finance and Administration, PT Hotel Indonesia Natour (Persero), (2013-2015)
- Mengelola Bagian Audit Internal, PT Chandra Asri Petrochemical, Tbk, (2003-2013)
- Managing the Internal Audit Section, PT Chandra Asri Petrochemical, Tbk, (2003-2013)
- Manager di Departemen Finance and Accounting, PT Asuransi Intra Asia, (2001-2003)
- Manager in Finance and Accounting Department, PT Asuransi Intra Asia, (2001-2003)
- Mengelola dan terlibat dalam berbagai unit kerja, PT Bank Duta, (1991-2000)
- Managing and involved in various work units, PT Bank Duta, (1991-2000)
- Agen di Beckmen-Jorgensen International Ltd, (1989-1990)
- Agent at Beckmen-Jorgensen International Ltd, (1989-1990)
- Menganalisis struktur pesawat CN 235, PT IPTN, (1988-1989)
- Analyzing the structure of the CN 235 aircraft, PT IPTN, (1988-1989)

Hubungan Afiliasi

Affiliate Relations

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pengusahaan dan Pemegang Saham Pengendali.

Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Directors, and Controlling Shareholders.



Singgih Budihartono

Anggota Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti
Member of the Risk and Security Monitoring Committee

Usia Age	59 tahun 59 years old
Domisili Domicile	DKI Jakarta
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	SK/005/BOC-MRT/X/2022

Pendidikan dan Sertifikasi Education and Certification

Pendidikan:

Education

- Magister Sains, Program Administrasi dan Kebijakan Publik, FISIP UI, (2003)
- Master of Science, Administration and Public Policy Program, FISIP UI, (2003)
- Diploma IV, Akuntansi, STAN, (1993)
- Diploma IV, Accounting, STAN, (1993)

Latar Belakang Karier

History of Employment

- Direktur, PT Tujuh Karta Wesi, Mei, (2014-2019)
- Director, PT Tujuh Karta Wesi, Mei, (2014-2019)
- Komite Audit Perum LKBN Antara, (2014-2018)
- Audit Committee of Public Corporation LKBN Antara, (2014-2018)
- Direktur Utama, PT Target Citra Konsultama, (2013-2014)
- President Director, PT Target Citra Konsultama, (2013-2014)
- Direktur, PT SPA Consulting, (2010-2011)
- Director, PT SPA Consulting, (2010-2011)
- Konsultan Individu, Bappenas, (2009)
- Individual Consultant, Bappenas, (2009)
- Komite Audit, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, (2008-2014)
- Audit Committee, TVRI Public Broadcasting Institution, (2008-2014)
- Managing Partner, PT CSA Strategic Advisory, (2004-2009)
- Managing Partner, PT CSA Strategic Advisory, (2004-2009)

Hubungan Afiliasi

Affiliate Relations

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pengusahaan dan Pemegang Saham Pengendali.

Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Directors, and Controlling Shareholders.

Independensi Komite Pemantau Risiko & Sekuriti

Perseroan telah menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti:

1. Bukan merupakan mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Pemprov DKI Jakarta maupun Kementerian dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan proyek MRT Jakarta, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi pihak independen dalam keanggotaan Komite sebelum menjalani masa tunggu selama enam bulan;
2. Bukan pegawai Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
3. Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan dan anak perusahaan termasuk di dalamnya tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan entitas anak selain imbalan jasa yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas sebagai anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti;
4. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan Perseroan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris, kecuali anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris;
5. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Perseroan.

Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti telah memenuhi kriteria independensi dimaksud.

Tugas Komite Pemantau Risiko & Sekuriti

1. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penyempurnaan sistem Manajemen Risiko Perseroan, serta pelaksanaannya;
3. Menyampaikan laporan evaluasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perseroan (RKAP) tahun berjalan;
4. Menyampaikan laporan evaluasi atas usulan RJPP dan RKAP yang diajukan oleh Direksi sesuai jadwal yang ditentukan oleh Dewan Komisaris;
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan RJPP dan RKAP;
6. Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan yang telah diambil oleh Direksi berkaitan dengan manajemen risiko;

Independence of the Risk & Security Monitoring Committee

The Corporation has defined several requirements to fulfill to be a member of the Risk & Security Monitoring Committee:

1. Not being a former member of the Board of Directors or Executives of the Government of DKI Jakarta Province or any Ministry and parties related to MRT Jakarta project, that may influence their ability to act independently, not being an independent party as a member of the Committee before undergoing a waiting period of six months;
2. Not working for a Public Accountant Firm, Legal Consultant Firm, or other parties providing audit services, non-audit services, and/or other consultancy services to the Corporation within the last 6 (six) months before being appointed by the Commissioners;
3. Not having direct or indirect business relationship related to the business activities of the Corporation, including not receiving compensation from the Corporation and its subsidiaries other than the compensation received for services relating to the duties as a member of the Risk & Security Monitoring Committee;
4. Not being a person with the authority and responsibility to plan, lead, or control the Corporation activities within the last 6 (six) months before being appointed by the Commissioners, except for Members of the Committee from the Board of Commissioners;
5. Not having family relationship due to marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically, with the Commissioners, Directors, or Shareholders of the Corporation.

All Members of the Risk & Security Monitoring Committee have met the independence criteria.

Duties of the Risk Monitoring & Security Committee

1. Assisting the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of risk management and the effectiveness of the implementation of the duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Division;
2. Providing recommendation to the Board of Commissioners concerning the improvement of the Risk Management system of the Corporation and its implementation;
3. Submitting evaluation reports to the Board of Commissioners related to the implementation of Corporate Long-Term Plan (RJPPP) and Corporate Work Plan and Budget (RKAP) of the running year;
4. Submitting evaluation reports of the RJPP and RKAP proposals as proposed by the Board of Directors according to the schedule as determined by the Board of Commissioners;
5. Providing recommendations to the Board of Commissioners in granting approvals for RJPP and RKAP;
6. Delivering recommendations to the Board of Commissioners regarding the policies that have been administered by the Board of Directors concerning risk management;



7. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan risiko kepada Dewan Komisaris tentang kegiatan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar;
8. Melakukan penilaian atas situasi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan proyek MRT Jakarta, agar Dewan Komisaris dapat melaporkan kepada Pemegang Saham;
9. Melakukan evaluasi atas rekomendasi perihal komunikasi risiko dilaksanakan, pembinaan budaya sadar Risiko diselenggarakan, penciptaan situasi yang kondusif untuk penerapan manajemen risiko diciptakan, dan pembentukan *tone at the top* terlaksana;
10. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja Komite (Piagam) dan melakukan reviu sesuai kebutuhan, paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali;
11. Memberikan persetujuan atas risiko kritis sebelum ditetapkannya tahun anggaran yang baru;
12. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai keseluruhan Selera Risiko, Toleransi Risiko, dan strategi Perseroan serta melakukan pengawasan implementasi strategi Perseroan;
13. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.

Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko & Sekuriti

1. Komite Pemantau Risiko & Sekuriti bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
2. Pertanggungjawaban Komite Pemantau Risiko & Sekuriti kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:
 - Laporan Profil Risiko Triwulanan;
 - Laporan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko;
 - Laporan Evaluasi Pelaksanaan RJPP dan RKAP;
 - Laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko & Sekuriti;
 - Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Pemantau Risiko & Sekuriti;
 - Laporan Komite Pemantau Risiko & Sekuriti ditandatangani oleh Ketua Komite.
3. Pemantau Risiko & Sekuriti bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan.

Wewenang Komite Pemantau Risiko & Sekuriti

- Mendapatkan informasi secara penuh tentang informasi Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya melalui Divisi Risk Management & QSSHE Assurance;
- Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, Komite Pemantau Risiko & Sekuriti wajib bekerja sama dengan Divisi Risk Management & QSSHE Assurance dengan melalui prosedur yang telah ditetapkan.

7. Providing recommendations and risk considerations to the Board of Commissioners concerning the activities requiring the approvals from the Board of Commissioners as regulated by the Articles of Association;
8. Conducting assessments of situations projected to potentially threaten the continuity of MRT Jakarta project to be reported by the Board of Commissioners to the Shareholders;
9. Evaluating recommendations on risk communications to be carried out, fostering the culture of risk awareness, creating conducive situations to implement risk management, and ensuring the establishment of tone at the top;
10. Developing guidelines and work rules for the Committee (Charter) and reviewing them as required, at least once in 3 (three) years;
11. Granting approval for critical risks before the new fiscal year;
12. Providing considerations and advice to the Board of Commissioners concerning the overall Risk Appetite, Risk Tolerance, and Corporation strategy as well as carrying out the monitoring of Corporation strategy implementation;
13. Carrying out other duties and responsibilities as directed by the Board of Commissioners from time to time.

Responsibilities of Risk Monitoring & Security Committee

1. The Risk & Security Monitoring Committee reports directly to the Board of Commissioners;
2. The accountability of the Risk & Security Monitoring Committee to the Board of Commissioners are reported with the reports as follows:
 - Quarterly Risk Profile Report;
 - Evaluation Report on the Implementation of Risk Management;
 - Evaluation Report of RJPP & RKAP Implementation.
 - Annual Report of the Implementation of the Duties of the Risk & Security Monitoring Committee;
 - Report for each implementation of special duties of the Risk & Security Monitoring Committee;
 - The Report of Risk & Security Monitoring Committee is signed by the Chair of the Committee.
3. Members of Risk & Security Monitoring Committee are required to maintain the confidentiality of document, data, and information of the Corporation.

Authorities of the Risk Monitoring & Security Committee

- Fully and freely obtaining information concerning Corporation information on the implementation of duties through Risk Management & QSSHE Assurance Division;
- In carrying out the duties as stated in the previous point, the Risk & Security Monitoring Committee shall collaborate with Risk Management & QSSHE Assurance Division through the established procedures.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti Tahun 2022
Distribution of Duties and Responsibilities among Members of the Risk & Security Monitoring Committee in 2022

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Bambang Kristiyono	Ketua Chair	Koordinasi Pengawasan Pengelolaan Risiko Korporasi dan Sekuriti Coordinating the Supervision of Corporate Risk and Security Management
Sutrisno	Anggota Member	Pengawasan Pengelolaan Sekuriti Supervising Corporate Risk Management
Ivan Malik	Anggota Member	Pengawasan Pengelolaan Risiko Korporasi Supervising Corporate Risk Management
Singgih Budihartono	Anggota Member	Pengawasan Pengelolaan Risiko Korporasi Supervising Corporate Risk Management
Zulfikri*)	Ketua Chair	Koordinasi Pengawasan Pengelolaan Risiko Korporasi dan Sekuriti Coordinating the Supervision of Corporate Risk and Security Management
Mukhtasor**)	Ketua Chair	Koordinasi Pengawasan Pengelolaan Risiko Korporasi dan Sekuriti Coordinating the Supervision of Corporate Risk and Security Management

*) menjabat hingga 22 Juli 2022 | serving until 22 July 2022

**) menjabat dari 22 Juli 2022 - 25 Oktober 2022 | served from July 22, 2022 - October 25, 2022

Rapat Komite Pemantau Risiko & Sekuriti

1. Rapat komite dilakukan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komite yang hadir yang dipilih oleh rapat;
3. Rapat dapat diselenggarakan baik dengan kehadiran secara fisik maupun melalui media elektronik atau kombinasi antara keduanya;
4. Rapat yang dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun;
5. Rapat yang dihadiri secara non-fisik dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang harus memungkinkan semua peserta rapat Komite saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Sepanjang tahun 2022, Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti telah melaksanakan rapat sebanyak 12 kali dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

Risk & Security Monitoring Committee's meeting

1. The Committee holds meeting at least once in a month;
2. The Meeting is chaired by the Committee Chair. If the Audit Committee Chair is not present, the Meeting is chaired by a present member of the Committee elected by the Meeting;
3. The Meeting can be carried out by physical presence or through electronic media or a combination of both;
4. There must be at least 2 (two) Meetings carried out by physical presence every year;
5. Non-physical Meeting is carried out through teleconference, video conference, or other electronic media that enables all participants of the Meeting to see and hear each other directly and to take part in the meeting;

Throughout 2022, the Risk and Security Monitoring Committee held 12 meetings with the attendance level of members as follows:

Rekapitulasi Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko & Sekuriti Tahun 2022
Recapitulation of Attendance Risk & Security Monitoring Committee's Meeting in 2022

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran (%) Percentage of Attendance (%)
Bambang Kristiyono	2	2	100
Sutrisno	12	12	100
Ivan Malik	12	12	100
Singgih Budihartono	12	12	100
Zulfikri*)	6	6	100
Mukhtasor**)	4	4	100

*) menjabat hingga 22 Juli 2022 | served until July 22, 2022

**) menjabat sebagai ketua dari 22 Juli sampai 25 Oktober 2022 | served as chairman from July 22 to October 25, 2022



Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko & Sekuriti Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Piagam Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti dan program kerja yang telah ditetapkan di awal tahun, antara lain dengan memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Merumuskan pernyataan *risk appetite*;
2. Memastikan setoran modal dari Pemegang Saham agar pembelian saham KCI dapat terlaksana sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku dengan terlebih dahulu melakukan review mengenai dampak dari akuisisi tersebut terhadap keberlangsungan bisnis PT MITJ;
3. Mengusulkan pembentukan Tim Pendamping pelaksanaan Proyek MRT yang disahkan melalui SK Gubernur untuk memitigasi risiko *financing charges* akibat keterlambatan proyek yang disebabkan oleh isu lahan dan relokasi utilitas;
4. Melakukan review terkait pelaksanaan *Direct Contracting* (DC) di CP202 dalam pengadaan ulang CP 202 dan CP 205 dapat memberikan efektivitas biaya, mengingat waktu penyelesaian tetap di 2030;
5. Melakukan kajian mengenai Model Bisnis dan skema IT dalam integrasi tiket untuk memastikan kerja sama dengan Jaklingko dapat memberikan nilai tambah;
6. Memastikan pelaksanaan aturan penanganan COVID-19 telah selaras dengan Instruksi Kemenhub terkait dengan penggunaan transportasi di masa pandemi;
7. Menjaga hubungan dengan masyarakat agar tetap dapat bekerja sama dengan baik dan saling mendukung;
8. Memperhatikan kesehatan dan kebugaran anggota Pam Luar yang bertugas dengan sistem *shift*;
9. Melakukan *follow up* terkait pemasangan stiker larangan berbicara langsung maupun melalui *handphone* di dalam kereta dan penambahan poster QR;
10. Membuat sesi khusus penyusunan *risk register* terkait pengelolaan risiko keamanan pada Dept Security;
11. Mempercepat proses *coaching* karyawan baru agar pergantian personel di Dept Security tidak mengganggu kinerja;
12. Menindaklanjuti kebutuhan CCTV di wilayah RSS Sambas dan Fatmawati yang memiliki risiko kerawanan di sekitar Kawasan;
13. Memastikan kinerja *incumbent* BUJP tetap optimal dalam proses lelang yang akan diikuti oleh calon vendor baru;
14. Memperhatikan potensi demo terkait reaksi massa atas peraturan JHT;
15. Memastikan implementasi manajemen risiko pada Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan;
16. Menindaklanjuti temuan major dan minor audit dari pelaksanaan manajemen mutu terintegrasi.

Report on the implementation of the duties of the Risk & Security Monitoring Committee in 2022

Throughout 2022, the Risk and Security Monitoring Committee has carried out its duties and responsibilities in accordance with the Risk and Security Monitoring Committee Charter and the work program established at the beginning of the year, among others by providing the following recommendations:

1. Formulate a risk appetite statement;
2. Ensure the payment of capital from Shareholders so that the purchase of KCI shares can be realized in accordance with applicable laws and regulations by first conducting a review of the impact of the acquisition on PT MITJ's business continuity;
3. Propose the formation of Assistance Team for MRT Project implementation which is enacted through a Governor's Decree to mitigate the risk of financing charges due to project delays caused by land issues and utility relocation;
4. To conduct a review regarding the implementation of Direct Contracting (DC) in CP202 in the re-tender of CP 202 and CP 205 that provide cost effectiveness, considering that the completion time remains in 2030;
5. To conduct studies on Business Models and IT schemes in ticketing integration to ensure that cooperation with Jaklingko can provide added value;
6. To ensure that the implementation of the rules for handling COVID-19 is in line with the Ministry of Transportation's instructions regarding the use of transportation during a pandemic;
7. To maintain relations with the public to maintain good cooperation and mutual support;
8. To pay attention to the health and fitness of security attendants who work on a shift system;
9. To make a follow-up on the installation of stickers on the prohibition to talk either directly or via cellphone on the train and adding QR posters;
10. To create a special session for preparing risk registers related to security risk management at the Security Department;
11. To accelerate the process of coaching new employees so that personnel changes at the Security Department do not interfere with performance;
12. To make a follow up on CCTV needs in the RSS Sambas and Fatmawati areas which have a risk of vulnerability around the area;
13. To ensure that the performance of the incumbent BUJP remains optimal in the auction process which will be participated in by prospective new vendors;
14. To pay attention to the potential for demonstrations related to mass reactions to the JHT regulations;
15. Ensure the implementation of risk management in Subsidiaries and Joint Venture Companies;
16. Follow up major and minor audit findings from the implementation of integrated quality management.

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko & Sekuriti

Untuk menunjang Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Perseroan juga menyertakan anggota Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti pada program-program peningkatan kapabilitas. Sepanjang tahun 2022, anggota Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti Perseroan telah mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Program Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko & Sekuriti
Competency Development Program of the Risk & Security Monitoring Committee

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/Seminar Name of Training/Workshop/Conference/ Seminar	Lembaga Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Time and place
Bambang Kristiyono	Ketua Chair	Pengembangan kompetensi/pelatihan Ketua Komite Pemantau Risiko & Sekuriti Bambang Kristiyono dapat dilihat pada bagian pengembangan kompetensi/pelatihan Dewan Komisaris. The competency development/training for the Risk & Security Monitoring Committee Chair Bambang Kristoyono can be seen in the Board of Commissioners competency development/training section.		
Sutrisno	Anggota Member	- Integrated GRC Sustainable Business PT MRT Jakarta (Perseroda) - Data Driven Executive (DDE)	- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) - Algoritma - Governance Policy National Committee (KNKG) - Algoritma	- Jakarta, 18 Agustus 2022 - Jakarta, August 18, 2022 - Training Online, 21 Juli 2022 - Online Training, July 21, 2022
Ivan Malik	Anggota Member	- Integrated GRC Sustainable Business PT MRT Jakarta (Perseroda) - Data Driven Executive (DDE)	- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) - Algoritma - Governance Policy National Committee (KNKG) - Algoritma	- Jakarta, 18 Agustus 2022 - Jakarta, August 18, 2022 - Training Online, 21 Juli 2022 - Online Training, July 21, 2022
Singgih Budihartono	Anggota Member	- Integrated GRC Sustainable Business PT MRT Jakarta (Perseroda) - Data Driven Executive (DDE)	- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) - Algoritma - Governance Policy National Committee (KNKG) - Algoritma	- Jakarta, 18 Agustus 2022 - Jakarta, August 18, 2022 - Training Online, 21 Juli 2022 - Online Training, July 21, 2022
Zulfikri*)	Ketua Chair	Pengembangan kompetensi/pelatihan Ketua Komite Pemantau Risiko & Sekuriti Zulfikri dapat dilihat pada bagian pengembangan kompetensi/pelatihan Dewan Komisaris. The competency development/training for the Risk & Security Monitoring Committee Chair Zulfikri can be seen in the Board of Commissioners competency development/training section.		
Mukhtasor**)	Ketua Chair	Pengembangan kompetensi/pelatihan Ketua Komite Pemantau Risiko & Sekuriti Mukhtasor dapat dilihat pada bagian pengembangan kompetensi/pelatihan Dewan Komisaris. The competency development/training for the Risk & Security Monitoring Committee Chair Mukhtasor can be seen in the Board of Commissioners competency development/training section.		

*) menjabat hingga 22 Juli 2022 | served until July 22, 2022

**) menjabat sebagai ketua dari 22 Juli sampai 25 Oktober 2022 | served as chairman from July 22 - October 25, 2022

KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN PENGUSAHAAN

Dewan Komisaris MRT Jakarta membentuk Komite SDM dan Pengusahaan dengan tujuan untuk Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat terkait fungsi nominasi dan fungsi remunerasi di lingkungan kerja Perseroan sesuai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta ketentuan perundang-undangan.

Competency Development of the Risk & Security Monitoring Committee

To support the Risk and Security Monitoring Committee in carrying out its duties and responsibilities, the Corporation also includes members of the Risk and Security Monitoring Committee in capability improvement programs. Throughout 2022, members of the Risk and Security Monitoring Committee of the Corporation participated in the following competency development and training programs:

HUMAN CAPITAL AND BUSINESS COMMITTEE

The MRT Jakarta Board of Commissioners established the Human Capital and Business Committee with the aim to carry out supervisory and advisory related to nomination and remuneration related to the nomination and remuneration functions within the work environment of the Corporation following the principles of good corporate governance and statutory provisions.



Komite juga membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas kebijakan, strategi, serta pelaksanaan pengelolaan SDM Perseroan.

Komite SDM dan Pengusahaan juga berfungsi sebagai kepanjangan tangan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi konsultasi pada pengelolaan SDM dan pengelolaan pengusahaan Perseroan. Komite mempunyai hubungan kerja langsung dengan Dewan Komisaris, serta berkoordinasi dengan Divisi Human Capital, Divisi Customer Engagement, dan Divisi Commercial and Retail.

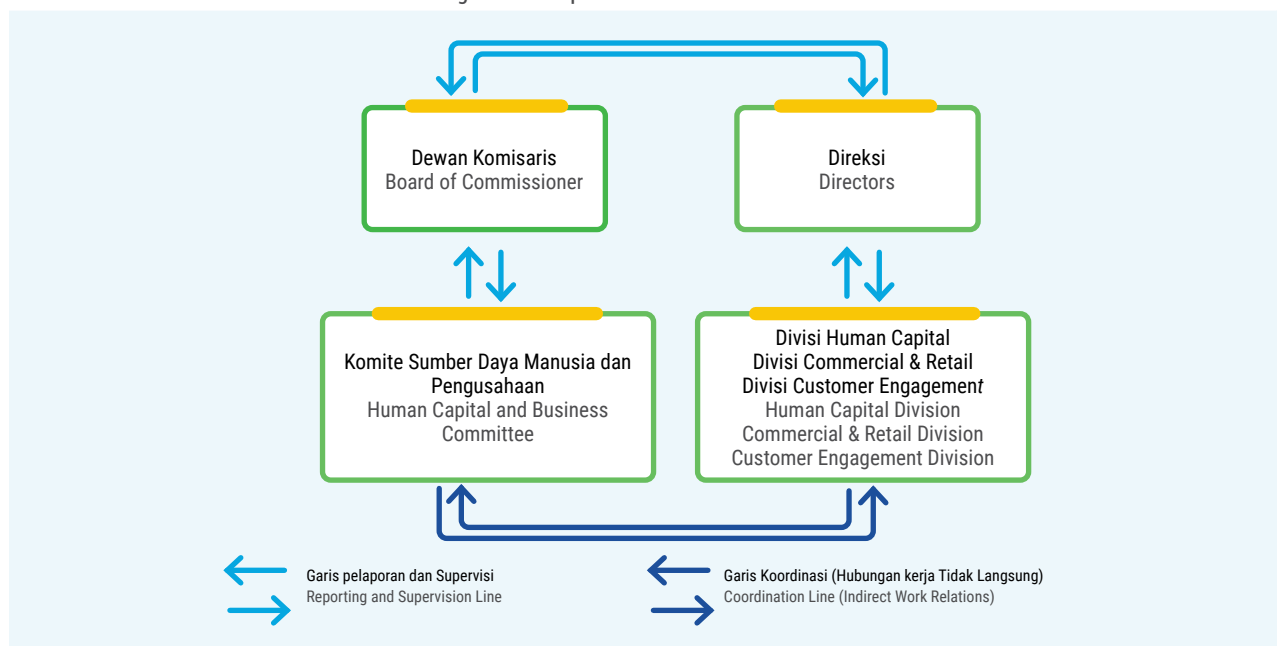
Ketua dan Anggota Komite SDM dan Pengusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Masa jabatan anggota Komite SDM dan Pengusahaan yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan sesuai dengan jangka waktu masa Jabatan Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

The Committee also assists the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of policies, strategies and implementation of the Human Capital management of the Corporation.

The Human Capital and Business Committee also functions as an extension of the Board of Commissioners in carrying out consultancy functions in the management of human capital and the business management of the Corporation. The Committee has a direct working relationship with the Board of Commissioners, and coordinates with the Human Capital Division, Customer Engagement Division, and Commercial and Retail Division.

The Chair and Members of the HC and Business Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners. The term of office for members of the HR and Business Committee who are not members of the Board of Commissioners of the Corporation is in accordance with the term of office of the Board of Commissioners, without limiting the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

Hubungan Kerja Komite SDM dan Pengusahaan
Working Relationship of the HC and Business Committee



Piagam Komite SDM dan Pengusahaan

Komite SDM dan Pengusahaan Perseroan memiliki Piagam sebagai acuan dan pedoman kerja bagi Komite dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Piagam Komite Audit ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 003 Tahun 2020 tanggal 23 Juli 2020. Piagam Komite SDM dan Pengusahaan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Ketua Komite Audit. Piagam Komite Audit memuat:

1. Tugas dan tanggung jawab, serta wewenang;
2. Komposisi, struktur, dan persyaratan keanggotaan;

HC and Business Committee Charter

The Human Capital and Business Committee of the Corporation has a Charter as a reference and work guideline for the Committee in carrying out its duties and authorities. The Audit Committee Charter is established through the Decree of the Board of Commissioners No. 003 of 2020 dated 23 July 2020. The HC and Business Committee Charter is signed by the Board of Commissioners and the Chair of the Audit Committee. The Audit Committee Charter covers:

1. Duties and responsibilities, and authorities;
2. Composition, structure and membership requirements;

3. Tata cara dan prosedur kerja;
4. Kebijakan penyelenggaraan rapat;
5. Sistem pelaporan kegiatan;
6. Kode etik;
7. Ketentuan mengenai pengawasan penerapan Manajemen SDM dan Pengusahaan;
8. Masa tugas Komite SDM dan Pengusahaan; dan
9. Periode pemutakhiran Piagam Komite SDM dan Pengusahaan.

Keanggotaan Komite SDM dan Pengusahaan

Persyaratan dan kualifikasi anggota Komite SDM dan Pengusahaan Perseroan harus memenuhi persyaratan kompetensi dan independensi sebagaimana diatur dalam Piagam Komite SDM dan Pengusahaan ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 003 Tahun 2020, tanggal 23 Juli 2020.

1. Anggota Komite SDM dan Pengusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
2. Ketua Komite SDM dan Pengusahaan adalah anggota Dewan Komisaris;
3. Anggota Komite SDM dan Pengusahaan dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau di luar Perseroan;
4. Anggota Komite SDM dan Pengusahaan memiliki keahlian di bidang yang berkaitan dengan manajemen Sumber Daya Manusia dan pengelolaan perusahaan;
5. Anggota Komite SDM dan Pengusahaan yang bukan berasal dari Dewan Komisaris paling banyak berjumlah 2 (dua) orang atau dapat lebih dari 2 (dua) orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Anggota Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Pada tahun 2022, komposisi anggota Komite SDM dan Pengusahaan Perseroan adalah sebagai berikut:

3. Work guideline and procedures;
4. Policy on holding meetings;
5. Activity reporting system;
6. Code of Conduct;
7. Provisions regarding the supervision of the implementation of HC Management and Business;
8. Term of office of the Human Capital and Business Committee; And
9. Period for updating the HC and Business Committee Charter.

Membership of the HC and Business Committee

Requirements and qualifications for members of the HC and Business Committee of the Corporation must meet the competency and independence requirements as stipulated in the HC and Business Committee Charter stipulated by Decree of the Board of Commissioners No. 003 of 2020, dated July 23, 2020.

1. Members of the HC and Business Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners;
2. The Chair of the Human Capital and Business Committee is a member of the Board of Commissioners;
3. Members of the HC and Business Committee may come from members of the Board of Commissioners or from outside the Corporation;
4. Members of the Human Capital and Business Committee have expertise in areas related to Human Capital and business management;
5. Members of the HC and Business Committee who are not from the Board of Commissioners are at most 2 (two) persons or can be more than 2 (two) persons in accordance with the provisions of laws and regulations; And
6. Members of the Human Capital and Business Committee are prohibited from having blood and marital relations to the third degree, either in a straight line or sideways, with members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Corporation.

In 2022, the composition of the HC and Business Committee members of the Corporation is as follows:

Komposisi Anggota Komite SDM dan Pengusahaan Perseroan pada tahun 2022
The Composition of the HC and Business Committee Members of the Corporation in 2022

Nama Nama	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keterangan Remarks
William P. Sabandar	Ketua Chair	SK 008/BOC-MRT/XI/2022	Komisaris Commissioner
Irwan Rei	Anggota Member	SK 006/BOC-MRT/X/2022	Pihak Independen Independent Party
Helda Chandra	Anggota Member	SK 006/BOC-MRT/X/2022	Pihak Independen Independent Party
Rukijo*)	Ketua Chair	SK/009/BOC-MRT/X/2020	Komisaris Commissioner

*) menjabat sebagai ketua Komite SDM dan Pengusahaan dari 1 Januari 2022 sampai dengan 25 Oktober 2022

*) served as a chair of the Human Capital and Business Committee from January 1, 2022 to October 25, 2022



Profil Komite SDM dan Pengusahaan Profile of HC and Business Committee



William P. Sabandar

Ketua Komite SDM dan Pengusahaan
Chair of the HC and Business Committee

Profil William P. Sabandar dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of William P. Sabandar can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section of this Annual Report.



Irwan Rei

Anggota Komite Audit
Member of HC and Business Committee

Usia Age	57 tahun 57 years old
Domisili Domicile	DKI Jakarta
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	SK 006/BOC-MRT/X/2022

Pendidikan dan Sertifikasi Education and Certification

Pendidikan:

Education

- MBA (S2) Mt. Eliza Business School, Monash University (1997)
- MBA (S2) from Monash Mt. Eliza Business School, Monash University, Australia (1997)
- MSc. (S2) Teknik Perminyakan University of Southern California (1993)
- MSc (S2) in Petroleum Engineering from the University of Southern California, USA (1993)
- Sarjana (S1) Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung (1989)
- Bachelor's degree in Petroleum Engineering from the Bandung Institute of Technology, Indonesia (1989)

Latar Belakang Karier

History of Employment

- Pengajar, School of Business Management (SBM) ITB, (2009-sekarang)
- Lecturer, School of Business Management (SBM) ITB, (2009-present)
- Tim Penulis Buku "Ketahanan Industri Indonesia 2018-2030", Dewan Analisis Strategis BIN, (2017)
- Writer Team of "Ketahanan Industri Indonesia 2018-2030" 'Indonesia's Industry Resilience 2018-2030' Book, BIN Strategic Analysis Board, (2017)
- Tim Penulis Buku "Practical Human Resources", Gramedia, (2016)
- Writer Team of 'Practical Human Resources' Book, Gramedia, (2016)
- Strategy Advisor, Daya Dimensi Indonesia, (2014-2018)
- Strategy Advisor, Daya Dimensi Indonesia, (2014-2018)
- Komite SDM, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), (2013-2017)
- HR Committee, OJK (Financial Services Authority), (2013-2017)
- Komite Remunerasi, Donggi Senoro-LNG, (2011-2018)
- Remuneration Committee, Donggi Senoro-LNG, (2011-2018)
- Komite SDM, LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), (2010-2015)
- HR Committee, LPS (Loan Insurance Agency), (2010-2015)
- Managing Director, MTI Consulting, (2006-sekarang)
- Managing Director, MTI Consulting, (2006-present)

Hubungan Afiliasi

Affiliate Relations

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pengusahaan dan Pemegang Saham Pengendali.

Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Directors, and Controlling Shareholders.



Helda Chandra

Anggota Komite SDM dan Pengusahaan
Member of HC and Business Committee

Usia Age	42 tahun 42 years old
Domisili Domicile	DKI Jakarta
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	SK 006/BOC-MRT/X/2022

Pendidikan dan Sertifikasi Education and Certification

Pendidikan:

Education

- Kandidat Master of Communication, Universitas Indonesia, (2018-sekarang)
- Candidate of Master of Communication, University of Indonesia, (2018-present)
- Associate's Degree, Sastra & Budaya Cina, Beijing Language and Culture University, (2003-2004)
- Associate's Degree, Chinese Literature & Culture, Beijing Language and Culture University, (2003-2004)
- Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Manajemen Pemasaran, Universitas Indonesia, (2002)
- Bachelor's Degree in Economics, Marketing Management, University of Indonesia, (2002)

Latar Belakang Karier

History of Employment

- Tenaga Ahli Bidang Komersial PT Angkasa Pura II, (2020-sekarang)
- Experts in Commercial, PT Angkasa Pura II, (2020-present)
- Partner, Commerce Development Research Institute, Taiwan, (2019)
- Partner, Commerce Development Research Institute, Taiwan, (2019)
- Partner, Red & White, China, Alibaba Project, (2016)
- Partners, Red & White, China, Alibaba Project, (2016)
- CEO, Communic 8 Agency, (2014-sekarang)
- CEO, Communic 8 Agency, (2014-present)
- Salah satu juri kompetisi Debat Pemasaran & Perencanaan Pemasaran Indonesia, (2013-2014)
- A jury of Indonesia Marketing Debate & Marketing Plan competition, University of Indonesia, (2013-2014)
- Senior Marketing Communication Manager, Fujitsu, (2011-2013)
- Senior Marketing Communication Manager, Fujitsu, (2011-2013)
- Marketing Communication, Adira Finance, (2008-2011)
- Marketing Communication, Adira Finance, (2008-2011)
- Marketing Communication, LG Indonesia, (2005-2008)
- Marketing Communication, LG Indonesia, (2005-2008)

Hubungan Afiliasi

Affiliate Relations

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pengusahaan dan Pemegang Saham Pengendali.

Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Directors, and Controlling Shareholders.

Independensi Komite SDM dan Pengusahaan

Anggota Komite SDM dan Pengusahaan diwajibkan memenuhi kriteria independensi:

1. Bukan merupakan bagian dari perusahaan konsultan bidang sumber daya manusia yang bekerja untuk Perseroan;
2. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan usaha Perseroan termasuk di dalamnya tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan entitas anak selain imbalan jasa yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas sebagai anggota Komite SDM dan Pengusahaan;
3. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal, dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan;
4. Tidak memegang jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Seluruh Anggota Komite SDM dan Pengusahaan telah memenuhi kriteria independensi dimaksud.

Independence of the HC and Business Committee

Members of the HC and Business Committee are required to meet the following independence criteria:

1. Not being a part of a consulting firm on human capital working for the Corporation;
2. Not having direct or indirect business relationship related to the business activities of the Corporation, including not receiving compensation from the Corporation and its subsidiaries other than the compensation received for services relating to the duties as a member of the HC and Business Committee;
3. Not having family relationship due to marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically, with the Commissioners, Directors, or Ultimate / Controlling Shareholders of the Corporation;
4. Not holding concurrent position as administrators of political parties and/or legislative members/candidates and/or governor/vice governor candidates, and other positions in accordance with the statutory regulations that may potentially lead to conflicts of interest.

All Members of the HC and Business Committee have met the independence criteria.



Tugas dan Tanggung Jawab SDM dan Pengusahaan

Terkait Pengelolaan SDM dan Pengusahaan

1. Membantu Dewan Komisaris memastikan efektivitas kebijakan, strategi, serta pelaksanaan pengelolaan SDM Perseroan;
2. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas kebijakan, strategi, serta implementasi inisiatif perusahaan dalam rangka meningkatkan daya saing bisnis korporasi dan pendapatan korporasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penyempurnaan dan pelaksanaan sistem manajemen SDM dan manajemen perusahaan;
4. Menyampaikan laporan evaluasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan pelaksanaan Rencana Bisnis Perusahaan (RBP) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perusahaan tahun berjalan terkait aspek manajemen SDM dan manajemen perusahaan;
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan RBP dan RKA Perusahaan, hal-hal terkait manajemen SDM dan perusahaan, serta tentang kegiatan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
6. Melakukan penilaian atas situasi yang turut memperhitungkan risiko dan tingkat bahayanya yang dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis dan pengelolaan SDM;
7. Menyusun pembaharuan pedoman dan tata tertib kerja Komite yang terutang dalam Piagam Komite, dengan melakukan reviu paling sedikit tiga tahun sekali;
8. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan unit kerja.

Terkait Nominasi dan Remunerasi

1. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan unit kerja;
3. Memberikan rekomendasi dan meninjau kelayakan kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi, dan besaran remunerasi;
4. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan unit kerja Perseroan;
5. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai strategi perusahaan Perseroan, serta melakukan pengawasan penerapannya.

Duties and Responsibilities of the HC and Business Committee

HC and Business Management

1. Assisting the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of policies, strategies, and implementation of Corporate human capital management;
2. Assisting the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of policies, strategies, and implementation of business initiative to increase the business competitiveness of the Corporation and Corporate revenue;
3. Providing recommendation to the Board of Commissioners concerning the improvement and implementation of human capital management and business management system;
4. Submitting an evaluation report to the Board of Commissioners concerning the implementation of Corporate Long-Term Plan (RJPP) and Corporate Work Plan and Budget (RKAP) of the running year concerning HC management and business management aspects;
5. Providing recommendations to the Board of Commissioners in approval of Corporate Business Plan and Corporate Work Plan and Budget, matters on HC and business management, and activities requiring approval from the Board of Commissioners as governed by the Articles of Association;
6. Conducting an assessment of the situation which takes into account the risks and the level of danger that may affect business continuity and HC management;
7. Preparing the update of work guidelines for the Committee as stated by the Committee charter by reviewing as required, at least once in 3 (three) years;
8. Assisting the Board of Commissioners to assess the performance of the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners, and work unit.

Nomination and Remuneration

1. Submitting candidates that fulfill the requirements as members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners to be proposed to the GMS;
2. Recommending the Board of Commissioners on development programs for the Board of Directors, Board of Commissioners, and work units;
3. Recommending to the Board of Commissioners and reviewing the fitness of remuneration structure, remuneration policy, and remuneration amount;
4. Assisting the Board of Commissioners in assessing the performance in accordance with the remuneration received by the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and work units;
5. Providing consideration and suggestions to the Board of Commissioners on corporate strategy on the Corporation and monitoring the implementation.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Keanggotaan Komite SDM dan Pengusahaan Tahun 2022
Distribution of Duties and Responsibilities among Members of the Risk & Security Monitoring Committee in 2022

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
William P. Sabandar	Ketua Chair	Koordinasi Pengawasan di bidang SDM dan Pengusahaan Coordinating the Supervision of HC and Business
Irwan Rei	Anggota Member	Fungsi Pengawasan di bidang SDM Supervising the Human Capital field
Helda Chandra	Anggota Member	Fungsi Pengawasan di bidang Pengusahaan Supervising the Business field
Rukijo*)	Ketua Chair	Koordinasi Pengawasan di bidang SDM dan Pengusahaan Coordinating the Supervision of HC and Business

*) menjabat sebagai ketua Komite SDM dan Pengusahaan dari 1 Januari 2022 sampai dengan 25 Oktober 2022

*) served as a chair of the Human Capital and Business Committee from January 1, 2022 to October 25, 2022

Rapat Komite SDM dan Pengusahaan

1. Rapat komite dilakukan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komite yang hadir yang dipilih oleh rapat;
3. Rapat dapat diselenggarakan baik dengan kehadiran secara fisik maupun melalui media elektronik atau kombinasi antara keduanya;
4. Rapat yang dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun;
5. Rapat yang dihadiri secara non-fisik dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang harus memungkinkan semua peserta rapat Komite saling melihat dan atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat;
6. Jadwal dan agenda serta program kerja harus dibuat dalam program tahunan yang ditetapkan pada akhir tahun sebelumnya;
7. Perubahan jadwal dan agenda ditetapkan oleh Ketua Komite;
8. Undangan dan materi rapat harus didistribusikan oleh Sekretaris Komite kepada Komite SDM dan Pengusahaan paling lambat 2 (dua) hari kalendar sebelum tanggal rapat dan disampaikan untuk diketahui oleh Komite SDM dan Pengusahaan;
9. Kuorum rapat sekurang-kurangnya dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Ketua Komite dan seorang anggota Komite Pihak Independen;
10. Hasil Rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat yang dibuat oleh Sekretaris Komite, dan ditandatangani oleh Ketua Komite.

Sepanjang tahun 2022, Komite SDM dan Pengusahaan telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

HC and Business Committee's Meeting

1. The Committee holds meeting at least once in a month;
2. The Meeting is led by the Committee Chair. If the Audit Committee Chair is not present, the Meeting is chaired by a present member of the Committee elected by the Meeting;
3. The Meeting can be carried out by physical presence or through electronic media or a combination of both;
4. There must be at least 2 (two) Meetings carried out by physical presence every year;
5. Non-physical Meeting is carried out through teleconference, video conference, or other electronic media that enables all participants of the Meeting to see and hear each other directly and to take part in the meeting;
6. The schedule and agenda as well as the work program must be compiled in an annual program that is defined by the end of the previous year;
7. Changes to the schedule and agenda is determined by the Committee Chair;
8. Summon Letter and material of the Meeting must be distributed by the Committee Secretary to the HC and Business Committee by no later than 2 (Two) calendar days before the date of the Meeting and submitted as information for the HC & Business Committee;
9. The Meeting quorum is attended by at least 51% of the total members of the Committee, including a Committee Chair and an Independent Member of the Committee;
10. The Minutes of Meeting must be documented to all members of the Committee as well as other participants.

Throughout 2022, the HR and Business Committee held 12 (twelve) Meetings with the attendance level of members as follows:



Rekapitulasi Kehadiran Rapat Komite SDM dan Pengusahaan Tahun 2022 Recapitulation of Attendance in the HC and Business Committee's Meeting in 2022

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran (%) Percentage of Attendance (%)
William P. Sabandar	2	2	100
Irwan Rei	12	12	100
Helda Chandra	12	12	100
Rukijo*)	10	10	100

*) menjabat sebagai ketua Komite SDM dan Pengusahaan dari 1 Januari 2022 sampai dengan 25 Oktober 2022

*) served as a chair of the Human Capital and Business Committee from January 1, 2022 to October 25, 2022

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite SDM dan Pengusahaan Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, Komite SDM dan Pengusahaan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Piagam Komite SDM dan Pengusahaan dan program kerja yang telah ditetapkan di awal tahun, antara lain dengan memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan peleburan divisi atau departemen agar tercipta kesetaraan *work-load* (beban kerja) dengan divisi atau departemen lainnya;
2. Melakukan kajian historikal perubahan struktur organisasi MRT Jakarta dan kaitannya dengan *core* bisnis MRT dan perkembangannya;
3. Menyesuaikan struktur organisasi untuk memperkuat struktur keuangan, termasuk penguatan rasio antara pendapatan tiket dan pendapatan non-tiket menjadi 50%:50%;
4. Melakukan *assessment* dan penyesuaian struktur organisasi yang sekaligus dapat menjawab pertanyaan dasar terkait berapakah jumlah optimal SDM di MRT untuk menjadi perusahaan yang sehat dan *agile*;
5. Memastikan penyesuaian struktur organisasi oleh Konsultan perlu konsisten telah mengikuti *guiding principles* yang telah ditetapkan, termasuk "kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (*compliance*)"; "terpenuhinya fungsi-fungsi strategis yang dibutuhkan oleh organisasi", dan *guiding principle* lainnya;
6. Struktur organisasi yang "*agile*" dan mengutamakan "*service excellence*" perlu diterapkan pada seluruh bagian dari organisasi MRT;
7. Menyusun *workplan* dan proses yang jelas dalam menindaklanjuti penyesuaian struktur organisasi dan implikasinya terhadap pengelolaan SDM secara menyeluruh;
8. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pegawai yang menjalankan fungsi pengelolaan *Human Capital* agar memberikan masukan yang progresif terkait pengelolaan HC kepada Direksi, termasuk juga pengelola HC di anak perusahaan;
9. Menjalankan program peningkatan kemampuan dan kapabilitas SDM secara berkelanjutan untuk mencapai target-target dalam RJPP dan visi dan misinya;
10. Merancang strategi *staffing* yang dapat mendukung pencapaian RJPP;

Report of the Implementation of Duties and Activities of the HC and Business Committee in 2022

Throughout 2022, the HC and Business Committee has carried out its duties and responsibilities in accordance with the HC and Business Committee Charter and the work program that was established at the beginning of the year, among others by providing the following recommendations:

1. To consider merging divisions or departments in order to create work-load equality with other divisions or departments;
2. To conduct a historical study of changes in the organizational structure of MRT Jakarta and its relation to the MRT's core business and its development;
3. To adjust the organizational structure to strengthen the financial structure, including strengthening the ratio between FB and NFB to 50%:50%;
4. To conduct assessments and adjustments to the organizational structure which can simultaneously answer basic questions related to what is the optimal number of human resources in MRT to become a healthy and agile company;
5. To ensure that the adjustments to the organizational structure by the Consultant have consistently follow the guiding principles that have been set, including "compliance with applicable regulations"; "fulfillment of strategic functions required by the organization", and other guiding principles;
6. An organizational structure that is agile and prioritizes service excellence needs to be implemented in all parts of the MRT organization;
7. To develop a clear work plan and process for following up on adjustments to the organizational structure and the implications for HC management as a whole;
8. To increase the capacity and capability of employees who carry out the Human Capital management function to provide progressive input regarding HC management to provide progressive input regarding HC management to BOD, including HC managers in subsidiaries;
9. To carry out HC competency and capability improvement programs in a sustainable manner to achieve the targets in the RJPP and its vision and mission;
10. To design a staffing strategy that can support the achievement of the RJPP;

11. Dibutuhkan keputusan yang progresif dari manajemen untuk memastikan RJPP bisa tercapai atau terwujud, seperti target dalam bidang pelayanan, target *city regenerator*, *urban platformer* dan lain-lain, dan implikasinya terhadap kapabilitas organisasi dan kompetensi SDM yang dibutuhkan. Kebijakan SDM, dari rekrutmen sampai dengan *separation*, perlu efektif dan progresif untuk mencapai RJPP;
 12. Memastikan hasil kajian konsultan bersifat progresif untuk dapat mendukung inisiatif-inisiatif usaha dari perusahaan;
 13. Memastikan target pendapatan non-tiket 2023 telah disusun dengan memperhatikan potensi, peluang dan strategi yang dijalankan di tahun 2022 serta menyiapkan mitigasi risiko dari pengalaman tahun 2022;
 14. Terkait dengan pendapatan non-tiket, MRT Jakarta harus menguji model bisnisnya mengingat model bisnis MRT Jakarta yang bernilai besar dan jangka panjang;
 15. Melakukan telaah terkait bisnis model dan cara *mendevlop* produk dan mengomunikasikannya; dan
 16. Mereview bisnis model anak perusahaan sesuai pengalaman selama ini dan melakukan integrasi model bisnis dengan perusahaan induk.
11. Progressive decisions are needed from management to ensure that the RJPP can be achieved, such as targets in the service sector, city regenerator targets, urban platformers etc., and their implications for organizational capabilities and required HC competencies. HC policies, from recruitment to separation, need to be effective and progressive in order to achieve the RJPP;
 12. To ensure that the results of consultant studies are progressive to be able to support business initiatives from the Corporation;
 13. To ensure that the 2023 NFB target has been prepared by taking into account the potential, opportunities and strategies implemented in 2022 and preparing risk mitigation from experience in 2022;
 14. With regard to the NFB, MRT Jakarta must test its business model considering that MRT Jakarta's business model is of great value and long term;
 15. To conduct studies related to business models and how to develop products and communicate them; and
 16. To review the business model of the subsidiaries according to the experience and integrate the business model with the parent company.





Pengembangan Kompetensi Komite SDM dan Pengusahaan

Untuk menunjang Komite SDM dan Pengusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Perseroan juga menyertakan anggota Komite SDM dan Pengusahaan pada program-program peningkatan kapabilitas. Sepanjang tahun 2022, anggota Komite SDM dan Pengusahaan Perseroan telah mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Competency Development of the HC and Business Committee

To support the HC and Business Committee in carrying out its duties and responsibilities, the Corporation also includes members of the HC and Business Committee in capability improvement programs. Throughout 2022, members of the HC and Business Committee of the Corporation have participated in the following competency training and development programs:

Program Pengembangan Kompetensi Komite SDM dan Pengusahaan Competency Development Program of the HC and Business Committee

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/Workshop/Konferensi/ Seminar Name of Training/Workshop/Conference/Seminar	Lembaga Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Time and place
William P. Sabandar*)	Ketua Chair	Pengembangan kompetensi/pelatihan Ketua Komite SDM dan Pengusahaan William P. Sabandar dapat dilihat pada bagian pengembangan kompetensi/pelatihan Dewan Komisaris. The competency development/training for the HC and Business Committee Chair William P. Sabandar can be seen in the Board of Commissioners competency development/training section.		
Irwan Rei	Anggota Member	- Integrated GRC Sustainable Business PT MR Jakarta (Perseroda) - Data Driven Executive (DDE)	- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) - National Committee on Governance Policy (KNKG) - Algoritma - Algoritma	- Jakarta, 18 Agustus 2022 - Jakarta, August 18, 2022 - Training Online, 21 Juli 2022 - Online Training, July 21, 2022
Helda Chandra	Anggota Member	- Integrated GRC Sustainable Business PT MR Jakarta (Perseroda) - Data Driven Executive	- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) - National Committee on Governance Policy (KNKG) - Algoritma - Algoritma	- Jakarta, 18 Agustus 2022 - Jakarta, August 18, 2022 - Training Online, 21 Juli 2022 - Online Training, July 21, 2022
Rukijo**)	Ketua Chair	Pengembangan kompetensi/pelatihan Ketua Komite SDM dan Pengusahaan Rukijo dapat dilihat pada bagian pengembangan kompetensi/pelatihan Dewan Komisaris. The competency development/training for the HC and Business Committee Chair Rukijo can be seen in the Board of Commissioners competency development/training section.		

*) mulai menjabat sejak 25 oktober 2022

**) menjabat sebagai ketua Komite SDM dan Pengusahaan dari 1 Januari 2022 sampai dengan 25 Oktober 2022

*) served since October 25, 2022

**) served as a chair of the Human Capital and Business Committee from January 1, 2022 to October 25, 2022

Komite/Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Fungsi Dewan Komisaris dalam hal menentukan nominasi dan remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dilaksanakan Komite Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pengusahaan. Pengungkapan informasi tentang Komite SDM dan Pengusahaan.

Nomination and Remuneration Committee/Function

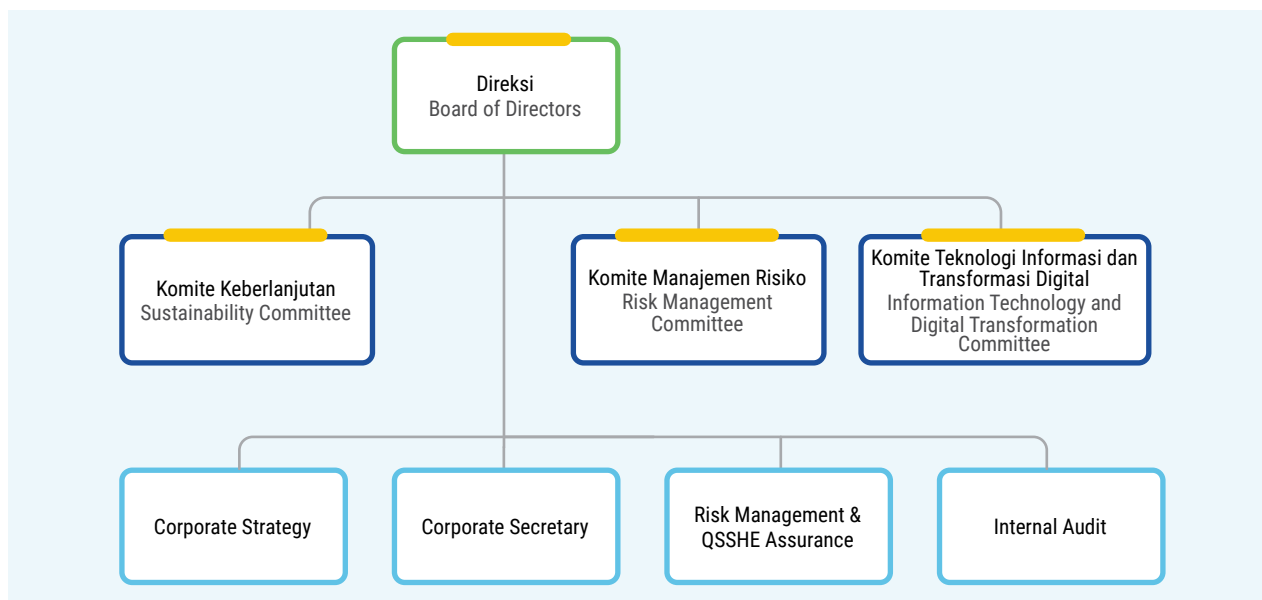
The Function of the Board of Commissioners in determining the nomination and remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors is carried out by the Human Capital (HC) and Business Committee. Disclosure of information on the HC and Business Committee.

Organ Pendukung Direksi

Supporting Organs Of The Board Of Directors

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk organ, baik yang bersifat *ad-hoc* maupun struktural dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan Perseroan. Hingga akhir tahun 2022, Direksi telah membentuk beberapa organ pendukung, yaitu Komite Keberlanjutan, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Teknologi Informasi dan Transformasi Digital yang bersifat *ad-hoc* dan Corporate Strategy, Risk Management and QSSHE Assurance, dan Internal Audit yang bersifat struktural.

In accordance with the provisions of the Law, in carrying out their duties and responsibilities, the Board of Directors can form organs both provisional and structural in carrying out the duties and responsibilities of managing the Corporation. Until the end of 2022, the Board of Directors has formed several provisional supporting organs, namely the Sustainability Committee, Risk Management Committee, and Information Technology and Digital Transformation Committee as well as structural supporting organs, namely Corporate Strategy, Risk Management and QSSHE Assurance, and Internal Audit.



KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Tujuan pembentukan Komite Manajemen Risiko adalah memberikan dukungan bagi Direksi dalam memantau langsung pengelolaan risiko Perseroan, yang mencakup risiko proyek konstruksi, risiko pengoperasian dan pemeliharaan MRT Jakarta, risiko pengelolaan bisnis, serta risiko lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Komite berperan untuk memantau independensi Divisi Risk Management & QSSHE Assurance, sesuai Peraturan Direksi No. 18 Tanggal 10 Juli 2020 tentang Kebijakan Manajemen Risiko di lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda).

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri atas Direktur selain Direktur Utama, Kepala Divisi Risk Management & QSSHE Assurance, serta sekurang-kurangnya satu orang Kepala Divisi terkait penanganan risiko Perseroan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi. Komite dapat diketuai oleh salah satu Direktur, selain Direktur Utama.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee was established to support the Board of Directors to directly monitor the risk management of the Corporation, covering construction project risk, MRT Jakarta operational and maintenance risk, business management risk, and other risk that may impact on the Performance of the Corporation. The Committee monitors the independency of Risk Management & QSSHE Assurance Division, in line with the Director's Decree No. 18 dated July 10, 2020 about Risk Management Policy within PT MRT Jakarta (Perseroda).

The Risk Management Committee consists of Directors other than the President Director, the Risk Management & QSSHE Assurance Division Head, and at least one Division Head related to Corporate risk management that is appointed by a Board of Directors Decision Letter. The Committee can be chaired by one of the Directors other than the President Director.



Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Keanggotaan Komite sesuai Surat Keputusan Direksi No. 008 tahun 2022 terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. Pada periode pelaporan Ketua Komite dijabat oleh Direktur Konstruksi, sementara anggota Komite terdiri atas beberapa pejabat perusahaan.

Susunan Komite Manajemen Risiko

Ketua Chair	Direktur Konstruksi Construction Director
Sekretaris Secretary	Kepala Divisi Risk Management & QSSHE Assurance Risk Management & QSSHE Assurance Division Head
Anggota Members	• Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi • Finance and Corporate Management Director • Direktur Operasi dan Pemeliharaan • Operation and Maintenance Director • Direktur Business Development • Business Development Director • Kepala Divisi Corporate Secretary • Corporate Secretary Division Head • Kepala Divisi Internal Audit • Internal Audit Division Head • Kepala Divisi Corporate Strategy • Corporate Strategy Division Head • Kepala Divisi Project Management Office • Project Management Office Division Head • Kepala Divisi Engineering • Engineering Division Head • Kepala Divisi Railway Operation • Railway Operation Division Head • Kepala Divisi Railway Maintenance • Railway Maintenance Division Head • Kepala Divisi Operation & Maintenance Facility Services • Operation & Maintenance Facility Services Division Head • Kepala Divisi Finance & Accounting • Finance & Accounting Division Head • Kepala Divisi Transit Oriented Development • Transit-Oriented Development Division Head • Kepala Divisi Comercial & Retail • Commercial & Retail Division Head • Kepala Divisi Business Expansion • Business Expansion Division Head • Kepala Divisi Customer Engagement • Customer Engagement Division Head • Kepala Divisi Human Capital • Human Capital Division Head • Kepala Divisi Information System & Technology • Information System & Technology Division Head • Kepala Divisi Legal • Legal Division Head

The Risk Management Committee reports to the President Director. The members of the Committee according to Board of Directors Decision Letter No. 008 dated 2022 consist of a chair, secretary, and members. During the reporting period, the Committee is chaired by the Construction Director, and the members consist of several officials of the Corporation.

Risk Management Committee Structure

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Manajemen Risiko

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Manajemen Risiko:

1. Menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk penetapan dan persetujuan batas (*limit*) risiko, penetapan top risiko Perusahaan serta perubahan Kebijakan Manajemen Risiko (apabila terdapat perubahan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kegiatan Perseroan secara signifikan);
2. Menyampaikan top risiko Perseroan yang telah ditetapkan dalam rapat Komite Manajemen Risiko kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
3. Memberikan fasilitasi dan konsultasi kepada Direksi, khususnya Direktur Utama, dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan Perseroan yang memiliki eksposur risiko yang signifikan;
4. Mengembangkan budaya sadar risiko pada seluruh karyawan Perseroan melalui kegiatan pengembangan kapasitas pengelolaan risiko dan sosialisasi hal-hal yang bersifat strategis, yaitu menyampaikan profil, peta, risiko kritis, dan batas toleransi risiko Perseroan paling sedikit satu tahun sekali;
5. Menyediakan sumber daya yang memadai dan memastikan keselarasan program manajemen risiko dengan strategi Perseroan secara keseluruhan;

Duties, responsibilities, and authorities of the Risk Management Committee:

Duties, responsibilities, and authorities of the Risk Management Committee:

1. Defining risk management policies and strategies including definition and agreement on the risk limit, definition of Corporate top risks and changes to Risk Management Policies (in the event of changes to the factors that may influence the activities of the Corporation significantly);
2. Reporting Corporate top risks as defined in a Risk Management Committee's report to the President Director and the Board of Commissioners;
3. Facilitating and providing consultation to the Board of Directors, especially the President Director, in making decisions concerning Corporate activities with significant risk exposures;
4. Developing a risk awareness culture among the employees through risk management capacity development and dissemination of strategic matters such as informing the risk profile, risk map, critical risks, and risk tolerance of the Corporation at least once a year;
5. Providing adequate resources and ensuring the alignment of risk management programs with the overall Corporate strategy;

6. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian risiko serta memberikan arahan berdasarkan laporan profil risiko Perseroan yang disampaikan Departemen Manajemen Risiko untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko dan memantau kinerjanya;
7. Diberikan kewenangan untuk mendapatkan dan menghimpun seluruh data dan informasi termasuk penjelasan yang dibutuhkan untuk melakukan analisis risiko.

Perseroan menyertakan Komite Manajemen Risiko pada beberapa kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas anggota Komite:

1. *Focus Group Discussion* dalam penetapan Risiko Strategis dan *Risk Appetite* tahun 2022;
2. *Focus Group Discussion* dalam pengukuran *Risk Maturity* dan *GRC Score* tahun 2022;
3. Konsinyering GRC yang melibatkan Dewan Komisaris dan Komite-Komite Perseroan serta Kepala Divisi yang terkait;
4. Webinar *Governance, Risk and Compliance (GRC)* Terintegrasi yang melibatkan seluruh Insan MRT Jakarta; dan
5. Pelatihan *Business Continuity Management (BCM)* yang melibatkan Direksi, Kepala Divisi, dan Kepala Departemen.

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko

Sepanjang tahun 2022, Komite Manajemen Risiko telah melakukan langkah strategis untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawab, sebagai berikut:

1. Melakukan pembahasan dan penetapan *Risk Appetite* Perseroan;
2. Melakukan pembahasan dan penetapan *Top Risk* Perseroan (termasuk *Top Risk* Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan);
3. Menyampaikan *Top Risk* Perseroan (termasuk *Top Risk* Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan) kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris).

KOMITE KEBERLANJUTAN

Sejalan dengan komitmen Perseroan terhadap penerapan prinsip keberlanjutan dalam aktivitas operasionalnya, Perseroan membentuk Komite Keberlanjutan. Komite ini disahkan berdasarkan SK Direksi No. 017 Tahun 2021 tentang Komite Keberlanjutan tertanggal 26 Februari 2021. Komite Keberlanjutan diawasi oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Susunan Komite Keberlanjutan

Ketua Chair	Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi Finance and Corporate Management Director
Wakil Ketua Vice Chair	Divisi Corporate Secretary Corporate Secretary Division Head
Anggota: Members:	• Direktur Operasi dan Pemeliharaan; • Operation & Maintenance Director • Direktur Pengembangan Bisnis; • Business Development Director • Direktur Konstruksi; • Construction Director

6. Evaluating the implementation of risk control and providing directions based on the Corporate risk profile report submitted by the Risk Management Department to ensure effective implementation of risk management and monitoring the performance;
7. Receiving the authorities to obtain and collect all data and information including the explanations required to analyze the risks.

The Corporation enables the participation of the Risk Management Committee in various activities to improve the competency and capability of the members:

1. Focus Group Discussion in determining Strategic Risk and Risk Appetite 2022;
2. Focus Group Discussion on measuring Risk Maturity and GRC Score in 2022;
3. GRC Consulting involving the Board of Commissioners and Committees of the Corporation;
4. Integrated Governance, Risk and Compliance (GRC) Webinar involving all personnels of MRT Jakarta; And
5. BCM training involving the Board of Directors, Division Heads, and Department Heads.

Implementation of the duties of Risk Management Committee

Throughout 2022, the Risk Management Committee has taken strategic steps to carry out the following functions and responsibilities:

1. Conduct discussions and determine Risk Appetite of the Corporation;
2. Conduct discussions and determine Top Risk of the Corporation (including the Top Risk of Subsidiaries and Joint Venture Companies);
3. Delivering Top Risk of the Corporation (including the Top Risk of Subsidiaries and Joint Venture Companies) to the President Director and the Board of Commissioners).

SUSTAINABILITY COMMITTEE

The Corporation established a Sustainability Committee as ratified by the Board of Directors Decision Letter No. 017 Year 2021 concerning Sustainability Committee dated February 26, 2021. The sustainability Committee is under the supervision of the President Director and the Board of Commissioners.

Structure of the Sustainability Committee

Ketua Chair	Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi Finance and Corporate Management Director
Wakil Ketua Vice Chair	Divisi Corporate Secretary Corporate Secretary Division Head
Anggota: Members:	• Kepala Divisi Corporate Strategy; • Corporate Strategy Division Head • Kepala Divisi Risk Management & Quality Assurance; • Risk Management & QSSHE Assurance Division Head • Kepala Divisi Internal Audit. • Internal Audit Division Head



Fungsi dan tanggung jawab Komite Keberlanjutan

1. Meninjau strategi keberlanjutan perusahaan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun;
2. Menetapkan rencana tindak lanjut penerapan strategi keberlanjutan yang telah disusun oleh masing-masing divisi, departemen, fungsi, dan unit, sesuai dengan kebijakan dan strategi keberlanjutan;
3. Mengarahkan dan meninjau kebijakan dan program perusahaan yang berkaitan dengan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial seperti kepatuhan dan tata kelola, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan dan energi, praktik operasi yang berkeadilan, isu pelanggan, pelibatan dan pengembangan masyarakat, serta yang dapat meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan;
4. Meninjau inisiatif dan rekomendasi yang diusulkan untuk mengatasi isu tanggung jawab sosial dan untuk meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap pencapaian tujuan pembangunan keberlanjutan;
5. Memantau, mengukur, menganalisis dan mengevaluasi kinerja keberlanjutan dan tanggung jawab sosial;
6. Melakukan tinjauan manajemen keberlanjutan dan tanggung jawab sosial;
7. Mengevaluasi dan menyetujui isi laporan keberlanjutan;
8. Memfasilitasi berbagi informasi dengan komite-komite lain sebagaimana diperlukan untuk menangani masalah-masalah yang menjadi kepentingan atau keprihatinan bersama sehubungan dengan isu-isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

Pelaksanaan Tugas Komite Keberlanjutan

Sepanjang tahun 2022, Komite Keberlanjutan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain dengan melakukan:

1. Mengevaluasi dan menyetujui Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2021;
2. Melakukan pemutakhiran peta jalan keberlanjutan tahun 2022 - 2030;
3. Menyusun rencana aksi atas implementasi peta jalan keberlanjutan tahun 2023; dan
4. Mengevaluasi pedoman kesetaraan *gender*.

KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSFORMASI DIGITAL

Komite Teknologi Informasi dan Transformasi Digital dibentuk berdasarkan SK Direksi No. 16 tahun 2022 tentang Komite Teknologi Informasi dan Transformasi Digital tertanggal 16 April 2022.

Roles and responsibilities of the Sustainability Committee

1. Reviewing corporate sustainability strategy at least once in a year;
2. Defining the follow-up plan of sustainability strategy implementation as developed by each division, department, function, and unit, in line with the sustainability policy and strategy;
3. Directing and reviewing corporate policies and programs concerning sustainability aspects and social responsibility, such as compliance and governance, human rights, employment, environment and energy, fair operations, customer issues, community engagement and development, and any matters that may improve the contribution of the Corporation to the Sustainable Development Goals;
4. Reviewing the proposed initiatives and recommendations to address social responsibility issues and to improve the contribution of the Corporation to the achievement of Sustainable Development Goals;
5. Monitoring, measuring, analyzing, and evaluating the sustainability and social responsibility performance;
6. Conducting management review on sustainability and social responsibility;
7. Evaluating and approving the contents of sustainability report;
8. Facilitating information sharing with other committees as required to handle issues of common concern related to sustainability and social responsibility issues.

Implementation of Duties of the Sustainability Committee

Throughout 2022, the Sustainability Committee has carried out its duties and responsibilities, among others by carrying out:

1. Evaluated and approved the 2021 Sustainability Report;
2. Updated the 2022 - 2030 sustainability roadmap;
3. Developed an action plan for the implementation of the 2023 sustainability roadmap; And
4. Evaluated gender equality guidelines.

INFORMATION TECHNOLOGY AND DIGITAL TRANSFORMATION COMMITTEE

The Information Technology and Digital Transformation Committee was formed based on the Board of Directors Decision Letter No. 16 of 2022 concerning the Information Technology and Digital Transformation Committee dated April 16, 2022.

Susunan Komite

Structure of the Committee

Ketua Chair	Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi Finance and Corporate Management Director	
Wakil Ketua Vice Chair	Kepala Divisi Corporate Strategy Corporate Strategy Division Head	
Anggota: Members:	- Direktur Business Development - Business Development Director - Kepala Divisi Corporate Secretary - Corporate Secretary Division Head - Kepala Divisi RMQSSHE - RMQSSHE Division Head - Kepala Divisi Finance & Accounting - Finance & Accounting Division Head - Kepala Divisi Comercial & Retail - Commercial & Retail Division Head	- Kepala Divisi Project Management Office - Project Management Office Division Head - Kepala Divisi Railway Operation - Railway Operation Division Head Keanggotaan tidak tetap : Non-permanent membership: - Kepala Divisi Information System and Technology - Information System and Technology Division Head

Fungsi dan Tanggung Jawab Komite

1. Membangun IT *Governance*, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:
 - a. Mereviu dan merekomendasikan kebijakan, standar operasional prosedur (SOP) dalam penerapan Teknologi Informasi dan Transformasi Digital;
 - b. Melakukan pemantauan terhadap risiko proyek/ layanan/produk digital sebagai dampak dari penggunaan Teknologi Informasi dan implementasi Transformasi Digital;
 - c. Mengawasi dan memberikan masukan atas keberlangsungan proyek/bisnis yang berkaitan dengan bidang Teknologi Informasi, *Masterplan* teknologi informasi dan transformasi digital sejalan dengan RJPP dan strategi perusahaan;
 - d. Mengawasi implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan memastikan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi sejalan dengan IT Masterplan serta strategi transformasi digital.

Committee Functions and Responsibilities

1. To build IT *Governance*, with the following job descriptions:
 - a. Review and recommend policies, standard operating procedures (SOP) in the application of Information Technology and Digital Transformation;
 - b. Monitor the risks of digital projects/services/products impacted by the use of Information Technology and the implementation of Digital Transformation;
 - c. Supervise and provide input on the sustainability of projects/businesses related to Information Technology, Information Technology Master Plan and digital transformation in line with the RJPP and corporate strategy;
 - d. Oversee the implementation of the Information Security Management System and ensure that the implementation of the Information Security Management System is in line with the IT Masterplan and digital transformation strategy.





2. Implementasi Transformasi Digital, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:
 - a. Mereviu dan merekomendasikan kerangka kerja, strategi, dan peta jalan Transformasi Digital PT MRT Jakarta (Perseroda);
 - b. Mereviu *milestone* Transformasi Digital dan menyelaraskan inisiatif digital pada masing-masing Direktorat dan merekomendasikan kepada Direksi untuk disetujui;
 - c. Mengawasi dan mengevaluasi implementasi Transformasi Digital pada masing-masing Direktorat PT MRT Jakarta (Perseroda);
 - d. Mengawasi dan mengevaluasi proses integrasi dan pemusatan data dari beberapa sistem aplikasi dan kegiatan di bidang teknologi informasi;
 - e. Melakukan reviu dan memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk menyetujui/menolak atas setiap usulan rencana bisnis/proyek/layanan/produk dan pendanaan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan transformasi digital;
 - f. Merekomendasikan kepada Direksi atas penonaktifan atau penghentian atas sistem/proyek/layanan/produk digital dan/atau layanan IT yang ada saat ini, yang dinilai sudah tidak relevan dengan rencana, strategi bisnis perusahaan dan tujuan dari kegiatan Teknologi Informasi;
 - g. Hal-hal lain yang sifatnya mereviu dan/atau memberi rekomendasi terhadap kegiatan Transformasi Digital atau digitalisasi pada sistem kerja di Perseroan yang memberikan kontribusi kepada peningkatan efisiensi ataupun peningkatan pendapatan Perseroan.
3. Memastikan seluruh usulan kegiatan Teknologi Informasi yang direkomendasikan kepada Direksi dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan dan/atau untuk efisiensi anggaran.
4. Melakukan *gap analysis* atas rencana penerapan Teknologi Informasi oleh Perseroan dengan sumber daya yang dimiliki Perseroan dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi gap tersebut.
5. Memberikan rekomendasi agar terciptanya harmonisasi dan/atau penyelesaian permasalahan yang timbul dari kegiatan Teknologi Informasi dan Transformasi Digital yang telah maupun yang akan diterapkan di Perseroan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite secara taktis dan operasional, dibentuklah Tim *Task Force* Transformasi Digital, melalui Keputusan Direksi No.020 tahun 2022, tertanggal 28 April 2022.

2. Implementation of Digital Transformation, with a description of the tasks as follows:
 - a. Make a review and provide recommendation on PT MRT Jakarta (Perseroda)'s Digital Transformation framework, strategy and roadmap;
 - b. Review Digital Transformation milestones and align digital initiatives in each Directorate and recommend the initiatives to the Board of Directors for approval;
 - c. Supervise and evaluate the implementation of Digital Transformation in each Directorate of PT MRT Jakarta (Perseroda);
 - d. Supervise and evaluate the process of integration and centralization of data from several application systems and activities in the field of information technology;
 - e. Conduct reviews and provide recommendations to the Board of Directors to approve/reject any proposed business/project/service/product and funding plans related to information technology and digital transformation;
 - f. Recommend to the Board of Directors the deactivation or termination of existing systems/projects/services/digital products and/or IT services, which are considered to be irrelevant to plans, corporation's business strategies and objectives of Information Technology activities;
 - g. Other matters that are reviewing and/or providing recommendations for Digital Transformation activities or digitization of work systems in the Corporation that contribute to increasing efficiency or increasing the Corporation's revenue.
3. Ensure that all proposed Information Technology activities recommended to the Board of Directors can provide added value to revenue and/or for budget efficiency.
4. Conduct a gap analysis on the plan to implement Information Technology by the Corporation with the resources owned by the Corporation and provide recommendations to overcome these gaps.
5. Provide recommendations for harmonization and/or resolution of problems arising from Information Technology and Digital Transformation activities that have been or will be implemented in the Corporation.

To support the implementation of the Committee's duties tactically and operationally, a Digital Transformation Task Force Team was formed, through the Board of Directors Decision Letter No. 020 of 2022, dated April 28, 2022.

Susunan Tim Transformasi Digital Digital Transformation Team Composition

Ketua Chair	Kepala Divisi Corporate Strategy Corporate Strategy Division Head
Wakil Ketua Vice Chair	Kepala Divisi Business Expansion Business Expansion Division Head
Anggota: Members	- Kepala Divisi Information System and Technology - Kepala Divisi Finance and Accounting - Knowledge Management Principal - Kepala Departemen IT Operation System Services & Infrastructure - Kepala Departemen IT Development - Kepala Departemen Quality Assurance & Quality Control - Kepala Departemen Corporate Communication - Kepala Departemen Risk Management - Kepala Departemen QSSHE - Kepala Departemen Human Capital Service - Kepala Departemen Procurement - Kepala Departemen Commercial and Retail Management - Kepala Departemen Commercial and TOD Facility Support - Kepala Departemen Digital Business - Kepala Departemen Program and Partnership - Kepala Seksi Railway Engineering - Kepala Seksi Station Master 2

Pelaksanaan Tugas Komite

Sepanjang tahun 2022, Komite Teknologi Informasi dan Transformasi Digital dengan didukung oleh Tim Task Force Transformasi Digital telah melakukan langkah strategis untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawab, sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengesahkan Pedoman Pengelolaan Inisiatif Digital melalui Peraturan Direksi No. 28 Tahun 2022.
2. Mengawal implementasi inisiatif digital, dengan rincian:
 - 9 inisiatif untuk peningkatan pendapatan non-tiket;
 - 31 inisiatif untuk memperkuat kapabilitas operasional;
 - 6 inisiatif untuk meningkatkan *customer experience*; dan
 - 6 inisiatif untuk memperkuat dampak sosial-ekonomi dari pembangunan TOD.
3. Menyusun laporan Transformasi Digital 2022.

Implementation of Committee Duties

Throughout 2022, the Information Technology and Digital Transformation Committee, supported by the Digital Transformation Task Force Team, has taken strategic measures to carry out the following functions and responsibilities:

1. Compile and ratify Digital Initiative Management Guidelines through the Board of Directors Decree No. 28 of 2022.
2. Oversee the implementation of digital initiatives, with details as follows:
 - 9 initiatives to increase non-farebox revenue;
 - 31 initiatives to strengthen operational capabilities;
 - 6 initiatives to improve customer experience; and
 - 6 initiatives to strengthen the socio-economic impact of TOD development.
3. Prepare a Digital Transformation 2022 report.





SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan adalah pihak penghubung yang menjembatani kepentingan antara Perseroan dengan pihak eksternal, terutama dalam menjaga persepsi publik atas citra Perseroan. Sebagai salah satu organ pendukung, Sekretaris Perusahaan berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi antar organ Perseroan, hubungan antara Perseroan dengan Pemegang Saham, regulator, dan Pemangku Kepentingan lainnya serta memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan. Sekretaris Perusahaan juga bertugas untuk membantu tugas Direksi, untuk merumuskan dan menyusun kebijakan dan pedoman; perencanaan, evaluasi, dan melaksanakan aktivitas hubungan eksternal; pemasaran; tanggung jawab sosial; protokol; administrasi; dan komunikasi internal Perseroan sesuai dengan kebijakan, pedoman dan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya langsung kepada Direktur Utama.

Profil Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan

Tahun 2022, Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Ahmad Pratomo sebagai Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, berdasarkan Keputusan Direksi No. 062 Tahun 2022. Pengangkatan tersebut telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.



Ahmad Pratomo

Kepala Divisi Corporate Secretary
Corporate Secretary Division Head

Usia Age	35 Tahun 35 years old
Domisili Domicile	Depok, Jawa Barat
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	SK/062/BOD-MRT/XII/2022

Pendidikan dan Sertifikasi Education and Certification

Pendidikan:

Education

- Magister (S2) Manajemen, Universitas Mercu Buana
- Masters (S2) in Management, Mercu Buana University
- Sarjana (S1) Manajemen, Universitas Indonesia
- Bachelor (S1) Management, University of Indonesia

Sertifikasi:

Certification:

- Sertifikasi Managerial Public Relations, Strategic Public Relations & Media Relations (2020)
- Certificate of Managerial Public Relations, Strategic Public Relations & Media Relations (2020)
- Sertifikasi Digital Marketing Strategies, Kellogg Executive Education (2020)
- Certificate of Digital Marketing Strategies, Kellogg Executive Education (2020)
- Sertifikasi BNSP Skema Strategic Public Relations, Perhumas RI (2020)
- BNSP Certification for Strategic Public Relations Scheme, Perhumas RI (2020)
- Sertifikasi BNSP Skema Public Relations Manager, Perhumas RI (2018)
- Public Relations Manager Scheme BNSP Certification, Perhumas RI (2018)
- Sertifikasi Lean Six Sigma Green Belt (2018)
- Lean Six Sigma Green Belt Certification (2018)
- Sertifikasi Manajemen Risiko: Enterprise Risk Management Associate Professional (2015)
- Risk Management Certification: Enterprise Risk Management Associate Professional (2015)

Latar Belakang Karier

History of Employment

- Kepala Divisi Corporate Secretary (2022 - Sekarang)
- Corporate Secretary Division Head (2022 - Present)
- Kepala Departemen Non-Rail Expansion (2022 - 2022)
- Department of Non-Rail Expansion Head (2022 - 2022)
- Kepala Departemen Corporate Communication (2018-2022)
- Corporate Communication Department Head (2018-2022)

Hubungan Afiliasi

Affiliate Relations

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pengusaha dan Pemegang Saham Pengendali.

Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Directors, and Controlling Shareholders.

CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary is a liaison bridging the interests of the Corporation and external parties, especially in maintaining public perception of the Corporation's image. As one of the supporting organs, the Corporate Secretary plays an important role in facilitating communication between the Corporation's organs, relations between the Corporation and Shareholders, regulators and other Stakeholders as well as ensuring the Corporation's compliance with laws and regulations. The Corporate Secretary is also tasked with assisting the Board of Directors in formulating and organizing policies and guidelines; planning, evaluating, and implementing external relations activities; marketing; social responsibility; protocol; administration; and the Corporation's internal communications in accordance with the established policies, guidelines and plans.

Parties Appointing and Dismissing Corporate Secretary

The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the President Director in accordance with internal Corporate mechanism. The Corporate Secretary reports directly to the President Director.

Profile of the Corporate Secretary Division Head

In 2022, the position of Corporate Secretary is held by Ahmad Pratomo as Head of Corporate Secretary Division, based on Board of Directors Decision Letter No. 062 of 2022. The appointment has been approved by the Board of Commissioners.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan ditetapkan sesuai Keputusan Direksi SK/053/BOD-MRT/XII/2021. Divisi Sekretaris Perusahaan membawahi tiga departemen, yakni Departemen Corporate Communication, Departemen Governance & Corporate Affairs, dan Departemen Government & External Relations. Hingga akhir tahun 2022, jumlah karyawan yang tergabung dalam unit Sekretaris Perusahaan sebanyak 21 orang.

Organizational Structure of the Corporate Secretary

The organizational structure of the Corporate Secretary is established in accordance with the Directors' Decree SK/053/BOD-MRT/XII/2022. The Corporate Secretary Division has three departments: Corporate Communication Department, Governance & Corporate Affairs Department, and Government & External Relations Department. As of the end of 2022, the total employees under the Corporate Secretary Division is 21 employees.



Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Fungsi Pokok:

- Sebagai pejabat penghubung antara Perseroan dengan organ Perseroan dan pemangku kepentingan;
- Menangani kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan pengelolaan masalah kehumasan.

Tugas Pokok:

1. Memberikan laporan secara periodik kepada Direktur Utama;
2. Menyusun pusat data dan penyimpanan dokumen asli Perseroan;
3. Membangun jaringan kerja sama yang saling menguntungkan;
4. Mengomunikasikan kebijakan Perseroan kepada pihak internal dan eksternal;
5. Menyiapkan laporan Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Mengoordinasikan penyusunan laporan manajemen dan proyek untuk keperluan selain RUPS;
7. Mengoordinasikan bahan-bahan laporan untuk rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, RUPS, dan rapat dengan pemangku kepentingan lainnya;
8. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan Perseroan;
9. Menyiapkan laporan kegiatan Sekretaris Perusahaan secara benar dan tepat waktu.

Roles, Duties, and Responsibilities of the Corporate Secretary

Main Roles:

- Acting as a liaison officer between the Corporation with the Corporation Organs and Stakeholders;
- Handling matters concerning the secretariat and management of public relation.

Main Duties:

1. Providing periodic reports to the President Director;
2. Organizing database and storage of original Corporation documents;
3. Building network of mutually beneficial cooperations;
4. Communicating Corporation policies to internal and external parties;
5. Preparing Corporation reports in accordance with the applicable regulations;
6. Coordinating the preparation of management and project reports for purposes other than GMS;
7. Coordinating report materials of the Board of Directors' Meeting, Board of Commissioners' Meeting, GMS, and other Stakeholders' meetings;
8. Carrying out Corporate secretarial activities;
9. Preparing reports on the activities of Corporate Secretary in a proper and timely manner.



Tanggung Jawab:

1. Mempersiapkan penyelenggaraan RUPS;
2. Menghadiri rapat Direksi dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi;
3. Mengelola dan menyimpan dokumen yang terkait dengan kegiatan Perseroan meliputi dokumen RUPS, risalah rapat Direksi, risalah rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris, dan dokumen-dokumen Perseroan yang penting lainnya;
4. Mencatat daftar khusus berkaitan dengan Direksi dan keluarganya serta Komisaris dan keluarganya, baik dalam Perseroan maupun afliasinya yang mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan Perseroan;
5. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama secara berkala;
6. Menghimpun semua informasi yang penting mengenai Perseroan dari setiap unit kerja;
7. Menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat disampaikan kepada pemangku kepentingan, termasuk informasi yang dapat disampaikan sebagai dokumen publik;
8. Memelihara dan memutakhirkan informasi tentang Perseroan yang disampaikan kepada pemangku kepentingan, baik dalam situs web atau media informasi lainnya;
9. Menyelenggarakan *database* dan penyimpanan dokumen asli Perseroan;
10. Membangun jaringan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak, termasuk pemangku kepentingan;
11. Mengomunikasikan kebijakan Perseroan kepada pihak internal dan eksternal;
12. Menyiapkan laporan Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku;
13. Mengoordinasikan penyusunan laporan manajemen dan proyek untuk keperluan selain RUPS;
14. Mengoordinasikan bahan-bahan laporan untuk rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, RUPS, dan rapat dengan pemangku kepentingan lainnya;
15. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan Perseroan;
16. Merumuskan dan menyusun kebijakan dan pedoman hubungan masyarakat, pemasaran, tanggung jawab sosial perusahaan, protokoler, legal, administrasi dan komunikasi internal Perseroan;
17. Menyetujui dan melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait;
18. Menyusun Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Pedoman Perilaku, dan pedoman-pedoman lain yang berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan;
19. Melakukan sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik ke seluruh karyawan; dan
20. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Responsibilities:

1. Preparing the execution of GMS;
2. Attending the Board of Directors' meeting and joint meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors;
3. Managing and storing documents related to Corporation activities, including GMS documents, minutes of the Board of Directors' meeting, minutes of the joint meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners, and other important Corporation documents;
4. Recording a special list concerning the Directors and their families and the Commissioners and their families both in the Corporation and its affiliates that covers share ownership, business relationships, and other roles that cause conflicts of interests with the Corporation;
5. Reporting the implementation of their duties and responsibilities to the President Director periodically;
6. Gathering all important information about the Corporation from each work unit;
7. Determining the criteria regarding the types and contents of information that can be submitted to stakeholders, including information that can be submitted as public documents;
8. Maintaining and updating information about the Corporation to be communicated to the Stakeholders, both on the website or other media;
9. Maintaining a database and storage of original Corporation documents;
10. Building network of mutually beneficial cooperation with various parties, including Stakeholders;
11. Communicating Corporation policies to internal and external parties;
12. Preparing Corporation reports in accordance with the applicable regulations;
13. Coordinating the preparation of management and project reports for purposes other than GMS;
14. Coordinating report materials for the Board of Directors' Meetings, Board of Commissioners' Meetings, GMS, and other Stakeholders' Meetings;
15. Carrying out Corporate secretarial activities;
16. Formulating and compiling policies and Guidelines on public relations, marketing, Corporate Social Responsibilities (CSR), protocols, legal matters, administration, and Corporate internal communication;
17. Approving and implementing CSR programs in coordination with relevant parties;
18. Compiling Corporate Governance Guidelines, Board Manual, Code of Conduct, and other Guidelines relating to the implementation of Good Corporate Governance;
19. Carrying out the dissemination of Good Corporate Governance principles to all employees; and
20. Monitoring the follow-up actions of the assessment results of the implementation of Good Corporate Governance.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan 2022

Sepanjang tahun 2022, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan beberapa tugas dan kegiatan sebagai berikut:

1. Mengoordinir penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, dan *monitoring* pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa di Anak Perusahaan dan perusahaan patungan;
2. Mengoordinir, menyiapkan materi, menghadiri dan menyusun risalah Rapat Direksi sebanyak 73 kali dan Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 13 kali;
3. Melakukan pengelolaan dan penyimpanan dokumen Perseroan yang terkait dengan Direksi;
4. Mengoordinir penyusunan dan pelaporan laporan perkembangan pekerjaan MRT Jakarta kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan beberapa pemangku kepentingan;
5. Membuat kebijakan tata kelola perusahaan untuk menunjang implementasi dan *monitoring* GCG selama tahun 2022. Telah dibuat dan disahkan 5 Peraturan Direksi, 1 Keputusan Direksi dan dokumen lainnya termasuk Daftar Khusus Saham Direksi, pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan dan Pakta Integritas Direksi dan Dewan Komisaris;
6. Mengadakan sosialisasi pengisian dan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh KPK dan internalisasi pedoman terkait implementasi GCG;
7. Melakukan asistensi/pendampingan pengisian dan pelaporan LHKPN kepada wajib LHKPN, termasuk *monitoring* pelaksanaan LHKPN di Anak Perusahaan dan perusahaan patungan;
8. Melaksanakan program pengenalan bagi Direksi baru dan anggota Dewan Komisaris baru;
9. Melakukan pemantauan terhadap pengelolaan sistem pelaporan dugaan pelanggaran periode Januari hingga Desember 2022;
10. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pedoman etika dan perilaku di Perseroan;
11. Mengoordinasikan pemantauan tindak lanjut dari hasil penilaian Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG *Assessment*);
12. Membuat piagam hubungan korporasi dengan anak perusahaan PT Integrasi Transportasi Jakarta yang telah disepakati dan disahkan oleh kedua belah pihak;
13. Melakukan *monitoring* penyusunan kebijakan dan pedoman terkait GCG pada Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan;
14. Melakukan *Stakeholder Engagement Index* yang bertujuan untuk memperkaya data pengalaman pemangku kepentingan selama bekerja sama dengan Perseroan;
15. Mengoordinasi pelaksanaan kunjungan para pemangku kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara selama Januari hingga Desember 2022;
16. Melakukan kegiatan seremonial dengan para pemangku kepentingan dan pendampingan kehadiran Pejabat dalam kegiatan MRT Jakarta;

Implementation of Duties of Corporate Secretary in 2022

Throughout 2022, the Corporate Secretary has carried out several tasks and activities as follows:

1. Coordinated the implementation of the Annual GMS and Extraordinary GMS, and monitored the implementation of the Annual GMS and Extraordinary GMS in Subsidiaries and joint ventures;
2. Coordinated, prepared materials, attended and compiled minutes of 73 Board of Directors meetings and 13 joint meetings of the Board of Commissioners and Directors;
3. Managed and stored corporate documents related to the Board of Directors;
4. Coordinated the preparation and reporting of MRT Jakarta work development reports to the Regional Secretary of DKI Jakarta Province and several stakeholders;
5. Devised corporate governance policies to support GCG implementation and monitoring in 2022. There were 5 Board of Directors Decree, 1 Board of Directors Decision Letter and other documents including the Special Register of Board of Directors' Shares, Statement of Not Having Conflicts of Interest and Integrity Pact of Board of Directors and Board of Commissioners that were compiled and ratified;
6. Conducted dissemination of filling out and reporting of the State Officials' Wealth Reports (LHKPN) by the KPK and internalization of guidelines related to GCG implementation;
7. Provided assistance in filling out and reporting of LHKPN to LHKPN obligatory, including monitoring the implementation of LHKPN in Subsidiaries and joint venture companies;
8. Carried out an induction program for new Directors and new members of the Board of Commissioners;
9. Monitored the management of the alleged violation reporting system for the period January to December 2022;
10. Monitored the implementation of the Code of Conduct and Behavior in the Corporation;
11. Coordinated the monitoring of follow up of the GCG Assessment results;
12. Devised a charter of corporate relations with the subsidiary PT Integrasi Transportasi Jakarta which has been agreed upon and ratified by both parties;
13. Monitored the preparation of policies and guidelines related to GCG in Subsidiaries and Joint Venture Companies;
14. Conducted Stakeholder Engagement Index which aims to enrich stakeholder experience data while working with the Corporation;
15. Coordinated the implementation of visits by stakeholders from the Central Government, Regional Governments and State Agencies from January to December 2022;
16. Carried out ceremonial activities with stakeholders and provide assistance in the presence of Officials in MRT Jakarta activities;



17. Mengoordinasi acara seremonial dalam penandatanganan perjanjian atau nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah dan mitra strategis lainnya. Penandatanganan perjanjian tersebut di antaranya:
 - a. Nota Kesepahaman Penjajakan Kerja Sama Dalam Rangka Pembangunan Fase 3 MRT Trase Timur-Barat (Cikarang-Balaraja) dan Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit di Kawasan Jababeka;
 - b. Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan PT MRT Jakarta (Perseroda) tentang Kampanye Pendidikan Anti Korupsi;
 - c. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terkait Penjajakan Kerja Sama Penyelenggaraan Promosi Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
 18. Melaksanakan penyusunan rencana, implementasi, serta *monitoring* dan evaluasi Strategi Komunikasi perusahaan kepada pemangku kepentingan;
 19. Menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat disampaikan kepada pemangku kepentingan, termasuk informasi yang dapat disampaikan sebagai dokumen publik;
 20. Melakukan program komunikasi melalui media sosial, *website*, dan aset digital untuk menjaga identitas dan reputasi Perusahaan;
 21. Melaksanakan fungsi penyampaian komunikasi dari *top management* kepada internal/seluruh karyawan di perusahaan melalui kegiatan Townhall yang dilakukan rutin setiap bulan, *corporate news*, dan *director letter*;
 22. Melakukan pengelolaan hubungan dengan media dengan mengadakan forum pertemuan rutin setiap bulannya, *monitoring* pemberitaan, menyelenggarakan *fellowship* program, serta melakukan kerja sama dengan pihak media;
 23. Melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada pengembangan masyarakat dan lingkungan sesuai dengan RJPP serta pelaksanaan program pelibatan komunitas;
 24. Membangun jaringan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak, termasuk pemangku kepentingan;
 25. Melakukan pengukuran *Brand Awareness Index* Perusahaan di tahun 2022 untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat terhadap merek;
 26. Melakukan pengukuran *Social Media Engagement Index* tahun 2022 untuk mengukur efektivitas program komunikasi Perusahaan di media sosial.
17. Coordinated ceremonial events in the signing of agreements or memorandum of understanding (MoU) with the government and other strategic partners. The signatories to the agreements include:
 - a. Memorandum of Understanding on Exploring Cooperation in the Context of the Development of Phase 3 of the MRT East-West Trace (Cikarang-Balaraja) and the Development of Transit Oriented Areas in the Jababeka Area;
 - b. Cooperation Agreement between the Corruption Eradication Commission (KPK) and PT MRT Jakarta (Perseroda) regarding the Anti-Corruption Education Campaign;
 - c. Signing of a Cooperation Agreement between PT MRT Jakarta (Perseroda) and the Regional Tourism Promotion Board of South Sulawesi Province regarding the Exploration of Cooperation in the Implementation of Tourism Promotion of South Sulawesi Province.
 18. Carried out the preparation of plans, implementation, as well as monitoring and evaluation of the Corporation's Communication Strategy to stakeholders;
 19. Determined criteria regarding the type and material of information that can be submitted to stakeholders, including information that can be submitted as a public document;
 20. Conducted communication programs through social media, websites and digital assets to maintain the Corporation's identity and reputation;
 21. Carried out the function of conveying communication from top management to internal/all employees in the Corporation through Townhall activities which were carried out routinely every month, corporate news, and director letters;
 22. Managed relations with the media by holding regular forum meetings every month, monitoring news, organizing fellowship programs, and cooperating with the media;
 23. Carried out corporate social responsibility programs focusing on community and environmental development in accordance with the RJPP and implementation of community engagement programs;
 24. Built mutually beneficial cooperation networks with various parties, including stakeholders;
 25. Conducted a measurement of the Corporation's Brand Awareness Index in 2022 to measure the level of public knowledge of brands;
 26. Conducted measurement of the Social Media Engagement Index for 2022 to measure the effectiveness of the Corporation's communication programs on social media.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Tahun 2022, Sekretaris Perusahaan Perseroan telah mengikuti program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

CORPORATE SECRETARY COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

In 2022, Corporate Secretary of the Corporation participated in the competency development program as follows:

Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Competency Development Program

No	Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/Workshop/Konferensi/ Seminar Name of Training/Workshop/Conference/ Seminar	Lembaga Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Time and place
1	Rendi Alhial*)	Corporate Secretary Division Head	<i>Business Continuity Management (BCM) Table-Top Simulation</i> PT MRT Jakarta (Perseroda)	PT Delloite Konsultan Indonesia	07 Desember 2022, <i>Onsite</i> - Wisma Nusantara, PT MRT Jakarta (Perseroda) December 7, 2022, <i>Onsite</i> - Wisma Nusantara, PT MRT Jakarta (Perseroda)
2			Pelatihan Management Development Program (MDP): <i>Powerful Conversation</i> Management Development Program (MDP) Training: <i>Powerful Conversation</i>	Asian Leadership Center	13 - 14 Oktober 2022, Ashley Hotel (Ruang <i>Downing</i> 6, Lobby Floor) October 13 - 14, 2022, Ashley Hotel (<i>Downing</i> Room 6, Lobby Floor)
3			Pelatihan General Technical Mandatory: <i>Legal Awareness</i> General Technical Mandatory Training: <i>Legal Awareness</i>	PT MRT Jakarta (Perseroda)	5 Juni 2022, <i>Online</i> - via <i>Learning Management System (LMS) SuccessFactors</i> PT MRT Jakarta (Perseroda) June 5, 2022, <i>Online</i> - via <i>Learning Management System (LMS) SuccessFactors</i> PT MRT Jakarta (Perseroda)
4			Pelatihan General Technical Mandatory: <i>Finance for Non-Finance</i> General Technical Mandatory Training: <i>Finance for Non-Finance</i>	PT MRT Jakarta (Perseroda)	1 April 2022, <i>Online</i> - via <i>Learning Management System (LMS) SuccessFactors</i> PT MRT Jakarta (Perseroda) April 1, 2022, <i>Online</i> - via <i>Learning Management System (LMS) SuccessFactors</i> PT MRT Jakarta (Perseroda)
5	Ahmad Pratomo**)	Corporate Secretary Division Head	Pelatihan Leadership Development Program (LDP): <i>Leading Through Change and Disruption</i> Leadership Development Program (LDP) Training: <i>Leading Through Change and Disruption</i>	Asian Leadership Center	5 - 13 September 2022, Kensington Ballroom 2nd Floor, Hotel Ashley Wahid Hasyim September 5 - 13 2022, Kensington Ballroom 2nd Floor, Hotel Ashley Wahid Hasyim
6			Pelatihan General Technical Mandatory: <i>Finance for Non-Finance</i> General Technical Mandatory Training: <i>Finance for Non-Finance</i>	PT MRT Jakarta (Perseroda)	1 Juli 2022, <i>Online</i> - via <i>Learning Management System (LMS) SuccessFactors</i> PT MRT Jakarta (Perseroda) July 1, 2022, <i>Online</i> - via <i>Learning Management System (LMS) SuccessFactors</i> PT MRT Jakarta (Perseroda)
7			Pelatihan General Technical Mandatory: <i>Legal Awareness</i> General Technical Mandatory Training: <i>Legal Awareness</i>	PT MRT Jakarta (Perseroda)	1 Juli 2022, <i>Online</i> - via <i>Learning Management System (LMS) SuccessFactors</i> PT MRT Jakarta (Perseroda) July 1, 2022, <i>Online</i> - via <i>Learning Management System (LMS) SuccessFactors</i> PT MRT Jakarta (Perseroda)

*) menjabat dari 01 November 2021 - 22 November 2022 | *) served from 01 November 2021 - 22 November 2022

**) menjabat dari 19 Desember 2022 - Sekarang | **) served from 19 December 2022 - Present

AUDIT INTERNAL

Divisi Internal Audit dibentuk untuk meningkatkan pengendalian internal untuk membantu manajemen dalam memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dasar hukum pembentukan Divisi Internal Audit:

- Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yakni Pasal 343 yang mengatur perlunya pembentukan Komite Audit dan Internal Audit pada BUMD;

INTERNAL AUDIT

The Internal Audit Division is established to support the implementation of risk-based internal supervision and control system based on the Internal Audit Standard Operating Procedures as established based on to the Internal Audit Charter. The legal bases of the establishment of Internal Audit Division are:

- Law no. 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government, namely Article 343 which regulates the need to establish an Audit Committee and Internal Audit in BUMD;



- Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 96 Tahun 2004 tanggal 7 Oktober 2004 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- Decree of DKI Jakarta Provincial Governor No. 96 Year 2004 dated October 7, 2004 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in Regionally-Owned Enterprises (ROEs) of the Government of DKI Jakarta Province.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Divisi Internal Audit

Divisi Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kepala Divisi Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

The Party Appointing and Dismissing the Head of the Internal Audit Division

The Internal Audit Division reports directly to the President Director. The Head of the Internal Audit Division is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

Profil Kepala Divisi Internal Audit

Pada tahun 2022, Kepala Divisi Internal Audit dijabat oleh Ernie Widianty Rahardjo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 31 Tahun 2022 tanggal 18 Juli 2022.

Profile of the Internal Audit Division Head

In 2022, the position of Head of the Internal Audit Division was held by Ernie Widianty Rahardjo who was appointed based Board of Directors' Decision Letter No. 31 of 2022 dated 18 July 2022.



Ernie Widianty Rahardjo

Kepala Divisi Internal Audit
Internal Audit Division Head

Usia Age	49 tahun 49 years old
Domisili Domicile	DKI Jakarta
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	SK/031/BOD-MRT/VII/2022

Pendidikan dan Sertifikasi Education and Certification

Pendidikan:

Education

- Master of Business Administration (MBA) Nanyang Business School, Nanyang Technological University, Singapore, (2009)
- Master of Business Administration (MBA) Nanyang Business School, Nanyang Technological University, Singapore, (2009)
- Magister (S2) Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, (2003)
- Master's degree from the Faculty of Public Health, University of Indonesia, (2003)
- Sarjana (S1) Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, (1998)
- Bachelor's degree from the Faculty of Medicine, Airlangga University, (1998)

Sertifikasi:

Certification:

- Certified Internal Audit Profesional (CIAP), (2022)
- Certified Internal Audit Profesional (CIAP), (2022)
- Qualified Risk Governance Profesional (QRGP), (2022)
- Qualified Risk Governance Profesional (QRGP), (2022)
- Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP), (2021 - sekarang);
- Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP), (2021 - now);
- Auditor for Safety and Health Management System (2019 - sekarang)
- Auditor for Safety and Health Management System (2019 - now)
- General Safety Health Specialist by Ministry of Manpower (2018 - sekarang)
- General Safety Health Specialist by Ministry of Manpower (2018 - now)
- Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP), (2017 - sekarang)
- Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP), (2017 - now)
- Certified for Human Resource Professional (2012).
- Certified for Human Resource Professional (2012).

Latar Belakang Karier

History of Employment

- Kepala Divisi Internal Audit, (2022-sekarang)
- Internal Audit Division Head, (2022-present)
- Kepala Divisi Risk Management & QSSHE Assurance, PT MRT Jakarta (Perseroda), (2017-2022)
- Risk Management & QSSHE Assurance Division Head, PT MRT Jakarta (Perseroda), (2017-2022)
- Kepala Divisi Risk Management, PT MRT Jakarta (Perseroda), (2014-2017)
- Risk Management Division Head, PT MRT Jakarta (Perseroda), (2014-2017)
- Kepala Divisi Human Resources, PT MRT Jakarta (Perseroda), (2013-2014)
- Human Resources Division Head, PT MRT Jakarta (Perseroda), (2013-2014)
- Kepala Departemen Human Resources, PT MRT Jakarta (Perseroda), (2010-2013).
- Human Resources Department Head, PT MRT Jakarta (Perseroda), (2010-2013).

Hubungan Afiliasi

Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pengusaha dan Pemegang Saham Pengendali.

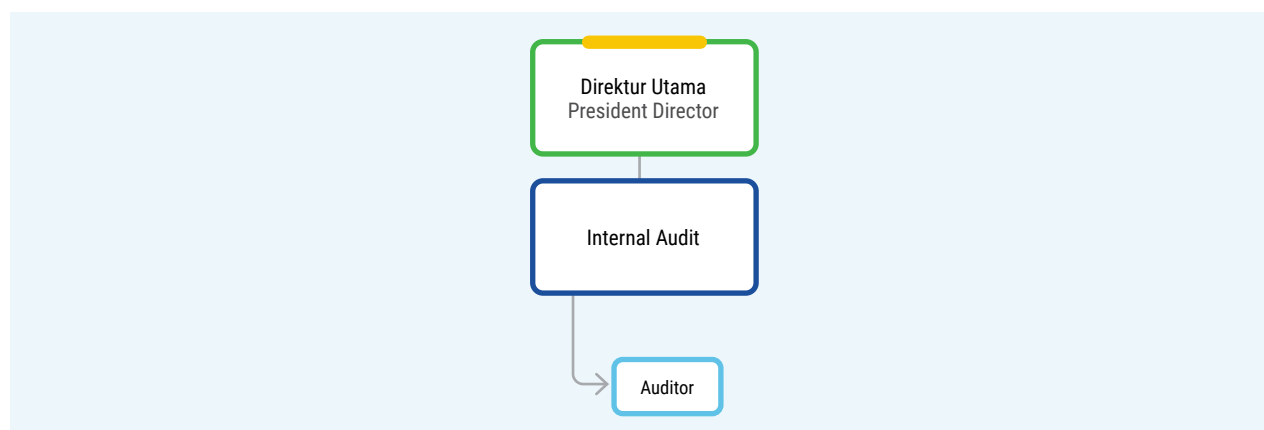
Had no affiliation with members of the Board of Directors of Commissioners, Directors, and Controlling Shareholders.

Struktur Organisasi Divisi Internal Audit

Struktur organisasi Divisi Internal Audit ditetapkan Keputusan Direksi No. 53 Pada tahun 2022, jumlah karyawan Divisi Internal Audit sebanyak 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari 6 orang auditor dan seorang Kepala Divisi Internal Audit.

Organizational Structure of Internal Audit Division

The organizational structure of the Internal Audit Division was stipulated in Board of Directors' Decision Letter No. 53 Year 2022. The number of employees of the Internal Audit Division is 7 (seven) employees, consisting of 6 auditors and a Head of the Internal Audit Division.



Kepala dan anggota unit kerja Divisi Internal Audit harus memiliki sertifikasi/kualifikasi audit internal.

The head and members of the Internal Audit Division must have internal audit certification/qualification.

Kualifikasi atau Sertifikasi sebagai Profesi Internal Audit

Auditor pada Divisi Internal Audit harus memiliki kecakapan profesional untuk bidang tugasnya. Persyaratan jabatan Auditor pada Divisi Internal Audit tertuang dalam Peraturan Direksi No. 017 Tahun 2020 tentang Pedoman *Job Description* bagi Karyawan di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda). Salah satu bentuk kecakapan profesional auditor internal adalah sertifikasi profesi, yang merupakan aspek penting untuk memahami perkembangan audit, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan serta perkembangan industri. Perseroan berkomitmen meningkatkan level sertifikasi profesi karyawan pada Divisi Internal Audit.

Professional Qualification or Certification of Internal Audit

Internal auditors of the Internal Audit Division must have sufficient professional skills in their area of work. The requirements for the Auditor of Internal Audit Division are governed by Board of Directors' Decree No. 017 Year 2020 concerning Guidelines for Job Description of the Employees of PT MRT Jakarta (Perseroda). A form of professional skills of internal auditor is professional certification, which is an important aspect to understand the development of audit, especially related to compliance with regulations and industrial developments. The Corporation is committed to increasing the level of professional certification for the employees of Internal Audit.

Sertifikasi Karyawan Divisi Internal Audit Per 31 Desember 2022
Certification of the Internal Audit Division Employees as of December 31, 2022

Jenis dan Level Sertifikasi Type and Level of Certification	Jumlah Karyawan Divisi Internal Audit yang Memiliki Sertifikasi Number of Certified Employees in the Internal Audit Division	Persentase terhadap Jumlah Karyawan Divisi Internal Audit (%) Percentage to the Number of Internal Audit Division Employees
Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor</i> Tingkat Lanjutan Qualified Internal Auditor Certification of Advanced Level	1	14,29%
Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor</i> Tingkat Manajerial Qualified Internal Auditor Certification of Managerial Level	5	71,43%
<i>Certified Internal Audit Profesional</i> (CIAP) Certified Internal Audit Profesional (CIAP)	1	14,29%
Jumlah Total	7	100



Piagam Audit Internal

Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi *Internal Audit* berpedoman pada Piagam Audit Internal yang telah ditetapkan Dewan Komisaris dan Direksi. Piagam Audit Internal disusun untuk menjadi norma-norma acuan kerja bagi Divisi Internal Audit sesuai tujuan penugasannya. Piagam Audit Internal telah diperbaharui pada 30 November 2022, dan berisi:

1. Kedudukan dan Fungsi Internal Audit;
2. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Internal Audit;
3. Wewenang Divisi Internal Audit;
4. Lingkup Kerja Divisi Internal Audit;
5. Hubungan Kerja dan Koordinasi;
6. Standar Audit Internal;
7. Program Asurans dan Peningkatan Kualitas.

Tanggung Jawab dan Wewenang Divisi Internal Audit

Tanggung Jawab

1. Mengelola kegiatan pengawasan melalui berbagai kegiatan asurans berbasis risiko dan konsultasi bagi seluruh unit kerja di perusahaan dan pihak terafiliasi agar dapat memenuhi mandatnya;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal, sistem manajemen risiko, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta kepatuhan sesuai dengan kebijakan perusahaan;
3. Menyusun perencanaan berbasis risiko untuk menetapkan prioritas kegiatan aktivitas audit internal sesuai dengan tujuan Perusahaan. Rencana Kerja dan Audit Tahunan beserta dengan anggaran biayanya, disampaikan untuk mendapatkan persetujuan Direktur Utama dan disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran.
4. Melakukan jasa asurans dan konsultasi untuk menguji efektivitas dan efisiensi di bidang keuangan, akuntansi, konstruksi, operasional dan perawatan, manajemen risiko, sumber daya manusia, pengembangan bisnis, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
5. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat, membuat Laporan Hasil Audit (LHA) dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan dan disepakati kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
7. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan/area yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Divisi Internal Audit;
9. Bekerja sama dengan Komite Audit;

Internal Audit Charter

In carrying out their duties, the Internal Audit Division refers to the Internal Audit Charter as established by the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Internal Audit Charter is compiled to become the norms of reference for the Internal Audit Division to be able to work professionally in accordance with the objectives of the assignments. The Internal Audit Charter has been amended on November 30, 2022, and covers:

1. Position and Roles of Internal Audit;
2. Duties and Responsibilities of the Internal Audit Division;
3. Authorities of the Internal Audit Division;
4. Scope of Work of the Internal Audit Division;
5. Working Relationship and Coordination;
6. Standards of Internal Audit;
7. Quality Assurance and Improvement Program.

Responsibilities and Authorities of the Internal Audit Division

Responsibilities

1. Managing supervisory activities through various risk-based assurance activities and consulting for all work units in the Corporation and affiliated parties so that they can fulfill their mandate;
2. Testing and evaluating the implementation of internal controls, risk management systems, implementation of Good Corporate Governance and compliance with policies of the Corporation;
3. Developing a risk-based plan to set priorities for internal audit activities in accordance with the goals of the Corporation. The Annual Work Plan and Audit along with the budget, are submitted for approval by the President Director and submitted to the Board of Commissioners through the Audit Committee for consideration and advice.
4. Performing assurance and consulting services to test the effectiveness and efficiency in the field of finance, accounting, construction, operations and maintenance, risk management, human capital, business development, information technology, and other activities;
5. Reporting significant findings to the President Director and the Board of Commissioners to take corrective actions in a short time, prepare an Audit Results Report (LHA) and submit the report to the President Director and the Board of Commissioners;
6. Monitoring, analyzing, and reporting on the implementation of follow-up improvements that have been recommended and agreed upon to the President Director and the Board of Commissioners;
7. Providing suggestions for improvement and objective information on the activities/areas examined at all levels of management;
8. Developing a program to evaluate the quality of the Internal Audit Division's activities;
9. Cooperating with the Audit Committee;

10. Melaksanakan audit khusus/audit dengan tujuan tertentu atas informasi dari *Whistleblowing System* (WBS) sebagai bagian dari penerapan ISO 37001:2016, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) maupun penugasan lainnya yang ditugaskan oleh Direktur Utama atau Dewan Komisaris. Melaporkan hasilnya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kebijakan Perusahaan;
11. Melakukan koordinasi pengawasan dengan penyedia asuransi eksternal (misalnya: Kantor Akuntan Publik, Investigator dan Auditor Eksternal Penilai Penerapan Sistem Manajemen) dalam rangka penerapan *combined assurance*;
12. Memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan internal sesuai dengan standar profesional Audit Internal dan kode etik Audit Internal;
13. Bekerja sama dengan fungsi lain dalam perusahaan, Divisi Internal Audit membangun budaya *risk and control awareness* untuk seluruh karyawan dalam perusahaan;
14. Melakukan penugasan lain yang diamanatkan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris selama tidak berdampak pada pelembutan terhadap Independensi dan Objektivitas Auditor Internal.

Wewenang

1. Menjalankan penugasan pada semua area, kegiatan operasional, bisnis perusahaan, termasuk anak perusahaan, pihak terafiliasi, mitra-mitra strategis, penyedia barang dan jasa, serta pihak lainnya yang relevan, sesuai dengan tata kelola yang berlaku;
2. Memiliki akses tidak terbatas atas semua data, informasi, dokumen, kegiatan, serta akses terhadap personel dan aset perusahaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas;
3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Direktur, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;
4. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Direktur, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;
5. Melakukan pemilihan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan penugasan Audit Internal dan memastikan Auditor Internal mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan Perusahaan;
6. Mendapatkan dukungan penuh dari Perusahaan berupa perangkat kerja berbasis Teknologi Informasi, *software* - aplikasi, akses informasi kepada data primer *Enterprise Resource Planning* (ERP) yang digunakan oleh Perusahaan maupun fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan;
7. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, dapat meminta atau mendapatkan bantuan dari pihak internal perusahaan sebagai *subject matter expert* maupun eksternal perusahaan, dengan mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki Auditor, tingkat urgensi, dan kerahasiaan data serta mematuhi piagam Audit Internal perusahaan;
8. Menyusun strategi pelaksanaan Audit Internal Anak Perusahaan dan merekomendasikan penyelarasan strategi Audit Internal terhadap Usaha Patungan;
9. Mengelola kegiatan koordinasi dan pengawasan atas anak perusahaan dan pihak-pihak terafiliasi.

10. Carrying out special audits/audits with specific objectives on information from the Whistleblowing System (WBS) as part of the implementation of ISO 37001:2016, the Anti-Bribery Management System (SMAP) or other assignments assigned by the President Director or the Board of Commissioners. Report the results in accordance with the provisions stipulated by the Policy of the Corporation;
11. Coordinating supervision with external assurance providers (such as Public Accounting Firm, Investigator and External Auditor of Management System Implementation Appraiser) in the context of implementing combined assurance;
12. Ensuring the implementation of the internal oversight function is in accordance with Internal Audit professional standards and the Internal Audit code of ethics;
13. In collaboration with other functions within the Corporation, the Internal Audit Division builds a culture of risk and control awareness for all employees within the Corporation;
14. Carrying out other assignments mandated by the Board of Directors and/or Board of Commissioners as long as they do not have an impact on weakening the Internal Auditor's Independence and Objectivity.

Authorities

1. Carrying out the duties in all areas of corporate operational and business activities, including its subsidiaries, affiliations, strategic partners, goods and services providers, and other relevant parties, in line with the prevailing governance;
2. Having unlimited access to all data, documents, activities, and access to personnels and corporate assets required to carry out their duties;
3. Communicating directly with the Board of Directors, Directors, Board of Commissioners and the Audit Committee;
4. Holding regular and incidental meetings with the Board of Directors, Directors, Board of Commissioners and the Audit Committee;
5. Carrying out selection of competent human capital according to the needs in carrying out Internal Audit assignments and ensure that Internal Auditors follow continuous professional development and other training in accordance with developments in the complexity and activities of the Corporation;
6. Getting full support from the Corporation in the form of Information Technology-based work tools, software - applications, access to information on Enterprise Resource Planning (ERP) primary data used by the Corporation and other supporting facilities required for the implementation of assignments;
7. In the context of carrying out their duties, they may request or obtain assistance from internal parties in the Corporation as subject matter experts or external parties of the Corporation, taking into account the competence of the Auditor, the level of urgency and data confidentiality and complying with the Internal Audit charter of the Corporation;
8. Developing strategies for implementing Subsidiaries' Internal Audits and recommend alignment of Internal Audit strategies with Joint Ventures;
9. Managing the activities of coordination and supervision of subsidiaries and affiliated parties.



Divisi Internal Audit tidak berwenang untuk menjabat/rangkap jabatan/mengambil alih tanggung jawab sebagai pelaksana, dalam kegiatan operasional perusahaan maupun anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Divisi Internal Audit

Kegiatan Divisi Internal Audit sepanjang tahun 2022, sebagai berikut:

1. Kegiatan Asurans: dari target 15 laporan hasil audit, telah tercapai 16 LHA dan akan tercapai 19 atau capaian sebesar 126,7% per Februari 2023 sesuai dengan waktu pada Surat Tugas yang telah diterbitkan;
2. Kegiatan konsultansi: dari target 60 kegiatan, tercapai sebanyak 76 atau capaian sebesar 126,7%;
3. Penyelesaian atas komitmen tindak lanjut atas temuan hasil audit per 31 Desember 2022 tercapai 100%; dan
4. Pengembangan dan pelatihan, telah dilaksanakan kegiatan:
 - a. *Technical skill* : 7 (tujuh) orang dengan jumlah kegiatan sebanyak 15; dan
 - b. *Softskill* : 7 (tujuh) orang dengan jumlah kegiatan sebanyak 3.

Program Pengembangan Kompetensi Internal Audit

MRT Jakarta mengikutsertakan personil Internal Audit dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perseroan.

The Internal Audit Division is not authorized to hold positions/ concurrent positions/take over responsibility as executor, in the operational activities of the Corporation or its subsidiaries and/or joint ventures.

Report on the Implementation of the Internal Audit Division's Duties

In brief, the implementation of Internal Audit Division's activities throughout 2022 was as follows:

1. Assurance Activities: from the target of 15 audit reports, 16 LHAs have been achieved and 19 will be achieved or an achievement of 126.7% as of February 2023 according to the time in the Assignment Letter that has been issued;
2. Consultancy activities: from the target of 60 activities, 76 have been achieved or an 126.7% achievement;
3. Completion of follow-up commitments on audit findings as of December 31, 2022 reached 100% of the follow-up targeted for completion in 2022; and
4. Development and training, the following activities have been carried out:
 - a. Technical skills: 7 (seven) people with a total of 15 (fifteen) activities; and
 - b. Softskill: 7 (seven) people with a total of 3 (three) activities.

Internal Audit Competency Development Program

MRT Jakarta includes Internal Audit personnel in competency development activities carried out through various training and education with full funding being the responsibility of the Corporation.

Program Pengembangan Kompetensi Internal Audit Internal Audit Competency Development Program

Kegiatan Sertifikasi dan Pelatihan yang Diikuti Karyawan Divisi Internal Audit Certification and Training Activities Followed by Internal Audit Division Employees	Jumlah Peserta (orang) Total Participants
<i>Certified Internal Audit Profesional (CIAP)</i>	1
Kegiatan Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor</i> Tingkat Qualified Internal Auditor Level Certification Activities	1
Kegiatan Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor</i> Tingkat Manajerial Certification of Qualified Internal Auditors at Managerial Level	1
Pelatihan Pengadaan Barang Jasa Goods and Services Procurement Training	6
Pelatihan Persiapan Ujian Sertifikasi CFA Level 1 Course CFA Certification Exam Level 1 Course Preparation Training	1
Seminar Nasional <i>Internal Audit Anticipating The Future The New Role of Internal Audit Foresight - Elevated- Transform</i> National Seminar on Internal Audit Anticipating The Future The New Role of Internal Audit Foresight - Elevated- Transform	1
<i>Training Certified Internal Auditor (CIA) Part 2 dan Part 3</i> Training for Certified Internal Auditor (CIA) Part 2 and Part 3	1
<i>Training dan Sertifikasi CISA Exam Preparation</i> CISA Exam Preparation Training and Certification	1
Sertifikasi CFE Exam CFE Exam Certification	2
<i>Training Fraud Auditing - 1</i>	1
<i>Training Fraud Auditing - 2</i>	1
<i>Training Penilaian Kapabilitas SPI Korporasi</i> Corporate SPI Capability Assessment Training	2

Audit Eksternal

External Audit

Audit Eksternal/Kantor Akuntan Publik merupakan organ eksternal yang membantu Perseroan dalam melakukan pemeriksaan atau mengaudit Laporan Keuangan agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Perseroan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan Kantor Akuntan Publik ini diharapkan dapat mendorong Perseroan untuk memberikan informasi dan data yang akuntabel, independen, dan wajar kepada Pemegang Saham, regulator, serta pemangku kepentingan lainnya.

PROSEDUR AUDIT EKSTERNAL DAN STANDAR AUDIT

Audit atas laporan keuangan Perseroan dilakukan sesuai standar profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan. Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Audit mengandung risiko inheren jika terdapat kekeliruan dan ketidakberesan yang material, maka KAP akan menyampaikan kepada manajemen. Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI.

Penunjukan calon Auditor Eksternal/KAP dilakukan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, dengan meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa. Dewan Komisaris menyampaikan alasan pencalonan tersebut kepada RUPS dan besarnya honorarium/imbalance jasa yang diusulkan untuk Auditor Eksternal tersebut. Untuk proses penunjukan calon Auditor Eksternal dan/atau penunjukan kembali Auditor Eksternal yang dilakukan oleh RUPS, Dewan Komisaris cukup memberikan kuasa kepada RUPS untuk menetapkan auditor tersebut.

External Auditor/Public Accountant Firm is an external organ assisting the Corporation in auditing the Financial Statements in order to be in conformity with the Financial Accounting Standards prevailing in Indonesia. The appointment of Public Accountant Firm ("KAP") is expected to encourage the Corporation to provide accountable, independent, and reasonable data and information to the Shareholders, regulators, and other stakeholders.

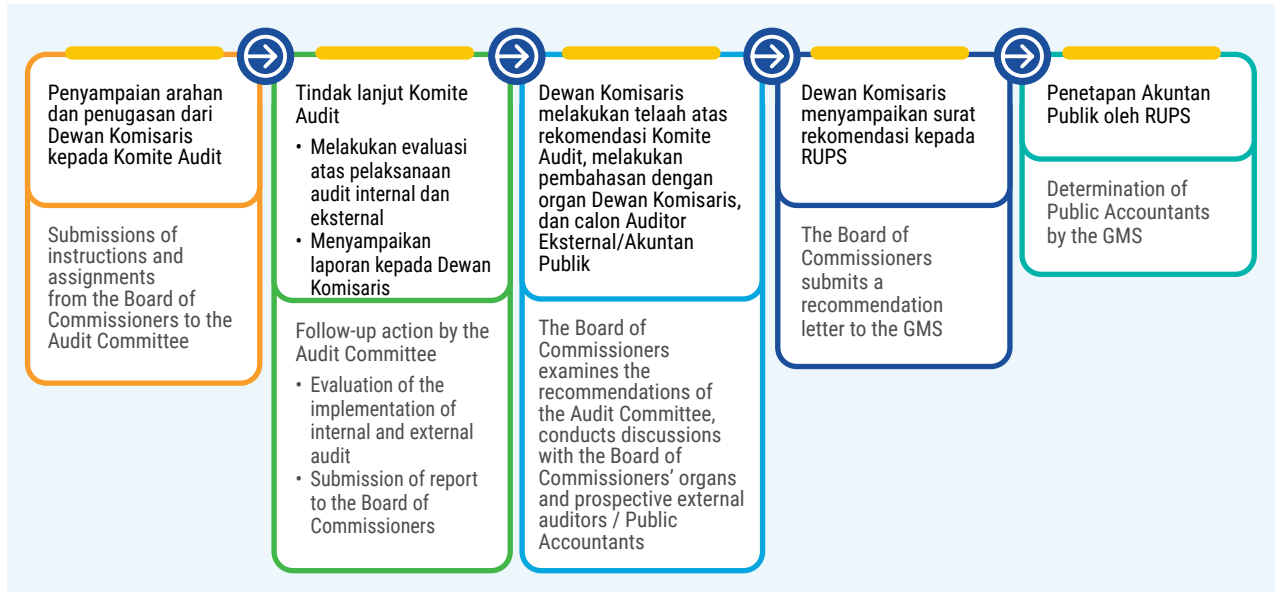
EXTERNAL AUDIT PROCEDURES AND AUDIT STANDARDS

Audits of the Corporation's financial statements are carried out in accordance with the Public Accountant professional standards that cover all audit procedures deemed necessary by the situations. The audits include testing and evaluation of the internal control system, as well as inspections, on the basis of testing, evidence that support the amounts and disclosures within the financial statements. The audit will also cover assessments of accounting principles used and significant estimations created by the management, as well as assessment of the overall financial statement presentation as regulated by the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) established by the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI).

The audit carries an inherent risk that if there are material errors and irregularities, the KAP will notify the management. The Audit is conducted based on the Professional Standards of Public Accountant issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI). If there is financial assistance from the Government of the Republic of Indonesia, then the audit is carried out based on the State Financial Examination Standards (SPKN) issued by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI).

The appointment of potential External Auditor/KAP is carried out by the Board of Commissioners through the Audit Committee by requesting the assistance of the Board of Directors in the appointment process in accordance with the provisions of the procurement of goods/services. The Board of Commissioners submits the reasons for the nomination to the GMS and the amount of the proposed fee/honorarium for the External Auditor. As for the process of appointing a prospective external auditor and/or re-appointing an external auditor carried out by the GMS, the Board of Commissioners only have to delegate the authorities to the GMS to determine the auditor.

Mekanisme Penunjukan hingga Penetapan Akuntan Publik Mechanism of Appointment until Determination of Public Accountant



KANTOR AKUNTAN PUBLIK TAHUN BUKU 2022

Pengungkapan tentang KAP untuk tahun buku 2022 dan periode sebelumnya, disampaikan pada bagian Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

PUBLIC ACCOUNTANT FIRM FOR FISCAL YEAR 2022

Disclosures about KAP for fiscal year 2022 and the previous period, are presented in the Corporate Profile section of this Annual Report.



Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, dipengaruhi dan/atau dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pekerja, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) dalam pencapaian tujuan organisasi, yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, pengamatan aset, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan kebijakan yang berlaku.

PEDOMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pedoman SPI ditetapkan melalui Peraturan Direksi No. PER/032-1/BOD-MRT/VIII/2020 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan PT MRT Jakarta (Persero) yang disusun dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
3. Surat Keputusan Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta No. 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Tujuan pembuatan dan penerapan Pedoman:

- Menunjukkan komitmen Perseroan dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik kepada seluruh pemangku kepentingan;
- Pemahaman bagi internal Perseroan tentang kerangka dan manajemen Sistem Pengendalian Internal Perseroan.

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DI LINGKUP PERSEROAN

SPI Perseroan dirancang dengan acuan *Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission (COSO) Framework*, melalui penerapan 5 (lima) unsur yang diperhatikan Perseroan dalam pengembangan pengendalian internal. Untuk memastikan bahwa aktivitas pengendalian pada setiap proses utama telah dilakukan secara baik, Auditor Internal telah melakukan pemetaan tentang proses-proses utama atas penyusunan SOP. Hasil pemetaan tersebut telah disampaikan kepada Direktur Utama dan selanjutnya diserahkan kepada unit kerja terkait untuk dilakukan perbaikan SOP. Selain itu, Direksi telah mengesahkan Peraturan Direksi tentang Panduan Penyusunan Pedoman, SOP, dan Instruksi Kerja, sebagai panduan dalam menyusun SOP pada proses-proses yang ada di unit kerjanya.

The Internal Control System (SPI) is an integral process on actions and activities carried out continuously, influenced and/or carried out by the Board of Commissioners, the Board of Directors and all employees, which is designed to provide reasonable assurance on the achievement of organizational goals, namely operational effectiveness and efficiency, reliability of financial reports, asset monitoring, and compliance with applicable laws and policies.

GUIDELINES OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

SPI guidelines are stipulated through Board of Directors Decree No. PER/032-1/BOD-MRT/VIII/2020 concerning Internal Control System Guideline in PT MRT Jakarta (Persero) which is prepared with reference to:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government; and
3. Decree of the Governor of DKI Jakarta Provincial Government No. 96 of 2004 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in Regionally Owned Enterprises (ROEs) of the Regional Government of the Special Capital City of Jakarta.

The Guideline is prepared and implemented for the following purposes:

- To show the Corporation's commitment to realizing good corporate governance to all stakeholders;
- As an understanding for the Corporation's internal regarding the framework and management of the Corporation's Internal Control System.

IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM WITHIN THE CORPORATION

The Internal Control System is designed in reference to the Committee of Sponsoring Organisation of Treadway Commission (COSO) Framework by implementing 5 (five) elements to consider in internal control development. To ensure that the control activities of each main element has been carried out well, the Internal auditor has mapped the main processes of SOP development. The mapping results are presented to the President Director to be distributed to the relevant work unit for SOP improvement. In addition, the Board of Directors have enacted the Board of Directors' Decree concerning the Guidelines to Develop Guidelines, SOP, and Work Instruction, to be a guideline in developing SOP of the processes within the work unit.



Sistem Pengendalian Internal MRT Jakarta Sesuai Kerangka COSO

Internal Control System of MRT Jakarta based on COSO Framework

Komponen Component	Prinsip Principle	Penerapan di MRT Implementation in MRT
Lingkungan Pengendalian Control Environment	- Organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. - Dewan pengawas menunjukkan independensinya dari manajemen dan melaksanakan pengawasan atas pengembangan dan kinerja pengendalian intern. - Manajemen dengan pengawasan dari dewan pengawas menetapkan struktur organisasi, garis pelaporan, serta wewenang dan tanggung jawab yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan. - Organisasi menunjukkan komitmen dalam merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan individu-individu yang kompeten sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. - Organisasi memegang akuntabilitas individu-individu atas pelaksanaan pengendalian intern dalam rangka pencapaian tujuan. - The organization demonstrates a commitment to integrity and ethical values. - The Supervisory Board demonstrates its independence from management and exercises supervision of the development and performance of internal controls. - Management under supervision of the Supervisory Board determines the appropriate organizational structure, reporting lines, and authorities and responsibilities in order to achieve the objectives. - The organization shows commitment to recruiting, developing, and retaining competent individuals in accordance with the stated objectives. - The organization holds individual accountability for the implementation of internal control in order to achieve goals.	Perseroan telah mengembangkan dan menciptakan lingkungan pengendalian yang baik melalui pembangunan budaya Perseroan, seperti adanya kesepakatan seluruh karyawan Perseroan akan nilai-nilai Perseroan dan aturan perilaku, serta adanya penyusunan struktur organisasi yang mencerminkan pendelegasian kewenangan dan pembagian tugas yang jelas sesuai dengan strategi Perseroan, kebijakan SDM yang berbasis kepada kompetensi, dan pengembangan tata kelola perusahaan yang baik secara terus menerus. The Corporation has developed and created a good control environment through the development of Corporation culture, such as the agreement by all Corporation employees on Corporation values and an arrangement of organizational structure that reflects clear authority and task delegations that align with the Corporation Strategy, human capital policies based on competency, and continuous good corporate governance development.
Penilaian Risiko Risk Assessment	- Organisasi menetapkan tujuan-tujuan yang jelas agar dapat dilakukan identifikasi dan penilaian risiko terkait tujuan tersebut. - Organisasi mengidentifikasi risiko atas pencapaian tujuan secara menyeluruh dan menganalisis risiko sebagai landasan pengelolaan risiko. - Organisasi mempertimbangkan potensi kecurangan (<i>fraud</i>) dalam melakukan penilaian risiko atas pencapaian tujuan. - Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan-perubahan yang dapat berdampak signifikan terhadap sistem pengendalian intern. - The organization establishes clear objectives so that risks can be identified and assessed in relation to these objectives. - The organization identifies risks to overall achievement of objectives and analyzes risks as a basis for risk management. - The organization considers the potential for fraud in conducting risk assessments for achieving objectives. - The organization identifies and evaluates changes that could have a significant impact on the internal control system.	Guna menjamin adanya sadar risiko pada setiap karyawan, Perseroan telah membangun budaya risiko di setiap unsur dan proses utama. Perseroan telah menetapkan Divisi Risk Management & QSSHE Assurance sebagai <i>leader</i> dalam pengembangan manajemen risiko, baik itu pada risiko level korporasi maupun unit kerja sehingga tersedia <i>Risk Register</i> di masing-masing unit kerja. <i>Risk Register</i> selalu dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan. In order to ensure that every employee has a risk awareness, the Company has built a risk culture in every element and main process. The Company has established the Risk Management & QSSHE Assurance Division as a leader in the development of risk management, both at the enterprise and work unit level risks so that a Risk Register is available in each work unit. The Risk Register is always evaluated every 3 (three) months.
Aktivitas Pengendalian Control Activities	- Organisasi memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian yang berkontribusi meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan sampai pada level yang dapat diterima. - Organisasi memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan. - Organisasi memberlakukan kegiatan pengendalian melalui kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan dan melalui prosedur yang menjabarkan kebijakan menjadi tindakan. - The organization selects and develops control activities that contribute to minimizing the risk of achieving objectives to an acceptable level. - The organization selects and develops general control activities on technology to support the achievement of objectives. - The organization enforces control activities through policies that define what is expected and through procedures that translate policies into action.	Untuk menjamin bahwa seluruh proses utama Perseroan telah dilakukan secara baik, memenuhi unsur efektivitas, efisiensi, dan dilengkapi dengan akuntabilitas serta pertanggungjawaban yang baik. Perseroan telah melakukan identifikasi proses-proses yang diperlukan dalam pengelolaan, baik itu pada divisi yang bersifat teknis maupun pada divisi pendukung. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap proses pengelolaan telah dilengkapi standar operasi dan prosedur yang ditetapkan oleh Direksi. Hal ini merupakan bagian dari mitigasi risiko dari masing-masing <i>Risk Register</i> unit kerja yang bersangkutan. Dalam penyusunan SOP untuk operasi, pemeliharaan dan perawatan MRT Jakarta, Perseroan dibantu oleh Konsultan Internasional. To guarantee that all the Company's main processes have been carried out properly, fulfilled the elements of effectiveness and efficiency, and are equipped with good accountability and responsibility, the Company has identified the processes needed in management, both in technical divisions and in support divisions. This is done to ensure that each management process is completed with operating standards and procedures set by the Board of Directors. This is part of the risk mitigation of each work unit's Risk Register. In preparing the SOP for the operation and maintenance of MRT Jakarta, the Company is assisted by an International Consultant.
Komunikasi dan Informasi Communication and Information	- Organisasi memperoleh, menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas untuk mendukung berfungsinya komponen pengendalian intern lainnya. - Organisasi melakukan komunikasi informasi secara intern, termasuk tujuan dan tanggung jawab pengendalian intern, yang diperlukan untuk mendukung berfungsinya pengendalian intern. - Organisasi menjalin komunikasi dengan pihak-pihak eksternal terkait hal-hal yang mempengaruhi berfungsinya komponen pengendalian intern lainnya. - The organization obtains, produces, and uses relevant and quality information to support the functioning of other internal control components. - The organization communicates information internally, including internal control objectives and responsibilities, which are necessary to support the functioning of internal control. - The organization maintains communication with external parties regarding matters that affect the functioning of other internal control components.	Sebagai Perseroan yang sedang mengerjakan proyek untuk kepentingan publik, manajemen sangat menyadari pentingnya komunikasi dan informasi, khususnya komunikasi dan informasi tentang jalannya pekerjaan proyek, progres proyek dan dampaknya terhadap pelayanan publik lainnya. Fungsi komunikasi dan informasi dikoordinasikan oleh Divisi Corporate Secretary. Hal-hal yang telah dilakukan, di antaranya membangun, memantau, dan mengevaluasi situs web. Di samping itu, kegiatan lain dilakukan melalui sosialisasi kegiatan proyek, baik dengan cara tinjauan langsung kepada masyarakat sekitar jalur proyek maupun melakukan seminar dan konferensi pers. As a company that is working on a project for the public interest, management is very aware of the importance of communication and information, especially communication and information about the course of project work, project progress and its impact on other public services. Communication and information function is coordinated by the Corporate Secretary Division. Things that have been done include building, monitoring, and evaluating websites. Apart from that, other activities are carried out through dissemination of project activities, either by direct observation on the community around the project line or by holding seminars and press conferences.
Monitoring	- Organisasi memilih, mengembangkan, dan melaksanakan evaluasi secara terus-menerus (berkelanjutan) dan/atau secara terpisah untuk memastikan bahwa komponen-komponen pengendalian intern benar-benar ada dan berfungsi. - Organisasi mengevaluasi dan mengkomunikasikan kelemahan pengendalian intern secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif, termasuk manajemen puncak dan dewan pengawas, sebagaimana mestinya. - The organization selects, develops, and carries out continuous and/or separate evaluations to ensure that the internal control components really exist and function. - The organization evaluates and communicates internal control weaknesses in a timely manner to the parties responsible for taking corrective action, including top management and the Supervisory Board, as appropriate.	Untuk memastikan bahwa Sistem Pengendalian Internal Perseroan telah berjalan dengan baik, manajemen dan unit-unit kerja terkait diwajibkan melakukan pemantauan dan perbaikan secara terus menerus atas penerapan Sistem Pengendalian Internal. Selain itu, Internal Audit secara terpisah juga melakukan pemantauan terhadap implementasi Sistem Pengendalian Internal. Fungsi pemantauan juga dilakukan Komite Audit dan Auditor Publik. To ensure that the Company's Internal Control System is running well, management and related work units are required to continuously monitor and improve the implementation of the Internal Control System. Apart from that, the Internal Audit also separately monitors the implementation of the Internal Control System. The monitoring function is also carried out by the Audit Committee and the Public Auditor.

PENGENDALIAN ATAS ASPEK OPERASIONAL DAN ASPEK KEUANGAN

Pengendalian aspek operasional dan keuangan tahun 2022 yang dilakukan oleh Divisi Internal Audit tercermin dalam hasil audit dan konsultasi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2022. Pada aspek operasional, Divisi Internal Audit telah melakukan rekomendasi perbaikan melalui kegiatan asurans terkait SOP pada unit kerja yang telah direncanakan pada Rencana Kerja dan Audit Tahunan (RKAT) 2022. Total ada 15 kegiatan asurans pada target RKAT, dengan realisasi kegiatan asurans hingga 31 Desember 2022 mencapai 19 kegiatan asurans atau 126,7% dari target. Pengendalian pada aspek operasional juga dilakukan oleh Divisi Internal Audit kepada anak usaha melalui penugasan audit dan pendampingan.

Untuk pengendalian aspek keuangan, Divisi Internal Audit telah melaksanakan asurans pada kegiatan pengelolaan keuangan berupa evaluasi Laporan Keuangan Interim dan pelaksanaan review atas penyusunan RKAP tahun 2023. Pelaksanaan evaluasi Laporan Keuangan Interim meliputi asurans pada Divisi Keuangan dan Akuntansi, yang merupakan fungsi lapis kedua pada *Three Lines Model*. Asurans yang dilakukan, meliputi Kebijakan Anggaran, Kebijakan Akuntansi, dan Kebijakan Keuangan, serta pelaksanaan prosedur pada SOP Akuntansi, SOP Asuransi, SOP Anggaran, dan SOP Keuangan pada Divisi Keuangan dan Akuntansi. Hasil asurans telah memberikan rekomendasi peningkatan kualitas pengelolaan pada aspek keuangan dan telah disampaikan melalui laporan hasil asurans.

Dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, Divisi Internal Audit telah melaksanakan upaya peningkatannya pada perseroan melalui kegiatan asurans dan konsultasi, di antaranya adalah pendampingan proses akuisisi KCI, asurans terhadap pelaksanaan penunjukan langsung pada proses pengadaan serta bentuk konsultasi lainnya.

PENILAIAN, EVALUASI, DAN PERNYATAAN PENGENDALIAN INTERNAL

Untuk mengetahui kondisi terkini atas pelaksanaan SPI, Perseroan melakukan penilaian terhadap 2 (dua) tingkatan pengendalian.

- Penilaian atas Pengendalian Tingkat Perseroan (*Entity Level*) Proses Pengendalian Internal tidak terpisahkan dalam setiap proses bisnis dan pengelolaan risikonya. Proses tersebut wajib dilaksanakan setiap karyawan pada seluruh unit kerja di Perseroan (*entity level*). Pelaksanaan proses pengendalian internal pada unit kerja akan dievaluasi dan dinilai melalui penilaian mandiri setiap tahun.

Divisi Internal Audit memberikan kontribusi dalam melakukan penilaian mandiri atas pengendalian internal tingkat Perseroan sesuai dengan COSO tahun 2013. Penugasan tersebut dapat direncanakan dan tertuang dalam RAT. Divisi Internal Audit menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penilaian mandiri, kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit. Selanjutnya, hasil penilaian akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan.

CONTROL OVER OPERATIONAL AND FINANCIAL ASPECTS

The control over operational and financial aspects in 2022 carried out by the Internal Audit Division is reflected in the results of audits and consultations carried out throughout 2022. On the operational aspect, the Internal Audit Division has made recommendations for improvements through assurance activities related to SOPs in work units that have been planned in the Work Plan and Annual Audit (RKAT) 2022. In total, there are 15 assurance activities on the RKAT target, with the realization of assurance activities as of December 31, 2022 reaching 19 assurance activities or 126.7% of the target. Control over operational aspects is also carried out by the Internal Audit Division for subsidiaries through audit assignments and mentoring.

For controlling the financial aspect, the Internal Audit Division has carried out assurance on financial management activities in the form of evaluating the Interim Financial Report and implementing a review of the 2023 RKAP preparation. The evaluation of the Interim Financial Report includes assurance in the Finance and Accounting Division, which is the second layer function on *Three Lines Model*. The assurances carried out include Budget Policy, Accounting Policy, and Financial Policy as well as implementation of procedures in Accounting SOP, Insurance SOP, Budget SOP, and Financial SOP in the Finance and Accounting Division. The results of the assurance have provided recommendations for improving the quality of management in the financial aspect and have been submitted through the assurance results report.

In terms of compliance with other laws and regulations, the Internal Audit Division has implemented efforts to improve the Corporation through assurance and consulting activities, including assistance in the KCI acquisition process, assurance regarding the implementation of direct appointments in the procurement process and other forms of consultation.

ASSESSMENT, EVALUATION, AND STATEMENT OF INTERNAL CONTROL

To ascertain the latest condition of the Internal Control system, the Corporation evaluates 2 (two) levels of control.

- Assessment of Corporate-level (*Entity-level*) Control Internal Control Process is an inseparable process in every business process and its risk management. The process must be carried out by every employee in all work units of the Corporation (*entity level*). The implementation of internal control processes in work units will be evaluated and assessed through annual self-assessment.

The Internal Audit Division contributes to carry out self-assessment of the internal control at the entity level in accordance with 2013 COSO. The assignment can be planned and stated in the Annual Audit Plan (RAT). The Internal Audit Division submits a report to the President Director with a copy to the Audit Committee on the results of the self-assessments. Then, the assessment results will be included in the Annual Report.



- **Penilaian atas Pengendalian tingkat Aktivitas**
Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya permasalahan eksternal yang memengaruhi operasional Perseroan. Risiko operasional bersifat tanpa batas dan melekat pada semua aktivitas bisnis dan operasional Perseroan. Perseroan bergerak dalam bidang transportasi umum, maka risiko operasional merupakan prioritas utama untuk pengendalian internal. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penilaian atas kecukupan efektivitas pengendalian ("Control") pengendalian internal yang sudah ditetapkan Perseroan berdasarkan Pedoman dan Prosedur ("Compliance").

Divisi Internal Audit melaksanakan penilaian pengendalian internal tingkat aktivitas sesuai dengan metode *Control & Compliance Self-Assessment* (CCSA). Setiap unit kerja (*risk owner*) melaksanakan identifikasi risiko dan aktivitas pengendalian atas proses kerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya secara periodik. Hasil identifikasi tersebut dikoordinasikan kepada Divisi Risk Management & QSSHE Assurance dalam bentuk Daftar Risiko (*Risk Register*).

Divisi Internal Audit melaksanakan penilaian kecukupan kontrol dan kepatuhan atas kebijakan dan prosedur yang sudah ditetapkan pada pelaksanaan aktivitas operasional yang terdapat pada Daftar Risiko. Bilamana pengendalian yang dimiliki dianggap belum memadai oleh Divisi Internal Audit untuk mengantisipasi risiko, maka Divisi Internal Audit merekomendasikan pengendalian tambahan dalam rencana mitigasi risiko dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia (anggaran, SDM, infrastruktur, waktu, dan lain-lain).

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Divisi Internal Audit/pihak independen lainnya, Direksi menyatakan efektivitas Pengendalian Internal telah memadai yang didukung oleh pernyataan setiap Kepala Divisi. Dewan Komisaris dapat menunjuk KAP/konsultan independen untuk melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal setiap tahunnya. Biaya yang muncul atas evaluasi tersebut akan dibebankan dalam anggaran Dewan Komisaris. Laporan pihak independen akan disampaikan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

PROSES DAN HASIL EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TAHUN 2022

Proses penilaian dan evaluasi dilakukan Divisi Internal Audit secara *self assessment*, dengan Surat Tugas Evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern pada PT MRT Jakarta (Persero) Tahun 2022 No. 119/INT/BOD-MRT/ST/XI/2022 tertanggal 30 November 2022.

Ruang lingkup evaluasi meliputi semua aspek yang mendukung pelaksanaan sistem pengendalian internal pada Perseroan, yakni Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta *Monitoring*. Hasil evaluasi dinyatakan dalam rentang skor dengan skala 0-100 dan tingkat efektivitas: tidak efektif, kurang efektif, cukup efektif, efektif, sangat efektif.

- **Assessment of Activity-Level Control**
Operational risks are the risks caused by the inadequacy and/or failure of the internal processes, human error, system failure, or external problems that affect the Corporation operations. Operational risk is unlimited and is inherent in all business and operational activities of the Corporation. Given that the Corporation operates in the public transportation sector, operational risk is a top priority for internal control. Therefore, it is necessary to assess the adequacy of the effectiveness of internal control ("Control") that has been established by the Corporation based on the Guidelines and Procedures ("Compliance").

The Internal Audit Division carries out the internal control assessment at activity level based on the method of Control & Compliance Self-Assessment (CCSA). Each work unit (*risk owner*) periodically carries out risk identification and control activities over the work processes according to their duties and responsibilities. The results of the identification are coordinated to the Risk Management & QSSHE Assurance in the form of Risk Register.

The internal Audit Division conducts assessment of control adequacy and compliance with the policies and procedures set for the implementation of operational activities stated in the Risk Register. If the control provided is deemed inadequate by the Internal Audit Division, to anticipate risks, the Internal Audit Division will recommend extra control in the risk mitigation plan while considering the available resources (budget, HC, infrastructure, time, etc.).

Based on the assessment results from the Internal Audit Division/other independent parties, the Board of Directors can declare whether the effectiveness of Internal Control is adequate, supported by the statements of each Division Head. The Board of Commissioners may appoint a Public Accountant Firm/Independent Consultant to evaluate the internal control system annually. The cost arising from the evaluation will be borne by the budget of the Board of Commissioners. Report from independent party will be submitted by the Board of Commissioners to the Shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders.

PROCESS AND RESULTS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM EVALUATION IN 2022

The assessment and evaluation process is carried out by the Internal Audit Division on a self-assessment basis, with a Letter of Assignment of Evaluation of the Internal Control System at PT MRT Jakarta (Persero) Year 2022 No. 119/INT/BOD-MRT/ST/XI/2022 dated 30 November 2022.

The scope of the evaluation includes all aspects that support the implementation of the internal control system in the Corporation, namely Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring. Evaluation results are expressed in a range of scores with a scale of 0-100 and levels of effectiveness: ineffective, less effective, moderately effective, effective, very effective.

Hasil evaluasi menunjukkan Sistem Pengendalian Internal Perseroan untuk tahun 2022 menunjukkan nilai capaian 85,40. Dengan demikian, tingkat efektivitas sistem pengendalian internal berada pada tingkatan "Sangat Efektif".

The results of the evaluation show that the Corporation's Internal Control System for 2022 achieves the value of 85.40. Thus, the level of effectiveness of the internal control system is at the level of "Very Effective".

Hasil Evaluasi dan Tingkat Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Tahun 2022
Evaluation Results and Effectiveness Level of Internal Control System in 2022

Komponen Component	Bobot Weight	Skor Score	Capaian Achievement
Lingkungan Pengendalian Control Environment	25,00	21,65	Sangat Efektif Very Effective
Pengendalian Risiko Risk Control	25,00	20,72	Efektif Effective
Kegiatan Pengendalian Control Activities	20,00	17,35	Sangat Efektif Very Effective
Informasi dan Komunikasi Information and Communication	17,50	14,46	Efektif Effective
Pemantauan Monitoring	12,50	11,21	Sangat Efektif Very Effective
Jumlah Total	100,00	85,40	Sangat Efektif Very Effective

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU
DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Direksi telah mereviu secara berkala tentang kecukupan sistem pengendalian internal. Direksi serta Dewan Komisaris berpandangan bahwa sistem tersebut telah selaras dengan regulasi terkait serta diimplementasikan dengan baik, sehingga sistem pengendalian internal yang diterapkan telah memadai.

Efektivitas penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi juga dilakukan, baik secara internal maupun eksternal. Pada 2022, pelaksanaan Audit Internal dilakukan secara terintegrasi mengacu kepada PP No. 50 Tahun 2012, Permenhub 69 Tahun 2018, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013, dan ISO 37001:2016. Hasil audit internal pada 2022 adalah sebagai berikut:

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS
AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS ON THE
ADEQUACY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Board of Directors has periodically reviewed the adequacy of the internal control system. The Board of Directors and the Board of Commissioners are of the view that the system is in line with the relevant regulations and implemented properly, so that the internal control system implemented is adequate.

The effectiveness of the implementation of the Integrated Management System is also carried out, both internally and externally. In 2022, the implementation of Internal Audit was carried out in an integrated manner referring to PP No. 50 of 2012, Permenhub 69 of 2018, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013, and ISO 37001:2016. Internal audit results in 2022 are as follows:

Hasil Audit Internal Pada 2022
Internal Audit Results In 2022

Jenis Temuan Finding Type	SMKP	SMK3	ISO Terintegrasi	ISO SMAP	ISO SMKI
Jumlah Temuan Major The number of Major Findings	-	-	-	-	-
Jumlah Temuan Minor The number of Minor Findings	6	6	4	1	1
Jumlah Temuan Rekomendasi The Number of Findings Recommendations	18	18	17	8	29

Sedangkan untuk hasil audit eksternal ISO adalah sebagai berikut:

Meanwhile, the ISO external audit results are as follows:

Hasil Audit Eksternal ISO
The ISO External Audit Results

ISO	Temuan 2022 2022 Findings	Temuan 2021 2021 Findings
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018	0 temuan minor dan major 0 minor and major finding	4 temuan minor 4 minor findings 0 temuan major 0 major finding
ISO SMAP	2 temuan minor 2 minor findings 0 temuan major 0 major finding	1 temuan minor 1 minor finding 0 temuan major 0 major finding

Manajemen Risiko

Risk Management



Manajemen risiko merupakan bagian dari tata kelola (*governance*) yang dilakukan dengan tujuan untuk mengelola kemungkinan terjadinya risiko dan dampak dari suatu kejadian risiko untuk meningkatkan keyakinan dalam mencapai sasaran Perseroan.

MRT Jakarta menyadari bahwa risiko telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap proses bisnis yang dijalankan organisasi. Dampak dari risiko tersebut secara signifikan dapat memengaruhi kestabilan organisasi, yang tentu saja melekat pada semua aktivitas dan pengambilan keputusan dalam menjalankan bisnis.

Pengelolaan risiko dilaksanakan dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal. Untuk itu, diperlukan pengelolaan semua risiko secara sistematis, terstruktur dan komprehensif dalam rangka meningkatkan kepastian tercapainya tujuan dan sasaran Perseroan.

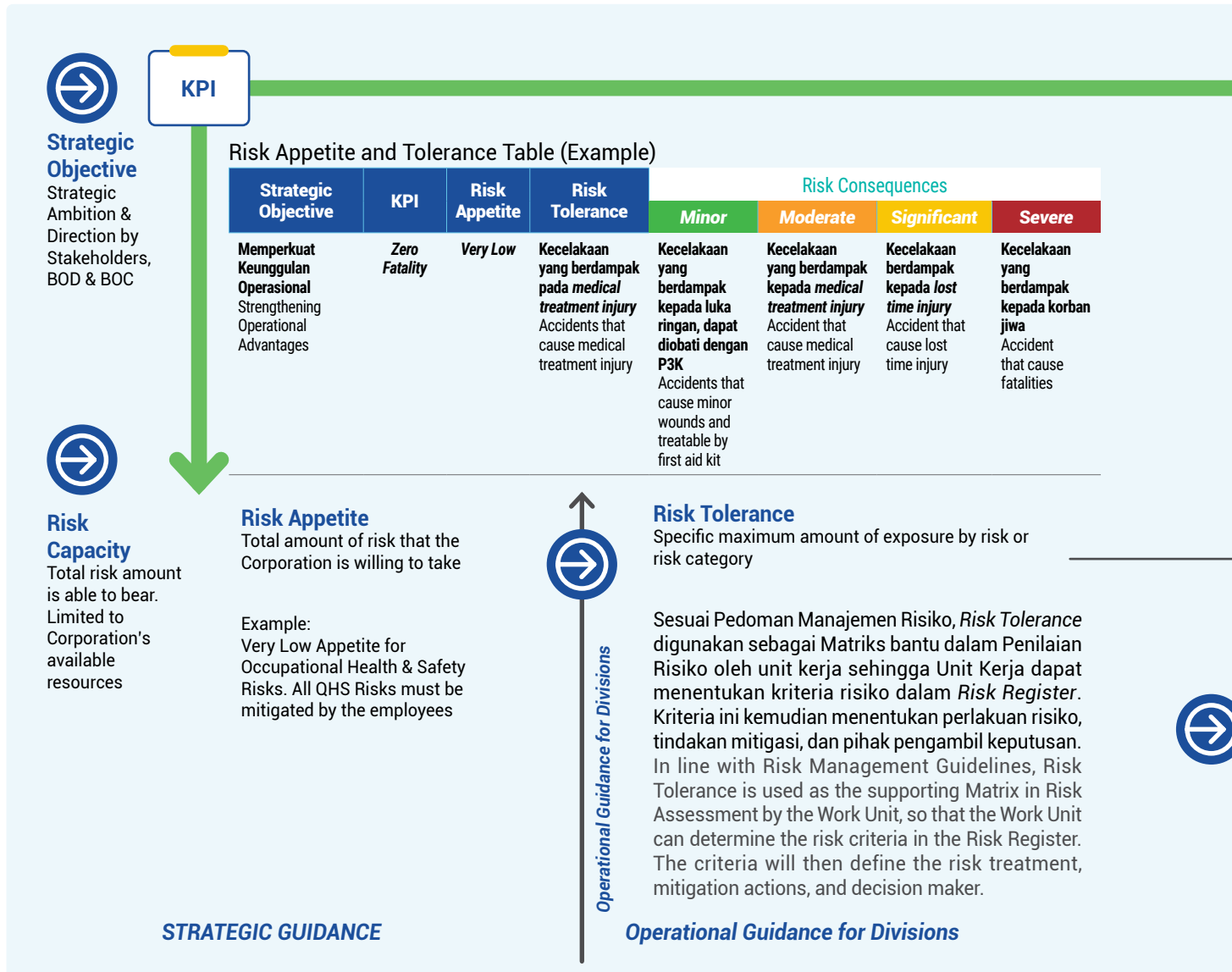
Risk management is part of governance carried out with the aim of managing the possibility of risk occurring and the impact of a risk event to increase confidence in achieving the Corporation's goals.

MRT Jakarta realizes that risks have become an integral part of every business process carried out by the organization. The impact of these risks can significantly affect the organization stability, which of course is inherent in all activities and decision-making in running business.

Risk management is carried out by considering environmental changes both externally and internally. For this reason, it is necessary to manage all risks in a systematic, structured and comprehensive manner in order to increase the certainty of achieving the Corporation's goals and targets.

Proses Bisnis Manajemen Risiko

Risk Management Business Process



TUJUAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

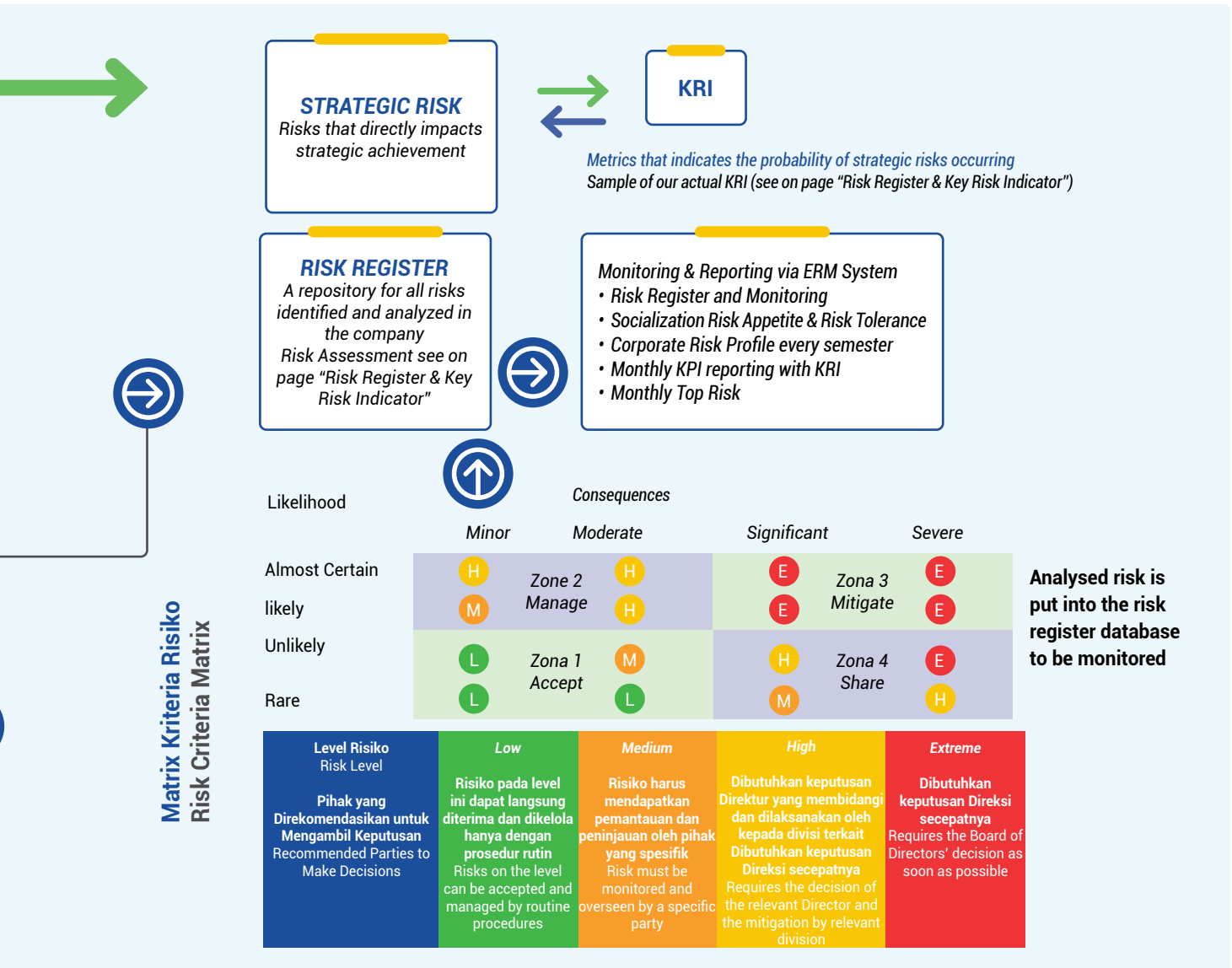
Sesuai Kebijakan Manajemen Risiko yang berlaku di Perusahaan, tujuan pengelolaan risiko adalah sebagai berikut:

- Melindungi dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan serta mendorong manajemen untuk bertindak proaktif terhadap pengelolaan risiko dan menjadikannya sebagai sumber keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan;
- Membangun kesadaran bertindak hati-hati dan kemampuan dalam pengelolaan risiko sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai bagian dari pengelolaan risiko yang terintegrasi;

OBJECTIVES OF RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

In accordance with the Risk Management Policy of the Corporation, the risk management aims to:

- Protect from significant risks that can hinder the achievement of the Corporation objectives and encourage the management to act proactively towards risk management and make it as a source of competitive advantages and Corporation performance;
- Build awareness of mindful actions and risk management competency according to the positions and responsibilities of each employees as a part of integrated risk management;

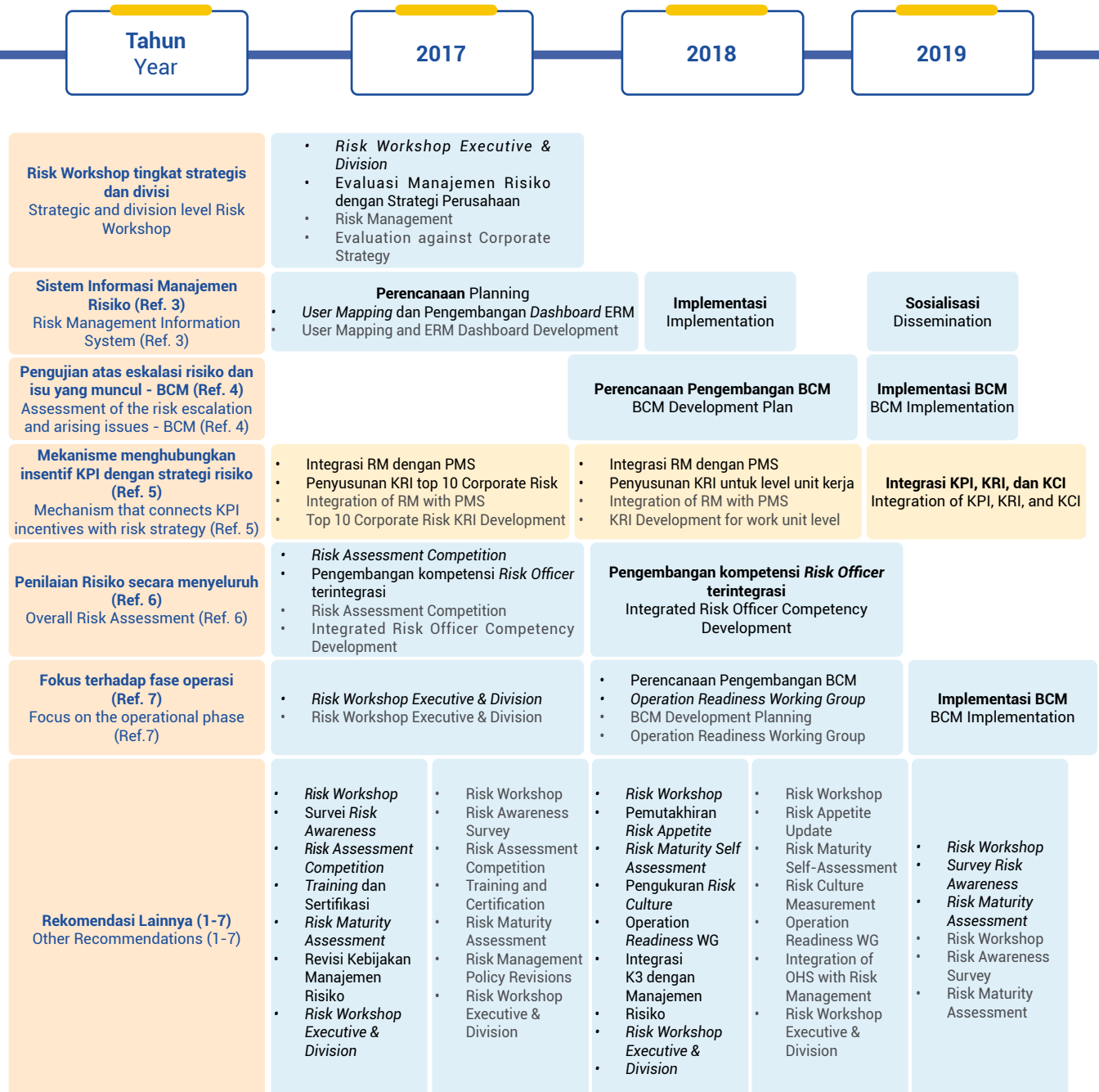


- Meningkatkan kinerja perusahaan melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang dituangkan dalam peta risiko (*risk map*) yang berguna bagi manajemen dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko termasuk *Key Risk Indicator* (KRI) secara terus menerus dan berkesinambungan.
- Improve the Corporation performance by providing risk level information as outlined in the risk map, which is useful for management in developing strategies and improving the risk management process, including the *Key Risk Indicator* (KRI), continuously and sustainably.

PETA JALAN MANAJEMEN RISIKO

Pada Tahun 2019, Perseroan menyusun Peta Jalan Pengembangan Manajemen Risiko 2008 - 2022 yang menjadi bagian dari Peta Jalan Pengembangan Sistem Manajemen MRT Jakarta. Sesuai peta jalan tersebut, pada tahun 2022, target Perseroan dalam Pengembangan Sistem Manajemen Risiko adalah Nilai *Risk Maturity* dengan target nilai sebesar 3,90 dengan realisasi aktual sebesar 3,90.

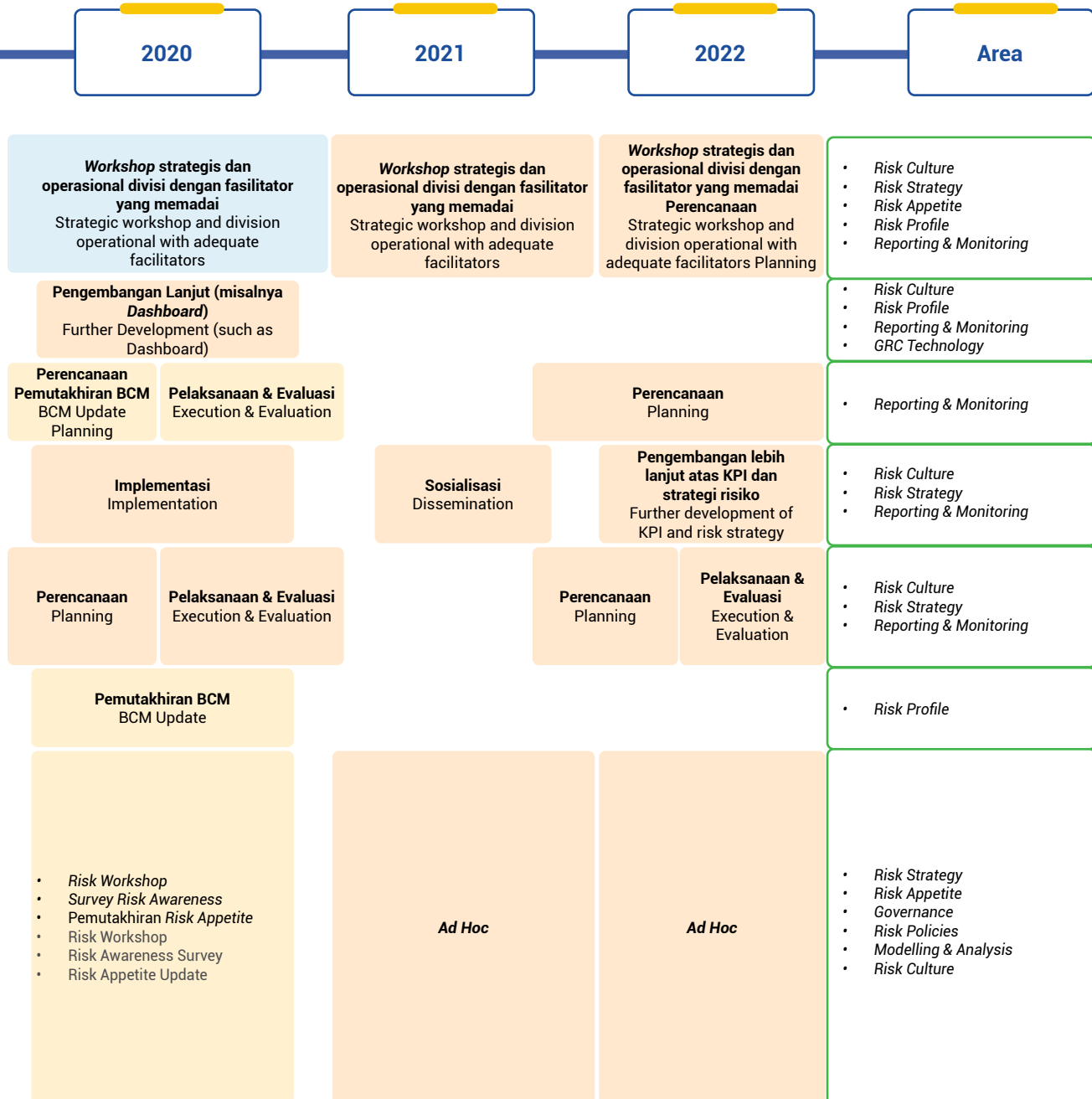
Peta Jalan Pengembangan Sistem Manajemen Risiko



RISK MANAGEMENT ROADMAP

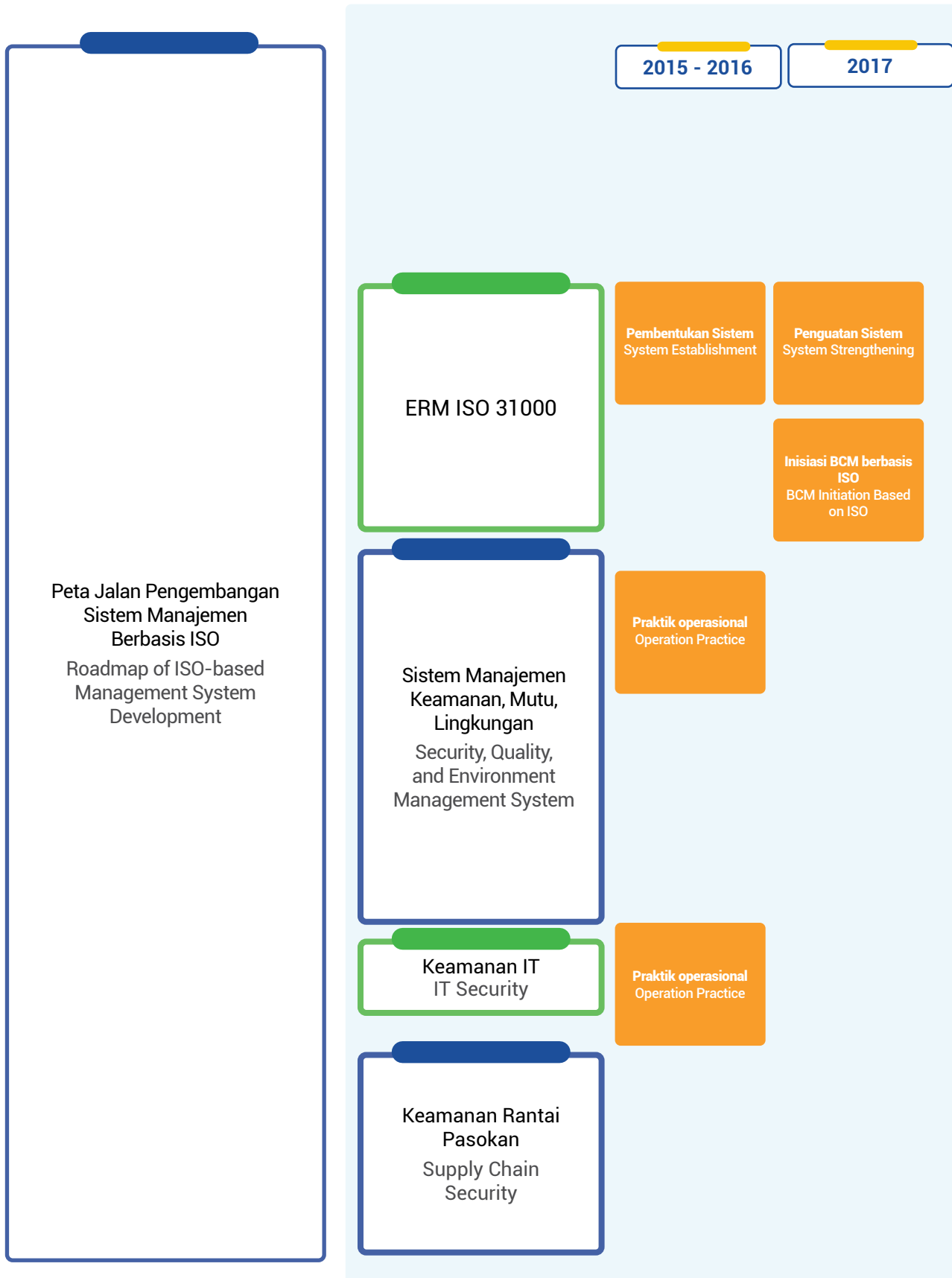
In 2019, the Corporation devised Risk Management Development Roadmap 2008-2022 which becomes part of MRT Jakarta's Management System Development Roadmap. According to the Roadmap, in 2022 the Corporation's target in the Risk Management System Development is Risk Maturity score with a targeted score of 3.90 with an actual realization of 3.90.

Risk Management System Development Roadmap



Peta Jalan Pengembangan Sistem Manajemen Risiko

Risk Management System Development Roadmap





Operasi & Pemeliharaan
Operations and Maintenance

Pengembangan *Holding* & Anak Usaha
Holding & Subsidiary Development



Untuk memperkuat Tata Kelola Manajemen Risiko Korporasi di tahun 2022, Perseroan melakukan penyesuaian:

1. Prinsip Manajemen Risiko;
2. Pedoman Umum Manajemen Risiko; dan
3. Proses Pengelolaan Risiko Perseroan.

Prinsip dan Pedoman Umum Manajemen Risiko merupakan pondasi (aturan dasar) bagi pengembangan kebijakan kerja pengelolaan risiko yang merupakan pilar-pilar bagi penerapan manajemen risiko. Sementara proses manajemen risiko adalah penjabaran dari Kerangka Kerja Manajemen Risiko untuk mempermudah integrasi penerapan pengelolaan risiko baik di tingkat korporat, unit kerja maupun individu.

Risk Appetite untuk Target KPI Perseroan di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

RISK APPETITE ASPEK FINANCIAL

To strengthen Risk Management Governance in 2022, the Corporation made adjustment:

1. Principles of Risk Management;
2. General Guidelines for Risk Management; and
3. The Corporation's Risk Management Process.

The General Principles and Guidelines for Risk Management are the foundation (basic rules) for the development of risk management work policies which are the pillars for the implementation of risk management. While the risk management process is an elaboration of the Risk Management Framework to facilitate the integration of risk management implementation at the corporate, work unit and individual levels.

The Risk Appetite for the Corporation's KPI Targets in 2022 is as follows:

FINANCIAL ASPECT RISK APPETITE

Risk Appetite Aspek Financial Financial Aspect Risk Appetite

KPI KPIs	Risk Appetite	Risk Appetite Statement	Contoh Aplikasi Risk Appetite Example of a Risk Appetite Application
EBITDA	L	MRT Jakarta mengizinkan Insan MRT untuk sedikit melonggarkan upaya mitigasi pencapaian EBITDA yang ditargetkan, apabila membawa manfaat bagi pencapaian KPI lainnya. MRT Jakarta allows MRT personnel to slightly loosen mitigation efforts to achieve the targeted EBITDA, if it brings benefits to achieving other KPIs.	MRT Jakarta mengizinkan Insan MRT untuk sedikit melonggarkan upaya pengendalian biaya, hanya jika diperlukan untuk menjamin tercapainya sasaran operasional. MRT Jakarta allows MRT personnel to slightly relax efforts to cut costs, only if necessary to ensure operational goals are achieved.
Total Pendapatan (Farebox dan Non-Farebox) Total Revenue (Farebox and Non-Farebox)	M	MRT Jakarta mengizinkan Insan MRT untuk mengambil banyak inisiatif dan upaya untuk mencapai jumlah pendapatan baik Farebox atau Non-Farebox yang ditargetkan, dengan tetap mempertimbangkan pengaruhnya terhadap pencapaian KPI yang lain. MRT Jakarta allows MRT personnel to take many initiatives and efforts to achieve the targeted amount of income, both Farebox and Non-Farebox, while still considering the impact on achieving other KPIs.	MRT Jakarta mengizinkan Insan MRT untuk merencanakan sebanyak mungkin kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan, namun tetap harus mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan. MRT Jakarta allows MRT personnel to plan as many activities as possible to increase income, but have to still consider the costs that must be incurred.
Cost Recovery Ratio	M	MRT Jakarta mengizinkan Insan MRT untuk mengambil banyak inisiatif dan upaya untuk mencapai sasaran Cost Recovery Ratio, dengan tetap mempertimbangkan pengaruhnya terhadap pencapaian KPI yang lain. MRT Jakarta allows MRT personnel to take many initiatives and efforts to achieve the Cost Recovery Ratio target, while still considering the impact on achieving other KPIs.	MRT Jakarta mengizinkan Insan MRT untuk melakukan sebanyak mungkin inovasi cost control dalam pelaksanaan kegiatan untuk mengurangi defisit finansial, namun tetap harus mempertimbangkan pencapaian target dan/atau KPI yang lain. MRT Jakarta allows MRT personnel to carry out as many cost control innovations as possible in implementing activities to reduce financial deficits, but must still consider achieving targets and/or other KPIs.



RISK APPETITE ASPEK CUSTOMER

CUSTOMER ASPECT RISK APPETITE

Risk Appetite Aspek Customer Customer Aspect Risk Appetite

KPI KPIs	Risk Appetite	Risk Appetite Statement	Contoh Aplikasi Risk Appetite Example of Risk Appetite Application
Indeks <i>Engagement Stakeholders</i> Stakeholder Engagement Index	L	MRT Jakarta mengizinkan Insan MRT untuk mengambil inisiatif dan upaya yang terukur untuk mencapai Indeks Kepuasan pelanggan dan <i>stakeholders' engagement</i> yang ditargetkan, selama tidak menghalangi pencapaian KPI yang lain. MRT Jakarta allows MRT personnel to take initiatives and measurable efforts to achieve the targeted customer satisfaction index and <i>stakeholders' engagement</i> , as long as it does not hinder the achievement of other KPIs.	Insan MRT Jakarta dapat bertindak atau mengambil keputusan untuk meningkatkan <i>stakeholders' engagement</i> hanya jika pelaksanaan kegiatan tersebut tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan dan/atau melanggar hukum. MRT Jakarta personnel can act or make decisions to increase stakeholder engagement only if the implementation of these activities does not exceed the set budget and/or violate the law.
Indeks Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Index	L	MRT Jakarta mengizinkan Insan MRT untuk mengambil inisiatif dan upaya yang terukur untuk menyelesaikan seluruh Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang ditugaskan, selama tidak menghalangi pencapaian KPI yang lain. MRT Jakarta allows MRT personnel to take initiatives and measurable efforts to complete all assigned Regional Strategic Activities (KSD), as long as they do not hinder the achievement of other KPIs.	Insan MRT Jakarta dapat bertindak atau mengambil keputusan yang mungkin dapat menurunkan kepuasan pelanggan, hanya jika tindakan atau keputusan tersebut dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan penumpang, karyawan atau pemangku kepentingan lainnya. MRT Jakarta personnel may act or make decisions that may reduce customer satisfaction, only if these actions or decisions can improve the safety and security of passengers, employees or other stakeholders.
% Penyelesaian Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Percentage of Completion of Regional Strategic Activities (KSD)	L	MRT Jakarta mengizinkan Insan MRT untuk mengambil inisiatif dan upaya yang terukur untuk menyelesaikan seluruh Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang ditugaskan, selama tidak menghalangi pencapaian KPI yang lain. MRT Jakarta allows MRT personnel to take initiatives and measurable efforts to complete all assigned Regional Strategic Activities (KSD), as long as they do not hinder the achievement of other KPIs.	Insan MRT Jakarta dapat bertindak atau mengambil keputusan untuk merealokasi sumber daya untuk penyelesaian penugasan KSD, hanya jika sumber daya tersebut diperlukan pada proyek dan/atau kegiatan lain yang lebih kritis untuk MRT Jakarta. MRT Jakarta personnel can act or make decisions to reallocate resources for the completion of KSD assignments, only if these resources are needed for other projects and/or activities that are more critical for MRT Jakarta.
Total Penumpang (berdasarkan sasaran rerata 40,000 pax/hari) Total Passengers (based on an average target of 40.000 pax/day)	H	MRT Jakarta mengizinkan Insan MRT untuk mengambil sebanyak-banyaknya inisiatif dan upaya mencapai jumlah <i>ridership</i> yang telah ditargetkan, terlepas dari tingkat keberhasilannya. MRT Jakarta allows MRT personnel to take as many initiatives and efforts to achieve the targeted number of <i>riderships</i> , regardless of the level of success.	MRT Jakarta mengizinkan Insan MRT untuk merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan sebanyak-banyaknya kegiatan yang dapat menarik minat penumpang, walaupun belum tentu memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. MRT Jakarta allows MRT personnel to plan, budget and carry out as many activities as possible to attract passengers, although not necessarily with a high success rate.



RISK APPETITE ASPEK INTERNAL BUSINESS PROCESS

INTERNAL BUSINESS PROCESS ASPECT RISK APPETITE

Risk Appetite Aspek Internal Business Process Internal Business Process Aspect Risk Appetite

KPI KPIs	Risk Appetite	Risk Appetite Statement	Contoh Aplikasi Risk Appetite Example of Risk Appetite Application
Frequency Rate	VL	MRT Jakarta tidak berkompromi terhadap risiko yang dapat menyebabkan insiden keselamatan dan kesehatan kerja serta keamanan kepada karyawan, pengguna layanan atau pemangku kepentingan MRT Jakarta lainnya yang dapat meningkatkan <i>Frequency Rate</i> Kecelakaan. MRT Jakarta does not compromise on risks that can cause occupational safety and health incidents and security for employees, passengers, or other MRT Jakarta stakeholders which can increase the Accident Frequency Rate.	Seluruh Insan MRT harus memastikan bahwa semua risiko keselamatan dan kesehatan kerja serta keamanan di tempat kerjanya masing-masing sudah dimitigasi tanpa kecuali. All MRT personnel must ensure that all risks to occupational safety and health as well as security in their respective workplaces have been mitigated without exception.
Train service delivery	L	Ketepatan waktu kereta adalah hal yang sangat penting bagi MRT Jakarta, sehingga MRT Jakarta mengizinkan Insan MRT untuk mengambil inisiatif dan upaya yang terukur untuk memastikan ketepatan waktu kereta, selama tidak menghalangi pencapaian KPI yang lain. Train punctuality is very important for MRT Jakarta, so MRT Jakarta allows MRT personnel to take initiatives and measurable efforts to ensure train punctuality, as long as it doesn't hinder the achievement of other KPIs.	Insan MRT Jakarta dapat bertindak atau mengambil keputusan yang mungkin menurunkan ketepatan waktu kereta, hanya jika hal tersebut dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan penumpang, karyawan atau pemangku kepentingan lainnya. MRT Jakarta personnel can act or make decisions that may reduce the punctuality of the train, only if this can improve the safety and security of passengers, employees or other stakeholders.
% Penyelesaian Konstruksi (Fase 2A) Construction Completion Percentage (Phase 2A)	H	MRT Jakarta mengizinkan Insan MRT untuk mengambil sebanyak-banyaknya inisiatif dan upaya demi mencapai target capaian untuk: • Penyelesaian Konstruksi Fase 2A; • Pengembangan Jalur Baru; • Pengembangan Bisnis Jasa Konsultasi Rail-Based.	MRT Jakarta mengizinkan Insan MRT untuk merancang berbagai inovasi dalam pengelolaan manajemen konstruksi untuk memastikan ketercapaian sasaran penyelesaian konstruksi Fase 2A, walaupun tidak semua inovasi memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi.
% Penyelesaian Milestone Pengembangan Jalur Baru % of Completion of New Line Development Milestone	H	MRT Jakarta allows MRT personnel to take as many initiatives and efforts as possible to achieve the achievement targets for: • Construction Completion of Phase 2A; • Development of New Lines; • Rail-Based Consulting Services Business Development.	MRT Jakarta allows MRT personnel to design various innovations in construction management to ensure the achievement of the target of completing Phase 2A construction, although not all innovations have a high success rate.
%Penyelesaian Milestone Pengembangan Bisnis Jasa Konsultasi Rail-based % of Completion of Rail-Based Consultancy Services Business Development Milestone	H		
% Penyelesaian Milestone Implementasi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Berorientasi Transit (KBT) % of Completion of Transit-Oriented Area Infrastructure Development Implementation Milestone	H	MRT Jakarta mengizinkan Insan MRT untuk mengambil sebanyak-banyaknya inisiatif dan upaya demi mencapai target capaian yang ditetapkan untuk: • Mencapai progres milestone implementasi pembangunan infrastruktur KBT; • Mencapai progress milestone pengembangan bisnis digital; • Mencapai progress milestone Quick Wins Transformasi Digital yang terimplementasi.	MRT Jakarta mengizinkan Insan MRT untuk merancang berbagai inovasi untuk memonetisasi media sosial dan mobile apps MRT Jakarta, walaupun tidak semua inovasi memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi.
% Penyelesaian milestone pengembangan bisnis digital % of Completion of digital business development milestone	H	MRT Jakarta allows MRT personnel to take as many initiatives and efforts as possible to achieve the achievement targets set for: • Achieve progress milestones in the implementation of KBT infrastructure development; • Achieve digital business development milestone progress; • Achieve implemented Quick Wins Digital Transformation milestone progress.	MRT Jakarta allows MRT personnel to design various innovations to monetize social media and MRT Jakarta mobile apps, although not all innovations have a high success rate.
% Penyelesaian Milestone Quick Wins Transformasi Digital yang Terimplementasi % of Completion of Implemented Digital Transformation Quick Wins Milestone	H		
% Penyelesaian Milestone Integrasi Antarmoda dengan Sistem Perseroan % of Completion of Intermodal Integration with the Corporation's System Milestone	L	MRT Jakarta berkomitmen untuk mengintegrasikan sistem MRT dengan moda transportasi lainnya, sehingga MRT Jakarta mengizinkan Insan MRT untuk mengambil inisiatif dan upaya yang terukur untuk memastikan pemenuhan milestone integrasi, selama tidak menghalangi pencapaian KPI yang lain. MRT Jakarta is committed to integrating the MRT system with other modes of transportation, so that MRT Jakarta allows MRT personnel to take initiatives and measurable efforts to ensure fulfillment of integration milestones, as long as they do not hinder the achievement of other KPIs.	MRT Jakarta mengizinkan Insan MRT untuk bertindak atau mengambil keputusan yang dapat memastikan pencapaian milestone integrasi sesuai rencana hanya jika hal tersebut tidak memberikan kerugian finansial bagi MRT Jakarta dan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. MRT Jakarta permits MRT personnel to act or make decisions that can ensure the achievement of integration milestones according to plan only if this does not result in financial loss for MRT Jakarta and still pays attention to the applicable laws and regulations.



RISK APPETITE ASPEK LEARNING & GROWTH

RISK APPETITE OF LEARNING & GROWTH ASPECT

Risk Appetite Aspek Learning & Growth Risk Appetite of Learning & Growth Aspect

KPI KPIs	Risk Appetite Risk Appetite	Risk Appetite Statement	Contoh Aplikasi Risk Appetite Example of a Risk Appetite Application
% Implementasi Roadmap Keberlanjutan % of Sustainability Roadmap Implementation	H	MRT Jakarta mengizinkan Insan MRT untuk mengambil sebanyak-banyaknya inisiatif dan upaya demi: - Mencapai sasaran Roadmap Keberlanjutan yang telah direncanakan; - Mencapai sasaran maturitas Knowledge Management yang telah ditetapkan.	MRT Jakarta mengizinkan Insan MRT untuk merancang berbagai inovasi untuk memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah konstruksi, operasi, dan KBT MRT Jakarta, walaupun tidak semua inovasi memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. MRT Jakarta allows MRT personnel to design various innovations to empower communities around the MRT Jakarta construction, operation and KBT areas, although not all innovations have a high success rate.
Tingkat Maturitas Knowledge Management (KM) Knowledge Management Maturity Level	H	MRT Jakarta allows MRT personnel to take as many initiatives and efforts as possible for: - Achieve the planned Sustainability Roadmap targets; - Achieve Knowledge Management maturity targets that have been set.	
Skor GRC GRC Score	L	MRT Jakarta berkomitmen untuk mencapai sasaran skor GRC, sehingga MRT Jakarta mengizinkan Insan MRT untuk mengambil inisiatif dan upaya yang terukur untuk memastikan pemenuhan Skor GRC, selama tidak menghalangi pencapaian KPI yang lain. MRT Jakarta is committed to achieving the GRC score target, so MRT Jakarta allows MRT personnel to take initiatives and measurable efforts to ensure fulfillment of the GRC Score, as long as it does not hinder the achievement of other KPIs.	MRT Jakarta mengizinkan Insan MRT untuk bertindak atau mengambil keputusan yang dapat memastikan pencapaian Skor GRC hanya jika hal tersebut tidak menambah biaya dari anggaran yang telah ditetapkan. MRT Jakarta allows MRT personnel to act or make decisions that can ensure the achievement of the GRC Score only if this does not add to the costs of the predetermined budget.
Indeks Manajemen Talenta Talent Management Index	H	MRT Jakarta mengizinkan Insan MRT untuk mengambil sebanyak-banyaknya inisiatif dan upaya demi memperkuat manajemen talenta Perusahaan. MRT Jakarta allows MRT personnel to take as many initiatives and efforts as possible to strengthen the Corporation's talent management.	MRT Jakarta mengizinkan Insan MRT untuk mengikuti seluas-luasnya pelatihan/pengembangan/pendidikan lanjutan demi meningkatkan pengetahuan dan keahlian Insan MRT walaupun belum tentu bermanfaat secara langsung pada MRT Jakarta. MRT Jakarta allows MRT personnel to participate in the widest possible range of training/development/further education in order to increase the knowledge and expertise of MRT personnel, although it is not necessarily directly beneficial to MRT Jakarta.

JENIS RISIKO TAHUN 2022 DAN PENGELOLAANNYA

TYPE OF RISKS IN 2022 AND THE MANAGEMENT

Jenis Risiko Tahun 2022 dan Pengelolaannya Type of Risks In 2022 and the Management

Peringkat Rank	Jenis Risiko Risk Type	Penyebab Caused by	Dampak Impact
1.	Tidak Tersedianya Lahan Depo MRT Fase 2B sesuai waktu yang ditentukan The MRT Depot Land for Phase 2B is not available according to the specified time	- Tidak adanya keputusan serta tindak lanjut dari pihak terkait (Pemprov DKI, Jamdatun, dll), termasuk dalam hal terjadinya pergantian Gubernur DKI Jakarta; - Pemilik Lahan/Aset menolak lahannya digunakan/dibebaskan; - Tidak adanya kepastian Pengadaan Lahan Ancol Barat sesuai UU No.2 tahun 2012 menggunakan APBD. - There is no decision and follow-up from related parties (DKI Provincial Government, Jamdatun, etc.), including in the case of a change in the Governor of DKI Jakarta; - Land/Asset Owners refuse to use/free up their land; - There is no certainty regarding West Ancol Land Procurement in accordance with Law No. 2 of 2012 using the APBD.	- Komitmen pendanaan konstruksi Fase 2B belum diperoleh dari JICA; - Keterlambatan mulainya konstruksi dan target operasi MRT Fase 2B; - Tidak dapat menambah Rolling Stock untuk operasional MRT Fase 2. - The funding commitment for Phase 2B construction has not yet been obtained from JICA; - Delays in the commencement of MRT Phase 2B construction and operation targets; - Cannot add Rolling Stock for Phase 2 MRT operations.
2.	Tidak tercapainya target Laba dan EBITDA Perusahaan di tahun berjalan sesuai hasil RUPS Desember 2022 Failure to achieve the Corporation's Profit and EBITDA targets in the current year according to the results of the December 2022 GMS	- Penambahan beban lain-lain atas Time Value of Money (TVM) atas piutang subsidi tahun 2021, Penyisihan piutang JIP, dan bagian kerugian Anak Usaha/ Usaha Patungan (MITJ dan JLI). - Tidak tercapainya target pendapatan non-tiket tahun berjalan. - Addition of other expenses to the Time Value of Money (TVM) for subsidy receivables in 2021, Allowance for JIP receivables, and share of losses for Subsidiaries/Joint Ventures (MITJ and JLI). - Failure to achieve the NFB revenue target for the current year.	Kerugian perusahaan yang melebihi batas toleransi (deviasi 5%). The Corporation losses that exceed the tolerance limit (5% deviation).

Jenis Risiko Tahun 2022 dan Pengelolaannya
Type of Risks In 2022 and the Management

Peringkat Rank	Jenis Risiko Risk Type	Penyebab Caused by	Dampak Impact
3.	Potensi Keterlambatan Relokasi Utilitas PLN SKTM 20 kV dan PLN SKTT 150 kV pada CP 202 Potential Delay in Relocating PLN SKTM 20 kV and PLN SKTT 150 kV utilities at CP 202	Pemilik utilitas (PLN) tidak memiliki anggaran untuk relokasi utilitas sehingga meminta MRTJ untuk melakukan relokasi, namun hal ini tidak sesuai dengan Perda DKI Jakarta No. 8 tahun 1999 dan Pergub DKI Jakarta No. 106 tahun 2019 di mana relokasi utilitas harus dilakukan oleh Pemilik Utilitas. The utility owner (PLN) does not have a budget for relocating utilities so they ask MRTJ to relocate, but this is not in accordance with DKI Jakarta Regional Regulation No. 8 of 1999 and DKI Jakarta Governor Regulation No. 106 of 2019 where the relocation of utilities must be carried out by the Utility Owner.	Keterlambatan pekerjaan konstruksi D-Wall/Stasiun MRT CP 202 dan menimbulkan klaim waktu serta biaya. Delays in the D-Wall construction of MRT CP 202 Station and causing time and cost claims.
4.	Terlambatnya penandatanganan 2 nd Slice Loan Late signing of 2 nd Slice Loan	- Proses <i>on lending-on granting</i> oleh pemerintah berlangsung lebih lama dari perkiraan. - Tidak adanya langkah percepatan di internal Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat. - The government's on lending-on granting process took longer than expected. - There are no accelerating steps within the Pemprov DKI and the Central Government.	- Kurangnya pendanaan proyek Fase 2A setelah Q1 2023. - Keterlambatan Certified ISO Integrated & Surveillance konstruksi dan target operasi MRT Fase 2A. - Munculnya <i>Financing Charges</i>, karena konstruksi berjalan namun tidak ada pembayaran. - Insufficient funding of Phase 2A projects after Q1 2023. - Delays in construction progress and MRT Phase 2A operating targets. - The emergence of Financing Charges, because the construction is running but there is no payment.
5.	Kegagalan Pengadaan Ulang (ICB) CP205 sesuai skenario pengadaan yang dipilih CP205 Procurement Failure (ICB) according to the selected procurement scenario	- Tidak ada Kontraktor yang berminat dikarenakan keikutsertaan kontraktor Fase 1, sehingga muncul persepsi dari calon <i>bidders</i> bahwa sudah ada pemenang yang pasti. - Kurangnya dukungan <i>stakeholders</i> untuk proses pengadaan akibat munculnya isu <i>governance</i> apabila terjadi <i>single bid</i> dengan harga penawaran yang tinggi dari HPS/tidak wajar - There were no interested contractors due to the participation of Phase 1 contractors, resulting in the perception of prospective bidders that there was already a definite winner. - Lack of stakeholder support for the procurement process due to the emergence of governance issues in the event of a single bid with a high bid price from HPS/unreasonable.	- Perpanjangan waktu (<i>delay</i>) penyelesaian Proyek MRT Jakarta Fase 2 hingga 15 bulan (estimasi jika dilakukan pengadaan ulang kembali). - Penurunan reputasi perusahaan dan hilangnya kepercayaan <i>stakeholders</i>. - Adanya eskalasi biaya yang lebih besar akibat <i>prolongation cost</i> dan <i>interface cost</i> di paket kontrak lain sebagai konsekuensi dari beberapa proyek yang tertunda. - Extension of time (<i>delay</i>) for the completion of MRT Jakarta Phase 2 Project up to 15 months (estimated if re-procurement is carried out). - Decreasing the Corporation reputation and loss of stakeholders' trust. - There was a greater cost escalation due to prolongation costs and interface costs in other contract packages as a consequence of several delayed projects.
6.	Keterlambatan/terhambatnya penyelesaian Proyek <i>Transport Hub</i> sesuai dengan target yang telah ditetapkan Delays/hinder in completing the Transport Hub Project in accordance with the targets set	- Terhambatnya proses Amandemen Kontrak <i>Transport Hub</i> sesuai hasil <i>revisit design</i>, karena tidak tercapainya kesepakatan harga dengan kontraktor (PT. PP) akibat adanya kenaikan harga yang signifikan karena kondisi pasar yang tidak stabil dan <i>markup</i> yang terlalu tinggi dari kontraktor pada harga satuan, terdapat pasal dalam SSUK dan SSKK yang mengatur tidak berlakunya penyesuaian harga satuan pada pekerjaan konstruksi awal. <i>Dispute</i> dengan kontraktor terkait pembayaran atas item pekerjaan yang telah dikerjakan di lapangan namun belum tertuang dalam kontrak saat ini. - Terdapat kekurangan pendanaan untuk membiayai Proyek <i>Transport Hub</i>. - Delays in the Transport Hub Contract Amendment process according to the results of the revisit design, due to the failure to reach a price agreement with the contractor (PT. PP) due to a significant price increase because of unstable market conditions and excessively high markup from the contractor on the unit price. There is an article in the SSUK and SSKK which stipulates that unit price adjustments do not apply to initial construction work. - Dispute with contractors regarding payments for work items that have been carried out in the field but have not been included in the current contract. - There is a lack of funding to finance the Transport Hub Project.	- Tidak tersedianya kantor MRT yang baru di mana kontrak kantor Wisma Nusantara akan berakhir di Juni 2023. - Terhambatnya pencapaian KSD terkait, yaitu: Pedestrian Jalan Blora dan Transit Plaza (Lt. 1) - Tuntutan perdata dari kontraktor. - There is no new MRT office while the Wisma Nusantara office contract will expire in June 2023. - Delays in achieving related KSD, namely: Pedestrian Jalan Blora and Transit Plaza (Lt. 1) - Civil lawsuits from contractors.



Jenis Risiko Tahun 2022 dan Pengelolaannya Type of Risks In 2022 and the Management

Peringkat Rank	Jenis Risiko Risk Type	Penyebab Caused by	Dampak Impact
7.	Keterlambatan Penyelesaian target Implementasi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Berorientasi Transit (KBT) Delay in the completion the Transit Oriented Area (TOD) Infrastructure Development Target	- Proses Perizinan membutuhkan waktu yang lama karena: (a) Jalur Koordinasi dan Birokrasi antar instansi terkait mempunyai standar dan kualifikasi dalam penerbitan perizinan; (b) Proses PKS kerja sama pemanfaatan BMD pada infrastruktur yg dibangun; (c) perencanaan satu arah (permintaan Pemda) dengan tidak mengacu pada ketentuan dan dokumen perencanaan yang berlaku. - Tidak tersedianya Pendanaan karena: (a) Kurangnya modal usaha pemilik proyek; (b) Tidak adanya investor yang tertarik untuk mendanai proyek Infrastruktur; (c) Belum adanya kejelasan pemanfaatan aset infrastruktur; dan (d) Tidak tersedianya Anggaran Pembangunan Infrastruktur pada RKAP PT MRT Jakarta. - Kelalaian pelaksana proyek karena: (a) belum adanya <i>guideline enterprise project management</i>; (b) Kurangnya <i>monitoring</i> yang dilakukan pada saat pelaksanaan pembangunan infrastruktur; (c) Faktor cuaca (khususnya musim penghujan). - Licensing process takes a long time because: (a) Coordination and Bureaucratic Lines between related agencies have standards and qualifications in issuing permits; (b) The PKS process for cooperation in the utilization of BMD on the infrastructure being built; (c) one-way planning (requested by the Regional Government) without referring to the applicable provisions and planning documents. - Unavailability of Funding due to: (a) Lack of business capital for the project owner; (b) There are no investors interested in funding the infrastructure projects; (c) There is no clarity regarding the utilization of infrastructure assets; and (d) The unavailability of the Infrastructure Development Budget in PT MRT Jakarta's RKAP. - Negligence by project implementers due to: (a) the absence of enterprise project management guidelines; (b) Lack of monitoring carried out during the implementation of infrastructure development; (c) Weather factors (especially rainy season).	- Tidak terpenuhinya KSD yang diamanatkan oleh Pemprov DKI baik yang dikerjakan oleh Perseroan maupun Anak Usaha/Perusahaan Patungan. - Reputasi MRT Jakarta sebagai Pengelola Kawasan TOD menjadi buruk karena tidak dapat melaksanakan implementasi pembangunan infrastruktur kawasan TOD. - Non-fulfillment of the KSD mandated by the Provincial Government of DKI, both those carried out by the Corporation and Subsidiaries / Joint Ventures. - MRT Jakarta's reputation as the TOD Area Manager has deteriorated because it is unable to carry out the implementation of infrastructure development in the TOD area.
8.	Kegagalan rencana transaksi akuisisi saham KCI sebesar 51% oleh Perseroan The failure of the plan to acquire 51% of KCI's shares by the Corporation	- Tidak tersedianya Anggaran APBD Prov. DKI Jakarta untuk pelaksanaan Akuisisi. - Tidak terealisasinya penyertaan modal untuk akuisisi saham KCI sebesar 51% dari Pemprov DKI Jakarta sesuai Target waktu yang ditetapkan karena Pemprov DKI melakukan penyediaan anggaran melalui APBD Perubahan. - Tidak terpenuhinya persyaratan pendahuluan sebagaimana diatur pada <i>Conditional Sales & Purchase Agreement</i> (CSPA). - The unavailability of DKI Jakarta Province APBD budget for the implementation of the Acquisition. - The capital investment for the acquisition of 51% KCI shares from DKI Jakarta Provincial Government was not realized according to the time target set because the DKI Provincial Government provided budget through the Revised APBD. - Non-fulfillment of the preliminary requirements as stipulated in the Conditional Sales & Purchase Agreement (CSPA).	- Tidak tercapainya KSD sesuai KPI Perusahaan tahun 2022. Terhambatnya implementasi rencana bisnis MITJ yang dapat berdampak terhadap kinerja keuangan perusahaan. - Failure to achieve KSD according to the Corporation's KPI of 2022. - Delays in the implementation of MITJ's business plan which could have an impact on the Corporation's financial performance.

Jenis Risiko Tahun 2022 dan Pengelolannya
Type of Risks In 2022 and the Management

Peringkat Rank	Jenis Risiko Risk Type	Penyebab Caused by	Dampak Impact
9.	Potensi gugatan ke arbitrase internasional dari pihak Kontraktor terkait pembayaran <i>Financing Charges</i> dan IPC 72B Potential lawsuit to international arbitration from the Contractor regarding the payment of Financing Charges and IPC 72B	- Ketidaksepakatan nominal pembayaran <i>financing charge</i> CP 103 dan CP 104-105 yang diajukan dan penolakan pembayaran IPC 72 B untuk CP104-105 oleh Kemenkeu di tahun 2020 (klaim kerugian finansial yang disebabkan oleh pembayaran retensi yang tertunda karena adanya EoT). - Adanya penolakan dari Menteri Keuangan untuk membayarkan <i>Financing Charges</i> dan <i>claims</i> menggunakan dana JICA berdasarkan surat Menteri Keuangan pada 12 Juli 2021 dan diperkuat kembali dengan surat Menteri Keuangan pada 1 September 2021. - Hasil Laporan Audit atas <i>Claim</i> IPC 72B oleh BPKP telah keluar, berdasarkan laporan hasil audit tersebut atas tagihan <i>claim</i> IPC 72B nilainya adalah 0. Sehingga menurut BPKP tagihan tersebut tidak dapat dibayarkan. - Disagreement on nominal payment of proposed CP 103 and CP 104-105 financing charges and rejection of IPC 72 B payments for CP104-105 by the Ministry of Finance in 2020 (claims for financial losses caused by delayed retention payments due to EoT). - There was a refusal from the Minister of Finance to pay Financing Charges and claims using JICA funds based on a letter from the Minister of Finance on July 12, 2021 and reinforced by a letter from the Minister of Finance on September 1, 2021. - The results of the Audit Report on the IPC 72B Claim by the BPKP have come out, based on the audit report on the IPC 72B claim bill the value is 0. So according to the BPKP the bill cannot be paid.	- Reputasi perusahaan yang kurang baik akibat tidak terpenuhinya komitmen yang telah disepakati di dalam amandemen kontrak dan tidak mengikuti keputusan yang sudah dikeluarkan oleh DAB. - Penambahan biaya atas proses gugatan secara hukum (arbitrase internasional) untuk <i>Financing Charges</i>, <i>Claim</i> 72B dan <i>Variation</i> dengan perkiraan total yang harus dikeluarkan jika Perseroan kalah dalam proses Arbitrase adalah: - Skenario A: Nilai <i>Dispute</i> ditambah Biaya Arbitrase dan Biaya <i>Lawyer</i> sebesar Rp70,431,988,082. - Skenario B: Nilai <i>Main Dispute</i> ditambah Biaya keterlambatan pembayaran, Biaya Arbitrase dan Biaya <i>Lawyer</i> sebesar Rp86,880,961,655. - Unfavorable Corporation reputation due to non-fulfillment of commitments agreed in the contract amendments and failure to follow decisions issued by DAB. - Additional fees for legal proceedings (international arbitration) for Financing Charges, Claim 72B and Variation with an estimated total that must be incurred if the Corporation loses the Arbitration process are: - Scenario A: Dispute Value plus Arbitration Fees and Lawyer Fees of IDR 70,431,988,082 - Scenario B: Main Dispute Value plus Late Payment Fees, Arbitration Fees and Lawyer Fees of IDR 86,880,961,655.
10.	Keterlambatan penyelesaian 1 SAM 1 <i>Applet</i> dan keterlambatan/tidak berhasilnya implementasi MTT sebagai Kartu Transportasi Delay in completion of 1 SAM 1 <i>Applet</i> and delay/unsuccessful implementation of MTT as a Transport Card	- Potensi adanya <i>wasted asset</i> terhadap perangkat dan kartu. - JLI tidak berhasil mengimplementasikan MTT sebagai kartu transportasi dan sekaligus pemenuhan 1 SAM 1 <i>Applet</i> pada September 2023. - Belum tersedianya perangkat pendukung pengoperasian MTT (di luar lingkup Jaklingko, misal: <i>reconciliation</i>, DRC, dsb) - Potential for wasted assets on devices and cards. - JLI failed to implement MTT as a transportation card and at the same time fulfill 1 SAM 1 <i>Applet</i> in September 2023. - The unavailability of tools to support MTT operations (outside the scope of Jaklingko, for example: <i>reconciliation</i>, DRC, etc.)	- Perseroan kehilangan status sebagai <i>issuer</i>. - Perangkat yang dihapus tercatat sebagai <i>expense</i> dalam pembukuan Perseroan dan Potensi <i>waste</i> pada perangkat dan kartu saat ini. - Tidak adanya <i>potential bidder</i> yang berminat saat CP207 <i>tender</i> akibat demarkasi pekerjaan yang tidak sesuai. - The Corporation lost its status as an issuer. - Deleted devices are recorded as an expense in the Corporation's books and potential waste on current devices and cards. - There were no potential bidders who were interested in the CP207 tender due to inappropriate job demarcation.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Evaluasi atas efektivitas penerapan Sistem Manajemen Risiko Korporasi, dilakukan secara rutin oleh Perseroan sesuai Prosedur Evaluasi Manajemen Risiko yang disahkan dalam Peraturan Direktur Utama Nomor 08 Tahun 2020 tentang Prosedur Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko. Evaluasi tersebut dilakukan dalam bentuk pengukuran *Risk Culture*, *Risk Conformity*, dan *Risk Maturity* Perseroan yang dilakukan setiap tahun. Secara umum, tujuan dari evaluasi Sistem Manajemen Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Menilai kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses Manajemen Risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa tujuan dan sasaran Perseroan tercapai sebagaimana diharapkan;
2. Mengetahui tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko;

REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

Evaluation of the effectiveness of the implementation of the Corporate Risk Management System is carried out routinely by the Corporation in accordance with the Risk Management Evaluation Procedure as stipulated in the President Director Decree Number 08 of 2020 concerning Risk Management Implementation Evaluation Procedures. The evaluation is carried out in the form of measuring the Corporation's Risk Culture, Risk Conformity and Risk Maturity which is carried out every year. In general, the objectives of evaluating the Corporation's Risk Management System are as follows:

1. Assess the adequacy of the design and the effectiveness of the implementation of the Risk Management process as one of the management tools in providing confidence to stakeholders that the Corporation's goals and objectives have been achieved as expected;
2. Find out the maturity level of Risk Management implementation;



3. Mengidentifikasi penerapan Manajemen Risiko yang memerlukan peningkatan berikut rekomendasi perbaikan.
4. Pada tahun 2022, Perseroan tidak melakukan pengukuran *Risk Conformity* terhadap ISO 31000: 2018, karena masih menindaklanjuti hasil *Risk Conformity* di tahun sebelumnya dan belum ada perubahan dari ISO 31000:2018. Dalam melakukan evaluasi implementasi manajemen risiko di tahun 2022, Perseroan meminta perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan penilaian kematangan penerapan manajemen risiko dengan menggunakan *tools* BPKP berdasarkan Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Daerah. Namun, karena *tools* yang digunakan oleh BPKP berbeda dengan *tools* yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya maka hasil penilaian tidak dapat diperbandingkan dengan hasil skor tahun-tahun sebelumnya.

Meskipun terdapat ketidaksamaan *tools* pengukuran, terdapat poin-poin rekomendasi yang dapat dijadikan *lesson learned* bagi peningkatan berkelanjutan, antara lain:

3. Identify the implementation of Risk Management that requires improvement along with recommendations for improvement.
4. In 2022, the Corporation did not measure Risk Conformity to ISO 31000: 2018, because the Corporation was still following up on the results of Risk Conformity in the previous year and there has been no change from ISO 31000: 2018. In evaluating the implementation of risk management in 2022, the Corporation asked BPKP representatives for DKI Jakarta Province to carry out a risk management implementation maturity assessment using BPKP tools based on the Regulation of the Deputy Head of BPKP for State Accountants Number 15 of 2022 concerning Technical Guidelines for Evaluation of the Maturity Level of Implementation of Risk Management in Regional owned enterprises. However, since the tools used by BPKP are different from those used in previous years, the results of the assessment cannot be compared with the scores of previous years.

Even though there are differences in measurement tools, there are points of recommendation that can be used as lessons learned for continuous improvement, including:

Tinjauan Atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko Review of The Effectiveness of The Risk Management System

No.	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Perbaikan Follow-Up for Improvement
1.	Menunjuk pegawai pada tingkat manajemen menengah sebagai <i>role model</i> penerapan budaya risiko berdasarkan hasil <i>survey</i> . Appoint employees at the middle management level as role models for implementing a risk culture based on survey results.	Dalam pembaharuan Pedoman Manajemen Risiko melalui Peraturan Direksi No. 002 Tahun 2023, telah ditambahkan poin "Penunjukan <i>Role Model</i> yang bertanggung jawab untuk mendorong pelaksanaan penerapan manajemen risiko secara meluas ke seluruh Perseroan" sebagai salah satu Strategi Penerapan Manajemen Risiko. In updating the Risk Management Guidelines through Directors' Decree No. 002 of 2023, the point "Appointment of a Role Model that is responsible for encouraging the implementation of risk management implementation throughout the Corporation" has been added as one of the Risk Management Implementation Strategies.
2.	Menggunakan sistem informasi dalam pengumpulan data historis penyusunan analisis risiko. Using information systems in the collection of historical data in the preparation of risk analysis.	Fitur <i>upload</i> dokumen pendukung, termasuk data historis dalam penyusunan analisis risiko, diakomodasi dalam aplikasi sistem baru yang akan digunakan pada tahun 2023. The supporting document upload feature, including historical data in the preparation of risk analysis, is accommodated in the new system application that will be used in 2023.
3.	Dokumen pendukung analisis risiko oleh masing-masing <i>risk owner</i> dikumpulkan ke unit manajemen risiko. Supporting documents for risk analysis by each risk owner are collected in the risk management unit.	Fitur <i>upload</i> dokumen pendukung analisis risiko diakomodasi dalam aplikasi sistem baru yang akan digunakan pada tahun 2023. The feature for uploading supporting documents for risk analysis is accommodated in a new system application that will be used in 2023.
4.	Mencantumkan akuntabilitas pengelolaan risiko dalam uraian jabatan manajer dan <i>risk owner</i> . Include accountability for risk management in the job descriptions of managers and risk owners.	Memastikan <i>job description</i> seluruh Kepala Divisi/Dept (<i>Risk Owner</i>) telah mencantumkan akuntabilitas pengelolaan risiko, serta dalam pembaharuan Pedoman Manajemen Risiko melalui Peraturan Direksi No. 002 Tahun 2023, telah ditambahkan penjelasan mengenai wewenang dan tanggung jawab Pemilik Risiko (<i>Risk Owner</i>). Ensuring that the job descriptions of all Division/Dept Heads (Risk Owners) include accountability for risk management, as well as in updating the Risk Management Guidelines through Board of Directors' Decree No. 002 of 2023, an explanation has been added regarding the authorities and responsibilities of the Risk Owner.
5.	Dalam penyusunan laporan manajemen semesteran terkait hasil reuiv atas perlakuan risiko melengkapi muatan informasi terkait dengan "Analisis jika ada deviasi hasil perlakuan risiko". In preparing the semiannual management report regarding the results of the review of risk treatment, complete the information content related to "Analysis if there is a deviation in the results of risk treatment".	Dalam Laporan <i>Corporate Risk Profile</i> Semester II Tahun 2022 telah ditambahkan analisis terkait dengan kesesuaian perlakuan risiko yang ditetapkan unit kerja dengan kebijakan perlakuan risiko yang diatur dalam Pedoman Manajemen Risiko sesuai dengan zonasi pada matriks risiko. In preparing the semiannual management report regarding the results of the review of risk treatment, complete the information content related to "Analysis if there is a deviation in the results of risk treatment".

- Mempertimbangkan terdapat perbedaan *tools* tersebut, maka dilakukan pengukuran kembali *Risk Maturity* 2022 oleh pihak internal (*self-assessment*) melalui pengukuran 9 (sembilan) komponen yang mendukung konsistensi pelaksanaan Manajemen Risiko Perseroan. Pengukuran dilakukan oleh Divisi Risk Management & QSSHE Assurance melalui survei kepada seluruh karyawan Perusahaan, FGD dengan Direksi dan Komisaris, serta revidi dokumen Manajemen Risiko yang berlaku di Perseroan. Dari hasil *self assessment* tersebut, Divisi Internal Audit melakukan *Quality Assurance* atas proses pengukuran tersebut demi mendapatkan keyakinan yang memadai atas *self-assessment* yang dilakukan.
- Pada tahun 2022, hasil penilaian kematangan penerapan manajemen risiko oleh pihak internal (*self assessment*) adalah 3,90 dari skala 5,00 yang menunjukkan implementasi manajemen risiko Perseroan berada pada tingkat kematangan *Defined* menuju *Managed*. Capaian tersebut meningkat dari capaian tahun 2021 sebesar 3,81.
- Considering that there are differences in these tools, the internal again conducted measurement (self-assessment) of risk maturity in 2022 by measuring 9 (nine) components that support the consistency of the implementation of the Company's Risk Management. The measurements are carried out by the Risk Management & QSSHE Assurance Division through surveys of all Corporation employees, FGDs with the Directors and Commissioners, as well as reviewing the applicable Risk Management documents in the Corporation. From the results of the self-assessment, the Internal Audit Division carries out Quality Assurance of the measurement process in order to obtain adequate assurance on the self-assessment carried out.
- In 2022, the results of the maturity assessment of the application of risk management by internal parties (self-assessment) is 3.90 out of a scale of 5.00 which indicates the implementation of the Corporation's risk management is at the Defined to Managed maturity level. This achievement increased from the 2021 achievement of 3.81.

Tingkat Kematangan Pada Komponen/Atribut Penerapan MR
Maturity Level of MR Implementation Components/Attributes

No	Komponen/Atribut Penerapan MR Components/Attributes of Implementing MR	Tingkat Kematangan Maturity Level	
		2022 (Internal Self Assessment)	2021 (Konsultan) Consultant
1	Strategi Risiko Risk Strategy	4,45	3,98
2	Selera Risiko Risk Appetite	4,10	3,78
3	Profil Risiko Risk Profile	4,13	3,96
4	Struktur Tata Kelola Governance Structure	4,11	3,77
5	Kebijakan Risiko Risk Policy	4,02	4,01
6	Pemantauan dan Pelaporan Risiko Risk Monitoring and Reporting	3,69	3,81
7	Analisis & Permodelan Risiko Risk Analysis & Modeling	3,85	3,90
8	Budaya Risiko Risk Culture	4,16	4,16
9	Teknologi Risiko Risk Technology	3,85	3,88
Total		3,90	3,81

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Karena perannya yang sangat besar, yaitu sebagai lini pertahanan pertama bagi Perseroan, maka Direksi memberikan perhatian yang sangat besar terhadap penerapan manajemen risiko di Perseroan. Direksi senantiasa melakukan review terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko di lingkungan Perseroan, termasuk juga menilai kecukupan prosedur, mekanisme dan infrastruktur manajemen risiko yang dimiliki Perseroan.

BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS' STATEMENT ON THE ADEQUACY OF RISK MANAGEMENT SYSTEM

Due to its very substantial role as the first line of defense for the Corporation, the Board of Directors pays great attention to the implementation of risk management in the Corporation. The Board of Directors constantly reviews the effectiveness of risk management implementation within the Corporation, including assessing the adequacy of risk management procedure, mechanism, and infrastructure owned by the Corporation.



Perkara Hukum Berdampak Material

Legal Cases with Material Impact

Dalam kurun waktu 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022, tidak terdapat kasus, perkara, dan/atau sengketa hukum yang dihadapi MRT Jakarta (Perseroda) yang berdampak material terhadap Perseroan.

Selama tiga tahun terakhir tidak pernah terjadi perdagangan orang dalam yang melibatkan direksi, komisaris, manajemen dan karyawan. Tidak ada kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi ke pihak berelasi yang signifikan atau material dalam tiga tahun terakhir.

Di dalam Perseroan tidak pernah terjadi pelanggaran hukum apa pun yang berkaitan dengan masalah perburuhan/ketenagakerjaan/konsumen/kepailitan/komersial/persaingan atau lingkungan.

In the period from 1 January 2022 to 31 December 2022, there were no legal cases and/or disputes faced by MRT Jakarta (Perseroda) which had a material impact on the Corporation.

Over the past three years there has been no insider trading involving directors, commissioners, management and employees. There were no cases of non-compliance with laws, rules and regulations relating to transactions to related parties that were significant or material in the last three years.

There have been no violations of any laws relating to labor/ labor/consumer/bankruptcy/commercial/competition or environmental issues within the Company.

Sanksi Administrasi/Sanksi Lain

Administrative Sanctions/Other Sanctions

Dalam kurun waktu 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022, PT MRT Jakarta (Perseroda), Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi tidak pernah menerima sanksi administratif ataupun sanksi lainnya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), regulator dan/atau pihak mana pun.

During the period January 1, 2022 to December 31, 2022, PT MRT Jakarta (Perseroda), Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors have never received administrative or other sanctions from the Financial Services Authority (OJK), regulators and / or any party.



Kode Etik

Code of Conduct

Kode Etik merupakan panduan etika kerja yang menjadi landasan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. MRT Jakarta memiliki Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang disusun untuk ditaati dan dijadikan pedoman seluruh Insan Perseroan dalam berhadapan dengan pemangku kepentingan demi mendorong perilaku Insan Perseroan yang profesional, beretika, serta jauh dari tindakan melanggar hukum.

Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi, SK Nomor 011 Tahun 2020 dan SK Nomor 067 Tahun 2020 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*). Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku dalam jangka panjang secara konsisten diharapkan akan mendorong perbaikan kinerja Perseroan dan meningkatkan citra Perseroan.

Pedoman tersebut juga mengatur hubungan etika kerja antar elemen dalam Perseroan sehingga tercipta hubungan kerja yang dilandasi atas profesionalitas yang diharapkan dapat terus memberikan nilai tambah bagi proses pengelolaan sesuai tujuan Perseroan dan asas kepatutan. Pedoman Etika dan Perilaku PT MRT Jakarta (Persero) dapat diakses di laman PPID MRT Jakarta melalui tautan <https://ppid.jakartamrt.co.id/informasi-berkala/>.

Perseroan juga berkomitmen untuk menerapkan standar yang tinggi tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang dapat menggambarkan praktik-praktik bisnis yang sehat serta penerapan prinsip GCG. Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku merupakan acuan bagi karyawan dan seluruh *stakeholder* yang lain dalam berperilaku di lingkungan kerjanya.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Pedoman Etika dan Perilaku merupakan pernyataan secara tertulis tentang nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan Perseroan, dan menjadi kebijakan serta standar perilaku yang diwajibkan bagi seluruh insan PT MRT Jakarta (Persero), baik anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun karyawan. Perilaku yang ideal wajib dikembangkan berdasarkan nilai-nilai luhur yang diyakini jajaran PT MRT Jakarta (Persero) sesuai dengan budaya Perseroan, meliputi pokok-pokok sebagai berikut.

Aktivitas Politik

1. Perseroan tidak terlibat dan tidak mendukung partai politik mana pun.
2. Perseroan tidak melarang dan tidak mencegah insan PT MRT Jakarta (Persero) melaksanakan haknya memberikan suara dalam pemilihan umum.

The Code of Conduct is a work ethic guide forming the basis for implementing good corporate governance. MRT Jakarta has in place Code of Conduct which is prepared to be obeyed and used as a guideline for all Personnel of the Corporation in dealing with stakeholders to encourage professional, ethical behavior of all Personnel of the Corporation, and far from the acts of violating the law.

The Code of Conduct is stipulated in the Joint Decision of the Board of Commissioners and the Board of Directors Number 011 of 2020 and Number 067 of 2020 concerning Code of Conduct. The Code of Conduct is expected to be implemented consistently in a long term to encourage improvements in the Corporation's performance and enhance the Corporation's image.

The Code of Conduct also regulates the work ethic relationship between elements within the Corporation to create a working relationship based on professionalism which is expected to continuously provide added value to the management process according to the Corporation's goals and the principle of decency. PT MRT Jakarta (Persero) Code of Conducts is accessible on the MRT Jakarta PPID website via the link <https://ppid.jakartamrt.co.id/informasi-berkala/>.

The Corporation is also committed to implementing high standards of the Code of Conduct which can describe healthy business practices and the implementation of GCG principles. The Code of Conduct is a reference for employees and all other stakeholders in behaving in their work environment.

KEY POINTS OF THE CODE OF CONDUCT

The Code of Conduct is a written statement regarding the ethical values that apply within the Corporation, and is a policy and standard of behavior that is mandatory for all PT MRT Jakarta (Persero) personnel, both members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and employees. Ideal behavior must be developed based on noble values that are believed by all ranks of PT MRT Jakarta (Persero) to be in accordance with the Corporation's culture, covering the following points.

Political Activity

1. The Corporation is not involved in and does not support any political party.
2. The Corporation does not prohibit and does not prevent PT MRT Jakarta (Persero) employees from exercising their right to vote in general elections.



3. Perseroan tidak menghalangi setiap insan PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk melakukan aktivitas politik sebagai simpatisan dengan syarat tertentu.
4. Insan PT MRT Jakarta (Perseroda) dapat diperkenankan sebagai calon legislatif hanya dari wakil independen atau DPD, dan setelah penetapannya yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Perseroan.

Aset

- Aset PT MRT Jakarta (Perseroda) digunakan semata-mata untuk operasi Perseroan.
- Penggunaan aset yang melekat pada jabatan harus dikembalikan kepada Perseroan dalam keadaan baik, kecuali ditetapkan lain oleh kebijakan perusahaan.

Benturan Kepentingan

- Perseroan menetapkan situasi-situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada insan PT MRT Jakarta (Perseroda).
- Perseroan mengatur tindakan yang harus dilakukan apabila ada pemasok/kontraktor/ konsultan/pemberi jasa yang sedang/akan melakukan hubungan kerja dengan PT MRT Jakarta (Perseroda), terdapat hubungan keluarga atau mengalami (potensi) benturan kepentingan.

Minuman Keras, Narkoba, Rokok, dan Judi

- Perseroan dan seluruh insan PT MRT Jakarta (Perseroda) berkewajiban menjaga lingkungan kerja maupun area kegiatan PT MRT Jakarta (Perseroda) lainnya bebas dari pengaruh minuman keras dan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang.
- Perseroan menyarankan kepada seluruh insan PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk tidak merokok karena tidak baik untuk kesehatan dirinya dan karyawan di sekitarnya.

Hadiah, Jamuan, dan Donasi

1. Insan PT MRT Jakarta (Perseroda) tidak diperkenankan memberikan, menjanjikan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada dan dari pemasok, kontraktor, konsultan, mitra kerja, pejabat pemerintah, atau pihak ketiga lainnya.
2. Suatu tanda terima kasih dalam kegiatan usaha, seperti hadiah, sumbangan, atau *entertainment* tidak boleh diterima insan PT MRT Jakarta (Perseroda) pada suatu keadaan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut.
3. Pemberian hadiah adalah wajar apabila Perseroan bermaksud memberikan sesuatu kepada pihak ketiga berupa barang tertentu dan dalam kondisi tertentu.
4. Donasi untuk tujuan amal, dalam batas kepatutan dapat dibenarkan, sedangkan untuk tujuan lain boleh dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Setiap bentuk penyyuapan baik dari maupun kepada pihak ketiga atau insan PT MRT Jakarta (Perseroda) merupakan sesuatu perbuatan yang tidak diperkenankan.

3. The Corporation does not prevent every member of PT MRT Jakarta (Perseroda) from carrying out political activities as sympathizers with certain conditions.
4. Individuals of PT MRT Jakarta (Perseroda) may only be allowed as legislative candidates from independent representatives or DPD, and after the determination, those concerned must resign from the Corporation.

Assets

- The assets of PT MRT Jakarta (Perseroda) are used solely for the Corporation's operations.
- Assets whose utilization is attached to a certain position must be returned to the Corporation in good condition, unless otherwise stipulated by corporation policy.

Conflict of Interest

- The Corporation determines situations that can cause a conflict of interest for PT MRT Jakarta (Perseroda) personnel.
- The Corporation regulates the actions that must be taken if a supplier/contractor/consultant/service provider is currently/will have a working relationship with PT MRT Jakarta (Perseroda), has a family relationship or experiences a (potential) conflict of interest.

Alcoholic Beverages, Drugs, Cigarettes and Gambling

- The Corporation and all employees of PT MRT Jakarta (Perseroda) are obliged to keep the work environment and other areas of PT MRT Jakarta (Perseroda) activities free from the influence of alcoholic beverages and drug abuse.
- The Corporation advises all employees of PT MRT Jakarta (Perseroda) not to smoke because it is not good for their health and that of the employees around them.

Gifts, Hospitality, and Donations

1. PT MRT Jakarta (Perseroda) personnel are not permitted to give, promise, or receive, either directly or indirectly, anything of value to and from suppliers, contractors, consultants, work partners, government officials, or other third parties.
2. A token of gratitude in business activities, such as gifts, donations or entertainment, may not be received by PT MRT Jakarta (Perseroda) personnel in a situation that could be considered as an inappropriate act.
3. Gift giving is reasonable if the Corporation intends to give something to a third party in the form of certain goods and under certain conditions.
4. Donations for charitable purposes, within the limits of decency are permissible while for other purposes may be made in accordance with laws and regulations.
5. Any form of bribery either from or to third parties or employees of PT MRT Jakarta (Perseroda) is an act that is not permitted.

Pernyataan Kepatuhan dan Pelanggaran

- Setiap insan PT MRT Jakarta (Persero) akan menandatangani surat pernyataan kepatuhan atas pemberlakuan Kode Etik yang merupakan komitmen bahwa insan PT MRT Jakarta (Persero) secara sungguh-sungguh dan sepakat menerapkan Kode Etik.
- Setiap pelanggaran atas Kode Etik merupakan suatu tindakan yang akan dikenakan sanksi yang ditetapkan Direksi.

SOSIALISASI DAN INTERNALISASI PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU PERSEROAN

Sosialisasi dan internalisasi Pedoman Etika dan Perilaku kepada seluruh karyawan dilakukan dengan membagikan salinan Pedoman Etika dan Perilaku pada saat pertama kali menjabat, dan juga setiap tahunnya melalui berbagai media sosialisasi maupun internalisasi Perseroan. Setiap karyawan kemudian menandatangani pernyataan kepatuhan Pedoman Etika dan Perilaku Perseroan yang dilakukan setahun sekali.

PELANGGARAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU PERSEROAN

Perseroan memberikan sanksi kepada setiap karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku. Sepanjang tahun 2022, terdapat 1 (satu) pelanggaran pedoman etika dan perilaku dari pekerja alih daya. Perseroan telah menyelesaikan penyimpangan tersebut dengan memberikan sanksi berupa surat teguran yang mengacu kepada Peraturan Perusahaan.

Compliance and Violation Statement

- Every employee of PT MRT Jakarta (Persero) is willing to sign a statement of compliance with the implementation of the Code of Conduct which is a commitment that PT MRT Jakarta (Persero) personnel seriously and agree to implement the Code of Conduct.
- Any violation of the Code of Conduct is an action that will be subject to sanctions determined by the Board of Directors.

DISSEMINATION AND INTERNALIZATION OF THE CORPORATION'S CODE OF CONDUCT

Dissemination and internalization of the Code of Conduct to all employees is carried out by distributing copies of the Code of Conduct when they first take office, and also annually through various socialization and internalization media of the Corporation. Each employee then signs a statement of compliance with the Corporation's Code of Conduct which is done once a year.

VIOLATION OF THE CORPORATION'S CODE OF ETHICS AND CONDUCT

The Corporation imposes sanctions on every employee who is proven to have violated the Code Conduct. Throughout 2022, there was 1 (one) violation of the Code of Conduct by outsourced workers. The Corporation has resolved this violation by imposing sanctions in the form of a warning letter referring to the Corporation's Regulations.

Penanganan Laporan Penyimpangan Pedoman Etika dan Perilaku Perseroan Tahun 2022
Handling of Reports of Violations against the Corporation's Code of Conduct in 2022

Bentuk Penanganan Handling Form	Manajemen Management	Karyawan Employees	Bukan Karyawan Non-Employees
Telah diselesaikan Settled	-	-	1
Tidak dapat ditindaklanjuti Cannot be followed-up	-	-	-
Dalam proses penyelesaian internal In internal settlement process	-	-	-
Belum diselesaikan Not Settled	-	-	-
Ditindaklanjuti melalui proses hukum Settled through legal process	-	-	-
Jumlah Total	-	-	1

KAJIAN DAN EVALUASI MANAJEMEN

Manajemen secara konsisten melakukan kajian dalam rangka mengevaluasi kinerja Perseroan, termasuk keterkaitan antara visi, misi, dan budaya Perseroan serta kode etik, dengan rencana jangka panjang dan profil risiko yang dihadapi Perseroan. Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku juga menjadi kajian manajemen untuk menjadi salah satu perangkat evaluasi keorganisasian Perseroan.

MANAGEMENT REVIEW AND EVALUATION

Management consistently conducts reviews in order to evaluate the Corporation's performance, including the synergy between the vision, mission, and the Corporation's culture and code of conduct, with the long-term plan and risk profile faced by the Corporation. The implementation of the Code of Conduct is also a management review to become one of the Corporation's organizational evaluation tools.



Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whistleblowing System)

Whistleblowing System

Demi menjaga dan meningkatkan komitmen Perseroan dalam memerangi praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik, Perseroan menerapkan *Whistleblowing System* (WBS) yaitu suatu media pengaduan atas adanya indikasi tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan MRT Jakarta yang berpotensi merugikan Perseroan baik secara finansial maupun non-finansial.

Penerapan WBS MRT Jakarta dikelola oleh pihak independen dan diawasi oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran Perseroan mengacu kepada Peraturan Direksi No. 018 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran. Penerapan pedoman tersebut telah dilaksanakan secara efektif di Perseroan.

Direksi membentuk Komite WBS yang terdiri dari Kepala Divisi Corporate Secretary, Kepala Divisi Internal Audit, dan Kepala Divisi Risk Management & QSSHE Assurance. Komite WBS antara lain bertugas untuk memberikan saran tindak lanjut atas laporan yang masuk di kanal WBS.

In order to maintain and increase the Corporation's commitment to combating practices that are contrary to the principles of good corporate governance, the Corporation implements a Whistleblowing System (WBS), namely a media for complaints about indications of violations committed by MRT Jakarta personnel which have the potential to harm the Corporation both financially as well as non-financially.

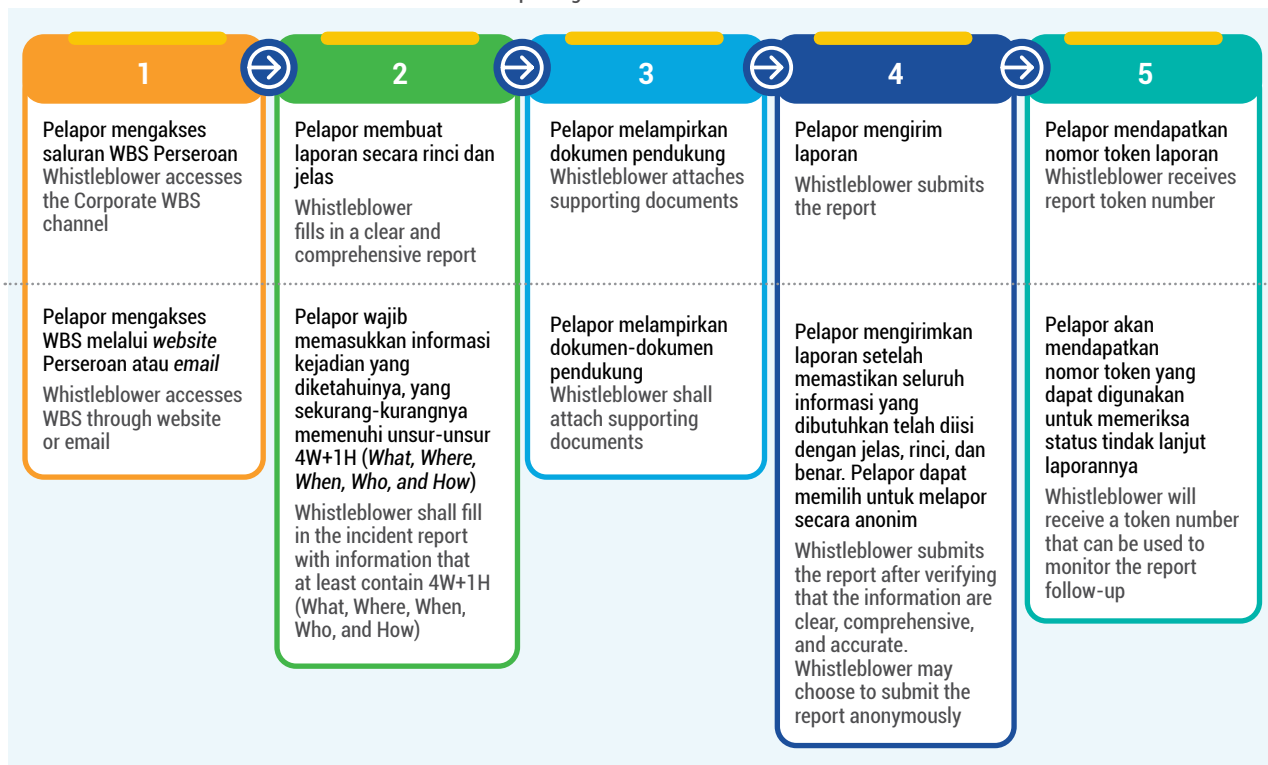
The implementation of the Jakarta MRT WBS is managed by an independent party and supervised by the Board of Commissioners and Directors. Guidelines for the Corporation's Alleged Violation Reporting System refer to Board of Directors' Decree No. 018 of 2022 concerning Guidelines for the Alleged Violation Reporting System. The implementation of these guidelines has been carried out effectively in the Corporation.

The Board of Directors formed a WBS Committee consisting of the Head of the Corporate Secretary Division, the Head of the Internal Audit Division, and the Head of the Risk Management & QSSHE Assurance Division. The WBS Committee, among other things, is tasked with providing follow-up advice on reports that enter the WBS channel.

Ruang Lingkup Pengaduan Dugaan Pelanggaran dan Sarana Pengaduan Whistleblowing Scope and Channel

Jenis Pelanggaran Type of Violations	Hal yang Dilaporkan Matters Reported	Sarana Channel
- Pelanggaran Etika; - Pelanggaran Korupsi; - Pelanggaran Kolusi; - Pelanggaran Nepotisme; - Kecurangan; - Benturan Kepentingan; - Penyuapan; - Pelanggaran Gratifikasi; - Pelanggaran Norma, Ketentuan, dan Peraturan Perseroan; - Pelanggaran Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan; dan - Pelanggaran lain-lain. - Ethical Violations; - Corruption Violations; - Collusion Violations; - Nepotism Violations; - Fraud; - Conflicts of Interest; - Bribery; - Gratification Violation; - Violations of Corporation Norms, Regulations, and Rules; - Violations of Law and Regulations; and; - Other violations.	What: Apa dugaan pelanggaran yang diketahui Pelapor? Where: Di mana perbuatan dugaan pelanggaran tersebut terjadi/dilakukan? When: Kapan perbuatan dugaan pelanggaran tersebut dilakukan? Who: Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan dugaan pelanggaran tersebut? How: Bagaimana perbuatan dugaan pelanggaran tersebut dilakukan? What: What is/was the alleged violation known by the Reporter? Where: Where does/did the alleged violation occur? When: When have the alleged violations happened? Who: Who are/were those involved in the alleged violation? How: How is/was the alleged violation done?	Website: https://whistleblowing.tips/wbs/@mrtjakarta Email: WBS.MRTJakarta@rsm.id

Alur Proses Pelaporan Pelanggaran pada WBS MRT Jakarta
Flow of Reporting Violations at WBS MRT Jakarta



ORGANISASI PELAKSANA SISTEM
PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

ORGANIZATION OF WHISTLEBLOWING
SYSTEM ADMINISTRATOR

Organisasi Pelaksana Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran
Organization of Whistleblowing System Administrator

Organisasi Organization	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Whistleblowing Handling Committee	- Menugaskan Divisi Internal Audit membentuk Tim Penelitian Awal untuk melakukan Audit Investigatif 4W+1H atas laporan WBS. - Menilai laporan Tim Penelitian Awal, apakah telah menjelaskan pemenuhan 4W+1H atau belum untuk dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. - Melaporkan hasil validasi data/informasi laporan sistem pelaporan dugaan pelanggaran kepada Direktur Utama (jika terlapor adalah selain Direksi), Komisaris Utama (jika terlapor adalah Direksi atau Komite Dewan Komisaris), atau Pemegang Saham (jika terlapor adalah anggota Dewan Komisaris) untuk diputuskan, apakah laporan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak. - Mereviu laporan hasil penelitian awal yang dilakukan oleh Tim Penelitian Awal, Tim Audit Investigatif, dan/atau Tim Pemeriksa Eksternal. - Membuat laporan akhir pelaporan sistem pelaporan dugaan pelanggaran dan menyampaikannya kepada Direktur Utama/ Komisaris Utama. - Assigning Internal Audit Division to establish Initial Investigation Team to carry out Investigative Audit 4W+1H for WBS reports. - Assessing the report from Initial Investigation Team, whether it elaborates the fulfillment of 4W+1H or not, to be proceeded to the next step. - Reporting the results of data/information validation from the Whistleblowing System to the President Director (if the reported is not the Board of Directors), President Commissioner (if the reported is the Board of Directors or the Board of Commissioners Committee), or Shareholders (if the reported is the Board of Commissioners), to be decided whether the report can be processed to the next step. - Reviewing the report of initial investigation carried out by Initial Investigation Team, Investigative Audit Team, and/or External Auditor Team. - Creating final report of whistleblowing system report and presenting the report to the President Director/President Commissioner
Divisi Internal Audit Internal Audit Division	- Merupakan Tim Penelitian awal dan Tim Audit Investigatif. - Mengeluarkan surat tugas kepada anggota Divisi Internal Audit yang akan menjadi Tim Penelitian Awal. - Melakukan Audit Investigatif untuk menilai pemenuhan 4W+1H terhadap laporan WBS dan melanjutkan proses Audit Investigatif terhadap laporan WBS yang telah disetujui oleh Direktur Utama/Komisaris Utama/ Pemegang Saham untuk diproses ke tahap selanjutnya. - Membuat laporan hasil Audit Investigatif dan melaporkannya kepada Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran. - Menyusun dan memasukkan anggaran tahunan Tim Pemeriksa Eksternal ke dalam RKAP. - Being the Initial Investigation Team and Investigative Audit Team. - Issuing letter of assignment to the member of Internal Audit Division to be a member of Initial Investigation Team. - Carrying out the Investigative Audit to assess the fulfillment of 4W+1H of the WBS report and proceeding Investigative Audit to WBS reports approved by the President Director/President Commissioner/Shareholder to be processed in the next step. - Creating the report of Investigative Audit results and reporting it to Whistleblowing Handling Committee. - Compiling and including the annual budget of the External Auditor Team to the RKAP.



Organisasi Pelaksana Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran Organization of Whistleblowing System Administrator

Organisasi Organization	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Tim Pemeriksa Eksternal External Auditor Team	- Merupakan pihak independen yang melakukan Audit Investigatif terhadap laporan WBS yang telah memenuhi validasi data atau unsur-unsur 4W+1H dan jika terlapor adalah karyawan Divisi Internal Audit atau jika dibutuhkan oleh Tim Audit Investigatif Divisi Internal Audit. - Merupakan pihak independen yang dibutuhkan keahliannya atau akses khususnya terhadap informasi yang dapat membantu memperlancar Audit Investigatif yang dilakukan Tim Internal Audit. - Membuat laporan hasil Audit Investigatif dan melaporkannya kepada Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran. - Being an independent party to carry out Investigative Audit concerning WBS report that has fulfilled data validation or 4W+1H elements and if the reported is a member of the Internal Audit Division of as required by the Investigative Audit Team of Internal Audit Division. - Being an independent party whose expertise or special access to information is required in order to help the Investigative Audit carried out by the Internal Audit Team. - Creating a report of Investigative Audit results and reporting it to the Whistleblowing Handling Committee.
Direktur Utama President Director	- Mengeluarkan anggota Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran yang merupakan Terlapor dalam laporan WBS dan menunjuk seorang kepala divisi lainnya yang tidak berpotensi terjadi benturan kepentingan dengan terlapor. - Memutuskan apakah laporan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak, dalam hal Terlapor merupakan karyawan Perseroan, berdasarkan laporan dari Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran. - Dismissing the member of Whistleblowing Handling Committee if the relevant member is the reported in WBS Report and appointing another Division Head without potential conflict of interest with the reported. - Deciding whether a report can be processed to the next step, in the event that the reported is an employee of the Corporation, based on the report from the Whistleblowing Handling Committee.
Komisaris Utama President Commissioner	- Memutuskan apakah laporan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak, dalam hal Terlapor merupakan anggota Direksi/anggota Komite Dewan Komisaris yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris, berdasarkan laporan dari Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran. - Deciding whether a report can be processed in the next step, in the event that the Reported is a member of the Board of Directors or a member of the Committee of the Board of Commissioners, based on the report from the Whistleblowing Handling Committee.
Pemegang Saham Shareholders	- Memutuskan apakah laporan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak, dalam hal Terlapor merupakan anggota Dewan Komisaris, berdasarkan laporan dari Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran. - Deciding whether a report can be processed in the next step, in the event that the Reported is a member of the Board of Commissioners, based on the report from Whistleblowing Handling Committee.

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Perseroan berkomitmen melindungi Pelapor dugaan pelanggaran yang beritikad baik, patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan, serta praktik terbaik yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem pelaporan dugaan pelanggaran. Kebijakan perlindungan terhadap pelapor meliputi:

- Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perseroan;
- Perseroan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak mana pun selama Pelapor menjaga kerahasiaan dugaan pelanggaran yang diajukan kepada pihak mana pun;
- Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan pemeriksaan, maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait pengaduan tersebut.

Perlindungan Pelapor juga dimaksudkan untuk mendorong setiap karyawan Perseroan dan Pelapor lainnya untuk berani melaporkan pelanggaran, dan menjadi keamanan Pelapor maupun keluarganya. Perlindungan kepada Pelapor juga ditujukan untuk pencegahan dari tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pembalasan, di antaranya:

- Pemecatan yang tidak adil;
- Penurunan jabatan atau pangkat;
- Pelecehan, dan/atau diskriminasi, dan/atau tekanan, dan/atau intimidasi dalam segala bentuknya;

WHISTLEBLOWER PROTECTION

The Corporation is committed to protecting well-intentioned whistleblowers who comply with the prevailing laws and regulations and the best practices that apply in WBS implementation. Whistleblower protection policy includes:

- The Corporation guarantees the confidentiality of the Whistleblowers' identities;
- The Corporation guarantees protection for Whistleblowers from all forms of threats, intimidations, or unpleasant actions from any party as long as the Whistleblowers maintain the secrecy of the reported violations from any party;
- Protection for Whistleblowers also applies to parties who carry out the investigation and parties who provide information concerning the Report.

Whistleblower protection aims to encourage all employees of the Corporation and other Whistleblowers to have the courage to report violations and to ensure the security of Whistleblowers and their families. The Corporation also provides protection to the Whistleblowers to prevent the arising of issues as follows:

- Unfair dismissal;
- Demotion;
- Harassment and/or discrimination and/or threats and/or intimidation in any form;

4. Catatan yang merugikan dalam dokumen data pribadinya;
5. Perbuatan diskriminasi dalam pengembangan karir di Perseroan;
6. Pelapor mendapatkan proses *counseling/trauma healing* bila dipandang perlu berdasarkan diagnosis Ahli.

4. Adverse records in the personal data documents;
5. Discrimination in terms of career development in the Corporation;
6. Whistleblowers may be provided with counseling/trauma healing process if deemed necessary based on a diagnosis of an Expert.

PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2022 DAN TINDAK LANJUT

Sampai dengan 31 Desember 2022, Perseroan mencatat 10 laporan yang diterima melalui kanal WBS. Perseroan melalui Tim Pengelola WBS dan Komite WBS telah melakukan analisis dan tindak lanjut terhadap aduan tersebut dan menyimpulkan bahwa sebanyak 6 (enam) laporan tidak dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme WBS dikarenakan tidak terkait WBS atau tidak memenuhi unsur 4W+1H (*What, Who, When, Where, dan How*). Selain itu, 1 (satu) laporan telah selesai dengan mekanisme tindak lanjut non-WBS dikarenakan laporan yang disampaikan bukan termasuk pelanggaran, 2 (dua) laporan tidak terbukti, dan 1 (satu) laporan dalam proses tindak lanjut.

VIOLATION REPORTS IN 2022 AND FOLLOW-UP ACTIONS

As of December 31, 2022, the Corporation recorded 10 reports received through the WBS channel. The Corporation through the WBS Management Team and WBS Committee has conducted an analysis and follow-up on the complaint and concluded that as many as 6 (six) reports cannot be followed up through the WBS mechanism because they are not related to WBS or do not fulfill the 4W+1H elements (*What, Who, When, Where, and How*). In addition, 1 (one) report has been completed with a non-WBS follow-up mechanism because the report submitted does not include a violation, 2 (two) reports are not proven, and 1 (one) report is in the follow-up process.

Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Tahun 2022 s/d 31 Desember 2022 Whistleblowing Handling in 2022 until December 31, 2022

Jumlah Pengaduan Number of Reports	Status/Hasil Tindak Lanjut Status/Follow-up Results				
	Tidak Dapat Ditindaklanjuti Cannot be Followed Up	Pengaduan Tidak terkait WBS Reports are not relevant with WBS.	Selesai dengan mekanisme non-WBS Solved with non-WBS mechanism	Tidak Terbukti Unproven	Dalam Proses Tindak Lanjut In Follow-up Process
10	-	6	1	2	1

*Laporan ditindaklanjuti dengan mekanisme non-WBS dikarenakan laporan yang disampaikan bukan pelanggaran
*The report is followed up with a non-WBS mechanism because the report submitted is not a violation





Kebijakan Anti-Korupsi

Anti-Corruption Policy

Perseroan memiliki komitmen kuat membangun budaya anti-korupsi. Perseroan menerapkan larangan suap dan penerimaan hadiah oleh setiap insan Perseroan dalam bentuk apa pun. Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh karyawan Perseroan dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga, dan pihak-pihak lain dengan cara menerima sejumlah imbalan yang bersifat material. Sampai dengan akhir tahun 2022, Perseroan membangun budaya anti-korupsi melalui beberapa cara, di antaranya kerja sama dengan penegak hukum, pengendalian gratifikasi, dan pemenuhan wajib lapor LHKPN.

Komitmen membangun budaya anti-korupsi diperkuat dengan sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diraih Perseroan pada tahun 2020 lalu. Sistem ini mewajibkan seluruh kegiatan Perseroan yang berhubungan dengan pihak ketiga untuk melalui proses uji tuntas terlebih dahulu sebagai langkah mitigasi risiko penyuapan di lingkungan Perseroan. Selain itu, Perseroan juga menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di antaranya dalam hal peningkatan kesadaran anti-korupsi melalui pelaksanaan sosialisasi anti-korupsi dan anti-gratifikasi kepada seluruh insan Perseroan.

KERJA SAMA DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, KEJAKSAAN AGUNG, DAN BPKP

Perseroan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan BPKP, dalam proses mencari kontraktor paket CP 202 dan CP 205 proyek MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI - Kota). Kerja sama dilakukan terkait dengan kesepakatan Pemerintah Indonesia dan Jepang yang akan menunjuk langsung kontraktor. Kesepakatan penunjukan langsung dilakukan karena pada proses lelang sebelumnya untuk paket CP 202 & CP 205 tidak berhasil mendapatkan perusahaan Jepang sebagai pemenang lelang. Pengadaan paket kontrak CP 202 untuk pengerjaan stasiun antara Harmoni - Mangga Besar, CP 205 untuk sistem perkeretaapian dan rel.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Perseroan berkomitmen untuk mematuhi ketentuan pemberian dan penerimaan gratifikasi berdasarkan peraturan Direksi Nomor 27 tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Pedoman ini mengatur batasan-batasan pemberian, penerimaan, dan penolakan gratifikasi oleh Insan MRT Jakarta beserta ketentuan pengendalian gratifikasi di lingkungan Perseroan antara lain tata cara pelaporan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). Pedoman pengendalian gratifikasi telah diunggah ke dalam *website* dan portal internal Perseroan.

The Corporation is committed to build anti-corruption culture. The Corporation prohibits bribery and reception of gifts by all employees of the Corporation in any form. The Board of Directors, the Board of Commissioners, and all employees of the Corporation are prohibited from abusing their position for personal, family, and other parties' interests by receiving material rewards. As of the end of 2022, the Corporation has built anti-corruption culture through various approaches, such as by collaborating with law enforcement officers, gratification control, and LHKPN fulfillment.

The commitment to building an anti-corruption culture is strengthened by the ISO 37001:2016 certification on the Anti-Bribery Management System which the Corporation achieved in 2020. This system requires all of the Corporation's activities related to third parties to go through a due diligence process first as a measure to mitigate the risk of bribery within the Corporation. In addition, the Corporation also cooperates with the Corruption Eradication Commission (KPK), including in terms of increasing anti-corruption awareness through anticorruption and anti-gratification socialization to all Corporation employees.

COLLABORATION WITH CORRUPTION ERADICATION COMMISSION, ATTORNEY GENERAL'S OFFICE, AND BPKP

The Corporation is collaborating with the Corruption Eradication Commission (KPK), the Attorney General's Office, and BPKP, in exploring the contractor for CP 202 and CP 205 of Phase 2A MRT Jakarta project (Bundaran HI - Kota). The collaboration is carried out concerning the agreement between the Government of Indonesia and Japan that will appoint the contractor directly. The agreement for direct appointment is carried out as the bidding process for CP202 & CP205 was failed to obtain a Japanese company as the winner. The procurement for CP 202 contract package covers the station construction between Harmoni and Mangga Besar, while CP 205 covers the railway and track system.

GRATIFICATION CONTROL

The Corporation is committed to complying with the provisions for giving and receiving gratuities based on the Board of Directors' Decree Number 27 of 2022 concerning Guidelines for Gratification Control. This guideline regulates the limits on giving, receiving and rejecting gratuities by MRT Jakarta personnel along with the provisions for controlling gratuities within the Corporation, including the procedures for reporting to the Gratification Control Unit (UPG). Gratification control guidelines have been uploaded to the Corporation's website and internal portal.

Aktivitas pengendalian gratifikasi di Perseroan dilaksanakan oleh UPG yang dibentuk di bawah Divisi Corporate Secretary. Tugas UPG adalah antara lain memantau laporan pemberian, penerimaan, dan penolakan gratifikasi serta pelaksanaan sosialisasi terkait ketentuan pengendalian gratifikasi.

Gratification control activities in the Corporation are carried out by the UPG which was formed under the Corporate Secretary Division. The UPG's duties include monitoring reports on giving, receiving and rejecting gratuities as well as carrying out outreach related to gratuity control provisions.

Hasil Tindak Lanjut Laporan Penerimaan Gratifikasi Tahun 2022
Results of Follow-Up on Gratification Report in 2022

Uraian Description	Jumlah Total
Gratifikasi disalurkan kepada pihak yang membutuhkan • Penerimaan parcel Hari Raya Gratification distributed to the parties who need it • Reception of Eid parcel	6
Gratifikasi diproses oleh internal Perseroan • Penerimaan buah tangan dari mitra Gratification is processed by the internal party of the Corporation • Reception of souvenirs from partner	3
Jumlah gratifikasi Total gratification	9

INFORMASI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

Perseroan memiliki kebijakan melarang pemberian donasi untuk kepentingan politik. Perseroan juga tidak mengizinkan karyawan Perseroan menggunakan fasilitas atau sumber daya apa pun untuk tujuan kampanye politik, penggalangan dana politik, maupun untuk tujuan partisipasi politik. Selama tahun 2022, tidak ada pemberian donasi dalam bentuk apa pun yang ditujukan untuk kepentingan/kegiatan politik.

INFORMATION ON FUNDING FOR POLITICAL ACTIVITIES

The Corporation has a policy that prohibits from providing donations for political purposes. The Corporation prohibits employees of the Corporation from utilizing Corporate facilities or resources for political campaign purposes, political fundraising, or political participation purposes. In 2021, there was no donation made for political activities in any form.

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Perseroan telah memiliki Pedoman Pengelolaan LHKPN yang disahkan berdasarkan Peraturan Direksi No. 048 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Pedoman tersebut mengatur tata cara penyampaian, pengelolaan LHKPN, pejabat di lingkungan PT MRT Jakarta (Persero) yang wajib menyampaikan LHKPN dan sanksi bagi yang tidak melaporkan LHKPN. Berdasarkan Pedoman Pengelolaan LHKPN, pejabat di lingkungan PT MRT Jakarta (Persero) yang wajib menyampaikan LHKPN, yaitu:

1. Dewan Komisaris Perseroan;
 2. Direksi Perseroan;
 3. Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan;
 4. Direksi Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan atau yang setara;
 5. Kepala Divisi Perseroan, Anak Perusahaan, dan/atau Perusahaan Patungan atau yang setara;
- Kepala Departemen Perseroan atau yang setara.

REPORT OF STATE OFFICIALS WEALTH (LHKPN)

The Corporation established Guidelines for the Management of the Report of State Officials Wealth, ratified by Board of Directors' Decree No. 048 Year 2020 concerning the Management of Report of State Officials Wealth. The guidelines regulate delivery procedure and management of the Report of State Officials Wealth, managerial employees in the Corporation who are obliged to submit the report, and sanctions for those who fail to do so. Based on the Guidelines for the Management of the Report of State Officials Wealth, the parties who are obliged to submit the report are as follows:

1. The Board of Commissioners of the Corporation;
2. The Board of Directors of the Corporation;
3. The Board of Commissioners of the Subsidiaries and/or Joint Ventures;
4. The Board of Directors of the Subsidiaries and/or Joint Ventures or equivalent;
5. Division Heads of the Corporation, Subsidiaries, and/or Joint Ventures or equivalent;
6. Department Heads of the Corporation or equivalent.



Pengelolaan LHKPN

LHKPN Administration

Struktur Tim Pengelola LHKPN LHKPN Administration Team Structure

Koordinator LHKPN LHKPN Coordinator	Administrator Instansi Agency Administrator	Administrator Unit Kerja GCG Specialist Work Unit Administrator GCG Specialist
Direktur Keuangan & Manajemen Korporasi Finance and Corporate Management Director	Kepala Divisi Corporate Secretary Corporate Secretary Division Head	GCG Specialist
- Menyelenggarakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Wajib LHKPN; - Mengkoordinasikan semua kegiatan LHKPN bagi seluruh Wajib LHKPN; - Mengarahkan kegiatan LHKPN kepada seluruh Wajib Laporan; - Melaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan LHKPN bagi Wajib LHKPN; - Melaporkan kegiatan pelaksanaan LHKPN bagi Wajib LHKPN kepada Direktur Utama PT MRT Jakarta (Persero). - Conducting Reports of State Officials Wealth (LHKPN) for the Obligees; - Coordinating all Reports of State Officials Wealth (LHKPN) activities to all Obligees; - Directing Reports of State Officials Wealth (LHKPN) activities to all Obligees; - Monitoring and evaluating the implementation of Reports of State Officials Wealth (LHKPN) by the Obligees; - Reporting the implementation of Reports of State Officials Wealth (LHKPN) for the Obliges to the President Director of PT MRT Jakarta (Persero).	- Mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan PT MRT Jakarta (Persero); - Membuat akun admin unit kerja; - Melakukan validasi pembuatan/pemutakhiran daftar Wajib LHKPN ke dalam aplikasi e-LHKPN; - Berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi Wajib LHKPN; - Memberikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN; - Membuat laporan kegiatan pelaksanaan LHKPN di lingkungan PT MRT Jakarta (Persero) kepada Direktur Utama PT MRT Jakarta (Persero); - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator LHKPN yang berkaitan dengan LHKPN bagi seluruh Wajib LHKPN. - Managing e-Reports of State Officials Wealth (e-LHKPN) application in the Corporation; - Creating work unit admin accounts - Validating the creation/ update of List of Obligees into e-LHKPN application; - Coordinating with the Corruption Eradication Commission concerning the management and administration the Reports of State Officials Wealth (LHKPN) Obligees Application; - Socializing the obligation for other duties as assigned by Reports of State Officials Wealth (LHKPN) and technical guidelines on how to fill out and submit of the report; - Reporting the implementation of the Reports of State Officials Wealth (LHKPN) in the Corporation to the President Director of the Corporation; - Carrying out other duties as assigned by Reports of State Officials Wealth (LHKPN) Coordinator related to Reports of State Officials Wealth (LHKPN) for the Obligees.	- Mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Unit Kerja; - Membuat akun wajib LHKPN; - Membuat dan memutakhirkan daftar Wajib LHKPN; - Menyiapkan kelengkapan LHKPN untuk dikirimkan ke KPK; - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator LHKPN yang berkaitan dengan LHKPN bagi wajib LHKPN. - Managing e-Reports of State Officials Wealth (e-LHKPN) applications in the Work Unit; - Creating a mandatory account for Reports of State Officials Wealth (LHKPN) - Preparing and updating the list of Obligees for LHKPN; - Preparing documents of Reports of State Officials Wealth (LHKPN) to be sent to the Corruption Eradication Commission; - Carrying out other duties as assigned by Reports of State Officials Wealth (LHKPN) Coordinator related to Reports of State Officials Wealth (LHKPN) for the Obligees.

Wajib Laporan dan Tingkat Kepatuhan LHKPN

Sesuai Pedoman Pengelolaan LHKPN, Wajib Laporan LHKPN Perseroan periode tahun 2021 yang dilaporkan pada tahun 2022 ada 95 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 110 orang telah memenuhi kewajiban LHKPN. Dengan demikian, tingkat kepatuhan LHKPN mencapai 100%.

Obligees and Compliance Level to LHKPN

In accordance with the LHKPN Management Guidelines, the Corporation's 2021 LHKPN obligees who were reported in 2022 there are 95 employees who must report their wealth. From that amount, 110 employees have fulfilled their obligation to report their wealth. Therefore, the compliance level reached 100%.

Daftar Wajib Lapo LHKPN Tahun 2022
List of LHKPN Obligees in 2022

Wajib LHKPN LHKPN Obligee	Jumlah Wajib Lapo Number of Obligees	Jumlah yang Telah Melaporkan Total Reports	Persentase (%) Percentage (%)
Dewan Komisaris The Board of Commissioners	3	3	100
Direksi The Board of Directors	5	5	100
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	1	1	100
Kepala Divisi dan/atau setara dan Kepala Departemen dan/atau setara Head of Division and/or equivalent and Head of Department and/or equivalent	88	88	100
Pejabat Anak Perusahaan dan/atau Perseroan Patungan Officials of Subsidiaries and/or Joint Ventures	13	13	100
Jumlah Total	110	110	100

SOSIALISASI DAN EDUKASI ANTI-KORUPSI KEPADA KARYAWAN DAN MASYARAKAT

Sebagai upaya meningkatkan pemahaman karyawan tentang budaya Anti-Korupsi, Perseroan pada tahun 2022 melaksanakan pelatihan/sosialisasi anti-korupsi sebagai berikut:

ANTI-CORRUPTION TRAINING/ DISSEMINATION FOR THE EMPLOYEES AND PUBLIC

To improve the understanding of Anti-Corruption culture of the employees, the Corporation carried out anti-corruption trainings/ dissemination as follows:

Tabel Pelatihan/Sosialisasi Anti-Korupsi
Anti-Corruption Trainings/Dissemination Table

No	Pelatihan/Sosialisasi Training/Dissemination	Tanggal Pelaksanaan Date	Pelaksana Organizer
1	Sosialisasi Pengisian dan Pelaporan LHKPN kepada Wajib Lapo Perseroan Dissemination of LHKPN Filling and Reporting to Corporate Compulsory Obligees	18 Januari 2022 January 18, 2022	Komisi Pemberantasan Korupsi Corruption Eradication Commission
2	Sosialisasi Pedoman Etika dan Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) kepada seluruh karyawan Dissemination of the Code of Conduct to all employees	12 Agustus 2022 August 12, 2022	Divisi Corporate Secretary Corporate Secretary Division
3	Sosialisasi Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Pengendalian Gratifikasi, dan WBS kepada seluruh karyawan Dissemination of the Implementation of the Anti-Bribery Management System, Gratification Control, and WBS to all employees	12 September 2022 September 12, 2022	Divisi Risk Management & QSSHE Assurance dan Divisi Corporate Secretary Risk Management & QSSHE Assurance Division and Corporate Secretary Division
4	Sosialisasi <i>Whistleblowing System</i> kepada seluruh karyawan dan perwakilan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan Dissemination of the Whistleblowing System to all employees and representatives of Subsidiaries and Joint Venture Companies	22 November 2022 November 22, 2022	Divisi Corporate Secretary Corporate Secretary Division

MRT Jakarta tidak hanya berupaya membangun dan memperkuat budaya Anti-Korupsi di lingkungan internal, namun juga kepada masyarakat luas dengan menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Perjanjian Kerja sama Nomor CON/023/MRT/IV/2022 tentang Kampanye dan Pendidikan Anti-Korupsi. Dengan adanya kerja sama tersebut, MRT Jakarta menyediakan sarana untuk KPK dalam melakukan kegiatan kampanye anti-korupsi untuk masyarakat. Pada saat yang sama, KPK menyediakan program pengembangan pendidikan Anti-Korupsi untuk karyawan Perseroan. Perseroan juga turut berpartisipasi pada Hari Anti-Korupsi Sedunia 2022 dengan memamerkan jejak jalan pembangunan budaya Anti-Korupsi PT MRT Jakarta (Persero) di Integrity Expo 2022 pada tanggal 10-11 Desember 2022.

MRT Jakarta does not only seek to build and strengthen an Anti-Corruption culture internally, but also to the wider community by collaborating with the Corruption Eradication Commission (KPK) through Cooperation Agreement Number CON/023/MRT/IV/2022 concerning Campaigns and Education Anti-Corruption. With this collaboration, MRT Jakarta provides facilities for the Corruption Eradication Commission in carrying out anti-corruption campaign activities for the community. At the same time, the Corruption Eradication Committee provides an Anti-Corruption education development program for the Corporation's employees. The Corporation also participated in the 2022 World Anti-Corruption Day by exhibiting the trail of PT MRT Jakarta's (Persero) Anti-Corruption culture development at the Integrity Expo 2022 on 10-11 December 2022.



Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

GCG Implementation Assessment

Untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG, Perseroan melakukan asesmen GCG atau pengukuran kualitas penerapan GCG. Perseroan melakukan beberapa jenis asesmen, antara lain:

- Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik berdasarkan Metode Penilaian BPKP Sebagai BUMD, oleh pihak independen yaitu Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta;
- Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG).

PENILAIAN OLEH BPKP

Penilaian dilakukan setiap tahun untuk mengetahui tingkat kecukupan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkup Perseroan. Penilaian telah dilakukan sejak tahun 2015, menggunakan metode penilaian berdasarkan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN.

Pada tahun 2017-2020, penilaian dilakukan secara independen dengan menunjuk Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta sebagai pelaksana penilaian. Pada tahun 2021, Perseroan menerapkan metode *self-assessment* dalam menilai skor GCG, dengan pendampingan dari BPKP. Pada tahun 2022, penilaian kembali dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta berdasarkan permintaan Direksi PT MRT Jakarta (Perseroda). Indikator penilaian mencakup 4 (empat) aspek pengujian dan dilakukan dengan penelusuran kelengkapan dokumen-dokumen, serta wawancara kepada beberapa pihak di internal Perseroan. Hasil penilaian menggunakan skor dengan angka maksimal 100 yang disesuaikan dengan poin-poin kriteria.

Parameter Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Berbasis Penilaian oleh BPKP

1. Komitmen
2. Kebijakan
3. Partisipan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
 - Pemegang Saham
 - Dewan Komisaris
 - Komite Dewan Komisaris
 - Direksi
 - Satuan Pengawasan Internal
 - Sekretaris Perusahaan
4. Pengungkapan Informasi
5. Lainnya

To continuously improve the quality of GCG implementation, the Corporation conducts GCG assessments or measures the quality of GCG implementation. The Corporation conducts several types of assessments, including:

- Assessment of the Implementation of Good Corporate Governance based on the BPKP Assessment Method as BUMD, by an independent party, namely the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), a representative for DKI Jakarta Province;
- Assessment of the Implementation of Good Corporate Governance by The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG).

ASSESSMENT BY BPKP

The assessment is carried out annually to determine the level of adequacy of the implementation of good corporate governance within the scope of the Corporation. The assessment has been carried out since 2015, using an assessment method based on a copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs.

In 2017-2020, the assessment was carried out independently by appointing the BPKP DKI Jakarta Representative as the executor of the assessment. In 2021, the Corporation applies the self-assessment method in assessing GCG scores, with assistance from BPKP. In 2022, a reassessment will be carried out by the DKI Jakarta Provincial BPKP Representative based on the request of the Directors of PT MRT Jakarta (Perseroda). The assessment indicators cover 4 (four) aspects of testing and are carried out by tracing the completeness of documents, as well as interviews with several parties within the Corporation. The results of the assessment use a score with a maximum number of 100 which is adjusted to the criteria points.

Parameters of Good Corporate Governance Implementation Based on Assessment by BPKP

1. Commitment
2. Policy
3. Participant in Good Corporate Governance
 - Shareholders
 - The Board of Commissioners
 - Committee under the Board of Commissioners
 - The Board of Directors
 - Internal Monitoring Unit
 - Corporate secretary
4. Information Disclosure
5. Others

Kualifikasi Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Sangat Baik Very Good	90-100
Baik Good	75-90
Cukup Baik Fair	60-75
Kurang Baik Poor	50-60
Tidak Baik Very Poor	0-50

Quality Qualification of Good Corporate Governance Implementation

Realisasi Penilaian Tahun Buku 2022

Pelaksanaan evaluasi dan penilaian tahun 2022 adalah berdasar Surat Tugas Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta No. ST-1112/PW09/4.2/2022 tentang *Assessment* Penerapan GCG pada PT MRT Jakarta (Perseroda) Tahun 2022 tanggal 7 Desember 2022. Adapun hasil penilaian GCG tahun 2022, Perseroan memperoleh skor 89,91 dengan predikat kualifikasi "Baik". Pencapaian tersebut menurun 0,76 poin dari penilaian tahun 2021 dengan skor 90,67 dan predikat kualifikasi kualitas "Sangat Baik". Penurunan skor terbesar ada pada aspek Dewan Komisaris dan Sekretaris Perusahaan.

Assessment Results for Fiscal Year 2022

The implementation of the evaluation and assessment in 2022 is based on the Letter of Assignment of the DKI Jakarta Province BPKP Representative No. ST-1112/PW09/4.2/2022 concerning Assessment of GCG Implementation at PT MRT Jakarta (Perseroda) Year 2022 dated December 7, 2022. As for the results of the GCG assessment for 2022, the Corporation obtained a score of 89.91 with the qualification title "Good". This achievement decreased 0.76 points from the 2021 assessment with a score of 90.67 and the quality qualification title "Very Good". The score was decrease in the aspect of the Board of Commissioners and Corporate Secretary.

Tabel Penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Tabel of GCG Assessment

Aspek Pengujian Assessment Aspects	2022	2021	2020
Komitmen Commitment	90,73	90,23	91,23
Kebijakan Policy	98,02	93,09	89,97
Pemegang Saham Shareholders	91,28	87,54	91,31
Dewan Komisaris The Board of Commissioners	86,03	89,77	83,74
Komite Dewan Komisaris Committee under the Board of Commissioners	96,67	93,13	93,19
Direksi The Board of Directors	92,66	93,39	92,68
Satuan Pengawas Internal Internal Monitoring Unit	91,73	87,29	85,24
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	85,80	95,02	94,96
Pengungkapan Disclosure	96,21	95,33	95,36
Lainnya Others	60,00	-	-



Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dan Perbandingannya dengan Pencapaian Tahun 2021

Corporate GCG Implementation Assessment Results for Fiscal Year 2022
Compared to the Achievement in 2021

Aspek Pengujian Assessment Aspect	2022				2021
	Bobot Weight	Capaian Aktual Actual Achievement	% Pencapaian % Achievement	Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG Qualification of GCG Implementation Quality	Capaian Aktual Actual Achievement
Komitmen Commitment	15,00	13,61	90,73	Baik Good	13,53
Kebijakan Policy	10,00	9,80	98,02	Sangat Baik Very Good	9,31
Partisipan Tata Kelola Perusahaan yang Baik GCG Participants					
Pemegang Saham Shareholders	24,00	19,17	91,28	Sangat Baik Very Good	21,01
Dewan Komisaris The Board of Commissioners	18,00	14,63	86,03	Baik Good	16,16
Komite Dewan Komisaris Committee under the Board of Commissioners	5,00	4,83	96,67	Sangat Baik Very Good	4,66
Direksi The Board of Directors	14,00	12,05	92,66	Sangat Baik Very Good	13,07
Satuan Pengawas Internal Internal Monitoring Unit	5,00	4,59	91,73	Sangat Baik Very Good	4,36
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	4,00	3,43	85,80	Baik Good	3,80
Pengungkapan Disclosure	5,00	4,81	96,21	Sangat Baik Very Good	4,77
Lainnya Others	5,00	3,00	60,00	Cukup Baik Fair	-
Skor Keseluruhan Total Score	100,00	89,91	89,91	Baik Good	90,67

Tindak Lanjut Rekomendasi Assessment

Follow-up on Assessment Recommendations

Rekomendasi Assessment Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2022

Good Corporate Governance Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year

Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut yang Telah Dilaksanakan/Rencana Tindak Lanjut Follow-up Actions That Have Been Implemented/Follow-up Plans
Kebijakan Policy	
Melakukan peninjauan secara berkala terhadap Pedoman Pengendalian Gratifikasi untuk menjamin bahwa pedoman tersebut masih relevan, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Conduct periodic reviews of the Gratification Control Guidelines to ensure that these guidelines are still relevant, effective and in accordance with applicable regulations.	Pedoman Pengendalian Gratifikasi telah diperbarui dengan Peraturan Direksi Nomor 027 Tahun 2022. Gratification Control Guidelines have been updated with Board of Directors' Decree Number 027 of 2022.
Partisipan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Management	
Pemegang Saham Shareholders	
Menginformasikan secara terbuka adanya perubahan modal ditempatkan pada tahun 2021 Openly inform the amendment to issued and paid-up capital in 2021.	Seluruh rekomendasi tindak lanjut telah disampaikan kepada Pemegang Saham pada tanggal 18 Februari 2022. All follow-up recommendations have been submitted to Shareholders on February 18, 2022.
Menetapkan kriteria sistem penilaian individu atas Dewan Komisaris dan Direksi dan melaksanakan penilaian sesuai kriteria tersebut. Establishing criteria for individual assessment systems for the Board of Commissioners and Directors and carry out assessments according to these criteria.	Seluruh rekomendasi tindak lanjut telah disampaikan kepada Pemegang Saham pada tanggal 18 Februari 2022. All follow-up recommendations have been submitted to Shareholders on February 18, 2022.

Rekomendasi Assessment Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2022
Good Corporate Governance Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year

Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut yang Telah Dilaksanakan/Rencana Tindak Lanjut Follow-up Actions That Have Been Implemented/Follow-up Plans
Mempertimbangkan kembali pendelegasian kewenangan oleh Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris dalam penetapan auditor eksternal yang melaksanakan audit pada PT MRT Jakarta. Reconsidering the delegation of authority by Shareholders to the Board of Commissioners in determining the external auditor to carry out the audit at PT MRT Jakarta.	Seluruh rekomendasi tindak lanjut telah disampaikan kepada Pemegang Saham pada tanggal 18 Februari 2022. All follow-up recommendations have been submitted to Shareholders on February 18, 2022.
Dewan Komisaris The Board of Commissioners	
Mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan. Proposing a candidate for the Board of Directors to the Shareholders according to the policy and applicable criteria.	Menyusun kebijakan dan kriteria seleksi Calon Anggota Direksi. Develop policies and selection criteria for Candidate Members of the Board of Directors.
Melakukan penilaian kinerja Direksi secara individu dan kolegal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham. Carrying out individual and collegial performance assessment of the Board of Directors based on the defined criteria and submit the assessment results to the Shareholders.	Menyusun kebijakan dan kriteria penilaian kinerja Direksi secara individu dan kolegal. Develop policies and criteria for assessing the performance of the Directors individually and collegially.
Menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan kepada seluruh Pemegang Saham saat ada <i>Corporate Action</i> yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris. Menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan kepada seluruh Pemegang Saham saat ada <i>Corporate Action</i> yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris.	Telah disampaikan melalui surat kepada Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 7 Februari 2022. It was submitted by letter to the Governor of DKI Jakarta on February 7, 2022.
Direksi Board of Directors	
Melakukan analisa kebutuhan atas perubahan struktur organisasi khususnya untuk memenuhi mandat Perseroan sebagai pengelola kawasan TOD. Namun juga secara umum perlu dilakukan analisa kebutuhan secara berkala pada setiap unit kerja di organisasi. Analyzing the requirements of organizational structure changes to fulfill the mandate of the Corporation as TOD area developer. However, in general, such analysis is required frequently for each work unit of the organization.	Melakukan kajian terhadap Sistem <i>Grading</i>, Struktur Organisasi dan sistem remunerasi. Conduct a review of the Grading System, Organizational Structure and remuneration system.
Melakukan pembaharuan atas <i>job description</i> sesuai dengan perubahan struktur organisasi dan melakukan sosialisasi atas perubahan <i>job description</i> tersebut. Updating the job description based on the changes to organizational structure and disseminate such changes to the job description.	Melakukan pembaharuan terkait <i>Job Description</i> untuk posisi yang mengalami perubahan struktur dan posisi baru serta menyosialisasikannya. Make updates related to Job Descriptions for positions that have undergone changes in structure and new positions and socialize them.
Melakukan penyusunan Peraturan Direksi terkait penetapan kamus peta kompetensi dan pengembangannya pada PT MRT Jakarta (Persero). Formulating a Board of Directors' Decree concerning the definition of development and competency map of the PT MRT Jakarta (Persero).	Pedoman pengembangan karyawan telah disahkan melalui Peraturan Direksi No. 17 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Karyawan. Employee development guidelines have been ratified through Board of Directors' Decree No. 17 of 2021 concerning Employee Development Guidelines.
Manajemen dalam memperbarui Pedoman Teknologi Informasi agar memuat penetapan Kerangka Kerja yang menjadi dasar Kebijakan Teknologi Informasi perusahaan. In updating the Information Technology Guidelines, the management shall contains the determination of the Framework which forms the basis of the Corporation's Information Technology Policy.	Pembaharuan dan Penyesuaian tata kelola TI berbasis COBIT 2019, berikut penyelarasan IT <i>MasterPlan</i>. Updating and Adjustment of IT governance based on COBIT 2019, along with IT MasterPlan alignment.
Melakukan sosialisasi kebijakan Teknologi Informasi yang telah diperbaharui kepada seluruh jajaran perusahaan dan memastikan setiap jajaran insan MRT memahami atas kebijakan tersebut. Management shall disseminate the updated Information Technology policy to all levels of the Corporation and ensure that every line of MRT personnel understands the policy.	Sosialisasi telah dilakukan melalui Komite IT dan Transformasi Digital. Dissemination has been carried out through the IT and Digital Transformation Committee.
Memasukkan materi pelaporan penerapan sistem teknologi informasi pada materi BOD-BOC atau pelaporan periodik direksi kepada Dewan Komisaris. Incorporate reporting materials on the implementation of information technology systems on BOD-BOC materials or the directors' periodic reports to the Board of Commissioners.	Laporan penerapan sistem teknologi informasi telah disampaikan secara berkala melalui Komite IT dan Transformasi Digital dan Rapat Gabungan (terakhir pada bulan September 2022). Reports on the implementation of information technology systems have been submitted periodically through the IT and Digital Transformation Committee and Joint Meetings (last in September 2022).
Melakukan harmonisasi ketentuan terkait perjalanan dinas Direksi dan Dewan Komisaris dan memastikan keselarasannya dengan peraturan pemerintah terkait. Harmonize regulations related to business trips for the Board of Directors and Board of Commissioners and ensure alignment with relevant government regulations.	Ketentuan perjalanan dinas Direksi dan Dewan Komisaris disusun berdasarkan hasil kajian konsultan eksternal. Provisions for official travel for the Board of Directors and Board of Commissioners are prepared based on the results of external consultant reviews.



Rekomendasi *Assessment* Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2022

Good Corporate Governance Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year

Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut yang Telah Dilaksanakan/Rencana Tindak Lanjut Follow-up Actions That Have Been Implemented/Follow-up Plans
Satuan Pengawas Intern Internal Monitoring Unit Menyusun kajian/analisis beban kerja berdasarkan RKAT secara tertulis serta menyampaikan usulan penambahan pegawai bila hasil kajian/analisis menunjukkan terdapat kekurangan pegawai untuk melaksanakan RKAT. Formulate writtenly a study/analysis of workload based on the RKAT and submit the proposal of additional employees if the results of study/analysis show that there is lack of employees to carry out RKAT. Menyusun pedoman teknis pengawasan, konsultasi, serta prosedur investigasi. Formulate technical guidance of supervision, consultation, and investigation procedures. Menyusun laporan berkala yang berisi <i>executive summary</i> atas kegiatan <i>assurans</i> dan <i>consulting</i> yang telah dilakukan oleh Divisi Internal Audit dalam periode tertentu dan menyampaikannya kepada Direktur Utama. Develop regular report containing the executive summary of assurance and consulting activities by the Internal Audit Division for a certain period and submit the report to the President Director. Menyusun pedoman kendali mutu atas program kerja yang memuat mekanisme <i>review</i> berjenjang, aspek pengelolaan risiko dan aspek pencapaian tujuan perusahaan serta pedoman <i>monitoring</i> tindak lanjut hasil penugasan. Prepare quality control guidelines for work programs that contain tiered review mechanisms, aspects of risk management and aspects of achieving corporate goals as well as guidelines for monitoring the follow-up of assignment results.	Hasil analisa beban kerja telah disampaikan melalui Nota Dinas Divisi <i>Internal Audit</i> No. 58 perihal Pengajuan <i>Manpower Plan</i> Divisi Internal Audit Tahun 2022. The results of the workload analysis have been submitted through the Office Note of the Internal Audit Division No. 58 regarding Submission of the Internal Audit Division's ManPower Plan for 2022. Divisi Internal Audit telah memperbarui prosedur audit dengan Peraturan Direktur Utama No. 001 tahun 2022 tentang Prosedur Teknis Audit Internal di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda). The Internal Audit Division has updated the audit procedures with the President Director Regulation No. 001 of 2022 concerning Internal Audit Technical Procedures within PT MRT Jakarta (Perseroda).
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Memberikan pelatihan kepada Kepala Divisi Corporate Secretary guna menunjang kompetensi yang dipersyaratkan (kehumasan, GRC <i>Integrated</i>). Provide training to the Head of the Corporate Secretary Division to support the required competencies (public relations, GRC Integrated).	Telah dilakukan pelatihan GRC kepada Kepala Divisi Corporate Secretary pada tanggal 18 & 22 Agustus 2022. GRC training was conducted for the Head of the Corporate Secretary Division on 18 & 22 August 2022.
Pengungkapan Disclosure Melakukan pemutakhiran <i>website</i> secara berkala serta menetapkan mekanisme pemantauan atas kecukupan dan kemutakhiran informasi yang disampaikan perusahaan kepada <i>stakeholders</i>. Update the website periodically and establish a monitoring mechanism for the adequacy and updating of information submitted by the Corporation to stakeholders.	Pemutakhiran <i>website</i> telah diatur dalam Peraturan Direksi No. 14 tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan <i>Website</i>. Website updating has been regulated in Board of Directors' Decree No. 14 of 2022 concerning Website Management Guidelines.

PENILAIAN INDEKS PERSEPSI TATA KELOLA

Pada tahun 2022, Perseroan mengikuti penilaian Indeks Persepsi Tata Kelola atau *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dilakukan oleh The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG). Penilaian ini dilakukan berdasarkan kinerja Perseroan tahun buku 2021.

Aspek penilaian CGPI meliputi struktur tata kelola, proses tata kelola, dan hasil tata kelola. Hasil penilaian CGPI berupa rentang skor yang dicapai oleh peserta dengan kategorisasi atas tingkat kualitas implementasi tata kelola perusahaan yang baik dengan menggunakan istilah "Cukup", "Terpercaya", dan "Sangat Terpercaya"

CORPORATE GOVERNANCE PERCEPTION INDEX ASSESSMENT

In 2022, the Corporation participated in the Corporate Governance Perception Index (CGPI) assessment conducted by The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG). This assessment is carried out based on the Corporation's performance for the 2021 fiscal year.

Aspects of the CGPI assessment include governance structures, governance processes, and governance outcomes. The results of the CGPI assessment are in the form of a range of scores achieved by participants with a categorization of the level of quality of implementation of good corporate governance by using the terms "Enough", "Trusted", and "Highly Trusted".

Hasil Penilaian CGPI Tahun 2022 dan Rekomendasi serta Tindak Lanjutnya

Hasil penilaian CGPI tahun 2022 mencapai skor 83,60 dari skala 100, dengan kategori Terpercaya. Pencapaian tersebut meningkat 0,08 poin dari skor hasil penilaian tahun 2021 sebesar 83,52 dari skala 100, dengan kategori "Terpercaya". Dari penilaian yang dilaksanakan, terdapat beberapa rekomendasi dari IICG terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di lingkup Perseroan. Rekomendasi tersebut menjadi bahan penyempurnaan yang ditindaklanjuti implementasinya dalam penerapan tata kelola di lingkup Perseroan.

CGPI Assessment Results in 2022 and the Recommendations and Follow-up Actions

The results of the CGPI assessment 2022 reached a score of 83.60 on a scale of 100, with the Trusted category. This achievement increased by 0.08 points from the 2021 assessment score of 83.52 on a scale of 100, with the "Trusted" category. From the assessment carried out, there were several recommendations from IICG regarding the implementation of good corporate governance within the Corporation. The recommendation became the material for improvement of which the implementation is followed-up in the Company's governance implementation.

Hasil Penilaian Assessment Results

Aspek Pengujian Assessment Aspects	Bobot Weight	Nilai Perseroan Score
Aspek Struktur Tata Kelola Governance Structure	27,98	23,51
Aspek Proses Tata Kelola Governance Process	38,22	31,93
Aspek Hasil Tata Kelola Governance Outcome	33,80	28,16
Nilai Akhir Final Score	100	83,60

Rekomendasi Assessment Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2022 oleh IICG Recommendation of GCG Assessment for Fiscal Year 2022 by IICG

Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut yang Telah Dilaksanakan/Rencana Tindak lanjut Follow-up Implemented/Follow-up Plan
Aspek Struktur Tata Kelola Governance Structure	
1. MRT Jakarta perlu menyusun rancangan struktur organisasi yang sesuai dengan rencana bisnis perusahaan serta memenuhi kekosongan formasi struktur fungsional yang menjadi tanggung jawab Direksi. MRT Jakarta needs to form an organizational structure that is in accordance with the Corporation's business plan and fill the vacancies in the functional structure formation which is the responsibility of the Board of Directors.	Divisi Human Capital telah mengkaji rancangan struktur organisasi MRT Jakarta untuk jangka menengah maupun jangka panjang dengan mempertimbangkan rencana bisnis perusahaan, rencana jangka panjang perusahaan, dan kapabilitas organisasi. The Human Capital Division has reviewed MRT Jakarta's organizational structure design for the medium and long term by taking into account the Corporation's business plan, the Corporation's long-term plan, and organizational capabilities.
2. MRT Jakarta perlu mempertimbangkan dan merespons keberagaman gender di dalam struktur keanggotaan Dewan Komisaris. MRT Jakarta needs to consider and respond to gender diversity in the membership structure of the Board of Commissioners.	MRT Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan keberagaman gender tidak hanya di level operasional, tetapi juga di level manajemen. MRT Jakarta is committed to increasing gender diversity not only at the operational level, but also at the management level.
3. MRT Jakarta perlu mengembangkan struktur dan/atau fungsi khusus yang bertanggung jawab dalam melakukan integrasi dan konsolidasi sistem GRC (Governance, Risk, Compliance) di grup perusahaan. MRT Jakarta needs to develop a special structure and/or function that is responsible for integrating and consolidating the GRC (Governance, Risk, Compliance) system in the Corporation's group.	MRT Jakarta berkomitmen mentransformasikan penerapan GRC yang sebelumnya diterapkan secara silo menjadi GRC Terintegrasi yang penerapannya dipimpin oleh fungsi Divisi Risk Management and QSSHE Assurance, melibatkan lintas fungsi GRACE IT (Governance, Risk, Assurance, Compliance Management, Ethics & Culture, and IT & Security). MRT Jakarta is committed to transforming the implementation of GRC which was previously implemented in silos into an Integrated GRC whose implementation is led by the Risk Management and QSSHE Assurance Division, involving cross-functional GRACE IT (Governance, Risk, Assurance, Compliance Management, Ethics & Culture, and IT & Security).
4. MRT Jakarta perlu melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi perusahaan secara berkala agar di setiap dinamika perubahan yang terjadi secara hati-hati mengeksplorasi tantangan yang muncul, mengelola kerentanan, beradaptasi mengelola perubahan, dan mengambil peluang dengan mengoptimalkan potensi sehingga dapat meraih tujuannya berdasarkan capaian terbaik. MRT Jakarta needs to make regular adjustments to corporate policies and strategies so that in every dynamic change that occurs the Corporation carefully explores emerging challenges, manages vulnerabilities, adapts to manage change, and takes opportunities by optimizing potential in order to achieve its goals based on the best results.	MRT Jakarta menyesuaikan kebijakan dan peraturan-peraturan perusahaan minimal tiga tahun sekali dengan mempertimbangkan perubahan yang terjadi di dalam maupun luar organisasi. Selain itu, strategi dan target yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan juga ditinjau secara berkala untuk mengakomodir perubahan yang berkembang. MRT Jakarta adjusts corporate policies and regulations at least once every three years taking into account changes that occur within and outside the organization. In addition, the strategies and targets set in the Corporation's Long Term Plan are also reviewed periodically to accommodate changes that are developing.



Rekomendasi Assessment Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2022 oleh IICG
Recommendation of GCG Assessment for Fiscal Year 2022 by IICG

Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut yang Telah Dilaksanakan/Rencana Tindak lanjut Follow-up Implemented/Follow-up Plan
Aspek Proses Tata Kelola Governance Process	
1. MRT Jakarta perlu mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk membangun ketangguhan perusahaan melalui program penguatan fundamental dan ketangguhan perusahaan yang terintegrasi dengan grup perusahaan. MRT Jakarta needs to optimize all resources to build corporate resilience through programs to strengthen fundamentals and corporate resilience that are integrated with the Corporation's group.	Insan MRT Jakarta didorong untuk terus berkembang dengan adanya manajemen pengetahuan yang juga didukung oleh program pengembangan individu oleh Divisi <i>Human Capital</i> . MRT Jakarta personnel are encouraged to continue to grow with knowledge management which is also supported by individual development program by the Human Capital Division.
2. MRT Jakarta dapat mempertimbangkan untuk menerapkan pedoman ISO 37000:2021 tentang Governansi Organisasi (<i>Governance of Organization</i>). MRT Jakarta may consider to implement ISO 37000:2021 guidelines on Governance of Organization.	MRT Jakarta akan mempertimbangkan ISO 37000:2021 tentang Governansi Organisasi sebagai salah satu rujukan perseroan dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. MRT Jakarta will consider ISO 37000:2021 concerning Organizational Governance as one of the Corporation's references in implementing Good Corporate Governance.
3. MRT Jakarta perlu mengoptimalkan penerapan konsep ESG (<i>Environmental, Social, and Governance</i>) yang terintegrasi di seluruh lini bisnis dan dievaluasi sehingga memberikan nilai tambah yang berkelanjutan. MRT Jakarta needs to optimize the application of the ESG (Environmental, Social, and Governance) concept which is integrated in all business lines and evaluated so as to provide sustainable added value.	MRT Jakarta berkomitmen untuk mengoptimalkan penerapan ESG dengan telah disahkannya Peta Jalan Keberlanjutan yang mengintegrasikan aspek-aspek keberlanjutan yang relevan di seluruh lini bisnis. MRT Jakarta is committed to optimizing the implementation of ESG with the ratification of a Sustainability Roadmap that integrates relevant sustainability aspects across all business lines.
4. MRT Jakarta perlu mengoptimalkan penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal dalam pelaporan keuangan diantaranya melalui implementasi ICoFR (<i>Internal Control Over Financial Reporting</i>) yang disesuaikan dengan tujuan, sasaran, dan strategi perusahaan. MRT Jakarta needs to optimize the implementation of risk management and internal control in financial reporting, including through the implementation of ICoFR (Internal Control Over Financial Reporting) which is adjusted to the Corporation's goals, objectives and strategy.	Meskipun perseroan belum menerapkan standar <i>Internal Control Over Financial Reporting</i> (ICoFR), Divisi Internal Audit secara berkala melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan perseroan. Even though the Corporation has not yet implemented the Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR) standard, the Internal Audit Division regularly evaluates the Corporation's financial statements.
5. MRT Jakarta dapat mengoptimalkan sistem dan mekanisme pelaporan dan pelanggaran (<i>Whistleblowing System/WBS</i>) dengan mempertimbangkan untuk melakukan adopsi atau menerapkan standar ISO 37002:2021 tentang Sistem Manajemen Pelaporan Pelanggaran. MRT Jakarta can optimize the system and mechanism for reporting and violations (Whistleblowing System/WBS) by considering adopting or implementing the ISO 37002:2021 standard concerning Whistleblowing Management System.	Pedoman WBS yang merupakan dasar penerapan dan pengelolaan WBS perseroan disusun berdasarkan ketentuan maupun panduan yang berlaku secara nasional dan internasional. The WBS guidelines which are the basis for the implementation and management of the Corporation's WBS are prepared based on provisions and guidelines that apply nationally and internationally.
6. MRT Jakarta dapat mengoptimalkan sistem manajemen pengelolaan pengetahuan (<i>knowledge management</i>) secara berkelanjutan yang mendukung ketangguhan Perusahaan dengan menerapkan standar ISO 30401:2018 tentang Sistem Manajemen Pengetahuan (<i>Knowledge Management System</i>). MRT Jakarta can optimize its knowledge management system on an ongoing basis which supports the Corporation's resilience by implementing the ISO 30401:2018 standard concerning Knowledge Management Systems.	Meskipun belum tersertifikasi ISO 30401:2018, penerapan manajemen pengetahuan di perseroan merujuk kepada ISO 30401:2018. Although not yet ISO 30401:2018 certified, the implementation of knowledge management in the Corporation refers to ISO 30401:2018.
7. MRT Jakarta perlu mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk membangun ketangguhan perusahaan melalui program penguatan fundamental dan ketangguhan perusahaan yang terintegrasi dengan grup perusahaan. MRT Jakarta needs to optimize all resources to build corporate resilience through programs to strengthen corporate fundamentals and resilience that are integrated with the Corporation's group.	Insan MRT Jakarta didorong untuk terus berkembang dengan adanya manajemen pengetahuan yang juga didukung oleh program pengembangan individu oleh Divisi <i>Human Capital</i> . MRT Jakarta personnel are encouraged to continue to grow with knowledge management which is also supported by individual development program by the Human Capital Division.
Aspek Hasil Tata Kelola Governance Outcome	
1. MRT Jakarta perlu mengoptimalkan pencapaian kinerja perusahaan yang tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam membangun ketangguhan keuangan dan non keuangan agar tetap tumbuh berkelanjutan. MRT Jakarta needs to optimize the achievement of the Corporation's performance while maintaining the principle of prudence in building financial and non-financial resilience so that the Corporation can continue to grow sustainably.	MRT Jakarta berkomitmen untuk memastikan agar kinerja keuangan dan non keuangan perseroan tumbuh secara berkelanjutan. MRT Jakarta is committed to ensuring that the Corporation's financial and non-financial performances grow in a sustainable manner.
2. MRT Jakarta perlu menumbuhkan budaya tangguh dengan kemampuan untuk cepat beradaptasi dan merespon perubahan serta mengelola tantangan agar dapat menjadi peluang untuk bersaing. MRT Jakarta needs to cultivate a culture of resilience with the ability to quickly adapt and respond to change and manage challenges to become an opportunity to compete.	Situasi VUCA (<i>Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity</i>) mendorong MRT Jakarta secara langsung dan tidak langsung untuk tangguh dalam menghadapi tantangan. Meskipun perseroan terdampak oleh pandemi COVID-19, MRT Jakarta terus berinovasi dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. The VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity) situation encourages MRT Jakarta directly and indirectly to be resilient in facing challenges. Even though the Corporation was affected by the COVID-19 pandemic, MRT Jakarta continues to innovate in maintaining stakeholders' trust.

Rekomendasi Assessment Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2022 oleh IICG
Recommendation of GCG Assessment for Fiscal Year 2022 by IICG

Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut yang Telah Dilaksanakan/Rencana Tindak lanjut Follow-up Implemented/Follow-up Plan
3. MRT Jakarta perlu mengoptimalkan penerapan dan kebijakan, strategi dan program peningkatan kapabilitas perusahaan yang dapat mendukung pengembangan bisnis yang efisien dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, serta menjadikan perusahaan bagian utama dalam ekosistem transportasi. MRT Jakarta needs to optimize the implementation and policies, strategies and programs to increase the Corporation's capabilities that can support efficient business development and sustainable business growth, as well as make the Corporation a major part of the transportation ecosystem.	Berbagai inovasi terus dikembangkan dan diluncurkan dengan semangat meningkatkan standar layanan dan bisnis yang ditawarkan kepada pemangku kepentingan. Various innovations are continuously being developed and launched with the spirit of increasing service and business standards offered to stakeholders.
4. MRT Jakarta perlu mengoptimalkan penerapan budaya risiko yang menyeluruh sehingga menjadi fondasi yang kuat untuk dapat mengoptimalkan potensi dan meraih kinerja yang lebih baik serta pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. MRT Jakarta needs to optimize the implementation of a comprehensive risk culture to make it a strong foundation to optimize potential and achieve better performance and sustainable business growth.	Budaya Risiko Perseroan terus ditingkatkan dengan beragam aktivitas yang dipromosikan seperti penyelenggaraan <i>risk competition</i>, penempatan <i>risk officer</i> di setiap unit kerja, dan simulasi-simulasi tanggap darurat dan bencana yang kerap dijalankan. The Corporation's Risk Culture continues to be enhanced with various activities promoted such as organizing risk competitions, placing risk officers in each work unit, and frequently running emergency and disaster response simulations.
5. MRT Jakarta diharapkan selalu meningkatkan capaian inovasi bisnis perusahaan menjadi yang terbaik tidak hanya pada produk dan layanan namun juga pada proses fungsi pendukung, kinerja organisasi atau strategi sehingga menjadi keunggulan bersaing perusahaan serta menjaga nilai perusahaan untuk tumbuh berkelanjutan. MRT Jakarta is expected to always improve the Corporation's business innovation achievements to be the best not only in products and services but also in process support functions, organizational performance or strategy in order to become a competitive advantage for the Corporation and maintain corporate value for sustainable growth.	MRT Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan inovasi pada proses fungsi pendukung, kinerja, dan strategi organisasi untuk menciptakan keunggulan bersaing yang kuat. MRT Jakarta is committed to increasing innovation in support function processes, performance and organizational strategy to create a strong competitive advantage.

Hasil Penilaian Indeks Persepsi Tata Kelola
CGPI Assessment Results

Tahun Year	Aspek Struktur Tata Kelola Governance Structure		Aspek Proses Tata Kelola Governance Process		Aspek Hasil Tata Kelola Governance Outcome		Nilai Akhir Final Score		Kategori Category
	Capaian Achievement	Bobot Weight	Capaian Achievement	Bobot Weight	Capaian Achievement	Bobot Weight	Capaian Achievement	Bobot Weight	
2022	23,51	27,98	31,93	38,22	28,16	33,80	83,60	100,00	Terpercaya Trusted
2021	29,72	35,41	30,15	36,17	23,65	28,42	83,52	100,00	Terpercaya Trusted
2020	22,52	27,10	30,06	36,31	30,40	36,59	82,98	100,00	Terpercaya Trusted

Pencapaian dan Perkembangan Hasil Penilaian Indeks Persepsi Tata Kelola
Achievement and Development of CGPI Assessment Results

2022	2021	2020
83,60	83,52	82,98
Terpercaya Trusted	Terpercaya Trusted	Terpercaya Trusted



Akses Informasi dan Data Perseroan

Corporate Information and Data Access

MRT Jakarta secara berkala memperbarui informasi dan memberikan kemudahan akses informasi mengenai aktivitas dan kinerja Perseroan kepada *Stakeholders* sesuai Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Perseroan memberikan akses kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi publik terkait PT MRT Jakarta (Perseroda), melalui:

- Situs www.jakartamrt.co.id.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) <https://ppid.jakartamrt.co.id/>
- Sekretaris Perusahaan di Kantor Pusat Perseroan
- Media sosial

MRT Jakarta regularly updates information and provides easy access to information regarding the Corporation's activities and performance to Stakeholders in accordance with Law (UU) No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. The Corporation provides access to stakeholders to obtain public information regarding PT MRT Jakarta (Perseroda), through:

- Website www.jakartamrt.co.id.
- Information Management and Documentation Officer (PPID) <https://ppid.jakartamrt.co.id/>
- Corporate Secretary at the Corporation's Head Office
- Social media

INSTAGRAM



mrtjkt & mrtjktinfo

TWITTER



@mrtjakarta

FACEBOOK



MRT Jakarta

YOUTUBE



MRTv

WEBSITE



jakartamrt.co.id

TIKTOK



@mrtjakarta

TATA KELOLA INFORMASI DAN AKSES DATA PERSEROAN UNTUK PIHAK EKSTERNAL

Pengelolaan Web

Perseroan telah memiliki situs (web) resmi yang menyediakan berbagai kanal informasi tentang PT MRT Jakarta (Perseroda), serta fitur layanan untuk pengguna jasa MRT Jakarta. Perseroan memperbarui situs dengan informasi terkini kepada publik. Situs Perseroan juga menyediakan informasi nomor kontak, serta alamat surat elektronik dan alamat pos yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan untuk berkomunikasi dengan Perseroan. Selama tahun 2022, situs Perseroan telah diakses 1.227 pengunjung.

Media Sosial

Perseroan memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi kepada publik. Keberadaan media sosial juga dimanfaatkan untuk interaksi dengan pemangku kepentingan. Media sosial yang dimiliki Perseroan sangat beragam, yaitu Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, dan TikTok. Beragamnya media sosial Perseroan dimaksudkan untuk membentuk jejaring dengan lebih banyak *audiens*/pengikut, sehingga informasi yang disampaikan dapat diketahui lebih banyak kalangan. Secara keseluruhan selama tahun 2022, media sosial Perseroan memiliki 619.236 *audiens*/pengikut.

CORPORATE DATA ACCESS AND INFORMATION GOVERNANCE FOR EXTERNAL PARTIES

Website Management

The Corporation has set up an official website that provides various information channels on the PT MRT Jakarta (Perseroda), and features for MRT Jakarta passengers. The Corporation periodically updates the website with the latest information for the public. The Corporation also states contact number and email and postal address that can be leveraged by the stakeholders to communicate with the Corporation. In 2022, the Corporate website has been accessed by 1,227 visitors.

Social Media

The Corporation utilizes social media to convey information to the public. The existence of social media is also used for interaction with stakeholders. The Corporation owns various social media, such as Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, and TikTok. The Corporation set up various social media to reach wider audience so that the information can be accessed by more people. In 2022, the Corporate social media accounts have overall audience of 619.236 followers.

Media Sosial Perseroan dan Jumlah Audiens/Pengikut
Corporate Social Media and Number of Followers

Media Sosial Social Media	Instagram	Twitter	Facebook	Youtube	LinkedIn	TikTok
Pengikut Followers	339.857	83.898	71.689	25.764	60.167	37.861

Dalam rangka mengukur efektivitas kegiatan edukasi dan promosi yang dilakukan melalui media sosial, tahun 2022 Perseroan melakukan pengukuran *brand awareness index* dan *social media engagement index*. Selain sebagai sarana untuk mengukur efektivitas program, pengukuran ini juga ditujukan untuk menentukan langkah perbaikan program ke depan.

Brand Awareness Index 2022

Brand Awareness Index tahun 2022 ditujukan untuk melihat pelaksanaan berbagai kegiatan Komunikasi perusahaan dari sisi saluran komunikasi, strategi, dan aktivitas bagi masyarakat, penumpang, ataupun *stakeholders* lainnya. Penelitian ini melihat periode kegiatan komunikasi perusahaan selama tahun 2021 di mana juga mempunyai berbagai tantangan untuk dapat tetap sesuai dengan *Key Performance Index* (KPI) perusahaan. Konsep pada penelitian ini disesuaikan dengan tahun sebelumnya memiliki 4 dimensi, yaitu *Unaware of Brand*, *Brand Recall*, *Brand Recognition*, dan *Top of Mind*. Metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data survei dengan instrumen kuesioner secara daring dan juga pendekatan dalam penelitian menggunakan kuantitatif. Pengambilan data dilakukan selama 7 hari, mulai 12-18 Desember 2022 dengan pemilihan Teknik pengambilan sampel *cluster* domisili atau wilayah DKI Jakarta (Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat), Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Penentuan jumlah sampel responden yang dibutuhkan menggunakan rumus Slovin dari populasi Jabodetabek sebesar 25.246.832 dengan margin error 5% maka minimal sampel yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 400 responden. Responden yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 977 orang (*response rate* 100% dari target 400 orang responden).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Brand Awareness Index* PT MRT Jakarta (Perseroda) 2022 dengan nilai indeks dari setiap dimensi yaitu *Unaware of Brand* sebesar 86,5%, *Brand Recall* sebesar 87,1%, *Brand Recognition* sebesar 84,4%, dan *Top of Mind* sebesar 87,6% (dari 100%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Brand Awareness Index* 2022 PT MRT Jakarta (Perseroda) memiliki nilai indeks 86,50% (dari 100%) yang dapat diartikan *Brand Awareness* MRT Jakarta pada tahun 2022 ini berada pada kategori Baik.

Social Media Engagement Index 2022

Social Media Engagement Index ditujukan untuk mengukur berbagai upaya PT MRT Jakarta (Perseroda) di media sosial yang berkaitan dengan *engagement* di media sosial perusahaan setelah 1 (satu) tahun melayani masyarakat sebagai operator transportasi publik dan serta melihat efektivitas dari strategi yang sudah dilakukan berdasarkan evaluasi pada tahun 2021.

In order to measure the effectiveness of educational and promotional activities carried out through social media, in 2022 the Corporation measured the brand awareness index and social media engagement index. Aside from being a means to measure program effectiveness, this measurement is also intended to determine future program improvement steps.

Brand Awareness Index 2022

The 2022 Brand Awareness Index is intended to see the implementation of various corporate communication activities in terms of communication channels, strategies and activities for the public, passengers or other stakeholders. This research looks at the period of corporate communication activities during 2021 which also has various challenges to be able to stay in line with the Corporation's Key Performance Index (KPI). The concept in this research is adjusted to the previous year which has 4 dimensions, namely Unaware of Brand, Brand Recall, Brand Recognition, and Top of Mind. The research method uses survey data collection techniques with online questionnaire instruments and also approaches in research using quantitative. Data collection was carried out for 7 days, from 12-18 December 2022 by selecting the domicile cluster sampling technique or the DKI Jakarta area (North Jakarta, South Jakarta, East Jakarta, West Jakarta, Central Jakarta), Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi. Determining the required number of respondent samples using the Slovin formula from a Jabodetabek population of 25,246,832 with a 5% margin of error, the minimum sample required in this study is 400 respondents. Respondents involved in this study amounted to 977 people (response rate of 100% of the target of 400 respondents).

The results showed that PT MRT Jakarta (Perseroda) Brand Awareness Index 2022 with index values from each dimension, namely Unaware of Brand of 86.5%, Brand Recall of 87.1%, Brand Recognition of 84.4%, and Top of Mind of 87.6% (out of 100%). The results of the research show that PT MRT Jakarta's (Perseroda) Brand Awareness Index 2022 has an index value of 86.50% (out of 100%) which can be interpreted as MRT Jakarta's Brand Awareness in 2022 is in the Good category.

Social Media Engagement Index 2022

The Social Media Engagement Index is intended to measure the various efforts of PT MRT Jakarta (Perseroda) in social media related to engagement on the Corporation's social media after 1 (one) year of serving the community as a public transportation operator and also see the effectiveness of the strategies that have been carried out based on evaluations on 2021.



Konsep yang digunakan dalam *Social Media Engagement Index* adalah konsep *Social Media Engagement* yang memiliki 3 dimensi, yaitu *Utilitarian*, *Hedonic*, dan *Social*. Pengukuran ini dapat menjadi tolok ukur untuk mengukur seberapa efektif strategi komunikasi perusahaan di media sosial, dan bagaimana strategi yang akan diambil setelahnya.

Penelitian ini menggunakan metode survei yang dilaksanakan secara daring dengan periode penelitian selama 14 Desember - 21 Desember 2021, dengan pemilihan teknik pengambilan *Simple random sampling* yaitu kepada populasi masyarakat yang mengikut media sosial MRT Jakarta. Target responden berjumlah 399 orang berdasarkan penggunaan rumus slovin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Social Media Engagement Index* MRT Jakarta 2022 memiliki nilai indeks dari setiap dimensi *Utilitarian* sebesar 87,2%, *Hedonic* sebesar 80,2%, dan *Social* sebesar 76,3% (skala 1-10). Hasil pengukuran akhir menunjukan bahwa *Social Media Engagement Index* 2022 MRT Jakarta memiliki nilai indeks 81,2% yang dapat diartikan *Social Media Engagement Index* 2022 MRT Jakarta pada *category* Baik.

Siaran Pers/Rilis Media dan Hubungan Media

Perseroan juga menggunakan media massa sebagai mitra untuk menyebarkan informasi publik kepada khalayak, melalui siaran pers/rilis media. Sepanjang tahun 2022, Perseroan menerbitkan siaran pers yang disebarkan kepada media massa, baik media cetak, media elektronik maupun media online. Pengungkapan informasi mengenai siaran pers/rilis media pada tahun 2022, dapat diakses melalui <https://jakartamrt.co.id/siaran-pers>.

Kunjungan Lapangan

Perseroan memberikan akses bagi kunjungan lapangan atau *site visit* kepada para pemangku kepentingan sebagai bentuk edukasi moda transportasi MRT Jakarta. Kunjungan lapangan diharapkan dapat memberikan perspektif menyeluruh tentang MRT Jakarta. Selama tahun 2022, terdapat 70 kunjungan publik ke fasilitas milik Perseroan, baik dari pemerintah, organisasi, instansi, komunitas, maupun akademisi.

The concept used in the *Social Media Engagement Index* is the *Social Media Engagement* concept which has 3 dimensions, namely *Utilitarian*, *Hedonic*, and *Social*. This measurement can be a benchmark for measuring how effective the Corporation's communication strategy is on social media, and what strategy will be taken afterwards.

This study used a survey method which was carried out online with a research period of 14 December - 21 December 2021, with the selection of the Simple random sampling technique, namely the population of people who follow MRT Jakarta social media. Target respondents amounted to 399 people based on the use of the Slovin formula.

The results showed that the MRT Jakarta *Social Media Engagement Index* 2022 has an index value for each dimension of *Utilitarian* at 87.2%, *Hedonic* at 80.2%, and *Social* at 76.3% (scale 1-10). The final measurement results show that the *Social Media Engagement Index* 2022 MRT Jakarta has an index value of 81.2% which can be interpreted as the *Social Media Engagement Index* 2022 MRT Jakarta is in the Good category.

Press Releases/Media Releases and Media Relations

The Corporation also uses the mass media as a partner to disseminate public information to the public, through press releases/media releases. Throughout 2022, the Corporation issued press releases which were distributed to the mass media, both print media, electronic media and online media. Disclosure of information regarding press releases/media releases in 2022, can be accessed via <https://jakartamrt.co.id/siaran-pers>.

Site Visit

The Corporation provides access to field visits or site visits to stakeholders as a form of education on the Jakarta MRT transportation mode. The field visit is expected to provide an overall perspective on MRT Jakarta. During 2022, there were 70 public visits to the Corporation's facilities, both from the government, organizations, agencies, communities and academics.



Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Information and Communication Technology (ICT) Governance

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi faktor yang sangat penting dalam dunia usaha saat ini. Hampir tak ada bisnis yang dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan TIK. Demikian juga dengan MRT Jakarta. Keberadaan dukungan TIK sangat menentukan keberlanjutan bisnis Perseroan.

Perseroan mengembangkan sistem TIK untuk mendukung bisnis Perseroan termasuk dalam hal pelayanan dan operasional, sehingga mampu meningkatkan level produktivitas dan efisiensi, meminimalkan risiko, serta meningkatkan sistem keamanan, terlebih dalam pelaksanaan kebijakan integrasi transportasi Jabodetabek. Untuk itu, Perseroan telah melakukan investasi yang cukup besar dalam pengembangan sistem TIK agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan usaha dan keberlanjutan Perseroan.

Information and communication technology (ICT) has become a very important factor in today's business world. Almost no business can run well without ICT support. Likewise with MRT Jakarta. The existence of ICT support greatly determines the sustainability of the Corporation's business.

The Corporation has developed an ICT system to support the Corporation's business, including in terms of services and operations, to be able to increase the level of productivity and efficiency, minimize risks, and improve security systems, especially in the implementation of the Jabodetabek transportation integration policy. For this reason, the Corporation has made a sizable investment in the development of the ICT system so that it can provide great benefits for the Corporation's business development and sustainability.

Martidocs

Pada tahun 2022, Perseroan aktif mengembangkan *platform e-office* sebagai salah satu quick wins dalam transformasi digital yang telah dicanangkan sebelumnya. Sejak tahun 2017, Perseroan telah memiliki *platform e-office* yang berfungsi sebagai alat pengiriman nota dinas (*interoffice memo*). Namun, seiring dengan perkembangan zaman, Perseroan membutuhkan *platform e-office* yang lebih komprehensif, sehingga pada tahun 2022 dikembangkan Martidocs, sebagai pembaharuan dari *e-office* lama, dengan menambahkan 2 (dua) fitur utama, yakni tanda tangan digital, bekerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), dan surat masuk beserta disposisinya. Martidocs akan digunakan secara menyeluruh pada tahun 2023.

In 2022, the Corporation was actively developing the e-office platform as one of the quick wins in digital transformation that was previously announced. Since 2017, the Corporation has had an e-office platform that functions as an interoffice memo delivery tool. However, along with the times, the Corporation needs a more comprehensive e-office platform, so that in 2022 Martidocs developed it, as a renewal of the old e-office, by adding 2 (two) main features, namely digital signatures, in collaboration with Balai Electronic Certification (BSrE) of the State Crypto and Cyber Agency (BSSN), and incoming letters and dispositions. Martidocs will be fully used by 2023.

KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN TIK

Regulasi kebijakan TIK Perseroan:

1. Surat Edaran Kementerian Informasi dan Komunikasi No. 05/SE/M.Kominfo/07/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi bagi Penyelenggara Pelayanan Publik;
2. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada BUMD di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta;
3. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 007 Tahun 2021 dan No. 043 Tahun 2021;
4. Peraturan Direksi No. 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi; dan
5. Keputusan Direksi No. 16 Tahun 2022 tentang Komite Teknologi Informasi dan Transformasi Digital.

TUJUAN KEBIJAKAN TIK PERSEROAN

1. Untuk melakukan tata kelola TIK yang benar, sesuai dengan standar;
2. Untuk melaksanakan transformasi digital pada seluruh proses bisnis menuju *go green*;
3. Untuk penerapan ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)/*Information Security Management*.

ICT POLICIES AND INSTITUTION

Policies concerning Corporate ICT:

1. Circular Letter of the Ministry of Information and Communication No.5/SE/M.Kominfo/07/2011 concerning the Implementation of Information Security Governance for Public Service Providers;
2. Decree of the Governor of DKI Jakarta Province No. 96 Year 2004 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in ROEs of the Government of DKI Jakarta Province;
3. Joint Decision Letter of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. 007 of 2021 and No. 043 Year 2021;
4. Board of Directors' Decree No. 13 of 2019 concerning Management of Information Technology; and
5. Board of Directors Decision Letter No. 16 of 2022 concerning the Information Technology and Digital Transformation Committee.

CORPORATE ICT POLICIES AIMS TO:

1. Conduct proper ICT governance based on the standard;
2. Carry out Digital Transformation in all business processes towards Go Green;
3. Implement ISO 27001:2013 Information Security Management.



CAKUPAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN TIK

1. Pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi;
2. Menerapkan fungsi pengelolaan manajemen risiko, yaitu perencanaan, penilaian, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko;
3. Pengembangan sistem perangkat lunak umum dan khusus;
4. Pemeliharaan dan dukungan untuk operasional sistem informasi;
5. Kepemilikan perangkat keras (*hardware*);
6. Ketentuan dan prosedur penggunaan perangkat aset Perseroan;
7. Keamanan teknologi informasi;
8. Rencana Pemulihan Kebencanaan (*Disaster Recovery Plan*);
9. Pengelolaan Keberlangsungan;
10. Pengelolaan Data;
11. Pengendalian Kualitas layanan;
12. Pengelolaan Teknologi dan Informasi anak usaha.

TANTANGAN PENGEMBANGAN TIK TAHUN 2022

Dalam melakukan pengembangan TIK di tahun 2022, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi MRT Jakarta, antara lain:

1. Pemenuhan personel dalam tim IT untuk dapat memenuhi fungsi IT secara menyeluruh dengan tugas yang *dedicated* dan tidak tumpang tindih yang berpotensi terjadinya *conflict of interest*;
2. Kecukupan anggaran untuk berjalannya kegiatan IT dari *hardware*, *software*, *manpower* hingga keamanan IT;
3. Dengan kurangnya *manpower*, IT bekerja sama dengan penyedia jasa *software house* untuk dapat memenuhi layanan jasa pembuatan, operasional dan perawatan aplikasi/*software*.

STRATEGI PENGEMBANGAN TIK

Strategi pengembangan Sistem Informasi pada Aplikasi dan Infrastruktur TIK, mengacu Peraturan Direktur No. 13 Tahun 2019 tentang Perihal Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi di Lingkungan PT MRT Jakarta (Persero). Pengembangan TIK untuk kebutuhan operasional, maupun korporasi dilaksanakan oleh Divisi Information System & Technology (IST).

ICT IMPLEMENTATION AND DEVELOPMENT COVERS:

1. Information technology development and management
2. Implementation of risk management function, i.e. planning, assessment, measurement, monitoring, and risk control;
3. General and specific software system development;
4. Information system operational maintenance and support;
5. Hardware ownership;
6. Provisions and procedures of Corporation asset utilisation;
7. Information technology security;
8. Disaster Recovery Plan;
9. Sustainability Management;
10. Data Management;
11. Service Quality Control;
12. Subsidiary Information and Technology Management.

ICT DEVELOPMENT CHALLENGES IN 2022

In carrying out ICT development in 2022, MRT Jakarta faced a number of challenges, including:

1. Fulfillment of personnel in the IT team to be able to fulfill IT functions as a whole with dedicated and non-overlapping tasks that have the potential for conflict of interest;
2. Sufficient budget for running IT activities from hardware, software, manpower to IT security;
3. With a lack of manpower, IT works together with software house service providers to be able to provide services for making, operating and maintaining applications/software.

ICT DEVELOPMENT STRATEGY

Development Strategy of Information System in ICT Application and Infrastructures refers to the Board of Directors' Decree No. 13 Year 2019 concerning Guidelines for Information Technology Management in PT MRT Jakarta (Persero). ICT Development for operational and corporate purposes is carried out by Information System & Technology (IST) Division.

Peta Jalan Pengembangan TIK Perseroan
Corporate ICT Development Roadmap

2022	2023	2024	2025
• Pengembangan ulang Dokumen Tata Kelola TI • Pengembangan Dokumen Tata Kelola Data • Migrasi <i>Data Center</i> Utama Wisma Nusantara ke Lebak Bulus • Solusi sementara Replikasi Data • Pengembangan infrastruktur <i>Data Lake (Phase-1)</i> • Pengembangan & Pemeliharaan (<i>Update</i>) Arsitektur Data • Re-development of IT Governance Documents • Data Governance Document Development • Migration of Wisma Nusantara Main Data Center to Lebak Bulus • Data Replication temporary solution • Development of Data Lake infrastructure (<i>Phase-1</i>) • Data Architecture Development & Maintenance (<i>Update</i>).	• Pengembangan Dokumen • Tata Kelola & Manajemen Data • Pengembangan Unit Kerja "<i>Data Management dan Analytic</i>" • Pengembangan Detail <i>Data Center 2</i> • Migrasi replikasi data sementara ke replikasi data tetap • Pengembangan infrastruktur <i>Data Lake (Phase-2)</i> • Penetapan standar SDLC • Persiapan dan perencanaan Pengembangan DevSecOps • Document Development • Governance & Data Management • Development of the "<i>Data Management and Analytic</i>" Work Unit • Data Center Detail Development 2 • Migration of temporary data replication to persistent data replication • Development of Data Lake infrastructure (<i>Phase-2</i>) • SDLC standard setting • DevSecOps Development preparation and planning	• Pengembangan infrastruktur <i>Data Lake (Phase-3)</i> • Pengembangan dan Pemeliharaan Dokumen Arsitektur Aplikasi Detail • Pengembangan DevSecOps • Pengembangan aplikasi-aplikasi bisnis • <i>Data Security & Privacy Audit & Enhancement</i> • Development of Data Lake infrastructure (<i>Phase-3</i>) • Development and Maintenance of Detailed Application Architecture Documents • DevSecOps development • Development of business applications • Data Security & Privacy Audit & Enhancement	• Pengembangan infrastruktur <i>Big Data Analytic & Machine Learning</i> • Persiapan Pengembangan infrastruktur <i>Artificial Intelligence</i> • Pengembangan dan Pemeliharaan Dokumen Arsitektur Aplikasi Detail • Pengembangan aplikasi-aplikasi bisnis Berkelanjutan • Development of Big Data Analytic & Machine Learning infrastructure • Preparation for Artificial Intelligence infrastructure development • Development and Maintenance of Detailed Application Architecture Documents • Development of Sustainable business applications

PEMANTAUAN DAN EVALUASI TIK

Pemantauan dan evaluasi penerapan dan pengembangan TIK dilakukan dengan melibatkan Audit Internal, sedangkan rencana audit TIK eksternal akan dilakukan pada tahun 2022 bersamaan dengan *assessment* dan kajian penyesuaian tata kelola TIK. Proses audit internal mencakup penerapan SMKI yang merujuk pada ketentuan ISO/IEC 27001:2013 *Information Security Management System* dan Kebijakan Keamanan Informasi Departemen Information System & Technology Management PT MRT Jakarta (Persero).

Perseroan telah menyusun rencana pengembangan *Disaster Recovery Center* sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen *IT Master Plan* Periode 2022-2025. Sejalan dengan rencana tersebut, di tahun 2023, Unit Kerja IT fokus pada pengembangan *Data Center 2* atau DRC. Langkah tersebut merupakan langkah lanjutan dimana pada tahun 2022 sudah memulai dengan pemindahan *Data Center* utama yang berada di Kantor Pusat yakni Gedung Wisma Nusantara ke Depo Lebak Bulus. Adapun rencana berikutnya melalui kerjasama dengan *Cloud Provider* untuk penyediaan *Data Center 2* (DRC) tentunya dengan mempertimbangkan faktor geografis atau jarak yang cukup jauh dan tetap berlokasi di dalam kawasan negara Indonesia yang menjadi parameter penting dalam penentuan *Data Center 2*.

Di tahun 2022, Perseroan juga telah melakukan *assessment IT maturity* berbasis COBIT 2019 dan memperoleh skor 2,30 (skala 5,0). Untuk itu, Perseroan akan melakukan hal-hal berikut agar dapat meningkatkan skor *assessment* COBIT di tahun-tahun mendatang:

1. Perkuatan Tim Komite IT dan Transformasi Digital dengan memasukkan Unit Kerja IT sebagai anggota tetap.
2. Memperkuat Fungsi Komite dengan penambahan beberapa tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan evaluasi & pengarahannya peran dan kinerja Unit Kerja IT, penerapan tata laksana IT, keselarasan pemahaman antara IT dan proses bisnis serta isu-isu strategis IT.
3. Perkuatan Unit Kerja IT dengan penambahan sub unit kerja IT dalam mendukung kebutuhan IT *Business Partner*, IT *Resource Planning*.
4. Dalam Mendukung kegiatan operasional dan pemantauan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), perlu dibentuk komite dan tim dalam memonitor & mengelola keamanan informasi, serta tim penanggulangan insiden dan keberlangsungan bisnis IT.

KINERJA TRANSFORMASI DIGITAL

Dalam proses percepatan implementasi transformasi digital pada tahun 2022, MRT Jakarta telah menetapkan adanya Komite Teknologi Informasi dan Transformasi Digital beserta Tim Transformasi Digital PT MRT Jakarta (Persero) yang memiliki tugas untuk mengawasi dan mengoordinir terlaksananya implementasi transformasi digital.

ICT MONITORING AND EVALUATION

Monitoring and evaluation of ICT implementation and development are carried out by engaging Internal Audit, while ICT External Audits will be carried out in 2022 along with ICT governance assessment and adjustment study. The internal audit process covers SMKI implementation that refers to ISO/IEC provisions 27001:2013 *Information Security Management System* and Information Security Policies of Information System & Technology Management Department of the Corporation.

The Company has prepared a Disaster Recovery Center development plan in accordance with the IT Master Plan document for the 2022-2025 period. In line with this plan, in 2023, IT Work Unit will focus on developing Data Center 2 or DRC. This step is a follow-up of the step started in 2022 with the relocation of the main Data Center from the Head Office in Wisma Nusantara Building to Lebak Bulus Depot. The next plan is to collaborate with a Cloud Provider in the provision of Data Center 2 (DRC), by considering geographical factor or considerable distance and the location that is still within the territory of Indonesia as an important parameter in determining Data Center 2.

In 2022, the Company also conducted an IT maturity assessment based on COBIT 2019 and obtained a score of 2.30 (scale of 5.0). For this reason, the Company will do the following in order to increase the COBIT assessment score in the coming years:

1. Strengthening the IT and Digital Transformation Committee Team by including the IT Work Unit as a permanent member.
2. Strengthening the Function of the Committee by adding several tasks and responsibilities related to the evaluation & direction of the role and performance of IT Work Unit, implementation of IT governance, alignment of understanding between IT and business processes and IT strategic issues.
3. Strengthening the IT Work Unit by adding IT sub-unit to support the needs of IT Business Partners, IT Resource Planning.
4. In supporting operational and monitoring activities of the Information Security Management System, it is necessary to form a committee and team to monitor & manage information security, as well as incident response team and IT business continuity.

DIGITAL TRANSFORMATION PERFORMANCE

In the process of accelerating the implementation of digital transformation in 2022, MRT Jakarta established an Information Technology and Digital Transformation Committee along with the PT MRT Jakarta (Persero) Digital Transformation Team which has the task of supervising and coordinating the implementation of digital transformation.



Pelaksanaan implementasi transformasi digital tersebut telah dituangkan ke dalam Pedoman Pengelolaan Inisiatif Digital PT MRT Jakarta (Persero).

Portofolio transformasi digital PT MRT Jakarta (Persero) pada tahun 2022 telah menghasilkan 52 inisiatif digital yang dimonitor dan tersebar di seluruh direktorat. 52 inisiatif digital tersebut terbagi ke dalam 4 kategori: (1) *Increase NFB Revenue*, (2) *Strengthen Operational Capability*, (3) *Upgrade Customer Experience*, (4) *Enhance TOD Socio-economic Impact*. 54% inisiatif digital dari seluruh inisiatif tahun 2022 telah selesai diimplementasikan, 8% dibatalkan, dan 39% inisiatif digital lainnya masih dilanjutkan implementasinya sampai tahun 2023.

Pada tahun 2022, MRT Jakarta juga telah melakukan asesmen IT Maturity dengan menggunakan framework COBIT 2019 (*Control Objectives for Information Technologies*), di mana MRT Jakarta mendapat skor 2,30.

Etika Penyebaran Informasi Non-Publik

Perseroan menekankan pentingnya etika penyebaran informasi non-publik oleh karyawan Perseroan. Segenap karyawan diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan semua informasi non-publik mengenai Perseroan, serta yang berkaitan dengan pengguna jasa, mitra, maupun pihak lainnya yang diperoleh selama bekerja di Perseroan. Pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang dilakukan, baik pada masa bakti karyawan maupun masa purnabakti.

Seiring dengan operasional Perseroan yang memerlukan pelayanan data dan informasi terkini, sampai dengan akhir tahun 2022, Divisi IST terus memperbaharui sistem keamanan informasi, termasuk keamanan informasi non-publik. Divisi IST juga memastikan keamanan/privasi data pengguna jasa berjalan dengan baik. Selama tahun 2022, Perseroan tidak pernah menerima pengaduan terkait dugaan penyebaran informasi non-publik oleh internal Perseroan untuk kepentingan pihak tertentu (*insider trading*). Perseroan juga tidak pernah menerima pengaduan terkait dugaan kebocoran maupun penyalahgunaan data pengguna jasa oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Transparansi Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Tidak Baik

Selama tahun 2022, Perseroan tidak pernah mendapatkan laporan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang tidak baik terkait:

1. Laporan atas aktivitas perseroan yang mencemari lingkungan;
2. Pengungkapan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK);
4. Kasus terkait dengan pekerja;
5. Informasi tentang pengungkapan segmen operasi pada Laporan Keuangan;
6. Kesesuaian buku Laporan Tahunan dan Laporan Tahunan digital.

The implementation of the digital transformation has been outlined in the PT MRT Jakarta (Persero) Digital Initiative Management Guidelines.

PT MRT Jakarta (Persero)'s digital transformation portfolio in 2022 has resulted in 52 digital initiatives that are monitored and spread across all directorates. The 52 digital initiatives are divided into 4 categories: (1) *Increase NFB Revenue*, (2) *Strengthen Operational Capability*, (3) *Upgrade Customer Experience*, (4) *Enhance TOD Socio-economic Impact*. 54% of all digital initiatives from all 2022 initiatives have been implemented, 8% have been cancelled, and 39% of other digital initiatives are still being continued to be implemented until 2023.

In 2022, MRT Jakarta also conducted an IT Maturity assessment using the COBIT 2019 (*Control Objectives for Information Technologies*) framework, where MRT Jakarta received a score of 2.30.

Ethics of Non-Public Information Disclosure

The Corporation emphasises the importance of ethics for non-public information disclosure by the employees of the Corporation. All employees are required to maintain the confidentiality of non-public information of the Corporation and all information related to passengers, partners, and other parties obtained while working for the Corporation. Disclosure of such confidential information to any third parties is prohibited, whether during or after the employees' tenure in the Corporation.

In line with the operations of the Corporation that require the most recent data and information service, as of the end of 2022 the IST Division constantly updates the information safety system, including non-public information safety. IST Division also ensures the data safety/privacy of the passengers. In 2022, the Corporation did not receive any complaint concerning allegation of non-public information disclosure by an internal party of the Corporation for the interests of certain parties (*insider trading*). The Corporation did not receive any complaint on passengers data leak nor passengers data abuse by irresponsible parties.

Transparency of Bad Corporate Governance Practices

During 2022, the Corporation never received reports of bad corporate governance practices related to:

1. Reports on the Corporation's activities that pollute the environment;
2. Disclosure of fulfillment of tax obligations;
3. Discrepancies in the presentation of the Annual Report and Financial Statements with the applicable regulations and Financial Accounting Standards (SAK);
4. Cases related to employees;
5. Information on disclosure of operating segments in the Financial Statements;
6. Conformity of Annual Report books and digital Annual Reports.





06

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Social and Environmental
Responsibility

Komitmen untuk menjalankan pengembangan usaha yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, MRT Jakarta juga sangat memperhatikan aspek sosial dan lingkungan sebagai wujud tanggung jawab Perseroan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

MRT Jakarta is committed to not only carrying out business activities that is oriented towards economic aspect, but also pays close attention to social and environmental aspects as a form of the Company's responsibility in supporting sustainable development.



MRT Jakarta berkomitmen untuk menjalankan pengembangan usaha yang memberikan dampak positif secara ekonomi, sosial dan lingkungan bagi masyarakat. Terlebih dengan status sebagai Perusahaan Daerah yang kepemilikannya berada di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, MRT Jakarta memiliki tanggung jawab moral untuk mewujudkan hal tersebut.

MRT Jakarta is committed to conducting business development that has a positive economic, social, and environmental impact on the community. Especially with its status as a Regional Company owned by the Provincial Government of DKI Jakarta, MRT Jakarta has a moral responsibility to embody the commitment.



Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibility Governance

Berlandaskan pada komitmen tersebut, MRT Jakarta secara konsisten telah menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Perseroan berupaya untuk turut berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan kapasitasnya melalui program TJSL yang dijalankan secara konsisten.

Pembahasan terkait kegiatan TJSL dan program pembangunan berkelanjutan yang dijalankan Perseroan dapat dilihat secara lengkap pada Laporan Keberlanjutan yang dibuat dalam buku yang terpisah namun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

Dalam aktivitas transportasi ramah lingkungan, MRT Jakarta melaksanakan program TJSL sebagai bentuk pertanggungjawaban akan keberadaan Perseroan kepada seluruh pemangku kepentingan. Hal ini tak lepas dari kesadaran MRT Jakarta untuk memperhatikan dampak dan pengaruh atas kegiatan usaha serta operasional yang berhubungan langsung dengan pemangku kepentingan khususnya adalah lingkungan, masyarakat, karyawan, dan konsumen.

Pada tahun 2022, melalui kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan, MRT Jakarta mendorong terciptanya inovasi dengan membangun infrastruktur yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam penyusunan strategi, pelaksanaan program, sampai dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TJSL MRT Jakarta mengacu pada ISO 26000 serta mewujudkan nilai-nilai keberlanjutan yang tertuang di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). MRT Jakarta telah melakukan pemutakhiran Peta Jalan Keberlanjutan Perseroan 2022-2030, yang menjadi landasan dalam pelaksanaan program TJSL dan strategi keberlanjutan selaras dengan rencana jangka panjang perusahaan (RJPP).

Perseroan memastikan dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Program TJSL MRT Jakarta berada di bawah tanggung jawab Divisi Corporate Secretary, Departemen Corporate Communication. Tugas dan tanggung jawab Departemen Corporate Communication meliputi penyusunan penentuan pilar TJSL perseroan, perencanaan program TJSL, pelaksanaan program TJSL, serta melakukan pemantauan dan evaluasi atas terlaksananya program TJSL.

Based on this commitment, MRT Jakarta has consistently implemented social and environmental responsibility ("TJSL") programs. The Corporation actively participates in efforts to realize sustainable development in accordance with its capacity through a consistent implementation of TJSL programs.

Information regarding TJSL activities and sustainable development programs carried out by the Corporation can be seen completely in the Sustainability Report which is prepared separately yet still an integral part of this Annual Report.

In environmentally friendly transportation activities, MRT Jakarta implements TJSL program as a form of the Corporation's responsibility to all stakeholders. This cannot be separated from MRT Jakarta's awareness to be attentive to the impact and influence of business and operational activities that are directly related to stakeholders, and especially to the environment, community, employees, and customers.

In 2022, through social and environmental responsibility activities, MRT Jakarta encouraged the creation of innovations by building resilient, inclusive, and sustainable infrastructure. In preparing the strategy, implementing the program, up to monitoring and evaluating the implementation of TJSL, MRT Jakarta refers to ISO 26000 and realizes the sustainability values contained in the Sustainable Development Goals (SDGs). MRT Jakarta has updated the 2022-2030 Corporation's Sustainability Roadmap, which is the foundation for implementing the TJSL program and sustainability strategy in line with the Corporation's long-term plan (RJPP).

The Corporation ensures that in carrying out all business activities it complies with applicable laws and regulations. MRT Jakarta's TJSL program is under the responsibility of the Corporate Secretary Division, Corporate Communication Department. This Department is responsible for preparing the determination of the Corporation's TJSL pillars, TJSL program planning and TJSL program implementation, as well as for monitoring and evaluating the implementation of TJSL programs.

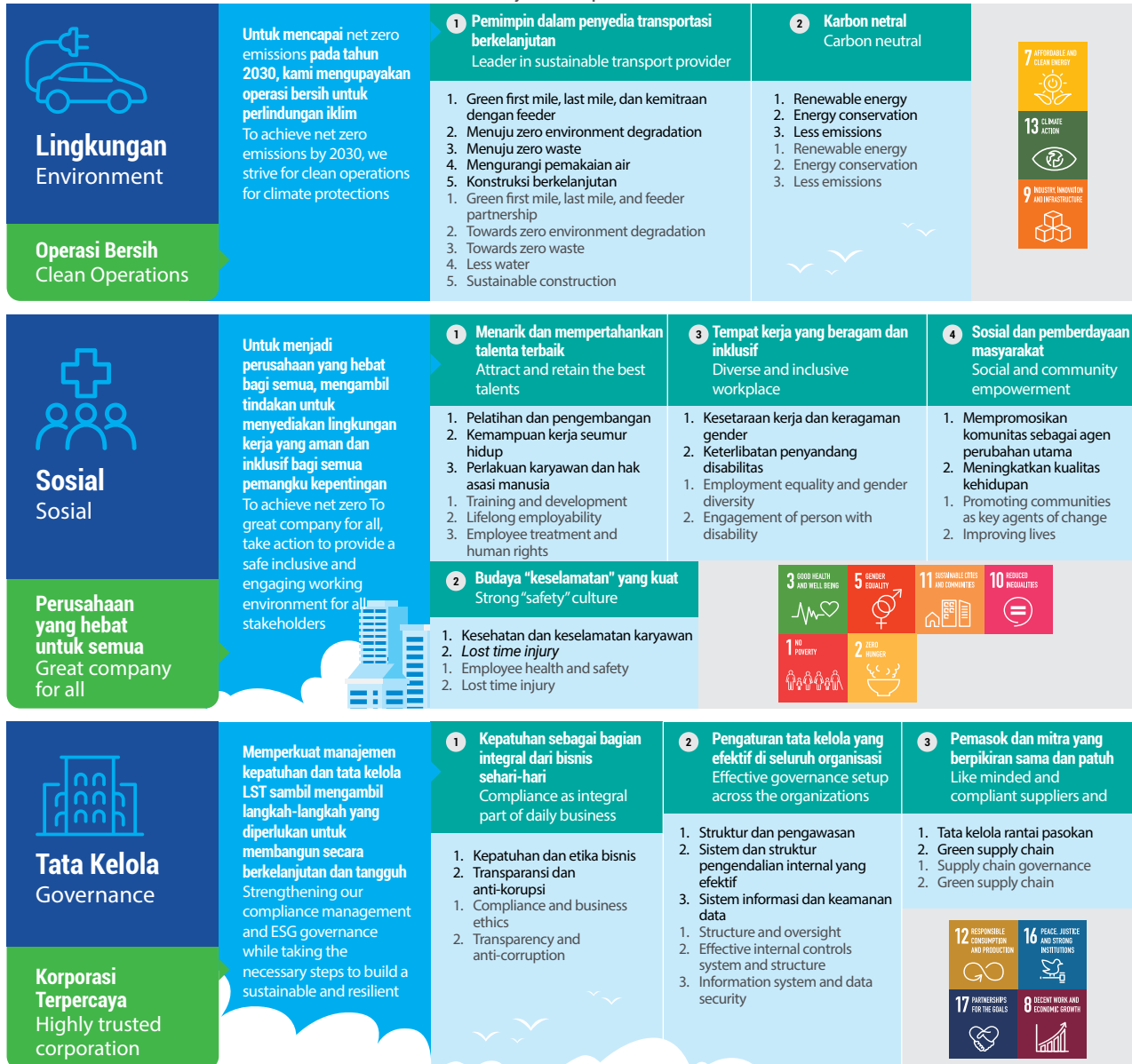
Strategi Pelaksanaan Program TJSL

Dalam menjalankan program TJSL, Perseroan mengacu pada peta jalan keberlanjutan tahun 2022 - 2030 yang telah dimutakhirkan melalui Peraturan Direksi No. 015 Tahun 2022. Penetapan target pencapaian berdasarkan prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) yang menjadi komitmen Perseroan dalam menyusun inisiatif strategis sampai dengan tahun 2030.

TJSL Program Implementation Strategy

In carrying out the TJSL program, the Corporation refers to the 2022 - 2030 sustainability roadmap which has been updated through the Board of Directors' Decree No. 015 of 2022. The determination of achievement targets based on environmental, social and governance (ESG) principles is the Corporation's commitment to developing strategic initiatives up to 2030.

Peta Jalan Keberlanjutan Tahun 2022 - 2030
Sustainability Roadmap in 2022 - 2030



● Komitmen Commitment
 ● Misi Mission
 ● Tujuan Goal
 ● Inisiatif Strategis Strategic Initiative
 ● Kesesuaian dengan TPB Alignment with SDG



Pilar Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan inisiatif keberlanjutan sesuai dengan peta jalan keberlanjutan tahun 2022-2030. Fokus inisiatif keberlanjutan khususnya pada bidang pemberdayaan masyarakat dijalankan melalui program TJSL yang dijalankan Perseroan, yakni sebagai berikut:

1. Program Pendidikan, Keagamaan, Kebudayaan, dan Infrastruktur;
2. Program Kesehatan Masyarakat;
3. Program Lingkungan Hidup; dan
4. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Manajemen Bencana.

Biaya Program TJSL

Salah satu wujud komitmen MRT Jakarta terhadap program TJSL adalah dengan menyediakan anggaran untuk pelaksanaan program TJSL. Setiap tahun Perseroan menyediakan anggaran program TJSL yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan namun dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan. Sepanjang tahun 2022, MRT Jakarta telah merealisasikan dana program TJSL sebesar Rp798.568.727. Anggaran kegiatan TJSL Perseroan mengacu pada ketentuan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Divisi *Corporate Secretary*.

Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Program TJSL

Proses mekanisme dan evaluasi program TJSL perseroan tertuang pada Peraturan Direksi No. PER/039/BOD-MRT/IX/2020 tentang Pedoman Pemberian Dana *Sponsorship* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda). Adapun proses penerimaan mitra TJSL sesuai dengan kelayakan dan kriteria yakni suatu badan usaha, yayasan, atau perorangan yang mempunyai visi dan misi untuk mendukung kegiatan CSR yang berkelanjutan, tidak berafiliasi pada partai politik tertentu, bebas dan bersih dari isu penyuapan atau negatif lainnya. dalam jangka waktu 3 tahun terakhir, dan memiliki rekening bank yang sah sesuai dengan ketentuan. Pada proses evaluasi, Perseroan membuat analisa atas pelaporan pelaksanaan kegiatan CSR, serta memberikan rekomendasi atas isu-isu yang diterima oleh pihak penerima CSR, untuk menjadi perbaikan ke depan, serta mengevaluasi hasil publikasi atas kegiatan CSR yang dilaksanakan perseroan.

Social and Environmental Responsibility Program (TJSL) Pillars

The Corporation was committed to implementing sustainability initiatives through the 2022-2030 sustainability roadmap. The focus of sustainability initiatives, especially in the field of community empowerment through the Corporation's TJSL program, which is as follows:

1. Education, Religion, Culture and Infrastructure Programs;
2. Community Health Program;
3. Environmental Program; and
4. Community Empowerment and Disaster Management Program.

TJSL Program Budget

One manifestation of MRT Jakarta's commitment to the TJSL program is by providing a budget for the TJSL program implementation. Every year the Corporation provides a budget which is adjusted to the needs but still considering the Corporation's financial condition. Throughout 2022, MRT Jakarta has realized TJSL program funds of Rp798,568,727. The Corporation's TJSL activity budget refers to the Corporation's Work Plan and Budget of the Corporate Secretary Division.

TJSL Program Monitoring and Evaluation Mechanism

Mechanism and evaluation of the Corporation's TJSL program is stated in the Board of Directors' Decree No. PER/039/BOD-MRT/IX/2020 concerning Guidelines for Providing Sponsorship and Corporate Social Responsibility (CSR) Funds in PT MRT Jakarta (Perseroda). The process of accepting TJSL partners is in accordance with the eligibility and criteria stated by the Corporation, such as a business entity, foundation, or individual who has a vision and mission to support sustainable CSR activities, is not affiliated with a particular political party, is free and clean from bribery or other negative issues, and within the last 3 years has a valid bank account in accordance with the regulations. In the evaluation process, the Corporation analyzes the report on the implementation of CSR activities and provides recommendations on issues received by CSR beneficiaries for future improvements and evaluates the results of the publication of CSR activities carried out by the Corporation.

Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Hidup

Responsibility to the Environment

Kegiatan usaha yang dijalankan MRT Jakarta secara tidak langsung bersentuhan dengan lingkungan hidup. Namun demikian, Perseroan meyakini bahwa berbagai aktivitas yang dijalankan Perseroan juga dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Berlandaskan pada kesadaran tersebut, MRT Jakarta memiliki komitmen untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan senantiasa memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup dalam kegiatan bisnis dan operasional, berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan mengevaluasi setiap kebijakan terkait pelestarian lingkungan hidup, dengan melakukan identifikasi, kontrol, dan menghindari atau meminimalisir penggunaan bahan material yang dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. MRT Jakarta memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha dan operasional Perseroan telah melalui proses yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk menjaga tingkat emisi karbon yang berdampak pada polusi udara dan pemanasan global.

Sebagai bentuk kepedulian akan pentingnya memerangi pemanasan global, serta mendukung TPB, MRT Jakarta berkomitmen penuh untuk terus berupaya menjalankan kegiatan usaha yang ramah lingkungan. Di samping itu, MRT Jakarta juga melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan hidup yang salah satunya adalah dengan melakukan penanaman pohon dan kegiatan lainnya.

Aktivitas Pelestarian Lingkungan

Sampai akhir tahun 2022, MRT Jakarta melaksanakan pembangunan Fase 2A, salah satunya adalah pembangunan CP202 Fase 2A. Selama proses pembangunan CP202 MRT Jakarta Fase 2A, terdapat 550 pohon terdampak yang terdiri atas 517 pohon yang akan diganti dengan 5.170 pohon pengganti, serta 33 pohon akan direlokasi demi pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Sebanyak 5.170 pohon pengganti tersebut akan ditanam kembali di area kebun bibit Srengseng Sawah Jakarta Selatan milik Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Demikian juga 33 pohon relokasi ditanam di area yang sama yaitu kebun bibit Srengseng Sawah Jakarta Selatan milik Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.

Upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan saat Fase konstruksi 2A berlangsung, di antaranya:

1. Merelokasi penemuan dari benda cagar budaya seperti *terracotta*, *tram rail* dan tugu jam di kawasan Thamrin;
2. Penanaman tanaman pengganti untuk pohon terdampak di lokasi Kebun Bibit Lebak Bulus, Ruang Terbuka Hijau Andara, Srengseng Sawah, dan Plaza Selatan Monas;

The business activities conducted by MRT Jakarta are not directly related with the environment. However, the Corporation believes that various activities carried out by the Corporation may also have a negative impact on the environment. Based on this awareness, the Corporation is committed to always preserving the environment by always paying attention to environmental balance in business and operational activities, subject to applicable laws and regulations.

The Corporation evaluates every policy related to environmental preservation, by identifying, controlling, and avoiding or minimizing the use of materials that can have a negative impact on the environment. The Corporation ensures that all the Corporation's business and operational activities have gone through processes in accordance with applicable rules and regulations, including maintaining the level of carbon emissions that have an impact on air pollution and global warming.

As a form of concern for the importance of fighting global warming as well as supporting SDGs, MRT Jakarta is fully committed to continuously striving for environmentally friendly business activities. In addition, The Corporation also carries out environmental preservation activities, one of which is by planting trees and other activities.

Environmental Preservation Activities

Up to the end of 2022, MRT Jakarta conducted Phase 2A construction, one of which is the construction of CP202 Phase 2A. During the construction process of MRT Jakarta Phase 2A CP202, there were 550 affected trees consisting of 517 trees that would be replaced by 5,170 new trees, and 33 trees that would be relocated for sustainable environmental preservation. A total of 5,170 new trees will be replanted in South Jakarta's Srengseng Sawah nursery area belonging to the DKI Jakarta Parks and City Forest Service. Likewise, 33 relocated trees were planted in the same area, namely the South Jakarta's Srengseng Sawah seed garden belonging to the DKI Jakarta City Parks and Forest Service.

Environmental preservation efforts carried out during the phase 2A construction implementation include:

1. Relocation of cultural heritage objects such as terracotta, tram rails and clock monuments in the Thamrin area;
2. Planting of new plants for affected trees at Lebak Bulus Nursery, Andara Green Open Space, Srengseng Sawah, and Monas South Plaza;



3. Merelokasi sumur resapan yang akan terkena dampak proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 2A;
 4. Mempersyaratkan uji emisi bagi kendaraan proyek untuk memenuhi standar yang berlaku;
 5. Melakukan survei awal terhadap gedung-gedung sekitar proyek dengan tujuan mengetahui kondisi gedung sebelum kegiatan, yang diperkirakan akan terkena dampak konstruksi seperti keretakan dan lainnya;
 6. Melakukan pemantauan secara berkala kepada kondisi kualitas udara, kebisingan, getaran, air tanah, dan air permukaan serta biota air dan biota darat;
 7. Melakukan pemantauan terhadap penurunan permukaan tanah dengan memasang alat pantau pada area tertentu; dan
 8. Menerapkan manajemen pengelolaan lalu lintas, selain untuk mengatasi kemacetan juga untuk menghindari terjadinya kenaikan polusi udara pada suatu wilayah.
3. Relocation of infiltration wells affected by the MRT Jakarta Phase 2A construction project;
 4. Requirement for emission tests for project vehicles to meet applicable standards;
 5. Prior to the activities, carrying out an initial survey of the buildings around the projects to evaluate the condition of the buildings which are predicted to be affected by construction such as cracks and others;
 6. Periodically conducting monitoring of the condition of air quality, noise, vibration, groundwater, surface water, as well as aquatic and terrestrial biota;
 7. Conducting monitoring of land subsidence by installing monitoring devices in certain areas; and
 8. Implementing traffic management, with a view to overcome congestion and to avoid an increase in air pollution in an area.

Upaya dan Pencapaian Reduksi Emisi GRK dan Penipisan Lapisan Ozon Efforts and Achievements of GHG Emission Reduction and Ozone Layer Depletion

Upaya Effort	Pencapaian Achievement
Emisi GRK/GHG Emission	
Pengelolaan limbah padat (<i>reduce, reuse, recycle/3R</i>) Solid waste management (reduce, reuse, recycle/3R)	Telah dilakukan di seluruh stasiun dan Depo Lebak Bulus Has been carried out at all stations and Lebak Bulus Depot
Pengelolaan limbah cair domestik Domestic liquid waste Management	Telah dilakukan pengelolaan limbah cair domestik dengan STP di seluruh stasiun dan Depo Lebak Bulus Domestic liquid waste has been treated with Sewage Water Treatment (SWT) at all stations and Lebak Bulus Depot
Pemakaian lampu hemat energi LED Usage of LED energy-saving lamps	Telah dipasang lampu LED di seluruh stasiun dan Depo Lebak Bulus LED lights have been installed in all stations and Lebak Bulus Depot
Pemakaian <i>automatic escalator</i> yang beroperasi hanya pada saat digunakan dan <i>sleep mode</i> bila tidak digunakan Usage of an automatic escalator that operates only when in use and sleep mode when not in use	Telah diterapkan di seluruh stasiun Has been carried out at all stations
Penanaman pohon Tree Planting	Dilakukan penanaman 30 jenis tanaman, seperti trembesi dan berbagai jenis tanaman apotek hidup 30 types of plants have been planted, such as trembesi and various types of medicinal plants
Emisi Penipis Lapisan Ozon/Ozone Layer Depleting Emissions	
Pemakaian unit pendingin udara (<i>air conditioner/AC</i>) dengan teknologi inverter dan non-CFC, sehingga berkontribusi mencegah kerusakan lapisan ozon Usage of air conditioning (AC) units with inverter technology and non-CFC, thus contributing to preventing damage to the ozone layer	Telah diterapkan di seluruh stasiun Has been applied in all stations
Instalasi <i>platform screen doors</i> (PSD) di stasiun <i>underground</i> , dengan tujuan pengaturan sirkulasi dan suhu dari AC dapat lebih optimal Installation of platform screen doors (PSD) at underground stations, with a view to regulate circulation and temperature from ACs to be more optimal	Telah diterapkan di seluruh stasiun Has been implemented in all stations

Aktivitas Pengelolaan Lingkungan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan selalu berupaya untuk memperhatikan aspek lingkungan hidup sebagai bentuk implementasi pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perseroan meyakini, sekecil apa pun kontribusi yang diberikan Perseroan terhadap lingkungan tetap memiliki arti yang sangat besar untuk meminimalisir dampak operasional Perseroan terhadap lingkungan.

Pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pengukuran kualitas udara, kebisingan, getaran air permukaan, dan air limbah setiap 3 bulan sekali untuk tahap konstruksi dan 6 bulan sekali untuk tahap operasional;
2. Melakukan pemantauan sosial, ekonomi dan budaya pada area konstruksi dan operasional yang terdampak;
3. Melakukan pemantauan dari izin terkait lingkungan yang diperoleh, seperti pelaporan realisasi penyimpanan TPS Limbah B3 dan perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah melalui pembuatan dokumen Persetujuan Teknis (Pertek) dan Sertifikat Layak Operasi (SLO) untuk 4 STP (Lebak Bulus, Haji Nawi, Asean, dan Dukuh Atas); dan
4. Bekerja sama dengan World Research Institute (WRI) Indonesia dalam membuat perhitungan mitigasi emisi MRT Jakarta dan strategi edukasi masyarakat.

Terkait implementasi secara teknis (pengelolaan air limbah, limbah padat dan limbah B3) meliputi:

1. Pengelolaan air limbah:
 - a. Melakukan swapantau harian pada seluruh STP;
 - b. Melakukan pemeliharaan secara berkala pada seluruh STP.

Environmental Management Activities

In carrying out its business activities, the Corporation always strives to pay attention to environmental aspects as a form of the environmental management implementation stipulated in Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.

The Corporation believes that even small contribution made by the Corporation to the environment has a very large meaning in minimizing the impact of the Corporation's operations on the environment.

Management and monitoring of environmental impacts are carried out as follows:

1. Measuring air quality, noise, surface water vibration, and wastewater every 3 months for the construction phase and once every 6 months for the operational phase;
2. Carrying out social, economic and cultural monitoring in affected construction and operational areas;
3. Monitoring environmental permits; such as reporting on the realization of a temporary storage area for hazardous and toxic materials waste, and extension of Wastewater Disposal Permits through the preparation of Technical Approval documents and Operational Eligibility Certificates for 4 Sewage Treatment Plants (STPs) (Lebak Bulus, Haji Nawi, Asean, and Dukuh Atas); and
4. Collaborating with the World Research Institute (WRI) Indonesia in making MRT Jakarta's emission mitigation calculations and public education strategies.

Technical implementation (water waste, solid waste, and toxic and hazardous waste management) includes:

1. Wastewater management:
 - a. Performing daily self-monitoring at all Sewage Treatment Plants
 - b. Performing periodic maintenance at all Sewage Treatment Plants





2. Pengelolaan limbah padat:
 - a. Melakukan upaya 3R pada seluruh area operasional MRT Jakarta;
 - b. Melakukan pemilahan sampah sebelum diangkut;
 - c. Bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola sampah (*recycle*), seperti melakukan *composting*, distilasi sampah plastik;
 - d. Bekerja sama dengan pihak ketiga dalam mengelola limbah anorganik pada area Stasiun Blok M dan Dukuh Atas, seperti *Waste Station* dan *Re-box*.
3. Pengelolaan limbah B3:
 - a. Penyimpanan limbah B3 pada TPS Limbah B3 berizin yang ada di Depo Lebak Bulus;
 - b. Pengangkutan limbah B3 setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
 - c. Pemusnahan limbah B3 oleh pihak ketiga yang berkerjasama dan berizin.
4. Pelaksanaan *pest control*;
5. Pembersihan drainase sekitar Depo.

MRT Jakarta berkolaborasi dengan Rekosistem, melalui kerja sama yang dilaksanakan telah mengelola lebih dari 30 Ton sampah anorganik (plastik, kertas, kardus, kaca, dan sampah lainnya). MRT Jakarta juga aktif dan mendukung layanan pengelolaan sampah secara bertanggung jawab dengan pemanfaatan *web-based dashboard* sebagai bentuk digitalisasi aktivitas kemitraan ini. Kolaborasi ini dikembangkan melalui penambahan 1 (satu) *waste station* sebagai pusat penyetoran sampah anorganik di area Dukuh Atas dengan tenaga panel surya. Diharapkan layanan ini mendekatkan dengan masyarakat sekitar dan tentunya turut serta dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan.

2. Solid waste management:
 - a. Carrying out 3R efforts in all MRT Jakarta operational areas;
 - b. Sorting waste before it is transported.
 - c. Collaborating with third parties to manage waste (*recycle*), such as *composting*, distilling plastic waste;
 - d. Collaborating with third parties in managing inorganic waste in Blok M and Dukuh Atas Station areas, such as *Waste Stations* and *Re-box*.
3. Hazardous and toxic materials waste management:
 - a. Storage of B3 waste in a licensed TPS for B3 waste at the Lebak Bulus Depot;
 - b. Transportation of B3 waste once every 3 (three) months; and
 - c. B3 waste destruction by cooperating with a licensed third party.
4. Conducting *pest control*;
5. Cleaning drainage around the depot.

MRT Jakarta collaborates with Rekosistem and has managed more than 30 tons of inorganic waste (plastic, papers, cardboards, glasses and other waste). The Corporation is also active and supports responsible waste management services by utilizing a web-based dashboard as a form of digitizing this partnership activity. This collaboration was developed through the addition of 1 (one) waste station as a center for depositing inorganic waste in Dukuh Atas area with solar panel power. This service is expected to bring the surrounding community closer and take part in increasing awareness of the importance of environmental management.



Tanggung Jawab Sosial Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja

Social Responsibility Related to Employment, and Occupational Safety and Health

Tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, meliputi karyawan yang bekerja di wilayah operasi MRT Jakarta, baik di kantor pusat, operasional MRT, stasiun, depo, maupun kawasan berorientasi transit sejak proses perencanaan, konstruksi, maupun pengelolaan, serta pemeliharaan. Secara umum pengelolaan K3 meliputi penerapan praktik-praktik terbaik yang berlaku secara nasional sesuai Sistem Manajemen K3 (SMK3) dan praktik-praktik terbaik yang berlaku global sesuai ISO 45001 Sistem Manajemen K3.

Aspek Penerapan Keselamatan Kerja

Upaya untuk meningkatkan budaya K3L (SHE Culture) di tahun 2022 meliputi:

1. Pelaksanaan *monthly QSSHE meeting* untuk membahas dan memantau kinerja K3 di konstruksi, operasi dan area pengembangan bisnis;
2. Pelaksanaan forum Komunikasi Konsultasi dan Partisipasi rutin mingguan dan dua mingguan yang melibatkan seluruh unit kerja dan karyawan dengan tema terkait K3, kesehatan, kualitas, lingkungan serta keamanan;
3. Program pelatihan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi dan pemenuhan terhadap persyaratan perundangan;
4. Pelaksanaan kegiatan *award* dan *reward* terhadap personil dan unit kerja untuk menjaga performa dengan evaluasi dan penilaian terhadap internal MRT, vendor dan kontraktor;
5. Pelaksanaan sosialisasi dan webinar dengan melibatkan praktisi eksternal seperti kegiatan hari HIV AIDS, *health talk*;
6. Pelaksanaan program pelaksanaan dan pengukuran Program *Behavior Based Safety* (BBS); dan
7. Pelaksanaan inspeksi, audit serta *management safety walkthrough* bersama Direksi.

Keselamatan dalam Perkeretaapian bagi Pekerja

Perseoran memperoleh sertifikat ISO 45001:2018 untuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Perseoran telah menyusun, menerapkan, dan menyampaikan laporan penerapan SMK3 kepada Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Perseoran mengelola keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi seluruh pekerja dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP), sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. 69 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian.

Perseoran melakukan audit sistem manajemen terintegrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3, Peraturan Menteri Perhubungan No. 69 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian, Standard ISO 9001:2015 Tentang Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen

The social responsibility related to employment, occupational safety and health (OSH) covers employees who work in MRT Jakarta operating areas, both at the head office, MRT operations, stations, depots, and transit-oriented areas from the planning, construction, management, and maintenance processes. In general, OSH management includes the application of best practices applying nationally according to the OSH Management System (SMK3) and best practices applying globally according to ISO 45001 OSH Management System.

Occupational Safety Implementation Aspects

Efforts to improve SHE Culture in 2022 are as follow:

1. Implementation of monthly QSSHE meetings to discuss and monitor OSH performance in construction, operations and business development areas;
2. Execution of weekly and biweekly routine Consultation and Participation Communication forums involving all work units and employees to carry out topics related to OSH, health, quality, environment and safety;
3. Execution of training programs to meet competency needs and compliance with statutory requirements;
4. Execution of award and reward activities for personnel and work units to maintain performance by evaluating and assessing internal MRT, vendors and contractors;
5. Implementation of dissemination and webinars involving external practitioners such as HIV AIDS day activity, health talks;
6. Execution of the Behavior Based Safety (BBS) program implementation and measurement;
7. Execution of inspections, audits, and management safety walkthroughs with the Board of Directors.

Railway Safety of the Employees

The Corporation has obtained the ISO 45001:2018 certificate for the Occupational Health and Safety Management System. The Corporation has prepared, implemented, and submitted the SMK3 implementation report to the Director General of Railways of the Ministry of Transportation. The Corporation manages occupational safety and health (OSH) for all employees by implementing the Railway Safety Management System (RSMS), in accordance with the Minister of Transportation Regulation No. 69 of 2018 concerning the Railway Safety Management System.

The Corporation conducts an audit of integrated management system based on the Government Regulation no. 50 of 2012 concerning OSH Management System, the Minister of Transportation Regulation No. 69 of 2018 concerning Railway Safety Management Systems, ISO 9001:2015 Standard concerning Quality Management System, ISO 14001:2015



Lingkungan, dan ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen K3. Perseroan melakukan audit sistem manajemen yang diterapkan secara berkala. Proses Audit dilakukan baik berupa Audit Internal dan juga Audit oleh pihak Eksternal yang mencakup aspek Kualitas, Keselamatan Perkeretaapian, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Pengamanan.

Hingga akhir tahun 2022 tidak ada insiden fatalitas akibat kecelakaan kerja untuk seluruh karyawan maupun pekerja bukan karyawan. Perseroan mampu mempertahankan kinerja pengelolaan kecelakaan kerja di Kantor Pusat, stasiun dan depo. Untuk pekerja bukan karyawan Perseroan, yang mencakup proyek pembangunan konstruksi MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI-Kota). Penghitungan statistik kinerja K3 untuk *Severity Rate* dan *Frequency Rate*, dilakukan Fungsi Departemen QSSHE Assurance, dengan pendekatan per 1.000.000 jam kerja orang.

concerning Environmental Management Systems, and ISO 45001:2018 concerning OSH Management System. The Corporation periodically conducts management system audits. The audit process is carried out both in the form of an internal and external audit party which includes the aspects of Quality, Railway Safety, Occupational Safety and Health, Environment and Security.

Until the end of 2022, there was no fatality incident due to workplace accident for all employees of the Corporation and workers who are not employees of the Corporation. In general, the Corporation was able to maintain workplace accident management performance at the Head Office, stations, and depots. It also applies to the workers who are not employees of the Corporation, in the construction of MRT Jakarta Phase 2 (Bundaran HI - Kota). The OSH statistics for Severity Rate and Frequency Rate is made by QSSHE Assurance Department, with the approach of per 1,000,000 man hours.

Statistik Kinerja K3 di Kantor Pusat, Stasiun dan Depo
OHS Performance Statistics at the Head Office, Stations, and Depots

Uraian Description	2022	2021	2020
<i>Number of fatalities</i>	0	0	0
<i>Lost time injuries</i>	0	0	0
<i>First aid injuries</i>	106	103	69
<i>Near miss unsafe action, unsafe condition</i>	616	422	1.401

*Pada tahun 2020 perhitungan *near miss* dan *unsafe action, unsafe condition* masih digabung

* In 2020, the nearmiss and unsafe action, unsafe condition were merged

Statistik Kinerja K3 Pekerja Bukan Karyawan PT MRT Jakarta Tahun 2022 pada Proyek Konstruksi MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI-Kota)
OSH Performance of Workers who Are not employee of the Corporation in 2022 at the Construction of MRT Jakarta Phase 2A (Bundaran HI -Kota)

Uraian Description	CP 201	CP 202	CP 203	Total
<i>Number of fatalities</i>	0	0	0	0
<i>Lost time injuries</i>	0	1	0	1
<i>First aid injuries</i>	0	1	9	10
<i>Near miss unsafe action, unsafe condition</i>	1	0	0	1

Keselamatan Perkeretaapian bagi Pengguna Jasa

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api, serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 95 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Moda Raya Terpadu/*Mass Rapid Transit*, dan Lintas Raya Terpadu/*Light Rail Transit* (LRT) Perseroan berkomitmen untuk mengelola keselamatan perkeretaapian bagi pengguna jasa yang dilakukan dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pada tahun 2022 penerapan SPM di MRT Jakarta di nilai oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan nilai sebesar 99,56%.

Railway Safety for Passengers

According to the Regulation of the Minister of Transportation No. 63 Year 2019 concerning Minimum Service Standards for Passengers of Railway Transportation, and Regulation of DKI Jakarta Governor No. 95 Year 2019 concerning Minimum Service Standards for Passengers of Mass Rapid Transit and Light Rail Transit, the Corporation is committed to managing railway safety for Passengers by implementing Minimum Service Standards (MSS). In 2022 the implementation of the Minimum Service Standards by MRT Jakarta was assessed by the Department of Transportation of DKI Jakarta, and the assessment results was 99.56%.

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Pelanggan

Social Responsibility to Customers

MRT Jakarta memiliki komitmen tinggi untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan yang diberikan pada pelanggan atau pengguna jasa, dengan terus menjaga kepentingan seluruh pengguna jasa. Perseroan menyadari bahwa layanan berkualitas menjadi kunci dalam menjaga loyalitas pengguna jasa untuk menjaga keberlangsungan bisnis Perseroan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha, MRT Jakarta senantiasa melaksanakannya sesuai dengan standar yang berlaku, serta tetap memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan konsumen atau pelanggan sebagai prioritas utama. Perseroan juga telah memiliki kebijakan produk dan jasa yang berorientasi terhadap kesehatan dan keselamatan pengguna jasa.

Layanan Pengaduan Pelanggan

Salah satu bentuk kepedulian MRT Jakarta terhadap pengguna jasa adalah dengan memberikan hak yang seluas-luasnya bagi pengguna jasa untuk melakukan pengaduan terkait layanan yang diberikan. Setiap keluhan atau pengaduan ditangani oleh *Customer Care* MRT Jakarta dan ditindaklanjuti sesuai dengan keluhan atau pengaduan yang disampaikan.

MRT Jakarta is highly committed to continuously improving the quality of services provided to customers or passengers, by continuing to safeguard the needs of all passengers. The Corporation realizes that quality of service is the key to maintaining the loyalty of passengers for the Corporation's business sustainability. MRT Jakarta always carries out its business activities in accordance with applicable standards with due observance of the health and safety aspects of customers as a top priority. The Corporation also implements product and service policies that are oriented towards the health and safety of passengers.

Customer Complaint Service

One form of MRT Jakarta's concern for passengers is by providing the widest possible rights for passengers to file complaints regarding the services provided. Every complaint or grievance is handled by MRT Jakarta Customer Care and followed up according to the complaint or grievance submitted.

Akses Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan
Complaints Access and Settlement of Complaints

Akses Access	Jumlah Pengaduan dan Persentase Penyelesaian Number of Complaints and Percentage of Settlement		
	Tahun Year	Jumlah Pengaduan Number of Complaints	Persentase Penyelesaian (%) Percentage of Settlement (%)
1. Stasiun/Station	2022	2.145	100
2. Call Center	2021	1.797	100
3. Instagram			
4. Twitter	2020	1.495	100
5. Facebook			
6. Email			
7. Whatsapp			
8. JAKI			
9. Kios-K			

Program Peningkatan Layanan kepada Pengguna Jasa

Sepanjang tahun 2022 MRT Jakarta mengadakan beragam program *pull ridership* kepada penumpang seperti layanan *feeder* bekerja sama dengan beberapa mitra *feeder* seperti Transjakarta, Perum PPD, Bluebird, Grab, Gojek, Tebengan, Swoop dan UPAS Bus Sekolah Dishub DKI Jakarta. Selain program *feeder* MRT Jakarta juga memberikan beragam program *lifestyle/gaya hidup* di sepanjang jalur MRT Jakarta berkolaborasi dengan mitra untuk pengguna jasa.

Service Improvement Program for Passengers

In 2022 MRT Jakarta held various pull ridership programs such as feeder services for passengers collaborating with several feeder partners such as Transjakarta, Perum PPD, Bluebird, Grab, Gojek, Tebengan, Swoop and UPAS School Bus of DKI Jakarta Transportation Agency. In addition to feeder program, MRT Jakarta also organized a variety of lifestyle programs for passengers along MRT Jakarta routes in collaboration with partners.

Selain itu MRT Jakarta juga menjaga kualitas layanan stasiun dan kereta Ratangga, ketepatan waktu pelayanan petugas, pengadaan kegiatan musik Ruang Musik Marti, dan *Jamming at Station*. Dengan inisiatif yang dilakukan, pada tahun 2022 MRT Jakarta berhasil meraih skor *Customer Satisfaction Index* sebesar 88,32, meningkat 0,03 dari tahun sebelumnya sebesar 88,29.

Other than that, MRT Jakarta also maintains the quality of Ratangga train and station services, the punctuality of services delivered by officers, the provision of music activities at Marti Music Room, and Jamming at Station. By doing those initiatives, in 2022 the Corporation managed to achieve a Customer Satisfaction Index score of 88.32, an increase by 0.03 from the previous year of 88.29.

Peluncuran Robot DINA

Perseroan terus berinovasi agar layanan yang diberikan dapat terus memenuhi kebutuhan para pengguna jasa MRT Jakarta. Oleh karena itu, Perseroan meluncurkan inovasi terbaru Robot DINA (*Digital Intelligent Assistant*) sebagai *surveillance robot*, yaitu robot pintar yang berpatroli di dalam area stasiun untuk mengawasi operasional stasiun termasuk fasilitas dan kondisi area publik. Selain itu, alat ini juga melakukan interaksi dua arah dengan penumpang karena Robot DINA tersambung dengan petugas di stasiun sehingga pengguna jasa dapat bertanya dan berbicara langsung dengan petugas tersebut yang diujicobakan di Stasiun Lebak Bulus Grab. Kedepannya, akan dilakukan kajian dan evaluasi untuk penambahan di stasiun lain, termasuk untuk Fase 2A.

Launch of DINA Robot

The Corporation relentlessly makes innovations so that the services provided can continuously meet the needs of MRT Jakarta passengers. Therefore, the Corporation has launched DINA (*Digital Intelligent Assistant*) Robot as the latest innovation. DINA is a surveillance robot, which is a smart robot that patrols in the station area to monitor station operations including facilities and conditions in public areas. In addition, this robot also carries out two-way interactions with passengers because DINA Robot is connected to officers at the station so that passengers can ask questions and talk directly with the officers. This activity has been tested at Lebak Bulus Grab Station. In the future, studies and evaluations will be carried out for additions at other stations, including for Phase 2A.



Tanggung Jawab Sosial Terkait Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Social Responsibility Related to Social and Community Development

Tanggung jawab sosial terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan yang dilaksanakan MRT Jakarta, adalah program kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik. MRT Jakarta senantiasa berupaya untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

MRT Jakarta senantiasa berkomitmen untuk terus menjalankan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai TPB. Melalui komitmen tersebut, Perseroan merencanakan dan menetapkan program yang tepat sasaran dan memberikan manfaat sesuai kebutuhan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam jangka panjang, Perseroan berupaya menciptakan sinergi yang baik dan tumbuh bersama para pemangku kepentingan sebagai modal sosial dalam menjamin keberlanjutan Perseroan.

Program Pembinaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Perseroan memiliki program pemberdayaan masyarakat lokal dengan menyediakan area untuk gerai UMKM di area beranda peron (*concourse*) stasiun. Seleksi terhadap UMKM dilakukan sesuai Peraturan Direksi No. PER/004/BODMRT/I/2019 tentang Pedoman Tata Laksana Seleksi Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai Gerai Ritel di Stasiun MRT Jakarta. Pada tahun 2022, terdapat 31 pelaku UMKM kuliner, fesyen, dan kriya, yang memanfaatkan beranda peron yang tersedia di stasiun MRT Jakarta, jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya di mana terdapat 23 pelaku UMKM yang memanfaatkan beranda peron.

The social responsibility related to social and community development implemented by MRT Jakarta is a program of community development activities that are carried out in a systematic, planned and directed manner to increase the community access to achieve better social, economic conditions and quality of life. The Corporation always strives to contribute to improving the people's welfare.

MRT Jakarta is relentlessly committed to carrying out community development and empowerment programs to achieve Sustainable Development Goals (SDGs). Through this commitment, the Corporation plans and determines programs that are right on target and provides benefits according to the needs mandated by the applicable laws and regulations. In the long term, the Corporation seeks to create good synergies and to grow with stakeholders as social capital in ensuring the sustainability of the Corporation.

Micro and Small Business Development Program

The Corporation implements local community empowerment program by providing an area for Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) booths in the station concourse. The MSME selection is carried out in accordance with the Board of Directors' Decree No. PER/004/BODMRT/I/2019 concerning Guidelines of Selection of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) as Retail Tenants at MRT Jakarta Stations. In 2022, there were 31 culinary, fashion and craft MSME entrepreneur utilizing the platform verandas available at MRT Jakarta stations. This number has increased compared to the previous year where there were 23 MSME entrepreneur utilizing the platform verandas.

Jumlah Gerai UMKM
Number of MSME Tenants

Bidang Usaha Industry	2022			2021		
	Jumlah Gerai Number of Booth	Lokasi Stasiun Station Location	Jumlah Pekerja Number of Workers	Jumlah Gerai Number of Booth	Lokasi Stasiun Station Location	Jumlah Pekerja Number of Workers
Kuliner Culinary	26	3	18	20	3	23
Kriya Crafts	2	1	1	-	-	-
Fesyen Fashion	3	2	2	3	2	3
Jumlah Total	31	6	21	23	3	26

Selain itu, terdapat juga kerja sama dengan penyewa regular (komersial), yang pada tahun 2022 memberikan manfaat penyediaan lapangan kerja sebanyak 112 orang.

In addition, there are several regular (commercial) tenants under the collaboration with the Corporation, that provides job opportunities for 112 people in 2022.

Jumlah Gerai UMKM
Number of MSME Tenants

Bidang Usaha Industry	2022			2021		
	Jumlah Gerai Number of Booth	Lokasi Stasiun Station Location	Jumlah Pekerja Number of Workers	Jumlah Gerai Number of Booths	Lokasi Stasiun Station Location	Jumlah Pekerja Number of Workers
Makanan dan Minuman Food and Beverages	8	6	40	10	8	50
Swalayan Mini Minimarket	11	10	66	10	10	50
Banking	1	1	1	1	1	1
Fesyen & Aksesoris Fashion & Accessories	-	-	-	3	1	15
Services	-	-	-	1	1	5

Selain itu, Perseroan juga melakukan pembinaan terhadap UMKM, yang antara lain dilakukan dengan cara:

1. Penyelenggaraan Bazar yang melibatkan mitra UMKM MRT Jakarta. Bazar tersebut dilaksanakan pada baik melalui program Dinas PPKUKM maupun program MRT Jakarta;
2. Kegiatan Bazar yang dilakukan untuk program MRT Jakarta diselenggarakan pada Bulan Ramadan, HUT DKI Jakarta serta menyambut kegiatan G20;
3. Memberikan pembinaan melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh MRT Jakarta dengan tema yang disesuaikan dengan kebutuhan para mitra UMKM;
4. Melakukan koordinasi bulanan, untuk menginformasikan program promosi mitra;
5. Mengajak mitra untuk aktif berpartisipasi dalam program tematik yang diselenggarakan oleh MRT Jakarta; dan
6. Memberikan informasi mengenai UMKM Jakarta melalui website MRT Jakarta.

In addition, the Corporation also fosters MSMEs, among others by:

1. Organizing bazaars involving MRT Jakarta MSME partners. The bazaars are held both through the PPKUKM (the Office of Cooperatives, Small and Medium Enterprises Industry and Trade) program and Jakarta MRT program;
2. Organizing bazaar activities as Jakarta MRT program that were held during the month of Ramadan, DKI Jakarta's anniversary and to welcome the G20 activities;
3. Providing coaches through training organized by MRT Jakarta with the themes tailored to the needs of MSME partners;
4. Conducting monthly coordination, to inform partner promotion programs;
5. Encouraging partners to actively participate in thematic programs organized by MRT Jakarta;
6. Providing information about MSMEs in Jakarta through the MRT Jakarta website.



Program #JalanJakarta

Pada tahun 2022, Perseroan berkomitmen untuk melanjutkan program #JalanJakarta dengan peningkatan aksesibilitas pejalan kaki menuju Stasiun MRT Blok A yang sudah disampaikan kepada pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta oleh ITDP, sesuai dengan dokumen andalalin Stasiun MRT Blok A. MRT Jakarta bersama dengan ITDP, Dinas Perhubungan dan Bina Marga berkolaborasi guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penyeberangan pejalan kaki di kawasan tersebut. Investasi sosial untuk program #JalanJakarta tahun 2022 melalui pembuatan zebra cross di Stasiun Blok A dengan biaya sebesar Rp45.052.802.

#JalanJakarta Program

In 2022, the Corporation was committed to continuing the #JalanJakarta program by increasing pedestrian accessibility to Blok A MRT Station which has been submitted to the DKI Jakarta Transportation Agency by ITDP, in accordance with the traffic impact analysis document for Blok A MRT Station. MRT Jakarta together with ITDP, Department of Transportation and Bina Marga were collaboration to improve the safety and comfort of pedestrian crossings in the area. Social investment for the #JalanJakarta program in 2022 through the construction of a zebra crossing at Blok A Station was at a cost of Rp45,052,802.

Program MRT Berbagi

MRT Berbagi bertujuan untuk memberikan bantuan serta donasi ataupun kegiatan sosial penunjang lainnya guna memberikan dampak positif bagi komunitas maupun masyarakat umum. Kampanye MRT Berbagi untuk korban gempa di Cianjur, Jawa Barat kali ini, bekerja sama dengan WeCare.id selaku penggalang dana/donasi dari publik, hasil dari penggalangan dana tersebut akan disalurkan secara langsung oleh WeCare.id, harapannya kampanye ini dapat memberikan ruang bagi lebih banyak orang, yang bergabung untuk membantu korban musibah gempa di Cianjur, Jawa Barat.

Hasil donasi diberikan untuk:

1. Membantu kebutuhan beberapa masjid agar layak untuk ibadah;
2. Menyediakan layanan psikososial anak korban gempa untuk memulihkan trauma; dan
3. Berbagi bingkisan makanan anak-anak korban gempa.

MRT Berbagi Program

MRT Berbagi aims to provide assistance and donations or other supporting social activities to have a positive impact on the community and the general public. The MRT Sharing Campaign for the victims of earthquake in Cianjur, West Java this time, was conducted in collaboraton with WeCare.id as a fundraiser of donations from the public. The donations of this fundraising were distributed directly by WeCare.id. This campaign was hoped to provide space for more people to join in helping the victims of earthquake in Cianjur, West Java.

The donations are given to:

1. Help the needs of several mosques so that the mosques can be decent for worship;
2. Provide psychosocial services for children affected by the earthquake to recover from trauma; and
3. Be distributed as food parcels for child victims of the earthquake.



Kolaborasi Bersama Perusahaan Rintisan

Perseroan melakukan kolaborasi dengan perusahaan rintisan untuk mendorong pembentukan ekonomi digital melalui program MRTJ Accelerator dan MRTJ Incubator. Tujuan dari penyelenggaraan program MRTJ Incubator adalah sebagai upaya dari MRT Jakarta selalu perseroan untuk membangun dan membuka ekosistemnya kepada perusahaan rintisan (*startup*) yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat, yang dapat memberikan dan/atau menawarkan inovasi solusi baru bagi ekosistem MRT Jakarta. Adapun kategori bisnis perusahaan yang berusaha dijangkau oleh MRT Jakarta antara lain yang berkenaan dengan peningkatan layanan penumpang MRT Jakarta, peningkatan dan pemeliharaan fasilitas MRT Jakarta dan upaya pengembangan bisnis di lingkungan MRT Jakarta.

Collaboration with Start-up Companies

The Corporation collaborates with start-up companies to encourage the formation of a digital economy through the MRTJ Accelerator and MRTJ Incubator programs. The purpose of implementing the MRTJ Incubator program is as an effort from MRT Jakarta to build and open up its ecosystem to startup companies in Indonesia, especially in DKI Jakarta and West Java areas, which can provide and/or offer new innovative solutions for MRT Jakarta ecosystem. The business categories of companies selected by the Company include those relating to improvement of MRT Jakarta passenger services, improvement and maintenance of MRT Jakarta facilities, and efforts to develop business within the MRT Jakarta environment.

MRTJ Incubator 2022



Industri : Periklanan

Penyedia jasa teknologi periklanan di Indonesia yang berfokus pada penyediaan brands dengan iklan yang berdampak, cerdas, dan mudah diakses.

Solusi produk : *Programmatic Advertising* (Mini DSP & SSP)

Industry : Advertising

An advertising technology service provider in Indonesia focusing on the provision of brands with impactful, intelligent and accessible advertising.

Product Solution : *Programmatic Advertising* (Mini DSP and SSP)



Industri : Hospitality & Properti

Izy.ai/Izy App, menawarkan platform jasa untuk solusi komersial perhotelan & properti.

Solusi produk : MRTJ Shop (*Web-based Mobile commerce platform*)

Industry : Hospitality & Property

Izy.ai/Izy App, offers a service platform for hotel & property commercial solutions.

Product Solution : MRTJ Shop (*Web-based Mobile commerce platform*)



Industri : SaaS

Penyedia solusi yang memungkinkan karyawan untuk mengakses dan memonitor gaji serta absensi melalui Sistem *Early Wage Acces* (EWA).

Solusi produk : *Mobile Attendances*

Industry : SaaS (Software as a Service)

Solution provider that allows employees to access and monitor salaries and attendance through the *Early Wage Access System* (EWA).

Product solutions : *Mobile Attendances*



Industri : Manufacturing

Menyediakan wadah bagi pasar manufaktur di Indonesia yang menghubungkan antara perusahaan manufaktur dan klien bisnis.

Solusi produk : *Project Management for Manufacturing Project* (Add on E-procurement & Project Financing)

Industry : Manufacturing

Providing a platform for the manufacturing market in Indonesia that connects manufacturing companies and business clients.

Product solution: *Project Management for Manufacturing Project* (Add on E-procurement & Project Financing)



Industri : Transportasi

Aplikasi solusi transportasi untuk mempermudah mobilitas pengguna ke tempat yang dituju secara kolektif.

Solusi produk : *Shuttle* bersama untuk pengembangan tur

Industry : Transportation

A transportation solution application to facilitate the mobility of passengers to their destination collectively.

Product solution: *Joint shuttle for tour development*



Industri : E-Sign and IT GCG

Penyedia solusi penandatanganan digital yang menjamin keamanan tinggi dari *cyber crime*.

Solution Product : Tanda tangan Digital (InSign)

Industry : E-Sign and IT GCG

A Provider of digital signing solutions that guarantee high security from cyber crime.

Solution Product : *Digital Signature* (InSign)



MRTJ Accel 2022



Jakarta menjalankan kemitraan dengan *start-up* binaan MRTJ Accel 2022 yaitu PT Higo Fitur Indonesia yang bergerak di bidang periklanan digital dalam media WiFi. MRT Jakarta melihat potensi atas pemanfaatan jaringan WiFi di stasiun yang sebelumnya hanya difungsikan secara terbatas untuk dapat dikembangkan dengan nilai komersial. Pengembangan telah selesai dilaksanakan hingga bulan Oktober 2022 dan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS Kemitraan pada Desember 2022. Kerja sama ini mendatangkan manfaat bagi publik berupa layanan internet bebas akses dan telah membawakan pendapatan *Non-Farebox* bagi MRT Jakarta melalui aktivitas periklanan media WiFi.

Jakarta collaborates a partnership with a startup fostered by MRTJ Accel 2022, namely PT Higo Feature Indonesia which engages in digital advertising in WiFi media. MRT Jakarta sees the potential for utilizing the WiFi network at stations that previously is only functioned in a limited way to be developed with commercial value. The development was completed in October 2022 and continued with the signing of the Cooperation Agreement on Partnership in December 2022. This collaboration brings benefits to the public in the form of free internet access and has generated *Non-Farebox* revenue for MRT Jakarta through WiFi media advertising activities.



Sistemisasi sistem periklanan melalui *digital signage* yang dilengkapi dengan teknologi *Content Management System (CMS)* dan *Mobile Device Management System*.

A systemization of advertising system through digital signage equipped with Content Management System (CMS) technology and Mobile Device Management System.



Menyediakan layanan jasa *concierge* dan *e-commerce* yang akan diintegrasikan ke dalam MRTJ Apps, yang akan membantu mempermudah kebutuhan *ridership* MRT Jakarta.

Providing concierge and e-commerce services that will be integrated into MRTJ Apps, which will help facilitate the needs of MRT Jakarta ridership.



Menyediakan solusi parkir berbasis digital bertingkat dengan menggunakan sistem *Compact Motorcycle Storage (CMS)*, terutama untuk di lahan parkir yang akan dikembangkan di sepanjang jalur MRT Jakarta.

Providing multi-storey digital-based parking solution using the Compact Motorcycle Storage (CMS) system, especially for parking lots developed along the MRT Jakarta routes.



Layanan *Human Resources (HR)* berbasis digital, yang menawarkan solusi pencatatan absensi dan sistem penggajian yang lebih mudah untuk diakses dan dikontrol baik oleh karyawan maupun oleh perusahaan.

Digital-based Human Resources (HR) services, which offers solutions for recording attendance and payroll systems that are easier to access and control for both employees and the Corporation.



Aplikasi solusi transportasi untuk mempermudah mobilitas pengguna ke tempat yang dituju secara kolektif. Tebengan memberikan nilai tambah kepada *ridership* MRT Jakarta dari/dan menuju stasiun MRT Jakarta ke tujuan lokasi berikutnya.

A transportation solution application to facilitate the mobility of passengers to their destination collectively. Tebengan provides added value to the MRT Jakarta ridership from/and to the Jakarta MRT station to the next destination location.



Rekosistem merupakan *startup cleantech* yang menawarkan jasa pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan, pemilahan, hingga daur ulang sampah. Perkembangan di tahun 2022 adalah penambahan waste station di DKA dan ekspansi penawaran layanan bersama MRT ke pihak eksternal.

Rekosistem is a cleantech startup offering waste management services starting from collecting, sorting, to recycling waste. Developments in 2022 were the addition of a waste station in DKA and the expansion of MRT joint service offerings to external parties.



Merupakan *start-up AI* asli Indonesia telah menghasilkan beragam produk AI seperti *Smart City* dan pengenalan wajah. Nodeflux membantu MRTJ dalam pemenuhan atas analisa CCTV di DKA.

An Indonesian original AI start-up of which has produced a variety of AI products such as Smart City and facial recognition. Nodeflux assisted MRTJ in fulfilling CCTV analysis in DKA.



Penyedia jasa layanan antar tanpa emisi dengan menggunakan *e-cargo bike*.

Zero-emission delivery service provider using e-cargo bikes.



07

LAPORAN KEUANGAN

Financial Statements



PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda)
dan entitas anaknya/ and its subsidiary

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Consolidated financial statements as of December 31, 2022
and for the year then ended
with independent auditors' report

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

Surat Pernyataan Direksi		<i>Board of Directors' Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1-2	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3-4	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian.....	5	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian.....	6	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	7-116	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>
Informasi keuangan tambahan.....	117-122	<i>Supplementary financial information</i>

**SURAT PERNYATAAN DEWAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA) DAN ENTITAS ANAKNYA**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA) AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini :

We, the undersigned below:

1. Nama	Tuhyat	Name
Alamat kantor	Wisma Nusantara 21 st Floor Jl. MH. Thamrin No. 59, Jakarta, 10350	Office address
Alamat domisili atau sesuai KTP	Jalan Emerald Blok L Nomor 02 Bintaro Jaya, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan	Domicile address or address according to ID
Nomor telepon	(021) 3906454	Telephone number
Jabatan	Direktur Utama / President Director	Title
2. Nama	Roy Rahendra	Name
Alamat kantor	Wisma Nusantara 21 st Floor Jl. MH. Thamrin No. 59, Jakarta, 10350	Office address
Alamat domisili atau sesuai KTP	Villa Bintaro Regency, Jl. Riau III J5/7 Pondok Aren, Tangerang Selatan	Domicile address or address according to ID
Nomor telepon	(021) 3906454	Telephone number
Jabatan	Direktur Keuangan & Manajemen Korporasi / Finance & Corporate Management Director	Title

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda) dan Entitas Anaknya;	1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda) ("the Company") and its subsidiaries;</i>
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;	2. <i>The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i>
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya telah dimuat secara lengkap dan benar; dan	3. a. <i>All information in the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries have been fully disclosed in a complete and truthful manner; and</i>
b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;	b. <i>The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit any information or material fact;</i>
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan dan Entitas Anaknya.	4. <i>We are responsible for the internal control system of the Company and its subsidiaries.</i>

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 21 Maret 2023/ Jakarta, March 21, 2023


Tuhya
Direktur Utama/President Director


Roy Rahendra
Direktur Keuangan & Manajemen Korporasi/
Finance & Corporate Management Director



The original report included herein is in
the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00306/2.1032/AU.1/06/1832-
1/1/III/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan
Direksi
PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda) dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian nya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditor's Report

Report No. 00306/2.1032/AU.1/06/1832-
1/1/III/2023

The Shareholders and the Boards of
Commissioners and Directors
PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda)

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda) and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2022, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2022, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00306/2.1032/AU.1/06/1832-
1/1/III/2023 (lanjutan)

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00306/2.1032/AU.1/06/1832-
1/1/III/2023 (continued)

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group or to cease its operations or has no realistic alternative but to do so.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00306/2.1032/AU.1/06/1832-
1/1/III/2023 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00306/2.1032/AU.1/06/1832-
1/1/III/2023 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements (continued)

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00306/2.1032/AU.1/06/1832-
1/1/III/2023 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas
laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00306/2.1032/AU.1/06/1832-
1/1/III/2023 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the
consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00306/2.1032/AU.1/06/1832-
1/1/III/2023 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas
laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00306/2.1032/AU.1/06/1832-
1/1/III/2023 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the
consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00306/2.1032/AU.1/06/1832-
1/1/III/2023 (lanjutan)

**Tanggung jawab auditor terhadap audit atas
laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)**

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00306/2.1032/AU.1/06/1832-
1/1/III/2023 (continued)

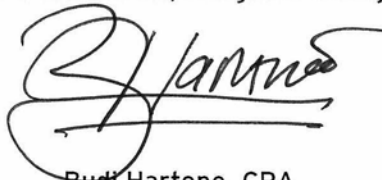
**Auditor's responsibilities for the audit of the
consolidated financial statements (continued)**

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja



Budi Hartono, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1832/Public Accountant Registration No. AP.1832

21 Maret 2023/March 21, 2023



**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2022
(Expressed in million rupiah,
unless otherwise stated)**

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	Catatan/ Notes	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	1.834.417	4,30	1.353.832	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - neto		5,30		Account receivables - net
Pihak berelasi	107.933		37.811	Related parties
Pihak ketiga	301.682		26.895	Third parties
Piutang subsidi	223.312	25,30	375.507	Subsidy receivables
Piutang sewa	6.084	12c	-	Lease receivables
Piutang lain-lain - neto	146		-	Other receivables - net
Pendapatan yang akan diterima	8.750	6	1.070	Accrued revenues
Persediaan	29.454	7	14.181	Inventories
Biaya dibayar dimuka	6.117	9,30	7.879	Prepaid expenses
Dana dibatasi penggunaannya	143.685	8	59.580	Restricted fund
Aset lancar lainnya	6.564		2.344	Other current assets
Total aset lancar	2.668.144		1.879.099	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Piutang usaha - neto		5		Account receivables - net
Pihak berelasi	-		36.934	Related parties
Pihak ketiga	-		191.481	Third parties
Piutang sewa	3.333	12c	-	Lease receivables
Taksiran tagihan pajak penghasilan	16.383	23d	15.691	Estimated claim for tax refund
Uang muka				Contractor's and
kontraktor dan konsultan	2.545.685	10	1.397.650	consultant advances
Aset tetap - neto	17.417.431	11	16.246.019	Fixed assets - net
Aset hak guna - neto	8.387	12	21.809	Right of use assets - net
Aset takberwujud - neto	66.009	13	27.407	Intangible assets - net
Investasi pada entitas asosiasi				Investment in associate
dan ventura bersama	17.541	14	25.441	and joint venture
Properti investasi	116.449	15	-	Investment property
Uang jaminan	20.489	16	20.593	Guarantee deposits
Aset pajak tangguhan - neto	681	23e	6.754	Deferred tax assets - net
Aset tidak lancar lainnya	146		-	Other non-current assets
Total aset tidak lancar	20.212.534		17.989.779	Total non-current assets
TOTAL ASET	22.880.678		19.868.878	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2022
(Expressed in million rupiah,
unless otherwise stated)**

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	Catatan/ Notes	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	7.004	17,32	2.973	Accounts payable
Utang lain-lain	1.651		-	Other payables
Utang pajak	18.948	23a	12.284	Taxes payable
Beban akrual	299.483	19,32	278.964	Accrued expenses
Utang kontraktor	56.060	18,32	56.142	Contractors payable
Utang bank	34.186	20,30	5.300	Bank loan
Liabilitas imbalan kerja karyawan	3.248	29	-	Employee benefits liability
Pendapatan diterima di muka	107.783	21	142.462	Unearned revenues
Utang retensi - jangka pendek	3.041	18,32	11.466	Retention payables - current
Liabilitas sewa	2.948	12,32	2.891	Lease liability
Total liabilitas - jangka pendek	534.352		512.482	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang retensi - jangka panjang	219.808	18,32	72.678	Retention payable - non-current
Liabilitas sewa	1.184	12,32	2.662	Lease liability
Pendapatan diterima di muka	143.876	21	131.120	Unearned revenue
Uang jaminan pelanggan	20.326	22,32	15.770	Customer's security deposit
Liabilitas imbalan kerja karyawan	50.715	29	51.140	Employee benefits liability
Liabilitas pajak tangguhan - neto	60.672	23e	-	Deferred tax liabilities - net
Total liabilitas jangka panjang	496.581		273.370	Total non-current liabilities
TOTAL LIABILITAS	1.030.933		785.852	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal				Share capital - par value of
Rp1.000.000 per saham				Rp1,000,000 per share
Modal dasar - 40.757.353				Authorized - 40,757,353
saham				shares
Modal ditempatkan dan disetor				Issued and fully paid -
penuh - 17.772.643 saham				17,772,643 shares
pada tahun 2022 dan 2021	17.772.643	24	17.772.643	in 2022 and 2021
Uang muka modal saham	4.286.916	24	1.617.420	Advance for share capital
Defisit	(210.796)		(307.957)	Deficit
Ekuitas neto yang dapat diatribusikan				Net Equity Attributable to the
kepada Pemilik Entitas Induk	21.848.763		19.082.106	Owners of the Parent Entity
Kepentingan non-pengendali	982		920	Non-controlling interest
Ekuitas Neto	21.849.745		19.083.026	Net Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	22.880.678		19.868.878	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the year ended December 31, 2022
(Expressed in million rupiah,
unless otherwise stated)**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31,			
	2022	Catatan/ Notes	2021
PENDAPATAN	1.466.986	25,30	1.355.917
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(1.045.193)	26,30	(989.996)
LABA KOTOR	421.793		365.921
Beban umum dan administrasi	(279.202)	27	(218.351)
LABA USAHA	142.591		147.570
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Penghasilan keuangan	41.920	28	40.664
Laba selisih kurs - neto	20.014		3.432
Penghasilan hibah	7.406		-
Serap rugi entitas asosiasi dan ventura bersama - neto	(12.992)	14	(9.407)
Beban keuangan - neto	(8.939)		(15.626)
Lain-lain - neto	(3.514)		16.407
Penghasilan lain-lain - neto	43.895		35.470
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN	186.486		183.040
Beban pajak final	(10.008)	23f	(11.678)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	176.478		171.362
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(71.510)	23b	(65.829)
LABA TAHUN BERJALAN	104.968		105.533
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya			
Laba (rugi) pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja - neto setelah pajak	(7.745)		166
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	97.223		105.699

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
For the year ended December 31, 2022
(Expressed in million rupiah,
unless otherwise stated)**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31,			
	2022	Catatan/ Notes	2021
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA			
Pemilik Entitas Induk	104.910		105.730
Kepentingan Non Pengendali	58		(197)
TOTAL	104.968		105.533
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA			
Pemilik Entitas Induk	97.161		105.896
Kepentingan Non Pengendali	62		(197)
TOTAL	97.223		105.699

**PROFIT FOR THE YEAR
ATTRIBUTABLE TO
Owners of the parent
Non-Controlling Interest
TOTAL**

**COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR
ATTRIBUTABLE TO
Owners of the parent
Non-Controlling Interest
TOTAL**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA**
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY**
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the year ended December 31, 2022
(Expressed in million rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity					Kepentingan Non-Pengendali/ Non-controlling Interests	Ekuitas Neto/ Net equity	
		Modal ditempatkan dan disektor penuh/ Issued and fully paid share capital	Modal disektor lainnya/ Other paid-up capital	Defisit/ Deficit	Total/ Total				
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020		16.339.169	1.433.474	(413.853)	17.358.790	1.117		17.359.907	Balance as of December 31, 2020
Uang muka modal saham	24	-	1.617.420	-	1.617.420	-		1.617.420	Advance for share capital
Reklasifikasi atas modal disektor lainnya	24	1.433.474	(1.433.474)	-	-	-		-	Reclassification of other paid-up capital
Laba (rugi) tahun berjalan		-	-	105.730	105.730	(197)		105.533	Profit (loss) for the year
Laba komprehensif lain - neto		-	-	166	166	-		166	Other comprehensive income - net
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021		17.772.643	1.617.420	(307.957)	19.082.106	920		19.083.026	Balance as of December 31, 2021
Uang muka modal saham	24	-	2.669.496	-	2.669.496	-		2.669.496	Advance for share capital
Laba tahun berjalan		-	-	104.910	104.910	58		104.968	Profit for the year
Laba (rugi) komprehensif lain - neto		-	-	(7.749)	(7.749)	4		(7.745)	Other comprehensive income (loss) - net
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022		17.772.643	4.286.916	(210.796)	21.848.763	982		21.849.745	Balance as of December 31, 2022

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the year ended
December 31, 2022
(Expressed in million rupiah,
unless otherwise stated)**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31				
	2022	Catatan/ Notes	2021	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari subsidi	953.537		529.591	Receipts from subsidy
Penerimaan dari pelanggan	490.316		411.729	Receipts from customers
Penerimaan penghasilan bunga	33.627		32.531	Receipts from interest income
Pembayaran kepada pemasok	(560.807)		(465.437)	Payment to vendors
Pembayaran kepada komisaris, direksi dan karyawan	(282.471)		(227.625)	Payments to commissioners, directors and employees
Pembayaran bunga pinjaman bank	(700)		(16)	Payment of bank loan interest
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	633.502		280.773	Net cash provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penambahan aset tetap	(45.575)	11,35	(66.033)	Additions to fixed assets
Penambahan investasi kepada entitas asosiasi dan ventura bersama	(5.100)	14	(1.000)	Addition to investment in associate and joint venture
Penambahan aset takberwujud	(37.828)	13,35	(5.243)	Additions to intangible assets
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(88.503)		(72.276)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITY
Penarikan pinjaman bank	28.886	37	5.300	Proceeds of bank loan
Penambahan dana dibatasi penggunaannya	(84.105)	8	(56.862)	Additions to restricted fund
Pembayaran liabilitas sewa	(9.195)	12b,36	(27.830)	Payment of lease liabilities
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(64.414)		(79.392)	Net cash used in financing activities
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	480.585		129.105	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.353.832	4	1.224.727	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1.834.417	4	1.353.832	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn. No. 140 tanggal 17 Juni 2008 dan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tanggal 17 Juni 2008 ("Perda No. 3"). Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No.AHU-36355.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 27 Juni 2008. Pada tanggal 28 Desember 2018 diterbitkan Peraturan Daerah No. 9 ("Perda No. 9"), menggantikan Peraturan Daerah sebelumnya dan status Perusahaan diubah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

Anggaran Dasar ("AD") Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir pada tanggal 22 Desember 2021 sehubungan dengan penambahan dan pengurangan kegiatan usaha perseroan. Perubahan terakhir termuat dalam Akta Notaris Miryany Usman, S.H. yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU-0075295.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 9 Tahun 2018, ruang lingkup kegiatan Perusahaan mencakup:

- a) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan dan pengusahaan prasarana.
- b) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan sarana, pengoperasian sarana, perawatan dan pengusahaan sarana.
- c) Pengembangan dan pengelolaan properti atau bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta Depo dan kawasan sekitarnya.

1. GENERAL

a. Establishment of the Company

PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda) is a Regional-Owned Company established in the Republic of Indonesia by virtue of Notarial Deed No. 140 dated June 17, 2008 of Sutjipto, S.H., M.Kn. and Government Regulation No. 3 Year 2008 dated June 17, 2008 ("Perda No. 3"). Its establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its letter No. AHU-36355.AH.01.01 Year 2008 dated June 27, 2008. On December 28, 2018, published Government Regulation No. 9 ("Perda No. 9") replaced Government Regulation beforehand and the status of the Company was changed to "Perseroan Daerah (Perseroda)".

The Company's Articles of Association ("AoA") has been amended several times, the latest of which was made on December 22, 2021, in relation to equity changes. The latest amendment was under Notarial Deed No. 46 dated December 22, 2021 of Miryany Usman, S.H. and had been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Decision Letter No. AHU-0075295.AH.01.02. Year 2021 dated December 27, 2021.

Based on the Government Regulation of DKI Jakarta No. 9 Year 2018, the Company's scope of activities covers the following:

- a) Infrastructure management for the public train in an urban area that includes infrastructure development, infrastructure operation, infrastructure maintenance, and infrastructure management.*
- b) Facilities management for the public train in an urban area that includes facility development, facilities operation, maintenance and management of the facilities.*
- c) Development and management of property or business on the station area and areas around the station, also Depo and areas around it.*

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 13 April 2017, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Daerah No. 53 Tahun 2017. Berdasarkan peraturan ini, Perusahaan diberi penugasan untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana Mass Rapid Transit.

Pada tanggal 6 Oktober 2017, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur No. 140 Tahun 2017. Berdasarkan peraturan ini, Perusahaan ditugaskan sebagai operator utama pengelola kawasan Transit Oriented Development Koridor (Utara - Selatan) Fase I Mass Rapid Transit Jakarta.

Pada tanggal 13 Oktober 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penyelenggaraan prasarana angkutan umum massal kereta api (Mass Rapid Transit) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perjanjian ini meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan. Perjanjian ini berlaku selama 30 tahun dihitung dan dapat diperpanjang untuk setiap kali untuk jangka waktu maksimal 20 tahun berdasarkan kesepakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 29 Maret 2019, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Perkeretaapian Mass Rapid Transit dan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit.

Pada tanggal 9 September 2019, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur No. 95 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu.

Pada tanggal 30 September 2019, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur No. 107 Tahun 2019 tentang Subsidi Moda Raya Terpadu Dan Lintas Raya Terpadu.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

On April 13, 2017, the Governor of DKI Jakarta issued Government Regulation No. 53 Year 2017. Based on this regulation, the Company is appointed to implement infrastructure and rolling stock of Mass Rapid Transit.

On October 6, 2017, the Governor of DKI Jakarta issued Governor Regulation No. 140 Year 2017. Based on this regulation, the Company is assigned to be the main operator of the Transit Oriented Development Corridor (North-South) Phase I Mass Rapid Transit Jakarta.

On October 13, 2017, the Company signed an infrastructure operation agreement for mass railway public transport (Mass Rapid Transit) with the Provincial Government of DKI Jakarta. This agreement covers development, operation, maintenance, and business. This agreement is valid for 30 years starting from the operating license determination date of public railway infrastructure and may be renewed for each time for a maximum period of 20 years based on the agreement in accordance with the provisions of the law.

On March 29, 2019, the Governor of DKI Jakarta issued Governor Regulation No. 34 Year 2019 regarding Mass Rapid Transit and Light Rail Transit Tariffs.

On September 9, 2019, the Governor of DKI Jakarta issued Governor Regulation No. 95 Year 2019 regarding Minimum Service Standards for public transportation with Mass Rapid Transit and Light Rail Transit.

On September 30, 2019, the Governor of DKI Jakarta issued Governor Regulation No. 107 Year 2019 regarding Subsidies for Mass Rapid Transit and Light Rail Transit.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Perusahaan berlokasi di Wisma Nusantara, Jl. M.H. Thamrin Kav. 59, Jakarta, Indonesia. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 April 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup mempunyai 686 karyawan tetap (2021: 667 karyawan tetap) (tidak diaudit).

Perusahaan dan entitas Anak secara bersama-sama disebut sebagai "Grup".

b. Struktur entitas anak, entitas asosiasi dan ventura bersama

Pada tanggal 31 Desember 2022, rincian entitas anak adalah sebagai berikut:

PT Integrasi Transit Jakarta (ITJ)

ITJ didirikan berdasarkan Akta Notaris No.18 tanggal 6 Oktober 2021, Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU - 0051263.AH.01.01 Tahun 2020 tanggal 6 Oktober 2020.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, penyertaan modal Perusahaan di ITJ sebesar Rp4.500 dengan kepemilikan saham sebesar 90%. ITJ bergerak dalam bidang industri real estate dan jasa konsultasi manajemen.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, ITJ mencatatkan total aset masing-masing sebesar Rp78.551 dan Rp20.376 sebelum eliminasi dan konsolidasi.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

The Company is located in Wisma Nusantara, Jl. M.H. Thamrin Kav. 59, Jakarta, Indonesia. The Company started its commercial operations on April 1, 2019.

As of December 31, 2022, the Group had a total of 686 permanent employees (2021: 667 permanent employees) (unaudited).

The Company and its Subsidiary, collectively referred to as the "Group".

b. Structure of subsidiary, associate and joint venture

As of December 31, 2022, the details of the Company's subsidiary are as follows:

PT Integrasi Transit Jakarta (ITJ)

ITJ was established under a Notarial Deed No. 18 dated October 6, 2021 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., and has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia through Decree No. AHU - 0051263.AH.01.01 Year 2020 dated October 6, 2020.

As of December 31, 2022, the Company's equity in ITJ is amounted to Rp4,500 with a share ownership of 90%. ITJ is operating in the real estate industry and management consultant service.

On December 31, 2022 and 2021, ITJ recorded total assets amounted to Rp78,551 and Rp20,376, respectively before elimination and consolidation.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Struktur entitas anak, entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022, rincian entitas asosiasi dan ventura bersama Perusahaan adalah sebagai berikut:

**PT Moda Integrasi Transportasi
Jabodetabek (MITJ)**

Perusahaan Patungan MITJ didirikan berdasarkan Akta Notaris No.11 tanggal 12 Februari 2020, Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU - 0008856.AH.01.01 Tahun 2020 tanggal 12 Februari 2020.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, penyertaan modal Perusahaan di MITJ sebesar Rp45.900 dengan kepemilikan saham sebesar 51%. MITJ dikelola dengan kendali bersama oleh para pemegang saham. MITJ bergerak dalam bidang industri konsultasi transportasi dan manajemen lainnya.

PT Jakarta Lingko Indonesia (JLI)

JLI didirikan berdasarkan Akta Notaris No.78 tanggal 30 Desember 2020, Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU - 0070252.AH.01.01 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020.

Perusahaan memiliki 20% saham atau sebanyak 1.000 lembar saham, dengan nilai sejumlah Rp1.000. JLI bergerak dalam bidang industri sistem pembayaran elektronik.

1. GENERAL (continued)

b. Structure of subsidiary, associate and joint venture (continued)

As of December 31, 2022, the details of the Company's associates and joint venture are as follows:

**PT Moda Integrasi Transportasi
Jabodetabek (MITJ)**

Joint Venture MITJ was established under a Notarial Deed No. 11 dated 12 February, 2020 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., and has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia through Decree No. AHU - 0008856.AH.01.01 Year 2020 dated February 12, 2020.

As of December 31, 2022, the Company's equity in MITJ is amounted to Rp45,900 with a share ownership of 51%. MITJ is managed under joint control by the shareholders. MITJ activities are in transportation and management consulting.

PT Jakarta Lingko Indonesia (JLI)

JLI was established under a Notarial Deed No. 78 dated December 30, 2020 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., and has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia through Decree No. AHU - 0070252.AH.01.01 Year 2020 dated December 30, 2020.

The Company owns 20% shares, valued at Rp1,000. JLI is operating in electronic payment industry.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Manajemen Kunci dan Informasi Lainnya

Berdasarkan Akta Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No. 51 tanggal 28 Oktober 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris

Dodik Wijanarko
Bambang Kristiyono
Rukijo
William P. Sabandar

Direksi
Direktur Utama
Direktur Konstruksi
Direktur Operasional dan Pemeliharaan
Direktur Keuangan dan Manajemen
Korporasi
Direktur Pengembangan Bisnis

Tuhyat
Silvia Halim
Muhammad Effendi
Roy Rahendra
Farchad Husein Mahfud

Berdasarkan Akta Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No. 02 tanggal 5 Mei 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris

Muhammad Syaugi
Rukijo
Adnan Pandu Praja
Mukhtasor
Zulfikri

Direksi
Direktur Utama
Direktur Konstruksi
Direktur Operasional dan Pemeliharaan
Direktur Keuangan dan Manajemen
Korporasi
Direktur Pengembangan Bisnis

William P. Sabandar
Silvia Halim
Muhammad Effendi
Roy Rahendra
Farchad Husein Mahfud

Jumlah gaji dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp36.572 (2021: Rp18.593).

1. GENERAL (continued)

c. Key Management and Other Information

Based on the Notarial Deed No. 51 dated October 28, 2022 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2022 was as follows:

Board of Commissioners
President Commissioner
Commissioners

Directors
President Director
Construction Director
Operations and Maintenance Director
Finance and Corporate
management director
Business Development Director

Based on the Notarial Deed No. 02 dated May 5, 2021 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2021 was as follows:

Board of Commissioners
President Commissioners
Commissioners

Directors
President Director
Construction Director
Operations and Maintenance Director
Finance and Corporate
management director
Business Development Director

The compensation and other benefits of the Company's Boards of Commissioners and Directors for the year ended December 31, 2022 amounted to Rp36,572 (2021: Rp18,593).

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK").

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") 1: Penyajian Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali akun-akun tertentu yang diukur dengan dasar sebagaimana dijelaskan di dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan metode langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of presentation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which consist of the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations to Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK").

The consolidated financial statements are prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") 1: Presentation of Financial Statements.

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the consolidated statement of cash flows, using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the relevant notes herein.

The consolidated statement of cash flows presents the receipts and payments of cash and cash equivalents classified into operating, investing, and financing activities. The cash flows from operating activities are presented using the direct method.

The reporting currency used in the consolidated financial statements is the Indonesian rupiah, which is also the functional currency of the Group.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Perubahan kebijakan akuntansi

b. Changes in accounting principles

Grup menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Grup:

The Group made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2022, including the following revised standards that have affected the consolidated financial statements of the Group:

Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis - Rujukan ke Kerangka Konseptual

Amendments to PSAK 22: Business Combinations - Reference to Conceptual Frameworks

Amendemen ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

These amendments clarify the interactions between PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 and the Conceptual Framework of Financial Reporting.

Secara umum, amendemen PSAK 22:

In general, the amendments to PSAK 22:

- Menambahkan deskripsi terkait "liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK 57 atau ISAK 30".
- Mengklarifikasi liabilitas kontinjensi yang telah diakui pada tanggal akuisisi.
- Menambahkan definisi aset kontinjensi dan perlakuan akuntansinya.

- Add a description regarding "liabilities and contingent liabilities within the scope of PSAK 57 or ISAK 30".
- Clarifying the contingent liabilities recognized at the acquisition date.
- Adds definition of a contingent asset and its accounting treatment.

Amendemen ini tidak memiliki dampak pada pelaporan keuangan konsolidasian Grup pada saat diadopsi untuk pertama kali.

This amendments have no impact to the consolidated financial reporting of the Group upon first-time adoption.

Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Merugi-Biaya Memenuhi Kontrak

Amendments to PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets - Onerous Contract Fulfillment Costs

Amendemen PSAK 57 mengatur biaya-biaya untuk memenuhi kontrak merugi terdiri dari biaya yang terkait langsung dengan kontrak, dimana terdiri dari:

These amendments provide that costs to fulfill an onerous contract consist of costs that are directly related to the contract, which consist of:

1. biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut, dan
2. alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

1. incremental costs to fulfill the contract, and
2. allocation of other costs that are directly related to fulfilling the contract.

Amendemen ini tidak memiliki dampak pada pelaporan keuangan konsolidasian Grup pada saat diadopsi untuk pertama kali.

These amendments have no impact to the consolidated financial reporting of the Group upon first-time adoption.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

b. Changes in accounting principles (continued)

**Penyesuaian Tahunan 2020 – PSAK 71:
Instrumen Keuangan**

**2020 Annual Improvements – PSAK 71:
Financial Instruments**

Amandemen ini mengklasifikasi biaya yang diperhitungkan entitas dalam mengevaluasi apakah persyaratan yang dimodifikasi dari suatu liabilitas keuangan menyebabkan penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Biaya tersebut hanya mencakup yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk fee yang dibayarkan atau diterima baik oleh peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.

The amendment classify the fees that an entity includes when assessing whether the modified terms of a financial liability required derecognition of the original financial liability and recognition of a new financial liability. These fees include only those paid or received between the borrower and the lender, including fees paid or received by either the borrower or lender on the other's behalf.

Amendemen ini tidak memiliki dampak pada pelaporan keuangan konsolidasian Grup pada saat diadopsi untuk pertama kali.

These amendments have no impact to the consolidated financial reporting of the Group upon first-time adoption.

**Penyesuaian Tahunan 2020 – PSAK 73:
Sewa**

**2020 Annual Improvements - PSAK 73:
Leases**

Amandemen terhadap Contoh Ilustrasi 13 yang merupakan bagian dari PSAK 73 menghilangkan dari contoh ilustrasi penggantian perbaikan properti sewaan oleh pesewa untuk mengatasi potensi kebingungan mengenai perlakuan insentif sewa yang mungkin timbul karena cara insentif sewa diilustrasikan dalam contoh tersebut.

The amendment to Illustrative Example 13 accompanying PSAK 73 removes from the example the illustration of the reimbursement of leasehold improvements by the lessor in order to resolve any potential confusion regarding the treatment of lease incentives that might arise because of how lease incentives are illustrated in that example.

Amendemen ini tidak memiliki dampak pada pelaporan keuangan konsolidasian Grup pada saat diadopsi untuk pertama kali.

These amendments have no impact to the consolidated financial reporting of the Group upon first-time adoption.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

c. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-anak. Kendali diperoleh bila Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini:

- i. Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*,
- ii. Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
- iii. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Bila Grup tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu *investee*, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- i. Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
- ii. Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
- iii. Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Grup.

Grup menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas entitas-entitas anak dimulai sejak Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh kendali sampai tanggal Grup tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Principles of consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Thus, the Group controls an investee if and only if the Group has all of the following:

- i. Power over the investee, that is existing rights that give the Group current ability to direct the relevant activities of the investee,
- ii. Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and
- iii. The ability to use its power over the investee to affect its returns.

When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- i. The contractual arrangement with the other vote holders of the investee,
- ii. Rights arising from other contractual arrangements, and
- iii. The Group's voting rights and potential voting rights.

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

c. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain ("PKL") diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit. Bila dipandang perlu, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak untuk diselaraskan dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar anggota Grup dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup menghentikan pengakuan atas aset (termasuk goodwill), liabilitas dan komponen lain dari ekuitas terkait, dan selisihnya diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

d. Klasifikasi lancar dan tidak lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Principles of consolidation (continued)

Profit or loss and each component of other comprehensive income ("OCI") are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies.

All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relation to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, NCI and other components of equity, while the difference is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.

d. Current and non-current classification

The Group presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- i) expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,*
- ii) held primarily for the purpose of trading,*
- iii) expected to be realized within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.*

All other assets are classified as non-current.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

d. Klasifikasi lancar dan tidak lancar (lanjutan)

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

e. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Entitas asosiasi adalah entitas yang terhadapnya Grup memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian Grup atas hasil usaha entitas asosiasi atau ventura bersama. Setiap perubahan OCI dari *investee* tersebut disajikan sebagai bagian dari pendapatan komprehensif Grup lainnya ("OCI"). Apabila telah terjadi perubahan yang diakui secara langsung dalam ekuitas entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut, Grup mengakui bagiannya atas perubahan, jika ada, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akibat transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut dieliminasi sesuai kepentingan entitas asosiasi atau ventura bersama.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**d. Current and non-current classification
(continued)**

A liability is current when it is:

- i) expected to be settled in the normal operating cycle,
- ii) held primarily for the purpose of trading,
- iii) due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- iv) there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets are classified as non-current assets.

e. Investment in Associates and Joint Ventures

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee, but is not control or joint control over those policies.

The consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income reflects the Group's share of the results of operations of the associate or joint venture. Any change in OCI of those investees is presented as part of the Group's Other comprehensive income ("OCI"). In addition, when there has been a change recognized directly in the equity of the associate or joint venture, the Group recognizes its share of any changes, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Group and the associate or joint venture are eliminated to the extent of the interest in the associate or joint venture.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**e. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura
Bersama (lanjutan)**

Keseluruhan bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi dan ventura bersama disajikan pada laba rugi di luar laba operasi dan merupakan laba rugi setelah pajak dan NCI pada entitas-entitas anak dari entitas asosiasi atau ventura bersama.

Laporan keuangan entitas asosiasi atau ventura bersama disusun untuk periode pelaporan yang sama dengan Grup. Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan untuk menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan Grup.

Setelah penerapan metode ekuitas, Grup menentukan apakah perlu untuk mengakui kerugian penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah ada bukti objektif bahwa investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama terganggu. Jika ada bukti tersebut, Grup menghitung jumlah penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang dapat dipulihkan dari entitas asosiasi atau ventura bersama dan nilai tercatatnya, dan kemudian mengakui kerugian tersebut dalam 'Bagian laba dari perusahaan asosiasi dan ventura bersama' dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Setelah kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi atau pengendalian bersama atas ventura bersama tersebut, Grup mengukur dan mengakui investasi yang ditahan pada nilai wajarnya. Selisih antara jumlah tercatat entitas asosiasi atau ventura bersama dengan kehilangan pengaruh signifikan atau pengendalian bersama dan nilai wajar investasi yang ditahan dan hasil pelepasan diakui dalam laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**e. Investment in Associates and Joint
Ventures (continued)**

The aggregate of the Group's share of profit or loss of an associate and a joint venture is shown on the face of the profit or loss outside operating profit and represents profit or loss after tax and NCI in the subsidiaries of the associate or joint venture.

The financial statements of the associate or joint venture are prepared for the same reporting period as the Group. When necessary, adjustments are made to bring the accounting policies in line with those of the Group.

After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognize an impairment loss on its investment in its associate or joint venture. At each reporting date, the Group determines whether there is objective evidence that the investment in the associate or joint venture is impaired. If there is such evidence, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate or joint venture and its carrying value, and then recognizes the loss within 'Share of profit of an associate and a joint venture' in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Upon loss of significant influence over the associate or joint control over the joint venture, the Group measures and recognizes any retained investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate or joint venture upon loss of significant influence or joint control and the fair value of the retained investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

f. Mata uang asing

Mata uang fungsional yang digunakan Grup adalah rupiah, yang juga merupakan mata uang penyajian dalam laporan keuangan konsolidasian. Transaksi dalam mata uang selain rupiah dicatat dengan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal terakhir transaksi perbankan tahun tersebut. Laba atau rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

Nilai tukar yang digunakan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,		
	2022	2021	
1 Dolar Amerika Serikat	15.731	14.269	1 United States dollar
100 Yen Jepang	11.757	12.389	100 Japanese yen

g. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian terdiri dari kas, bank dan deposito jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo antara 3 bulan atau kurang pada saat penempatan dan tidak dibatasi penggunaannya, dan mana yang memiliki risiko tidak signifikan dari perubahan nilai.

h. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi diakui dalam nilai tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Foreign currencies

The functional currency of the Group is rupiah, which is also as the presentation currency used in the consolidated financial statements. Transactions in currencies other than rupiah are recorded at the prevailing rates of exchange in effect on the date of the transactions. At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to rupiah based on the middle rates published by Bank Indonesia at the last banking transaction date for the year. The resulting gains or losses are credited or charged to current year operations.

The exchange rates used were as follows:

g. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents in the consolidated statement of financial position comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with an original maturity of 3 months or less at the time of placements and not restricted to use, and which are subject to an insignificant risk of changes in value.

h. Fixed assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as they are incurred.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

h. Aset tetap (lanjutan)

h. Fixed assets (continued)

Penyusutan atas setiap aset tetap dimulai ketika aset tetap siap untuk digunakan sesuai peruntukannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

Depreciation of each item of fixed assets starts when it is available for its intended use and is calculated on the straight-line basis over the estimated useful lives of the assets as follows:

	Tahun/Year
Sarana	14-30
Prasarana	
Fasilitas pengoperasian	5-30
Jalur dan bangunan	5-50
Fasilitas	
Peralatan pemeliharaan	10-30
Peralatan mekanikal dan elektrik	10-25
Kendaraan	4
Peralatan dan perabotan kantor	4-5

Rolling stock
Infrastructures
Operating facilities
Building and track
Facilities
Maintenance equipment
Mechanical and electrical equipment
Vehicles
Furniture, fixtures and office equipment

Suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak terdapat manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan nilai tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan konsolidasian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in the year the asset is derecognized.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, masa manfaat, dan metode penyusutan atas aset tetap ditelaah dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

The residual values, useful lives, and methods of depreciation of fixed assets are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at each financial year end.

Akumulasi biaya konstruksi bangunan, mesin dan peralatan dan pemasangan mesin dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan tersebut selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada saat aset tersebut siap digunakan.

The accumulated costs of the construction of buildings, machinery and equipment and the installation of machinery are capitalized as construction in progress. These costs are reclassified to the appropriate fixed assets accounts when the related construction or installation is completed. Depreciation is charged from the date the assets become ready for their intended use.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

h. Aset tetap (lanjutan)

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Grup manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti diskonto baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset kualifikasian, dikapitalisasi sampai saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi dalam tahun berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut.

Untuk pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan suatu aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan menggunakan tingkat kapitalisasi untuk pengeluaran aset kualifikasian tersebut. Tingkat kapitalisasi adalah tingkat rata-rata tertimbang biaya pinjaman terkait pinjaman dalam tahun tertentu, tidak termasuk jumlah pinjaman yang secara khusus digunakan untuk pendanaan pembangunan aset kualifikasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

h. Fixed assets (continued)

Repairs and maintenance expenses are taken to the profit or loss when they are incurred. The cost of major renovation and restoration is included in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Group and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when the construction is completed. For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any income earned from the temporary investment of such borrowings.

For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalization rate to the amount disbursed on the qualifying asset. The capitalization rate is the weighted average of the borrowing cost applicable to the total borrowings outstanding during the year, excluding borrowings directly attributable to financing the qualifying asset under construction.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

i. Aset takberwujud

Aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas diamortisasi selama masa manfaat ekonomis dan dinilai untuk penurunan nilai setiap ada indikasi bahwa aset takberwujud tersebut mungkin mengalami penurunan nilai. Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas dikaji paling lambat pada setiap akhir periode pelaporan. Perubahan dalam masa manfaat yang diharapkan atau pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi masa depan yang terkandung dalam aset dianggap memodifikasi periode atau metode amortisasi, sebagaimana mestinya, dan diperlakukan sebagai perubahan dalam estimasi akuntansi. Beban amortisasi atas aset takberwujud dengan umur terbatas diakui dalam laba rugi dalam kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset takberwujud.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset takberwujud diukur sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset dan diakui dalam laba rugi ketika aset dihentikan pengakuannya.

j. Properti investasi

Properti investasi Grup terdiri dari bangunan dan prasarana yang dikuasai Grup untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada, kecuali tanah yang tidak disusutkan. Total tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi, dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Intangible Assets

Intangible assets with finite lives are amortized over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are considered to modify the amortization period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortization expense on intangible assets with finite life is recognized in the statement of profit or loss in the expense category that is consistent with the function of the intangible assets.

Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in the profit or loss when the asset is derecognized.

j. Investment properties

Investment properties of the Group consist of land, building and infrastructures held by the Group to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business.

Investment properties are stated at cost including transaction cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any, except for land which is not depreciated. Such cost includes the cost of replacing part of the investment properties, if the recognition criteria are met, and excludes the daily expenses on their usage.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

j. Properti investasi (lanjutan)

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Untuk pengalihan dari properti investasi ke properti yang digunakan sendiri, Grup menggunakan metode biaya pada tanggal perubahan penggunaan.

Jika properti yang digunakan Grup menjadi properti investasi, Grup mencatat properti investasi tersebut sesuai dengan kebijakan aset tetap sampai dengan saat tanggal terakhir perubahan penggunaannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Investment properties (continued)

An investment property should be derecognized upon disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal of an investment property is credited or charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in the period the asset is derecognized.

Transfers to investment properties should be made when, and only when, there is a change in use, evidenced by the end of owner-occupation, commencement of an operating lease to another party or end of construction or development. Transfers from investment properties should be made when, and only when, there is a change in use, evidenced by the commencement of owner occupation or commencement of development with a view to sell.

For a transfer from investment properties to owner-occupied property, the Group uses the cost method at the date of change in use.

If an owner-occupied property becomes an investment property, the Group records the investment property in accordance with the fixed assets policies up to the date of change in use.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

k. Pengakuan pendapatan dan beban

Grup menilai pengaturan pendapatannya terhadap kriteria tertentu untuk menentukan apakah ia bertindak sebagai prinsipal atau agen. Grup telah menyimpulkan bahwa ini bertindak sebagai prinsipal dalam semua pengaturan pendapatannya.

Pengakuan pendapatan Grup dilakukan berdasarkan lima langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas penyerahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas penyerahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri *relative* diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Revenue and expense recognition

The Group assesses its revenue arrangements against specific criteria to determine if it is acting as principal or agent. The Group has concluded that it is acting as principal in all of its revenue arrangement.

The Group's revenue recognition fulfils the following five steps of assessment:

1. *Identify contract(s) with a customer;*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;*
3. *Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer which will be paid during the contract period;*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct good or service promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling prices are estimated based on expected cost plus margin; and*
5. *Recognise revenue when the performance obligation is satisfied by transferring a promised good or service to a customer (which is when the customer obtains control of that good or service).*

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**k. Pengakuan pendapatan dan beban
(lanjutan)**

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi:

- a. Pada suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Kriteria pengakuan tertentu berikut harus dipenuhi sebelum pengakuan pendapatan diakui:

- Pendapatan tiket diakui pada saat jasa angkutan telah selesai diberikan.
- Pendapatan Non-tiket yang diterima dimuka disajikan sebagai "Pendapatan diterima di muka". Pendapatan Non-tiket diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa kontrak ditambah dengan bagi hasil, apabila ada.
- Subsidi sarana dan prasarana diakui sebagai pendapatan berdasarkan berita acara verifikasi bulanan yang disepakati bersama antara Perusahaan dan Pemerintah, dimana disepakati jumlah subsidi yang akan dibayarkan oleh Pemerintah dan telah diakui sebagai kewajiban oleh Pemerintah. Nilai subsidi yang diakui oleh Pemerintah pada akhir tahun adalah sesuai dengan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Beban diakui pada saat terjadinya, kecuali biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan konstruksi proyek MRT Jakarta dikapitalisasi pada aset dalam penyelesaian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**k. Revenue and expense recognition
(continued)**

A performance obligation may be satisfied:

- a. At a point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

The following specific recognition criteria must be met before revenue recognition will be recognized:

- Farebox revenue is recognized when services are rendered.
- Non-Farebox revenues received in advance are presented as "Unearned Revenues". Non-farebox revenue are recognized as revenue on straight-line basis over the contract period plus revenue and/or profit sharing, if any.
- Facilities and infrastructure subsidy is recognized as revenue based on a monthly verification report in which the amount of subsidy to be paid by the Government is agreed and recognized as an obligation by the Government. The final subsidy amount recognized by the Government at the end of the year is based on audit result of Audit Board of Republic of Indonesia.

Expenses are recognized when incurred, except for the costs incurred in connection with the construction of Jakarta MRT's project which are capitalized as construction in progress.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

1. Imbalan kerja

Pada bulan April 2022, DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia) menerbitkan materi penjelasan melalui siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK 24: Imbalan Kerja yang diadopsi dari IAS 19 *Employee Benefits*. Materi penjelasan tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam *IFRS Interpretation Committee ("IFRIC") Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service* (IAS 19). Grup telah menerapkan materi penjelasan tersebut dan dengan demikian merubah kebijakan akuntansi menyangkut atribusi imbalan kerja pada periode jasa dari yang kebijakan yang diterapkan sebelumnya pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Grup mempunyai program dana pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat.

Grup juga mencatat penyisihan manfaat tambahan selain program dana pensiun tersebut di atas untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan-karyawan sesuai dengan Undang-undang No. 11/2020 ("Undang-undang Cipta Kerja"). Penyisihan tambahan tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuaria metode "Projected Unit Credit".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

1. Employee benefits

In April 2022, DSAK IAI (Institute of Indonesia Chartered Accountants' Accounting Standard Board) issued an explanatory material through a press release regarding attribution of benefits to periods of service in accordance with PSAK 24: *Employee Benefits* which was adopted from IAS 19 *Employee Benefits*. The explanatory material conveyed the information that the fact pattern of the pension program based on the Labor Law currently enacted in Indonesia is similar to those responded and concluded in the *IFRS Interpretation Committee (IFRIC) Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service* (IAS 19). The Group has adopted the said explanatory material and accordingly changed its accounting policy regarding attribution of benefits to periods of service previously applied in the consolidated financial statements of the Company as of December 31, 2022 and for the year then ended.

The Group have defined contribution retirement plans covering all their qualified permanent employees.

The Group also provides additional provisions on top of the benefits provided under the above-mentioned defined contribution pension programs in order to meet and cover the minimum benefits required to be paid to the qualified employees under Law No. 11/2020 (the "Job Creation Law"). The said additional provisions are estimated using actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" method.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

1. Imbalan kerja (lanjutan)

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, efek dari plafon aset, tidak termasuk jumlah yang termasuk dalam bunga bersih atas liabilitas manfaat pasti bersih dan pengembalian aset program (tidak termasuk jumlah yang termasuk dalam bunga bersih atas liabilitas imbalan pasti bersih) segera diakui pada laporan posisi keuangan dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:

- i) ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi; dan
- ii) ketika Perusahaan mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Grup mengakui perubahan berikut pada liabilitas obligasi neto pada akun "Beban Pokok Penjualan" dan "Beban Umum dan Administrasi" pada laba rugi:

- i) Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (*curtailment*) tidak rutin, dan
- ii) Beban atau penghasilan bunga neto.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

1. Employee benefits (continued)

Re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, the effect of the asset ceiling, excluding the amounts included in the net interest on the net defined benefit liability and the return on plan assets (excluding the amounts, included in net interest on the net defined benefit liability) are recognized immediately in the statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI in the period in which they occur. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier between:

- i) the date of the plan amendment or curtailment, and*
- ii) the date the Company recognizes related restructuring costs.*

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. The Group recognizes the following changes in the net defined benefit obligation under "Cost of Revenues" and "General and Administrative Expenses" as appropriate in the profit or loss:

- i) Service costs comprising current service costs, past-service costs, gains or losses on curtailments and non-routine settlements, and*
- ii) Net interest expense or income.*

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

m. Perpajakan

Pajak Penghasilan Kini

Aset dan liabilitas pajak kini diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Grup beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, saldo kredit pajak yang tidak digunakan dan akumulasi rugi fiskal yang tidak terpakai. Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, dan penerapan kredit pajak yang tidak terpakai serta akumulasi rugi fiskal yang dapat digunakan, kecuali:

- i. jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Taxation

Current Income Tax

Current income tax assets and liabilities are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted at the reporting date in the countries where the Group operates and generates taxable income.

Interests and penalties are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expense.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, the carry forward of unused tax credits and any unused tax losses. Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and any unused tax losses can be utilized, except:

- i. when the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

m. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

- ii. dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada entitas anak, perusahaan asosiasi dan kepentingan dalam pengaturan bersama, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Pajak tangguhan atas barang yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Taksiran pajak tangguhan diakui berkorelasi dengan transaksi dasarnya baik di penghasilan komprehensif lain maupun langsung di ekuitas.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

- ii. in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, associates and interest in joint arrangements, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are re-assessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss. Deferred tax items are recognized in correlation to the underlying transaction either in other comprehensive income or directly in equity.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

m. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

- ▶ PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan
- ▶ Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang terpulihkan dari, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari piutang atau utang pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pajak Final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46: Pajak Penghasilan.

n. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

Grup mempunyai transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 7: Pengungkapan pihak-pihak berelasi.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 30.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan pihak tidak berelasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Taxation (continued)

Value Added Tax

Revenue, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:

- ▶ When the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable from the taxation authority, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and
- ▶ When receivables and payables are stated with the amount of VAT included.

The net amount of VAT recoverable from, or payable to, the taxation authorities is included as part of receivables or payables in the consolidated statement of financial position.

Final Tax

In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions, even when the parties carrying the transaction recognize losses.

Final tax is scoped out from PSAK 46: Income Tax.

n. Transaction with related parties

The Group has transactions with related parties as defined in PSAK 7: Related party disclosures.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties. Transactions and balances with related parties are disclosed in Note 30.

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the notes to the consolidated financial statements are unrelated parties.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

o. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Grup menetapkan penyisihan untuk nilai realisasi neto persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan.

p. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lainnya.

Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Grup telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 72.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (NWPKL), aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Cost is calculated using weighted-average method.

The Group provides allowance for net realizable value of inventories based on periodic reviews of the physical conditions and net realizable values of the inventories.

p. Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial Assets

Initial Recognition and Measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 72.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income (FVOCI), it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest ("SPPI")' on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif atas pelepasan (instrumen ekuitas), dan
- Nilai wajar melalui laba rugi (NWLRL).

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk piutang usaha, piutang subsidi, piutang sewa, piutang lain-lain, pendapatan yang harus diterima, uang jaminan dan dana yang dibatasi penggunaannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

Financial Assets (continued)

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- Financial assets at amortized cost (debt instruments),
- Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),
- Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and
- Fair value through profit or loss (FVTPL).

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Group's financial assets at amortized cost includes account receivables, subsidy receivables, lease receivables, other receivables, accrued revenues, guarantee deposits and restricted funds.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan pada NWPKL (instrumen utang)

Untuk instrumen utang yang diukur pada NWPKL, pendapatan bunga, revaluasi mata uang asing dan kerugian penurunan nilai atau pembalikan diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui di PKL. Pada saat penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di PKL direklasifikasi ke laba rugi.

Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif setelah pelepasan (instrumen ekuitas)

Pada pengakuan awal, Grup dapat memilih untuk menetapkan klasifikasi yang takterbatalkan atas investasi pada instrumen ekuitas sebagai NWPKL jika memenuhi definisi ekuitas sesuai PSAK 50 dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan atas basis instrumen per instrumen.

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan ini tidak pernah direklasifikasi ke laba rugi, dan aset keuangan ini tidak menjadi subjek penurunan nilai. Dividen diakui sebagai penghasilan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Grup memilih untuk mengklasifikasi secara takterbatalkan investasi ekuitas yang tidak terdaftar di bursa masuk dalam kategori ini.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Financial assets at FVOCI (debt instruments)

For debt instruments at FVOCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in the statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in OCI. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in OCI is recycled to profit or loss.

Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments)

Upon initial recognition, the Group can elect to classify irrevocably its investments in equity instruments at FVOCI when they meet the definition of equity under PSAK 50 and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss, and these financial assets are not subject to impairment assessment. Dividends are recognized as other income in the profit or loss when the right of payment has been established.

The Group elected to classify irrevocably its non-listed equity investments under this category.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan pada NWLR

Aset keuangan pada NWLR tercatat dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan perubahan neto nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

Derivatif melekat dalam kontrak hibrida, dengan liabilitas keuangan atau kontrak utama non-keuangan, dipisahkan dari kontrak utamanya dan dicatat sebagai derivatif terpisah jika: karakteristik ekonomi dan risiko tidak berkaitan erat dengan kontrak utamanya; instrumen terpisah dengan persyaratan yang sama dengan derivatif melekat akan memenuhi definisi derivatif; dan kontrak hibrida ini tidak diukur pada NWLR. Derivatif melekat diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Penilaian ulang hanya terjadi jika terdapat perubahan baik dalam persyaratan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang sebaliknya akan diperlukan, atau reklasifikasi aset keuangan diluar dari kategori NWLR.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Financial assets at FVTPL

Financial assets at FVTPL are carried in the statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognized in the statement of profit or loss.

A derivative embedded in a hybrid contract, with a financial liability or non-financial host, is separated from the host and accounted for as a separate derivative if: the economic characteristics and risks are not closely related to the host; a separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative; and the hybrid contract is not measured at FVTPL. Embedded derivatives are measured at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss. Reassessment only occurs if there is either a change in the terms of the contract that significantly modifies the cash flows that would otherwise be required or a reclassification of a financial asset out of the FVTPL category.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir
Atau
- Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan 'pass-through', dan salah satu dari (a) Grup telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

Penghentian Pengakuan

Ketika Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan 'pass-through', Grup mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Grup masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Grup tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Grup tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutan. Dalam kasus tersebut, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Grup.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Grup untuk membayar kembali.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Group's consolidated statement of financial position) when:

- *The rights to receive cash flows from the asset have expired*
Or
- *The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset*

Derecognition

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Group continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya amortisasi, nilai wajar melalui laba rugi (NWLR) atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung

Grup menetapkan liabilitas keuangan mencakup utang usaha, utang lain-lain, utang kontraktor, beban akrual, utang bank, utang retensi, liabilitas sewa dan uang jaminan pelanggan yang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Pengukuran selanjutnya

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

Financial Liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at amortized cost, fair value through profit or loss (FVTPL) or through comprehensive income (FVOCI).

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Group designates its financial liabilities include accounts payable, other payable, contractors payable, accrued expenses, bank loan, retention payable, lease liabilities and Customer's security deposit which are classified as financial liabilities at amortized cost. Financial liabilities are classified as non-current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months, and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.

Subsequent measurement

After initial recognition, interest - bearing financial liabilities at amortized cost are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Gains or losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or canceled or expires.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau harga yang diminta pada penutupan bisnis pada akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian.

Teknik penilaian tersebut mencakup penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan (*arm's length market transactions*), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskontokan, atau model penilaian lainnya.

q. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada akhir tahun, Grup melakukan penelaahan untuk menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai aset.

Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi kerugian akibat penurunan nilai apabila terjadi kondisi atau perubahan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat diperoleh kembali secara penuh. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan jumlah terpulihkan dari aset tersebut. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara harga jual neto atau nilai pakai aset. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset-aset diklasifikasikan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah. Pemulihan penyisihan penurunan nilai diakui sebagai penghasilan pada tahun dimana pemulihan tersebut terjadi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Financial instruments (continued)

Financial Liabilities

Fair value of financial instruments

The fair value of financial instruments that are actively traded in organized financial markets is determined by reference to quoted market bid or ask prices at the close of business at the end of the reporting period. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques.

Such techniques may include using recent arm's length market transaction, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models.

q. Impairment of non-financial assets

At the end of the year, the Group undertakes a review to determine whether there is any indication of asset impairment.

Fixed asset and other non-current assets are reviewed for impairment losses whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which an asset's carrying amount exceeds its recoverable amount which is the higher of the asset's net selling price or value in use. For the purpose of assessing impairment, assets are classify at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows. Reversal of an impairment provision is recorded as income in the year when the reversal occurs.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

r. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

s. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi diungkapkan, kecuali jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, tetapi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar (*probable*) arus masuk manfaat ekonomi.

t. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaatnya, dan disajikan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar sesuai sifatnya masing-masing.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

s. Contingencies

Unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote, contingent liabilities are disclosed. Contingent assets are not recognized in the consolidated financial statements but are disclosed when an inflow of economic benefits is probable.

t. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized and charged to operations over the periods benefited, and are presented as current asset or non-current asset based on their nature.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mensyaratkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas, serta pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Namun, ketidakpastian estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan hasil yang memerlukan penyesuaian material atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang berdampak pada masa mendatang.

a. Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

- Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah, antara lain, mata uang yang mempengaruhi secara signifikan terhadap beban usaha dan mata uang atas dana yang dihasilkan dari kegiatan pembiayaan.

- Pengklasifikasian properti

Grup menentukan apakah sebuah properti yang diperoleh diklasifikasikan sebagai properti investasi atau persediaan properti:

- Properti investasi terdiri dari tanah dan bangunan (terutama kantor dan properti ritel) yang tidak bertujuan untuk digunakan oleh atau dalam kegiatan operasi Grup, tidak juga untuk dijual dalam kegiatan bisnis, tetapi digunakan untuk memperoleh pendapatan sewa dan peningkatan nilai.
- Persediaan properti terdiri dari properti yang bertujuan untuk dijual dalam kegiatan bisnis. Secara khusus, berkaitan dengan properti hunian yang dikembangkan oleh Grup dan digunakan untuk dijual sebelum atau pada saat penyelesaian konstruksi.

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

a. Judgments

The following judgments were made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

- Determination of functional currency

The functional currency of the Group is the currency of the primary economic environment in which it operates. It is the currency that, among others, mainly influences operating expenses and the currency in which funds from financing activities are generated.

- Classification of property

The Group determines whether an acquired property is classified as investment property or property inventory:

- Investment property consists of land and buildings (principally offices and retail property) which are not occupied substantially for use by, or in the operations of the Group, nor for sale in the ordinary course of business, but are held primarily to earn rental income and capital appreciation.
- Property inventory consists of property that is held for sale in the ordinary course of business. In particular, it pertains to the residential property that the Group develops and intends to sell on or before the completion of construction.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

a. Pertimbangan (lanjutan)

• **Pengaturan bersama**

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan kapan Grup memiliki pengendalian bersama terhadap sebuah pengaturan, yang memerlukan penilaian dari aktivitas yang relevan dan apabila keputusan sehubungan dengan aktivitas tersebut mengharuskan persetujuan dengan suara bulat.

Grup menetapkan bahwa aktivitas relevan bagi Grup untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berhubungan dengan keputusan keuangan, operasional dan modal dari pengaturan tersebut.

Pertimbangan juga diperlukan untuk menentukan klasifikasi suatu pengaturan bersama. Pengklasifikasian tersebut mengharuskan Grup menilai hak dan kewajibannya yang timbul dari pengaturan bersama. Secara khusus, Grup mempertimbangkan berikut ini:

- (1) Apakah pengaturan bersama dibentuk melalui entitas terpisah; dan
- (2) Ketika pengaturan bersama dibentuk melalui entitas terpisah, Grup juga mempertimbangkan hak dan kewajiban para pihak yang timbul dari:
 - Bentuk hukum dari entitas terpisah;
 - Persyaratan pengaturan kontraktual; atau
 - Fakta dan keadaan lainnya, jika relevan

Penilaian tersebut sering memerlukan pertimbangan yang signifikan. Kesimpulan yang berbeda baik atas kesimpulan mengenai pengendalian bersama dan apakah suatu pengaturan adalah sebuah operasi bersama atau ventura bersama, dapat secara material mempengaruhi perlakuan akuntansinya.

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

a. Judgments (continued)

• **Joint arrangements**

Judgement is required to determine when the Group has joint control over an arrangement, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent.

The Group has determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the financial, operational and capital decisions of the arrangement.

Judgement is also required to classify a joint arrangement. Classifying the arrangement requires the Group to assess its rights and obligations arising from the arrangement. Specifically, the Group considers the following:

- (1) *Whether the joint arrangement is structured through a separate entity; and*
- (2) *When the arrangement is structured through a separate entity, the Group also considers the rights and obligations arising from:*
 - *The legal form of the separate entity;*
 - *The terms of the contractual arrangement; or*
 - *Other relevant facts and circumstances.*

This assessment often requires significant judgement. A different conclusion about both joint control, and whether the arrangement is a joint operation or a joint venture, may materially impact the accounting treatment.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

b. Estimasi dan asumsi

- Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian atas Piutang Usaha

Grup menetapkan penyisihan penurunan nilai piutang usaha menggunakan pendekatan yang disederhanakan dari ECL. Matriks provisi digunakan untuk menghitung ECL untuk piutang usaha dan lain-lain. Tarif penyisihan didasarkan pada hari tunggakan untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian serupa.

Matriks penyisihan awalnya didasarkan pada riwayat tingkat kerugian pelanggan. Perusahaan akan melakukan penyesuaian pengalaman kerugian historis dengan informasi berwawasan ke depan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi yang terkait erat dengan riwayat tingkat kerugian diperkirakan akan memburuk pada tahun berikutnya yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar pada sektor-sektor pelanggan beroperasi, riwayat tingkat kerugian disesuaikan

Pada setiap tanggal pelaporan, riwayat tingkat gagal bayar yang diamati diperbarui dan perubahan dalam estimasi berwawasan ke depan dianalisis

Evaluasi atas korelasi antara tingkat gagal bayar yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi dan ECL, adalah estimasi signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin tidak mewakili tingkat gagal bayar pelanggan aktual di masa depan.

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

b. Estimates and assumptions

- Allowance for Expected Credit Losses of Accounts Receivables

The Group estimates impairment allowance for accounts receivables using simplified approach of ECL. A provision matrix is used to determine ECL for accounts receivables, where the allowance rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns.

The provision matrix is initially based on the customers historical observed loss rates. The Company will adjust the historical observed loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions closely related to the historical observed loss are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the sectors where customers are operating, the historical losses are adjusted accordingly.

At every reporting date, the historical observed loss rates are updated and changes in the forward looking estimates are analyzed

The assessment of the correlation between historical observed loss rates, forecast economic conditions and ECLs, is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical observed loss rate and forecast of economic conditions may not be representative of customer's actual default in the future

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

c. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

- Penentuan nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan

Ketika nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diambil dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model arus kas terdiskonto.

Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan dalam asumsi mengenai faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan.

- Estimasi masa manfaat aset tetap

Grup mengestimasi masa manfaat dari aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dapat didukung dengan rencana dan strategi usaha yang juga mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan perilaku pasar.

Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan diatas.

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

c. Estimates and assumptions (continued)

- Determination of fair values of financial assets and financial liabilities

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the statement of financial position cannot be derived from active markets, their fair values are determined using valuation techniques including the discounted cash flow model.

The judgments include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair values of financial instruments.

- Estimating useful lives of fixed assets

The Group estimates the useful lives of its fixed assets based on expected asset utilization as anchored on business plans and strategies that also consider expected future technological developments and market behavior.

The estimation of the useful lives of fixed assets is based on the Group's collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives are reviewed at least each financial year end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

- Estimasi masa manfaat aset tetap (lanjutan)

Jumlah dan waktu dari beban yang dicatat untuk setiap tahun akan terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan situasi tersebut. Pengurangan dalam estimasi masa manfaat dari aset tetap Grup akan meningkatkan beban operasi dan menurunkan aset tidak lancar yang dicatat.

Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai 50 tahun, yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya.

- Estimasi atas Suku Bunga Pinjaman Inkremental ("SBPI") dari Suatu Sewa

Grup tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu, Grup menggunakan SBPI untuk mengukur liabilitas sewa. SBPI adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Grup untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama.

Dengan demikian, SBPI mencerminkan tingkat bunga yang harus dibayar oleh Grup, yang perlu diestimasi ketika tidak ada tingkat bunga yang dapat langsung diamati (seperti untuk entitas dalam Grup yang tidak melakukan transaksi pembiayaan) atau ketika tingkat bunga perlu disesuaikan untuk mencerminkan persyaratan dan kondisi sewa.

Grup menetapkan estimasi SBPI menggunakan input yang dapat diamati (seperti suku bunga pasar) jika tersedia dan diharuskan untuk membuat estimasi spesifik untuk entitas tertentu jika diperlukan.

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

b. Estimates and assumptions (continued)

- *Estimating useful lives of fixed assets (continued)*

The amounts and timing of recorded expenses for any year will be affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of the Group's fixed assets will increase the recorded operating expenses and decrease non-current assets.

The management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 to 50 years, which are common life expectancies applied in the industry where the Group conducts its business.

- *Estimating the Incremental Borrowing Rate ("IBR") of a Lease*

The Group cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, it uses its IBR to measure lease liabilities. The IBR is the rate of interest that the Group would have to pay to borrow over a similar term.

The IBR therefore reflects interest the Group would have to pay, which requires estimation when no observable rates are available (such as for entities within the Group that do not enter into financing transactions) or when they need to be adjusted to reflect the terms and conditions of the lease.

The Group estimates the IBR using observable inputs (such as market interest rates) when available and is required to make certain entity-specific estimates as necessary.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

- Penurunan nilai aset non-keuangan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup, setiap aset atau unit penghasil kas dievaluasi setiap tahun pelaporan untuk menentukan apakah ada indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi, estimasi jumlah yang dapat dipulihkan akan dilakukan dan kerugian penurunan nilai akan diakui sejauh jumlah tercatat melebihi jumlah yang dapat dipulihkan. Jumlah yang dapat diperoleh kembali dari sebuah aset atau kelompok aset penghasil kas diukur pada nilai wajar yang lebih tinggi dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai.

Penentuan nilai wajar dan nilai pakai mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tentang ekspektasi operasi dan volume pendapatan, harga tiket, biaya operasi, serta belanja modal di masa depan.

Estimasi dan asumsi ini memiliki risiko dan ketidakpastian; sehingga ada kemungkinan bahwa perubahan situasi akan mengubah proyeksi ini, yang selanjutnya dapat mempengaruhi jumlah aset yang dapat dipulihkan. Dalam keadaan seperti itu, beberapa atau semua aset mungkin akan mengalami penurunan nilai atau biaya penurunan nilai dikurangi dengan dampak yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

b. Estimates and assumptions (continued)

- Impairment of non-financial assets

In accordance with the Group's accounting policy, each asset or cash-generating unit is evaluated every reporting year to determine whether there are any indications of impairment. If any such indication exists, a formal estimate of recoverable amount is performed and an impairment loss recognized to the extent that the carrying amount exceeds the recoverable amount. The recoverable amount of an asset or cash-generating company of assets is measured at the higher of fair value less costs to sell and value in use.

The determination of fair value and value in use requires management to make estimates and assumptions about expected operations and revenue volumes, ticket prices, operating costs, and future capital expenditure.

These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty; hence, there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may have an impact on the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired or the impairment charge reduced with the impact recorded in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

- Realisasi dari aset pajak tangguhan

Grup melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai tersebut sampai sebesar kemungkinan aset tersebut tidak dapat direalisasikan, dimana penghasilan kena pajak yang tersedia memungkinkan untuk penggunaan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut. Penelaahan Grup atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan permanen yang dapat dikurangkan didasarkan atas tingkat dan waktu dari penghasilan kena pajak yang ditaksirkan untuk periode pelaporan berikutnya.

Taksiran ini berdasarkan hasil pencapaian di masa lalu dan ekspektasi di masa depan terhadap pendapatan dan beban, sebagaimana juga dengan strategi perencanaan perpajakan di masa depan. Tetapi tidak terdapat kepastian bahwa Grup dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh bagian dari aset pajak tangguhan tersebut.

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

b. Estimates and assumptions (continued)

- Realization of deferred tax assets

The Group reviews the carrying amounts of deferred tax assets at the end of each reporting period and reduces these to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized. The Group's assessment on the recognition of deferred tax assets on deductible temporary differences is based on the level and timing of forecasted taxable income of the subsequent reporting period.

This forecast is based on the Group's past results and future expectations on revenues and expenses as well as future tax planning strategies. However, there is no assurance that the Group will generate sufficient taxable income to allow all or part of deferred tax assets to be utilized.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (LANJUTAN)**

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

- Estimasi beban imbalan kerja karyawan

Imbalan karyawan ditentukan dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*. Penilaian aktuaris termasuk membuat variasi asumsi yang terdiri dari, antara lain, tingkat diskonto, tingkat pengembalian dana pensiun yang diharapkan, tingkat kenaikan kompensasi dan tingkat kematian.

Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan oleh Grup langsung diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan atas asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material atas estimasi liabilitas imbalan karyawan dan beban imbalan karyawan neto. Nilai tercatat atas estimasi liabilitas imbalan karyawan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp53.963 dan Rp51.140 (Catatan 29).

Grup percaya bahwa asumsi mereka adalah memadai dan tepat, perbedaan signifikan dalam pengalaman aktual Grup atau perubahan signifikan dalam asumsi dapat mempengaruhi secara material beban dan kewajiban pensiun dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Semua asumsi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan.

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (CONTINUED)**

b. Estimates and assumptions (continued)

- *Estimation of employee benefits*

Employee benefits are determined using the projected-unit-credit method. Actuarial valuation includes making various assumptions which consist of, among others, discount rates, expected rates of return on plan assets, rates of compensation increases and mortality rates.

Actual results that differ from the assumptions set forth by the Group are recognized immediately in profit or loss as incurred. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions used can materially affect the estimated liability for employee benefits and employee benefits expense. The amount of the estimated employee benefits liability as of December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp53,963 and Rp51,140, respectively (Note 29).

While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Groups's actual experience or significant changes in its assumptions may materially affect the costs and obligations of pension and other long-term employee benefits. All assumptions are reviewed at each reporting date.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2022	2021
Kas	1.309	824
Bank		
Pihak berelasi - rupiah: (Catatan 30)		
PT Bank DKI	14.812	4.829
Pihak ketiga:		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	88.654	49.340
PT Bank Central Asia Tbk	1.657	10.423
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.842	2.031
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	859	1.895
Dolar Amerika Serikat		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	27	26
Total bank	110.851	68.544
Total kas dan bank	112.160	69.368
Deposito berjangka - rupiah		
Pihak berelasi: (Catatan 30)		
PT Bank DKI	1.449.471	1.024.140
Pihak ketiga:		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	222.530	217.921
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	36.414	34.265
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	9.795	8.138
PT Bank Central Asia Tbk	4.047	-
Total deposito berjangka	1.722.257	1.284.464
Total kas dan setara kas	1.834.417	1.353.832

Rekening di bank memiliki tingkat bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada masing-masing bank. Pada tahun 2022 tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka berkisar antara 1,90% sampai dengan 4,75% (2021: antara 2,25% sampai dengan 4,50%)

Tingkat bunga yang diperoleh dari bank pihak yang berelasi sebanding dengan tingkat bunga yang diperoleh dari bank pihak ketiga.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

This account consists of:

Cash on hand
Cash in banks
Related party - rupiah: (Note 30)
PT Bank DKI
Third parties:
Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
United States Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total cash in banks
Cash on hand and in banks
Time deposits - rupiah
Related party: (Note 30)
PT Bank DKI
Third parties:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
Total time deposits
Total cash and cash equivalents

Accounts in banks earn interest at floating rates based on the offered rate from each bank. In 2022, time deposits earned interest at annual rates ranging from 1.90% to 4.75% (2021: from 2.25% to 4.50%).

The interest rates of the related-party bank are comparable to those offered by third-party banks.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

5. PIUTANG USAHA – NETO

Akun ini terdiri dari:

5. ACCOUNT RECEIVABLES - NET

This account consists of:

		31 Desember/December 31,		
		2022	2021	
Lancar				Current
Pihak berelasi: (Catatan 30)				<i>Related party: (Note 30)</i>
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	115.700	31.436		<i>PT Jakarta Infrastruktur Propertindo</i>
Perumda Pembangunan Sarana Jaya	6.893	5.349		<i>Perumda Pembangunan Sarana Jaya</i>
KSO ITJ-DPP	3.020	-		<i>KSO ITJ-DPP</i>
PT Bank DKI	950	944		<i>PT Bank DKI</i>
PT Jakarta Lingko Indonesia	210	82		<i>PT Jakarta Lingko Indonesia</i>
Sub-total pihak berelasi	126.773	37.811		<i>Sub-total related party</i>
Pihak ketiga:				<i>Third parties:</i>
PT Avabanindo Perkasa	334.620	16.100		<i>PT Avabanindo Perkasa</i>
PT Bank Digital BCA	6.660	-		<i>PT Bank Digital BCA</i>
PT Inti Menara Jaya	2.980	1.750		<i>PT Inti Menara Jaya</i>
PT Trimedia Imaji Rekso Abadi	2.750	-		<i>PT Trimedia Imaji Rekso Abadi</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.872	1.872		<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
PT KOI Café Indonesia	1.664	1.100		<i>PT KOI Café Indonesia</i>
PT Jasamarga Related Business	-	5.500		<i>PT Jasamarga Related Business</i>
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500)	4.914	1.006		<i>Others (each below Rp500)</i>
Sub-total pihak ketiga	355.460	27.328		<i>Sub-total third party</i>
Cadangan penurunan nilai				<i>Allowance for impairment</i>
Pihak berelasi (Catatan 30)	(18.840)	-		<i>Related parties (Note 30)</i>
Pihak ketiga	(53.778)	(433)		<i>Third parties</i>
Piutang neto				Net account receivables
Pihak berelasi (Catatan 30)	107.933	37.811		<i>Related parties (Note 30)</i>
Pihak ketiga	301.682	26.895		<i>Third parties</i>
Total	409.615	64.706		Total
Tidak Lancar				Non-current
Pihak berelasi: (Catatan 30)				<i>Related party: (Note 30)</i>
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	-	36.934		<i>PT Jakarta Infrastruktur Propertindo</i>
Pihak ketiga:				<i>Third parties:</i>
PT Avabanindo Perkasa	-	191.481		<i>PT Avabanindo Perkasa</i>
Total	-	228.415		Total

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha Grup dinilai secara individual.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan atas penurunan nilai adalah cukup untuk menutup kerugian atas piutang usaha yang tidak tertagih.

On December 31, 2022 and 2021, allowance for impairment losses of the Group's Accounts Receivable is assessed individually.

Management believes that the allowance for impairment in value is adequate to cover possible losses on uncollectible receivables.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

6. PENDAPATAN YANG AKAN DITERIMA

Pendapatan yang akan diterima terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2022	2021
Pihak ketiga:		
Pendapatan non-tiket	8.750	-
Lainnya	-	1.070
Total	8.750	1.070

Pada tanggal 31 Desember 2022, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai Pendapatan yang akan diterima.

6. ACCRUED REVENUES

Accrued revenues consists of:

	31 Desember/December 31,	
	2022	2021
Third parties:		
Non-farebox revenue		
Others		
Total	8.750	1.070

As of December 31, 2022, management believes that no indication of impairment in value of accrued revenues.

7. PERSEDIAAN

Persediaan merupakan suku cadang sarana yang digunakan untuk perawatan rutin/terjadwal kereta yang dilakukan di Depo Lebak Bulus.

Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang dapat mengindikasikan penurunan nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2022, sehingga tidak diperlukan penyisihan atas penurunan nilai persediaan pada tanggal tersebut.

7. INVENTORIES

Inventories represents rolling stock spare parts used for routine/scheduled maintenance of rolling stock which are undertaken in the Company's Lebak Bulus Depots.

Based on the Company's management's review, there are no events or changes in circumstances which indicate that there is impairment in value of the inventories as of December 31, 2022, thus, no allowance for impairment in value of inventories is provided.

8. DANA DIBATASI PENGGUNAANNYA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2022	2021
Pihak berelasi (Catatan 30):		
PT Bank DKI		
Jaminan pinjaman	50.000	15.000
Pihak ketiga:		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
Jaminan pinjaman	45.600	-
Jaminan <i>letter of credit</i>	40.000	40.000
Saldo kartu elektronik	8.085	4.580
Total	143.685	59.580

8. RESTRICTED FUNDS

This account consists of:

Related party (Note 30):	
PT Bank DKI	
Debt collateral	
Third party:	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Debt collateral	
Collateral of letter of credit	
Electronic card balance	
Total	143.685

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

8. DANA DIBATASI PENGGUNAANNYA (lanjutan)

Jaminan pinjaman merupakan *cash collateral* berbentuk deposito berjangka yang dijaminkan Perusahaan kepada PT Bank DKI dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sehubungan dengan fasilitas kredit agunan deposito PT Integrasi Transit Jakarta dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek.

Jaminan *letter of credit* merupakan *cash collateral* berbentuk deposito berjangka yang dijaminkan Perusahaan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sehubungan dengan pembukaan fasilitas *letter of credit*.

Saldo kartu elektronik merupakan saldo *multi trip ticket* yang belum digunakan oleh pelanggan.

Pada tanggal 31 Desember 2022, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai Dana Dibatasi Penggunaannya.

8. RESTRICTED FUNDS (continued)

Loan guarantee represents cash collateral in form of time deposit secured by the Company to PT Bank DKI and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk related to Deposit-Collateral Loan facilities of PT Integrasi Transit Jakarta and PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek.

The letter of Credit guarantee represents cash collateral in the form of time deposit secured by the Company to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk related to the letter of credit facility.

Electronic card balance represents customers' unused multi-trip ticket balance.

As of December 31, 2022, management believes that no indication of impairment in the value of Restricted Funds.

9. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Akun ini terdiri dari:

9. PREPAID EXPENSES

This account consists of:

	31 Desember/December 31,		
	2022	2021	
Asuransi sarana dan prasarana	5.749	6.060	Facility and infrastructure insurance
Asuransi purna jabatan	368	1.819	Post-service insurance
Total	6.117	7.879	Total

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

10. UANG MUKA KONTRAKTOR DAN KONSULTAN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2022	2021
Uang Muka Kontraktor:		
Shimizu - Adhi Karya JV (Contract Package 201 & Contract Package 202)	1.808.417	627.944
PT Hutama Karya (Persero) - Sumitomo Mitsui Construction JO (Contract Package 203)	620.650	620.650
Subtotal	2.429.067	1.248.594
Uang Muka Konsultan:		
Oriental Consultants Global Co JV (Construction Management Consultant Services II)	109.665	132.534
Japan International Consultants for Transportation - Nippon Koei JV (Operation and Maintenance Consulting Services II)	6.953	16.522
Subtotal	116.618	149.056
Total	2.545.685	1.397.650

Akun uang muka kontraktor dan konsultan merupakan uang muka atas pembangunan konstruksi MRT Jakarta Fase II yang bersifat transaksi non-kas.

10. ADVANCE PAYMENT TO CONTRACTORS AND CONSULTANTS

This account consists of:

Advance Payment to Contractors:	
Shimizu - Adhi Karya JV (Contract Package 201 & Contract Package 202)	
PT Hutama Karya (Persero) - Sumitomo Mitsui Construction JO (Contract Package 203)	
Subtotal	
Advance Payment to Consultants:	
Oriental Consultants Global Co JV (Construction Management Consultant Services II)	
Japan International Consultants for Transportation - Nippon Koei JV (Operation and Maintenance Consulting Services II)	
Subtotal	
Total	

Advance payment to contractors and consultants is an advance payment for construction MRT Jakarta Phase II that are non-cash transactions.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

11. ASET TETAP – NETO

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:

11. FIXED ASSETS – NET

The details of fixed assets are as follows:

31 Desember 2022/December 31, 2022				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance
Harga perolehan				Acquisition cost
Sarana	1.597.372	-	-	1.597.372
Prasarana				Rolling stock
Fasilitas pengoperasian	2.289.752	421	-	2.290.173
Jalur dan bangunan	10.727.609	16.490	35.756	10.779.855
Fasilitas				Infrastructure
Peralatan pemeliharaan	423.749	5.474	-	429.223
Mekanikal dan elektrikal	1.128.931	-	-	1.128.931
				Operating facilities
Peralatan dan perabotan kantor	64.312	2.231	-	66.543
Kendaraan	17.443	1.382	-	18.825
				Building and track
Sub-total	16.249.168	25.998	35.756	16.310.922
				Facilities
Aset dalam penyelesaian	1.467.527	1.799.779	(152.205)	3.115.101
				Equipment maintenance
Total harga perolehan	17.716.695	1.825.777	(116.449)	19.426.023
				Mechanical and electrical
				Furniture, fixtures and
				office equipment
				Vehicles
				Sub-total
				Construction in progress
				Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan				Accumulated depreciation
Sarana	148.186	51.746		199.932
Prasarana				Rolling stock
Fasilitas pengoperasian	373.846	135.697		509.543
Jalur dan bangunan	644.721	235.298		880.019
Fasilitas				Infrastructure
Peralatan pemeliharaan	89.869	37.421		127.290
Mekanikal dan elektrikal	167.136	62.104		229.240
				Operating facilities
Peralatan dan perabotan kantor	33.309	12.560		45.869
Kendaraan	13.609	3.090		16.699
				Building and Track
Total akumulasi penyusutan	1.470.676	537.916		2.008.592
				Facilities
				Maintenance equipment
				Mechanical and electrical
				Furniture, fixtures and
				office equipment
				Vehicles
				Total accumulated depreciation
Nilai tercatat	16.246.019			17.417.431
				Carrying amount

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

11. ASET TETAP – NETO (lanjutan)

Rincian aset tetap - neto adalah sebagai berikut:
(lanjutan)

11. FIXED ASSETS – NET (continued)

The details of fixed assets are as follows: (continued)

	31 Desember 2021/ December 31, 2021				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan					Acquisition cost
Sarana	1.597.372	-	-	1.597.372	Rolling stock
Prasarana					Infrastructures
Fasilitas pengoperasian	2.289.752	-	-	2.289.752	Operating facilities
Jalur dan bangunan	10.700.949	26.660	-	10.727.609	Building and track
Fasilitas					Facilities
Peralatan pemeliharaan	421.411	2.338	-	423.749	Equipment maintenance
Mekanikal dan elektrik	1.125.507	3.424	-	1.128.931	Mechanical and electrical
Peralatan dan perabotan kantor	52.908	11.404	-	64.312	Furniture, fixtures and
Kendaraan	17.443	-	-	17.443	office equipment
					Vehicles
Sub-total	16.205.342	43.826	-	16.249.168	Sub-total
Aset dalam penyelesaian	673.165	794.362	-	1.467.527	Construction in progress
Total harga perolehan	16.878.507	838.188	-	17.716.695	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Sarana	96.739	51.447	-	148.186	Rolling stock
Prasarana					Infrastructures
Fasilitas pengoperasian	237.789	136.057	-	373.846	Operating facilities
Jalur dan bangunan	409.724	234.997	-	644.721	Building and Track
Fasilitas					Facilities
Peralatan pemeliharaan	53.194	36.675	-	89.869	Maintenance equipment
Mekanikal dan elektrik	105.762	61.374	-	167.136	Mechanical and electrical
Peralatan dan perabotan kantor	21.243	12.066	-	33.309	Furniture, fixtures and
Kendaraan	9.945	3.664	-	13.609	office equipment
					Vehicles
Total akumulasi penyusutan	934.396	536.280	-	1.470.676	Total accumulated depreciation
Nilai tercatat	15.944.111			16.246.019	Carrying amount

Biaya penyusutan aset tetap dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation of fixed assets are allocated as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2022	2021	
Beban pokok penjualan (Catatan 26)	526.050	523.823	Costs of revenues (Note 26)
Beban umum dan administrasi (Catatan 27)	11.866	12.457	General and administrative expenses (Note 27)
Total	537.916	536.280	Total

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup mengasuransikan aset tetap terhadap risiko kerugian fisik atau kerusakan termasuk risiko kebakaran dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp28.137.932 yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

As of December 31, 2022, the Group has insured its fixed assets against physical loss or damage including loss due to fire with total sum assured amounting to Rp28,137,932 which according to management's opinion, are adequate to cover possible losses that may arise from such risks.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

11. ASET TETAP – NETO (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan melakukan reklasifikasi Aset Tetap Dalam Penyelesaian sebesar Rp116.449 ke akun Properti Investasi dalam Penyelesaian (Catatan 15), sehubungan dengan aset Transport Hub, dikarenakan telah ditetapkan penggunaannya aset tersebut untuk tujuan menghasilkan sewa.

Pada tanggal 31 Desember 2022, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset tetap.

11. FIXED ASSETS – NET (continued)

On December 31, 2022, the Company reclassified Construction in process amounted to Rp116,449 to Investment Properties under construction (Note 15), related to Transport Hub assets, due to the determination of the assets' purpose to earn rental income.

As of December 31, 2022, management believes that no indication of impairment in value of fixed assets.

12. SEWA

a. Aset hak-guna - neto:

Rincian dari aset hak-guna - neto adalah sebagai berikut:

12. LEASES

a. Right of use assets - net:

The details of right of use assets - net are as follows:

	31 Desember 2022/December 31, 2022				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan:					Acquisition Cost:
Aset hak-guna - ruang kantor	41.218		(6.630)	34.588	Right of use asset - office space
Aset hak-guna - kendaraan	801			801	Right of use asset - vehicle
Aset hak-guna - peralatan	3.728			3.728	Right of use asset - equipment
Aset hak-guna - pemanfaatan lahan	-	1.559	-	1.559	Right of use asset - land use
Sub-total	45.747	1.559	(6.630)	40.676	Sub-total
Akumulasi depresiasi:					Accumulated depreciation:
Aset hak-guna - ruang kantor	22.406	8.594	(1.481)	29.519	Right of use asset - office space
Aset hak-guna - kendaraan	290	289	-	579	Right of use asset - vehicle
Aset hak-guna - peralatan	1.242	932		2.174	Right of use asset - equipment
Aset hak-guna - pemanfaatan lahan	-	17	-	17	Right of use asset - land use
Jumlah akumulasi depresiasi	23.938	9.832	(1.481)	32.289	Total accumulated depreciation
Nilai buku neto	21.809			8.387	Net book value

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

12. SEWA

a. Aset hak-guna – neto: (lanjutan):

	31 Desember 2021/December 31, 2021			
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan:				
Aset hak-guna - ruang kantor	39.210	2.008	-	41.218
Aset hak-guna - kendaraan	801	-	-	801
Aset hak-guna - peralatan	3.728	-	-	3.728
Sub-total	43.739	2.008	-	45.747
Akumulasi depresiasi:				
Aset hak-guna - ruang kantor	11.203	11.203	-	22.406
Aset hak-guna - kendaraan	33	257	-	290
Aset hak-guna - peralatan	621	621	-	1.242
Jumlah akumulasi depresiasi	11.857	12.081	-	23.938
Nilai buku neto	31.882			21.809

Biaya penyusutan aset hak guna seluruhnya dicatat pada beban umum dan administrasi (Catatan 27).

Pada tanggal 31 Desember 2022, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai Aset Hak Guna.

b. Liabilitas sewa:

Mutasi liabilitas sewa berdasarkan aset pendasar adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022/ December 31, 2022				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Beban Bunga/ Interest Expense	Pembayaran/ Payment	Saldo akhir/ Ending balance
Aset Pendasar					
Ruang kantor	3.762		20	(3.350)	432
Kendaraan	514		16	(167)	363
Peralatan	1.277		20	(1.297)	-
Pemanfaatan lahan	-	7.648	70	(4.381)	3.337
Total	5.553	7.648	126	(9.195)	4.132

Underlying asset
Office space
Vehicle
Equipment
Land use

Total

12. LEASES

a. Right of use assets – net (continued):

Acquisition Cost:
Right of use asset - office space
Right of use asset - vehicle
Right of use asset - equipment

Sub-total

Accumulated depreciation:
Right of use asset - office space
Right of use asset - vehicle
Right of use asset - equipment

Total accumulated depreciation

Net book value

Depreciation of right-of-use assets are recorded entirely in General and Administrative Expenses (Note 27).

As of December 31, 2022, management believes that no indication of impairment in value of Rights-of-use assets.

b. Lease liabilities:

Movement of lease liabilities based on underlying assets are as follows:

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

12. SEWA (lanjutan)

b. Liabilitas sewa (lanjutan):

Mutasi liabilitas sewa berdasarkan aset pendasar adalah sebagai berikut: (lanjutan)

12. LEASES (continued)

b. Lease liabilities (continued):

Movement of lease liabilities based on underlying assets are as follows: (continued)

	31 Desember 2021/ December 31, 2021					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Beban Bunga/ Interest Expense	Pembayaran/ Payment	Saldo akhir/ Ending balance	
<u>Aset Pendasar</u>						<u>Underlying asset</u>
Ruang kantor	27.190	2.008	160	(25.596)	3.762	Office space
Kendaraan	770	-	30	(286)	514	Vehicle
Peralatan	3.128	-	97	(1.948)	1.277	Equipment
Total	31.088	2.008	287	(27.830)	5.553	Total

Analisa jatuh tempo atas utang sewa adalah sebagai berikut:

The analysis of the maturities of other liabilities related to leases is as follows:

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
Kurang dari 12 bulan	2.948	2.891	Within the next 12 months
Lebih dari 12 bulan	1.184	2.662	More than 12 months
Total	4.132	5.553	Total

c. Piutang sewa

Akun ini terdiri dari:

c. Lease receivable

This account consists of:

	31 Desember 2022/ December 31, 2022					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pendapatan Bunga/ Interest Expense	Pembayaran/ Payment	Saldo akhir/ Ending balance	
Ruang kantor	-	2.794	133	-	2.927	Office space
Pemanfaatan lahan	-	6.414	76	-	6.490	Land use
Total	-	9.208	209	-	9.417	Total

Pada tahun 2022, Perusahaan mengakui penghasilan dari mensubsewakan aset hak-guna sebesar Rp581.

During 2022, the Company recognized income from subleasing right-of-use assets amounted to Rp581.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

12. SEWA (lanjutan)

c. Piutang sewa (lanjutan)

Analisis maturitas piutang sewa adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021
Lancar	6.084	-
Tidak lancar	3.333	-
Total	9.417	-

Pada tanggal 31 Desember 2022, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai piutang sewa.

12. LEASES (continued)

c. Lease receivable (continued)

The maturity analysis of lease receivables is as follows:

Current
Non-current
Total

As of December 31, 2022, management believes that no indication of impairment in value of lease receivable.

13. ASET TAK BERWUJUD – NETO

Rincian aset tak berwujud adalah sebagai berikut:

13. INTANGIBLE ASSETS - NET

The details of intangible assets are as follows:

31 Desember 2022/December 31, 2022				
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan				Acquisition cost
Aset tak berwujud	20.849	26.083	46.932	Intangible assets
Aset tak berwujud dalam penyelesaian	14.821	17.368	32.189	Intangible assets in progress
Total harga perolehan	35.670	43.451	79.121	Total acquisition cost
Akumulasi amortisasi				Accumulated amortization
Aset tak berwujud	8.263	4.849	13.112	Intangible assets
Nilai tercatat	27.407		66.009	Carrying amount
31 Desember 2021/December 31, 2021				
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan				Acquisition cost
Aset tak berwujud	17.874	602	20.849	Intangible assets
Aset tak berwujud dalam penyelesaian	15.021	2.173	14.821	Intangible assets in progress
Total harga perolehan	32.895	2.775	35.670	Total acquisition cost
Akumulasi amortisasi				Accumulated amortization
Aset tak berwujud	5.180	3.083	8.263	Intangible assets
Nilai tercatat	27.715		27.407	Carrying amount

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

13. ASET TAK BERWUJUD – NETO (lanjutan)

Amortisasi dari aset takberwujud pada tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.849 dan Rp3.083 dan dibebankan sebagai bagian dari beban umum dan administrasi (Catatan 27).

Manajemen berpendapat bahwa jumlah tercatat dari seluruh aset takberwujud Perusahaan dapat dipulihkan, sehingga tidak diperlukan adanya penurunan nilai atas aset tak berwujud tersebut.

13. INTANGIBLE ASSETS - NET (continue)

The amortization of intangible assets in 2022 and 2021 amounted to Rp4,849 and Rp3,083 respectively, and was charged as part of general and administrative expenses (Note 27).

Management believes that the carrying value of all intangible assets of the Company is fully recoverable, hence, no provision for impairment in value of intangible assets is provided.

14. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

Rincian investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

14. INVESTMENT IN ASSOCIATE AND JOINT VENTURE

The details of the investments in associates and joint venture are as follows:

		31 Desember 2022/ December 31, 2022				
Asosiasi dan Ventura Bersama/ Associate and Joint Venture	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Nilai tercatat investasi awal tahun/ Carrying value of investment at the beginning of the year	Penambahan investasi / Addition of investment	Bagian laba (Rugi) bersih tahun berjalan/ Portion of Net Profit (loss) for the current year	Bagian Penghasilan Komprehensif Lain/ Portion of Other Comprehensive Income	Nilai tercatat investasi akhir tahun/ Carrying value of investment at the end of the year
PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ)	51%	22.441	5.100	(9.992)	(8)	17.541
PT Jakarta Lingko Indonesia (JLI)	20%	3.000	-	(3.000)	-	-
Total		25.441	5.100	(12.992)	(8)	17.541

		31 Desember 2021/ December 31, 2021				
Asosiasi dan Ventura Bersama/ Associate and Joint Venture	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Nilai tercatat investasi awal tahun/ Carrying value of investment at the beginning of the year	Penambahan investasi tahun berjalan/ Addition of investment	Bagian laba (Rugi) bersih tahun berjalan/ Portion of Net Profit (loss) for the current year		Nilai tercatat investasi akhir tahun/ Carrying value of investment at the end of the year
PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ)	51%	33.848	-	(11.407)		22.441
PT Jakarta Lingko Indonesia (JLI)	20%	-	1.000	2.000		3.000
Total		33.848	1.000	(9.407)		25.441

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup memiliki 51% kepemilikan di MITJ dan 20% kepemilikan di JLI. Investasi Grup dalam MITJ dan JLI dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasian karena Grup mempunyai pengaruh yang signifikan. MITJ dan JLI tidak memiliki kewajiban atau komitmen kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2022.

As of December 31, 2022, the Group has 51% ownership in MITJ and 20% ownership in JLI. The Group's ownership in MITJ and JLI are accounted for using the equity method in the consolidated financial statements due to the Group has significant influence. MITJ and JLI had no contingent liability or commitment as of December 31, 2022.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

14. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Informasi keuangan ringkas dari entitas asosiasi dan ventura bersama, berdasarkan laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

14. INVESTMENT IN ASSOCIATE AND JOINT VENTURE (continued)

Summarized financial information of the joint venture, based on its financial statements are set out below:

Asosiasi dan Ventura Bersama/ Associate and Joint Ventures	Total Aset/ Total Assets	Total liabilitas/ Total liabilities	Total pendapatan/ Total revenues	Laba (rugi)/ Profit (loss)
2022				
PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ)	81.895	46.574	6.243	(18.665)
PT Jakarta Lingko Indonesia (JLI)	40.199	45.889	11.733	(26.235)
2021				
PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ)	59.417	15.415	5.000	(22.367)
PT Jakarta Lingko Indonesia (JLI)	8.231	10.996	-	10.001

15. PROPERTI INVESTASI

Rincian properti investasi adalah sebagai berikut:

15. INVESTMENT PROPERTY

The details of investment property are as follows:

31 Desember 2022/December 31, 2022				
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan				Acquisition cost
Properti investasi dalam konstruksi	-	116.449	116.449	Investment property under construction

Properti investasi merupakan investasi pada bangunan Transport Hub di Jakarta Pusat. Properti investasi tersebut akan disewakan ke pihak ketiga (Catatan 11). Pada tanggal 31 Desember 2022, properti investasi tersebut masih dalam tahap konstruksi, dimana persentase penyelesaian pekerjaan konstruksi adalah 59,1%.

Investment property represents Transport Hub building in Central Jakarta. This investment property will be leased to third parties (Note 11). On December 31, 2022, this investment property is still in the construction process, in which the percentage of completion of the construction works are 59.1%.

Pada tanggal 31 Desember 2022, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai Properti Investasi.

As of December 31, 2022, management believes that no indication of impairment in value of Properti Investasi.

16. UANG JAMINAN

Uang jaminan terdiri dari:

16. GUARANTEED DEPOSITS

Guaranteed deposits consist of:

	31 Desember/December 31,		
	2022	2021	
Jaminan langganan listrik	16.320	16.320	Electricity subscription guarantee
Jaminan sewa kantor	3.793	3.791	Office space rental guarantee
Jaminan lainnya	376	482	Other guarantee deposits
Total	20.489	20.593	Total

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

17. UTANG USAHA

Utang usaha terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2022	2021
PT Sumitomo Indonesia	2.312	-
BPJS Ketenagakerjaan	-	839
Lain-lain	4.692	2.134
Total	7.004	2.973

Pada tanggal 31 Desember 2022, utang usaha merupakan tagihan atas pembelian persediaan dari Pemasok dan operasional lainnya.

Seluruh utang usaha berdenominasi dalam mata uang rupiah.

17. ACCOUNTS PAYABLES

Account payables consists of:

PT Sumitomo Indonesia
BPJS Ketenagakerjaan
Others
Total

As of December 31, 2022, accounts payables represent bills for purchases of inventories from Suppliers and other operations.

All account payables are denominated in rupiah.

18. UTANG KONTRAKTOR DAN UTANG RETENSI

Utang kontraktor terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2022	2021
Shimizu - Obayashi - Wijaya Karya		
• Jaya Konstruksi Joint Venture	42.894	45.754
Obayashi - Shimizu - Jaya Konstruksi Joint Venture	13.166	10.388
Total	56.060	56.142

Utang kontraktor berdasarkan mata uang terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2022	2021
Rupiah	54.510	54.510
Yen Jepang	1.550	1.632
Total	56.060	56.142

18. CONTRACTORS PAYABLE AND RETENTION PAYABLE

Payables to contractors consists of:

Shimizu - Obayashi - Wijaya Karya
- Jaya Konstruksi Joint Venture
Obayashi - Shimizu - Jaya Konstruksi Joint Venture
Total

Payables to contractors based on currency consists of:

Rupiah
Japanese yen
Total

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**18. UTANG KONTRAKTOR DAN UTANG RETENSI
(lanjutan)**

Utang retensi terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2022	2021
Jangka pendek		
Sumitomo Corporation	3.041	6.092
Metro One Consortium	-	5.374
Subtotal	3.041	11.466
Jangka panjang		
JO Shimizu - Adhi Karya	184.249	66.366
SMCC - HK Joint Operation	35.559	6.312
Subtotal	219.808	72.678
Total	222.849	84.144

Utang kontraktor dan utang retensi merupakan kewajiban kepada kontraktor sehubungan dengan proyek pembangunan MRT Fase I dan II.

18. CONTRACTORS PAYABLE AND RETENTION PAYABLE (continued)

Retention payable consists of:

Current
Sumitomo Corporation
Metro One Consortium
Subtotal
Non-Current
JO Shimizu - Adhi Karya
SMCC - HK Joint Operation
Subtotal
Total

Contractors payable and retention payable represents liabilities to contractors in relation with MRT's construction project for phase I and II.

19. BEBAN AKRUAL

Beban akrual terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2022	2021
Kontraktor Aset Fase I dan II	175.790	192.762
Operasional dan pemeliharaan	123.693	86.202
Total	299.483	278.964

19. ACCRUED EXPENSES

Accrued expenses consists of:

Contractors Asset Phase I and II
Operations and maintenance
Total

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

20. UTANG BANK

Utang bank terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2022	2021
ITJ		
Pihak berelasi (Catatan 30)		
PT Bank DKI	34.186	5.300

a. Perjanjian Kredit Agunan Tunai sebesar Rp15.000

Pada tanggal 20 September 2021, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pinjaman Bank dengan PT Bank DKI dalam bentuk Kredit Agunan Tunai sebesar Rp15.000. Penjamin adalah Perusahaan dengan deposito yang dijaminkan dengan tingkat bunga 1,25% di atas tingkat suku bunga deposito yang diserahkan sebagai jaminan dengan maksimal bunga 3,50%. Perjanjian ini akan jatuh tempo pada tanggal 20 September 2023. Tidak terdapat pembatasan penting atas perjanjian ini.

Pada tanggal 31 Desember 2022, nilai pinjaman Perusahaan adalah sebesar Rp15.000.

b. Perjanjian Kredit Agunan Tunai sebesar Rp35.000

Pada tanggal 13 Juni 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pinjaman Bank dengan PT Bank DKI dalam bentuk Kredit Agunan Tunai sebesar Rp35.000. Penjamin adalah Perusahaan dengan deposito yang dijaminkan dengan tingkat bunga 1,25% di atas tingkat suku bunga deposito yang diserahkan sebagai jaminan dengan maksimal bunga 3,50%. Perjanjian ini akan jatuh tempo pada tanggal 13 Juni 2023. Tidak terdapat pembatasan penting atas perjanjian ini.

Pada tanggal 31 Desember 2022, nilai pinjaman Perusahaan adalah sebesar Rp19.186.

20. BANK LOAN

Bank loan consists of:

ITJ	
Related party (Note 30)	
PT Bank DKI	

a. Cash Collateral Credit amounted to Rp15,000

On September 20, 2021, the Company signed an Agreement Bank Loans with PT Bank DKI in form of Cash Collateral Credit amounted to Rp15,000. The Company is a Guarantor with deposit as guaranteed in interest rate 1.25% above interest rate submitted with maximum rate in 3.50%. The agreement will mature on September 20, 2023. This agreement has no financial covenant.

As of December 31, 2022, the Company recorded the balance for bank loan amounting to Rp15,000.

b. Cash Collateral Credit amounted to Rp35,000

On June 13, 2022, the Company signed an Agreement Bank Loans with PT Bank DKI with scheme Cash Collateral Credit amounted to Rp35,000. The Company is a Guarantor with deposit as guaranteed in interest rate 1.25% above interest rate submitted with maximum rate in 3.50%. The agreement will mature on June 13, 2023. This agreement has no financial covenant.

As of December 31, 2022, the Company recorded the balance for bank loan amounting to Rp19,186.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

21. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan diterima dimuka terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2022	2021
Jatuh tempo dalam satu tahun		
Tiket	7.972	4.548
Non-tiket :		
Hak penamaan stasiun	50.025	47.525
Kerjasama pembayaran berbasis aplikasi seluler	27.917	32.917
Kerjasama retail dan penyewaan ruang ATM	12.844	11.867
Kerjasama penerimaan uang elektronik	5.750	5.500
Kerjasama layanan periklanan	2.000	38.830
Kerjasama telekomunikasi	1.275	1.275
Total	107.783	142.462
Jatuh tempo lebih dari satu tahun		
Non-tiket :		
Hak penamaan stasiun	97.100	97.100
Kerjasama layanan periklanan	30.500	32.500
Manajemen konstruksi	14.908	-
Kerjasama penyewaan ruang ATM	1.368	1.520
Total	143.876	131.120

21. UNEARNED REVENUES

Unearned revenues consist of:

Current maturities
Farebox
Non-farebox :
Station's naming rights
Mobile application based payment cooperation
Retail cooperation and space rental for ATM
Electronic money acceptance cooperation
Advertising cooperation
Telecommunication cooperation
Total
Long-term maturities
Non-farebox :
Station's naming rights
Advertising cooperation
Construction management
Cooperation in rental space for ATM
Total

22. UANG JAMINAN PELANGGAN

Uang jaminan terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2022	2021
Jaminan hak penamaan stasiun	19.552	15.770
Jaminan lainnya	774	-
Total	20.326	15.770

22. CUSTOMER'S SECURITY DEPOSIT

Guaranteed deposits consist of

Naming Rights guarantee
Other security deposits
Total

Jaminan hak penamaan stasiun merupakan jaminan tunai yang diterima dari mitra usaha hak penamaan stasiun yang akan dikembalikan oleh Perusahaan pada saat berakhirnya masa kontrak.

The naming rights guarantee represents cash collateral received from the station's naming rights partner refundable by the Company at the end of contract period.

Mutasi dari jaminan hak penamaan stasiun adalah sebagai berikut:

The movement of naming rights guarantee are as follows:

	31 Desember/December 31,	
	2022	2021
Saldo awal	15.770	14.487
Penambahan	2.500	-
Akresi bunga	1.282	1.283
Total	19.552	15.770

Beginning balance
Addition
Accreted interest
Total

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

23. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2022	2021
Perusahaan		
Pajak penghasilan:		
Pasal 4(2)	342	692
Pasal 21	4.859	3.572
Pasal 23	472	286
Pasal 26	1	1
Pajak Pertambahan Nilai	8.999	7.298
Subtotal - Perusahaan	14.673	11.849
Entitas Anak		
Pajak penghasilan:		
Pasal 4(2)	6	9
Pasal 21	234	289
Pasal 23	25	15
Pasal 26	39	-
Pajak Pertambahan Nilai	3.971	122
Subtotal - Entitas Anak	4.275	435
Total	18.948	12.284

*The Company
Income taxes:
Article 4(2)
Article 21
Article 23
Article 26
Value Added Tax*

Subtotal – The Company

*Subsidiary
Income taxes:
Article 4(2)
Article 21
Article 23
Article 26
Value Added Tax*

Subtotal - Subsidiary

Total

b. Beban pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan Grup adalah sebagai berikut:

b. Income tax expenses

The Group's income tax expenses are as following:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31,	
	2022	2021
Pajak kini		
Perusahaan	1.747	-
Entitas anak	825	256
Subtotal	2.572	256
Pajak tangguhan		
Perusahaan	69.328	65.863
Entitas anak	(390)	(290)
Subtotal	68.938	65.573
Beban pajak penghasilan	71.510	65.829

*Current tax
The Company
Subsidiary*

Subtotal

*Subsidiary
The Company
Subsidiary*

Subtotal

Income tax expense

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Berdasarkan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pemerintah Indonesia menyesuaikan tarif PPh Badan dalam negeri menjadi sebesar 22% pada tahun pajak 2020 dan seterusnya.

Pajak atas laba/(rugi) sebelum pajak Grup berbeda dari nilai teoritis yang mungkin muncul apabila menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak terhadap laba pada entitas konsolidasian dalam jumlah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31,		
	2022	2021	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan Efek eliminasi dan konsolidasi	176.478 4.410	171.362 (1.806)	Consolidated profit before income tax Elimination and consolidation effect
Laba sebelum pajak penghasilan - gabungan	180.888	169.556	Profit before income tax - combined
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	39.795	37.302	Tax calculated at applicable tax rate
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui	33.706	36.943	Unrecognized deferred tax assets
Beban pajak dari hasil pemeriksaan pajak	1.747	-	Tax expense resulted from tax audit
Penyesuaian saldo pajak tangguhan	388	-	Adjustment of deferred tax balance
Pengaruh pajak atas beda tetap	(4.126)	(8.416)	Tax effect on permanent difference
Beban pajak penghasilan konsolidasian	71.510	65.829	Consolidated income tax expense

23. TAXATION (continued)

b. Income tax expenses (continued)

Based on Law No. 7/2021 regarding Harmonization of Tax Regulations, the Government of Indonesia adjusted the corporate income tax rate to 22% for fiscal years 2020 and onward.

The tax on the Group's profit/(loss) before tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable to profits on the consolidated entities as follows:

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

- c. Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perusahaan dan estimasi rugi fiskal adalah sebagai berikut:

23. TAXATION (continued)

- c. The reconciliation between income (loss) before income tax, as shown in the Company's consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, and the estimated tax loss are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31,		
	2022	2021	
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	176.478	171.362	Profit before consolidated income tax
Dikurang:			Less:
Rugi (laba) entitas anak sebelum pajak penghasilan	(1.018)	1.999	Loss (profit) of subsidiary before income tax
Efek eliminasi	4.410	(1.806)	Elimination effect
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	179.870	171.555	Profit before income tax - the Company
Beda waktu:			Temporary differences:
Estimasi pencadangan piutang	33.264	-	Estimated allowance of receivable
Selisih nilai piutang usaha	9.353	20.656	Difference on receivable present value
Penyusutan dan amortisasi	(340.690)	(348.354)	Depreciation and amortization
Akrual (pembayaran) bonus dan insentif	(8.998)	14.701	Accruals (payment) for bonus and incentives
Liabilitas imbalan kerja karyawan	(6.862)	5.211	Liability for employee benefits
Aset hak guna dan liabilitas sewa	(2.960)	(15.462)	Right on use asset and rent liabilities
Sub-total	(316.893)	(323.248)	Sub-total
Beda tetap:			Permanent differences:
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak	11.669	15.099	Non-deductible expenses
Bagian rugi entitas asosiasi dan ventura bersama - neto	12.467	11.175	Share in loss of associate and joint venture - net
Penghasilan yang dikenakan pajak final - neto:	(43.849)	(57.539)	Income subject to final tax - net
Sub-total	(19.713)	(31.265)	Sub-total
Taksiran rugi fiskal - Perusahaan	(156.736)	(182.958)	Estimated tax loss - the Company
Taksiran akumulasi rugi fiskal awal tahun - Perusahaan:			Estimated tax losses carry-forward at beginning of year - the Company:
2017*)	-	(130.993)	2017*)
2018	(162.626)	(162.626)	2018
2019	(169.965)	(169.965)	2019
2020	(441.750)	(441.750)	2020
2021	(182.958)	-	2021
Taksiran akumulasi rugi fiskal akhir tahun - Perusahaan	(1.114.035)	(1.088.292)	Estimated tax losses carry-forward at end of year - the Company

*) Kadaluarsa pada tahun 2022

*) Expired in 2022

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

- c. Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perusahaan dan estimasi rugi fiskal adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Perusahaan akan menyampaikan SPT Pajak Penghasilan Tahun 2022 ke Kantor Pajak sesuai dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2022.

ITJ, entitas anak, mencatat beban pajak kini sebesar Rp825 pada tahun 2022 dan utang pajak penghasilan badan sebesar Rp39 pada tanggal 31 Desember 2022.

d. Taksiran tagihan pajak penghasilan

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan mempunyai taksiran tagihan pajak penghasilan pasal 22 dan 23 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,		
	2022	2021	
Kredit pajak tahun 2019	-	3.424	2019 tax credits
Kredit pajak tahun 2020	4.145	5.961	2020 tax credits
Kredit pajak tahun 2021	6.246	6.306	2021 tax credits
Kredit pajak tahun 2022	5.992	-	2022 tax credits
Total	16.383	15.691	Total

Pada tanggal 20 April 2022, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) tahun 2020 sebesar Rp5.892 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPh 21, PPh 23, dan PPh pasal 4 ayat 2 tahun 2020 sebesar Rp1.747, sehingga nilai tagihan pajak penghasilan neto tahun 2020 adalah sebesar Rp4.145.

Pada tanggal 3 Desember 2021, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) tahun 2019 sebesar Rp4.958 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPh 21, PPh 23, dan PPh pasal 4 ayat 2 tahun 2020 sebesar Rp1.534, sehingga nilai tagihan pajak penghasilan neto tahun 2019 adalah sebesar Rp3.424.

23. TAXATION (continued)

- c. The reconciliation between income (loss) before income tax, as shown in the Company's consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, and the estimated tax loss are as follows: (continued)

The Company will submit its Annual Corporate Income Tax Return for 2022 to the Tax Office based on information reported in the 2022 consolidated financial statements.

ITJ, a subsidiary, recorded current income tax expenses amounted to Rp825 in 2022 and corporate income tax payable amounted to Rp39 as of December 31, 2022.

d. Estimated claim for tax refund

As of December 31, 2022 and 2021, the Company still has estimated claim for tax refund articles 22 and 23 with details as follows:

On April 20, 2022, the Company received Preliminary Tax Assessment Letters of Overpayment ("SKPLB") for its 2020 Corporate Income Tax (CIT) amounted to Rp5,892, and Preliminary Tax Assessment Letters of Underpayment ("SKPKB") for income tax article 21, income tax article 23 and income tax article 4 (2) amounting to Rp1,747, hence the 2020 net estimated claim for tax refund is amounted to Rp4,145.

On December 3, 2022, the Company received Preliminary Tax Assessment Letters of Overpayment ("SKPLB") for its 2019 Corporate Income Tax (CIT) amounted to Rp4,958, and Preliminary Tax Assessment Letters of Underpayment ("SKPKB") for income tax article 21, income tax article 23 and income tax article 4 (2) amounting to Rp1,534, hence the 2019 net estimated claim for tax refund is amounted to Rp3,424.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Taksiran tagihan pajak penghasilan (lanjutan)

Perusahaan telah mengajukan restitusi pajak kepada Kantor Pajak untuk kredit pajak tahun 2021.

Perusahaan akan mengajukan restitusi pajak kepada Kantor Pajak untuk kredit pajak tahun 2022.

e. Liabilitas pajak tangguhan - neto

Liabilitas pajak tangguhan - neto terdiri dari:

23. TAXATION (continued)

d. Estimated claim for tax refund (continued)

The Company has filed tax restitution to the Tax Office related to 2021 tax credits.

The Company will file tax restitution to the Tax Office related to 2022 tax credits.

e. Deferred tax Liabilities - net

Deferred tax liabilities - net consists of:

31 Desember 2022/ December 31, 2022					
	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/Credited to others comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
Perusahaan					The Company
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					Deferred tax asset (liabilities)
Rugi fiskal	202.753	1.738	-	204.491	Fiscal loss
Akrua bonus dan insentif	3.234	(3.234)	-	-	Accruals for bonus and incentives
Liabilitas imbalan kerja karyawan	6.546	(1.510)	2.192	7.228	Liability for employee benefits
Aset tetap dan aset takberwujud	(209.312)	(74.952)	-	(284.264)	Fixed assets and intangible assets
AHG dan Liabilitas Sewa	(3.561)	(651)	-	(4.212)	ROU and Lease Liabilities
Selisih nilai piutang	6.709	2.058	-	8.767	Difference on receivable
Estimasi Penyisihan Piutang	95	7.223	-	7.318	Estimated allowance of receivable
Aset/(liabilitas) pajak tangguhan - neto Perusahaan	6.464	(69.328)	2.192	(60.672)	Deferred tax assets/(liabilities) - net of the Company
Entitas Anak					Subsidiary
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					Deferred tax asset (liabilities)
Liabilitas imbalan kerja karyawan	42	(12)	(8)	22	Liability for employee benefits
AHG dan Liabilitas Sewa	248	330	-	578	ROU and Lease Liabilities
Akrua bonus dan insentif	-	57	-	57	Accruals for bonus and incentives
Estimasi Penyisihan Piutang	-	24	-	24	Estimated allowance for receivable
Aset pajak tangguhan - neto Entitas Anak	290	399	(8)	681	Deferred tax assets - net of Subsidiary
Total Liabilitas pajak tangguhan konsolidasian - neto	6.754	(68.929)	2.184	(59.991)	Total consolidated deferred tax liabilities - net

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Liabilitas pajak tangguhan – neto (lanjutan)

Liabilitas pajak tangguhan - neto terdiri dari:
(lanjutan)

	31 Desember 2021/ December 31, 2021			
	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/Credited to others comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance
Perusahaan				
Aset (liabilitas) pajak tangguhan				
Rugi fiskal	185.646	17.107	-	202.753
Akrual bonus dan insentif	-	3.234	-	3.234
Liabilitas imbalan kerja karyawan	5.447	1.146	(47)	6.546
Aset tetap dan aset takberwujud	(120.615)	(88.697)	-	(209.312)
AHG dan Liabilitas Sewa	(159)	(3.402)	-	(3.561)
Selisih nilai piutang	1.968	4.741	-	6.709
Estimasi Penyisihan Piutang	87	8	-	95
Aset/(liabilitas) pajak tangguhan – neto perusahaan	72.374	(65.863)	(47)	6.464
Entitas Anak				
Aset pajak tangguhan				
Liabilitas imbalan kerja karyawan	-	42	-	42
AHG dan Liabilitas Sewa	-	248	-	248
Aset pajak tangguhan – neto Entitas Anak	-	290	-	290
Total Aset pajak tangguhan – neto	72.374	(65.573)	(47)	6.754

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan yang timbul dari beda waktu di atas dapat direalisasikan pada periode mendatang.

f. Pajak final

Rincian pajak final untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,	
	2022	2021
Perusahaan		
Pajak final penghasilan keuangan	8.384	8.124
Pajak final pendapatan sewa	1.328	2.240
Subtotal	9.712	10.364
Entitas anak		
Pajak final penghasilan keuangan	296	1.314
Total	10.008	11.678

23. TAXATION (continued)

e. Deferred tax Liabilities – net (continued)

Deferred tax liabilities - net consists of:
(continued)

The Company
Deferred tax asset (liabilities)
Fiscal loss
Accruals for bonus and incentives
Liability for employee benefits
Fixed assets and intangible assets
ROU and Lease Liabilities
Difference on receivable
Estimated impairment of receivable
Deferred tax assets/(liabilities) - net of the Company
Subsidiary
Deferred tax asset
Liability for employee benefits
ROU and Lease Liabilities
Deferred tax assets - net of Subsidiary
Total deferred tax assets - net

Management believes that the deferred tax assets resulted from the above temporary differences are realizable in future periods.

f. Final tax

The details of final tax for the year ended December 31, 2022, is as follows.

the Company
Final tax on Interest income
Final tax on rent revenue
Subtotal
Subsidiary
Final tax on Interest income
Total

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

24. MODAL SAHAM

Rincian pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Total/ Total	Shareholders
Pemerintah Daerah DKI Jakarta	17.772.143	99,9972%	17.772.143	Government of DKI Jakarta
Perumda Pasar Jaya	500	0,0028%	500	Perumda Pasar Jaya
Total	17.772.643	100,0000%	17.772.643	Total

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 30 November 2021, yang telah diaktakan melalui Akta Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No. 46 tanggal 16 Desember 2021, para pemegang saham telah menyetujui perubahan modal ditempatkan dan disetor dari sebelumnya Rp12.771.972 menjadi sebesar Rp16.339.169. Perubahan tersebut telah disetujui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT MRT Jakarta Nomor AHU-AH.01.03-0421641 tanggal 21 Desember 2021.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 13 Agustus 2022, yang telah diaktakan melalui Akta Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No. 02 tanggal 2 September 2022, para pemegang saham telah menyetujui perubahan modal ditempatkan dan disetor dari sebelumnya Rp16.339.169 menjadi sebesar Rp17.772.643. Perubahan tersebut telah disetujui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT MRT Jakarta Nomor AHU-AH.01.03-0445164 tanggal 7 September 2022.

24. SHARE CAPITAL

Details of the Company's shareholders as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

Based on the minutes of the General Meeting of Shareholders on November 30, 2021 which were on Notarial Deed No. 46 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dated December 16, 2021, the shareholders has approved the change in the issued and fully paid capital from Rp12,771,972 to become Rp16,339,169. The changes were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its acknowledgement Letter No. AHU-AH.01.03-0421641 dated December 21, 2021.

Based on the minutes of the General Meeting of Shareholders on August 13, 2022 which were on Notarial Deed No. 02 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dated September 2, 2022, the shareholders has approved the change in the issued and fully paid capital from Rp16,339,169 to become Rp17,772,643. The changes were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its acknowledgement Letter No. AHU-AH.01.03-0445164 dated September 7, 2022.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

24. MODAL SAHAM (lanjutan)

Selama tahun 2022, Perusahaan telah menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai penyertaan modal disetor yang berasal dari penerusan hibah dan penerusan pinjaman sebesar Rp2.669.496 (Catatan 31a).

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, penambahan modal sebesar Rp4.286.916 belum diaktakan dan dicatat sebagai "Uang muka modal Saham" didalam bagian Ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Mutasi modal ditempatkan dan disetor penuh dan uang muka modal saham adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2022	2021
Modal ditempatkan dan disetor penuh		
Saldo awal tahun	17.772.643	16.339.169
Reklasifikasi dari uang muka modal saham	-	1.433.474
Saldo akhir tahun	17.772.643	17.772.643
Uang muka modal saham		
Saldo awal tahun	1.617.420	1.433.474
Penambahan yang berasal dari APBD dari penerusan pinjaman	2.669.496	1.617.420
Reklasifikasi ke modal ditempatkan dan disetor penuh	-	(1.433.474)
Saldo akhir tahun	4.286.916	1.617.420

Perusahaan membukukan penambahan uang muka modal saham pada saat penerbitan *Notice of Disbursement* oleh JICA serta diakui sebagai modal ditempatkan yang berasal dari penerusan hibah dan penerusan pinjaman Pemerintah menggunakan nilai tukar yang terdapat dalam Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan yang diterbitkan setiap tahun oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

24. SHARE CAPITAL (continued)

During 2022, the Company received the additional contribution from the Government of DKI Jakarta, as paid-up capital sourced from the grant and loan mechanism amounting Rp2,669,496 (Note 31a).

As of December 31, 2022, the paid-up capital amounting to Rp4,286,916 has not been notarized and presented as "Advance for share capital" in the Equity section of the consolidated statement of financial position.

The movement of issued and fully paid share capital and advance for share capital are as follows:

Issued and fully paid share capital
Balance at beginning of the year
Reclassification from advance for share capital
Balance at end of the year
Advance for share capital
Balance at beginning of the year
Addition from APBD from loan mechanism
Reclassification to issued and fully paid share capital
Balance at end of the year

The Company recorded the addition of advance for share capital at the date of the Notice of Disbursement from JICA, and recognized it as issued share capital sourced from the Government grant and loan using the exchange rate in Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan which annually published by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

24. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pengelolaan modal

Dalam mengelola permodalannya, Grup senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Grup secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan (a) efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas yang digunakan untuk kegiatan operasi serta (b) pengeluaran modal dan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

Grup mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit (*gearing ratio*), dengan membagi utang neto dengan ekuitas neto. Rasio pengungkit adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2022	2021
Liabilitas jangka pendek	534.352	512.482
Liabilitas jangka panjang	496.581	273.370
Total	1.030.933	785.852
Dikurangi kas dan setara kas	(1.834.417)	(1.353.832)
Utang (aset) neto	(803.484)	(567.980)
Total ekuitas neto	21.849.745	19.083.026
Rasio aset neto terhadap ekuitas	(0,04)	(0,03)

Grup memiliki porsi ekuitas lebih besar dibandingkan porsi utang dikarenakan sebagian besar sumber pendanaan berasal dari penyertaan modal atau ekuitas.

24. SHARE CAPITAL (continued)

Capital management

In managing its capital, the Group safeguards its ability to continue as a going concern and to maximize benefits to the shareholders and other stakeholders.

The Group actively and regularly reviews and manages its capital to ensure the optimal capital structure and return to the shareholders, taking into consideration the (a) efficiency of capital use based on operating cash flow and (b) capital expenditures and future capital needs.

The Group monitors its capital using gearing ratios, by dividing net debt by the net equity. The gearing ratio is as follow:

Current liabilities
Non-current liabilities
Total
Less cash and cash equivalents
Net debt (asset)
Total net equity
Net asset to equity ratio

The Group has higher equity portion compared to debt because most of financing sources came from capital contributions or equity.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

25. PENDAPATAN

Pendapatan terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2022	2021
Pendapatan tiket	155.615	60.371
Pendapatan subsidi	808.200	821.978
Pendapatan non-tiket:		
Kerjasama layanan periklanan	154.968	147.763
Hak penamaan stasiun	129.600	122.100
Kerjasama penerimaan uang digital	87.250	73.750
Kerjasama penerimaan uang elektronik	25.000	23.416
Kerjasama periklanan luar ruang media pilar	35.000	65.000
Kerjasama periklanan pada media Cooling Tower dan Ventilation Tower	25.000	-
Jasa Konsultan	25.443	15.000
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000)	20.910	26.539
Sub-total pendapatan non-tiket	503.171	473.568
Total	1.466.986	1.355.917

Pendapatan tiket

Pendapatan tiket merupakan pendapatan dari hasil penjualan tiket sesuai tarif angkutan penumpang yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 34 tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Perkeretaapian Mass Rapid Transit dan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit ("Peraturan Gubernur No. 34"). Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 34 tersebut, tarif terjauh angkutan perkeretaapian MRT Koridor Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia adalah sebesar Rp14.000 (Rupiah penuh).

Pendapatan subsidi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan subsidi sarana dan prasarana kepada Perusahaan untuk memastikan keberlangsungan penyelenggaraan sarana dan prasarana MRT serta keterjangkauan tarif bagi masyarakat. Tata cara penghitungan dan pembayaran subsidi sarana dan prasarana menggunakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 107 tahun 2019 tentang Subsidi Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu.

25. REVENUES

Revenues consists of:

Farebox revenues
Subsidy revenue
Non-farebox revenues:
Advertising cooperation
Station's naming rights
Digital money acceptance cooperation
Electronic money acceptance cooperation
Pillar media outdoor advertising cooperation
Advertising on media Cooling Tower and Ventilation Tower cooperation
Consultancy service
Others (each below Rp10,000)
Sub-total non-farebox revenue

Farebox revenues

Farebox revenues is revenues from the sale of tickets based on passenger transportation tariff stipulated on Jakarta Governor Regulation No. 34 Year 2019 regarding Railway Transportation Tariff of Mass Rapid Transit and "Kereta Api Ringan"/Light Rail Transit ("Governor Regulation No. 34"). Based on the Governor Regulation No. 34, the farthest tariff of railway transportation for Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia line is amounted to Rp14,000 (full Rupiah).

Subsidy revenue

The Government of DKI Jakarta provides facilities and infrastructure subsidies to the Company to ensure the sustainability of the operation of MRT facilities and infrastructure and the affordability of tariffs for society. The procedure of calculation and payment for facilities and infrastructure subsidies is stipulated in Governor Regulation No. 107 of 2019 regarding subsidies for "Mass Rapid Transit" and "Light Rapid Transit".

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

25. PENDAPATAN (lanjutan)

Pendapatan subsidi (lanjutan)

Tata cara penghitungan dan pembayaran subsidi sarana dan prasarana menggunakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 107 tahun 2019 tentang Subsidi Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 39 tahun 2021.

Subsidi sarana merupakan alokasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penyelenggaraan sarana perkeretaapian dalam rangka kewajiban pelayanan publik agar tarif terjangkau oleh pelanggan.

Subsidi prasarana merupakan alokasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membayar biaya operasional dan perawatan prasarana perkeretaapian serta biaya modal fasilitas operasi.

Berdasarkan peraturan di atas, Perusahaan telah menandatangani perjanjian dengan Pemprov DKI Jakarta No. 45/-10.00 tanggal 22 April 2022 tentang Pemberian Subsidi Moda Raya Terpadu yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Besaran pagu pemberian subsidi sarana dan prasarana tahun 2022 senilai Rp605.000 dan akan dibayarkan dalam beberapa tahapan pembayaran, yaitu:

- a. Pencairan uang muka dengan nilai 20% dari nilai kontrak atau senilai Rp121.000 yang dibayarkan dalam jangka waktu 14 hari kalender setelah diterimanya surat permohonan pencairan Uang Muka.
- b. Pencairan subsidi periode 1 Januari – 30 April 2022 dilakukan secara sekaligus selambat-lambatnya 14 hari kalender sejak tanggal diterimanya surat permohonan pencairan subsidi dan dokumen dinyatakan lengkap oleh Dinas Perhubungan

25. REVENUE (continued)

Subsidy revenue (continued)

The procedure of calculation and payment for facilities and infrastructure subsidies is stipulated in Governor Regulation No. 107 of 2019 regarding subsidies for "Moda Raya Terpadu" and "Lintas Raya Terpadu" are amended by Governor Regulation No. 39 of 2021.

The facilities subsidy is the budget allocation from the Government of DKI Jakarta to operate the railways facilities in the context of public service obligations in order that the tariffs are affordable for customers.

The infrastructure subsidy is the budget allocation from the Government DKI Jakarta to cover the operational and maintenance cost of railway infrastructure and capital costs of operational facilities.

Based on the regulation above, the Company has signed the agreement with Government of DKI Jakarta No. No. 45/-10.00 dated April 22, 2022, about "Moda Raya Terpadu" Subsidies sourced from Regional Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2022.

The maximum amounts of facilities and infrastructure subsidy in 2022 is Rp605,000 and will be paid in several payment phase, which are:

- a. *Advances disbursement amounting to 20% of the contract value or Rp121,000, which will be paid within 14 calendar days after receipt of the application for disbursement of Advances.*
- b. *The settlement of subsidies for the period of January 1 - April 30, 2022, will be paid in full at the latest 14 calendar days from the date of receipt of the application letter for disbursement of subsidies and the documents are declared complete by the Department of Transportation*

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

25. PENDAPATAN (lanjutan)

Pendapatan subsidi (lanjutan)

- c. Pencairan subsidi periode 1 Mei – 31 Oktober 2022 dilakukan secara tiap bulan berdasarkan permohonan pencairan subsidi selambat lambatnya 14 hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pencairan subsidi dan dokumen dinyatakan lengkap oleh Dinas Perhubungan;
- d. Pencairan subsidi periode 1 November – 31 Desember 2022 dilakukan selambat-lambatnya 31 Desember 2022.

Perusahaan telah menandatangani addendum perjanjian dengan Pemprov DKI Jakarta No. 5407/PH.10.00 tanggal 13 Desember 2022 tentang Pemberian Subsidi Moda Raya Terpadu yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan Penyesuaian terhadap Perjanjian sebagai berikut:

- a. Perubahan Target Pengguna Jasa, yakni periode Januari sampai dengan Oktober 2022 menggunakan nilai realisasi pengguna jasa, sedangkan untuk periode November sampai dengan Desember 2022 menggunakan nilai proyeksi pengguna jasa
- b. Realokasi anggaran subsidi sarana dan prasarana
- c. Verifikasi akan dilakukan terhadap seluruh komponen biaya terkait pengoperasian dan perawatan sarana dan prasarana dan akan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi, namun nilai pencairan subsidi hanya atas komponen biaya yang menjadi pembentuk nilai kontrak

Pada tahun 2022, Perusahaan telah menerima pencairan subsidi atas uang muka subsidi, subsidi bulan Januari – November 2022, 90% subsidi bulan Desember 2022 sebesar Rp584.687 setelah dikurangi denda atas ketidaktercapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM), ketidaktercapaian pengguna jasa, kecelakaan dan aduan masyarakat serta pencairan piutang subsidi tahun 2021 dari Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp365.097.

25. REVENUE (continued)

Subsidy revenue (continued)

- c. The settlement of subsidies for the period of May 1 - October 31, 2022, will be conducted on a monthly basis based on the request for disbursement of subsidies no later than 14 calendar days from the date of receipt of the request for subsidies disbursement and the documents are declared complete by the Department of Transportation.
- d. The settlement of subsidies for the period November 1 – 31 December 2022, will be paid at the latest on December 31, 2022.

The Company has signed amendment of agreement with Provincial Government of DKI Jakarta No. 5407/PH.10.00 dated December 13, 2022, about the Provision of Subsidy for "Moda Raya Terpadu" sourced from the 2022 Regional Fiscal Year Budget, which will be paid in several stages of payment, namely:

- a. Changes in Passenger Target, for the period from January to October 2022 using the actual number of passengers, while for the period November to December 2022 using the projection number of passengers.
- b. Reallocation of the budget for sarana and prasarana subsidies
- c. Verification will be carried out for all cost components related to the operation and maintenance of facilities and infrastructure and will be stated in the Verification Minutes, but the value of disbursement of subsidies is only for the cost components that form the contracted value.

In 2022, the Company has received the settlement of subsidy from advance and subsidy for the period of from January-November 2022, 90% of December 2022 subsidy amounted to Rp584,687 after deducting a penalty for not achieving the Minimum Service Standards (MSS), service user inaccessibility, accidents and public complaints and subsidy receivable 2021 from Government of DKI Jakarta with the total amount of Rp365,097.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

25. PENDAPATAN (lanjutan)

Pendapatan subsidi (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo piutang subsidi Perusahaan adalah sebesar Rp223.312 (2021: Rp375.507).

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh saldo piutang subsidi dapat tertagih sehingga tidak diperlukan penyisihan atas penurunan nilai piutang ini.

Pada bulan Januari tahun 2023, Perusahaan dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah menandatangani Berita Acara Verifikasi Selisih Kurang/Lebih Subsidi Prasarana dan Sarana MRT Jakarta Tahun 2022. Dimana dalam berita acara tersebut tercantum nilai subsidi MRT Jakarta sebesar Rp808.200 dan nilai denda sebesar Rp200. Berdasarkan hasil verifikasi dan sesuai usulan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengakui dan mencatat kekurangan pencairan subsidi MRT Jakarta sebagai utang daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Manajemen berkeyakinan bahwa saldo piutang subsidi dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan atas penurunan nilai piutang subsidi.

25. REVENUE (continued)

Subsidy revenue (continued)

As of December 31, 2022, the balance of the Company's subsidy receivables amounting to Rp223,312 (2021: Rp375,507).

Management believes that there is no objective evidence that may indicate impairment in the value of the subsidy receivables; hence, no provision for impairment was made.

In January 2023, the Company and Department of Transportation signed Minutes of Subsidy Difference Verification Year 2022. Based on the minutes of verification, the total subsidy for the Company amounted to Rp808,200 and the penalty amounted to Rp200. Based on the verification results and according to the proposal from the Department of Transportation, DKI Jakarta province has acknowledged and recorded the difference of subsidy disbursement as payable in the 2022 Local Government Financial Statement.

Management believe that the balance of subsidy receivable is collectible, therefore no allowance for impairment of subsidy receivable is required.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

25. PENDAPATAN (lanjutan)

Pendapatan non-tiket

Rincian pendapatan non-tiket berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2022	2021
Pihak berelasi (Catatan 30):		
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	35.000	65.000
Perumda Pembangunan Sarana Jaya	3.030	-
PT Bank DKI	3.000	825
Pihak ketiga:		
PT Avabanindo Perkasa	154.968	147.763
PT Bank Central Asia Tbk	36.020	35.648
PT Solusi Transportasi Indonesia	33.000	33.000
PT Astra International Tbk	25.000	25.000
PT Espay Debit Indonesia	25.000	25.000
PT Trimedia Imaji Rekso Abadi	25.000	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	24.220	23.648
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	21.600	21.748
PT Melati Anugerah Semesta	17.387	-
PT Fintek Karya Nusantara	15.000	15.000
PT Visionet International	15.000	15.000
PT Dompot Anak Bangsa	15.000	15.000
PT Indomarco Prismaatama	11.250	-
PT Jasamarga Related Business	2.072	15.000
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp10.000)	41.624	35.936
Total	503.171	473.568

25. REVENUE (continued)

Non-farebox revenues

The details of the above amounts of non-farebox revenues by customers are as follows:

Related parties (Notes 30):	
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	
Perumda Pembangunan Sarana Jaya	
PT Bank DKI	
Third parties:	
PT Avabanindo Perkasa	
PT Bank Central Asia Tbk	
PT Solusi Transportasi Indonesia	
PT Astra International Tbk	
PT Espay Debit Indonesia	
PT Trimedia Imaji Rekso Abadi	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Melati Anugerah Semesta	
PT Fintek Karya Nusantara	
PT Visionet International	
PT Dompot Anak Bangsa	
PT Indomarco Prismaatama	
PT Jasamarga Related Business	
Others (each below Rp10,000)	
Total	

26. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Beban pokok pendapatan terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2022	2021
Penyusutan aset tetap (Catatan 11)	526.050	523.823
Gaji dan kesejahteraan karyawan	144.879	134.673
Keamanan dan kebersihan	131.610	131.626
Pemeliharaan	75.108	53.514
Energi dan utilitas	70.900	61.360
Pajak bumi dan bangunan (Catatan 30)	43.982	34.808
Keperluan rumah tangga	23.780	25.763
Asuransi	23.308	23.580
Jasa profesional	3.936	-
Lain-lain (dibawah Rp1.000)	1.640	849
Total	1.045.193	989.996

26. COST OF REVENUES

Cost of revenues consists of the following:

Depreciation of fixed assets (Note 11)	
Salaries and employee's welfare	
Security and hygiene	
Maintenance	
Energy and utility	
Land and building tax (Note 30)	
Household appliances	
Insurance	
Professional services	
Others (below Rp1,000)	
Total	

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Beban umum dan administrasi terdiri dari:

27. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

General and administrative expenses consists of the following:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2022	2021	
Gaji dan kesejahteraan karyawan	125.664	112.779	Salaries and employee's welfare
Penyisihan piutang	39.722	-	Allowance for receivables
Jasa profesional	30.165	36.972	Professional fee
Perlengkapan kantor	17.752	20.126	Office supplies
Penyusutan aset tetap (Catatan 11)	11.866	12.457	Depreciation of fixed assets (Note 11)
Penyusutan aset hak guna (Catatan 12)	9.832	12.081	Depreciation on right of use assets (Note 12)
Rapat koordinasi	8.461	-	Coordination meeting
Perjalanan Dinas	6.687	-	Business travel
Pelatihan dan keanggotaan	6.431	7.230	Training and membership
Promosi dan pameran	3.535	4.455	Promotion and exhibition
Amortisasi aset takberwujud (Catatan 13)	4.849	3.083	Amortization of intangible assets (Note 13)
Keperluan rumah tangga	4.330	3.026	Household appliances
Sewa kantor dan kendaraan	1.460	631	Office and vehicle rent expenses
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2.500)	8.448	5.511	Other (each below Rp2,500)
Total	279.202	218.351	Total

28. PENGHASILAN KEUANGAN

Akun ini terdiri dari:

28. FINANCE INCOME

This account consists of the following:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2022	2021	
Penghasilan bunga			Interest Income
Penghasilan bunga deposito	38.650	37.215	Deposit interest income
Penghasilan jasa giro	3.270	3.449	Current accounts income
Total penghasilan keuangan	41.920	40.664	Total finance income

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Rincian liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31	
	2022	2021
Perusahaan		
Program purna karya	28.255	26.696
Program cuti besar	19.084	13.570
Program masa persiapan pensiun	3.205	5.854
Program penghargaan masa kerja	3.316	4.826
Subtotal - Perusahaan	53.860	50.946
Entitas anak	103	194
Total	53.963	51.140

Liabilitas imbalan kerja memiliki klasifikasi sebagai berikut:

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021
Jangka pendek	3.248	-
Jangka panjang	50.715	51.140
Total	53.963	51.140

Liabilitas imbalan kerja Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 ditentukan berdasarkan penilaian aktuaris yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Yusi & Rekan, aktuaris independen, berdasarkan laporannya masing-masing pada tanggal 21 Februari 2023 dan 9 Maret 2022.

Penilaian aktuaris Perusahaan dihitung dengan menggunakan metode *Projected-Unit-Credit* yang berdasarkan asumsi-asumsi berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2022	2021
Tingkat diskonto	5.52% - 7.43%	3.40% - 7.55%
Kenaikan gaji dan upah	7%	3%
Usia pensiun normal	58 tahun/58 years	58 tahun/58 years
Tabel mortalitas	TMI (2019)	TMI (2019)
Tingkat cacat	10% dari TMI 2019/ 10% of TMI 2019	10% dari TMI 2019/ 10% of TMI 2019
Tingkat pengunduran diri untuk usia:		
15-29	6%	6%
30-34	3%	3%
35-39	1,8%	1,8%
40-49	1,2%	1,2%
50-53	0%	0%
lebih dari 53	0%	0%

29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

The details of employee benefits liability are as follows:

The Company
Post-retirement benefits program
Long leave program
Pension preparation program
Jubilee program
Subtotal - the Company
Subsidiary
Total

The employee benefits liabilities has the following classification:

Current
Non-current
Total

The Company's employee benefit liabilities as of December 31, 2022 and 2021 was determined based on the actuarial valuation performed by Yusi & Rekan, an independent actuary, based on their reports dated February 21, 2023 and March 9, 2022, respectively.

The Company's actuarial valuation was performed using the *Projected-Unit-Credit* method which considered the following assumptions:

Discount rate
Wage and salary increase
Retirement age
Mortality table
Disability rate
Voluntary resignation for ages:
15-29
30-34
35-39
40-49
50-53
more than 53

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah karyawan yang berhak atas imbalan program purna karya, program cuti besar, program masa persiapan pensiun dan program penghargaan masa kerja adalah sebanyak 686 karyawan.

Selama tahun 2022, Perusahaan mengkapitalisasi beban imbalan kerja pada tahun berjalan ke dalam aset dalam penyelesaian sebesar Rp1.464.

Estimasi liabilitas imbalan kerja yang diakui oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Program purna karya

Manajemen berkeyakinan bahwa saldo liabilitas imbalan kerja tersebut cukup untuk memenuhi imbalan minimum sesuai dengan Undang-Undang No. 11/2021.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2022	2021
Nilai kini liabilitas - awal tahun	26.696	25.181
Biaya bunga	1.712	1.604
Biaya jasa kini	3.708	5.248
Biaya jasa lalu	(10.275)	(4.757)
Pembayaran manfaat	(3.414)	(450)
Pengukuran kembali:		
- Perubahan asumsi keuangan	9.374	(213)
- Penyesuaian atas pengalaman	454	83
Nilai kini liabilitas - akhir tahun	28.255	26.696

29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

As of December 31, 2022, the number of employees entitled to post-retirement benefits program, long leave program, pension preparation program and jubilee program are 686 employees.

During 2022, the Company capitalized expense for employee benefits for the current year to construction in progress amounting to Rp1,464.

The estimated employee benefit liabilities recognized by the Company are as follows:

a. Post-retirement benefits program

Management believes that the balance of employee benefits liability is sufficient to cover the minimum benefits required under the Law No. 11/2021.

Reconciliation of beginning and ending balance of present value of liabilities is as follows:

Present value of liability - beginning of the year
Interest cost
Current service cost
Past service cost
Benefits paid
Remeasurement:
- Changes in financial assumptions
- Experience adjustments

Present value of liability - end of the year

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**29. PROGRAM PENSIUN DAN IMBALAN KERJA
(lanjutan)**

b. Program cuti besar

Perusahaan memberikan program cuti besar kepada karyawan sebesar gaji pokok bulanan dan tunjangan tetap bulanan untuk setiap 3 tahun masa kerja.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31,

	2022	2021
Nilai kini liabilitas - awal tahun	13.570	11.130
Biaya bunga	709	581
Biaya jasa kini	3.257	3.521
Pembayaran manfaat	(2.040)	(2.883)
Pengukuran kembali:		
- Perubahan asumsi demografi	-	-
- Dari perubahan asumsi keuangan	3.692	(116)
- Penyesuaian atas pengalaman	(104)	1.337
Nilai kini liabilitas - akhir tahun	19.084	13.570

Present value of liability - beginning of the year

Interest cost

Current service cost

Benefits paid

Remeasurement:

- Changes in demographic assumptions

- From changes in financial assumptions

- Experience adjustments

Present value of liability - end of the year

c. Program Masa Persiapan Pensiun

Sesuai dengan Peraturan Perusahaan, Perusahaan memberikan Masa Persiapan Pensiun kepada karyawan selama 12 bulan sebelum masa usia pensiun normal. Selama Masa Persiapan Pensiun, karyawan masih mendapatkan penghasilan, namun dibebaskan dari tugas dan kewajibannya di Perusahaan.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31,

	2022	2021
Nilai kini liabilitas - awal tahun	5.854	4.614
Biaya bunga	381	300
Biaya jasa kini	387	1.039
Biaya jasa lalu	(3.555)	-
Pembayaran manfaat	-	-
Pengukuran kembali:		
- Perubahan asumsi demografi	-	-
- Perubahan asumsi keuangan	1.172	(44)
- Penyesuaian atas pengalaman	(1.034)	(55)
Nilai kini liabilitas - akhir tahun	3.205	5.854

Present value of liability - beginning of the year

Interest cost

Current service cost

Past service cost

Benefits paid

Remeasurement:

- Changes in demographic assumptions

- Changes in financial assumptions

- Experience adjustments

Present value of liability - end of the year

29. RETIREMENT BENEFITS AND EMPLOYEE BENEFITS (continued)

b. Long leave program

The Company rewards employees with a long leave program amounting to basic monthly salary and fixed monthly allowance every 3-year of work.

Reconciliation of beginning and ending balance of present value of liabilities is as follows:

c. Retirement Preparation Program

Based on the Company's Regulation, the Company provides Retirement Preparation Program to employees for 12 months prior to the normal retirement age. During Retirement Preparation Program, the employee is still receiving salaries but released from task and responsibility in the Company.

Reconciliation of beginning and ending balance of present value of liabilities are as follows:

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**29. PROGRAM PENSIUN DAN IMBALAN KERJA
(lanjutan)**

29. RETIREMENT BENEFITS AND EMPLOYEE BENEFITS (continued)

d. Program penghargaan masa kerja

d. Jubilee program

Perusahaan memberikan penghargaan kesetiaan kepada karyawan yang telah memiliki masa kerja tertentu berupa emas.

The Company rewards employees with certain working period in form of gold.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

Reconciliation of beginning and ending balance of present value of liabilities are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2022	2021	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	4.826	3.837	Present value of liability - beginning of the year
Biaya bunga	296	233	Interest cost
Biaya jasa kini	727	1.246	Current service cost
Biaya jasa lalu			Past service cost
Pembayaran manfaat	(185)	(56)	Benefits paid
Pengukuran kembali:			Remeasurement:
- Perubahan asumsi demografi	-	-	- Changes in demographic assumptions
- Perubahan asumsi keuangan	(54)	(56)	- Changes in financial assumptions
- Penyesuaian atas pengalaman	(2.294)	(378)	- Experience adjustments
Nilai kini liabilitas - akhir tahun	3.316	4.826	Present value of liability - end of the year

Analisis sensitivitas

Sensitivity analysis

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap nilai kini liabilitas imbalan kerja dan beban jasa kini Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022:

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, of the Company's present value of the obligations and current service cost as of December 31, 2022:

	Nilai kini kewajiban imbalan pasti/ Present value of the benefit obligations	Beban jasa kini/ Current service cost	
Kenaikan 1% tingkat diskonto	49.338	7.467	1% increase of discount rate
Penurunan 1% tingkat diskonto	59.091	8.789	1% decrease of discount rate
Kenaikan 1% tingkat kenaikan gaji masa depan	58.874	8.768	1% increase of future salary incremental rate
Penurunan 1% tingkat kenaikan gaji masa depan	49.448	7.478	1% decrease of future salary incremental rate

Analisa sensitivitas di atas dihitung menggunakan metode deterministik atas pengaruh terhadap liabilitas imbalan kerja sebagai hasil dari perubahan yang beralasan atas asumsi utama yang mungkin terjadi pada tanggal pelaporan.

The sensitivity analysis above are calculated based on a deterministic method on the impact to the employee on benefit obligation as a result of reasonable changes in key assumptions occurring at the end of the reporting period.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**29. PROGRAM PENSIUN DAN IMBALAN KERJA
(lanjutan)**

**29. RETIREMENT BENEFITS AND EMPLOYEE
BENEFITS (continued)**

d. Program penghargaan masa kerja (lanjutan)

d. Jubilee program (continued)

Analisis sensitivitas (lanjutan)

Sensitivity analysis (continued)

Durasi rata-rata dari liabilitas imbalan kerja Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah 14,93 (2021: 17,46 tahun).

The average duration of the Company's employee benefit liability on December 31, 2022 was 14.93 (2021: 17.46 years).

30. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG BERELASI

**30. BALANCES AND NATURE OF RELATED
PARTIES TRANSACTIONS**

Saldo dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

Balances with related parties are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2022	2021	
Bank (Catatan 4) PT Bank DKI	14.812	4.829	Bank (Note 4) PT Bank DKI
Persentase terhadap total aset	0,06%	0,02%	Percentage to total assets
Deposito berjangka (Catatan 4) PT Bank DKI	1.449.471	1.024.140	Time deposits (Note 4) PT Bank DKI
Persentase terhadap total aset	6,33%	5,15%	Percentage to total assets
Piutang usaha lancar (Catatan 5) PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Perumda Pembangunan Sarana Jaya KSO ITJ-DPP PT Bank DKI PT Jakarta Lingko Indonesia	115.700 6.893 3.020 950 210	31.436 5.349 - 944 82	Account receivables – current (Note 5) PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Perumda Pembangunan Sarana Jaya KSO ITJ-DPP PT Bank DKI PT Jakarta Lingko Indonesia
Total	126.773	37.811	Total
Cadangan penurunan nilai	(18.840)	-	Allowance for impairment
Total - neto	107.933	37.811	Total - net
Persentase terhadap total aset	0,47%	0,19%	Percentage to total assets

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

30. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)

Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

30. BALANCES AND NATURE OF RELATED PARTIES TRANSACTIONS (continued)

Transactions with related parties are as follows (continued):

31 Desember/December 31,		
2022	2021	
Piutang usaha tidak lancar (Catatan 5) PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	- 36.934	Account receivables - non current (Note 5) PT Jakarta Infrastruktur Propertindo
Persentase terhadap total aset	- 0,19%	Percentage to total assets
Piutang subsidi (Catatan 25) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	223.312 375.507	Subsidy receivables (Note 25) Government of DKI Jakarta
Persentase terhadap total aset	0,98% 1,89%	Percentage to total assets to total assets
Dana dibatasi penggunaannya (Catatan 8) PT Bank DKI	50.000 15.000	Restricted fund (Note 8) PT Bank DKI
Persentase terhadap total aset	0,22% 0,08%	Percentage to total assets to total assets
Utang bank (Catatan 20) PT Bank DKI	34.186 5.300	Bank loan (Note 20) PT Bank DKI
Persentase terhadap total liabilitas	3,32% 0,68%	Percentage to total liabilities
31 Desember/December 31,		
2022	2021	
Pendapatan subsidi (Catatan 25) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	808.200 821.978	Subsidy revenue (Note 25) Government of DKI Jakarta
Persentase terhadap pendapatan	55,09% 60,62%	Percentage to revenues
Pendapatan non-tiket (Catatan 25) PT Jakarta Infrastruktur Propertindo PT Bank DKI Perumda Pembangunan Sarana Jaya	35.000 65.000 3.000 825 3.030 -	Non-farebox revenue (Note 25) PT Jakarta Infrastruktur Propertindo PT Bank DKI Perumda Pembangunan Sarana Jaya
Total	41.030 65.825	Total
Persentase terhadap pendapatan	2,80% 4,85%	Percentage to revenues
Beban pajak bumi dan bangunan (Catatan 26) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	43.982 34.808	Land and property tax expense (Note 26) Government of DKI Jakarta
Persentase terhadap total beban pokok pendapatan	4,21% 3,52%	Percentage to total cost of revenues

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

30. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak yang berelasi/ Related parties	Hubungan/ Nature of relationship
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/ <i>Government of DKI Jakarta</i>	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>
PT Bank DKI	Dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/ <i>Controlled by Government of DKI Jakarta</i>
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	Dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/ <i>Controlled by Government of DKI Jakarta</i>
Perumda Pembangunan Sarana Jaya	Dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/ <i>Controlled by Government of DKI Jakarta</i>

30. BALANCES AND NATURE OF RELATED PARTIES TRANSACTIONS (continued)

In the normal course of business, The Group engages in transactions with related parties. The nature of transactions and relationship with related parties are as follows:

Sifat transaksi/ Nature of transactions
Subsidi dan pajak bumi dan bangunan/ <i>Subsidy and land and Property tax</i>
Penempatan giro, deposito berjangka, bank untuk pengumpulan pendapatan tiket, pendapatan diterima dimuka, utang bank dan pendapatan non-tiket/ <i>Placement of current accounts, time deposits, bank for ticket collection, unearned revenues, bank loan and non-farebox revenues</i>
Kerjasama layanan periklanan/ <i>Advertising services cooperation</i>
Jasa konsultasi konstruksi/ <i>Construction consultant service</i>

31. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN

a. Perjanjian terkait penyertaan modal, hibah dan pinjaman

1) Perjanjian Utang No. IP-536

Pada tanggal 28 November 2006, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Utang No. IP-536 dengan Pemerintah Jepang melalui *Japan Bank for International Cooperation* ("JBIC") terkait dengan jasa teknik untuk Proyek Mass Rapid Transit Jakarta ("Proyek").

JBIC setuju untuk memberikan pinjaman tidak melebihi dari JPY1.869.000.000 (nilai penuh) kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk pelaksanaan jasa teknik untuk Proyek. Pinjaman akan digunakan untuk pengadaan jasa konsultan yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

a. Agreements related to capital investments, grants and loans

1) Loan Agreement No. IP-536

On November 28, 2006, Government of the Republic of Indonesia signed Loan Agreement No. IP-536 with the Japanese Government through the Japan Bank for International Cooperation ("JBIC") in relation to the Jakarta Mass Rapid Transit Project (the "Project").

JBIC agreed to lend the Government of the Republic of Indonesia an amount not exceeding JPY1,869,000,000 (full amount) for the engineering services of the Project. The loan would be used for the purchase of eligible services from consultants that is necessary for the Project implementation.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**31. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- a. Perjanjian terkait penyertaan modal, hibah dan pinjaman (lanjutan)

1) Perjanjian Utang No. IP-536 (lanjutan)

Pencairan terakhir terkait Perjanjian Utang harus dilakukan sebelum lima tahun setelah tanggal efektif perjanjian pinjaman pada hari dan bulan yang sama, kecuali terdapat kesepakatan lain antara JBIC dan Pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 19 Juni 2012, berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *closing date* Perjanjian Utang No. IP-536 yang semula tanggal 22 Maret 2012 diubah sehingga menjadi tanggal 22 Desember 2014.

Pada tanggal 27 Februari 2013, berdasarkan *Minutes of Discussion of Pre-Appraisal Mission* yang telah ditandatangani oleh perwakilan dari Japan International Cooperation Agency ("JICA"), Pemerintah Republik Indonesia, yang diwakili oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Perusahaan dimana para pihak telah menyepakati nilai keseluruhan pembangunan Proyek Mass Rapid Transit Jakarta adalah sebesar JPY137.695.000.000 (nilai penuh).

**31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

- a. *Agreements related to capital investments, grants and loans (continued)*

1) *Loan Agreement No. IP-536 (continued)*

The final disbursement under the Loan Agreement should be made not later than the same day and month at five years after the effective date of the Loan Agreement, unless otherwise agreed upon between JBIC and the Government of the Republic of Indonesia.

On June 19, 2012, based on a letter from the Director General of Treasury of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the Closing Date of Loan Agreement No. IP-536 which was originally on March 22, 2012 had been extended to become December 22, 2014.

On February 27, 2013, based on the Minutes of Discussion of Pre-Appraisal Mission which were signed by representatives of Japan International Cooperation Agency ("JICA"), the Government of the Republic of Indonesia as represented by the National Development Planning Agency, the Directorate General of Railways, DKI Jakarta Provincial Government and the Company agreed that the total project cost for the construction of the Mass Rapid Transit Jakarta Project amounted to JPY137,695,000,000 (full amount).

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**31. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- a. Perjanjian terkait penyertaan modal, hibah dan pinjaman (lanjutan)

2) Penerusan Hibah No. NPPH-001/PK/2009

Pada tanggal 25 Maret 2009, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-001/PK/2009 dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dana hibah yang tidak melebihi dari JPY191.000.000 (nilai penuh) akan diteruskan seluruhnya kepada Perusahaan sebagai penyertaan modal daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pelaksanaan jasa konsultasi pengadaan oleh Perusahaan.

Tata cara penyaluran hibah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 188/PMK.07/2012 tanggal 26 November 2012.

3) Perjanjian Utang No. IP-554

Pada tanggal 31 Maret 2009, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Utang No. IP-554 dengan JICA terkait dengan Proyek.

JICA setuju untuk memberikan pinjaman tidak melebihi dari JPY48.150.000.000 (nilai penuh) kepada Pemerintah Republik Indonesia akan digunakan untuk membeli barang dan jasa dari para pemasok, kontraktor atau konsultan yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek.

Pencairan terakhir terkait Perjanjian Utang harus dilakukan sebelum sepuluh tahun setelah tanggal efektif perjanjian pinjaman pada hari dan bulan yang sama, kecuali terdapat kesepakatan lain antara JICA dan Pemerintah Republik Indonesia.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

- a. Agreements related to capital investments, grants and loans (continued)

2) Grant Agreement No. NPPH-001/PK/2009

On March 25, 2009, the Government of the Republic of Indonesia signed Grant Agreement No. NPPH-001/PK/2009 with the Government of DKI Jakarta.

Grant fund not exceeding JPY191,000,000 would be granted to the Company as equity of the Government of DKI Jakarta for the implementation of the Company's consulting services.

The procedures to distribute the grant are covered by Regulations No. 188/PMK.07/2012 dated November 26, 2012, of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

3) Loan Agreement No. IP-554

On March 31, 2009, the Government of the Republic of Indonesia signed Loan Agreement No. IP-554 with JICA in relation to the Project.

JICA agreed to lend the Government of the Republic of Indonesia an amount not exceeding JPY48,150,000,000 (full amount) will be used for the purchase of goods and services from suppliers, contractors or consultants necessary for the implementation of the Project.

The final disbursement under the Loan Agreement should be made not later than the same day and month at ten years after the effective date of the Loan Agreement, unless otherwise agreed upon between JICA and the Government of the Republic of Indonesia.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**31. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- a. Perjanjian terkait penyertaan modal, hibah dan pinjaman (lanjutan)

- 4) Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-002/PK/2009

Pada tanggal 24 Juli 2009, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-002/PK/2009 dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Perjanjian Hibah, Pemerintah Republik Indonesia setuju untuk menghibahkan dana sebesar JPY48.150.000.000 (nilai penuh) yang diperoleh dari pinjaman yang berasal dari negara lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan pekerjaan sipil dan peralatan, jasa konsultasi dan alokasi cadangan kontinjensi oleh Perusahaan bagi pelaksanaan kegiatan Proyek.

Pada tanggal 23 Maret 2016, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Hibah Daerah No. PHD-001/PK/2016 dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penerusan hibah dari JICA atas Loan Agreement IP-571 untuk Pembiayaan Proyek Mass Rapid Transit Jakarta. Para pihak setuju untuk meneruskan pinjaman JICA IP-571 sebagai hibah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar JPY11.347.000.000 (nilai penuh).

- 5) Keputusan Gubernur No. 1517/2011

Pada tanggal 27 Oktober 2011, Perusahaan menerima Keputusan Gubernur No. 1517/2011, dimana telah disetujui pencairan tambahan modal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp44.179 yang alokasinya bersumber dari APBD sebesar Rp30.000 dan hibah dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp14.179, sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-001/PK/2009 (Catatan 31a.2).

**31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

- a. Agreements related to capital investments, grants and loans (continued)

- 4) Grant Agreement No. NPPH-002/PK/2009

On July 24, 2009, Government of the Republic of Indonesia signed the Grant Agreement No. NPPH-002/PK/2009 with the Government of DKI Jakarta.

Under the Grant Agreement, the Government of the Republic of Indonesia agreed to provide grant fund amounting to JPY48,150,000,000 (full amount), which would be obtained from a loan from another country, to the Government of DKI Jakarta in order to implement equipment and civil works, consultation services and allocation for contingency reserves by the Company for implementation of development activities of the Project.

On March 23, 2016, the Government of Republic Indonesia signed grant agreement No. PHD-001/PK/2016 with the government of DKI Jakarta related to subsidiary loan JICA loan agreement on IP-571 for project financing Mass Rapid Transit Jakarta. The parties agreed to continue the JICA loan IP-571 as grant to the Government of DKI Jakarta amounted to JPY11,347,000,000 (full amount).

- 5) Governor Decree No. 1517/2011

On October 27, 2011, the Company received Governor Decree No. 1517/2011, whereby additional paid-in capital would be made by the Government of DKI Jakarta amounted to Rp44,179, which would be funded from the APBD amounting to Rp30,000 and grant from the Government of the Republic of Indonesia amounting to Rp14,179 based on Grant Agreement No. NPPH-001/PK/2009 (Note 31a.2).

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**31. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- a. Perjanjian terkait penyertaan modal, hibah dan pinjaman (lanjutan)

- 5) Keputusan Gubernur No. 1517/2011 (lanjutan)

Pada tanggal 2 Oktober 2012, Perusahaan menerima Keputusan Gubernur No. 1525/2012, yang menyetujui pencairan tambahan modal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp968.510 yang alokasinya bersumber dari APBD sebesar Rp65.000 dan hibah dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp14.041 sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-001/PK/2009 (Catatan 31a.4) dan hibah dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp889.469, sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-002/PK/2009 (Catatan 31a.4).

Pada bulan November dan Desember 2013, Perusahaan telah menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp111.000 berdasarkan Keputusan Gubernur No. 704 tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp31.000 dan Keputusan Gubernur No. 1923 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp80.000 yang alokasinya bersumber dari APBD.

Pada tanggal 11 Desember 2013, Perusahaan menerima Keputusan Gubernur No. 1924/2013, dimana telah disetujui pencairan tambahan modal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.720.529 yang alokasinya bersumber dari hibah dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp12.088, sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-001/PK/2009 (Catatan 27a2) dan hibah dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp1.708.441, sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-002/PK/2009 (Catatan 31a.4).

**31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

- a. Agreements related to capital investments, grants and loans (continued)

- 5) Governor Decree No. 1517/2011 (continued)

On October 2, 2012, the Company received Governor Decree No. 1525/2012, whereby additional paid-in capital would be made by the Government of DKI Jakarta amounting to Rp968,510, which would be funded from the APBD amounting to Rp65,000 and grant from the Government of the Republic of Indonesia amounting to Rp14,041,116,650 based on Grant Agreement No. NPPH-001/PK/2009 (Note 31a.4) and grant from the Government of the Republic of Indonesia amounting to Rp889,469 based on Grant Agreement No. NPPH-002/PK/2009 (Note 31a.4).

In November and December 2013, the Company received the additional Contribution from the Government of DKI Jakarta totaling Rp111,000 based on Governor Decree No. 704 dated May 1, 2013 amounting to Rp31,000 and Governor Decree No. 1923 dated December 11, 2013 amounting to Rp80,000 which were funded from the APBD.

On December 11, 2013, the Company received Governor Decree No. 1924/2013, whereby additional paid-in capital would be made by the Government of DKI Jakarta amounting to Rp1,720,529, which would be funded from a grant from the Government of the Republic of Indonesia amounting to Rp12,088 based on Grant Agreement No. NPPH-001/PK/2009 (Note 27a2) and grant from the Government of the Republic of Indonesia amounting to Rp1,708,441 based on Grant Agreement No. NPPH-002/PK/2009 (Note 31a.4).

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**31. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- a. Perjanjian terkait penyertaan modal, hibah dan pinjaman (lanjutan)

- 5) Keputusan Gubernur No. 1517/2011 (lanjutan)

Pada bulan Juli 2014, Perusahaan telah menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp125.000 berdasarkan Keputusan Gubernur No. 1123 tanggal 8 Juli 2014 yang alokasinya bersumber dari APBD.

Pada bulan Desember 2015, Perusahaan telah menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp145.000 berdasarkan Keputusan Gubernur No. 2700 tanggal 8 Desember 2015 yang alokasinya bersumber dari APBD.

Pada tanggal 4 Desember 2015, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Utang No. IP-571 dengan JICA terkait dengan Proyek. JICA setuju untuk memberikan pinjaman sebesar JPY75.218.000.000 (nilai penuh) kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk pelaksanaan Proyek Mass Rapid Transit Jakarta. Pinjaman akan digunakan untuk membeli barang dan jasa dari para pemasok, kontraktor atau konsultan yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek Mass Rapid Transit Jakarta.

Pada tanggal 4 Februari 2016, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Penerusan Pinjaman No.SLA-1263/DSMI/2016 dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penerusan pinjaman dari JICA atas Loan Agreement IP-571 untuk Pembiayaan Proyek Mass Rapid Transit Jakarta. Para pihak setuju untuk meneruskan pinjaman JICA IP-571 sebesar JPY63.871.000.000 (nilai penuh) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

- a. Agreements related to capital investments, grants and loans (continued)

- 5) Governor Decree No. 1517/2011 (continued)

In July 2014, the Company received the additional contribution from the Government of DKI Jakarta totaling Rp125,000 based on Governor Decree No. 1123 dated July 8, 2014 which were funded from the APBD.

In December 2015, the Company received the additional contribution from the Government of DKI Jakarta totaling Rp145,000 based on Governor Decree No. 2700 dated December 8, 2015 which were funded from the APBD.

On December 4, 2015, the Government of the Republic of Indonesia signed Loan Agreement No. IP-571 with JICA in relation to the Project. JICA agreed to lend the Government of the Republic of Indonesia an amount JPY75,218,000,000 (full amount) for the implementation of the Mass Rapid Transit Jakarta Project. The loan will be used for the purchase of goods and services from suppliers, contractors or consultants necessary for the implementation of the Mass Rapid Transit Jakarta Project.

On February 4, 2016, the Government of Republic of Indonesia signed Grant Agreement No.SLA-1263/DSMI/2016 with the Government of DKI Jakarta related to subsidiary loan from JICA loan agreement on IP-571 for project financing Mass Rapid Transit Jakarta. The parties agreed to continue the JICA loan IP-571 amounted to JPY63,871 to Government of DKI Jakarta.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**31. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- a. Perjanjian terkait penyertaan modal, hibah dan pinjaman (lanjutan)

- 5) Keputusan Gubernur No. 1517/2011 (lanjutan)

Pada bulan Desember 2016, Perusahaan telah menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp49.000 berdasarkan Keputusan Gubernur No. 2092 tanggal 16 September 2016 dan Rp100.000 berdasarkan Keputusan Gubernur No. 2730 tanggal 20 Desember 2016.

Pada bulan Desember 2017, Perusahaan telah menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp444.000 berdasarkan Keputusan Gubernur No. 2308 tanggal 20 Desember 2017 yang alokasinya bersumber dari APBD.

Pada tanggal 28 Desember 2018, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 tentang penyertaan modal daerah pada Perusahaan sebesar Rp40.757.353, setara dengan 99% dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada Perusahaan. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 mencabut Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 beserta perubahannya.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

- a. Agreements related to capital investments, grants and loans (continued)

- 5) Governor Decree No. 1517/2011 (continued)

In December 2016, the Company received the additional contribution from the Government of DKI Jakarta amounting to Rp49,000 based on Governor Decree No. 2092 dated September 16, 2016 and amounting to Rp100,000 based on Governor Decree No. 2730 dated December 20, 2016.

In December 2017, the Company received the additional contribution from the Government of DKI Jakarta totaling Rp444,000 based on Governor Decree No. 2308 dated December 20, 2017 which were funded from the APBD.

On December 28, 2018 Governor of DKI Jakarta issued Government Regulation No. 9 Year 2018 regarding the capital investment in the Company amounting to Rp40,757,353 which was equivalent to 99% of the issued and fully paid share capital of the Company. Government Regulation No. 9 Year 2018 revoked Government Regulation No. 4 Year 2008 and its amendment.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**31. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- a. Perjanjian terkait penyertaan modal, hibah dan pinjaman (lanjutan)

- 6) Perjanjian Hibah Daerah No. PHD-001/MK.7/2019

Pada tanggal 13 Februari 2019, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Hibah Daerah No. PHD-001/MK.7/2019 dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penerusan hibah atas *Loan Agreement* IP-578 untuk kegiatan Mass Rapid Transit Jakarta Fase 2 (II). Para pihak setuju untuk meneruskan pinjaman IP-578 sebagai hibah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar JPY70.021.000.000 (nilai penuh).

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan telah menerima pencairan modal yang berasal dari APBD, setoran modal dari PD Pasar Jaya dan penerusan hibah serta penerusan pinjaman masing-masing sebesar Rp1.193.500, Rp500 dan Rp20.865.565.

- b. Perjanjian kontraktor dan konsultan terkait proyek MRT

- 1) Perjanjian *Construction Management Consulting Services*

Pada tanggal 10 Juni 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian *Construction Management Consulting Services* dengan Oriental Consultant Co. Ltd., Japan International Consultant for Transportation Co. Ltd., dan Pacific Consultants, Co. Ltd. Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen kesepuluh tanggal 4 Februari 2020. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2020. Total nilai keseluruhan kontrak (tidak termasuk PPN) adalah sebesar JPY2.027.173.674 (nilai penuh) dan Rp154.939.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

- a. *Agreements related to capital investments, grants and loans (continued)*

- 6) *Grant Agreement No.PHD-001/MK.7/2019*

On February 13, 2019, Government of Republic Indonesia signed grant No.PHD-001/MK.7/2019 with government of DKI Jakarta related to subsidiary loan agreement on IP-578 for Mass Rapid Transit Jakarta Phase 2 (II) activities. The parties agreed to continue the loan IP-578 as grant to the Government of DKI Jakarta amounted to JPY70,021,000,000 (full amount).

As of December 31, 2022, the Company has received additional paid-up capital that was funded from the APBD, capital investment from PD Pasar Jaya, grant and loan mechanism amounting to Rp1,193,500, Rp500 and Rp20,865,565, respectively.

- b. *Contractors and consultants' agreement related to MRT's project*

- 1) *Construction Management Consulting Services agreement*

On June 10, 2013, the Company entered into a Construction Management Consulting Services agreement with Oriental Consultant Co. Ltd., Japan International Consultant for Transportation Co. Ltd., and Pacific Consultants, Co. Ltd. The agreement was last amended on tenth Amendment dated February 4, 2020. The agreement is valid until March 31, 2020. Total cost of the contract (excluding VAT) amounted to JPY2,027,173,674 (full amount) and Rp154,939.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**31. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- b. Perjanjian kontraktor dan konsultan terkait proyek MRT (lanjutan)

Seluruh tagihan sesuai perjanjian diatas telah dibayarkan.

- 2) Pada tanggal 11 Juni 2013, Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian sebagai berikut:

- (i) Perjanjian *Underground and Tunnels 9K+211 to 11K+043* dengan Shimizu-Obayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan Jaya Konstruksi JV (CP-104). Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen kedua puluh tujuh tanggal 5 November 2019 dengan jumlah nilai pekerjaan (termasuk PPN) sebesar JPY1.769.802.845 (nilai penuh) dan Rp1.429.713. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 20 Maret 2021.
- (ii) Perjanjian *Underground and Tunnels 11K+043 to 13K+102* dengan Shimizu-Obayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan Jaya Konstruksi JV (CP-105). Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen kedua puluh delapan tanggal 5 November 2019 dengan jumlah nilai pekerjaan (termasuk PPN) sebesar JPY1.345.610.067 (nilai penuh) dan Rp1.528.405. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 20 Maret 2021.
- (iii) Perjanjian *Underground and Tunnels 13K+102 to 15K+123* dengan SMCC and HK JO (CP-106). Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen ketiga belas tanggal 4 November 2019 dengan jumlah nilai pekerjaan (termasuk PPN) sebesar JPY5.558.748.360 (nilai penuh) dan Rp1.436.306. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 20 Maret 2021.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

- b. Contractors and consultants' agreement related to MRT's project (continued)

All invoices according to the agreement above have been paid.

- 2) On June 11, 2013, the Company entered into several agreements as follows:

- (i) *Underground and Tunnels 9K+211 to 11K+043 agreement with Shimizu-Obayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and Jaya Konstruksi JV (CP-104). The agreement was last amended on twenty seventh Amendment dated November 5, 2019 with total cost of contract (including VAT) amounting to JPY1,769,802,845 (full amount) and Rp1,429,713. The contract is valid until March 20, 2021.*
- (ii) *Underground and Tunnels 11K+043 to 13K+102 agreement with Shimizu, Obayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk & Jaya Konstruksi JV (CP-105). The agreement was last amended on twenty eighth Amendment dated November 5, 2019 with total cost of contract (including VAT) amounting to JPY1,345,610,067 (full amount) and Rp1,528,405. The contract is valid until March 20, 2021.*
- (iii) *Underground and Tunnels 13K+102 to 15K+123 agreement with SMCC and HK JO (CP-106). The agreement was last amended on thirteenth Amendment dated November 4, 2019 with total cost of contract (including VAT) amounting to JPY5,558,748,360 (full amount) and Rp1,436,307. The contract is valid until March 20, 2021.*

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**31. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- b. Perjanjian kontraktor dan konsultan terkait proyek MRT (lanjutan)

- 2) Pada tanggal 11 Juni 2013, Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian sebagai berikut:

Selama tahun 2022, nilai sertifikat pembayaran Kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY216.352.444 (nilai penuh) (setara dengan Rp 28.365) dan Rp 96.234.

- 3) Perjanjian *Tender Assistance Services (2) for Installation and Procurement of Railway System & Track and Rolling Stock for Jakarta MRT System Project*

Pada tanggal 4 Juli 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian *Tender Assistance Services (2) for Installation and Procurement of Railway System & Track and Rolling Stock for Jakarta MRT System Project* dengan Nippon Koei Co. Ltd., Japan Transportation Consultants, Inc., The Japan Electrical Consulting Co., Ltd, PT Jaya CM, PT Dardela Yasa Guna, PT Wiratman, PT Rayakonsult, PT LAPI ITB dan PT Inti Daya Kreasicitra. Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen keempat tanggal 8 Juli 2015 dengan jumlah nilai keseluruhan kontrak (tidak termasuk PPN) adalah sebesar JPY91.284.484 (nilai penuh) dan Rp5.045.

Seluruh tagihan sesuai perjanjian diatas telah dibayarkan.

- 4) Pada bulan Oktober 2013, Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian sebagai berikut:

- (i) Perjanjian *Depot, Elevated Structure and Station 0K+580 TO 0K+630* dengan Tokyu-Wika JO (CP-101). Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen kedua puluh tanggal 1 November 2019 dengan jumlah nilai pekerjaan (tidak termasuk PPN) sebesar JPY6.533.334.118 (nilai penuh) dan Rp1.511.377. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 19 Maret 2021.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

- b. Contractors and consultants' agreement related to MRT's project (continued)

- 2) On June 11, 2013, the Company entered into several agreements as follows:

During 2022, total Contractors' payment certificate which has been paid related to the above agreements amounted to JPY216,352,444 (full amount) (equivalent to Rp28,365) and Rp96,234.

- 3) *Tender Assistance Services (2) Agreement for Installation and Procurement of Railway System & Track and Rolling Stock for Jakarta MRT System Project agreement*

On July 4, 2013, the Company entered into a *Tender Assistance Services (2) for Installation and Procurement of Railway System & Track and Rolling Stock for Jakarta MRT System Project agreement* with Nippon Koei Co. Ltd., Japan Transportation Consultants, Inc., The Japan Electrical Consulting Co., Ltd, PT Jaya CM, PT Dardela Yasa Guna, PT Wiratman, PT Rayakonsult, PT LAPI ITB and PT Inti Daya Kreasicitra. The agreement was last amended on fourth amendment dated July 8, 2015 with total cost of the contract (excluding VAT) amounted to JPY91,284,484 (full amount) and Rp5,045.

All invoices according to the agreement above have been paid.

- 4) In October 2013, the Company entered into several agreements as follows:

- (i) *Depot, Elevated Structure and Station 0K+580 TO 0K+630 agreement* with Tokyu-Wika JO (CP-101). The agreement was last amended on twentieth Amendment dated November 1, 2019, with total cost of contract (excluding VAT) amounting to JPY6,533,334,118 (full amount) and Rp1,511,377. The contract is valid until March 19, 2021.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**31. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- b. Perjanjian kontraktor dan konsultan terkait proyek MRT (lanjutan)
- 4) Pada bulan Oktober 2013, Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian sebagai berikut: (lanjutan)
- (ii) Perjanjian *Elevated Structures and Stations* dengan Tokyu-Wika JO (CP 102). Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen kedua puluh tanggal 1 November 2019 dengan jumlah nilai pekerjaan (termasuk PPN) sebesar JPY2.540.345.561 (nilai penuh) dan Rp1.423.548. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 19 Maret 2021.
- (iii) Perjanjian *Elevated Structures and Stations 5K+369 to 9K+211* dengan Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi JV (CP 103). Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen kedelapan belas tanggal 7 November 2019 dengan jumlah nilai pekerjaan (termasuk PPN) dengan jumlah nilai pekerjaan sebesar JPY4.175.950.529 (nilai penuh) dan Rp1.768.547. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 20 Maret 2021.

Selama tahun 2022, tidak terdapat nilai sertifikat pembayaran kontraktor yang dibayarkan terkait perjanjian diatas.

- 5) Perjanjian *Contract for Systems and Rolling Stock Section: CP 108 - Rolling Stock*

Pada tanggal 3 Maret 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian *Contract for Systems and Rolling Stock Section: CP 108 - Rolling Stock* dengan Sumitomo Corporation. Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen kelima tanggal 20 Desember 2019. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 2 April 2021. Jumlah nilai keseluruhan kontrak (termasuk PPN) adalah sebesar JPY11.179.106.055 (nilai penuh) dan Rp157.382.

Selama tahun 2022, tidak terdapat nilai sertifikat pembayaran kontraktor yang dibayarkan terkait perjanjian diatas.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

- b. *Contractors and consultants' agreement related to MRT's project (continued)*

- 4) *In October 2013, the Company entered into several agreements as follows: (continued)*

(ii) *Elevated Structures and Stations agreement with Tokyu-Wika JO (CP 102). The agreement was last amended on twentieth Amendment dated November 1, 2019, with total cost of contract (excluding VAT) amounting to JPY2,540,345,561 (full amount) and Rp1,423,548. The contract is valid until March 19, 2021.*

(iii) *Elevated Structures and Stations 5K+369 to 9K+211 agreement with Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi JV (CP 103). The agreement was last amended on eighteenth Amendment dated September 9, 2019, with total cost of contract (including VAT) amounting to JPY4,175,950,529 (full amount) and Rp1,768,547. The contract is valid until March 20, 2021.*

During 2022, there is no payment certificate has been paid related to the above agreements

- 5) *Contract Agreement for Systems and Rolling Stock Section: CP 108 - Rolling Stock*

On March 3, 2015, the Company entered into a Contract for Systems and Rolling Stock Section: CP 108 - Rolling Stock with Sumitomo Corporation. The agreement was last amended on fifth Amendment dated March 27, 2019. The agreement is valid until April 2, 2021. Total cost of the contract (including VAT) amounted to JPY11,179,106,055 (full amount) and Rp157,382.

During 2022, there is no payment certificate has been paid related to the above agreements.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**31. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- b. Perjanjian kontraktor dan konsultan terkait proyek MRT (lanjutan)

6) Perjanjian *Contract for Railway Systems and Trackwork CP-107*

Pada tanggal 30 April 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian *Contract for Railway Systems and Trackwork CP-107* dengan Mitsui & Co, Ltd., Toyo Engineering Corporation, Kobe Steel, Ltd., Sumitomo Corporation dan PT Inti Karya Persada Teknik. Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen kesepuluh tanggal 17 Januari 2021. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 19 Maret 2021. Jumlah nilai keseluruhan kontrak (termasuk PPN) adalah sebesar JPY16.216.169.825 (nilai penuh) dan Rp1.445.890.

Selama tahun 2022, tidak terdapat nilai sertifikat pembayaran kontraktor yang dibayarkan terkait perjanjian diatas.

7) Perjanjian *Operation and Maintenance Consulting Services Proyek MRT Jakarta System Fase 1 Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia*

Pada tanggal 13 April 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian *Operation and Maintenance Consulting Services Proyek MRT Jakarta System Fase 1 Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia* dengan Japan International Consultants for Transportation Co., Ltd. (*Joint Venture and Association*). Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen kedelapan tanggal 15 November 2019. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2020. Jumlah nilai keseluruhan kontrak adalah (tidak termasuk PPN) sebesar JPY858.730.793 (nilai penuh) dan Rp51.483.

Seluruh tagihan sesuai perjanjian diatas telah dibayarkan.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

- b. *Contractors and consultants' agreement related to MRT's project (continued)*

6) *Contract Agreement for Railway Systems and Trackwork CP-107*

On April 30, 2015, the Company entered into a *Contract for Railway Systems and Trackwork CP-107* with Mitsui & Co, Ltd., Toyo engineering Corporation, Kobe Steel, Ltd., Sumitomo Corporation and PT Inti Karya Persada Teknik. The agreement was last amended on tenth Amendment dated January 17, 2021. The agreement is valid until March 19, 2021. Total cost of the contract (including VAT) amounted to JPY16,216,169,825 (full amount) and Rp1,445,890.

During 2022, there is no payment certificate has been paid related to the above agreements

7) *Contract Agreement for Operation and Maintenance Consulting Services Proyek MRT Jakarta System Phase 1 Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia*

On April 13, 2016, the Company entered into a *Contract for Operation and Maintenance Consulting Services Proyek MRT Jakarta System Phase 1 Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia* with Japan International Consultants for Transportation Co., Ltd. (*Joint Venture and Association*). The agreement was last amended on eighth Amendment dated November 15, 2019. The Agreement is valid until July 31, 2020. Total cost of the Contract (exclude VAT) amounted to JPY858,730,793 (full amount) and Rp51,483.

All invoices according to the agreement above have been paid.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**31. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- b. Perjanjian kontraktor dan konsultan terkait proyek MRT (lanjutan)

- 8) Perjanjian *Engineering Design and Tender Assistances Consulting Services for Phase II Section MRT System*

Pada tanggal 4 Desember 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian *Engineering Design and Tender Assistances Consulting Services for Phase II Section MRT System* dengan Oriental Consultants Global Co., Ltd (*Joint Venture and Association*). Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen kedelapan tanggal 26 Agustus 2022. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2023. Jumlah nilai keseluruhan kontrak (termasuk PPN) adalah sebesar JPY2.513.793.225 (nilai penuh) dan Rp116.391.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, keseluruhan nilai pembayaran konsultan yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY471.872.690 (nilai penuh) (setara dengan Rp53.699) dan Rp15.725.

- 9) Perjanjian Paket Pekerjaan CP 200: Jasa Konstruksi Dinding Diafragma untuk Gardu Induk Monas Proyek MRT Jakarta Fase 2

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian Paket Pekerjaan CP 200: Jasa Konstruksi Dinding Diafragma untuk Gardu Induk Monas Proyek MRT Jakarta Fase 2 dengan PT Trocon Indah Perkasa. Jumlah nilai keseluruhan kontrak adalah sebesar Rp21.767 (termasuk pajak).

Seluruh tagihan sesuai perjanjian diatas telah dibayarkan.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

- b. *Contractors and consultants' agreement related to MRT's project (continued)*

- 8) *Contract Agreement for Engineering Design and Tender Assistances Consulting Services for Phase II Section MRT System*

On December 4, 2017, the Company entered into a Contract for Engineering Design and Tender Assistances Consulting Services for Phase II Section MRT System with Oriental Consultants Global Co., Ltd (Joint Venture and Association). The agreement was last amended on eighth Amendment dated August 26, 2022. The Agreement is valid until June 30, 2023. Total cost of the contract (including VAT) amounted to JPY2,513,793,225 (full amount) and Rp116,391.

During 2022, total contractors' payment certificate which has been paid related to the above agreements amounted JPY471,872,690 (full amount) (equivalent to Rp53,699) and Rp15,725.

- 9) *On December 31, 2018, the Company entered into a Contract for Contract Package CP200: Diaphragm Wall Construction Services for Jakarta Monas Substation MRT Phase 2 Project*

On December 31, 2018, the Company entered into a Contract for Contract Package CP200: Diaphragm Wall Construction Services for Jakarta Monas Substation MRT Phase 2 Project with PT Trocon Indah Perkasa. Total cost of the Contract amounted to Rp21,767, (include taxes).

All invoices according to the agreement above have been paid.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**31. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- b. Perjanjian kontraktor dan konsultan terkait proyek MRT (lanjutan)

- 10) Perjanjian Paket Pekerjaan CP 201: Jasa Rancang Bangun Bangunan Bawah Tanah – Pekerjaan Sipil 1-

Pada tanggal 14 Februari 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian Paket Pekerjaan CP 201: Jasa Rancang Bangun Bangunan Bawah Tanah – Pekerjaan Sipil 1- Berlokasi di Sepanjang Kp. 15K+123 hingga Kp.17+800, pada proyek Mass Rapid Transit Jakarta (Fase 2) (I) dengan Shimizu – Adhi Karya Joint Venture. Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen kedua tanggal 15 Agustus 2022. Jumlah nilai keseluruhan kontrak (termasuk PPN) adalah sebesar JPY3.746.033.751 (nilai penuh) dan Rp4.038.472

Selama tahun 2022, nilai sertifikat pembayaran kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY749.981.671 (nilai penuh) (setara dengan Rp82.589) dan Rp480.979.

Pada tanggal 29 April 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian jasa konsultansi: Construction Management Consulting Services (CMCS) for Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) Project Phase 2 (I) dengan Joint Venture Oriental Consultants Global Co., Ltd., Japan International Consultants for Transportation Co.,Ltd., Pacific Consultants Co., Ltd., Chodai co., Ltd., Nippon Koei co., Ltd berasosiasi dengan PT Dardela Yasa Guna, PT Rayakonsult, PT Jaya Cm, PT Oriental Consultants Indonesia, PT Parentjana Djaja, PT Amythas. Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen kedua tanggal 16 Desember 2022. Jumlah nilai keseluruhan kontrak (tidak termasuk PPN) adalah tidak melebihi sebesar JPY4.247.722.500 (nilai penuh) dan Rp323.918.

Selama tahun 2022, nilai sertifikat pembayaran kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY475.254.896 (nilai penuh) (setara dengan Rp53.733) dan Rp38.381.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

- b. Contractors and consultants' agreement related to MRT's project (continued)

- 10) Agreement for Contract Package CP201: Design and Build of underground section – civil 1-

On February 14, 2021, the Company entered into a Contract for Contract Package CP201: Design and Build of underground section – civil 1- from Kp. 15K+123 to Kp.17+800 of Mass Rapid Transit Jakarta Project (phase 2) (I). The agreement was last amended on second amendment dated August 15, 2022 Total cost of the Contract amounted to JPY3,746,033,751 (full amount) and Rp4,038,472 (include VAT)

During 2022, total contractors' payment certificate which has been paid related to the above agreements amounted JPY749,981,671 (full amount) (equivalent to Rp82,589) and Rp480,979.

On April 29, 2021, the Company entered into a Consultations Contract: Construction Management Consulting Services (CMCS) for Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) Project Phase 2 (I) dengan Joint Venture Oriental Consultants Global Co., Ltd., Japan International Consultants for Transportation Co.,Ltd., Pacific Consultants Co., Ltd., Chodai co., Ltd., Nippon Koei co., Ltd berasosiasi dengan PT Dardela Yasa Guna, PT Rayakonsult, PT Jaya Cm, PT Oriental Consultants Indonesia, PT Parentjana Djaja, PT Amythas. The agreement was last amended on second amendment dated December 16, 2022. Total cost of the Contract (exclude VAT) amounted to JPY4,247,722,500 (full amount) dan Rp323,918.

During 2022, total contractors' payment certificate which has been paid related to the above agreements amounted JPY475,254,896 (full amount) (equivalent to Rp53,733 and Rp38,381).

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**31. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- b. Perjanjian kontraktor dan konsultan terkait proyek MRT (lanjutan)

- 11) Perjanjian untuk *Operation & Maintenance Consulting Services* (OMCS) 2nd Stage untuk Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) Project

Pada tanggal 27 Oktober 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian untuk *Operation & Maintenance Consulting Services* (OMCS) 2nd Stage untuk Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) Project dengan Joint Venture antara Japan International Consultants for Transportation Co., Ltd.; dan Nippon Koei Co., Ltd., beserta Asosiasinya. Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen kedua tanggal 25 oktober 2021. Jumlah nilai keseluruhan kontrak adalah tidak lebih dari sebesar JPY810.883.961 (nilai penuh) dan Rp17.660.

Selama tahun 2022, nilai sertifikat pembayaran kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY306.134.915 (nilai penuh) (setara dengan Rp33.948) dan Rp4.292.

- 12) Perjanjian Paket Pekerjaan CP 202: Rancang Bangun Bangunan Bawah Tanah – Pekerjaan Sipil 2 –

Pada tanggal 18 Juli 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian Paket Pekerjaan CP 202: Rancang Bangun Bangunan Bawah Tanah – Pekerjaan Sipil 2 – Berlokasi di Sepanjang KP. 17K+800 Hingga KP.19K+641, Pada Proyek Mass rapid Transit Jakarta (Fase 2) (I). Jumlah nilai keseluruhan kontrak (tidak termasuk PPN) adalah sebesar JPY8.343.143.485 (nilai penuh) dan Rp7.149.350.

Selama tahun 2022, nilai sertifikat pembayaran kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY1.300.237.129 (nilai penuh) (setara dengan Rp138.152) dan Rp296.395.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

- b. Contractors and consultants' agreement related to MRT's project (continued)

- 11) Contract Agreement *Operation & Maintenance Consulting Services* (OMCS) 2nd Stage to Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) Project

On October 27, 2021, the Company entered a Contract *Operation & Maintenance Consulting Services* (OMCS) 2nd Stage to Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) Project with Joint Venture between Japan International Consultants for Transportation Co., Ltd.; and Nippon Koei Co., Ltd., and its Association. The agreement was last amended on second amendment dated October 25, 2021. Total cost of the Contract shall not exceed amounted to JPY810,883,961 (full amount) dan Rp17,660.

During 2022, total contractors' payment certificate which has been paid related to the above agreements amounted JPY306,134,915 (equivalent to Rp33,948) and Rp4,292.

- 12) Contract Agreement for Contract Package CP202: Design and Build of Underground Section – civil 2 -

On July 18, 2022, the Company entered into a Contract for Contract Package CP202: Design and Build of Underground Section – civil 2 - from 17K+800 to 19K+641 of Mass Rapid Transit Jakarta Project (phase 2) (I). Total cost of the Contract (exclude VAT) amounted to JPY8,343,143,485 (full amount) and Rp7,149,350.

During 2022, total contractors' payment certificate which has been paid related to the above agreements amounted JPY1,300,237,129 (full amount) (equivalent to Rp138,152) and Rp296,395.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**31. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- b. Perjanjian kontraktor dan konsultan terkait proyek MRT (lanjutan)

- 13) Perjanjian Paket Pekerjaan CP 203: Rancang Bangun Bangunan Bawah Tanah – Pekerjaan Sipil 3 -

Pada tanggal 19 April 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian Paket Pekerjaan CP 203: Rancang Bangun Bangunan Bawah Tanah – Pekerjaan Sipil 3 - Berlokasi di Sepanjang Kp. 19K+641 hingga Kp.20+971, pada proyek Mass Rapid Transit Jakarta (Fase 2) (I) dengan Sumitomo Mitsui Construction Co., - PT Hutama Karya (Persero) Joint Operation. Jumlah nilai keseluruhan kontrak (termasuk PPN) adalah sebesar JPY8.957.471.950 (nilai penuh) dan Rp3.395.412.

Selama tahun 2022, nilai sertifikat pembayaran kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY1.703.101.982 (nilai penuh) (setara dengan Rp189.514) dan Rp78.182.

Perusahaan memiliki hutang retensi sebesar 10% yang akan dibayarkan masing-masing sebesar 5% pada masa tahun pertama dan kedua *defect liability period*. Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo hutang retensi adalah sebesar Rp222.849 (2021: Rp84.145).

- c. Denda keterlambatan pembayaran kepada kontraktor proyek MRT

Berdasarkan *General Conditions of Contract, FIDIC Yellow Book* edisi tahun 1999, pada klausul 20.1 *Contractor's Claim*, kontraktor dapat mengajukan notifikasi melalui *Engineer* dalam waktu tidak lebih dari 28 hari setelah kontraktor mengetahui atau, seharusnya mengetahui, terhadap keadaan atau kejadian yang mengakibatkan notifikasi tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 nilai *financing charge* dan *claims* yang masih harus dibayarkan adalah sebesar Rp54.512 dan JPY13.172.849 (nilai penuh) atau ekuivalen dengan masing-masing sebesar Rp1.549 dan Rp1.632 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

- b. Contractors and consultants' agreement related to MRT's project (continued)

- 13) Work Package agreement CP 203: Underground Building Design – Civil Works 3 -

On April 19, 2021, the Company signed a Work Package agreement CP 203: Underground Building Design – Civil Works 3 - Located Along Kp. 19K+641 to Kp.20+971, in the Jakarta Mass Rapid Transit project (Phase 2) (I) with Sumitomo Mitsui Construction Co., - PT Hutama Karya (Persero) Joint Operation. The total contract value (including VAT) is JPY 8,957,471,950 (full amount) and Rp 3,395,412.

During 2022, total contractors' payment certificate which has been paid related to the above agreements amounted JPY1,703,101,982 (full amount) (equivalent to Rp189,514) and Rp78,182.

The Company has 10% of retention payables that will be paid by 5% in the first and second year of defect liability period. As of December 31, 2022, the balance of retention payables are Rp222.849 (2021: Rp84,145)

- c. Delayed payment charge to contractors of MRT's project

Based on the contract clause 20.1 on the *FIDIC General Conditions of Contract, Yellow Book Year 1999*, the contractor entitled of claim, as soon as practicable, and not later than 28 days to Engineer after the contractor became aware, or should have become aware, of the event or circumstance.

On December 31, 2022 and 2021, the accrued financing charge and claims are amounted to Rp54,512 and JPY13,172,849 (full amount), equivalent to Rp1,549 and Rp1,632 on December 31, 2022 and 2021, respectively.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**31. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- d. Re-ekspor atas peralatan dan mesin yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi MRT

Untuk memenuhi kebutuhan proyek, Perusahaan melakukan impor atas material, peralatan dan mesin tertentu yang terkait dengan proyek pembangunan MRT Fase 2 Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia. Terdapat kewajiban Perusahaan untuk melakukan re-ekspor atas peralatan dan mesin yang telah diimpor. Terkait atas kewajiban tersebut, Perusahaan telah mengeluarkan surat jaminan atas bea masuk kepada Kantor Bea dan Cukai, yang akan menjadi kewajiban sesungguhnya, apabila Perusahaan tidak melakukan re-ekspor. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan tidak melakukan re-ekspor atas peralatan dan mesin yang telah diimpor.

- e. Perjanjian terkait pendapatan non-tiket

- 1) Perjanjian Kerjasama Layanan Periklanan dengan PT Avabanindo Perkasa

Pada tanggal 13 Desember 2017, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Layanan Periklanan dengan PT Avabanindo Perkasa ("AP") untuk kebutuhan penyediaan layanan periklanan operasional MRT Jakarta - Fase I. Perjanjian tersebut berlaku selama 20 tahun dimulai dari tanggal operasi pendapatan.

Berdasarkan perjanjian tersebut, AP wajib memberikan komisi penandatanganan perjanjian kepada Perusahaan sebesar Rp40.000. Atas biaya tersebut dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka dan akan diamortisasi sejak Perusahaan beroperasi dan selama jangka waktu perjanjian.

Pada tanggal 28 November 2019, Perusahaan dan AP sepakat untuk menyelesaikan denda ketidakpatuhan sebesar Rp23.028 dan denda tersebut telah dibayarkan oleh AP.

**31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

- d. Re-export of the equipments and machines that have been used for MRT's project

In order to fulfill the project needs, the Company imported certain materials, equipments and machines with MRT project phase 2' Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia. There is a liability for the Company to re-export the equipments and machines which has been imported. Related to its liability, the Company has issued its guarantee letter to cover the custom import duty to "Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai", in which, the liability will be recognized if the Company failed to re-export. As of December 31, 2022, the Company has not re-exported all the equipments and machines which has been imported.

- e. Agreements related to non-farebox revenues

- 1) Advertising Cooperation Agreement with PT Avabanindo Perkasa

On December 13, 2017, the Company signed an Advertising Cooperation Agreement with PT Avabanindo Perkasa ("AP") for provide advertising services in the operational area of MRT Jakarta - Phase I. This agreement is valid for 20 years from the revenue operation date.

Based on the agreement, AP shall have an obligation to pay the Agreement signing commission to the Company amounting to Rp40,000. The fee recognized as unearned revenue and will amortize since the Company operated and during the term of the agreement.

On November 28, 2019, the Company and AP have agreed to settle the non-compliance penalty amounted to Rp23,028 and the said penalty has been paid by AP.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**31. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

e. Perjanjian terkait pendapatan non-tiket
(lanjutan)

1) Perjanjian Kerjasama Layanan Periklanan
dengan PT Avabanindo Perkasa (lanjutan)

Pada tanggal 4 Agustus 2022, Perusahaan dan AP menandatangani amandemen ketiga Perjanjian Kerja Sama layanan periklanan. Dalam amandemen tersebut, Perusahaan dan AP menyepakati beberapa hal yaitu:

1. Mengubah Minimum Guarantee Revenue Sharing (MGRS) tahunan serta proyeksi pendapatan kotor tahunan
2. Perpanjangan termin pembayaran utang MGRS tahun kerjasama kedua, ketiga dan keempat (termin 1-3) maksimal sampai dengan tiga tahun sejak tanggal jatuh tempo setiap invoice.
3. Apabila terdapat porsi piutang diatas yang masih belum dibayar setelah 3 tahun sejak tanggal jatuh tempo, maka diberikan relaksasi kembali sesuai dengan kontrak, yaitu pembayaran bertahap sampai dengan tanggal 1 Desember 2027, namun atas setiap Piutang yang masih outstanding, Avabanindo dikenakan denda sebesar tingkat suku bunga Deposito Tahunan perbankan.

**31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

e. Agreements related to non-farebox revenues
(continued)

1) Advertising Cooperation Agreement with
PT Avabanindo Perkasa (continued)

On August 4, 2022, the Company and AP have signed the third Advertising Services Cooperation Agreement amendments. In the amendments, the Company and AP agreed on several matters, namely:

1. Changing the annual Minimum Guarantee Revenue Sharing (MGRS) and annual gross income projections.
2. Extension of the term of payment related to MGRS debt for the second, third and fourth years of cooperation (terms 1-3) for a maximum of three years from the due date of each invoice.
3. If there is a portion of the receivables above that are still unpaid after 3 years from the due date, relaxation will be given according to the contract, namely gradual payments until December 1, 2027, but for each receivable that is still outstanding, Avabanindo will be subject to a penalty at the interest rate Banking Annual Deposit.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**31. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

e. Perjanjian terkait pendapatan non-tiket (lanjutan)

- 2) Selama tahun 2018 sampai dengan 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Hak Penamaan Stasiun dengan pihak ketiga dalam rangka hak penamaan eksklusif stasiun MRT Jakarta fase 1 di stasiun dengan beberapa pihak dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal/ Date	Pihak Ketiga/Third Parties	Stasiun/ Station	Jangka Waktu/ Period
31 Desember 2018/ December 31, 2018	PT Bank Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dukuh Atas	10 tahun/ 10 years
31 Desember 2018/ December 31, 2018	PT Astra International Tbk	Setiabudi	10 tahun/ 10 years
11 Februari 2019/ February 11, 2019	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Istora	10 tahun/ 10 years
1 April 2019/ April 1, 2019	PT Solusi Transportasi Indonesia	Lebak Bulus	5 tahun/ 5 years
17 Mei 2019/ May 17, 2019	PT Bank Central Asia Tbk	Blok M	5 tahun/ 5 years
24 Desember 2021/ December 24, 2021	PT Indomarco PrismaTama	Fatmawati	5 tahun/ 5 years

Nilai kontrak atas perjanjian-perjanjian diatas berkisar antara Rp10.000 sampai dengan Rp33.000 per tahun.

- 3) Selama tahun 2018 sampai dengan 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Usaha Retail dengan pihak ketiga dalam rangka sewa ruang dan bagi hasil usaha retail. Perjanjian tersebut berlaku untuk 2 tahun yang dimulai dari tanggal berusaha gerai. Atas perjanjian ini, pihak ketiga berkewajiban atas biaya sewa dan bagi hasil dari penjualan harian berdasarkan persentase yang telah disepakati dalam perjanjian, yakni antara 10% - 20%.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

e. Agreements related to non-farebox revenues (continued)

- 2) During 2018 up to 2022, the Company signed the Station Naming Rights Agreement with third parties in the context of the exclusive naming rights of MRT Jakarta stations phase 1 with several parties with details as follow:

Contract value of the agreements above ranging from Rp10,000 to Rp33,000, per year.

- 3) During 2018 up to 2022, the Company signed the Retail Business Agreement with third parties in the context of retail business space rent and revenue sharing. The agreement is valid for 2 years after the store opening date. For these agreements, third parties obliged of rent fee and revenue sharing on daily sales based on the agreements, between 10%-20%.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**31. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

e. Perjanjian terkait pendapatan non-tiket (lanjutan)

- 4) Selama tahun 2019 sampai dengan 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemesanan dan Pembayaran Digital Tiket Berbasis *Mobile Application* dengan pihak ketiga untuk kebutuhan penyediaan layanan pembayaran digital tiket berbasis *mobile application*. Perjanjian tersebut berlaku selama 3 tahun dimulai dari tanggal operasi pendapatan.

Berdasarkan perjanjian tersebut, pihak ketiga wajib membayar biaya pelaksanaan kerjasama selama jangka waktu perjanjian. Atas biaya tersebut dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka dan akan diamortisasi sejak Perusahaan beroperasi dan selama jangka waktu perjanjian. Detail Perjanjian Kerjasama Pemesanan dan Pembayaran Digital Tiket Berbasis *Mobile Application* dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Tanggal/Date

7 Oktober 2019/ *October 7, 2019*
3 Oktober 2019/ *October 3, 2019*
6 November 2019/ *November 6, 2019*
31 Oktober 2019/ *October 31, 2019*
22 Juni 2022/ *June 22, 2022*
27 Desember 2022/ *December 27, 2022*

Komisi atas pelaksanaan kerjasama atas perjanjian tersebut berkisar antara Rp4.000 sampai dengan Rp25.000 per tahun.

**31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

e. *Agreements related to non-farebox revenues (continued)*

- 4) *During 2019 up to 2022, the Company has signed the Digital Ticketing Payment with Mobile Application Cooperation Agreement with third parties for provide digital ticketing payment services with mobile application. This agreement is valid for 3 years from the revenue operation date.*

Based on the agreements, third parties shall have an obligation to pay the agreement signing commission to the Company during the term of the agreement. The fee recognized as unearned revenue and will be amortized since the Company being operated and during the term of the agreement. The details of Digital Ticketing Payment with Mobile Application Cooperation Agreement with third parties are as follows:

Pihak Ketiga/Third Parties

PT Espay Debit Indonesia Koe (Dana)
PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja)
PT Visionet Internasional (OVO)
PT Dompot Anak Bangsa (Gopay)
PT Astra Digital Arta (AstraPay)
PT Inti Dunia Sukses dan PT Indomarco Pristama (i.saku)

Agreement signing commission of the agreements above ranging from Rp4,000, to Rp25,000 per year.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**31. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

e. Perjanjian terkait pendapatan non-tiket (lanjutan)

5) Pada tanggal 26 Desember 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Layanan Periklanan dengan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo ("JIP") untuk kebutuhan penyediaan layanan periklanan pada media luar ruang media pilar MRT Jakarta - Fase I. Perjanjian tersebut berlaku selama 5 tahun dimulai dari tanggal 14 Februari 2021 atau tanggal Berita Acara Pemasangan, tergantung yang tercapai terlebih dahulu.

Pada tanggal 4 Februari 2022, Perusahaan dan JIP menandatangani amandemen Perjanjian Kerja Sama layanan periklanan pada media luar ruang media pilar MRT Jakarta Fase 1. Dalam amandemen perjanjian tersebut, kedua belah pihak sepakat mengubah jangka waktu kerja sama menjadi tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2025.

Pada tanggal 9 Maret 2022, Perusahaan dan JIP menandatangani Berita Acara Kesepakatan (BAK). Berdasarkan BAK tersebut, kedua belah pihak sepakat mengubah jadwal pembayaran porsi minimum yang dijamin tahun Kerjasama kedua dan mengubah jadwal dan ketentuan pembayaran porsi pendapatan minimum yang dijamin.

Pada tanggal 30 Desember 2022, Perusahaan dan JIP menandatangani Amandemen kedua Perjanjian Kerja Sama. Berdasarkan amandemen tersebut, para pihak menyepakati beberapa hal diantaranya:

1. Memperpanjang jangka waktu kerja sama menjadi delapan tahun;
2. Mengubah porsi bagi hasil atas pendapatan kotor; dan
3. Mengubah nilai pendapatan minimum yang dijamin.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

e. Agreements related to non-farebox revenues (continued)

5) On December 26, 2019, the Company signed an Advertising Services Cooperation Agreement with Jakarta Infrastruktur Propertindo ("JIP") for provide advertising services in the outdoor pillar media of MRT Jakarta - Phase I. This agreement is valid for 5 years from February 14, 2021 or the installation report date, whichever is shorter.

On Februari 4, 2022, the Company and JIP sign the Cooperation Agreement amendments of MRT Jakarta Phase 1 advertising services on outdoor pillar media. In the agreement amendments, both parties agreed to change the period of agreement from October 14, 2021 to October 13, 2025.

On March 9, 2022, the Company and JIP sign Minutes of Agreement (MOA). Based on the minutes of agreement, both parties agreed to change the period of minimum guarantee payment year 2 and change the schedule of payment of the minimum guarantee payment

On December 30, 2022, the Company and JIP have signed the second amendment of Cooperation Agreement. Based on the agreement, both parties agreed to:

1. To extend the cooperation period to eight years;
2. To change the gross revenue sharing portion;
3. To change the minimum guarantee payment.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**31. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

e. Perjanjian terkait pendapatan non-tiket (lanjutan)

- 6) Pada tanggal 5 Mei 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Layanan Periklanan pada media *Cooling Tower & Ventilation Tower* (CTVT) dengan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi ("TIRA"). Perjanjian tersebut berlaku selama lima tahun.

Sesuai dengan perjanjian, TIRA diwajibkan untuk membayar *Commitment Fee* sebesar Rp25,000 dan porsi pendapatan minimum yang dijamin sebesar Rp26,500 setiap tahun.

f. Perjanjian jual beli tenaga listrik

Pada tanggal 21 Desember 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya untuk kebutuhan sistem operasi MRT Jakarta dengan Biaya Penyambungan (BP) listrik menurut kontrak sebesar Rp32.100. Perjanjian tersebut berlaku selama Perusahaan masih menjadi pelanggan listrik. Kewajiban bulanan pembayaran listrik dimulai pada saat Perusahaan memulai kegiatan operasional MRT Jakarta.

g. Perjanjian ITJ dengan PT Melati Anugerah Semesta (MAS)

Pada tanggal 10 Maret 2022 ITJ menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan MAS tentang Pelaksanaan Kewajiban Infrastruktur dengan nilai kontrak sebesar Rp60.272 Perjanjian ini terdiri dari pekerjaan konstruksi atas pembangunan akses pejalan kaki di Jl. Blora - Jl. Kendal, revitalisasi taman kudu, penataan stasiun karet dan revitalisasi Jl. Pati - Jl. Juana. Masa berlaku perjanjian ini selama 6 tahun dari 10 Maret 2022 atau pada saat seluruh kewajiban dilakukan BAST dengan Pemerintah DKI Jakarta sampai dengan 10 Maret 2028.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

e. Agreements related to non-farebox revenues (continued)

- 6) On May 5, 2022, the Company have signed Cooperation Agreement related to Cooling Tower & Ventilation Tower (CTVT) Advertising with PT Trimedia Imaji Rekso Abadi ("TIRA"). The agreement is effective for five years.

Based on the agreement, TIRA shall make payments of Commitment Fee amounted to Rp25,000 and annual minimum guarantee revenues amounted to Rp26,500.

f. Agreement of electricity power

On December 21, 2016, the Company signed a Purchase Agreement of Electricity Power with PT PLN (Persero) Distribution Area of Jakarta Raya to supply electricity for operational system of MRT Jakarta with the cost of installation electricity for Rp32,100. This agreement is valid as long as the Company is a customer of PT PLN (Persero). The monthly payment of the electricity begins when the Company starts MRT Jakarta operational.

g. Agreement ITJ with PT Melati Anugerah Semesta (MAS)

On March 10, 2022 ITJ signed an Agreement with MAS regarding Implementation of Infrastructure Obligation with amount Rp60,272. This agreement consisted of construction of pedestrian in Jl. Blora - Jl. Kendal, revitalization of Taman Kudu, arrangement of Karet Station and revitalization of Jl. Pati - Jl. Juana. The agreement is valid for 6 years start a period of March 10, 2022 or when Infrastructure Obligation BAST with DKI Jakarta Government until March 10, 2028.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Kebijakan manajemen risiko keuangan Grup adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Grup beroperasi dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Direksi.

Dalam pengelolaan risiko, Grup membentuk Divisi *Risk Management and Quality, Security, Safety, Health and Environment Assurance* yang bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan, kerangka kerja, pedoman penerapan manajemen risiko dan infrastruktur pengelolaan risiko, serta memastikan implementasi manajemen risiko tersebut di lingkungan Grup. Divisi *Risk Management and Quality, Security, Safety, Health and Environment Assurance* bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Risiko utama dari instrumen keuangan Grup adalah risiko likuiditas dan risiko mata uang asing dan risiko kredit. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko tersebut yang dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut:

a. Risiko mata uang asing

Risiko mata uang adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur Grup terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari utang usaha yang akan dibayarkan melalui penerusan pinjaman JICA.

Grup menanggung risiko nilai tukar mata uang asing atas transaksi dan saldo yang di denominasi dalam mata uang selain Rupiah. Mata uang yang menimbulkan risiko ini adalah terutama Yen Jepang.

Grup memonitor secara ketat fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing, sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Grup pada waktu yang tepat.

32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The financial risk management policies of the Group is made to ensure that the adequate financial resources are available for operation and business development and managing exposure to market risks (including foreign currency risk), credit risk and liquidity risk. The Group operate within defined policies approved by the Directors.

In managing those risks, the Group established a Risk Management and Quality, Security, Safety, Health and Environment Assurance Division which is responsible for the preparation of the policies, the relevant frameworks, implementation guideline and the necessary risk management infrastructure to ensure the implementation of risk management in the Group's environment. The Risk Management and Quality, Security, Safety, Health and Environment Assurance Division reports to the President Director.

The main risks arising from the Group's financial instruments are liquidity risk foreign currency risk and credit risk. The Directors review and agree policies for managing each of these risks, which are described in more details as follows:

a. Foreign currency risk

Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group's exposure to exchange rate fluctuations results primarily from accounts payables that will be settled by JICA grant.

The Group incurs foreign currency risk on the transactions and balances that are denominated in currencies other than Indonesian Rupiah. The currency giving rise to this risk is primarily Japanese Yen.

The Group closely monitors the foreign exchange rate fluctuation and market expectation so it can take necessary actions benefited most to the Group in due time

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

b. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh rekanan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual.

Semua kas di bank dan deposito berjangka ditempatkan di bank-bank yang memiliki kualitas kredit yang baik.

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mengendalikan dan mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat Grup memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan pelanggan, perjanjian yang mengikat secara hukum untuk transaksi serta jasa lainnya yang telah dilakukan dan secara historis mempunyai tingkat yang rendah untuk piutang yang bermasalah. Grup tidak memiliki konsentrasi risiko kredit.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas (juga dikenal risiko pendanaan) adalah risiko dimana Grup akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Grup untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Risiko likuiditas muncul dalam situasi Grup kesulitan memperoleh pendanaan. Kebijakan manajemen risiko likuiditas yang berhati-hati dilakukan dengan menjaga kecukupan kas dan setara kas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual serta menyesuaikan profil jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan yang penyelesaiannya tidak menggunakan dana JICA.

**32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

b. Credit risk

Credit risk refers to the risk that the Group will default on its contractual obligation resulting in financial loss to the Group.

All the cash in banks and time deposits are placed in banks with good credit ratings.

Management is confident in its ability to continue to control and to maintain minimal exposure of credit risk, since the Group has clear policies on the selection of customers, legally binding agreements in place for sales transactions and other services rendered and historically low levels of bad debts. The Group has no concentration of credit risk.

c. Liquidity risk

Liquidity risk (also known as funding risk) is a risk where the Group would be having a difficulty in obtaining funds to fulfill its commitments associated with financial instruments. Liquidity risk may rise from the incapability of the Group to sell assets immediately at prices close to its fair value.

Liquidity risk arises in situations where the Group struggles to obtain financing. Risk management policy on liquidity was conducted carefully to maintain sufficient cash and cash equivalents. The Group manages liquidity risk by monitoring cash flow forecasts and actual cash flows and adjusts the maturity profile of financial assets and liabilities that not settled by JICA fund.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel berikut ini memberikan rincian tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati sebagai berikut: (lanjutan)

	31 Desember 2022/ December 31, 2022				
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1-5 tahun/ 1-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Total/ Total	
Utang usaha	7.004	-	-	7.004	Accounts payables
Utang kontraktor	56.060	-	-	56.060	Payables to contractors
Beban akrual	299.483	-	-	299.483	Accrued expenses
Utang bank	34.186	-	-	34.186	Bank loan
Utang retensi	3.041	219.808	-	222.849	Retention payables
Liabilitas sewa	2.948	1.184	-	4.132	Lease liabilities
Uang jaminan pelanggan	-	-	20.326	20.326	Customer's security deposit
Total	402.722	220.992	20.326	644.040	Total

**32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

c. Liquidity risk (continued)

The following table details the Group remaining contractual maturity for its financial liabilities with agreed repayment as follows: (continued)

33. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan. Aset dan liabilitas keuangan Grup yang diukur dan diakui pada nilai wajar adalah piutang usaha dan uang jaminan pelanggan.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Grup untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan adalah harga permintaan (*ask price*).

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi, apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi.

33. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes. The Group's financial assets and liabilities that are measured and recognized at fair value are accounts receivable and customer's security deposit.

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. The quoted market price used for financial assets held by the Group is the current bid price, for financial liabilities is the current ask price.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on estimates, if all significant inputs required to fair value an instrument are observable.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**33. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis dan;
- Teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2022, nilai tercatat instrumen keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

34. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENGUNGKAPAN

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Grup namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Perusahaan saat ini sedang menilai dampak dari amendemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan perusahaan.

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023

Amendemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan

Amandemen ini tidak memperbolehkan entitas untuk mengurangi suatu hasil penjualan item yang diproduksi saat membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen dari biaya perolehan suatu aset tetap. Sebaliknya, entitas mengakui hasil dari penjualan item-item tersebut, dan biaya untuk memproduksi item-item tersebut, dalam laba rugi.

Amandemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dan diterapkan secara retrospektif untuk aset tetap yang tersedia untuk digunakan pada atau setelah awal dari periode sajian paling awal dimana entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut.

**33. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)**

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, specific valuation techniques are used to value financial instrument include:

- *The use of quoted market prices or dealer quotes for similar instruments and;*
- *Other techniques such as discounted cash flows analysis are used to determine fair value for the remaining financial instruments.*

On December 31, 2022, the carrying values of financial instruments presented in the consolidated statement of financial position approximate their fair values.

34. CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND DISCLOSURES

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Group's consolidated financial statements, but not yet effective are disclosed below. The Company is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Company's financial reporting.

Effective beginning on or after January 1, 2023

Amendments to PSAK 16: Fixed Assets - Proceeds before Intended Use

The amendments prohibit entities to deduct from the cost of an item of fixed assets, any proceeds from selling items produced while bringing that asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Instead, an entity recognizes the proceeds from selling such items, and the costs of producing those items, in the profit or loss.

The amendment is effective for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2023 and shall be applied retrospectively to items of property, plant and equipment made available for use on or after the beginning of the earliest period presented when the entity first applies the amendment.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

34. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENGUNGKAPAN (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 (lanjutan)

Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan Tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Amandemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:

- hal yang dimaksud sebagai hak untuk menanggguhkan pelunasan,
- hak untuk menanggguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan,
- klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan haknya untuk menanggguhkan liabilitas, dan
- hanya jika derivatif melekat pada liabilitas konversi tersebut adalah suatu instrumen ekuitas, maka syarat dan ketentuan dari suatu liabilitas konversi tidak akan berdampak pada klasifikasinya.

Amandemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dan diterapkan secara retrospektif.

Amendemen PSAK 1: Penyajian laporan keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Amandemen ini memberikan panduan dan contoh untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amandemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan' entitas dengan persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

Amandemen ini berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 dengan penerapan dini diperkenankan.

34. CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND DISCLOSURES (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2023 (continued)

Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements – Classification of a Liability as current or non-current

The amendments specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current and clarify:

- what is meant by a right to defer settlement,
- the right to defer must exist at the end of the reporting period,
- classification is not affected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right, and
- only if an embedded derivative in a convertible liability is an equity instrument would the terms and conditions of a liability will not impact its classification.

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023 and shall be applied retrospectively.

Amendment of PSAK 1: Presentation of financial statement - Disclosure of accounting policies

This amendments provides guidance and examples to help entities apply materiality judgements to accounting policy disclosures. The amendment aims to help entities provide accounting policy disclosures that are more useful by replacing the requirement for entities to disclose their 'significant' accounting policies with a requirement to disclose their 'material' accounting policies and adding guidance on how entities apply the concept of materiality in making decisions about accounting policy disclosures.

The amendments are effective on or after 1 January 2023 with earlier application permitted.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**34. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PENGUNGKAPAN (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari
2023 (lanjutan)**

Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
terkait Definisi Estimasi Akuntansi

Amandemen tersebut memperkenalkan definisi 'estimasi akuntansi' dan mengklarifikasi perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amandemen tersebut juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi.

Amandemen tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023 dan berlaku untuk perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi yang terjadi pada atau setelah awal periode tersebut. Penerapan dini diperkenankan.

Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang
Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang
Timbul Dari Transaksi Tunggal

Amandemen ini mengusulkan agar entitas mengakui aset maupun liabilitas pajak tangguhan pada saat pengakuan awalnya sebagai contoh dari transaksi sewa, untuk mengeliminasi perbedaan praktik saat ini atas transaksi tersebut dan transaksi lain yang serupa.

Amandemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dengan penerapan dini diperkenankan.

**34. CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND
DISCLOSURES (continued)**

**Effective beginning on or after January 1, 2023
(continued)**

Amendment of PSAK 25: Accounting Policies,
Changes in Accounting Estimates and Errors –
Definition of Accounting Estimates

The amendments introduces a definition of 'accounting estimates' and clarify the distinction between changes in accounting estimates and changes in accounting policies and the correction of errors. Also, they clarify how entities use measurement techniques and inputs to develop accounting estimates.

The amendments are effective on or after 1 January 2023 and apply to changes in accounting policies and changes in accounting estimates that occur on or after the start of that period. Earlier application is permitted.

Amendment of PSAK 46: Income Taxes – Deferred
Tax related to Assets and Liabilities arising from a
Single Transaction

This amendment proposes that entities recognize deferred tax assets and liabilities at the time of initial recognition, for example from a lease transaction, to eliminate differences in current practice for such transactions and similar transactions.

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023 with early adoption permitted.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

34. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENGUNGKAPAN (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024

Amandemen PSAK 1: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Amendemen ini mengklarifikasi bahwa hanya kovenan yang harus dipatuhi entitas pada atau sebelum tanggal pelaporan yang akan mempengaruhi klasifikasi liabilitas sebagai lancar atau tidak lancar.

Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 dengan penerapan dini diperkenankan.

Entitas menerapkan amandemen PSAK 1 (Oktober 2020) tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang pada periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25. Jika entitas menerapkan amandemen PSAK 1 (Oktober 2020) pada periode yang lebih awal setelah terbitnya amandemen PSAK 1 (Desember 2022) tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan, maka entitas juga menerapkan amandemen PSAK 1 (Desember 2022) pada periode tersebut. Jika entitas menerapkan amandemen PSAK 1 (Oktober 2020) untuk periode sebelumnya, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

Amandemen PSAK 73: Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik

Amandemen PSAK 73 Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

Amandemen berlaku secara retrospektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan dini diperkenankan.

34. CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND DISCLOSURES (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2024

Amendment of PSAK 1: Non-current Liabilities with Covenants

This amendment clarifies that only covenants with which entities must comply on or before the reporting date will affect a liability's classification as current or non-current.

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024 with early adoption permitted.

Entities apply retrospectively amendments to PSAK 1 (October 2020) regarding the classification of a liability as current or non-current for financial reporting starting on or after January 1, 2024 in accordance with PSAK 25. If entities apply the amendments to PSAK 1 (October 2020) in a period that earlier after the issuance of the amendment to PSAK 1 (December 2022) regarding non-current liabilities with covenants, entities also apply the amendment to PSAK 1 (December 2022) in that period. If entities apply the amendments to PSAK 1 (October 2020) for the previous period, the entity shall disclose this fact.

Amendment to PSAK 73: Lease Liability in a Sale and Leaseback

The amendment to PSAK 73 Leases specifies the requirements that a seller-lessee uses in measuring the lease liability arising in a sale and leaseback transaction, to ensure the seller-lessee does not recognise any amount of the gain or loss that relates to the right of use it retains.

The amendment applies retrospectively to annual reporting periods beginning on or after 1 January 2024. Earlier application is permitted.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

34. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENGUNGKAPAN (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025

PSAK 74: Kontrak Asuransi

Standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan, pada saat berlaku efektif PSAK 74 akan menggantikan PSAK 62: *Kontrak Asuransi*. PSAK 74 berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung dan reasuransi, terlepas dari entitas yang menerbitkannya, serta untuk jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat, serta beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan dari PSAK 74 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk asuradur.

PSAK 74 berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025, dengan mensyaratkan angka komparatif. Penerapan dini diperkenankan bila entitas juga menerapkan PSAK 71 dan PSAK 72 pada atau sebelum tanggal penerapan awal PSAK 74.

34. CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND DISCLOSURES (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2025

PSAK 74: Insurance Contracts

A comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure, upon its effective date, PSAK 74 will replace PSAK 62: Insurance Contracts. PSAK 74 applies to all types of insurance contracts, life, non-life, direct insurance and re-insurance, regardless of the entities issuing them, as well as to certain guarantees and financial instruments with discretionary participation features, while a few scope exceptions will apply. The overall objective of PSAK 74 is to provide an accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurers.

PSAK 74 is effective for reporting periods beginning on or after 1 January 2025, with comparative figures required. Early application is permitted, provided the entity also applies PSAK 71 and PSAK 72 on or before the date of initial application of PSAK 74.

35. TRANSAKSI NON KAS

35. NON-CASH TRANSACTIONS

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2022	2021	
a. Penambahan aset tetap dari:			a. Addition to fixed assets from:
Uang muka modal saham	1.325.503	486.716	Advance for share capital
Akrual kontraktor	175.790	184.434	Contractor accruals
Utang retensi	222.849	48.302	Retention payable
Utang kontraktor	56.060	41.497	Contractors payable
Uang muka	-	6.709	Advance payment
Lainnya	-	4.493	Others
b. Penambahan aset hak guna dari dari liabilitas sewa	1.559	2.008	b. Addition to right of use asset from lease liability
c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh dikreditkan ke uang muka modal saham	-	(1.433.474)	c. Addition to issued and fully paid capital credited to advance for share capital
d. Penambahan properti investasi dari reklasifikasi aset tetap	116.449	-	d. Addition to investment property from fixed assets reclassification
e. Penambahan aset takberwujud dengan mengkredit beban akrual	5.623	-	e. Addition to intangible assets by crediting accrued expenses

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
As of December 31, 2022
and for the year then ended
(Expressed in million rupiah,
Unless otherwise stated)**

**36. LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS
PENDANAAN**

**36. LIABILITIES ARISING FROM FINANCING
ACTIVITIES**

2022					
	1 Januari January 1	Arus kas/ Cash Flow	Lain-lain/ Others	31 Desember/ December 31	
Utang bank	5.300	28.886	-	34.186	Bank loan
Liabilitas sewa	5.553	(9.195)	7.773	4.131	Lease liability
Jumlah	10.853	19.691	7.773	38.317	Total
2021					
	1 Januari January 1	Arus kas/ Cash Flow	Lain-lain/ Others	31 Desember/ December 31	
Utang bank	-	5.300	-	5.300	Bank loan
Liabilitas sewa	31.088	(27.830)	2.295	5.553	Lease liability
Jumlah	31.088	(22.530)	2.295	10.853	Total

**37. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**37. COMPLETION OF THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang selesai disusun dan diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2023.

The management of the Company is responsible for the preparation of the consolidated financial statements that were completed and authorized for issued on March 21, 2023.

38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

38. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

- a. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham tanggal 7 Desember 2022, para pemegang saham telah menyetujui dan mengesahkan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan dari sebelumnya Rp17.772.643 menjadi Rp19.390.063.

- a. Based on Shareholders Resolution dated December 7, 2022, the shareholders have approved the change in the issued and fully paid capital from Rp17,772,643 to become Rp19,390,063.

Keputusan tersebut telah diaktakan berdasarkan Akta Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, No. 1 tanggal 3 Januari 2023.

This decision has been notarized based on the Notary Deed of Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, No. 1 dated January 3, 2023.

- b. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham tanggal di luar Rapat Umum Pemegang Saham sirkuler tanggal 13 Maret 2023, para pemegang saham telah menyetujui pengangkatan Sdri. Weni Maulina sebagai Direktur Konstruksi menggantikan Sdri. Silvia Halim.

- b. Based on Shareholders Circular Resolution dated March 13, 2023, the shareholders approved the appointment of Ms. Weni Maulina as Construction Director replacing Ms. Silvia Halim.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

Informasi berikut adalah laporan keuangan Entitas Induk PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda), yang merupakan informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda) dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

The following information is the separate financial statement of PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda), a Parent Entity, which is presented as supplementary information to the consolidated financial statements of PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda) and its subsidiary as of December 31, 2022 and for the year then ended.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
PARENT ENTITY
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2022
(Expressed in million rupiah,
unless otherwise stated)**

	31 Desember 2022/ December 31, 2022
ASET	
ASET LANCAR	
Kas dan setara kas	1.829.150
Piutang usaha - neto	
Pihak berelasi	107.609
Pihak ketiga	290.883
Piutang subsidi	223.312
Piutang lain-lain	146
Pendapatan yang akan diterima	8.750
Piutang sewa	10.984
Persediaan	29.454
Dana dibatasi penggunaannya	143.685
Pajak dibayar dimuka	-
Aset lancar lainnya	12.330
Total aset lancar	2.656.303
ASET TIDAK LANCAR	
Uang muka kontraktor dan konsultan	2.545.685
Aset tetap - neto	17.419.104
Piutang usaha - neto	
Pihak berelasi	-
Pihak ketiga	-
Piutang sewa	3.333
Aset hak guna - neto	6.031
Aset takberwujud - neto	45.750
Investasi pada entitas anak, asosiasi dan ventura bersama	26.381
Properti investasi	116.449
Uang jaminan	20.489
Taksiran tagihan pajak penghasilan	16.383
Aset pajak tangguhan - neto	-
Total aset tidak lancar	20.199.605
TOTAL ASET	22.855.908

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
ASSETS		
CURRENT ASSETS		
Cash and cash equivalents	1.352.067	
Account receivables - net		
Related parties	32.462	
Third parties	22.495	
Subsidy receivables	375.507	
Other receivables	181	
Accrued revenues	1.070	
Lease receivables	-	
Inventories	14.181	
Restricted fund	59.580	
Prepaid Tax	2.162	
Other current assets	7.510	
Total current assets	1.867.215	
NON-CURRENT ASSETS		
Contractors' and consultants' advances	1.397.650	
Fixed assets - net	16.256.408	
Account receivables - net		
Related party	36.934	
Third party	191.481	
Lease receivables	-	
Right of use assets - net	21.297	
Intangible assets - net	12.586	
Investment in subsidiary, associate and joint venture	33.724	
Investment property	-	
Guarantee deposits	20.489	
Estimated claim for tax refund	15.691	
Deferred tax assets - net	6.464	
Total non-current assets	17.992.724	
TOTAL ASSETS	19.859.939	

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/ SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
PARENT ENTITY
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2022
(Expressed in million rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	4.691	1.797	Account payables
Utang lain-lain	1.651	-	Other payables
Utang kontraktor	56.060	56.142	Payables to contractors
Beban akrual	328.110	278.602	Accrued expenses
Pendapatan diterima dimuka	107.783	142.462	Unearned revenues
Utang pajak	14.673	11.849	Taxes payable
Utang retensi	3.041	11.465	Retention payables
Liabilitas imbalan kerja karyawan	3.248	-	Liability for employee benefits
Liabilitas sewa	1.203	3.349	Lease liability
Total liabilitas jangka pendek	520.460	505.666	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG			NON-CURRENT LIABILITIES
Utang retensi	219.808	72.680	Retention payables
Liabilitas sewa	2.565	1.690	Lease Liability
Pendapatan diterima dimuka	128.968	131.120	Unearned revenue
Uang jaminan pelanggan	20.213	15.770	Customer's security deposit
Liabilitas imbalan kerja karyawan	50.612	50.946	Liability for employee benefits
Liabilitas pajak tangguhan	60.673	-	Deferred tax liabilities
Total liabilitas jangka panjang	482.839	272.206	Total non-current liabilities
TOTAL LIABILITAS	1.003.299	777.872	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS			EQUITY
Modal saham - nilai nominal			Share capital - par value of
Rp1.000.000 per saham			Rp1,000,000 per share
Modal dasar - 40.757.353			Authorized - 40,757,353
saham			shares
Modal ditempatkan dan disetor			Issued and fully paid -
penuh - 17.772.643 saham			17,772,643 shares
pada tahun 2022 dan 2021	17.772.643	17.772.643	in 2022 and 2021
Uang muka modal saham	4.286.917	1.617.420	Advance for share capital
Defisit	(206.951)	(307.996)	Deficit
Ekuitas neto	21.852.609	19.082.067	Net Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	22.855.908	19.859.939	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/ SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA) ENTITAS INDUK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (Disajikan dalam jutaan rupiah, Kecuali dinyatakan lain)		PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA) PARENT ENTITY STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME For the year ended December 31, 2022 (Expressed in million rupiah, unless otherwise stated)	
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31,			
	2022	2021	
PENDAPATAN	1.442.230	1.338.417	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(1.032.942)	(983.304)	COST OF REVENUES
LABA KOTOR	409.488	355.113	GROSS PROFIT
Beban umum dan administrasi	(263.572)	(206.916)	General and administrative expenses
LABA USAHA	145.916	148.197	OPERATING PROFIT
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			OTHER INCOME (EXPENSE)
Penghasilan bunga	41.920	40.620	Interest income
Laba selisih kurs - neto	20.015	3.432	Gain on foreign exchange - net
Penghasilan (beban) keuangan - neto	(35.998)	(15.595)	Finance Income (expense) - net
Bagian kerugian entitas anak dan ventura bersama	(12.467)	(11.175)	Share of loss of subsidiary and joint venture
Lain-lain - neto	30.195	16.440	Other - net
Penghasilan lain-lain - neto	43.665	33.722	Other income - net
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN	189.581	181.919	PROFIT BEFORE FINAL TAX EXPENSE AND INCOME TAX EXPENSE
Beban pajak final	(9.712)	(10.364)	Final tax expense
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	179.869	171.555	PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(71.075)	(65.864)	INCOME TAX EXPENSES
LABA TAHUN BERJALAN	108.794	105.691	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Laba (rugi) pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja - neto dari pajak	(7.749)	166	Remeasurement gain (loss) on employee benefits liability - net of tax
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	101.045	105.857	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/ SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
ENTITAS INDUK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
PARENT ENTITY
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the year ended December 31, 2022
(Expressed in million rupiah,
unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid share capital	Modal disetor lainnya/ Other paid-up capital	Defisit/ Deficit	Ekuitas neto/ Net equity	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	16.339.169	1.433.474	(413.853)	17.358.790	Balance as of December 31, 2020
Uang muka modal saham	-	1.617.420	-	1.617.420	Advance for share capital
Reklasifikasi atas modal disetor lainnya	1.433.474	(1.433.474)	-	-	Reclassification of other paid-up capital
Laba tahun berjalan	-	-	105.691	105.691	Income for the year
Penghasilan komprehensif lain - neto	-	-	166	166	Other comprehensive income - net
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	17.772.643	1.617.420	(307.996)	19.082.067	Balance as of December 31, 2021
Uang muka modal saham	-	2.669.497	-	2.669.497	Advance for share capital
Laba tahun berjalan	-	-	108.794	108.794	Income for the year
Penghasilan komprehensif lain - neto	-	-	(7.749)	(7.749)	Other comprehensive income - net
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	17.772.643	4.286.917	(206.951)	21.852.609	Balance as of December 31, 2022

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/ SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA) ENTITAS INDUK LAPORAN ARUS KAS Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)		PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA) PARENT ENTITY STATEMENT OF CASH FLOW For the year ended December 31, 2022 (Expressed in million rupiah, unless otherwise stated)	
		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31	
		2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari subsidi	953.537	529.591	Receipts from subsidy
Penerimaan dari pelanggan	454.778	396.629	Receipts from customers
Penerimaan penghasilan bunga	33.536	32.496	Receipts from interest income
Pembayaran kepada pemasok	(531.525)	(461.181)	Payment to vendors
Pembayaran kepada komisaris, direksi dan karyawan	(267.816)	(214.312)	Payments to commissioners, directors and employees
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	642.510	283.223	Net cash received from operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penambahan aset tetap	(45.494)	(64.101)	Additions to fixed assets
Penambahan aset takberwujud	(24.181)	(2.774)	Additions to intangible assets
Penambahan investasi pada entitas anak, asosiasi dan ventura bersama	(5.100)	(1.000)	Additions to investment in subsidiary, associate and joint venture
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(74.775)	(67.875)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITY
Penambahan dana dibatasi penggunaannya	(84.105)	(56.862)	Increase in restricted fund
Pembayaran liabilitas sewa	(6.547)	(27.543)	Payment of rent liabilities
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	(90.652)	(84.405)	Net cash received from financing activity
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	477.083	130.943	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.352.067	1.221.124	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1.829.150	1.352.067	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/ SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
ENTITAS INDUK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN**

a. Dasar penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk

Laporan keuangan tersendiri Entitas Induk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 4, "Laporan Keuangan Tersendiri".

PSAK 4 (Revisi 2013) mengatur dalam hal entitas memilih untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh Entitas Induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama berdasarkan biaya perolehan atau sesuai dengan PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

Amandemen PSAK 4 (2015) memperkenalkan penggunaan metode ekuitas sebagai salah satu metode pencatatan investasi Entitas Induk pada entitas anak, ventura bersama dan entitas asosiasi dalam Laporan Keuangan Tersendiri entitas tersebut.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
PARENT ENTITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022 and
for the year ended December 31, 2022
(Expressed in million rupiah,
unless otherwise stated)**

1. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of preparation of the separate financial statements of the parent entity

The separate financial statements of the Parent Entity are prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 4, "Separate Financial Statements".

PSAK 4 (Revised 2013) regulates that when an entity elected to present the separate financial statements, such financial statements should be presented as supplementary information to the consolidated financial statements. Separate financial statement are those presented by a Parent Entity, in which the investments in subsidiaries and associates are accounted for at cost or in accordance with PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement".

Amendment to PSAK 4 (2015) allows the use of equity method as a method of recording the investments in subsidiaries, joint ventures and associates in the Separate Financial Statements of the entity.

Accounting policies adopted in the preparation of the parent entity separate financial statements are the same as the accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements.

Kriteria Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUKGI)

Criteria of the Indonesian General Corporate Governance Guidelines (PUGKI)

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Penerapan di MRT Jakarta Implementation in MRT Jakarta
1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners		
1.1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi Roles and Responsibilities of the Board of Directors		
Rekomendasi Recommendation			
1.1.1	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: - berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; - beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; - berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta - berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (corporate resilience). To achieve sustainable value creation, the Board of Directors carries out its leadership role and seeks to achieve the following governance outcomes: - competitive and focused on long-term performance; - ethical and responsible in conducting business; - contribute positively to society and the environment; as well as - ability to survive and grow (corporate resilience).	Apply	MRT Jakarta memiliki sasaran strategi yang bertujuan untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan. Dalam hal ini dijelaskan bahwa Direksi menjalankan perannya melalui: - Berdaya saing <i>People Agenda</i> (Meningkatkan kapabilitas SDM dan kualitas untuk mendukung tercapainya tiga poros Perseroan) <i>KM & Innovation Agenda</i> Mendukung peningkatan kapabilitas riset, <i>knowledge creation</i> dan budaya lesson learning di internal organisasi. - Beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis. MRT Jakarta senantiasa mengedepankan kejujuran, respect, memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Hal ini dibuktikan dengan pendandatanganan <i>Code of Conduct</i> setiap tahun oleh seluruh Insan Perseroan. Pada Tahun 2022, Perseroan menerapkan <i>zero fraud</i>. - Berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini dilaksanakan melalui program CSR Perusahaan terhadap lingkungan hidup, pelanggan, pengembangan sosial masyarakat, ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Hal ini dibuktikan dengan revitalisasi ruang terbuka hijau di dalam Taman Literasi Martha Tiahahu, Blok M. Selain itu, Perseroan memberikan kemudahan di sekitar kawasan MRT Jakarta dengan pembangunan alaspadu dan rumapadu. - Berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh. MRT Jakarta bertahan dengan menjaga <i>zero layoff</i> dan terus mendorong inovasi dalam bisnis dengan mengembangkan jalur dan kinerja konstruksinya, serta menambah lini bisnis baru seperti jasa pelatihan dan konsultasi baik dalam level nasional dan internasional.



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Penerapan di MRT Jakarta Implementation in MRT Jakarta
			MRT Jakarta has strategic objectives that aim to achieve sustainable value creation. In this case it is explained that the Board of Directors carries out its role through: - Competitive - People Agenda (Improving HR capability and quality to support the achievement of the Company's three axes) - KM & Innovation Agenda Supporting the improvement of research capability, knowledge creation and lesson learning culture within the internal organization. - Be ethical and responsible in running the business. MRT Jakarta always prioritizes honesty, respect, fulfilling commitment, building and maintaining moral values and trust consistently. This is proven by the signing of the Code of Conduct every year by all Company personnel. In 2022, the Company implements zero fraud. - Make a positive contribution to society and the environment This is implemented through the Company's CSR programs for the environment, customers, community social development, employment, health and work safety. This is proven by the revitalization of green open spaces in the Martha Tiahahu Literacy Park, Blok M. In addition, the Company has provided facilities around the Jakarta MRT area with the construction of mats and rumapadu. - Ability to survive and grow. MRT Jakarta survives by maintaining zero layoff and continues to encourage innovation in business by developing its track and construction performance, as well as adding new business lines such as training and consulting services at both the national and international levels.
1.1.2	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. The Board of Directors must ensure that the corporate mission, vision, goals, objectives, strategies and annual and mid-term plans are consistent with long-term goals, by making effective use of innovation and technology.	Apply	Direksi telah mengambil sejumlah kebijakan strategis yang sejalan dengan rencana bisnis perusahaan dan rencana jangka panjang perusahaan. Direksi memastikan bahwa visi Perusahaan yaitu Menjadi penyedia sarana transportasi publik terdepan, yang berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas, pengurangan kemacetan, dan pengembangan sistem transit perkotaan konsisten dengan tujuan jangka panjang Perseroan yang memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. IT Masterplan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam RJPP. The Board of Directors has taken a number of strategic policies that are in line with the company's business plan and the company's long-term plans. The Board of Directors ensures that the Company's vision, namely To become a leading provider of public transportation facilities, is committed to driving economic growth through increasing mobility, reducing congestion, and developing urban transit systems, consistent with the Company's long-term goal of making effective use of innovation and technology. The IT Masterplan is an integral part of the RJPP.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Penerapan di MRT Jakarta Implementation in MRT Jakarta
1.1.3	Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. The Board of Directors ensures that the corporation implements an appropriate and effective risk management and internal control system that is aligned with the corporate vision, mission, goals, objectives and strategies and complies with applicable laws and regulations and standards.	Apply	Direksi telah memastikan penerapan manajemen risiko melalui proses bisnis manajemen risiko yang di dalamnya terdapat matriks pengukuran manajemen risiko, pemantauan <i>top risk</i> setiap bulan dengan Dewan Komisaris, serta meningkatkan budaya risiko. Selain itu sistem pengendalian internal ditetapkan melalui Peraturan Direksi No.PER/023-1/BOD-MRT/IX/2021 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda). The Board of Directors has ensured the implementation of risk management through the risk management business process which there is a risk management measurement matrix, monitoring top risks every month with the Board of Commissioners, as well as enhancing the risk culture. In addition, the internal control system is stipulated through Board of Directors' Decree No.PER/023-1/BOD-MRT/IX/2021 concerning Guidelines for Internal Control Systems within PT MRT Jakarta (Perseroda).
1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. The Board of Directors ensures the integrity of the corporate accounting and financial reporting system and the timely and accurate disclosure of all material information about the corporation.	Apply	Direksi melalui Divisi Internal Audit telah melaksanakan asurans pada kegiatan pengelolaan keuangan berupa evaluasi Laporan Keuangan Interim dan pelaksanaan reviu atas penyusunan RKAP tahun 2023. Laporan Keuangan Tahunan juga di audit oleh Pihak Ketiga dan disahkan dalam RUPS Tahunan. The Board of Directors through the Internal Audit Division has carried out assurance on financial management activities in the form of evaluating the Interim Financial Report and implementing a review of the 2023 RKAP preparation. The Annual Financial Report is also audited by a Third Party and ratified at the Annual GMS.
1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. The Board of Directors ensures that sustainability reporting has been prepared properly.	Apply	Direksi telah memastikan pelaporan keberlanjutan (<i>sustainability report</i>) telah disusun sesuai dengan indikator yang ada di POJK dan GRI. The Board of Directors has ensured that a sustainability report has been prepared in accordance with the indicators in the POJK and GRI.
1.1.6	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi. The Board of Directors builds a framework for corporate information technology (IT) governance that is aligned with corporate business needs and priorities, drives business opportunities and performance, strengthens risk management, and supports corporate goals and strategies.	Apply	MRT Jakarta telah memperbaharui <i>IT Masterplan</i> yang selaras dengan strategi Korporasi, serta terus mengembangkan knowledge management dalam <i>platform Knowledge, Information, and Education Center</i> (Kinetic) sebagai <i>platform internal</i> yang dapat digunakan oleh Insan MRT Jakarta untuk mengelola pengetahuan sekaligus sebagai intranet portal menuju berbagai aplikasi digital internal. MRT Jakarta juga telah menerapkan pendekatan konstruksi digital (<i>digital construction</i>), dengan mekanisme <i>common data environment</i> (CDE) untuk pengembangan MRT Jakarta Fase 2. MRT Jakarta has updated its IT Masterplan in line with the Corporate strategy, and continues to develop knowledge management in the Knowledge, Information, and Education Center (Kinetic) platform as an internal platform that can be used by MRT Jakarta personnel to manage knowledge as well as an intranet portal to various internal digital applications. MRT Jakarta has also implemented a digital construction approach, with a common data environment (CDE) mechanism for the development of MRT Jakarta Phase 2.
1.1.7	Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. For the corporate that carry out business activities based on Sharia principles, the Board of Directors needs to ensure the authority and availability of adequate supporting tools so that the Sharia Supervisory Board can carry out its role effectively	Explain	Tidak relevan Not relevant
1.1.8	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi. The Board of Directors' Charter is periodically reviewed. The Charter includes, among other things, the division of roles for the Directors individually which can be regulated in the Board of Directors Charter or by a decision letter of the Board of Directors.	Apply	MRT Jakarta juga telah menyusun Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi atau Board Manual, yang ditetapkan Perseroan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT MRT Jakarta (Perseroda) No. SK/010/BOC-MRT/XII/2020, dan No. SK/066/BOD-MRT/XII/2020, tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (<i>Board Manual</i>). MRT Jakarta has also prepared the Guidelines for the Board of Commissioners and Directors or the Board Manual, which was stipulated by the Company through Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT MRT Jakarta (Perseroda) No. SK/010/BOC-MRT/XII/2020, and No. SK/066/BOD-MRT/XII/2020, regarding Work Guidelines for the Board of Commissioners and Directors (Board Manual).



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Penerapan di MRT Jakarta Implementation in MRT Jakarta
1.1.9	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of a member of the Board of Directors if they are involved in a financial crime and proven conducting a mistake.	Apply	MRT Jakarta memiliki kebijakan terkait ketentuan pengakhiran masa jabatan Direksi apabila terlibat dan terbukti dalam kejahatan keuangan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT MRT Jakarta (Perseroda) No. SK/010/BOC-MRT/XII/2020, dan No. SK/066/BOD-MRT/XII/2020, tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (<i>Board Manual</i>). MRT Jakarta has a policy regarding provisions for terminating the term of office of the Directors if they are involved and proven to be involved in a financial crime through the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT MRT Jakarta (Perseroda) No. SK/010/BOC-MRT/XII/2020, and No. SK/066/BOD-MRT/XII/2020, regarding Work Guidelines for the Board of Commissioners and Directors (<i>Board Manual</i>).
1.2	Penilaian Kinerja - Direksi dan Anggotanya Performance Appraisal - Board of Directors and Members		
Rekomendasi Recommendation			
1.2.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu direktur. The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively and independently to determine the effectiveness of the Board of Directors and each individual director.	Explain	Dewan Komisaris melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Direksi setiap bulan berdasarkan kontrak kinerja tahunan, namun belum melakukan evaluasi formal tahunan terhadap masing-masing anggota Direksi. The Board of Commissioners monitors and evaluates the performance of the Directors every month based on an annual performance contract, but has not conducted an annual formal evaluation for each member of the Board of Directors.
1.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. The Board of Commissioners, with the consideration of the Nomination and Remuneration Committee, is responsible for determining performance evaluation criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.	Explain	Dewan Komisaris melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Direksi setiap bulan dengan pertimbangan Komite Dewan Komisaris. The Board of Commissioners monitors and evaluates the performance of the Board of Directors every month with the consideration of the Board of Commissioners' Committees.
1.3	Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners		
Rekomendasi Recommendation			
1.3.1	Dewan Komisaris mereview strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereview, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi. The Board of Commissioners reviews the corporate strategy at least annually and approves the corporate mission, vision and strategy formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also reviews, provides advice and approves business plans and long-term financial plans and corporate short-term financial plans. The Board of Commissioners provides advice and monitors the Directors on the management of its implementation. The Board of Directors and Board of Commissioners are involved in decisions that are very important for the corporation, regulated in the articles of association of the corporation.	Apply	Melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan Direksi setiap bulannya dengan melakukan <i>monitoring</i> , pengawasan, dan pemberian masukan/umpan balik kepada manajemen, khususnya dalam pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> di Perusahaan. Dewan Komisaris menyetujui rencana bisnis dan RKA yang diajukan oleh Direksi, dan disahkan oleh Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan. Carry out meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors every month by monitoring, supervising and providing input/feedback to management, especially in the implementation of Good Corporate Governance in the Company. The Board of Commissioners approves the business plan and RKA submitted by the Board of Directors, and approved by the Shareholders through the Annual GMS.
1.3.2	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan Types of decisions that require the approval of the Board of Commissioners must be disclosed in the annual report	Explain	Perseroan memiliki kebijakan terkait Keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris yang tertuang di dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT MRT Jakarta (Perseroda) No. SK/010/BOC-MRT/XII/2020, dan No. SK/066/BOD-MRT/XII/2020, tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (<i>Board Manual</i>). Namun tidak diungkapkan secara lengkap di dalam laporan tahunan. The company has a policy regarding decisions that require the approval of the Board of Commissioners which is contained in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT MRT Jakarta (Perseroda) No. SK/010/BOC-MRT/XII/2020, and No. SK/066/BOD-MRT/XII/2020, regarding Work Guidelines for the Board of Commissioners and Directors (<i>Board Manual</i>). However, it is not fully disclosed in the annual report.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Penerapan di MRT Jakarta Implementation in MRT Jakarta
1.3.3	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan. Considering the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners proposes to, and to be decided by, the GMS the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. In proposing the above matters, the Board of Commissioners pays attention to diversity, non-discriminatory elements and provides equal opportunities regardless of ethnicity, religion, race, class and gender. The Board of Commissioners ensures that the process of nominating and selecting members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners is formal and transparent	Explain	Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Direksi mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi kepada Pemegang Saham. Perseroan memastikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender dalam pemilihan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. The Board of Commissioners based on the recommendation of the Board of Directors proposes the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors to the Shareholders. The Company ensures diversity, non-discriminatory elements and provides equal opportunities regardless of ethnicity, religion, race, class and gender in selecting members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
1.3.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. The Board of Commissioners or the Committee that carries out the nomination function formulates a succession policy in the process of nominating members of the Board of Directors. Every year, the Board of Commissioners review the report on the implementation of the development and succession plan submitted by the President Director.	Explain	Perseroan memiliki Peraturan Direksi tentang kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi yang disusun dengan melibatkan Komite yang menjalankan fungsi nominasi. The Company has a Board of Directors' Decree regarding the succession policy in the process of nominating members of the Board of Directors which is prepared by involving the Committee that carries out the nomination function.
1.3.5	Dewan Komisaris - mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; - secara berkala merevisi sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. Board of Commissioners - submit to the GMS, which may be preceded by a recommendation from the Committee that carries out the remuneration function, the amount of remuneration for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners in line with sustainable corporate development and the long-term interests of the corporation and shareholders; - periodically reviewing the remuneration system for the Board of Directors and the Board of Commissioners.	Apply	- Perseroan memiliki Mekanisme remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi. Hal ini sesuai dengan Pergub DKI Jakarta No. 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas, dan Dewan Komisaris BUMD. - Dewan Komisaris secara berkala merevisi sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan kajian oleh pihak independen dan menyampaikannya kepada Pemegang Saham. - The Company has a remuneration mechanism for members of the Board of Commissioners and Board of Directors which is determined by the GMS based on the recommendation of the Committee that carries out the remuneration function. This is in accordance with DKI Jakarta Governor Regulation No. 79 of 2019 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Supervisory Board and Board of Commissioners of BUMD. - The Board of Commissioners periodically reviews the remuneration system for the Board of Directors and Board of Commissioners based on reviews by independent parties and submits it to Shareholders.
1.3.6	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan. The Board of Commissioners supervises the effectiveness of corporate governance policies and their implementation and proposes changes if necessary.	Apply	Dewan Komisaris senantiasa mengawasi struktur, proses, dan hasil governansi korporat serta mengusulkan perbaikannya. The Board of Commissioners constantly monitors the structure, processes and results of corporate governance and proposes improvements.
1.3.7	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. The Board of Commissioners monitors and directs corporations to implement appropriate and effective risk management and internal control systems that are aligned with corporate goals, objectives and strategies and comply with laws and regulations, codes of conduct and applicable standards.	Apply	Dewan Komisaris memiliki tugas yang berkaitan dengan Pengawasan Manajemen Risiko dan Internal Audit, serta senantiasa menjalankan tugas tersebut untuk memastikan agar penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. The Board of Commissioners has duties related to Risk Management Supervision and Internal Audit, and always carries out these duties to ensure that the implementation of risk management and internal control systems is appropriate and effective in line with corporate goals, objectives and strategies and complies with laws and regulations, codes applicable conduct and standards.



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Penerapan di MRT Jakarta Implementation in MRT Jakarta
1.3.8	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal. The Board of Commissioners supervises and directs the integrity of the corporate accounting and financial reporting system, as well as the independence of the internal and external audit functions.	Apply	Berdasarkan keputusan RUPS, Dewan Komisaris diberikan kewenangan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kegiatan audit internal dan eksternal namun tidak mengintervensi proses dan hasil audit. Based on the resolutions of the GMS, the Board of Commissioners is granted the authority to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements. The Board of Commissioners supervises internal and external audit activities but does not intervene in audit processes and results.
1.3.9	Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. The Board of Commissioners monitors, reviews and approves the annual report and corporate sustainability report and ensures the integrity, as well as oversees the corporate disclosure and communication process.	Apply	Dewan Komisaris memiliki tugas yang terkait dengan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan. Dalam implementasinya, Dewan Komisaris memastikan integritas laporan dengan mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan serta menyetujuinya. The Board of Commissioners has duties related to the Annual Report and Sustainability Report. In its implementation, the Board of Commissioners ensures the integrity of reports by overseeing the process of disclosure and communication of the Annual Report and Sustainability Report and approves them.
1.3.10	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. The charter of the Board of Commissioners is periodically reviewed.	Apply	MRT Jakarta menyusun Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi atau Board Manual, yang ditetapkan Perseroan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT MRT Jakarta (Perseroda) No. SK/010/BOC-MRT/XII/2020, dan No.SK/066/BOD-MRT/XII/2020, tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual). Pedoman ini senantiasa ditinjau dan dimutakhirkan sekurang-kurangnya 3 tahun sekali. MRT Jakarta compiles the Guidelines for the Board of Commissioners and Directors or the Board Manual, determined by the Company through the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT MRT Jakarta (Perseroda) No. SK/010/BOC-MRT/XII/2020, and No.SK/066/BOD-MRT/XII/2020, concerning Work Guidelines for the Board of Commissioners and Directors (Board Manual). These guidelines are constantly reviewed and updated at least once every 3 years.
1.3.11	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes and are proven to have made a mistake.	Apply	MRT Jakarta memiliki kebijakan terkait ketentuan pengakhiran masa jabatan Dewan Komisaris apabila terlibat dan terbukti dalam kejahatan keuangan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT MRT Jakarta (Perseroda) No. SK/010/BOC-MRT/XII/2020, dan No. SK/066/BOD-MRT/XII/2020, tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual). MRT Jakarta has a policy regarding provisions for terminating the term of office of the Board of Commissioners if it is involved and proven to be involved in a financial crime through the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT MRT Jakarta (Perseroda) No. SK/010/BOC-MRT/XII/2020, and No. SK/066/BOD-MRT/XII/2020, regarding Work Guidelines for the Board of Commissioners and Directors (Board Manual).
1.3.12	Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. Independent commissioners are expected to be able to contribute to honest, objective, active and constructive discussions at the meetings of the Board of Commissioners.	Explain	Perseroan tidak memiliki Komisaris Independen The company does not have an Independent Commissioner
1.3.13	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. The President Commissioner acts as the coordinator of the Board of Commissioners and ensures its effectiveness. The President Commissioner promotes a culture of openness and constructive dialogue that allows a variety of views to be expressed, including coordinating the setting of appropriate board meeting agendas and ensuring sufficient time is available to discuss all agenda items. In addition, there should also be an opportunity for the Board of Commissioners to meet with the Board of Directors and senior management.	Apply	MRT Jakarta berdasarkan SK Nomor 008/BOC-MRT/XI/2022 pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris Perseroan di tahun 2022, Komisaris Utama memiliki tugas sebagai koordinator seluruh bidang penugasan pengawasan Dewan Komisaris. MRT Jakarta based on Decree Number 008/BOC-MRT/XI/2022 on the division of duties and responsibilities of members of the Company's Board of Commissioners in 2022, President Commissioner has the task of coordinating all areas of assignment of supervision of the Board of Commissioners.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Penerapan di MRT Jakarta Implementation in MRT Jakarta
1.4	Pembentukan Komite Committee Formation		
Rekomendasi Recommendation			
1.4.1	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. The Corporate have the committees under the Board of Commissioners consisting of at least: Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Risk Management Monitoring Committee.	Apply	Dewan Komisaris memiliki organ penunjang yang terdiri dari Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan serta Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti. The Board of Commissioners has supporting organs consisting of the Secretary to the Board of Commissioners, the Audit Committee, the Human Resources and Operations Committee and the Risk Monitoring and Security Committee.
1.4.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen. The Board of Commissioners ensures that all members of the Audit Committee are independent and the majority of other committees formed by the Board of Commissioners are independent parties, and all committee members are competent, committed and have sufficient authority to carry out their roles effectively and independently.	Apply	Persyaratan dan kualifikasi anggota Komite Audit serta Komite Dewan Komisaris Perseroan lainnya harus memenuhi persyaratan kompetensi dan independensi sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 001 Tahun 2022, tanggal 16 Juni 2022, Piagam Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 002 Tahun 2022, tanggal 17 Juni 2022, dan Piagam Komite SDM dan Pengusahaan ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 003 Tahun 2022, tanggal 17 Juni 2022. Seluruh Ketua Komite adalah Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen dan seluruh Anggota Komite dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau di luar Perseroan. Requirements and qualifications for members of the Audit Committee and other Committees of the Company's Board of Commissioners must meet the competency and independence requirements as stipulated in the Audit Committee Charter stipulated by Decree of the Board of Commissioners No. 001 of 2022, dated 16 June 2022, the Risk Monitoring and Security Committee Charter was stipulated by Decree of the Board of Commissioners No. 002 of 2022, June 17, 2022, and the Human Resources and Business Committee Charter was stipulated by Decree of the Board of Commissioners No. 003 of 2022, June 17, 2022. All Committee Chairs are Members of the Board of Commissioners who can act independently and all Committee Members can come from members of the Board of Commissioners or outside the Company.



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Penerapan di MRT Jakarta Implementation in MRT Jakarta
1.4.3	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan To ensure the monitoring of implementation on the duties of the Audit Committee is carried out objectively and independently, the President Commissioner may not become the chairman of the Audit Committee, except in extraordinary circumstances which must be explained in the annual report.	Apply	Anggota Komite Audit Perseroan diwajibkan memenuhi kriteria independensi, sebagai berikut: 1. Bukan pegawai Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris; 2. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan Perseroan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris; 3. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan usaha Perseroan termasuk di dalamnya tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan entitas anak selain imbalan jasa yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas sebagai anggota Komite Audit; 4. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal, dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan. Members of the Company's Audit Committee are required to meet the independence criteria, as follows: 1. Not an employee of a Public Accountant Office, Legal Consulting Firm, or other party providing audit services, non-audit services and/or other consulting services to the Company within the last six months before being appointed by the Board of Commissioners; 2. Not a person who has the authority and responsibility to plan, lead, or control the Company within the last six months before being appointed by the Board of Commissioners, except for members of the Audit Committee who come from the Board of Commissioners; 3. Does not have a business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business including not receiving compensation from the Company and its subsidiaries other than compensation for services received in connection with the duties as a member of the Audit Committee; 4. Has no family relationship on marriage and heredity to the second degree, both horizontally and vertically, with the Board of Commissioners, Directors, or Major/Controlling Shareholders of the Company.
1.5	Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya Performance Appraisal - Board of Commissioners and Members		
Rekomendasi Recommendation			
1.5.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitennya, dan setiap individu komisaris. The Board of Commissioners conducts an annual formal objective evaluation to determine the effectiveness of the Board, its committees and each individual commissioner.	Explain	Dewan Komisaris melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara kolegial, komitennya, dan setiap anggota Dewan Komisaris, namun belum melakukan evaluasi formal tahunan. The Board of Commissioners monitors and evaluates the collegial performance of the Board of Commissioners, its committees, and each member of the Board of Commissioners, but has not conducted an annual formal evaluation.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Penerapan di MRT Jakarta Implementation in MRT Jakarta
1.6	Benturan Kepentingan Conflict of Interest		
Rekomendasi Recommendation			
1.6.1	Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan. Members of the Board of Directors who have concurrent positions outside the corporation must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner notifies the Board of Commissioners and the chairman of the committee carrying out the nomination function, before accepting a new appointment as a director or commissioner of a publicly listed corporation, other directorships or other positions with significant time commitments.	Apply	Direksi dapat mempunyai rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan, sedangkan Dewan Komisaris dapat mempunyai rangkap jabatan selain jabatan Direksi dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT MRT Jakarta (Perseroda) No. SK/010/BOC-MRT/XII/2020, dan No. SK/066/BOD-MRT/XII/2020, tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (<i>Board Manual</i>). The Board of Directors may have concurrent positions as members of the Board of Commissioners of Subsidiaries and/or Joint Ventures, while the Board of Commissioners may have concurrent positions other than the position of the Board of Directors and other positions which may cause a conflict of interest in accordance with the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT MRT Jakarta (Perseroda) No. SK/010/BOC-MRT/XII/2020, and No. SK/066/BOD-MRT/XII/2020, regarding Work Guidelines for the Board of Commissioners and Directors (<i>Board Manual</i>).
1.6.2	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan. The Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest for management, members of the Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders, including misuse of corporate assets and misuse in related party transactions. Commissioners who have conflicts of interest do not participate in monitoring and making decisions on potential conflicts of interest involving the Commissioners or affiliates of the Commissioners concerned.	Explain	Dewan Komisaris dan Direksi menandatangani surat pernyataan tidak memiliki Benturan Kepentingan setiap tahunnya. Perseroan memiliki kebijakan Benturan Kepentingan sebagaimana disahkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 13 Tahun 2020 dan No. 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Benturan Kepentingan, dimana mengatur apabila anggota Komisaris memiliki potensi dan/atau benturan kepentingan, maka wajib menarik diri dari proses pengambilan keputusan. Perseroan menindak tegas bagi yang terbukti melakukan tindakan benturan kepentingan. The Board of Commissioners and the Board of Directors sign a statement that they do not have a Conflict of Interest every year. The Company has a Conflict of Interest policy as approved through the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors No. 13 of 2020 and No. 71 of 2020 concerning Guidelines for Conflicts of Interest, which stipulates that if a member of the Board of Commissioners has a potential and/or conflict of interest, he must withdraw from the decision-making process. The company takes firm action against those who are proven to have committed a conflict of interest.
1.7	Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Competency Improvement of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners		
Rekomendasi Recommendation			
1.7.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan. The Board of Commissioners ensures that members of the Board of Directors and the Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, characteristics and operations of the corporation, relevant laws and regulations and other applicable standards and obligations. The Board of Directors through the corporate secretary supports all members of the Board of Directors and Board of Commissioners in updating and refreshing their skills and knowledge necessary to carry out their roles on the Board.	Apply	Perseroan memiliki kebijakan memberikan induksi atau program pengenalan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru menjabat. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi atau <i>Board Manual</i>. Sekretaris Perusahaan bersama dengan Divisi Human Capital menyusun program pelatihan dan pengembangan Direksi dan Dewan Komisaris. The Company has a policy of providing induction or introduction programs to all newly appointed members of the Board of Commissioners and Directors. In carrying out their duties and responsibilities, the Board of Commissioners and Directors refer to the applicable laws and regulations and the Guidelines for the Board of Commissioners and Directors or the Board Manual. The Corporate Secretary together with the Human Capital Division prepares training and development programs for the Board of Directors and the Board of Commissioners.



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Penerapan di MRT Jakarta Implementation in MRT Jakarta
2	Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners		
2.1	Komposisi Direksi Composition of the Board of Directors		
Rekomendasi Recommendation			
2.1.1	Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. In determining candidates for directors, the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee does not only rely on recommendations from the Board of Commissioners, management or majority shareholders. The Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee can use independent sources to determine qualified candidates.	Apply	Dalam proses pengusulan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris dapat mempertimbangkan rekomendasi Komite SDM & Pengusahaan, Manajemen, Pemegang Saham Mayoritas, dan sumber independen lainnya. Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Patungan, calon anggota Direksi akan mengikuti proses seleksi yang dilakukan Perseroan melalui tahapan seleksi administrasi, yaitu verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan. In the process of proposing candidates for directors, the Board of Commissioners may consider recommendations from the Human Resources & Business Committee, Management, Majority Shareholders, and other independent sources. In accordance with the Regulation of the Governor of the Province of the Special Capital Region of Jakarta Number 5 of 2018 concerning Procedures for Appointing and Dismissing Directors of Regional-Owned Enterprises and Joint Ventures, prospective members of the Board of Directors will follow the selection process carried out by the Company through the administrative selection stage, namely verification of the completeness of the requirements.
2.1.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. The Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of the Board of Directors include at least the knowledge, abilities and expertise needed to properly fulfill the role of the Board of Directors and considering the fulfillment of the diversity of the Board of Directors.	Explain	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) yang merupakan perangkat daerah melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan BUMD memastikan calon anggota Direksi haruslah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Patungan, antara lain: 1. Memiliki Pengetahuan dan Keahlian yang memadai di bidang usaha Perseroan; 2. Memiliki integritas dan kompetensi yang tercermin dari pengalaman selama ini; 3. Memiliki motivasi serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMD; 4. Memiliki pengalaman kepemimpinan dalam sebuah unit usaha minimal 5 tahun di bidang usaha BUMD yang akan dipimpin; 5. Cakap melakukan perbuatan hukum. The Regional Owned Enterprise Development Agency (BPBUMD), which is a regional apparatus, carries out the duties and functions of BUMD development to ensure that prospective members of the Board of Directors must fulfill the requirements specified in the Regional Regulation of the Province of the Special Capital Region of Jakarta Number 5 of 2018 concerning Procedures for Appointing and Dismissing Directors of Regional-Owned Enterprises and Joint Ventures, including: 1. Have sufficient knowledge and expertise in the Company's business sector; 2. Have integrity and competence as reflected in the experience so far; 3. Have high motivation and dedication to advance and develop BUMD; 4. Have leadership experience in a business unit for at least 5 years in the field of BUMD business to be led; 5. Capable of performing legal actions.
2.1.3	Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The corporate policy regarding diversity among the Board of Directors and Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report.	Explain	Kebijakan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Pemegang Saham. The policy for appointing the Board of Directors and Board of Commissioners is determined by the Shareholders.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Penerapan di MRT Jakarta Implementation in MRT Jakarta
2.1.4.	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. The Board of Commissioners ensures that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent so as to produce the desired composition of the Board. The Board of Commissioners uses independent sources to determine qualified candidates.	Explain	Kebijakan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Pemegang Saham. The policy for appointing the Board of Directors and Board of Commissioners is determined by the Shareholders.
2.1.5.	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. The Board of Commissioners/Committee that performs the nomination function establishes nomination procedures and criteria that are consistent with the Board of Commissioners' expertise matrix that has been approved by the Board of Commissioners and ensures that the candidate profile meets the requirements set out in the expertise matrix and nomination criteria.	N/A	
2.1.6.	Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. The composition of the Board of Commissioners must be formed in such a way that its members as a group reflect the diversity in terms of abilities, skills, knowledge, experience, age, cultural background and gender needed to properly fulfill the role of the Board of Commissioners.	Apply	Komposisi Dewan Komisaris dibentuk dengan mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk menjalankan secara tepat peran Dewan Komisaris sesuai dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT MRT Jakarta (Perseroda) No. SK/010/BOC-MRT/XII/2020, dan No.SK/066/BOD-MRT/XII/2020, tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual). The composition of the Board of Commissioners was formed reflecting the diversity in terms of ability, expertise, knowledge, experience, age, cultural background and gender needed to properly carry out the role of the Board of Commissioners in accordance with the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT MRT Jakarta (Perseroda) No. SK/010/BOC-MRT/XII/2020, and No.SK/066/BOD-MRT/XII/2020, concerning Work Guidelines for the Board of Commissioners and Directors (Board Manual).
2.1.7.	Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi. To enable the Board of Commissioners to provide independent advice and supervision to the Board of Directors and for roles which there is a potential conflict of interest, the Board of Commissioners consists of a sufficient number of Independent Commissioners, with a limited term of office and disclosure of the term of membership of the Board of Commissioners and their independence from the corporate point of view.	Explain	Perseroan tidak memiliki Komisaris Independen The company does not have an Independent Commissioner
2.1.8.	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To facilitate the effective functioning of the Board of Directors and Board of Commissioners and to increase investor and stakeholder confidence, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a formal, rigorous and transparent process for the appointment and appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	Explain	Komite SDM & Pengusahaan dapat mengusulkan kandidat calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris, namun proses seleksi dan pengangkatan dilakukan oleh BPBUMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah. The HR & Business Committee may propose candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners, but the selection and appointment process is carried out by BPBUMD as stipulated in DKI Jakarta Governor Regulation No. 50 of 2018 concerning Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Supervisory Board and Members of the Board of Commissioners of Regional Owned Enterprises.



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Penerapan di MRT Jakarta Implementation in MRT Jakarta
2.2	Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners		
Rekomendasi Recommendation			
2.2.1.	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. The remuneration policy for members of the Board of Directors consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The Board of Directors' remuneration must be proposed, through the Nomination and Remuneration Committee, by the Board of Commissioners to be decided by the GMS. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Directors and the economic situation and corporate performance.	Apply	Mekanisme remunerasi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite SDM & Pengusahaan serta memperhatikan Laporan Keuangan Perseroan. Hal ini sesuai dengan Pergub DKI Jakarta No. 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas, dan Dewan Komisaris BUMD. The remuneration mechanism for members of the Board of Directors is determined by the GMS based on recommendations from the Board of Commissioners after considering the recommendations of the HR & Operations Committee and considering the Company's Financial Statements. This is in accordance with DKI Jakarta Governor Regulation No. 79 of 2019 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Supervisory Board and Board of Commissioners of BUMD.
2.2.2.	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Disamping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite. The remuneration policy for members of the Board of Commissioners consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The amount of remuneration proposed by the Board of Commissioners to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Commissioners and the economic situation and corporate performance. Furthermore, his position as President Commissioner and chairman as well as his membership in committees must also be considered.	Apply	Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi Dewan Komisaris memperhatikan hal-hal sebagai berikut: • Peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 79 Tahun 2019; • Kinerja Perseroan; • Prestasi kerja Dewan Komisaris; • Remunerasi yang berlaku dalam industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan, yang mempunyai jenis dan skala usaha yang sama dengan Perseroan. The preparation of the structure, policies and amount of remuneration for the Board of Commissioners takes into account the following matters: • Applicable laws and regulations, specifically Regulation of the Governor of DKI Jakarta Province No. 79 of 2019; • Company performance; • Work performance of the Board of Commissioners; • Remuneration that applies in the industry in accordance with the Company's business activities, which have the same type and business scale as the Company.
2.2.3.	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that the remuneration package is determined based on the achievements, qualifications and competencies of the directors and commissioners with due regard to corporate operating performance, individual performance and market conditions, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there are fair and transparent procedures for establishing remuneration policies for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	Explain	Komite SDM & Pengusahaan dapat mengusulkan paket remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan Laporan Keuangan Perseroan kepada Dewan Komisaris. Namun, mekanisme penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Pergub DKI Jakarta No. 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas, dan Dewan Komisaris BUMD. The HR & Business Committee may propose a remuneration package for the Board of Directors and Board of Commissioners by taking into account the Company's Financial Statements to the Board of Commissioners. However, the mechanism for determining remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors is determined by the GMS in accordance with DKI Jakarta Governor Regulation No. 79 of 2019 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Supervisory Board and Board of Commissioners of BUMD.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Penerapan di MRT Jakarta Implementation in MRT Jakarta
3.	Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris Working Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners		
3.1	Sifat Hubungan Kerja Nature of Working Relationship		
Rekomendasi Recommendation			
3.1.1	Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. There are open discussions between the Board of Directors and the Board of Commissioners and between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. However, it is still important to maintain the confidentiality of information so that confidential information does not leak.	Apply	Dewan Komisaris rutin menyelenggarakan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang hasil rapatnya dituangkan ke dalam dokumen risalah rapat. Dokumen risalah rapat ini disusun dan disimpan oleh Sekretaris Dewan Komisaris. The Board of Commissioners routinely holds joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, the results of which are recorded in the minutes of meetings. This minutes of meeting document is compiled and kept by the Secretary to the Board of Commissioners.
3.1.2	Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. In accordance with their respective duties and roles, the Board of Directors cooperates with the Board of Commissioners in formulating the corporate mission, vision and strategy and regularly discusses their implementation.	Apply	Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dengan tugas dan perannya masing-masing untuk membahas hal-hal strategis korporasi, termasuk di dalamnya visi, misi, dan strategi korporasi. Dewan Komisaris dan Direksi secara rutin memantau implementasinya. The Board of Directors cooperates with the Board of Commissioners with their respective duties and roles to discuss corporate strategic matters, including corporate vision, mission and strategy. The Board of Commissioners and Directors routinely monitor its implementation.
3.1.3	Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, mendorong implementasi praktik governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. The Corporate Secretary has an important role in supporting the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, encouraging the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.	Apply	Sekretaris Perusahaan berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi antar organ Perseroan, hubungan antara Perseroan dengan Pemegang Saham, regulator, dan Pemangku Kepentingan lainnya serta memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan-undangan. The Corporate Secretary plays an important role in facilitating communication between the Company's organs, relations between the Company and Shareholders, regulators and other Stakeholders and ensuring the Company's compliance with laws and regulations.



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Penerapan di MRT Jakarta Implementation in MRT Jakarta
3.2	Akses informasi Dewan Komisaris Access to information on the Board of Commissioners		
Rekomendasi Recommendation			
3.2.1	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners has access to accurate, relevant and timely information. The Board of Commissioners itself ensures that it obtains sufficient information. The Board of Directors provides information to the Board of Commissioners regularly, without delay and comprehensively on all matters relevant to the corporation. The Board of Commissioners may at any time request the Board of Directors to provide additional information	Apply	Direksi memastikan bahwa Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu melalui: • Dashboard Dewan Komisaris; • Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi; Dewan Komisaris dapat sewaktu-waktu meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. Hal ini diatur di dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT MRT Jakarta (Perseroda) No. SK/010/BOC-MRT/XII/2020, dan No.SK/066/BOD-MRT/XII/2020, tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (<i>Board Manual</i>) dan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT MRT Jakarta (Perseroda) No. SK/007/BOC-MRT/X/2021, dan No. SK/043/BOD-MRT/X/2021, tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Perseroan. The Board of Directors ensures that the Board of Commissioners gets access to accurate, relevant and timely information through: • Dashboard of the Board of Commissioners; • Joint Meetings of the Board of Commissioners and Directors; The Board of Commissioners may ask the Board of Directors at any time to provide additional information. This is regulated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT MRT Jakarta (Perseroda) No. SK/010/BOC-MRT/XII/2020, and No.SK/066/BOD-MRT/XII/2020, regarding Work Guidelines for the Board of Commissioners and Directors (Board Manual) and the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT MRT Jakarta (Perseroda) No. SK/007/BOC-MRT/X/2021, and No. SK/043/BOD-MRT/X/2021, regarding the Company's Corporate Governance Guidelines.
3.3	Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners for the Impact of Ownership Structures on Corporate		
Rekomendasi Recommendation			
3.3.1	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. The impact of the ownership structure on the corporation. The Board of Directors and the Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the shareholding structure and relationships between corporate shareholders which may impact the management and operations of the corporation.	Apply	Direksi dan Dewan Komisaris memastikan bahwa struktur kepemilikan pemegang saham dan hubungan antar pemegang saham tidak mempengaruhi pelaksanaan peran dan tanggung jawab mereka. Perseroan menjamin pemegang saham dilakukan setara dan sama-sama memiliki hak dasar yang dilindungi dan difasilitasi. Hal ini diatur di dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT MRT Jakarta (Perseroda) No. SK/007/BOC-MRT/X/2021, dan No. SK/043/BOD-MRT/X/2021, tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Perseroan. The Board of Directors and Board of Commissioners ensure that the shareholder ownership structure and the relationship between shareholders do not affect the implementation of their roles and responsibilities. The company guarantees that shareholders are treated equally and have basic rights that are protected and facilitated. This is regulated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT MRT Jakarta (Perseroda) No. SK/007/BOC-MRT/X/2021, and No. SK/043/BOD-MRT/X/2021, regarding the Company's Corporate Governance Guidelines.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Penerapan di MRT Jakarta Implementation in MRT Jakarta
4.	Perilaku Etis dan bertanggung jawab Ethical and responsible behavior		
4.1.1	Pernyataan ini dituangkan dalam This statement is stated in		
Rekomendasi Recommendation			
4.1.1	Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: - Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; - Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; - Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. - Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; - Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; - Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; - Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. - Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi. - Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/ memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan. - Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan. - Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya. This statement is set forth in the Code of Business Conduct and Ethics which must clearly state the corporate expectation that each member of the Board of Directors and Board of Commissioners and employees will: - Act in the best interests of the corporation; - Act honestly and with a high standard of integrity; - Be independent and act on full information, in good faith, with due diligence and prudence. - Comply with laws and regulations that apply to corporations and their operations; - Avoiding actions that violate laws and regulations or unethical actions based on corporate ethics guidelines; - Not involved or participating in any activities that will cause a conflict of interest with the best interests of the corporation or which will have a negative impact on the reputation of the corporation; - Do not take advantage of property or information owned by the corporation, ownership of other assets or its customers for personal gain or which causes harm to the corporation and its customers. - Does not take advantage of his position or opportunities generated by his position for personal gain. - Avoiding the act of asking for or receiving from third parties payments, gratuities or other benefits for oneself or for other people that creates a conflict of interest/provides benefits to third parties in violation of laws and regulations. - Respect differences of opinion and the rights of each member of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees. - Ensuring full, fair, accurate, timely and understandable disclosure in reports and documents submitted by the corporation to regulators and in other public communications	Apply	Perseroan memiliki kebijakan terkait etika dan perilaku yang ditetapkan di dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. SK/011/BOC-MRT/XII/2020 dan No. SK/067/BOD-MRT/XII/2020 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (<i>Code of Conduct</i>). The Company has policies related to ethics and behavior that are stipulated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors No. SK/011/BOC-MRT/XII/2020 and No. SK/067/BOD-MRT/XII/2020 concerning Code of Conduct.



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Penerapan di MRT Jakarta Implementation in MRT Jakarta
4.1.2	Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, antikecurangan (<i>antifraud</i>), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, antikecurangan atau standar terkait lainnya. The Board of Directors set the policies and practices on anti-money laundering and financing of terrorism, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, political involvement with reference to national or international standards regarding anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud or other related standards.	<i>Apply</i>	Peraturan Direksi No. 035 tahun 2022 tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan, namun tidak menjelaskan terkait praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, antikecurangan (<i>antifraud</i>), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, antikecurangan atau standar terkait lainnya. Board of Directors' Decree No. 035 of 2022 concerning Implementation of the Anti-Bribery Management System, but does not explain practices related to anti-money laundering and terrorism financing, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, involvement in politics with reference to national or international standards regarding anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud or other related standards.
4.2	Nilai - nilai dan Budaya Organisasi Organizational Values and Culture		
Rekomendasi Recommendation			
4.2.1	Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi The corporation articulates, fosters and expresses corporate culture and values	<i>Apply</i>	Nilai-nilai Perseroan ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi No. 003 Tahun 2018 tentang Penetapan <i>Core Values</i> Perseroan dan <i>Leadership Competences</i> di Lingkungan PT MRT Jakarta (Persero). <i>Core Values</i> Perseroan <i>Integrity, Customer Focus, Achievement Orientation, Nurturing Teamwork</i> (I CAN) diterapkan sejalan dengan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia Tahun 2021 tentang empat prinsip dasar governansi korporat, yakni Perilaku Beretika, Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan. Nilai-nilai korporasi juga menjadi dasar penyusunan RJPP. Company values are determined based on Board of Directors' Decree No. 003 of 2018 concerning Determination of the Company's Core Values and Leadership Competences in Environment of PT MRT Jakarta (Persero). The Company's Core Values of Integrity, Customer Focus, Achievement Orientation, Nurturing Teamwork (I CAN) are implemented in line with the 2021 Indonesian General Corporate Governance Guidelines concerning the four basic principles of corporate governance, namely Ethical Behavior, Transparency, Accountability, and Sustainability. Corporate values are also the basis for preparing the RJPP.
4.3	Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya Communication and Enforcement of Code of Ethics, Values and Culture		
Rekomendasi Recommendation			
4.3.1	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan. The corporate code of conduct and ethics are communicated effectively to the Board of Directors, Board of Commissioners and all employees, integrated into corporate strategy and operations including the risk management system and remuneration structure, and enforced.	<i>Apply</i>	Sosialisasi dan internalisasi Pedoman Etika dan Perilaku kepada seluruh karyawan dilakukan dengan membagikan salinan Pedoman Etika dan Perilaku pada saat pertama kali menjabat, dan juga setiap tahunnya melalui berbagai media sosialisasi maupun internalisasi Perseroan. Setiap karyawan kemudian menandatangani pernyataan kepatuhan Pedoman Etika dan Perilaku Perseroan yang dilakukan setahun sekali. Dissemination and internalization of the Code of Ethics and Conduct to all employees is carried out by distributing copies of the Code of Ethics and Conduct when they first take office, and also annually through various socialization and internalization media of the Company. Each employee then signs a statement of compliance with the Company's Code of Ethics and Conduct which is done once a year.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Penerapan di MRT Jakarta Implementation in MRT Jakarta
5.	Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan Risk Management, Internal Control and Compliance		
5.1	Pengendalian Internal dan Kepatuhan Internal Control and Compliance		
Rekomendasi Recommendation			
5.1.1	Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi. The Board of Directors conducts periodic reviews of the design accuracy and operational effectiveness of the governance system, risk management, internal control and corporate compliance and reports the implementation and results of the review to shareholders through the annual corporate report.	Explain	Perseroan melaporkan kinerja governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi secara Triwulan. Namun tidak dijelaskan secara detail reviu secara berkala. The Company reports quarterly performance on governance, risk management, internal control and corporate compliance. However, it is not explained in detail the review on a regular basis.
5.2	Manajemen Risiko Risk Management		
Rekomendasi Recommendation			
5.2.1.	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Strategy and risk are an integral part, disclosed in a transparent manner, included in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as in discussions at the meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors.	Apply	Direksi bersama dengan Dewan Komisaris setiap bulan melakukan pemantauan strategi dan risiko dalam rapat Dewan Komisaris dan Direksi. The Board of Directors together with the Board of Commissioners monitors strategy and risk every month in the Board of Commissioners and Board of Directors meetings.
5.2.2.	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. The Risk Management Monitoring Committee assists the implementation of the duties of the Board of Commissioners by creating a transparent, focused and independent mechanism for oversight of corporate risk management.	Apply	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi melalui rapat rutin bulanan. The Risk Management Monitoring Committee assists the implementation of the duties of the Board of Commissioners by creating a transparent, focused and independent mechanism for monitoring corporate risk management through regular monthly meetings.
5.3.	Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Integration of Governance, Risk Management and Compliance		
Rekomendasi Recommendation			
5.3.1	Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. The Board of Directors builds an integrated governance, risk management and compliance (GRC) system, by handling various uncertainties in an integrated manner and with high integrity, to ensure that the corporation can achieve its goals.	Apply	Perseroan sudah membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi di tahun 2022 dan telah mengukur skor maturitas sebesar 3,67 dari skala 5 (<i>defined</i>). The company has built an integrated governance, risk management and compliance (GRC) system in 2022 and has measured a maturity score of 3.67 out of a scale of 5 (<i>defined</i>).
5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The Board of Directors ensures that the division in charge of the compliance function does not concurrently carry out functions that have the potential to cause a conflict of interest.	Explain	Unit Kerja Kepatuhan terdapat dalam beberapa Divisi, Direksi memastikan fungsi tersebut tidak menimbulkan benturan kepentingan. Sepanjang tahun 2022, tidak ada laporan terkait dengan benturan kepentingan. The Compliance Work Unit is divided into several Divisions, the Board of Directors ensures that this function does not create a conflict of interest. Throughout 2022, there were no reports related to conflicts of interest



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Penerapan di MRT Jakarta Implementation in MRT Jakarta
5.4.	Audit Internal Internal Audit		
Rekomendasi Recommendation			
5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. The Board of Commissioners through the Audit Committee monitors and ensures that the internal audit function assists corporations in achieving their goals by bringing an objective and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, internal control and corporate governance.	Apply	Komite Audit membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan Divisi Internal Audit. The Audit Committee assists the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of the internal control system, and the effectiveness of the implementation of the duties of the external auditors and the Internal Audit Division.
6.	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency		
6.1	Kebijakan Pengungkapan Disclosure Policy		
Rekomendasi Recommendation			
6.1.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi The corporation has disclosure and transparency policies and procedures that ensure the disclosure of material information and safeguard sensitive information and corporate secrets	Apply	Perseroan telah memiliki Peraturan Direksi No. 040 Tahun 2020 tentang Penyampaian Informasi kepada Eksternal melalui Media Sosial dan Aset Digital. Untuk menjaga informasi sensitif Korporasi, Perseroan menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang disahkan melalui Peraturan Direksi No. 005 Tahun 2022. The company already has Board of Directors' Decree No. 040 of 2020 concerning Submission of Information to Externals through Social Media and Digital Assets. In order to protect sensitive corporate information, the Company implements an Information Security Management System which is legalized through Board of Directors' Decree No. 005 Year 2022.
6.1.2	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi. Shareholders' right to obtain regularly and timely relevant material information about the corporation must be fulfilled.	Apply	Sesuai anggaran dasar Perseroan, pemegang saham memiliki hak memperoleh informasi material (termasuk hak bertanya), baik dari Dewan Komisaris maupun Direksi, mengenai keuangan atau hal-hal lain yang menyangkut Perseroan secara lengkap, tepat waktu, dan teratur. In accordance with the Company's articles of association, shareholders have the right to obtain material information (including the right to ask questions), both from the Board of Commissioners and the Board of Directors, regarding finance or other matters relating to the Company in a complete, timely and orderly manner.
6.2	Laporan Keuangan dan Keberlanjutan Financial and Sustainability Reports		
Rekomendasi Recommendation			
6.2.1	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. The corporation discloses systems and procedures to ensure that interim financial reports that are not materially audited or reviewed by external auditors are accurate, complete, and provide investors with the right information to make the right investment decisions.	Apply	Perseroan memiliki sistem dan prosedur penyajian laporan keuangan interim sesuai dengan Peraturan Direksi No. 030 Tahun 2020 tentang Pedoman Keuangan dan Akuntansi. The Company has a system and procedure for presenting interim financial reports in accordance with Board of Directors' Decree No. 030 of 2020 concerning Guidelines for Finance and Accounting.
6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. The Audit Committee ensures the quality of financial report audits carried out by external auditors. This activity includes recommending the appointment, reappointment and, if necessary, the termination and remuneration of the external auditor.	Apply	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Berdasarkan Piagam Komite Audit, mengusulkan kepada Dewan Komisaris Calon Auditor Eksternal disertai alasan pencalonan dan besarnya honorarium atau imbal jasa yang diusulkan untuk Auditor Eksternal. Usulan tersebut didasarkan atas pertimbangan legalitas independensi dan kompetensi. The Audit Committee ensures the quality of financial report audits carried out by external auditors. Based on the Audit Committee Charter, propose to the Board of Commissioners a Candidate for External Auditor along with the reasons for the nomination and the amount of honorarium or compensation proposed for the External Auditor. The proposal is based on legality, independence and competence considerations.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Penerapan di MRT Jakarta Implementation in MRT Jakarta
6.2.3	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. Sustainability reports must be prepared and disclosed accurately and in accordance with national or international sustainability reporting frameworks.	Apply	Laporan Keberlanjutan disusun berdasarkan standar nasional dan internasional, yakni POJK dan GRI. The Sustainability Report is prepared based on national and international standards, namely POJK and GRI.
6.2.4	Perusahaan telah menerbitkan Laporan Keberlanjutan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Laporan Tahunan. Laporan Keberlanjutan Perseroan telah memaparkan tentang kinerja keberlanjutan Perseroan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola, yang disajikan dalam perbandingan selama 3 tahun, sehingga diharapkan membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. The company has issued a Sustainability Report which is an integral part of the Annual Report. The Company's Sustainability Report has presented the Company's sustainability performance which includes economic, social, environmental and governance aspects, which are presented in a 3-year comparison, so that it is expected to help shareholders and stakeholders understand the strategic goals of the corporation and its progress in creating sustainable value.	Apply	Pembahasan terkait program pembangunan berkelanjutan yang dijalankan Perseroan dapat dilihat secara lengkap pada Laporan Keberlanjutan yang dibuat dalam buku yang terpisah. Discussion regarding the sustainable development program implemented by the Company completely can be seen in the Sustainability Report which is made in a separate book.
6.3	Diseminasi Informasi Information Dissemination		
Rekomendasi Recommendation			
6.3.1	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna. Information dissemination channels should provide users with equitable, timely and relatively inexpensive access to relevant information.	Apply	Perseroan menyediakan saluran penyebaran informasi yang dapat diakses secara mudah oleh seluruh pemangku kepentingan melalui situs www.jakartamrt.co.id dan sosial media resmi PT MRT Jakarta (Perseroda). The Company provides an information dissemination channel that can be accessed easily by all stakeholders through the website www.jakartamrt.co.id and the official social media of PT MRT Jakarta (Perseroda).
6.3.2	Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun. The Corporation ensures that an annual statement on the application of the General Guidelines for Corporate Governance in Indonesia, including an explanation of the application of each Recommendation and Guide is available on the website for a minimum period of five years.	Explain	Perseroan akan melakukan penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia atas masing-masing rekomendasi dan panduan ke dalam situs web setiap tahun. The Company will implement the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance for each of the recommendations and guidelines on the website every year.
6.3.3	Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus didiungkapkan dengan jelas. Dalam hal cross listing, kriteria dan prosedur <i>cross listing</i> , kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan listing untuk listing utama harus transparan dan didokumentasikan. For corporations listed on the capital market in jurisdictions other than the jurisdiction of origin, the applicable laws and regulations on corporate governance must be clearly disclosed. In the case of cross listing, the criteria and procedures for recognizing the listing requirements for the primary listing must be transparent and documented.	Explain	Tidak relevan Not relevant



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Penerapan di MRT Jakarta Implementation in MRT Jakarta
7.	Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham Protection of the Rights of Shareholders		
Rekomendasi Recommendation			
7.1.1	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor The corporation has a communication policy that facilitates and encourages shareholder or investor participation	Apply	Setiap tahun Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai Anggaran Dasar Perseroan, dan Perseroan senantiasa menyampaikan informasi material dan konstruktif kepada Pemegang Saham baik laporan setiap bulan maupun via Website Perseroan. Every year the Company holds an Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's Articles of Association, and the Company always delivers material and constructive information to Shareholders, both monthly reports and via the Company's Website.
7.1.2	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. Corporations that are parent entities ensure that their corporate governance policies apply to subsidiaries and entities under common control in which the corporate investment is significant.	Apply	Perseroan telah memiliki Charter Hubungan Korporasi antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dengan PT Integrasi Transit Jakarta. The company already has a Corporate Relations Charter between PT MRT Jakarta (Perseroda) and PT Integrasi Transit Jakarta.
7.1.3	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambil alihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya. Corporations have rules and procedures governing acquisitions, acquisitions and extraordinary transactions such as mergers and sale of substantial corporate assets to ensure transactions occur in a transparent and under reasonable conditions and protect the rights of all shareholders according to class.	Apply	Perseroan telah memiliki prosedur yang mengatur akuisisi, pengambil alihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. The Company has procedures governing acquisitions, takeovers and extraordinary transactions such as mergers and sales of substantial corporate assets to ensure that transactions occur in a transparent and reasonable manner in accordance with the Company's Articles of Association.
7.2	Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham Fair Treatment of Shareholders		
Rekomendasi Recommendation			
7.2.1	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan a). semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara, a. pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. Corporations have rules and procedures that ensure a). all shareholders of the same series in one class of shares must be treated equally, a. Disclosure of such rules and procedures as well as disclosure of capital structure and arrangements that allow certain shareholders to gain influence or control that is disproportionate to their share ownership.	Explain	Perseroan telah memiliki kebijakan seluruh Pemegang Saham diperlakukan setara dan semua saham yang dikeluarkan Perseroan adalah saham atas nama satu saham satu suara. The Company has a policy that all Shareholders are treated equally and all shares issued by the Company are shares on behalf of one share, one vote.
7.2.2	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. The corporation has rules and procedures that ensure related party transactions are approved and executed in such a way as to ensure that conflicts of interest are properly managed, and protect the interests of the corporation and shareholders.	Apply	Perseroan telah memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan sesuai dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT MRT Jakarta (Perseroda) No. SK/013/BOC-MRT/XII/2020, dan No. SK/071/BOD-MRT/XII/2020, tentang Pedoman Benturan Kepentingan. The Company has rules and procedures that ensure related party transactions are approved and carried out in such a way as to ensure that conflicts of interest are in accordance with the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT MRT Jakarta (Perseroda) No. SK/013/BOC-MRT/XII/2020, and No. SK/071/BOD-MRT/XII/2020, regarding Guidelines for Conflicts of Interest.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Penerapan di MRT Jakarta Implementation in MRT Jakarta
7.2.3	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> . Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar. The corporation has and discloses policies to prevent insider trading. The corporation has clear rules regarding any trading in corporate shares carried out by directors, commissioners and insiders to ensure that no one may benefit directly or indirectly from information that is not/not yet available in the market.	Explain	Tidak relevan Not relevant
7.3 Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders			
Rekomendasi Recommendation			
7.3.1	Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi The corporation summons for the GMS with the agenda and materials for the GMS as completely and as early as possible (no later than 28 days before the GMS) to provide sufficient time and material for shareholders to properly study the meeting agenda. Meeting invitations and all GMS information are disclosed through electronic means such as through the corporate website	Explain	RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, materi disampaikan sebelum pelaksanaan RUPS. The GMS is held by summoning the shareholders in advance by registered letter no later than 14 (fourteen) days prior to the date the GMS is held, the material is submitted before the GMS is held.
7.3.2	Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The corporation has and discloses rules and procedures that facilitate shareholders in participating and voting effectively at GMS.	Apply	Sesuai dengan Anggaran Dasar, pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan dengan mekanisme musyawarah untuk mufakat. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan secara tertulis, keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama yang diambil dengan sah dalam RUPS. In accordance with the Articles of Association, decision-making at the GMS is carried out by means of deliberation to reach a consensus. Shareholders can also make valid decisions without convening a GMS provided that all shareholders have been notified in writing and all shareholders have given their approval regarding the proposal submitted in writing and signed a written agreement, decisions taken in this way have the same power as those taken legally at the GMS.
7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Shareholders participate effectively in determining the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners	Apply	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yang ditandai dengan adanya Keputusan Para Pemegang Saham dan ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham. Shareholders participate effectively in determining the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, which is marked by a Shareholders' Decision and signed by all Shareholders.
7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. The corporation ensures the transparency and accountability of the external auditor at the GMS.	Apply	Auditor senantiasa hadir dalam RUPS Tahunan, dan sesuai Anggaran Dasar Perseroan, auditor eksternal ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Pemegang Saham melalui RUPS. The auditor always attends the Annual GMS, and according to the Company's Articles of Association, the external auditor is appointed by the Board of Commissioners based on the delegation of authority from the Shareholders through the GMS.
7.3.5	Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. Submission of voting results and a complete summary of the minutes of the GMS will be announced to the public on the following working day.	Explain	Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, risalah rapat hasil penyelenggaraan RUPS dibuat secara tertulis, dan diedarkan kepada seluruh Pemegang Saham. In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, the minutes of the meeting of the results of the GMS are made in writing, and circulated to all Shareholders.



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Penerapan di MRT Jakarta Implementation in MRT Jakarta
8.	Pemangku Kepentingan Lainnya Other Stakeholders		
8.1	Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (<i>stakeholder engagement</i>) Key Stakeholder Engagement		
Rekomendasi Recommendation			
8.1.1	Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka. The corporation through the Corporate Secretary carries out regular, transparent and effective communication with key stakeholders and involves them to understand their hopes and complaints as well as the impact of the corporation on them.	Apply	Sekretaris Perusahaan berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi antar organ Perseroan, hubungan antara Perseroan dengan Pemegang Saham, regulator, dan Pemangku Kepentingan lainnya serta memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Forum Jurnalis, Stakeholders Gathering, dan Komunikasi melalui Media Sosial. The Corporate Secretary plays an important role in facilitating communication between the Company's organs, the relationship between the Company and Shareholders, regulators and other Stakeholders as well as ensuring the Company's compliance to the regulations, such as the Journalist Forum, Stakeholders Gathering, and Communication through Social Media
8.2	Komitmen Keberlanjutan dalam Model Bisnis Sustainability Commitment in Business Models		
Rekomendasi Recommendation			
8.2.1	Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko. The Board of Commissioners together with the Board of Directors are responsible, accountable and transparent for sustainability governance, including setting corporate sustainability strategies, priorities and targets. The Board of Directors and Board of Commissioners incorporate sustainability considerations when carrying out their roles, including among others developing and implementing corporate strategies, business plans, key action plans and risk management.	Apply	Perseroan telah menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi melalui KPI Dewan Komisaris bersama dengan Direksi, sehingga mereka bersama-sama merumuskan Peta Jalan Keberlanjutan tahun 2022-2030. The Company has set corporate sustainability strategies, priorities and targets through the KPIs of the Board of Commissioners together with the Board of Directors, so that they jointly formulate a Sustainability Roadmap for 2022-2030.
8.3	Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan Protection of Stakeholders		
Rekomendasi Recommendation			
8.3.1	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures and discloses that corporate operations reflect the application of high standards of ethics, social and environmental responsibility throughout the corporation and ensures that appropriate policies and procedures are implemented to respect and comply with the rights of stakeholders.	Apply	Perseroan memiliki penerapan standar dan etika serta memastikan hak-hak pemangku kepentingan, hal ini dibuktikan dengan hasil customer satisfaction index sebesar 88,32. Perseroan juga memastikan proses pengadaan yang transparan dan akuntabilitas melalui sistem e-procurement. Perseroan dalam menjalankan bisnisnya memastikan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan Pedoman Manajemen Keberlanjutan dan Peta Jalan Keberlanjutan 2022-2030. Implementasi Keberlanjutan, tertuang di dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2022 yang terpisah dari Laporan Tahunan. The company has the implementation of standards and ethics and ensures the rights of stakeholders, this is proven by the results of the customer satisfaction index of 88.32. The company also ensures a transparent and accountable procurement process through the e-procurement system. The Company in carrying out its business ensures social and environmental responsibility in accordance with the Sustainability Management Guidelines and the 2022-2030 Sustainability Roadmap. Implementation of Sustainability, contained in the 2022 Sustainability Report which is separate from the Annual Report.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Penerapan di MRT Jakarta Implementation in MRT Jakarta
8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. The Board of Directors encourages employees to work for the long term interests of the corporation and prioritizes sustainability.	Apply	Perseroan telah menyusun Peta Jalan Keberlanjutan tahun 2022-2030 yang tertuang di dalam rencana jangka panjang perusahaan. Selain itu, Perseroan dapat memastikan Karyawan mendapatkan <i>job security</i>, melalui: 1. Kebijakan Pemberian Insentif Jangka Panjang kepada Karyawan yang tertuang di dalam Peraturan Perusahaan 2. Remunerasi berbasis Kinerja untuk Karyawan harus memperhatikan unsur risiko berdasarkan Pedoman Remunerasi 3. Memiliki program pengembangan dan manajemen SDM yang efektif berdasarkan Pedoman Pengembangan Karyawan 4. Mempertimbangkan unsur keberagaman dan non-diskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon posisi manajerial melalui Pedoman Manajemen Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial. The company has prepared a Sustainability Roadmap for 2022-2030 which is contained in the company's long-term plan. In addition, the Company can ensure employees get job security, through: 1. Long-Term Incentive Policy for Employees as stipulated in Company Regulations 2. Performance-based remuneration for employees must take into account the element of risk based on the Remuneration Guidelines 3. Has an effective HR development and management program based on the Employee Development Guidelines 4. Consider the elements of diversity and non-discrimination and provide equal opportunities to all candidates for managerial positions through the Guidelines for Sustainability Management and Social Responsibility.



Referensi Silang SEOJK No. 16 /SEOJK.04/2021: Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Cross-Reference No. 16/SEOJK.04/2021: Format and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies

KETERANGAN DESCRIPTION		HALAMAN PAGE
I. Ketentuan Umum General Terms		
1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: In this Financial Services Authority Circular Letter what is meant by:		
a.	Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan emiten atau perusahaan publik. The Annual Report is a report on the board of directors and board of commissioners accountability in managing and supervising issuers or public companies within a period of 1 (one) fiscal year to the general meeting of shareholders prepared based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation concerning the Annual Report of issuers or public companies.	✓
b.	Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Issuers are parties who make public offerings.	✓
c.	Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. A Public Company is a company whose shares are owned by at least 300 (three hundred) shareholders and has a paid-up capital of at least Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah) or a number of shareholders and paid-up capital as determined by the Financial Services Authority.	✓
d.	Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik A Public Company is an Issuer that has made a public offering of equity securities or a Publically-listed Company	✓
e.	Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. A Sustainability Report is a report published to the public that contains the economic, financial, social, and environmental performance of a financial service institution, Issuer, and Public Company in running a sustainable business.	✓
f.	Direksi: Board of Directors:	
1)	bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the Board of Directors as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and	✓
2)	bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan mengenai badan hukum tersebut. for an Issuer or a Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that carries out the management of the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.	✓
g.	Dewan Komisaris: Board of Commissioners:	
1)	bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, the Board of Commissioners as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and	✓
2)	bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut. for the Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that supervises the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.	✓
h.	Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS: General Meeting of Shareholders hereinafter abbreviated as GMS:	
1)	bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the GMS as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company; and	✓

KETERANGAN DESCRIPTION		HALAMAN PAGE
2)	bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut. for an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that has authority that is not given to any other body that carries out management and supervisory functions, within the limits specified in the legislation and/or articles of association governing the legal entity .	✓
2.	Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. The Annual Report of Issuers or Public Companies is an important source of information for investors or shareholders as one of the basic considerations in making investment decisions and a means of supervision of Issuers or Public Companies.	✓
3.	Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat, dan akuntabel melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Along with the development of the capital market and the increasing need for information disclosure by investors or shareholders, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to present quality, accurate, and accountable information through the Annual Reports of Issuers or Public Companies.	✓
4.	Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Annual Reports that are prepared regularly and informatively can provide convenience for investors or shareholders and stakeholders in obtaining the required information.	✓
5.	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan. This Financial Services Authority Circular is a guideline for Issuers or Public Companies that must be applied in preparing Annual Reports and Sustainability Reports.	✓
II. Bentuk Laporan Report Format		
1.	Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik. The Annual Report is presented in the form of printed and electronic documents.	✓
2.	Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik. The Annual Report is presented in the form of a printed document, printed on light colored paper, of good quality, A4 size, bound, and can be reproduced with good quality.	✓
3.	Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami. The Annual Report may present information in the form of pictures, graphs, tables, and/or diagrams by including clear titles and/or descriptions, so that they are easy to read and understand.	✓
4.	Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam portable document format (PDF). The Annual Report presented in the form of an electronic document is the Annual Report converted into a portable document format (PDF).	✓
III. Isi Laporan Tahunan Annual Report Contents		
1.	Laporan Tahunan paling sedikit memuat: The Annual Report shall at least contain:	
a.	ikhtisar data keuangan penting; overview of important financial data;	16-19
b.	informasi saham (jika ada); stock information (if any);	19
c.	laporan Direksi; report of the Board of Directors;	30-37
d.	laporan Dewan Komisaris; report of the Board of Commissioners;	38-46
e.	profil Emiten atau Perusahaan Publik; profile of the Issuer or Public Company;	52-98
f.	analisis dan pembahasan manajemen; management analysis and discussion;	101-170



KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
g. tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; governance of Issuers or Public Companies;	171-329
h. tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik; social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company;	330-347
i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan audited annual financial report; and	348
j. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan. statement letter of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding their responsibility for the Annual Report.	48-49
2. Uraian Isi Laporan Tahunan Description of Annual Report Contents	
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: Summary of Important Financial Data Summary of important financial data containing financial information that is presented in the form of a comparison for 3 (three) fiscal years or since starting its business if the Issuer or Public Company has carried out its business activities for less than 3 (three) years, at least containing:	16-19
1) pendapatan/penjualan; income/sales;	16
2) laba bruto; gross profit;	16
3) laba (rugi); profit (loss);	16
4) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; the amount of profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	16
5) total laba (rugi) komprehensif; total comprehensive profit (loss);	16
6) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; total comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	16
7) laba (rugi) per saham; earning (loss) per share;	16
8) jumlah aset; total assets;	17
9) jumlah liabilitas; total liabilities;	17
10) jumlah ekuitas; total equity;	17
11) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; ratio of profit (loss) to total assets;	19
12) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; ratio of profit (loss) to equity;	19
13) rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; ratio of profit (loss) to revenue/sales;	19
14) rasio lancar; current ratio;	19
15) rasio liabilitas terhadap ekuitas; ratio of liabilities to equity;	19
16) rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan ratio of liabilities to total assets; and	19
17) informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya. other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and the type of industry.	19
b. Informasi Saham Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: Stock Information Stock information for a Public Company shall at least contain:	19
1) saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: shares that have been issued for each quarterly period presented in the form of a comparison for the last 2 (two) fiscal years, at least containing:	19
a) jumlah saham yang beredar; number of shares outstanding;	19

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
b) kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares are listed;	19
c) harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan the highest, lowest, and closing share prices based on prices on the stock exchange where the shares are listed; and	19
d) volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. trading volume on the stock exchange where the shares are listed.	19
e) Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek; Information in letter b), letter c) and letter d) is only disclosed if the shares are listed on a stock exchange;	19
2) dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: in the event of a corporate actions that causes changes in shares, such as stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of conversion securities, as well as capital additions and deductions, stock information as referred to in number 1) shall be added with at least an explanation regarding:	19
a) tanggal pelaksanaan aksi korporasi; the date of implementation of the corporate action;	19
b) rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; the ratio of stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, the number of convertible securities issued, and changes in the nominal value of shares;	19
c) jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; the number of outstanding shares before and after the corporate action;	19
d) jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan the number of convertible securities exercised (if any); and	19
e) harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi; the share price before and after the corporate action;	19
3) dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan in the event of a temporary suspension of share trading (suspension) and/or delisting of shares in the fiscal year, the reasons for the suspension and/or delisting of shares shall be explained; and	19
4) dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (delisting) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut. in the event that the temporary suspension of share trading as referred to in number 3) and/or the delisting process is still ongoing until the end of the Annual Report period, it explains the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading and/or cancellation of the share listing (delisting).	19
c. Laporan Direksi Board of Directors' Report	38-46
Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Directors' report shall at least contain a brief description of:	38-46
1. kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: performance of the Issuer or Public Company, at least containing:	41
a. strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company;	39
b. peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies;	39
c. proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy;	44-45
d. perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan comparison between the results achieved and those targeted by the Issuer or Public Company; and	41-43
e. kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; obstacles faced by Issuers or Public Companies;	40-41
2. gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan description of the business prospects of the Issuer or Public Company; and	43
3. penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. implementation of the governance of Issuers or Public Companies.	44-45
d. Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report	30-37



KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Commissioners' report shall at least contain a brief description of:	30-37
1. penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi; evaluation of the performance of the Board of Directors regarding the management of Issuers or Public Companies, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of strategies for Issuers or Public Companies carried out by the Board of Directors;	32
2. pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan views on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors; and	34-35
3. pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. views on the implementation of governance of the Issuer or Public Company.	35-36
a. Profil Emiten atau Perusahaan Publik Issuer or Public Company Profile	51-97
Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi: The profile of the Issuer or Public Company contains at least the following information:	51-97
1. nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku; name of the Issuer or Public Company, including if there is a change in name, the reason for the change, and the effective date of the name change in the fiscal year;	52-53
2. akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: access to Issuers or Public Companies including branch offices or representative offices that enable the public to obtain information about Issuers or Public Companies, including:	53
a. alamat; address;	53
b. nomor telepon; telephone number;	53
c. alamat surat elektronik; dan e-mail address; and	53
d. alamat situs web; website address;	53
3. riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; brief history of the Issuer or Public Company;	54-57
4. visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan; vision and mission of the Issuer or Public Company as well as the corporate culture or corporate values;	60-61
5. kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan; business activities according to the latest articles of association, business activities carried out in the fiscal year, as well as types of goods and/or services produced;	62-63
6. wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan. operational area of the Issuer or Public Company; operational area is the area or area for the implementation of operational activities or the range of the company's operational activities.	65
7. struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan; organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions;	66-67
8. daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan; list of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;	64
9. profil Direksi, paling sedikit memuat: Directors' profile, at least containing:	79-85
a. nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; name and position in accordance with the duties and responsibilities;	79-85
b. foto terbaru; recent photograph;	79-85
c. usia; age;	79-85
d. kewarganegaraan; nationality;	79-85
e. riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; education history and/or certification;	79-85
f. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	79-85

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
1) dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; the legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the Issuer or Public Company concerned;	79-85
2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this is disclosed; and	79-85
3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	79-85
4) hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, majority and controlling shareholders, either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and	79-85
5) perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed;	79-85
10. profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: profile of the Board of Commissioners, at least containing:	71-78
a. nama dan jabatan; name and position;	71-78
b. foto terbaru; recent photograph;	71-78
c. usia; age;	71-78
d. kewarganegaraan; nationality;	71-78
e. riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; education history and/or certification;	71-78
f. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	71-78
1) dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; legal basis for appointment as member of the Board of Commissioners;	71-78
2) dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner of the Issuer or Public Company concerned;	71-78
3) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Commissioners does not have concurrent positions, then this is disclosed; and	71-78
4) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	71-78
g. hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties; In the event that a member of the Board of Commissioners has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter;	71-78
h. pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan statement of independence of the independent commissioner in the event that the independent commissioner has served more than 2 (two) terms; and	71-78
i. perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed;	71-78



KETERANGAN DESCRIPTION		HALAMAN PAGE
11. dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya; in the event that there is a change in the composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners that occurs after the fiscal year ends up to the deadline for submitting the Annual Report, the composition included in the Annual Report is the last and previous composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;		157
12. jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the fiscal year; Disclosure of information can be presented in tabular form.		88-89
13. nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: names of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the fiscal year, which consists of information regarding:		90-91
a. pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; shareholders who own 5% (five percent) or more shares of the Issuer or Public Company;		90-91
b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares of the Issuer or Public Company. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, then this matter is disclosed; and		90-91
c. kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; community shareholder group, namely the group of shareholders who each own less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company;		90-91
Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel. The above information can be presented in tabular form.		
14. persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; the percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the fiscal year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;		91
Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter shall be disclosed.		90
15. jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: number of shareholders and percentage of ownership at the end of the fiscal year based on classification:		
a. kepemilikan institusi lokal; ownership in local institutions;		N/A*
b. kepemilikan institusi asing; ownership in foreign institutions;		
c. kepemilikan individu lokal; dan local individual ownership; and		
d. kepemilikan individu asing; foreign individual ownership;		
16. informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; information regarding the majority and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, up to the individual owner, which is presented in the form of a schematic or chart;		91
17. nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut. the name of the subsidiary, associate, joint venture company where the Issuer or Public Company has joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture company; For a subsidiary, information about the address of the subsidiary is added.		92-93
18. kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada); chronology of share listing, number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of listing to the end of the fiscal year as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock splits, reverse stock, dividends shares, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and subtractions (if any);		94
19. informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada); other securities listing information other than the securities as referred to in number 18), which have not yet matured in the fiscal year, at least contain the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any);		94

*N/A: Tidak ada penjelasan, dikarenakan tidak relevan dengan MRT | No explanation, as it is not relevant to MRT

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
20. informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliannya meliputi: information on the use of a public accountant (AP) and a public accounting firm (KAP) services and their networks/associations/alliances include:	95
a. nama dan alamat; name and address;	96
b. periode penugasan; assignment period;	95
c. informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; information on audit and/or non-audit services provided;	95
d. biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan audit and/or non-audit fees for each assignment given during the fiscal year; and	98
e. dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliannya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan in the event that AP and KAP and their network/association/alliance, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed; and Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliannya dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/alliances can be presented in tabular form.	95
21. nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP name and address of capital market supporting institutions and/or professionals other than AP and KAP	96-97
a. Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Analysis and Discussion Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat: Management analysis and discussion contains analysis and discussion of financial statements and other important information with an emphasis on material changes that occurred in the fiscal year, which at least contains:	99-169
1. tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a review of operations per business segment according to the type of industry of the Issuer or Public Company, at least regarding:	105-133
a. produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; production, which includes the process, capacity, and development;	108-128
b. pendapatan/penjualan; dan income/sales; and	130-133
c. profitabilitas; profitability;	130-133
2. kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: comprehensive financial performance which includes a comparison of financial performance in the last 2 (two) fiscal years, an explanation of the causes of the changes and the impact of these changes, at least regarding:	135-151
a. aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; current assets, non-current assets, and total assets;	135-139
b. liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; current liabilities, long term liabilities, and total liabilities;	139-143
c. ekuitas; equity;	143-144
d. pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan income/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss); and	144-149
e. arus kas; cash flows;	149-151
3. kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; ability to pay debts or obligations by presenting the relevant ratio calculations;	151
4. tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; collectibility level of the Issuer's or Public Company's receivables by presenting the relevant ratio calculations;	151-154
5. struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud; capital structure and management policies on the capital structure with the basis for determining the said policy;	154-155
6. bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: discussion of material ties for capital goods investment with an explanation that at least contains:	155
a. tujuan dari ikatan tersebut; the purpose of the bond;	155
b. sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; the expected source of funds to fulfill the commitment;	155



KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
c. mata uang yang menjadi denominasi; dan the currency in which it is denominated; and	156
d. langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait; steps that are planned by the Issuer or Public Company to protect the risk from the related foreign currency position;	156
7. bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: discussion of capital goods investments realized in the last fiscal year, at least contains:	155-157
a. jenis investasi barang modal; type of capital goods investment;	155-157
b. tujuan investasi barang modal; dan the purpose of capital goods investment; and	155
c. nilai investasi barang modal yang dikeluarkan; the total of capital goods investments;	155-157
8. informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada); information and material facts occurring after the date of the accountant's report (if any);	157
9. prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya; the business prospects of the Issuer or Public Company are related to the conditions of the industry, the general economy and the international market accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources;	166-169
10. perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: comparison between the target/projection at the beginning of the fiscal year with the results achieved (realization), regarding:	157-158
a. pendapatan/penjualan; income/sales;	157-158
b. laba (rugi); profit (loss);	157-158
c. struktur modal (capital structure); atau capital structure; or	157-158
d. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters deemed important to the Issuer or Public Company;	157-158
11. target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: targets/projections to be achieved by the Issuer or Public Company for the next 1 (one) year, regarding:	158-159
a. pendapatan/penjualan; income/sales;	158-159
b. laba (rugi); profit (loss);	158-159
c. struktur modal (capital structure); capital structure;	158-159
d. kebijakan dividen; atau dividend policy; or	158-159
e. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters deemed important to the Issuer or Public Company;	158-159
12. aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar; marketing aspects of the goods and/or services of the Issuer or Public Company, at least regarding the marketing strategy and market share;	159
13. uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: description of dividends for the last 2 (two) fiscal years, at least:	160
a. kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; dividend policy, which includes information on the percentage of dividends distributed to net income;	160
b. tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends;	160
c. jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan the amount of dividends per share (cash and/or non-cash); and	160
d. jumlah dividen per tahun yang dibayar; the amount of dividends paid annually;	160
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Disclosure of information can be presented in tabular form. In the event that the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed.	160
14. realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: realization of the use of proceeds from the public offering, provided that:	161
a. dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan in the event that during the fiscal year, the Issuer has an obligation to submit a report on the realization of the use of funds, then the realization of the cumulative use of the proceeds from the public offering shall be disclosed until the end of the fiscal year; and	161

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
b. dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut; in the event that there is a change in the use of funds as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the report on the realization of the use of the proceeds from the public offering, the Issuer shall explain the change;	161
15. informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: material information (if any), regarding investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions, which occurred during the fiscal year, at least containing :	161-163
a. tanggal, nilai, dan objek transaksi; date, value, and object of the transaction;	161-163
b. nama pihak yang melakukan transaksi; name of the party conducting the transaction;	161-163
c. sifat hubungan afiliasi (jika ada); nature of the affiliation relationship (if any);	161-163
d. penjelasan mengenai kewajaran transaksi; explanation of the fairness of the transaction;	161-163
e. pemenuhan ketentuan terkait; dan compliance with related provisions; and	161-163
f. dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: in the event that there is an affiliation relationship, apart from disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information:	161-163
1) pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); dan a statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle; and	161-163
2) peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); the role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle;	161-163
g. untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; for affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out to generate operating income. and run regularly, repeatedly, and/or continuously;	161-163
Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. In the event that the affiliated transactions or material transactions referred to have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements is added.	√
h. untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; for disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added;	161-163
i. dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; in the event that there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, then this shall be disclosed;	√
16. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan changes in the provisions of laws and regulations that have a significant effect on Issuers or Public Companies and their impact on financial statements (if any); and	164
17. perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada). changes in accounting policies, reasons and impact on financial statements (if any).	164
a. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik Issuer or Public Company Governance	171-327
Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The governance of the Issuer or Public Company shall at least contain a brief description of:	178-193
1. RUPS, paling sedikit memuat: GMS, at least contains:	178-193



KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
a. Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: Information regarding the resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year prior to the fiscal year include:	178-193
1) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year realized in the fiscal year; and	178-193
2) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year that have not been realized and the reasons for not realizing them;	178-193
a) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; in the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed;	178-193
2. Direksi, paling sedikit memuat: The Board of Directors, at least contains:	208-226
a. tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. duties and responsibilities of each member of the Board of Directors; Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in tabular form.	210-220
b. pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi; statement that the Board of Directors has guidelines or charter for the Board of Directors;	208
c. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS;	220-221
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: training and/or competency development of members of the Board of Directors:	221-222
a) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan policies for training and/or improving the competence of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and	221-222
b) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any);	221-222
e. penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: the Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the Board of Directors' duties for the fiscal year shall at least contain:	226
f. prosedur penilaian kinerja; dan performance appraisal procedures; and	226
g. kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan the criteria used are performance achievements during the fiscal year, are competence and attendance at meetings; and	226
h. dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. in the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.	226
3. Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The Board of Commissioners, at least contains:	195-207
a. tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; duties and responsibilities of the Board of Commissioners;	197
b. pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris; a statement that the Board of Commissioners has guidelines or charter for the Board of Commissioners;	195
c. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings including attendance at the GMS;	198-199
d. Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the level of attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in tabular form.	199
e. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners:	202

KETERANGAN DESCRIPTION		HALAMAN PAGE
1) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan policy on competency training and/or development of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and		202
2) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); competency training and/or development attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any);		202
f. penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least containing:		224-225; 205-206
1) prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; procedures for implementing performance appraisals;		205, 223
2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings; and		205, 223
3) pihak yang melakukan penilaian; dan party conducting the assessment; and		205, 223
g. penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the fiscal year includes:		206-207
1) prosedur penilaian kinerja; dan performance appraisal procedures; and		206-207
2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; the criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings;		205
3) Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain:		227-233
a) prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan nomination procedure, including a brief description of the policies and process for nomination of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and		227-229
b) prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others:		230-233
1) prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners;		230-233
2) struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan the remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and		230-233
3) besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. the amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners; Disclosure of information can be presented in tabular form.		230-233
4) Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: The sharia supervisory board, for Issuers or Public Companies that carry out business activities based on sharia principles as stated in the articles of association, shall at least contain:		N/A*
a) nama; name;		
b) dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; legal basis for the appointment of the sharia supervisory board;		
c) periode penugasan dewan pengawas syariah; period of assignment of the sharia supervisory board;		
d) tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan duties and responsibilities of the sharia supervisory board; and		
e) frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik; frequency and method of providing advice and suggestions as well as supervising the fulfillment of sharia principles in the capital market to Issuers or Public Companies;		
5) Komite audit, paling sedikit memuat: The audit committee, at least contains:		234-242
a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;		234-242
b) usia; age;		234-242

*N/A: Tidak ada penjelasan, dikarenakan tidak relevan dengan MRT | No explanation, as it is not relevant to MRT



KETERANGAN DESCRIPTION		HALAMAN PAGE
c)	kewarganegaraan; nationality;	234-242
d)	riwayat pendidikan; educational history;	234-242
e)	riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	234-242
	1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;	234-242
	2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of the committee as well as other positions (if any); and	234-242
	3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	234-242
f)	periode dan masa jabatan anggota komite audit; period and term of office of the audit committee members;	234-242
g)	pernyataan independensi komite audit; statement of independence of the audit committee;	234-242
h)	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);	234-242
i)	kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan policies and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members in those meetings; and	234-242
j)	pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit; the implementation of the audit committee's activities for the fiscal year in accordance with the guidelines or charter of the audit committee;	234-242
6)	komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: the nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at least containing:	250-259
a)	nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	250-259
b)	usia; age;	250-259
c)	kewarganegaraan; nationality;	250-259
d)	riwayat pendidikan; educational history;	250-259
e)	riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	250-259
	1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;	250-259
	2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	250-259
	3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	250-259
f)	periode dan masa jabatan anggota komite; period and term of office of the committee members;	250-259
g)	pernyataan independensi komite; statement of committee independence;	250-259
h)	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);	250-259
i)	uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	250-259
j)	pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); a statement that it has a guideline or charter;	250-259
k)	kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; policies and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting;	250-259
l)	uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan brief description of the implementation of activities in the fiscal year; and	250-259

KETERANGAN DESCRIPTION		HALAMAN PAGE
m) dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: m) in the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:		√
1. alasan tidak dibentuknya komite; dan reasons for not forming the committee; and		250-259
2. pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi; the party carrying out the nomination and remuneration function;		250-259
7) komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: other committees owned by Issuers or Public Companies in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, at least containing:		260-266
a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;		250-259
b) usia; age;		250-259
c) kewarganegaraan; nationality;		250-259
d) riwayat pendidikan; educational history;		250-259
e) riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:		250-259
1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;		250-259
2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and		250-259
3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;		250-259
f) periode dan masa jabatan anggota komite; period and term of office of the committee members;		250-259
g) pernyataan independensi komite; statement of committee independence;		250-259
h) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any); and		250-259
i) uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;		250-259
j) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite; a statement that the committee has had guidelines or charters;		250-259
k) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members at the meeting; and		250-259
l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; a brief description of the committee's activities for the fiscal year;		250-259
8) Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat: Corporate secretary, at least contains:		267-272
a) nama; name;		267-272
b) domisili; domicile;		267-272
c) riwayat jabatan, meliputi: position history, including:		267-272
1) dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan legal basis for appointment as company secretary; and		267-272
2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;		267-272
d) riwayat pendidikan; educational history;		267-272
e) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan training and/or competency improvement followed during the fiscal year; and		267-272



KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
f) uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku; a brief description of the implementation of the duties of the corporate secretary for the fiscal year;	267-272
9) Unit audit internal, paling sedikit memuat: Internal audit unit, at least contains:	272-277
a) nama kepala unit audit internal; name of the head of the internal audit unit;	272-277
b) riwayat jabatan, meliputi: position history, including:	272-277
1) dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan legal basis for the appointment as head of the internal audit unit; and	272-277
2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	272-277
c) kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); qualification or certification as an internal audit profession (if any);	272-277
d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; training and/or competency improvement to be followed during the fiscal year;	272-277
e) struktur dan kedudukan unit audit internal; structure and position of the internal audit unit;	272-277
f) uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	272-277
g) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; dan a statement that the internal audit unit has had guidelines or charters; and	272-277
h) uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit; a brief description of the implementation of the internal audit unit's duties for the fiscal year including the policy and implementation of the frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or audit committee;	272-277
10) uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the internal control system implemented by the Issuer or Public Company, at least containing:	280-284
a) pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations;	280-284
b) tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan review of the effectiveness of the internal control system; and	280-284
c) pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;	280-284
11) sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: the risk management system implemented by the Issuer or Public Company, at least contains:	285-300
a) gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; general description of the risk management system of the Issuer or Public Company;	285-300
b) jenis risiko dan cara pengelolaannya; types of risks and how to manage them;	285-300
c) tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan review of the effectiveness of the Issuer's or Public Company's risk management system; and	285-300
d) pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;	300
12) perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: legal cases that have a material impact faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least contain:	301
a) pokok perkara/gugatan; subject matter/claim;	301
b) status penyelesaian perkara/gugatan; dan status of settlement of cases/claims; and	301
c) pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik; effect on the condition of the Issuer or Public Company;	301
13) informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada); information on administrative sanctions/sanctions imposed on Issuers or Public Companies, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities for the fiscal year (if any);	301

KETERANGAN DESCRIPTION		HALAMAN PAGE
14) informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: information regarding the code of ethics of the Issuer or Public Company includes:		302-304
a) pokok-pokok kode etik; main points of the code of ethics;		302
b) bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan form of socialization of the code of ethics and its enforcement efforts; and		303
c) pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; a statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of Issuers or Public Companies;		304
15) uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP); a brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or program employee stock ownership (ESOP);		233
Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: In terms of providing compensation in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed must at least contain:		
a) jumlah saham dan/atau opsi; number of shares and/or options;		N/A*
b) jangka waktu pelaksanaan; implementation period;		
c) persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan requirements for eligible employees and/or management; and		
d) harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan; exercise price or determination of exercise price;		
16) uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: a brief description of the information disclosure policy regarding:		
a) kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company; and		N/A*
b) pelaksanaan atas kebijakan dimaksud; implementation of the policy;		
17) uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the whistleblowing system at the Issuer or Public Company, at least containing:		305-308
a) cara penyampaian laporan pelanggaran; method of submitting a violation report;		306
b) perlindungan bagi pelapor; protection for whistleblowers;		307-308
c) penanganan pengaduan; complaint handling;		308
d) pihak yang mengelola pengaduan; dan party managing the complaint; and		306
e) hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: result of complaint handling, at least:		308
1) jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan number of complaints received and processed in the fiscal year; and		308
2) tindak lanjut pengaduan; follow-up on complaints;		308
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, this matter is disclosed. uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:		√
18) program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan a description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least containing:		309-312

*N/A: Tidak ada penjelasan, dikarenakan tidak relevan dengan MRT | No explanation, as it is not relevant to MRT



KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
a) pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; programs and procedures implemented in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in Issuers or Public Companies; and	312
b) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud. anti-corruption training/socialization to employees of Issuers or Public Companies;	√
19) penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: In the event that the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy are explained.	
a) pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau implementation of the Public Company governance guidelines for Issuers issuing equity securities or Public Companies, including:	N/A*
b) penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada). a statement regarding the recommendations that have been implemented; and/or	
h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik Social and Environmental Responsibility of Issuers or Public Companies	331-347
1. Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: The information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, at least includes:	331-347
a. penjelasan strategi keberlanjutan; explanation of the sustainability strategy;	√
b. ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup); overview of sustainability aspects (economic, social, and environmental);	√
c. profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik; brief profile of the Issuer or Public Company;	√
d. penjelasan Direksi; explanation of the Board of Directors;	√
e. tata kelola keberlanjutan; sustainability governance;	√
f. kinerja keberlanjutan; sustainability performance;	√
g. verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada; written verification from an independent party, if any;	√
h. lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada; dan feedback sheet for readers, if any; and	√
i. tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya; the response of the Issuer or Public Company to the previous year's report feedback;	√
2. Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; The Sustainability Report as referred to in number 1) must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as contained in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;	√
3. informasi Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) pada angka 1) dapat: information on the Sustainability Report in number 1) can:	√
a. diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau disclosed in other relevant sections outside the social and environmental responsibility section, such as the Directors' explanation regarding the Sustainability Report disclosed in the section related to the Directors' Report; and/or	√
b. merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik; refers to other sections outside the social and environmental responsibility section by still referring to the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter, such as the profile of the Issuer or Public Company;	√
4. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan; The Sustainability Report as referred to in number 1) is an inseparable part of the Annual Report but can be presented separately from the Annual Report;	√

*N/A: Tidak ada penjelasan, dikarenakan tidak relevan dengan MRT | No explanation, as it is not relevant to MRT

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
5. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus: In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the Sustainability Report must:	√
a. memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan contains all the information as referred to in number 1); and	√
b. disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;	√
6. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, then the social and environmental responsibility section contains information that information on social and environmental responsibility has been disclosed in the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report; and	√
7. Penyampaian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. Submission of the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report must be submitted together with the Annual Report.	√
i. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Audited Annual Financial Report	350-481
Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek. The annual financial reports contained in the Annual Report are prepared in accordance with financial accounting standards in Indonesia and have been audited by a public accountant registered with the Financial Services Authority. The said annual financial report contains a statement regarding the accountability for financial statements as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the Board of Directors' responsibility for financial reports or the laws and regulations in the capital market sector which regulates the periodic reports of securities companies in the event that the Issuer is a securities company.	352
Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Statement Letters of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibilities for the Annual Report Statements of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding the responsibilities of the Annual Report are prepared in accordance with the format of Statement Letters of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibilities for the Annual Report as contained in the Appendix I which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter.	48-49



Thriving Through Transformation

Menerobos Maju Melalui Transformasi



PT MRT JAKARTA (Perseroda)

Wisma Nusantara Lt. 21
Jln. MH Thamrin 59
Jakarta 10350 - Indonesia

Telp. (+62-21) 390 6454
Faks. (+62-21) 315 5846
(+62-21) 314 2273



<https://jakartamrt.co.id/id>